BUPATI LUWU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2019-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Pusat;

b. bahwa sehubungan dengan adanya Pandemi Covid-19 dan untuk penyesuaian RPJM Nasional serta berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024, maka Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 perlu dilakukan perubahan untuk disesuaikan terhadap kondisi yang ada saat ini serta sesuai kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Pusat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungaa Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provin si Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU

dan

BUPATI LUWU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2019-2024

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2019 Nomor 8), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut;

Pasal 2

(1) RPJMD merupakan penjabaran visi, misi dan program kerja Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan Daerah dan keuangan Daerah serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yakni tahun 2019 sampai dengan tahun 2024.

(2) Kerangka pendanaan adalah untuk menghitung kapasitas riil keuangan Daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah Daerah 5 (lima) tahun kedepan.

(3) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dengan Sistematika sebagai berikut :
   a. Bab I Pendahuluan;
   b. Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah;
   c. Bab III Gambaran Keuangan Daerah;
   d. Bab IV Permasalahan dan Isu Strategis Daerah;
   e. Bab V Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;
   f. Bab VI Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah;
   g. Bab VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah;
   h. Bab VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
   i. Bab IX Penutup.

(4) Isi dan uraian RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

2. Ketentuan Lampiran diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 23 Juni 2021
BUPATI LUWU,

BASMIN MATTAYANG

Diundangkan di Belopa
pada tanggal 23 Juni 2021
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU

SULAIMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2021 NOMOR 3
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU PROVINSI SULAWESI SELATAN : B.HK.03.045.21

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN

LUWU NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2019-2024

I. UMUM

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 merupakan penjabaran visi dan misi Kepala Daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, yang disusun sesuai amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang- Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Visi pembangunan daerah Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 adalah *"Kabupaten Luwu Yang Maju, Sejahtera Dan Mandiri Dalam Nuansa Religi"*.

Visi Kabupaten Luwu ini merupakan kondisi masyarakat yang diamanatkan dalam konstitusi, yaitu kehidupan yang cerdas dan sejahtera. Manusia yang sejahtera adalah manusia yang memiliki tata kehidupan dan penghidupan, dapat memenuhi kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosialnya. Daerah yang maju ditopang oleh kecerdasan manusia, dan kecerdasaran ini akan memberikan kehidupan yang sejahtera. Dengan sumber daya manusia yang berdaya saing dan didukung pengelolaan potensi sumber daya alam yang maksimal, maka akan terwujud daerah yang mandiri. Selanjutnya kemajuan, kesejahteraan, kemandirian, akan meneguhkan kehidupan masyarakat yang religius.

Berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa RPJMD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Disamping itu, Pasal 342 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dinyatakan bahwa perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila : (a) hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri ini; (b) Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini; dan (c) terjadi perubahan mendasar antara lain terjadinya bencana alam, goncangan

politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka materi untuk menyusun perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 mencakup:

1. Penyesuaian terhadap substansi kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Penyesuaian terhadap nomenklatur program, indikator dan target yang tertuang dalam RPJMD dengan memperhatikan capaian kinerja, kondisi, potensi dan amanat regulasi.

Saat ini telah diberlakukan berbagai regulasi yang berpengaruh dan menuntut penyesuaian dalam penyelenggaraan tata pemerintahan dan pembangunan daerah, antara lain Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023.

Atas dasar pertimbangan tersebut, maka RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 perlu diubah dengan Peraturan Daerah dan selanjutnya dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD). Pelaksanaan Perubahan RPJMD dijabarkan lebih lanjut ke dalam RKPD sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Kabupaten Luwu yang memuat Program Prioritas dan kegiatan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU NOMOR 3

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU PROVINSI SULAWESI SELATAN : B.HK.03.045.21

DAFTAR ISI

SAMPUL
DAFTAR ISI i
DAFTAR TABEL v
DAFTAR GAMBAR xii
DAFTAR GRAFIK xiii

BAB I PENDAHULUAN ..... I- 1
1.1. Latar Belakang ..... I- 1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan Perubahan RPJMD ..... I- 5
1.3. Hubungan Antar Dokumen I-10
1.4. Maksud dan Tujuan I-15
1.5. Sistematika Penulisan I-16

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH ..... II- 1
2.1. Aspek Geografi dan Demografi ..... II- 1
2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah ..... II- 1
2.1.2. Topografi ..... II- 3
2.1.3. Geologi ..... II- 4
2.1.4. Hidrologi ..... II- 6
2.1.5. Klimatologi ..... II- 6
2.1.6. Penggunaan Lahan ..... II- 7
2.1.7. Potensi Pengembangan Wilayah ..... II- 8
2.1.8. Wilayah Rawan Bencana II-11
2.1.9. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan sesuai Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) II-13
2.1.10. Demografi II-23
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat II-28
2.2.1. Pertumbuhan PDRB II-28
2.2.2. Laju Inflasi II-35
2.2.3. PDRB per kapita II-36
2.2.4. Rasio Gini II-37
2.2.5. Penduduk Diatas Garis Kemiskinan II-39
2.2.6. Indeks Pembangunan Manusia II-41
2.2.7. Angka Harapan Lama Sekolah II-42
2.2.8 Angka Rata-rata Lama Sekolah II-43
2.2.9 Usia Harapan Hidup II-44
2.2.10 Balita Gizi Buruk II-47
2.2.11 Balita Gizi Kurang II-46
2.2.12 Desa Siaga Aktif II-46
2.2.13 Partisipasi Angkatan Kerja II-47
2.2.14 Pengangguran Terbuka II-48
2.2.15 Penduduk yang Bekerja II-50
2.2.16 Pertumbuhan PDRB per Tenaga Kerja II-51
2.2.17 Kesempatan Kerja Penduduk Usia Usia 15 Tahun ke atas II-52
2.2.18 Tenaga Kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga II-53

2.2.19 Keluarga Pra Sejahtera Dan Keluarga Sejahtera I II-54
2.2.20 Indeks Kepuasan Masyarakat..... II-56
2.2.21 Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Pendapatan Daerah..... II-56
2.2.22 Opini BPK..... II-58
2.2.23 Skor Pola Pangan Harapan (PPH) II-58
2.2.24 Penguatan Cadangan Pangan..... II-59
2.2.25 Penanganan Daerah Rawan Pangan II-60
2.2.26 Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB. II-62
2.2.27 Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB II-63
2.2.28 Produksi Sektor Pertanian II-64
2.2.29 Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB II-65
2.2.30 Produksi sektor Perkebunan..... II-66
2.2.31 Kontribusi Produksi Kelompok Petani terhadap PDRB II-67
2.2.32 Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB II-68
2.2.33 Kontribusi Sektor pertambangan terhadap PDRB..... II-68
2.2.34 Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap PDRB II-69
2.2.35. Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB II-70
2.2.36. Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB..... II-71
2.2.37. Pertumbuhan Industri II-72
2.3. Aspek Pelayanan Umum..... II-72
2.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib Dasar II-73
2.3.2. Fokus Layanan Urusan Wajib Non Dasar..... II-119
2.3.3. Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Pilihan..... II-153
2.3.4. Fokus Penunjang Urusan II-162
2.4. Aspek Daya Saing Daerah..... II-168
2.4.1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita (Angka Konsumsi RT per Kapita) II-168
2.4.2. Persentase Desa Swasembada terhadap Total Desa.... II-169
2.4.3. Angka Kriminalitas yang Tertangani II-169
2.4.4. Rasio Ketergantungan..... II-170
2.5. Standar Pelayanan Minimal II-171
2.5.1. Bidang Urusan Pendidikan II-171
2.5.2. Bidang Urusan Kesehatan..... II-172
2.5.3. Bidang Urusan Pekerjaan Umum II-172
2.5.4. Bidang Urusan Perumahan Rakyat II-173
2.5.5. Bidang Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum II-173
2.5.6. Bidang Urusan Sosial II-174
2.6. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / *Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs)..... II-175
2.7.Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kabupaten Luwu Tahun 2015 -2019 ..... II-184

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH ..... III- 1

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu ..... III- 2
3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD ..... III- 2

3.1.2. Neraca Daerah ..... III- 29
3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu ..... III- 33
3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran..... III- 37
3.2.2. Analisis Pembiayaan ..... III- 40
3.3. Kerangka Pendanaan ..... III- 45
3.3.1. Asumsi Ekonomi, Sosial dan Fiskal ..... III- 46
3.3.2. Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah ..... III- 48
3.3.3. Perhitungan Kerangka Pendanaan..... III- 55
3.4. Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pendapatan Kabupaten Luwu Tahun 2020 ..... III- 59

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH .....IV- 1

4.1. Permasalahan Pembangunan Daerah .....IV- 1
4.1.1. Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.....IV- 2
4.1.2. Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan IV- 19
4.2. Isu Strategis .....IV- 30
4.2.1. Isu Strategis Global .....IV- 30
4.2.2. Isu Strategis Nasional.....IV- 34
4.2.3. Isu Strategis Provinsi Sulawesi Selatan.....IV- 36
4.2.4. Penelaahan RPJPD Kabupaten Luwu 2005-2025 .....IV- 40
4.2.5. Penelaahan RPJMD Kabupaten/Kota Sekitar.....IV- 41
4.2.6. Penelaahan Terhadap RTRW Kabupaten Luwu .....IV- 46
4.2.7. Isu Strategis Kabupaten Luwu..... IV- 47
4.3. Permasalahan dan Isu Strategis Kajian TPB Berdasarkan KLHS IV-55

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN..... V- 1

5.1. Visi..... V- 1
5.2. Misi ..... V- 2
5.3. Tujuan dan Sasaran..... V- 9
5.4. Keterkaitan RPJMD Kabupaten Luwu terhadap Dokumen Perencanaan Lainnya (RPJPD Luwu Tahun 2005-2025, PRJMD Sulsel Tahun 2018-2023, RPJMN Tahun 2020-2024)..... V-22
5.4.1. Keterkaitan Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 dengan RPJPD Kabupaten Luwu Tahun 2005-2025 ..... V-22
5.4.2. Keterkaitan Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 dengan Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018- 2023 ..... V-28
5.4.3. Keterkaitan Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 dengan RPJMN Tahun 2020-2024 ..... V-32

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH.....VI- 1

6.1. Strategi .....VI- 1
6.2. Arah Kebijakan.....VI-14
6.3. Program Pembangunan Daerah VI-24

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH .....VII- 1

7.1. Kerangka Pendanaan Pembangunan .....VII- 1
7.2. Program Perangkat Daerah .....VII- 5

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.....VIII- 1

8.1. Penetapan Indikator Kinerja Makro .....VIII- 1
8.2. Penetapan Indikator Kinerja Utama.....VIII- 2
8.3. Indikator Kinerja Kunci (IKK) .....VIII- 3
8.4. Indikator Standar Pelayanan Minimal.....VIII-29
8.5. Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Suistainable Development Goals* (TPB/SDGs).....VIII-33

BAB IX PENUTUP .....IX- 1

9.1. Pedoman Transisi.....IX- 1
9.2. Kaidah Pelaksanaan.....IX- 1

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Keterkaitan Visi dan Misi antara RPJMN Tahun 2020-2024 dengan Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 ..... I-13
Tabel 1.2. Keterkaitan Visi dan Misi antara Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 dengan Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 ..... I-14
Tabel 2.1. Luas Kecamatan dan Jumlah Desa/Kelurahan Kabupaten Luwu ..... II- 2
Tabel 2.2. Topografi Kabupaten Luwu Ditinjau dari Ketinggiannya ..... II- 4
Tabel 2.3. Skema Hubungan antara Kelas Kemampuan Lahan dengan Intensitas dan Macam Penggunaan Lahan II-14
Tabel 2.4. Kelas Kemampuan Lahan di Kabupaten Luwu II-16
Tabel 2.5. Kelas Kemampuan Lahan per Kecamatan di Kabupaten Luwu II-16
Tabel 2.6. Status Ketersediaan dan Kebutuhan Penyediaan Air Bersih di Kabupaten Luwu II-18
Tabel 2.7. Proyeksi Daya Dukung Air Bersih Kabupaten Luwu II-22
Tabel 2.8. Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Luwu Tahun 2019 ..... II-24
Tabel 2.9. Kepadatan Penduduk Kabupaten Luwu Menurut Kecamatan Tahun 2019 ..... II-24
Tabel 2.10. Jumlah Penduduk Kabupaten Luwu Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2019 ..... II-25
Tabel 2.11. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama yang dianut Menurut Kecamatan Tahun 2019 ..... II-27
Tabel 2.12. PDRB Kabupaten Luwu Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2015-2019 ..... II-30
Tabel 2.13. Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2015-2019 Atas Dasar Harga Berlaku di Kabupaten Luwu II-31
Tabel 2.14. Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2015-2019 ... II-34
Tabel 2.15. Perkembangan PDRB Kabupaten Luwu Tahun 2015-2019 ..... II-36
Tabel 2.16. Komponen IPM Kabupaten Luwu Tahun 2015-2019 ..... II-41
Tabel 2.17. Angka Harapan Hidup Kabupaten Luwu II-45
Tabel 2.18. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tahun 2015-2019 ..... II-47
Tabel 2.19. Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2015-2019 ..... II-48
Tabel 2.20. Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin Tahun 2019 ..... II-49
Tabel 2.21. Rasio Penduduk Yang Bekerja Tahun 2015-2019 ..... II-51
Tabel 2.22. PDRB per Tenaga Kerja Tahun 2015-2019 ..... II-51
Tabel 2.23. Rasio Kesempatan Kerja Terhadap Penduduk Usia 15 Tahun ke atas Tahun 2015-2019 ..... II-52
Tabel 2.24. Proporsi Penduduk 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Terhadap Total Kesempatan Kerja Tahun 2015-2019 ..... II- 53
Tabel 2.25. Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I Tahun 2015-2019 ..... II- 55

Tabel 2.26. Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah ..... II- 57
Tabel 2.27. Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kabupaten Luwu Tahun 2015-2019 ..... II- 59
Tabel 2.28. Penguatan Cadangan Pangan Tahun 2015-2019 ..... II- 60
Tabel 2.29. Penanganan Daerah Rawan Pangan Tahun 2015-2019 ..... II- 61
Tabel 2.30. Produksi Pertanian Pangan dan Palawija Tahun 2015-2019 ..... II- 64
Tabel 2.31. Produksi Tanaman Perkebunan Tahun 2015-2019 ..... II- 66
Tabel 2.32. Data dan Informasi Penyelenggaraan Bidang Urusan Pendidikan Tahun 2015-2019 ..... II- 73
Tabel 2.33. Data dan Informasi Penyelenggaraan Bidang Urusan Kesehatan Tahun 2015-2019 ..... II- 85
Tabel 2.34. Jumlah Tenaga Kesehatan / Medis Menurut Jenis, Tahun 2019 ..... II-105
Tabel 2.35. Data dan Informasi Penyelenggaraan Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2015-2019 ..... II-106
Tabel 2.36. Data dan Informasi Penyelenggaraan Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2015-2019 ..... II-111
Tabel 2.37. Data dan Informasi Penyelengaraan Bidang Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tahun 2015-2019 ..... II-114
Tabel 2.38. Data dan Informasi Penyelenggaraan Bidang Urusan Sosial Tahun 2015-2019 ..... II-116
Tabel 2.39. Data dan Informasi Penyelenggaraan Bidang Urusan Tenaga Kerja Tahun 2015-2019 ..... II-120
Tabel 2.40. Data dan Informasi Penyelenggaraan Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2015-2019 ..... II-121
Tabel 2.41. Data dan Informasi Penyelenggaraan Bidang Urusan Pangan Tahun 2015-2019 ..... II-126
Tabel 2.42. Data dan Informasi Penyelenggaraan Bidang Urusan Pertanahan Tahun 2015-2019 ..... II-127
Tabel 2.43. Data dan Informasi Penyelenggaraan Bidang Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2015-2019 ..... II-129
Tabel 2.44. Data dan Informasi Penyelenggaraan Bidang Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2015-2019 ..... II-131
Tabel 2.45. Data dan Informasi Penyelenggaraan Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2015-2019 ..... II-133
Tabel 2.46. Data dan Informasi Penyelenggaraan Bidang Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2015-2019 ..... II-134
Tabel 2.47. Data dan Informasi Penyelenggaraan Bidang Urusan Perhubungan Tahun 2015-2019 ..... II-141
Tabel 2.48. Data dan Informasi Penyelenggaraan Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2015-2019 ..... II-144

Tabel 2.49. Data dan Informasi Penyelenggaraan Bidang Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Tahun 2015-2019 ..... II-145
Tabel 2.50. Data dan Informasi Penyelenggaraan Bidang Urusan Penanaman Modal Tahun 2015-2019 ..... II-146
Tabel 2.51. Data dan Informasi Penyelenggaraan Bidang Urusan Pemuda dan Olah Raga Tahun 2015-2019 ..... II-147
Tabel 2.52. Data dan Informasi Penyelenggaraan Bidang Urusan Kebudayaan Tahun 2015-2019 ..... II-149
Tabel 2.53. Data dan Informasi Penyelenggaraan Bidang Urusan Statistik Tahun 2015-2019 ..... II-150
Tabel 2.54. Data dan Informasi Penyelenggaraan Bidang Urusan Persandian Tahun 2015-2019 ..... II-151
Tabel 2.55. Data dan Infromasi Penyelenggaraan Bidang Urusan Perpusta-kaan Tahun 2015-2019 ..... II-151
Tabel 2.56. Data dan Informasi Penyelenggaraan Bidang Urusan Kearsipan Tahun 2015-2019 ..... II-153
Tabel 2.57. Data dan Informasi Penyelenggaraan Bidang Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019 ..... II-154
Tabel 2.58. Kunjungan Wisatawan Tahun 2015-2019 ..... II-156
Tabel 2.59. PAD Sekor Pariwisata Tahun 2015-2019 ..... II-156
Tabel 2.60. Jumlah Objek Wisata di Kabupaten Luwu Tahun 2015-2019 ..... II-157
Tabel 2.61. Produksi Padi Kabupaten Luwu Tahun 2015-2019 ..... II-159
Tabel 2.62. Cakupan Bina Kelompok Petani Tahun 2015-2019 ..... II-160
Tabel 2.63. Pertumbuhan Industri di Kabupaten Luwu Tahun 2015-2019 ..... II-161
Tabel 2.64. Data dan Informasi Penyelenggaraan Bidang Urusan Transmigrasi Tahun 2015-2019 ..... II-161
Tabel 2.65. Data dan Informasi Penyelenggaraan Penunjang Urusan Bidang Perencanaan Pembangunan II-162
Tabel 2.66. Data dan Informasi Penyelenggaraan Penunjang Urusan Bidang Keuangan II-162
Tabel 2.67. Data dan Informasi Penyelenggaraan Penunjang Urusan Bidang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2015-2019 ..... II-163
Tabel 2.68. Data dan Informasi Penyelenggaraan Penunjang Urusan Bidang Pengawasan Tahun 2015-2019 ..... II-165
Tabel 2.69. Data dan Informasi Penyelenggaraan Penunjang Urusan Bidang Sekretariat DPRD II-166
Tabel 2.70. Data dan Informasi Penyelenggaraan Penunjang Urusan Bidang Sekretariat Daerah II-166
Tabel 2.71. Angka Kriminalitas, Tahun 2015-2019 ..... II-170
Tabel 2.72. Rasio Ketergantungan, Tahun 2015-2019 ..... II-171
Tabel 2.73. Target dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Pendidikan II-171
Tabel 2.74. Target dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Kesehatan II-172

Tabel 2.75. Target dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum II-173
Tabel 2.76. Target dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat II-173
Tabel 2.77. Target dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Kententraman dan Ketertiban Umum II-174
Tabel 2.78. Target dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial II-174
Tabel 2.79. Capaian dan Target TPB/SDGs Tahun 2015-2019 ..... II-176
Tabel 2.80. Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Luwu Tahun 2015-2019 ..... II-185

Tabel 3.1. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2016-2020 ..... III- 4
Tabel 3.2. Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2016-2020 ..... III-8
Tabel 3.3. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2016-2020 ..... III- 12
Tabel 3.4. Realisasi PAD dari Pajak Daerah Tahun 2016-2020 ..... III- 15
Tabel 3.5. Realisasi PAD dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2016-2020 ..... III- 18
Tabel 3.6. Realisasi PAD dari Lain-Lain PAD yang Sah ..... III- 18
Tabel 3.7. Realisasi Dana Perimbangan Kabupaten Luwu Tahun 2016-2020 ... III- 20
Tabel 3.8. Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah 2016-2020 ..... III- 22
Tabel 3.9. Struktur Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2016-2020 ..... III- 23
Tabel 3.10. Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2016-2020 ..... III- 26
Tabel 3.11. Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2016-2020 ..... III- 27
Tabel 3.12. Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Tahun 2017-2019 ..... III- 30
Tabel 3.13. Analisis Rasio Solvabilitas Kabupaten Luwu ..... III- 33
Tabel 3.14. Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Tahun 2016-2020 ..... III- 38
Tabel 3.15. Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Luwu Tahun 2016-2018 ..... III- 39
Tabel 3.16. Analisis terhadap Realisasi Pengeluaran Wajib dan Mengikat Tahun 2016-2020 ..... III- 39
Tabel 3.17. Penutup Defisit Riil Anggaran Tahun 2016-2020 ..... III- 41
Tabel 3.18. Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Tahun 2016-2020 ..... III-42
Tabel 3.19. Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2019-2020 ..... III- 44
Tabel 3.20. Sisa Lebih (Riil) Pembiyaan Anggaran Tahun Berkenaan Tahun 2016-2019 ..... III-45
Tabel 3.21. Asumsi Indikator Makro Ekonomi dan Sosial Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 ..... III-46
Tabel 3.22. Asumsi Pokok-pokok Kebijakan Fiskal Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024 ..... III-48

Tabel 4.1. Identifikasi Permasalahan dan Akar Masalah "Belum optimlanya tata kelola dan tata laksan Pemerintahan Daerah .....IV- 5
Tabel 4.2. Identifikasi Permasalahan dan Akar Masalah "Akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan yang berkualitas Belum Merata" IV- 7
Tabel 4.3. Identifikasi Permasalahan dan Akar Masalah "Kualitas dan ketersediaan infrastruktur Masih Rendah" .....IV- 9
Tabel 4.4. Identifikasi Permasalahan dan Akar Masalah "Masih rendahnya pendapatan Masyarakat".....IV-11
Tabel 4.5. Identifikasi Permasalahan dan Akar Masalah "Produktivitas dan nilai tambah produk pertanian belum maksimal".....IV-12
Tabel 4.6. Identifikasi Permasalahan dan akar Masalah "Masih tingginya angka kemiskinan di perdesaan" IV-14
Tabel 4.7. Identifikasi Permasalahan dan Akar Masalah "Rendahnya Nilai Investasi".....IV-15
Tabel 4.8. Identifikasi Permasalahan dan Akar Masalah "Belum optimalnya partisipasi publik dalam Pembangunan" IV-17
Tabel 4.9. Identifikasi Permasalahan dan Akar Masalah "Menurunnya kualitas lingkungan Hidup" IV-18
Tabel 4.10. identifikasi Permasalahan dan Akar Masalah "Risiko yang ditimbulkan akibat bencana masih tinggi" IV-19
Tabel 4.11. Perbandingan Substansi Utama RPJMD Kabupaten Wajo (2018-2023), Kota Palopo (2018-2023) dan Kabupaten Luwu Utara (2016-2021).....IV-42
Tabel 4.12. Prioritas Penanganan Jalan di Kabupaten Luwu IV-49
Tabel 4.13. Identifikasi Isu Strategis Daerah IV-54
Tabel 4.14. Jumlah Indikator TPB yang Sudah Dilaksanakan Dalam Setiap Tujuan IV-55
Tabel 4.15. Capaian Indikator TPB Kabupaten Luwu IV-56
Tabel 4.16. Jumlah Indikator yang Sudah Dilaksanakan pada Setiap Tujuan TPB IV-56
Tabel 4.17. Isu dan Sasaran Strategis Pembangunan Berkelanjutan.....IV-60
Tabel 5.1. Keterkaitan Antara Misi dengan Pokok Visi ..... V- 8
Tabel 5.2. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 ..... V-17
Tabel 5.3. Keterkaitan Sasaran Perubahan RPJMD dengan Sasaran Strategis Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2024..... V-19
Tabel 5.4. Hubungan Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Luwu Tahun 2005-2025 dengan Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 ..... V-27

Tabel 5.5. Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 dengan Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 ..... V-31
Tabel 5.6. Keterkaitan Sasaran RPJMN Tahun 2020-2024 dengan Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 ..... V-32
Tabel 5.7. Keterkaitan Sasaran RPJMN Tahun 2020-2024 dengan Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 ..... V-35
Tabel 6.1. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 .....VI- 2
Tabel 6.2. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Luwu Tahun 2020-2021 .....VI-15
Tabel 6.3. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Luwu Tahun 2022-2024 .....VI-19
Tabel 6.4. Rencana Proyek Prioritas Strategis Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2022-2024 .....VI-25
Tabel 6.5. Program Pembangunan Daerah dan Pagu Indikatif RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 .....VI-27
Tabel 7.1. Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2021-2024 .....VII- 2
Tabel 7.2. Hasil Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Luwu Untuk Tahun 2020 .....VII- 4
Tabel 7.3. Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Luwu Tahun 2021-2024 .....VII-32
Tabel 7.4. Keterkaitan Sasaran RPJMD dan Sasaran Strategis Perangkat Daerah VII-51
Tabel 7.5. Keterkaitan Prioritas, Sasaran dan Program Pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah Dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 .....VII-55
Tabel 8.1. Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 .....VIII- 1
Tabel 8.2. Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 .....VIII- 2
Tabel 8.3. Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 .....VIII- 5
Tabel 8.4. Penetapan Indikator Kinerja Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 .....VIII-30
Tabel 8.5. Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Suistainable Development Goals* (TPB/SDGs) VIII-34

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan I-11
Gambar 1.2. Bagan Alur Keterkaitan Perencanaan dan Penganggaran Daerah . I-15
Gambar 2.1. Peta Letak dan Batas Kecamatan di Kabupaten Luwu ..... II- 3
Intensitas dan Macam Penggunaan Lahan II-14
Gambar 2.2. Peta Kelas Kemampuan Lahan Kabupaten Luwu Tahun 2019 ..... II-17
Gambar 2.3. Peta Kajian Daya Dukung Penyajian Air Bersih di Kabupaten Luwu II-20
Gambar 2.4. Peta Kajian Daya Dukung Penyediaan Pangan di Kabupaten Luwu II-23
Gambar 4.1. Mata Rantai Permasalahan Utama Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu .....IV- 3
Gambar 5.1. Keterkaitan Antar Elemen Pokok Visi ..... V- 2
Gambar 5.2. Keselarasan Visi RPJPD Kabupaten Luwu Tahun 2005-2025 dengan Visi Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 ..... V-24
Gambar 5.3. Keselarasan Misi RPJPD Kabupaten Luwu Tahun 2005-2025 dengan Misi Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 ..... V-25
Gambar 5.4. Keselarasan Visi Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 dengan Visi Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 ..... V-29
Gambar 5.5. Keselarasan Misi Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 dengan Misi Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 ..... V-29
Gambar 6.2. Tema Pembangunan Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024 .....VI-14

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1. Jenis Tanah di Kabupaten Luwu II-5
Grafik 2.2. Piramida Penduduk Kabupaten Luwu Tahun 2019 ..... II-27
Grafik 2.3. Perbandingan Pertumbuhan PDRB Kabupaten Luwu dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan PDB Nasional Tahun 2016-2020 ..... II-35
Grafik 2.4. Perbandingan PDRB Per Kapita Kabupaten Luwu dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan PDB Nasional Tahun 2016-2020 ..... II-37
Grafik 2.5. Perkembangan Gini Ratio II-38
Grafik 2.6. Perbandingan Gini Ratio Kabupaten Luwu dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2015-2019 ..... II-39
Grafik 2.7. Garis Kemiskinan Kabupaten Luwu dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019 ..... II-40
Grafik 2.8. Perbandingan IPM Kabupaten Luwu dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, Tahun 2015-2019 ..... II-42
Grafik 2.9. Harapan Lama Sekolah Kabupaten Luwu Tahun 2015-2019 ..... II-43
Grafik 2.10. Perbandingan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Luwu dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, Tahun 2015-2019 ..... II-44
Grafik 2.11. Perkembangan Balita Gizi Buruk Tahun 2015-2019 ..... II-45
Grafik 2.12. Persentase Balita Gizi Kurang Tahun 2014-2018 ..... II-46
Grafik 2.13. Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Luwu Dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2016-2020 ..... II-49
Grafik 2.14. Pertumbuhan PAD terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2015-2019 ..... II-58
Grafik 2.15. Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan terhadap PDRB Tahun 2015-2019 ..... II-63
Grafik 2.16. Kontribusi Sektor Pertanian (palawija) terhadap PDRB Pertanian/Perkebunan Tahun 2015-2019 ..... II-64
Grafik 2.17. Kontribusi Sektor Perkebunan Terhadap PDRB Pertanian/ Perkebunan Tahun 2015-2019 ..... II-65
Grafik 2.18. Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB Tahun 2015-2019 ..... II-68
Grafik 2.19. Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB Tahun 2015-2019 ..... II-69
Grafik 2.20. Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap PDRB Tahun 2015-2019 ..... II-70
Grafik 2.21. Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB Tahun 2015-2019 ..... II-71
Grafik 2.22. Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB Tahun 2015-2019 ..... II-72
Grafik 2.23. Perkembangan APS PAUD Tahun 2015-2019 ..... II-78
Grafik 2.24. Perkembangan APS Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2015-2019 ..... II-79

Grafik 2.25. Perkembangan Angka Melanjutkan Pendidikan Tahun 2015-2019 .. II-81
Grafik 2.26. Perkembangan Ruang Kelas SD/MI Dalam Kondisi Baik Tahun 2015-2019 ..... II-82
Grafik 2.27. Perkembangan Rasio Guru terhadap Murid Tahun 2015-2019 ..... II-83
Grafik 2.28. Perkembangan Jalan Dalam Kondisi Baik Tahun 2015-2019 ..... II-109
Grafik 2.29. Perbandingan IPG dan IDG Kabupaten Luwu dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2015-2019 ..... II-125
Grafik 2.30. Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2015-2019 ..... II-138
Grafik 2.31. Perkembangan Akseptor KB Tahun 2015-2019 ..... II-139
Grafik 2.32. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga perKapita Tahun 2015-2019 ..... II-168
Grafik 3.1. Grafik Proporsi Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2016-2020 ..... III- 11
Grafik 3.2. Perkembangan Komponen PAD Kabupaten Luwu Tahun 2016-2020 ..... III- 13
Grafik 3.3. Proporsi Komponen PAD terhadap PAD Tahun 2016-2020 ..... III- 14
Grafik 3.4. Postur Pajak Daerah ..... III- 16
Grafik 3.5. Perkembangan Pajak Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2017-2020 ..... III- 17
Grafik 3.6. Proporsi Komponen Dana Perimbangan Tahun 2016-2020 ..... III- 20
Grafik 3.7. Perkembangan Komponen Dana Perimbangan Tahun 2017-2020 ..... III- 17
Grafik 3.8. Perbandingan Belanja Langsung dan Tidak Langsung Tahun 2016-2020 ..... III- 23
Grafik 3.9. Realisasi Komponen Pembiayaan Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2017-2020 ..... III- 28
Grafik 4.1. Jumlah Indikator yang Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target Nasional pada Setiap Pilar Tahun 2019 ..... IV- 57
Grafik 4.2. Jumlah Indikator yang Sudah Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional pada Setiap Pilar Tahun 2019 ..... IV- 58
Grafik 4.3. Jumlah Indikator yang Belum Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional pada Setiap Pilar Tahun 2019 ..... IV- 59
Grafik 4.4. Jumlah Indikator dengan Data Belum Tersedia pada Setiap Pilar Tahun 2019 ..... IV- 59

Lampiran: Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu (RPJMD) Tahun 2019-2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah secara konseptual dirancang untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang diamanatkan dalam konstitusi. Pasal 260 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

RPJMD merupakan *strategic planning* pemerintahan daerah, mengingat di dalamnya tergambar keputusan mengenai program prioritas, indikator kinerja *outcome*, pagu indikatif, dan organisasi penanggungjawab. Proses pembuatan kebijakan merupakan aktivitas intelektual yang divisualisasikan sebagai serangkaian tahapan yang secara sekuen saling terintegrasi menurut urutan waktu mencakup:

- *Perumusan masalah*, merupakan tahapan untuk mencurahkan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan yang mempersoalkan berbagai asumsi dalam mendefinisikan masalah. Pada tahap ini diharapkan menghasilkan asumsi-asumsi yang tersembunyi, hasil diagnosis faktor-faktor penyebab, memetakan tujuan, menyatukan pandangan-pandangan yang berbeda, sehingga melahirkan peluang untuk merancang kebijakan baru.
- *Peramalan*, tahap ini dilakukan pada formulasi kebijakan dengan cara mencurahkan pengetahuan yang relevan untuk mengestimasi dampak yang terjadi dimasa datang, sebagai akibat dari diambilnya atau tidak dilakukannya suatu kebijakan dalam pencapaian tujuan, termasuk mengenali kendala dan dukungan politik.
- *Rekomendasi*, menghasilkan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang biaya dan manfaat dari berbagai alternatif yang akibatnya dimasa datang telah diestimasi melalui peramalan yang dilakukan pada tahap adopsi kebijakan. Rekomendasi bermanfaat membantu mengestimasi tingkat resiko dari ketidakpastian, identifikasi eksternalitas, dan akibat ganda, menentukan kriteria dalam membuat alternatif pilihan dan menentukan pertanggungjawaban administratif implementasi kebijakan.

- *Pemantauan (monitoring)*, menyediakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang akibat dari kebijakan yang diambil sebelumnya. Monitoring dilakukan selama proses implementasi kebijakan yang dilakukan secara teratur menggunakan berbagai indikator yang ditetapkan untuk menilai tingkat keberhasilan pencapaian kinerja, tingkat kepatuhan, menemukan faktor penyebab dan akibat yang tidak diinginkan, mengantisipasi hambatan implementasi, menentukan pihak-pihak yang bertanggungjawab pada setiap tahapan kegiatan.
- *Evaluasi*, membuahkan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang perbedaan antara kinerja yang diharapkan dengan yang dihasilkan, sehingga membantu pengambilan kebijakan pada tahap penilaian terhadap proses pembuatan kebijakan. Evaluasi tidak hanya menghasilkan kesimpulan, tetapi mencakup informasi seberapa banyak masalah yang dihadapi dapat diselesaikan, diklarifikasi dan kritisi terhadap nilai-nilai yang mendasari kebijakan.

Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa RPJMD harus memuat kondisi saat ini dan meramalkan kondisi yang akan datang. Dengan demikian RPJMD dapat dilakukan perubahan berdasarkan keadaan tertentu. Sehubungan dengan itu, Pasal 342 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 menyatakan bahwa perubahan RPJPD dan RPJMD dapat dilakukan apabila:

a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri ini;

b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini; dan

c. terjadi perubahan yang mendasar, yaitu terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

Dampak dari merebaknya *Coronavirus Disease 2019* (*Covid-19*) sejak bulan Desember tahun 2019 dan di Indonesia sejak bulan Maret tahun 2020 dan telah ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sebagai pandemi, memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap kehidupan masyarakat, termasuk di Kabupaten Luwu. Dampak pandemi ini tidak hanya mempengaruhi aspek kesehatan, tetapi juga aspek lainnya seperti perekonomian, sosial maupun keuangan daerah. Sehingga, target pembangunan dan kerangka pendanaan yang ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2019-2024 mengalami degradasi.

Selanjutnya, setelah RPJMD Kabupaten Luwu yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019, terdapat perubahan kebijakan nasional di bidang perencanaan dan penganggaran maupun kebijakan lain yang mempengaruhi penyelenggaraan pemerintahan daerah, antara lain:

1. Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang

membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan yang memberikan arah terhadap penanganan dampak pandemi.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Keuangan Daerah sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 yang merupakan pedoman dalam perumusan kerangka pengelolaan keuangan daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 yang harus disinergikan dengan rencana pembangunan daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia yang mengatur tentang tata kelola Data yang dihasilkan oleh pemerintah daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang harus dipedomani dalam perumusan program pembangunan daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang harus diaplikasikan dalam perencanaan dan penganggaran daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018-2023 yang harus dipedomani oleh pemerintah daerah di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.

Selain karena adanya pandemi covid 19 dan perubahan peraturan perundangan, perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 juga didasari capaian kinerja ekonomi makro pada pelaksanaan RPJMD di tahun 2020. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Luwu pada tahun 2020 hanya sebesar 1,30 persen (BPS, 2021), sangat jauh dari apa yang ditargetkan pada RPJMD Pokok yaitu sebesar 7,30 persen. Pertumbuhan yang rendah tersebut diakibatkan dari penyebaran COVID-19 yang memberikan dampak yang sangat besar terhadap sektor transportasi dan pergudangan, industri pengolahan, dan jasa perusahaan.

Selanjutnya inflasi Kabupaten Luwu pada tahun 2020 sebesar 1,47 persen, capaian tersebut masih berada dibawah yang ditargetkan pada RPJMD untuk tahun 2020 yaitu 3,5-4 persen. Daya beli yang masih terbatas akibat COVID-19 membuat tekanan permintaan diperkirakan lebih rendah dibanding tahun sebelumnya. Meskipun inflasi cenderung terkendali namun pengaruh COVID-19 tetap perlu diwaspadai.

Terkait kondisi ketenagakerjaan, tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Luwu tahun 2020 sebesar 5,36 persen, mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2019 yaitu 4,66 persen, kondisi tersebut tentunya meleset dari apa yang ditargetkan pada RPJMD Pokok untuk tahun 2020 yaitu sebesar

4,36 persen. Meningkatnya tingkat pengangguran merupakan dampak dari pandemi Covid-19 yang menyebabkan dirumahkannya karyawan pada industry pengolahan serta rendahnya daya serap tenaga kerja..

Meskipun terjadi pelambatan ekonomi, angka kemiskinan Kabupaten Luwu pada tahun 2020 turun sebesar 0,13 poin jika dibandingkan dengan tahun 2019, yaitu dari 12,78 persen menjadi 12,65 persen. Penurunan angka kemiskinan pada tahun 2020, dimana kondisi perekonomian global, nasional maupun regional mengalami pelambatan, menunjukkan bahwa penurunan perekonomian tidak terlalu mempengaruhi kehidupan masyarakat yang berada pada golongan rentan miskin serta keberhasilan berbagai kebijakan pemerintah dalam menanggulangai dampak pandemi Covid-19.

Terkait dengan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), berdasarkan hasil evaluasi menunjukkan bahwa dari sejumlah 235 indikator yang menjadi kewenangan Kabupaten, terdapat 191 indikator yang dilaksanakan oleh Kabupaten Luwu . Berdasarkan persentase capaian SDGs pada tahun 2020 pada 17 tujuan, yang sudah dilaksanakan dan mencapai target 62 indikator (32,46%), yang sudah dilaksanakan dan belum mencapai target 69 Indikator (36,13%), yang belum dilaksanakan 9 indikator (4,71%) dan yang tidak ada data 51 indikator (26,70%).

Kondisi sebagaimana dikemukakan di atas menjadi alasan yang cukup untuk dilakukannya perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024. Dengan berpedoman pada Pasal 344 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa tahapan penyusunan RPJMD berlaku mutatis mutandis terhadap tahapan perubahan RPJMD, perubahan RPJMD Kabupaten Luwu dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Persiapan Penyusunan Perubahan RPJMD;
2. Penyusunan Rancangan Awal Perubahan RPJMD;
3. Penyusunan Rancangan Perubahan RPJMD;
4. Pelaksanaan Musrenbang Perubahan RPJMD;
5. Perumusan Rancangan Akhir Perubahan RPJMD; dan
6. Penetapan Perubahan RPJMD.

Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 dilakukan dengan tidak merubah visi dan misi **Dr. Drs. H. Basmin Mattayang, M.Pd.** dan **Syukur Bijak, SE** sebagai Bupati dan Wakil Bupati Luwu masa bakti Tahun 2019-2024. Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 merupakan tahap ke empat dari RPJPD Kabupaten Luwu Tahun 2005-2025 yang menjabarkan beberapa sasaran pembangunan lima tahun tahap ke empat. Dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 selanjutnya akan menjadi pedoman perangkat daerah dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Tahun 2019-2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah dan selanjutnya akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen rencana tahunan yaitu untuk tahun 2022, 2023 dan 2024..

1.2 Dasar Hukum Penyusunan Perubahan RPJMD

Landasan hukum dalam penyusunan PERUBAHAN RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019 -2024 adalah landasan konstitusional dan landasan operasional. Landasan konstitusional berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, sementara landasan operasionalnya didasarkan pada peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 ayat (6);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
15. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan; (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penetapan Dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 219 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6407);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2016 tentang Tata Cata Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
26. Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan yang memberikan arah terhadap penanganan dampak pandemi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485).
27. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
28. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21);
29. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 109 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
30. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapain Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
31. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

32. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Di Daerah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955) sudah diubah dengan permendagri 72 Tahun 2019;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 288);
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

43. Peraturan Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 581);
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
45. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
46. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2020 tentang Menjaga Ketahanan Pangan Nasional pada Saat Tanggap Darurat *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*);
47. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 283);
48. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 249);
49. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 286);
50. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1; Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1);
51. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2011 Nomor 1);
52. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2011 Nomor 6).
53. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu (Berita Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2016 Nomor 111);

54. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 1 Tahun 2019 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah ((Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2019 Nomor 1).

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, RPJMD (termasuk perubahannya) pada dasarnya merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Untuk RPJMD kabupaten/kota, disusun dengan berpedoman pada RPJMN, RPJPD kabupaten dan RTRW kabupaten serta mengacu pada RPJMD provinsi dan memperhatikan RPJMD kabupaten/kota sekitar. RPJMD menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) sesuai dengan tugas dan fungsinya dan juga menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya. Selanjutnya, RKPD menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD). Selanjutnya, Renja-PD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) perangkat daerah, sedangkan KUA-PPAS menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD). Setelah R-APBD dibahas dan disepakati dengan DPRD dan ditetapkan menjadi APBD, oleh perangkat daerah digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) perangkat daerah.

Keterkaitan RPJMD yang ditetapkan dengan peraturan daerah dengan dokumen lainnya dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 1.1.
Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan dalam
Sistem Perencanaan Pembangunan

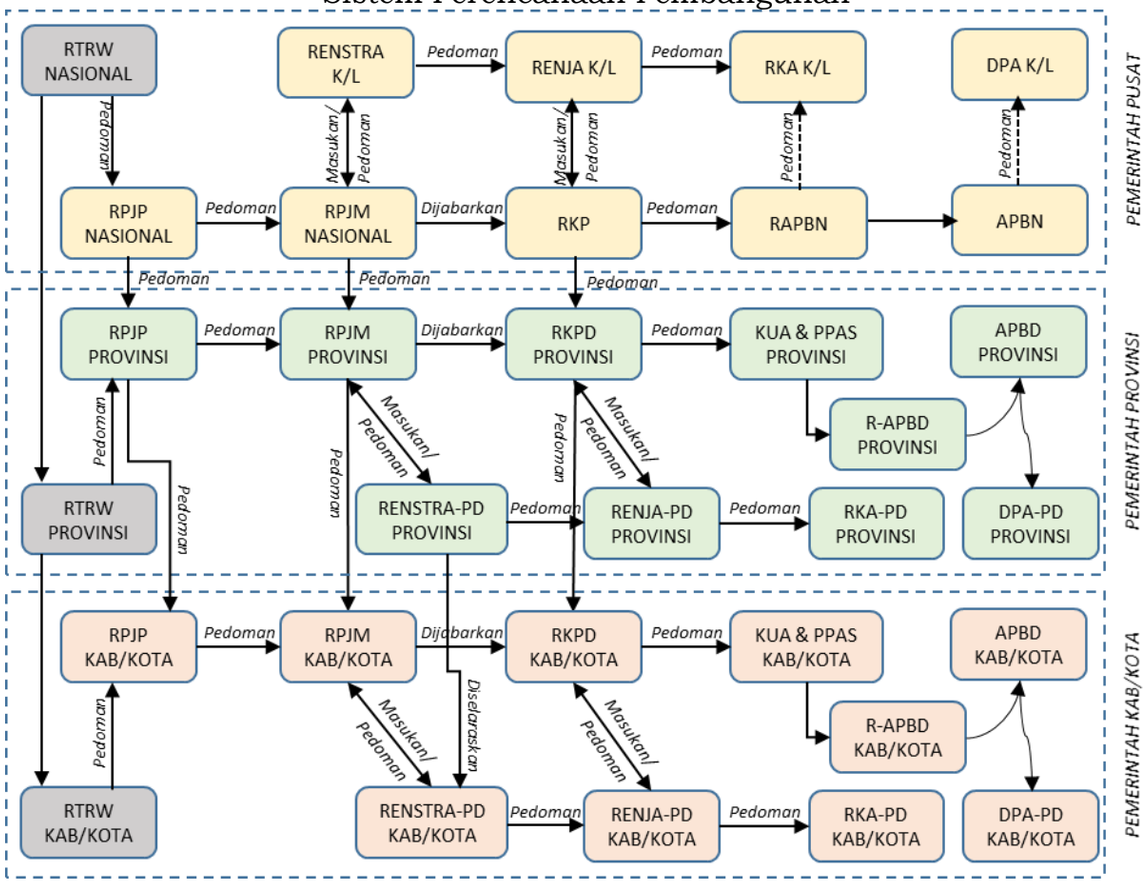

Berdasarkan gambar di atas, dapat dijelaskan secara ringkas hubungan antara RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 dengan dokumen lainnya sebagai berikut:

➢ Perubahan RPJMD dengan RPJPD Kabupaten Luwu

Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 merupakan pelaksanaan rencana pembangunan tahap keempat dari RPJPD Tahun 2005-2025. Oleh sebab itu, penyusunan perubahan RPJMD selain memuat visi, misi, dan program kerja Bupati dan Wakil Bupati periode tahun 2019-2024, juga berpedoman pada visi dan misi Kabupaten Luwu yang ditetapkan dalam RPJPD Kabupaten Luwu Tahun 2005-2025 beserta sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan pada periode yang bersangkutan.

Keadaan ideal yang ingin diwujudkan Kabupaten Luwu pada tahun 2025 yang dituangkan dalam RPJMD adalah kemajuan, kemandirian dan kesejahteraan dalam nuansa religi. Keinginan ini sangat berkonstribusi bagi visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Luwu yang penekanannya pada ketermukaan, kemandirian lokal dan keagamaan. Isu strategis pembangunan daerah Kabupaten Luwu yang tertuang dalam RPJPD Kabupaten Luwu Tahun 2005-2025 khususnya pada tahap keempat periode 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Kemajuan
   Kemajuan ditandai oleh pencapaian bidang kualitas manusia selain nilai indeks pembangunan manusia bidang pendidikan dan kesehatan yang secara kuantitatif tinggi, secara kualitatif juga mencapai taraf unggul dalam daya saingserta mewujudkan tatanan (choices dan voices) yang beradab dan semakin membawa keberkahan bagi kemanusiaan dan kehidupan secara umum.
2. Kemandirian
   Kemandirian ditandai oleh pencapaian dari upaya-upaya pengembangan produk unggul hasil pengelolaan sumberdaya daerah dengan daya saing yang mengandalkan kandungan pengetahuan dalam produk khususnya produk derivasi kakao, rumput laut dan lainnya. Pada tahap ini kemandirian juga diitandai oleh kepemerintahan yang makin baik dengan kemandirian fiskal yang cukup mendukung. Keberdayaan masyarakat, dengan kelembagaan bidang sosial, politik, ekonomi, kebudayaan dan lingkungan yang semakin kuat dan fungsional, juga diupayakan lebih terwujud.
3. Kesejahteraan
   Kesejahteraan ditandai dengan kualitas manusia yang tinggi dan berdaya saing, struktur perekonomian yang didominasi sektor sekunder dan tersier berlandaskan keunggulan kompetitif, dan kondisi sosial-politik yang semakin demokratis serta kebudayaan yang maju. Kesejahteraan ditandai oleh pencapaian dari upaya-upaya untuk meningkatkan pendapatan perkapita yang semakin tinggi dan merata, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, angka kemiskinan yang semakin rendah, transformasi perekonomian yang semakin memposisikan sektor industri, seiring dengan makin besarnya kontribusi produk UKM dan koperasi dalam perekonomian daerah, sebagai indikasi perwujudan kemakmuran sebagaimana menjadi tekanan pada RPJPN.Pada tahap ini, upaya pengelolaan lingkungan juga semakin signifikan dalam adaptasi dan mitigasi dampa perubahan iklim global.
4. Nuansa religi yang semakin melandasi sendi-sendi kehidupan.
   Nuansa religi pada tahap ini ditandai oleh pencapaian dari upaya-upaya untuk mewujudkan kecerdasan spiritual masyarakat dimana ketertiban, keamanan, saling percaya dan kebajikan sosial terjelmakan sebagai landasan kehidupan masyarakat. Pada tahap ini, kebudayaan daerah semakin memanifestkan identitas daerah yang menunjukkan keunikan sekaligus keunggulan di tengah kompleksitas dinamika regional, nasional dan global.

➢ Perubahan RPJMD dengan RTRW Kabupaten Luwu

Penyusunan perubahan RPJMD berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 6 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Luwu Tahun 2011-2031 dengan memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai pola dan struktur tata ruang yang telah ditetapkan, sebagai acuan untuk mengarahkan lokasi kegiatan dalam Renstra-PD dan menyusun program pembangunan yang berkaitan pemanfaatan ruang kawasan.

➢ Perubahan RPJMD dengan Renstra-PD

Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 menjadi pedoman dalam penyusunan perubahan Renstra-PD dalam rentang waktu 5 (lima) tahun. Perubahan Renstra-PD merupakan penjabaran dari perubahan RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap perangkat daerah di bawah koordinasi Badan Perencanaan dan Litbang Daerah Kabupaten Luwu.

➢ Perubahan RPJMD dengan RKPD

Pelaksanaan perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 setiap tahunnya akan dijabarkan ke dalam RKPD termasuk perubahannya, sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Kabupaten Luwu yang memuat prioritas program dan kegiatan. Rancangan RKPD merupakan bahan utama pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah Kabupaten Luwu yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat Desa, Kecamatan, dan Kabupaten.

➢ Perubahan RPJMD dengan RPJMN

Salah satu alasan dilakukannya perubahan RPJMD Kabupaten Luwu tahun 2019-2024 adalah untuk mempedomani RPJMN Tahun 2020-2024. Keterkaitan antara visi dan misi RPJMN yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 dan RPJMD Kabupaten Luwu sebagaimana dimaksud dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.1.
Keterkaitan Visi dan Misi antara RPJMN Tahun 2020-2024
dengan Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024

RPJMN Tahun 2020-2024	**Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024**
VISI **"Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"**	**VISI** **"Kabupaten Luwu Yang Maju, Sejahtera dan Mandiri Dalam Nuansa Religi"**
MISI	**MISI**
1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia	2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pendidikan Dan Kesehatan Yang Terjangkau Bagi Semua Lapisan Masyarakat.
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing	4. Mewujudkan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Melalui Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah Dan Perluasan Lapangan Kerja
	5. Mewujudkan Ketahanan Pangan Dan Perekonomian Daerah Yang Tangguh Berbasis Agribisnis.
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan	3. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas dan Berkelanjutan.
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	8. Menciptakan Iklim Investasi dan Usaha Yang Kondusif Berwawasan Lingkungan.
	10. Mewujudkan Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Serta Penanggulangan Bencana.
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa	6. Meningkatkan Kuaitas Kehidupan Beragama Dalam Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Luwu Yang Religius.
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya	9.

RPJMN Tahun 2020-2024	Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga	Penegakan Supremasi Hukum, Hak Asasi Manusia, Untuk Mendorong Partispasi Publik
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya	1 Mewujudkan Pemerintahan Yang Profesional, Berwibawa, Amanah, Transparan, dan Akuntabel
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan	7 Optimaslisasi Otonomi Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

➢ Perubahan RPJMD dengan Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan

Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 menjadi salah satu alasan dilakukannya perubahan RPJMD Kabupaten Luwu tahun 2019-2024. Keterkaitan antara visi dan misi Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan dan RPJMD Kabupaten Luwu sebagaimana dimaksud dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.2.
Keterkaitan Visi dan Misi antara Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 dengan Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024

Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024	Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024
VISI **"Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter"**	**VISI** **"Kabupaten Luwu Yang Maju, Sejahtera dan Mandiri Dalam Nuansa Religi"**
MISI	**MISI**
1. Mewujudkan pemerintahan yang berorientasi melayani dan inovatif	1 Mewujudkan Pemerintahan Yang Profesional, Berwibawa, Amanah, Transparan, dan Akuntabel
	7. Optimaslisasi Otonomi Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
	9. Penegakan Supremasi Hukum, Hak Asasi Manusia, Untuk Mendorong Partispasi Publik.
2. Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan aksesibel	3. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas dan Berkelanjutan.
3. Mewujudkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang produktif	5. Mewujudkan Ketahanan Pangan Dan Perekonomian Daerah Yang Tangguh Berbasis Agribisnis.
	8. Menciptakan Iklim Investasi dan Usaha Yang Kondusif Berwawasan Lingkungan.
4. Mewujudkan kualitas manusia yang kompetitif, inklusif dan berkarakter	2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pendidikan Dan Kesehatan Yang Terjangkau Bagi Semua Lapisan Masyarakat.
	6. Meningkatkan Kuaitas Kehidupan Beragama Dalam Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Luwu Yang Religius
5. Meningkatkan produktivitas dan daya saing produk sumber daya alam yang berkelanjutan	4. Mewujudkan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Melalui Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah Dan Perluasan Lapangan Kerja
	10. Mewujudkan Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Serta Penanggulangan Bencana.

Rencana pembangunan tidak bermakna apa-apa jika tidak dianggarkan dalam rencana anggaran. Keterkaitan dokumen rencana pembangunan dan anggaran dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 1.2.

Bagan Alur Keterkaitan Perencanaan dan Penganggaran Daerah

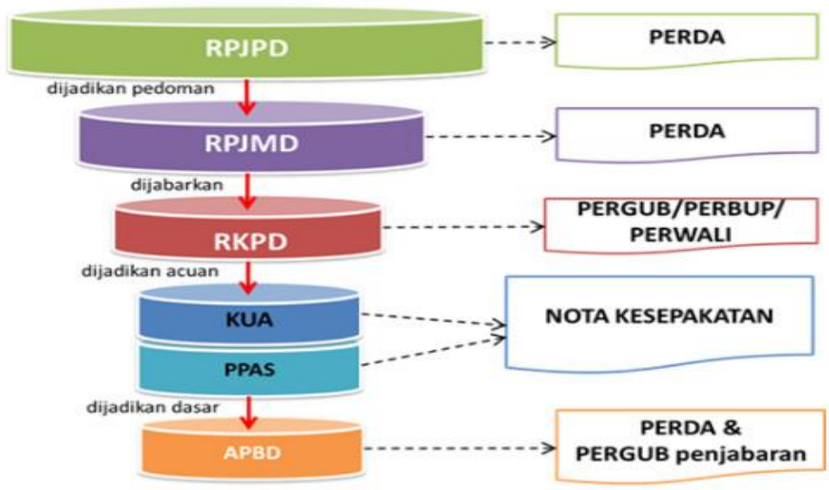

Bagan alur di atas menunjukkan bagaimana dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) yang saling terkait hingga menjadi dasar dalam penyusunan dokumen anggaran. RPJPD yang ditetapkan dengan peraturan daerah, dilaksanakan melalui RPJMD yang juga ditetapkan dengan peraturan daerah, dan selanjutnya RPJMD tersebut dijabarkan melalui RKPD setiap tahun yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. Untuk menjembatani penyusunan APBD yang akan ditetapkan dengan peraturan daerah, maka disepakati terlebih dahulu KUA dan PPAS yang disusun dengan berpedoman pada RKPD. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa RPJMD sebagai dokumen perencanaan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah, sejajar dan saling berhubungan dengan APBD yang juga ditetapkan dengan peraturan daerah. Sehingga, evaluasi R-APBD merupakan kegiatan yang dimaksudkan untuk menguji kesesuaian R-APBD dengan KUA dan PPAS, RKPD dan RPJMD, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014.

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 adalah untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka menerjemahkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Luwu sebagai bentuk respon terhadap janji politik dan aspirasi masyarakat yang diwujudkan melalui penetapan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah serta program pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhan saat ini dan di masa datang. Disamping itu, penyusunan RPJMD juga dimaksudkan sebagai penjabaran dari RPJPD Kabupaten Luwu Tahun 2005-2025 serta untuk memberikan arah bagi pelaksanaan pembangunan daerah yang lebih efektif dan efisien.

Tujuan penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 adalah untuk menyediakan dokumen daerah yang akan dijadikan sebagai:

1. Pedoman bagi perangkat daerah dalam penyusunan Renstra-PD berupa program dan kegiatan yang mendukung pencapaian RPJMD serta

peningkatan kinerja pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan daerah sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah.

2. Instrumen penilaian keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah dibawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati.
3. Instrumen bagi DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kinerja pelaksanaan pemerintah daerah dalam mendukung aspirasi masyarakat serta pencapaian target kinerja program pembangunan daerah.
4. Instrumen dalam menetapkan target kinerja sasaran dan program pembangunan daerah dalam rangka mendukung pencapaian prioritas daerah dan prioritas nasional.
5. Pedoman bagi *stakeholder* dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
6. Dasar bagi Pemerintah Pusat dan Provinsi Sulawesi Selatan dalam pengalokasian anggaran pembangunan di Kabupaten Luwu berdasarkan tujuan dan sasaran pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMN dan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penyajian Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dengan struktur sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Perubahan RPJMD yang berisi latar belakang, dasar hukum penyusunan perubahan RPJMD, hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya, maksud dan tujuan penyusunan perubahan RPJMD serta sistematika penulisan perubahan RPJMD.

BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, aspek daya saing daerah yang dilengkapi dengan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan aspek-aspek tersebut. Gambaran kondisi umum daerah dijabarkan berdasarkan hasil analisis dan kajian pada tahap perumusan berupa informasi yang relevan dan penting yang menjelaskan gambaran umum kondisi daerah yang selaras dan mendukung isu strategis, permasalahan pembangunan daerah, visi/misi kepala daerah, dan kebutuhan perumusan strategi..

BAB III : GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Menyajikan gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah, meliputi: kinerja keuangan, kebijakan pengelolaan keuangan, dan kerangka pendanaan jangka menengah daerah.

BAB IV : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

Menguraikan permasalahan utama pembangunan daerah maupun permasalahan menurut bidang urusan pemerintahan, serta isu-isu strategis daerah yang menjadi dasar utama dalam penjabaran visi dan misi pembangunan jangka menengah, yang menjelaskan butir-butir penting isu-isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan Kabupaten Luwu dalam 5 (lima) tahun mendatang.

BAB V : VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

Menguraikan tentang visi dan misi Bupati/Wakil Bupati Luwu Tahun 2019-2024, serta perumusan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai kepala dan wakil kepala daerah Kabupaten Luwu hingga akhir periode RPJMD ini.

BAB VI : STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Menguraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih. Selain itu diberikan penjelasan hubungan setiap strategi dengan arah kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Sedangkan program pembangunan daerah dirumuskan dari masing-masing strategi untuk mendapatkan program prioritas. Program pembangunan daerah menggambarkan kepaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih.

BAB VII : KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam RENSTRA Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, target kinerja, pagu indikatif, serta Perangkat Daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan.

BAB VIII : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Memuat indikator kinerja daerah untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

BAB IX : PENUTUP

Bab ini menguraikan pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan dari Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024. Pedoman transisi merupakan penjelasan terhadap penyusunan RKPD sepanjang belum ditetapkannya RPJMD, disusun untuk menjembatani kekosongan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah dengan memasukan program-program yang diarahkan pada pencapaian target kinerja yang belum dicapai

selama periode perencanaan sebelumnya berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.

Adapun kaidah pelaksanaan adalah penjelasan tentang bagaimana Perubahan RPJMD ini dilaksanakan, dikendalikan dan dievaluasi pada setiap tahun anggaran, serta tugas dan tanggung jawab seluruh stakeholder pembangunan daerah dalam mewujudkan tujuan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam Perubahan RPJMD ini.

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Gambaran umum kondisi daerah penting dikemukakan sebagai landasan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan.Gambaran umum kondisi daerah menjelaskan mengenai kondisi geografi dan demografi serta aspek–aspek pembangunan daerah, yaitu kesejahteraan masyarakat, daya saing dan pelayanan umum**.**

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

Pemahan tentang kondisi dan potensi sumberdaya alam serta kependudukan suatu daerah dapat dicermati dari aspek geografi dan demografi. Uraian kondisi geografi diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah dan wilayah rawan bencana.

2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Kabupaten Luwu adalah salah satu Kabupaten di Sulawesi Selatan yang ber Ibukota di Belopa dan diresmikan sejak 13 Februari 2006. Kabupaten Luwu memiliki wilayah geografis yang unik karena wilayahnya terbagi dua yang dipisahkan oleh sebuah daerah otonom yakni Kota Palopo, ada pun daerah yang terpisah tersebut adalah wilayah Walenrang dan Lamasi atau yang juga dikenal dengan sebutan WALMAS.

Kabupaten Luwu memiliki potensi pembangunan berupa luas wilayah yang cukup besar, yaitu kurang lebih 3.000,25 km^2, merupakan kabupaten terbesar keempat di Sulawesi Selatan, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kabupaten Luwu Utara dan Kota Palopo
Sebelah Timur : Teluk Bone
Sebelah Selatan : Kabupaten Wajo dan Kabupaten Sidenreng Rappang
Sebelah Barat : Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten Enrekang

Secara administrasi, sejak tahun 2017 Kabupaten Luwu terdiri dari 22 kecamatan yang dibagi habis menjadi 207 Desa dan 20 Kelurahan. Kecamatan Latimojong adalah Kecamatan terluas yaitu mencapai sekitar 467,75 km^2 atau 15,59% dari luas Kabupaten Luwu, menyusul kemudian Kecamatan Walenrang Utara dan Walenrang Barat dengan luas masing-masing sekitar 259,77 km^2 atau 8,66% dan 247,13 km^2 atau 8,24%. Sedangkan Kecamatan yang memiliki luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Belopa Utara yaitu kurang lebih 34,73 km^2 atau hanya sekitar 1,16%. Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan dan Luas masing-masing Kecamatan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1.
Luas Kecamatan dan Jumlah Desa/Kelurahan
Kabupaten Luwu Tahun 2020

No	Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Desa	Kelurahan	Luas Wilayah (Km²)	%
1	Larompong	Larompong	12	1	225,25	7,51
2	Larompong Selatan	Bonepute	9	1	131,00	4,37
3	Suli	Suli	12	1	81,75	2,72
4	Suli Barat	Lindajang	7	1	153,50	5,12
5	Belopa	Tampumia Radda	5	4	59,26	1,98
6	Kamanre	Cilallang	7	1	52,44	1,75
7	Belopa Utara	Pammanu	6	2	34,73	1,16
8	Bajo	Bajo	11	1	68,52	2,28
9	Bajo Barat	Bonelemo	9	-	66,30	2,21
10	Bassesangtempe	Lissaga	12	-	178,12	5,94
11	Latimojong	Kadundung	12	-	467,75	15,59
12	Bassesangtempe Utara	Pantilang	12	-	122,88	4,10
13	Bupon	Noling	9	1	182,67	6,09
14	Ponrang	Padangsappa	8	2	107,09	3,57
15	Ponrang Selatan	Pattedong	12	1	99,98	3,33
16	Bua	Bua	14	1	204,01	6,80
17	Walenrang	Batusitanduk	8	1	94,60	3,15
18	Walenrang Timur	Tabah	8	-	63,65	2,12
19	Lamasi	Lamasi	9	1	42,20	1,41
20	Walenrang Utara	Bosso	10	1	259,77	8,66
21	Walenrang Barat	Ilan Batu	6	-	247,13	8,24
22	Lamasi Timur	To'lemo	9	-	57,65	1,92
JUMLAH			**207**	**20**	**3.000,25**	**100**

Sumber: BPS Kabupaten Luwu, Tahun 2021.

Secara geografis Kabupaten Luwu berada pada antara 2°3'45" - 3°37'30" LS dan 119°15" - 121°43'11" BB. Kabupaten Luwu dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959. Pada Tahun 1999 wilayah Kabupaten Luwu mengalami perubahan dengan pembentukan Kabupaten Luwu Utara berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 1999. Selanjutnya, wilayah Kabupaten Luwu berubah Kembali dengan terbentuknya Kota Palopo berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2002. Wilayah Kabupaten Luwu menempati bagian Utara dan Timur Provinsi Sulawesi Selatan, jarak dari ibu kota Provinsi yakni Makassar sekitar 300 km.

Letak Kabupaten Luwu sangat strategis karena wilayahnya berbatasan dengan lima Kabupaten dan satu Teluk, memiliki garis pantai sepanjang 139,92 km, dengan luas wilayah pegunungan 63,99% serta wilayah dataran dan pesisir seluas 36,01%. Disamping itu, Kabupaten Luwu dilintasi oleh Trans Sulawesi yang menghubungkan Sulawesi Selatan dengan Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah, didukung pula dengan adanya pengembangan pelabuhan Taddatta, Ulo-Ulo, dan Balambang, serta keberadaan Bandara Bua yang terus dikembangkan kapasitasnya dari tahun ketahun.

Gambar 2.1.
Peta Letak dan Batas Kecamatan di Kabupaten Luwu

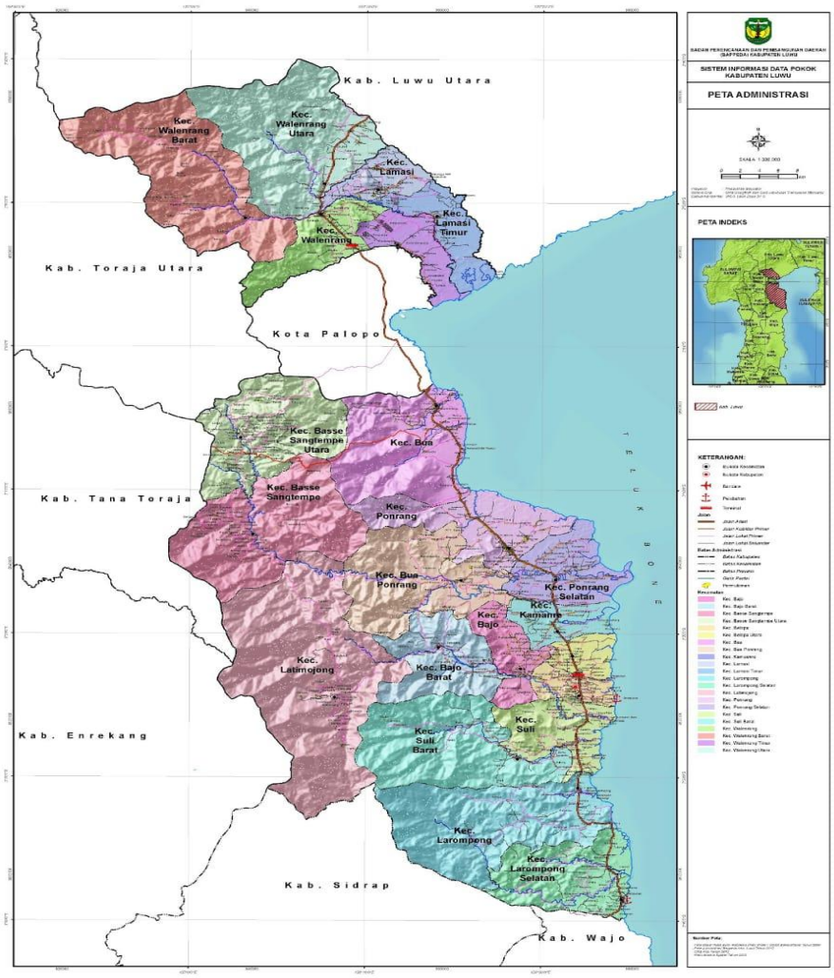

Sumber: Badan Perencanaan dan Litbang Daerah Kabupaten Luwu, Tahun 2020.

2.1.2. Topografi

Kondisi topografis Kabupaten Luwu terdiri dari wilayah dengan ketinggian 0-25 meter (dpl) sebesar 19,42%, ketinggian 25-100 meter (dpl) sebesar 16,58%,ketinggian 100-500 m (dpl) sebesar 22,03%, ketinggian 500-1000 m(dpl) sebesar 18,34%, dan wilayah yang berada pada ketinggian diatas 1000 meter (dpl) adalah sebesar 23,62%. Kondisi kemiringan tanah mempunyai pengaruh sangat besar dalam pemanfaatan lahan. Berdasarkan tingkat kemiringan tanah dan lahan, wilayah Kabupaten Luwu dapat dikelompokkan kedalam 5 kelompok kemiringan, yaitu 0-8% sebesar 42.094,88 Ha, 8-15% sebesar 29.696,28 Ha,15-25% sebesar 8245,50 Ha, 25-40% sebesar 22.297,60 Ha, dan 40% sebesar 197.690,77 Ha.

Topografi wilayah Kabupaten Luwu selengkapnya sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 2.2.
Topografi Kabupaten Luwu Ditinjau Dari Ketinggiannya Tahun 2019

No	Kecamatan	Ketinggian Wilayah (Ha)				
		0-25 m (dpl)	25-100 m (dpl)	100-500 m (dpl)	500-1000 m (dpl)	1000 m (dpl)
1	Larompong	1.807,54	3.944,92	9.479,15	3.728,15	3.563,43
2	Larompong Selatan	2.776,64	4.760,38	4.636,21	926,09	-
3	Suli	4.080,06	3.057,23	1.034,03	-	-
4	Suli Barat	121,38	3.338,78	3.806,05	3.939,32	4.143,98
5	Belopa	4.716,05	1.207,83	-	-	-
6	Kamanre	4.975,49	265,37	-	-	-
7	Belopa Utara	3.471,66	-	-	-	-
8	Bajo	1.896,63	2.311,73	2.642,47	-	-
9	Bajo Barat	316,83	-	2.268,42	2.468,06	234,15
10	Bassesangtempe	-	-	9.523,52	-	8.289,18
11	Latimojong	-	-	6.524,25	8.964,08	31.285,45
12	Bassesangtempe Utara	-	-	-	12.285,84	-
13	Bupon	1.969,25	5.306,79	7.440,40	3.547,47	-
14	Ponrang	5.864,46	1.716,70	1.348,64	1.779,23	-
15	Ponrang Selatan	9.996,12	-	-	-	-
16	Bua	6.105,67	4.274,99	4.445,76	5.573,21	-
17	Walenrang	-	4.310,23	1.943,32	2.144,70	1.060,15
18	Walenrang Timur	4.086,96	2.277,59	-	-	-
19	Lamasi	913,66	3.017,60	287,80	-	-
20	Walenrang Utara	-	8.012,55	10.300,64	6.701,78	960,23
21	Walerang Barat	-	-	322,93	3.125,62	21.261,67
22	Lamasi Timur	5.162,26	600,61	-	-	-

Sumber: Kabupaten Luwu Dalam Angka 2019, Badan Pusat Statistik 2020.

2.1.3. Geologi

Struktur dan karakteristik geologi wilayah Kabupaten Luwu banyak dipengaruhi oleh pegunungan Latimojong dan Teluk Bone, jenis tanah yang terdapat yakni tanah Aluvial dengan luasan 40.246,11 ha, tanah Latusol dengan luasan 30.989,34, tanah Mediteran dengan luasan 41.937,38, tanah Gromisol dengan luasan 114.967,97 ha, dan tanah Podlosik dengan luasan 66.526,79 ha. Selain tanah juga terdapat pasir, batu kali/pasir kerikil/pasir timbunan, sirtu, kalsit, dan batu gunung/batu kali. Untuk jenis galian terdapat potensi tambang emas di Kecamatan Latimojong, Walenrang Utara, Batu Gamping di Kecamatan Latimojong, Walenrang, Lamasi, Granodiorit di Kecamatan Bajo, Rijang (Chert) di Kecamatan Latimojong, Kuarsa di Kecamatan Walenrang, Batu Sabak di Kecamatan Latimojong, Bajo Barat, Andesit di Kecamatan Bajo, Basalt di Kecamatan Latimojong, Bajo, Gabro di Kecamatan Latimojong, Diorit di Kecamatan Latimojong, Monzonit di Kecamatan Latimojong, Larompong, Besi di Kecamatan Bajo di Kecamatan Larompong Suli, Lempung di Kecamatan Bajo.

Grafik 2.1.
Jenis Tanah di Kabupaten Luwu

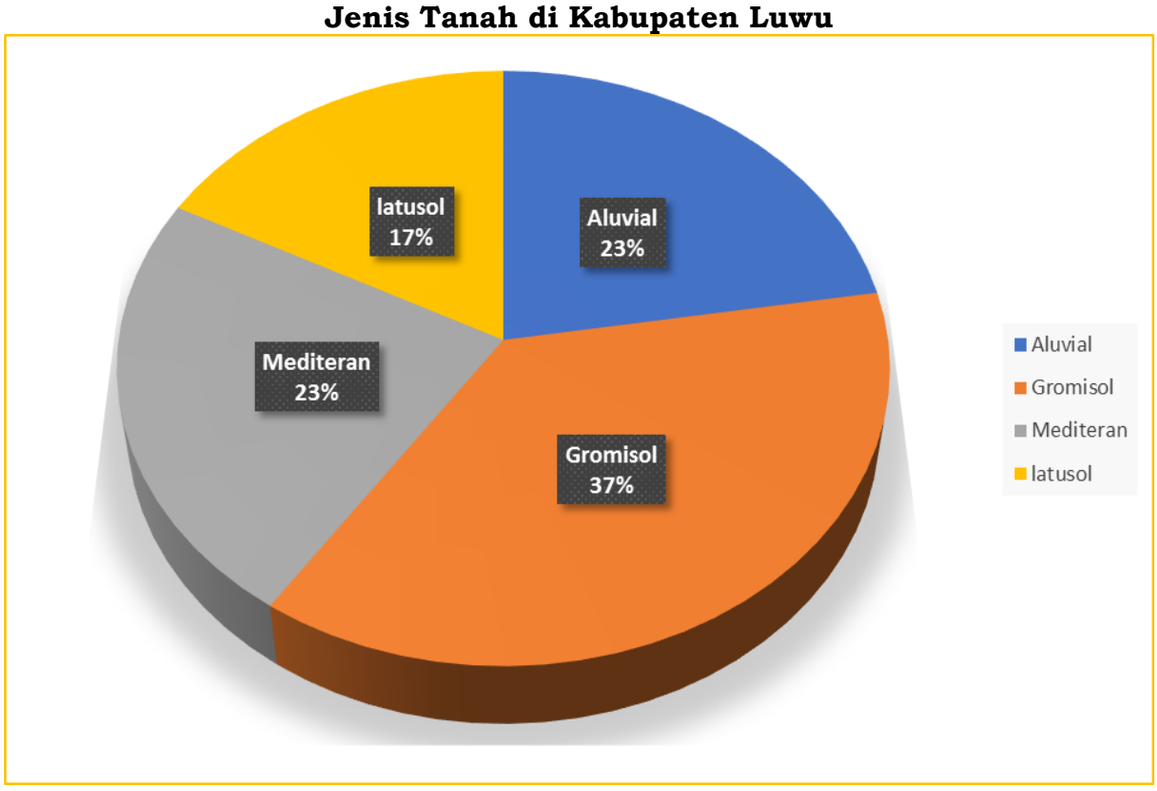

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2021.

Kabupaten Luwu mempunyai 2 (dua) potensi sumber daya logam dan sumber daya non logam, yaitu GALENA dengan potensi cadangan diperkirakan 1.800.000 ton terdapat di Kecamatan Suli Barat dan Walenrang Barat, BESI dengan potensi cadangan belum diketahui persis, terdapat di Kecamatan Bajo Barat dan Walenrang, Hematit dengan potensi cadangan diperkirakan mencapai jutaan ton terdapat di Kecamatan Suli Barat dan Kecamatan Bajo Barat, TEMBAGA yang terdapat di Kecamatan Walenrang Barat dan Kecamatan Latimojong, BESIMANGANIS dengan potensi masih bersifat indikasi dan masih perlu dilokalisir, terdapat di Kecamatan Suli, dan EMAS yaitu:

- Potensi cadangan sebesar 1.45-18.84 g/Ton (hasil analisa laboratorium) terdapat di Kecamatan Latimojong.
- Potensi cadangan sebesar 35-37 ppb terdapat di Kecamatan Walenrang Timur.
- Potensi cadangan sebesar 13 ppm terdapat di Kecamatan Walenrang Barat.
- Potensi cadangan sebesar 122.08-29.08 ppm terdapat di Kecamatan Suli Barat.

Selama lima tahun terakhir, pengelolaan bahan-bahan galian tersebut belumlah optimal. Jika dikelola dengan baik tentu dapat menunjang pelaksanaan pembangunan untuk mempercepat pencapaian tujuan pembangunan.

2.1.4. Hidrologi

Potensi sumber daya air yang dimiliki oleh Kabupaten Luwu tergolong baik dimana terdapat 11 sungai yang cukup besar dan panjang, yang mengalir dari arah barat kearah timur atau ke wilayah Teluk Bone. Kesebelas sungai tersebut masing-masing adalah Sungai Lamasi yang melintasi Kecamatan Walenrang Barat, Walenrang dan Kecamatan Lamasi, Sungai Makawa melintasi Kecamatan Lamasi Timur, Sungai Bua melintasi Kecamatan Bua, Sungai Pareman melintasi Kecamatan Bupon, Ponrang, Ponrang Selatan dan Kecamatan Kamanre, Sungai Bajo melintasi Kecamatan Bajo Barat, Bajo dan Kecamatan Belopa, Sungai Suli melintasi Kecamatan Suli Barat dan Kecamatan Suli, Sungai Larompong melintasi Kecamatan Larompong, Sungai Tembo'e melintasi Kecamatan Larompong Selatan, Sungai Rantebelu melintasi Kecamatan Larompong, Sungai Sampano melintasi Kecamatan Larompong Selatan, Sungai Kandoa (Balambang) melintasi Kecamatan Bua. Dari 11 sungai tersebut yang terpanjang adalah Sungai Pareman (Noling) dengan panjang tercatat sekitar 73 km. Sepuluh sungai lainnya panjangnya tercatat sekitar 12 - 69 km. Dengan potensi sungai tersebut di atas sangat bermanfaat untuk digunakan sebagai sumber air baku, pengairan persawahan, perkebunan, pembangkit listrik tenaga air (PLTA) dan sarana transportasi.

2.1.5. Klimatologi

Curah hujan di suatu tempat antara lain dipengaruhi oleh keadaan iklim, dan perputaran/pertemuan arus udara. Oleh karena itu jumlah curah hujan beragam menurut bulan dan letak stasiun pengamat. Secara umum Kabupaten Luwu beriklim tropis basah dan terbagi atas 2 musim yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Intensitas curah hujan termasuk sedang. Curah hujan berkisar antara 2000 mm - 4000 mm pertahun. Suhu udara rata-rata berkisar antara 30,6°C - 31,6°C pada musim kemarau dan antara 25°C - 28°C pada musim penghujan. Untuk wilayah bagian utara (WAL-MAS) musim hujan jatuh pada bulan Oktober sampai bulan Maret, sedangkan wilayah bagian selatan (dari Kecamatan Bua sampai Kecamatan Larompong Selatan) musim hujan jatuh pada bulan April sampai dengan bulan September. Dalam beberapa tahun terakhir ini, keadaan musim di Kabupaten Luwu kadang tidak menentu. Pada bulan-bulan yang seharusnya turun hujan dalam kenyataannya tidak ada hujan sama sekali, atau sebaliknya pada bulan-bulan yang seharusnya kemarau justru terjadi hujan dengan musim yang jauh lebih panjang, rata-rata curah hujan selama tahun 2019 berkisar 154,92 mm per bulan.

Suhu udara pada suatu tempat di daerah tropik antara lain ditentukan oleh ketinggian tempat terhadap permukaan laut. Secara umum Kabupaten Luwu beriklim tropik dengan temperature udara pada tahun 2019 berkisar dari 21,84°C sampai dengan 34,06°C. Pada Daerah pegunungan yakni Kecamatan Latimojong, Bassesangtempe, Bassesangtempe Utara, Walenrang Barat pada umumnya suhu lebih rendah yakni berkisar 21,84°C sampai dengan 30°C sehingga di daerah tersebut berpotensi untuk dijadikan kawasan sentra hortikultura dan dapat dikembangkan sebagai daerah agrowisata.

Kecepatan angin di Kabupaten Luwu berkisar antara 3 sampai 23 knot. Kecepatan angin terkadang tinggi pada musim peralihan dengan arah angin barat yang mempengaruhi masyarakat pesisir dengan pekerjaan nelayan yang batal melaut dan masyarakat pegunungan yang memiliki pertanian perkebunan pada daerah dataran tinggi dimana sering terjadinya tanaman produksi yang tumbang khususnya tanaman cengkeh serta masyarakat dataran yang memiliki persawahan yang terkadang tanaman padi mereka rebah sehinnga kwalitas dan kwantitas hasil produksinya menurun.

2.1.6. Penggunan Lahan

Proporsi penggunaan lahan utama di Kabupaten Luwu Tahun 2015 tidak berubah dibandingkan tahun sebelumnya. Dari seluruh luas lahan yang ada di Kabupaten Luwu 52,01% digunakan untuk usaha pertanian, yaitu untuk tegal/ kebun/ ladang/ huma, tambak, kolam/tebat/empang, sawah, lahan untuk tanaman kayu-kayuan, perkebunan negara dan swasta. Sedangkan sisanya digunakan untuk pekarangan/lahan untuk bangunan dan halaman sekitarnya, padang rumput serta lahan yang sementara tidak digunakan. Pada tahun 2015 luas lahan yang digunakan untuk usaha pertanian di Kabupaten Luwu mencapai 300.025 Ha, sedangkan luas lahan yang tidak diusahakan untuk pertanian sebesar 31.048,10 Ha. Dari 300.025 Ha lahan pertanian tersebut, 38.429 Ha diantaranya merupakan lahan sawah, dan selebihnya merupakan lahan bukan sawah atau 230.547 Ha.

Pada wilayah pesisir terdapat terumbu karang dengan kedalaman antara 10-15 meter, namun arealnya sedikit berkurang akibat terjadinya perubahan iklim. Untuk itu kegiatan mitigasi mulai dilakukan dengan transplansi karang di beberapa wilayah pesisir Teluk Bone. Penggunaan lahan pada wilayah ini adalah untuk areal budidaya rumput laut. Kemudian pada wilayah peralihan terdapat ekosistem mangrove yang merupakan peralihan atau gabungan antara ekosistem darat dan laut dimana terdapat habitat berbagai jenis burung, primata, reptil dan berbagai jenis habitat lainnya. Kegiatan masyarakat pada wilayah tersebut adalah budidaya tambak dengan luas areal pada tahun 2012 tercatat sekitar 10.041,40 Ha.

Pada wilayah pegunungan peruntukan penggunaan lahan lebih banyak digunakan sebagai kawasan budidaya kehutanan (KBK) dan kawasan budidaya non kehutanan (KBNK). Dalam KBK terdapat sebagian kecil areal persawahan terasering, dan hamparan tempat memelihara hewan ternak (sapi, kerbau, kambing dll).

2.1.7. Potensi Pengembangan Wilayah

Potensi pengembangan wilayah sebagaimana yang sudah dikaji dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu (RTRW) berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah, dapat diidentifikasi wilayah yang memiliki potensi untuk dikembangkan. Pengembangan kawasan pada beberapa sektor harus sesuai dengan arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten berdasarkan RTRW, hal itu untuk menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang kabupaten, menghindari penggunaan lahan yang

tidak sesuai dengan rencana tata ruang, menjaga keseimbangan dan keserasian peruntukan ruang, sebagai alat pengendali pengembangan kawasan, mencegah dampak pembangunan yang merugikan kepentingan umum.

Pemetaan potensi daerah dalam rangka pengembangan kawasan Kabupaten Luwu dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2011. Adapun potensi pengembangan wilayah yang perlu menjadi perhatian adalah sebagai berikut:

1. Kawasan lindung tersebar di 19 kecamatan dengan luas kurang lebih 85.371,63 Ha diluar kawasan hutan mangrove dan luasan kawasan hutan mangrove kurang lebih 4.372 Ha.
2. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya berupa kawasan resepan air terdapat di Kecamatan Walenrang Utara dan Lamasi Timur dengan luas kurang lebih 1.000 Ha.
3. Kawasan perlindungan setempat, kawasan sempadan pantai; dan kawasan sempadan sungai. Kawasan sempadan pantai terdapat di Kecamatan Larompong, Larompong Selatan, Suli, Belopa, Belopa Utara, Kamanre, Ponrang Selatan, Ponrang, Bua, Walenrang Timur dan Lamasi Timur dengan Panjang Kurang Lebih 116,161 Kilometer dengan ketentuan daratan sepanjang tepian laut minimal 100 meter dari titik pasang air laut tertinggi kearah darat. Kawasan sempadan sungai terdapat di sungai Noling, Bajo, Suli, Larompong, Tembo'e, Bua, Lamasi dan Makawa. Dikawasan permukiman berupa sempadan sungai yang diperkirakan cukup untuk dibangun jalan inspeksi antara 10-15 meter.
4. Kawasan cagar budaya terdiri atas kawasan cagar budaya Lapandoso terdapat di Kecamatan Bua; kawasan cagar budaya Meriam Kuno terdapat di Kecamatan Suli; kawasan cagar budaya Ayam Puang Ritede, cagar budaya Bubun Lamu; cagar budaya Benteng Tajojok, cagar budaya Awa'tondong, cagar budaya Pantilang; cagar budaya Loko Maindo terdapat di Kecamatan Bastem; kawasan cagar budaya Bukit Kamanre terdapat di Kecamatan Kamanre; kawasan cagar budaya Kuburan Tua Noling terdapat di Kecamatan Bupon; kawasan cagar budaya Kaili terdapat di Kecamatan Suli Barat; dan kawasan cagar budaya Patung Batu Pemburu terdapat di Kecamatan Walenrang Barat.
5. Kawasan budi daya terdiri atas kawasan hutan produksi; kawasan peruntukan pertanian; kawasan peruntukan perikanan; kawasan peruntukan pertambangan; kawasan peruntukan industri; kawasan peruntukan pariwisata; kawasan peruntukan permukiman; dan kawasan peruntukan lainnya.
6. Kawasan peruntukan hutan produksi terdiri atas kawasan hutan produksi terbatas, dan kawasan hutan produksi tetap. Untuk kawasan hutan produksi terbatas terdapat di Kecamatan Walenrang Barat, Bastem, Bua, Bupon dan Ponrang dengan luas kurang lebih 5.122,08 Ha. Sedangkan untuk kawasan hutan produksi tetap terdapat di kecamatan Bastem, Bua,

Bupon, Latimojong, Ponrang dan Walenrang Utara dengan luas kurang lebih 18.349,7 Ha.

7. Kawasan peruntukan pertanian terdiri atas:
   a. kawasan pertanian tanaman pangan terdapat di setiap wilayah kecamatan ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan, dengan luas kurang lebih 52.738 Ha.
   b. kawasan pertanian hortikultura terdapat di setiap wilayah kecamatan kurang lebih 7.953 Ha.
   c. kawasan perkebunan terdiri dari kawasan pengembangan:
      1) Kakao dengan luas kurang lebih 36.762 Ha tersebar di seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Luwu;
      2) Kelapa dengan luas kurang lebih 4.711 Ha tersebar di seluruh wilayah Kecamatan Kabupaten Luwu;
      3) Cengkeh dengan luas kurang lebih 14.280 Ha tersebar di wilayah Kecamatan Larompong Selatan, Larompong, Suli, Suli Barat, Belopa, Belopa Utara, Bajo, Bajo Barat, Latimojong, Bastem, Ponrang, Bupon, Bua, Walenrang, Walenrang Barat, Walenrang Timur dan Walenrang Utara;
      4) Kopi dengan luas kurang lebih 4.627 Ha tersebar di wilayah Kecamatan Bastem dan Latimojong;
      5) Lada dengan luas kurang lebih 321 Ha tersebar di wilayah Kecamatan Larompong, Larompong Selatan, Suli, Suli Barat, Bajo, Bajo Barat, Latimojong dan Bastem;
      6) Sagu dengan luas kurang lebih 1.462 Ha tersebar di wilayah Kecamatan Larompong Selatan, Larompong, Suli, Suli Barat, Belopa, Belopa Utara, Kamanre, Bajo, Bajo Barat, Latimojong, Ponrang, Ponrang Selatan, Bupon, Bua, Lamasi, Lamasi Timur, Walenrang, Walenrang Barat, Walenrang Timur dan Walenrang Utara; dan
      7) komoditas lain-lain dengan luas kurang lebih 2.833 Ha.
   d. kawasan peternakan terdapat di setiap wilayah kecamatan.

8. Kawasan peruntukan Perikanan terdiri atas:
   a. Kawasan peruntukan perikanan tangkap terdapat di Teluk Bone meliputi: Kecamatan Belopa, Larompong Selatan, Bua, Ponrang, Ponrang Selatan, Larompong dan Suli;
   b. Kawasan peruntukan budi daya perikanan terdiri atas rumput laut di Kecamatan Belopa, Belopa Utara, Kamanre, Suli, Ponrang, Ponrang Selatan, Bua, Larompong, Larompong Selatan, Walenrang Timur dan Lamasi Timur; udang di Kecamatan Belopa, Belopa Utara, Kamanre, Suli, Ponrang, Ponrang Selatan, Bua, Larompong, Larompong Selatan, Walenrang Timur dan Lamasi Timur; ikan Bandeng di Kecamatan Belopa, Belopa Utara, Kamanre, Suli, Ponrang, Ponrang Selatan, Bua, Larompong, Larompong Selatan, Walenrang Timur dan Lamasi Timur;

dan ikan Mas di Kecamatan Bajo, Suli Barat, Bupon, Walenrang dan Lamasi; dan

c. Kawasan peruntukan pengolahan ikan terdapat di Kecamatan Larompong, Suli, Ponrang Selatan dan Bua.

9. Kawasan peruntukan pertambangan terdiri atas:
   a. Kawasan peruntukan pertambangan mineral logam dan batu bara meliputi kecamatan Walenrang Utara ,Walenrang Barat, Walenrang, Bastem, Latimojong, Bajo Barat, Suli Barat, Larompong, Bupon dan Bua.
   b. Kawasan peruntukan pertambangan mineral bukan logam meliputi kecamatan Walenrang Utara, Walenrang Barat, Lamasi, Lamasi Timur, Walenrang, Bastem, Latimojong, Bajo, Bajo Barat, Suli, Suli Barat, Belopa, Belopa Utara, Kamanre, Bupon, Ponrang, Ponrang Selatan, Larompong dan Larompong Selatan.
   c. Kawasan peruntukan pertambangan mineral batuan meliputi kecamatan Walenrang Utara, Walenrang Barat, Lamasi, Lamasi Timur, Walenrang, Bastem, Latimojong, Bajo, Bajo Barat, Suli, Suli Barat, Belopa ,Belopa Utara, Kamanre, Ponrang Selatan, Larompong dan Larompong Selatan.
   d. Kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi. berada di Teluk Bone Utara.

10. Kawasan peruntukan industri merupakan kawasan yang potensi dimanfaatkan untuk kegiatan industri yang meliputi :
    a. Kawasan industri menengah meliputi: kawasan potensi usaha industri di kecamatan Bua dan Walenrang;
    b. Kawasan industri kecil meliputi: kawasan potensi usaha industri di kecamatan Belopa, Suli, Suli Barat, Bajo Barat, Bupon, Ponrang, Ponrang Selatan, Larompong Selatan, Walenrang Barat, Walenrang Timur, Walenrang Utara, dan Lamasi Timur; dan
    c. Kawasan industri mikro meliputi: kawasan potensi usaha industri di Kecamatan Larompong Selatan, Larompong, Suli, Suli Barat, Bajo, Bajo Barat, Belopa, Belopa Utara, Kamanre, Ponrang Selatan, Ponrang, Bupon, Bua, Latimojong, Bastem, Walenrang, Walenrang Timur, Walenrang Barat, Walenrang Utara, Lamasi,LamasiTimur.

11. Kawasan peruntukan pemukiman terdiri atas :
    a. Kawasan peruntukan pemukiman perkotaan terdiri dari kurang lebih 4.464 Ha tersebar di Kecamatan Belopa, Belopa Utara, Larompong Selatan, Larompong, Suli, Kamanre, Bajo, Ponrang, Ponrang Selatan, Bua, Walenrang dan Lamasi;
    b. Kawasan peruntukan permukiman perdesaan terdiri dari atas kurang lebih 2.773 Ha tersebar di seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Luwu kecuali Kecamatan Belopa dan Belopa Utara.

12. Kawasan peruntukan lainnya adalah kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan terdiri atas:
    a. Kawasan wilayah pertahanan KORAMIL Larompong;
    b. Kawasan wilayah pertahanan KORAMIL Suli;

c. Kawasan wilayah pertahanan KORAMIL Belopa;
d. Kawasan Wilayah pertahanan KORAMIL Bajo;
e. Kawasan wilayah pertahanan KORAMIL Bastem;
f. Kawasan wilayah pertahanan KORAMIL Ponrang;dan
g. Kawasan wilayah pertahanan KORAMIL Walenrang.

Selain potensi pemgembangan wilayah yang telah disebutkan di atas masih dapat dilakukan beberapa terobosan pemanfaatan kawasan namun demikian diperlukan kajian komprehensif lebih lanjut dengan memperhatikan kondisi lingkungan setempat dan tetap melakukan koordinasi dengan pihak yang terkait. Namun kemungkinan adanya gangguan terhadap kawasan tersebut perlu terus diantisipasi dengan sebaik-baiknya. Bentuk gangguan yang sering terjadi adalah kebakaran hutan, penebangan liar, alih fungsi lahan dan lainnya.

2.1.8. Wilayah Rawan Bencana

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh factor alam dan atau faktor non alam maup unfactor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. Didalam menyusun suatu perencanaan, aspek rawan bencana perlu diperhatikan dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko, dan dampak bencana.

Setiap daerah itu memiliki potensi bencana berbeda, termasuk Kabupaten Luwu. Mengamati kondisi yang terjadi beberapa tahun terakhir ini potensi terjadinya bencana alam seperti tanah longsor, banjir, abrasi, angin kencang dan lain-lain masih cukup tinggi. Sesuai dengan karakteristik Kabupaten Luwu, beberapa daerah merupakan daerah rawan tanah longsor, banjir, abrasi, angin kencang dan lain-lain:

a. Tanah longsor (*landslide*) merupakan salah satu bentuk erosi yang pengangkutan atau pemindahan masa tanahnya terjadi pada suatu saat secara tiba-tiba dalam volume yang besar (sekaligus). Untuk Kabupaten Luwu kawasan rawan bencana tanah longsor terdapat di Kecamatan Latimojong, Larompong, Larompong Selatan, Bajo, Bajo Barat, Suli Barat, Bastem, Bupon, Bua, Walenrang Utara dan Walenrang Barat;
b. Banjir adalah debit aliran air sungai yang secara relative lebih besar dari biasanya/ normal akibat hujan yang turun di hulu atau disuatu tempat tertentu secara terus menerus, sehingga tidak dapat ditampung oleh alur sungai yang ada,maka air melimpah keluar dan menggenangi daerah sekitarnya. Banjir merupakan suatu peristiwa alam biasa, kemudian menjadi suatu masalah apabila sudah mengganggu kehidupan dan penghidupan manusia serta mengancam keselamatan. Kawasan rawan bencana banjir di Kabupten Luwu terdapat di Kecamatan Larompong Selatan, Larompong, Suli, Belopa, Belopa Utara, Bajo, Kamanre, Ponrang, Ponrang Selatan, Bua, Walenrang Timur dan Lamasi Timur;

c. Abrasi adalah proses pengikisan pantai oleh tenaga gelombang laut dan arus laut yang bersifat merusak. Abrasi biasanya disebut juga erosi pantai. Kerusakan garis pantai akibat abrasi ini dipacu oleh terganggunya keseimbangan alam daerah pantai tersebut. Walaupun abrasi bisa disebabkan oleh gejala alami, namun manusia sering disebut sebagai penyebab utama abrasi adapun kawasan rawan abrasi di Kabupaten Luwu terdapat di Kecamatan Larompong Selatan, Larompong, Suli, Belopa, Belopa Utara, Kamanre, Ponrang, Ponrang Selatan, Bua, Walenrang Timur dan Lamasi Timur;
d. Angin kencang adalah angin dibuat oleh area udara yang dingin secara signifikan akibat hujan, setelah mencapai permukaan tanah, menyebar ke segala arah memproduksi angin kencang. Tidak seperti angin tornado, angin dalam suatu angin kencang diarahkan ke arah luar dari titik di mana menyentuh tanah atau air. Angin kencang kering dikaitkan dengan badai dengan hujan sangat sedikit, sementara angin kencang basah diciptakan oleh badai dengan jumlah curah hujan yang tinggi. Daerah rawan bencanaanginkencang di Kabupaten Luwu terdapat di Kecamatan Larompong Selatan, Larompong, Suli Barat, Ponrang Selatan, Bua, Bassesangtempe, Bassesangtempe Utara dan Walenrang Barat dan Walenrang Utara.

Untuk mengantisipasi terjadinya bencana alam perlu dilakukan rehabilitasi hutan dan lahan, perbaikan kondisi hutan atau tutupan vegetasi permanen dapat berfungsi mengikat tanah selain menahan laju aliran (*run-off*) sehingga dapat mengurangi tanah longsor, banjir maupun abrasi pantai; Perencanaan bangunan teknik sipil dapat diarahkan untuk mengurangi beban alami, seperti tekanan aliran; Penggunaan lahan seperti pemukiman, persawahan ataupun pembangunan embung seharusnya diaplikasikan menyesuaikan kondisi alam sehingga dapat dicapai keseimbangan alam yang berkualitas, dan yang terpenting adalah penataan hukum mengenai lingkungan hidup dan peran serta masyarakaat dalam mengelolah lingkungan hidup.

Salah satu upaya yang dapat dilaksanakan untuk tujuan tersebut diatas adalah dengan melakukan pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan. Untuk dapat mewujudkan program tersebut, maka dipandang perlu untuk menilai kerawanan bencana tiap-tiap kecamatan.

2.1.9. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan sesuai Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Pengertian daya dukung dan daya tampung lingkungan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya. Penentuan daya dukung lingkungan dapat dijadikan sebagai patokan besarnya kemampuan suatu wilayah dengan kondisi lingkungan tertentu dapat mendukung kegiatan atau aktivitas manusia.

Kebijakan pembangunan yang didasarkan dengan pertimbangan daya dukung lingkungan dapat menghasilkan kebijakan yang lebih ramah terhadap lingkungan sehingga kerusakan lingkungan dapat diminimalkan.

Banyak metode yang telah dikembangkan dalam menentukan daya dukung lingkungan suatu wilayah. Sampai saat ini metode yang kerap digunakan yaitu metode penentuan daya dukung lingkungan yang berbasis pada potensi lingkungan seperti kapasitas bio ekologi, kapasitas lahan, air, dan udara dalam menyerap karbondioksida. Penentuan daya dukung berbasis potensi terkadang kurang dapat menggambarkan kondisi daya dukung secara komprehensif dan kurang dapat menggambarkan data secara spasial kewilayahan. Hasil penentuan daya dukung lingkungan yang berbasis potensi ini terkadang kurang dapat dimanfaatkan secara tepat guna dalam penentuan kebijakan pembangunan di suatu daerah pada wilayah tertentu. Hal ini terjadi karena penentuan daya dukung berbasis potensi hanya menggambarkan kondisi kapasitas lingkungan berbasis wilayah administrasi saja.

Salah satu metode yang dapat digunakan untuk menjawab kelemahan metode daya dukung berbasis potensi yaitu dengan berbasis pada jasa ekosistem. Penilaian daya dukung lingkungan berbasis jasa ekosistem dilakukan dengan mendasarkan pada manfaat yang dapat dihasilkan dari suatu ekosistem. Pendekatan nilai jasa ekosistem dalam perhitungan daya dukung lingkungan didasarkan pada fungsi dari sumberdaya alam dan lingkungan yaitu berbentuk barang (goods) dan pelayanan (services). Produk berupa barang yang dinilai berupa hasil langsung dari sumberdaya alam dan lingkungan seperti kayu, bahan tambang, minyak, gas, pangan, dan sebagainya. Sedangkan, produk jasa yang dinilai berupa hasil tidak langsung atau disebut pula jasa lingkungan (jasa ekosistem) berupa fungsi lingkungan seperti tata air, iklim, air bersih, biodiversitas, keindahan, kesejukan, dan lain sebagainya. Pendekatan nilai jasa ekosistem yang digunakan dalam perhitungan daya dukung lingkungan dapat dikategorikan dalam empat aspek yaitu: Jasa penyediaan (provisioning); Jasa pengaturan (regulating); Jasa budaya (cultural); Jasa pendukung (supporting).

Konsep perhitungan daya dukung lingkungan dengan pendekatan nilai jasa ekosistem dihitung dengan mempertimbangkan dari kondisi penggunaan atau tutupan lahan. Penggunaan atau tutupan lahan inilah yang dipertimbangkan sebagai aspek penilaian jasa ekosistem untuk berbagai aspek perhitungan daya dukung. Asumsi yang digunakan dimana setiap penggunaan lahan memiliki nilai kemampuan tersendiri dalam mendukung berbagai kebutuhan hidup manusia. Nilai kemampuan suatu sumberdaya alam dan lingkungan ditampilkan dalam bentuk nilai indeks jasa ekosistem dengan rentang nilai 0 – 1, dimana semakin mendekati 1 (satu), semakin baik fungsi wilayah dalam menyediakan jasa lingkungan.

Kajian daya dukung Kabupaten Luwu menyajikan daya dukung yang berbasis potensi dan jasa ekosistem. Untuk berbasis potensi, daya dukung ditentukan pada kemampuan lahan di Kabupaten Luwu. Sementara untuk jasa

ekosistem ditentukan melalui penetapan status ketersediaan air di wilayah Kabupaten dengan pendekatan jasa ekosistem.

Kemampuan lahan adalah penilaian lahan secara sistematis berdasarkan atas sifat-sifat yang merupakan potensi dan penghambat dalam penggunaannya secara lestari. Adapun kriteria penggunaan lahan yang diperkenankan pada setiap kelas kemampuan lahan diperlihatkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.3.
Skema Hubungan antara Kelas Kemampuan Lahan
dengan Intensitas dan Macam penggunaan Lahan

KELAS KEMAMPUAN LAHAN		INTENSITAS DAN PILIHAN PENGGUNAAN MENINGKAT								
		CAGAR ALAM/ HUTAN LINDUNG	HUTAN PRODUKSI TERBATAS	PENGEMBALAAN TERBATAS	PENGEMBALAAN SEDANG	PENGEMBALAAN INTENSIP	GARAPAN TERBATAS	GARAPAN SEDANG	GARAPAN INTENSIP	GARAPAN SANGAT INTENSIP
HAMBATAN/ANCAMAN MENINGKAT. KESESUAIAN DAN PILIHAN PENGGUNAAN BERKURANG	I									
	II									
	III									
	IV									
	V									
	VI									
	VII									
	VIII									

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2021.

Penjelasan kelas kemampuan lahan sebagai berikut: Kelas I, tanah pada kelas ini memiliki sedikit faktor pembatas dan memiliki risiko kerusakan yang kecil. Jenis tanah pada kelas ini sangat baik dan dapat diusahakan untuk segala jenis pertanian. Tanah ini umumnya relatif datar, bahaya erosi kecil, solum tanah dalam, drainase baik, mudah diolah, penahan air yang baik dan responsif terhadap pemupukan.

Kelas II, tanah pada kelas ini mempunyai sedikit faktor pembatas yang dapat mengurangi pilihan penggunaannya atau membutuhkan tindakan konservasi yang sedang. Oleh sebab itu tanah pada kelas ini membutuhkan pengelolaan tanah yang cukup hati-hati meliputi tindakan konservasi, menghindari kerusakan dan memperbaiki hubungan air-udara dalam tanah.

Kelas III, tanah pada kelas ini mempunyai lebih banyak faktor pembatas daripada tanah pada kelas II, dan apabila digunakan untuk usaha pertanian akan memerlukan tindakan konservasi yang serius, yang umumnya lebih sulit baik dalam pelaksanaan maupun pemeliharaannya. Faktor-faktor pembatas pada lahan kelas ini dapat berupa lereng yang agak miring, cukup peka terhadap erosi, drainase jelek, permeabilitas tanah sangat lambat, solum dangkal, kapasitas menahan air rendah, kesuburan dan produk aktivitas tanah rendah dan sulit untuk diperbaiki.

Kelas IV, tanah pada kelas ini merupakan faktor pembatas yang lebih besar dari pada kelas III, sehingga jenis penggunaan/jenis tanaman yang diusahakan juga sangat terbatas. Tanah pada kelas ini terletak pada lereng yang cukup curam (15% - 30%), sehingga sangat peka terhadap erosi, drainasenya jelek, solumnya dangkal, dan kapasitas menahan air rendah.

Kelas V, tanah pada kelas ini terletak pada tempat yang datar/ agak cekung, selalu basah/ tergenang air, atau terlalu banyak batu di atas permukaan tanah. Karena itu tanah pada kelas ini tidak sesuai untuk usaha pertanian tanaman semusim, namun lebih sesuai untuk ditanami dengan vegetasi permanen seperti tanaman makanan ternak/ dihutankan.

Kelas VI, tanah pada kelas ini terletak pada daerah yang mempunyai lereng yang cukup curam, sehingga mudah ter-erosi/ telah mengalami erosi yang sangat berat/ mempunyai solum yang sangat dangkal. Tanah pada kelas ini tidak sesuai di jadikan lahan pertanian namun lebih sesuai untuk vegetasi permanen.

Kelas VII, tanah pada kelas ini terletak pada lereng yang cukup curang, telah tererosi berat, solum sangat dangkal dan berbatu. Karena itu tanah ini hanya cocok untuk ditanami dengan vegetasi permanen.

Kelas VIII, tanah pada kelas ini terletak pada lereng yang sangat curam, permukaan sangat kasar, tertutup batuan lepas/ batuan singkapan/ tanah pasir pantai. Karena itu tanah pada kelas ini dibiarkan pada keadaan alami dibawah vegetasi alami (cagar alam, hutan lindung, atau tempat rekreasi).

Berdasarkan kriteria tersebut dilakukan analisis kemampuan lahan di Kabupaten Luwu. Hasilnya adalah sebesar 2,16% luas lahan kelas II, 0,19% luas lahan kelas III, 23,18% luas lahan kelas V, 72,81 % luas lahan kelas VI, dan 1,66% luas lahan kelas VIII. Hasil ini menunjukkan bahwa sebagian besar lahan di Kabupaten Luwu terletak pada daerah yang mempunyai lereng yang cukup curam, sehingga mudah ter-erosi/telah mengalami erosi yang sangat berat/mempunyai sokum yang sangat dangkal.l

Tabel 2.4.
Kelas Kemampuan Lahan di Kabupaten Luwu
Tahun 2019

Kelas	Luas (Ha)	Persentase (%)
II	6.598,23	2,16
III	586,68	0,19
V	70.722,59	23,18
VI	222.178,74	72,81
VIII	5.057,54	1,66

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2021.

Sebaran kelas kemampuan lahan setiap kecamatan diperlihatkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.5.
Kelas Kemampuan Lahan per Kecamatan di Kabupaten Luwu Tahun 2019

Kecamatan	Satuan	Kelas				
		II	III	V	VI	VIII
BAJO	Ha	653,32		2.458,58	2.785,86	
BAJO BARAT	Ha	365,61		1.416,53	8.867,36	
BASSESANGTEMPE	Ha				48.830,69	
BELOPA	Ha	141,01		2.547,92	549,86	
BELOPA UTARA	Ha			3.095,57		
BUA	Ha	1.430,98		4.626,72	12.791,90	85,74
BUPON	Ha	1.058,52		3.345,38	11.212,46	180,42
KAMANRE	Ha			4.756,22		489,35
LAMASI	Ha			3.907,47		351,68
LAMASI TIMUR	Ha			6.556,58		
LAROMPONG	Ha		426,90	2.437,83	21.725,78	
LAROMPONG SELATAN	Ha	2.254,84	159,78	820,24	6.383,72	
LATIMOJONG	Ha				34.170,87	
PONRANG	Ha	85,56		6.970,57	3.981,83	
PONRANG SELATAN	Ha			9.761,45		
SULI	Ha	432,33		4.599,79	3.010,36	
SULI BARAT	Ha			743,81	18.289,71	
WALENRANG	Ha			2.781,23	1.479,65	51,92
WALENRANG TIMUR	Ha			80,13	30.762,24	
WALENRANG UTARA	Ha			6.601,84	93,85	
WALERANG BARAT	Ha	176,07		3.214,72	17.242,58	3.898,43
Total	Ha	**6.598,23**	**586,68**	**70.722,59**	**222.178,74**	**5.057,54**

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2021.

Berdasarkan kriteria kuantitatif kemampuan lahan dan faktor pembatas, lahan di Kabupaten Luwu umumnya terlalu banyak batu di atas permukaan tanah dan cenderung sering terjadi banjir serta erosi sedang. Selain itu kondisi drainase lahan sangat buruk sehingga sering tergenang air, terletak pada lereng yang agak curam, ancaman erosi berat, hanya cocok untuk tanaman permanen atau dihutankan. Oleh sebab itu tanah pada kelas ini membutuhkan pengelolaan tanah yang cukup hati-hati meliputi tindakan konservasi, menghindari kerusakan dan memperbaiki hubungan air-udara dalam tanah bila ditanami faktor pembatas dalam kelas ini dapat merupakan satu atau kombinasi dari faktor-faktor lereng landai, kepekaan erosi sedang dan struktur tanah yang kurang baik.

Berdasarkan tabel di atas, daerah yang tidak sesuai dengan pengembangan sektor pertanian yang didukung oleh potensi lahan terdapat pada Kecamatan Bassesangtempe (48.830,69 ha), Kecamatan Latimojong (34.170,87 ha), Kecamatan Walenrang Barat (30.762,24 ha) dan beberapa

kecamatan lainnya. Hasil ini menujukkan bahwa sebagian besar lahan di Kabupaten Luwu terletak pada daerah yang mempunyai lereng yang cukup curam, sehingga mudah ter-erosi/telah mengalami erosi yang sangat berat/mempunyai solum yang sangat dangkal.

Gambar 2.2.

Peta Kelas Kemampuan Lahan Kabupaten Luwu, Tahun 2019

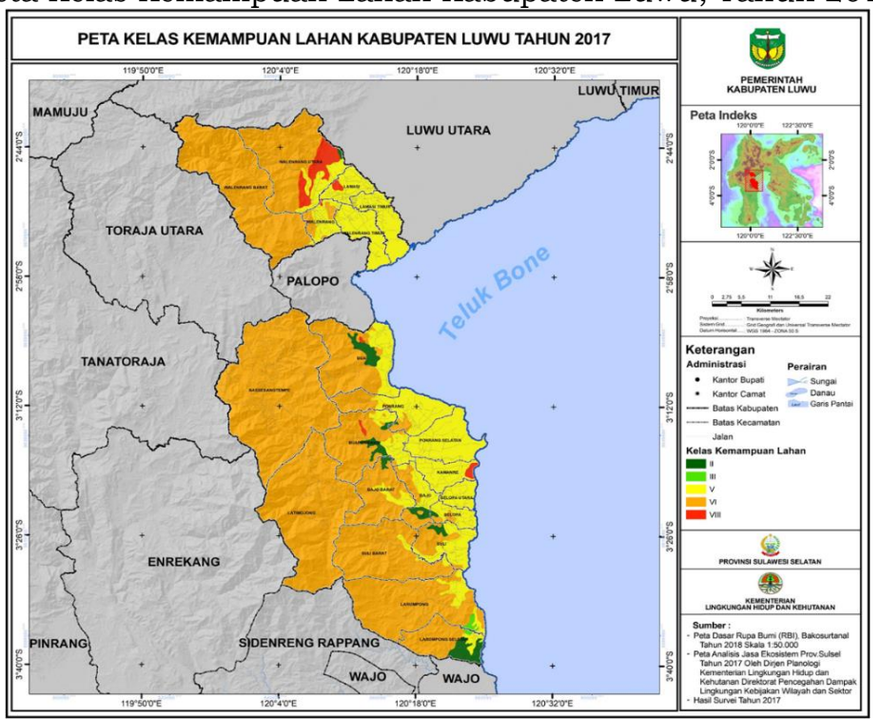

Sumber: Badan Perencanaan dan Litbang Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2020.

Adapun hasil analisis daya dukung berdasarkan jasa ekosistem yang datanya tersedia adalah daya dukung penyediaan air bersih dan penyediaan pangan. Penentuan ambang batas dihitung berdasarkan jasa ekosistem penyediaan air bersih dengan pendekatan ketersediaan *(suplay)* dan kebutuhan *(demand)* melalui pembangunan model distribusi populasi penduduk resolusi tinggi dengan menggunakan system grid skala ragam. Hasil analisis yang menunjukkan terlampaui atau tidaknya ambang batas penyediaan air bersih dan pangan menggambarkan status daya dukung suatu wilayah. Penyediaan air bersih di Kabupaten Luwu diperlihatkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.6.
Status Ketersediaan dan Kebutuhan Penyediaan Air Bersih
di Kabupaten Luwu Tahun 2017

Kecamatan	Status Air Tahun 2017 (m3/tahun)		
	Ketersediaan	Kebutuhan	Selisih
BAJO	6.951.306,55	1.002.820,71	5.948.485,84
BAJO BARAT	7.818.874,17	170.558,30	7.648.315,88
BASSESANGTEMPE	32.564.862,62	5.272.984,55	27.291.878,07
BELOPA	5.227.987,77	983.365,85	4.244.621,92
BELOPA UTARA	5.365.864,11	1.027.169,13	4.338.694,98
BUA	15.450.151,80	3.720.772,77	11.729.379,03
BUAPONRANG	13.472.313,49	2.457.519,45	11.014.794,04
KAMANRE	9.040.440,19	1.219.569,39	7.820.870,80
LAMASI	8.376.108,13	1.890.821,91	6.485.286,22
LAMASI TIMUR	8.264.462,71	2.146.957,74	6.117.504,97
LAROMPONG	18.103.380,17	3.072.078,35	15.031.301,82
LAROMPONG SELATAN	9.308.859,54	2.077.731,84	7.231.127,70
LATIMOJONG	28.519.566,67	1.191.640,32	27.327.926,35
PONRANG	13.125.524,42	3.119.581,64	10.005.942,79
PONRANG SELATAN	14.353.214,09	2.606.116,43	11.747.097,66
SULI	8.032.471,92	787.384,94	7.245.086,99
SULI BARAT	13.802.335,39	1.610.218,31	12.192.117,09
WALENRANG	6.145.939,95	1.899.296,12	4.246.643,84
WALENRANG BARAT	24.252.097,57	3.037.823,46	21.214.274,11
WALENRANG TIMUR	10.142.069,02	2.159.490,02	7.982.579,00
WALENRANG UTARA	24.126.249,87	1.502.679,45	22.623.570,42
Total	**282.444.080,16**	**42.956.580,63**	**239.487.499,53**

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2021.

Hasil kajian daya dukung penyediaan air menunjukkan ketersediaan air di Kabupaten Luwu sebesar 282.444.080,16 m^3/tahun, sementara kebutuhan sebesar 42.956.580,63 m^3/tahun, sehingga masih ada selisih sebesar 239.487.499,53 m^3/tahun, hal ini berarti ambang batas terhadap daya dukung penyediaan air belum terlampaui. Hasil analisis antara ketersediaan dan kebutuhan air untuk setiap kecamatannya memperlihatkan selisih terbesar terdapat pada Kecamatan Latimojong (27.327.926,79 m^3/Tahun), dan Bassesangtempe (27.291.878,07 m^3/Tahun). Hal ini dapat dipahami dikarenakan Kecamatan tersebut merupakan kecamatan yang tutupan lahannya masih bagus (bervegetasi) dan berada dalam kawasan hutan. Sementara untuk selisih antara ketersediaan dan kebutuhan terkecil terdapat pada Kecamatan Belopa (4.244.621,92 m^3/tahun).

Gambar 2.3.

Peta Kajian Daya Dukung Penyediaan Air Bersih di Kabupaten Luwu Tahun 2019

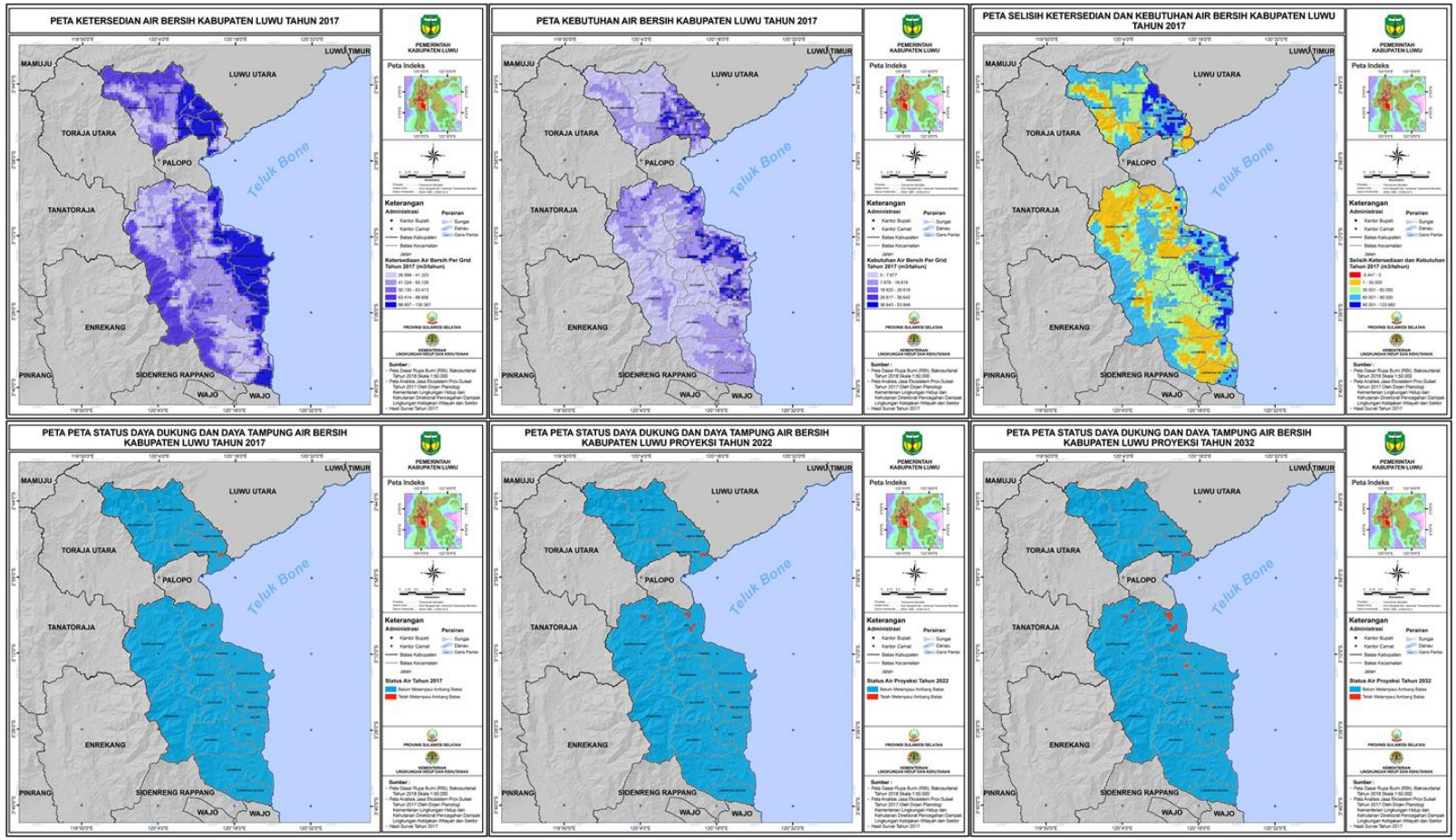

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2021.

Adapun hasil kajian ketersediaan pangan juga menunjukkan masih belum melampaui daya dukung penyediaan pangan. Ketersediaan pangan di Kabupaten Luwu sebesar 1.203.352.091,24 Kkal/tahun, sementara kebutuhan sebesar 346.630.791,00 Kkal/tahun, sehingga masih terdapat selisih sebesar 856.721.300,24 Kkal/tahun. Hasil analisis antara ketersediaan dan kebutuhan pangan untuk setiap kecamatannya memperlihatkan selisih terbesar terdapat pada kecamatan Bassesangtempe (117.228.559,41 Kkal/tahun), dan selisih terkecil terdapat pada Kecamatan Walenrang (6.467.389,88 Kkal/tahun).

Ketersediaan pangan dapat dipengaruhi oleh kesuburan tanah, mata pencarian, dan ketinggian tempat. Keragaman konsumsi pangan dapat dipengaruhi oleh ketersediaan pangan yang ditentukan dari nilai-nilai kebiasaan/adat (tradisi dan kepercayaan) yang berhubungan dengan pangan, pengetahuan gizi dan kualitas pangan. Menggantikan beberapa jenis pangan tertentu dengan pangan lain yang memiliki kandungan gizi serupa membawa konsekuensi pada ketersediaan pangan yang mungkin berhubungan dengan keragaman pangan seperti yang telah diperhitungkan dari keragaman konsumsi pangan sejenis tetapi tidak dengan keragaman pangan seperti yang telah diperhitungkan dari sebagian besar kelompok pangan. Jika jenis pangan di seluruh wilayah yang tersedia sama, maka akan sulit untuk memasukkan jenis pangan yang tersedia sebagai salah satu determinan keragaman konsumsi pangan. Keragaman pangan setiap wilayah berbeda-beda dan dipengaruhi oleh faktor luar seperti iklim, kondisi tanah dan keadaan biologis wilayah, yang nantinya berpengaruh terhadap ketersediaan pangan di wilayah tersebut.

Tabel 2.7.
Ketersediaan dan Kebutuhan Penyediaan Pangan
di Kabupaten Luwu Tahun 2017

Kecamatan	Status Pangan Tahun 2022 (kkal/tahun)		
	Ketersediaan	Kebutuhan	Selisih
BAJO	28.517.758,82	8.478.819,22	20.038.939,60
BAJO BARAT	39.646.127,66	1.451.861,28	38.194.266,38
BASSESANGTEMPE	160.818.915,09	46.253.533,43	114.565.381,66
BELOPA	19.690.891,21	8.484.858,07	11.206.033,14
BELOPA UTARA	20.108.023,15	8.851.598,75	11.256.424,40
BUA	72.686.857,84	31.766.838,49	40.920.019,35
BUAPONRANG	60.763.028,07	20.238.159,50	40.524.868,57
KAMANRE	29.502.384,22	10.097.131,54	19.405.252,68
LAMASI	25.263.159,59	15.561.232,75	9.701.926,84
LAMASI TIMUR	37.499.838,31	17.638.035,63	19.861.802,68
LAROMPONG	91.913.730,18	25.898.955,68	66.014.774,50
LAROMPONG	37.874.125,30	17.013.278,35	20.860.846,95
LATIMOJONG	114.964.312,00	9.773.213,73	105.191.098,27
PONRANG	53.828.613,72	25.748.149,40	28.080.464,32
PONRANG	49.021.087,24	21.463.592,11	27.557.495,13
SULI	36.288.862,24	6.465.242,99	29.823.619,25
SULI BARAT	67.732.203,42	13.472.754,70	54.259.448,72
WALENRANG	21.661.758,80	16.009.873,26	5.651.885,54
WALENRANG	108.835.867,70	26.813.805,08	82.022.062,62
WALENRANG	36.595.244,04	18.204.765,71	18.390.478,33
WALENRANG	90.139.302,63	12.345.731,47	77.793.571,16
Total	**1.203.352.091,23**	**362.031.431,14**	**841.320.660,09**

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2021.

Gambar 2.4.

Peta Kajian Daya Dukung Penyediaan Pangan di Kabupaten Luwu

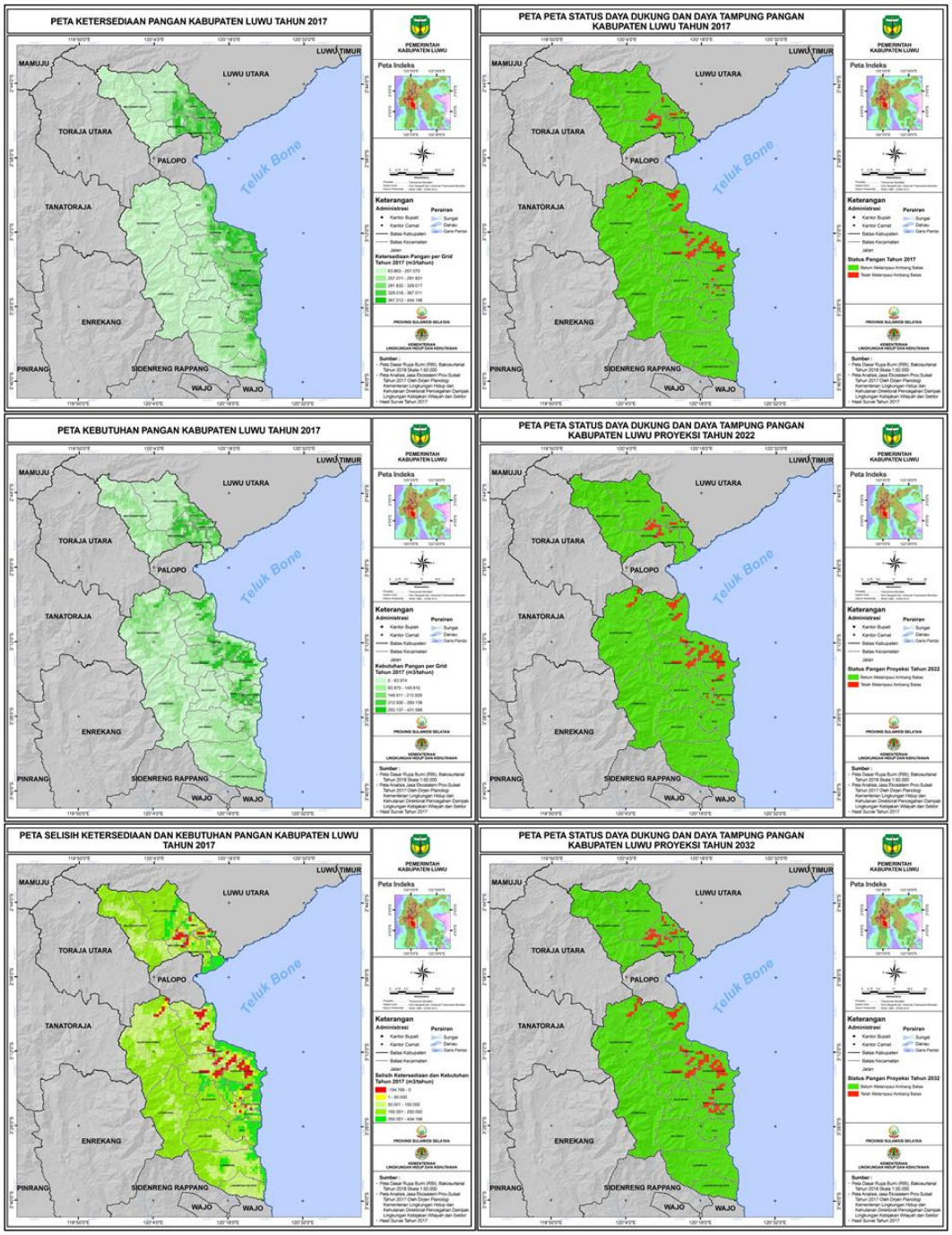

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2021..

2.1.10. Demografi

Penjelasan mengenai aspek demografi meliputi ukuran, struktur, dan distribusi penduduk, serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian dan migrasi. Analisis kependudukan dapat dilakukan secara keseluruhan atau kelompok tertentu yang didasarkan kriteria seperti pendidikan, usia, agama, dan lain-lain.

Penduduk Kabupaten Luwu menunjukkan jumlah yang terus meningkat setiap tahun, baik penduduk laki-laki maupun perempuan. Berdasarkan data BPS, Laju pertumbuhan penduduk dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 4,23%, dengan rata-rata laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,84%, dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2015 yaitu mencapai 0,90%. Jumlah penduduk pada tahun 2015 adalah 350.218 jiwa, meningkat menjadi 362.027 pada tahun 2019. Kepadatan penduduk pada tahun 2015 adalah 117 jiwa/km^2, meningkat menjadi 120 jiwa/km^2 pada tahun 2019. Rasio jenis kelamin adalah 96,34 yang berarti bahwa setiap 100 penduduk perempuan terdapat 96 hingga 97 penduduk laki-laki.

Tabel 2.8.
Perkembangan Jumlah Penduduk di Kabupaten Luwu
Tahun 2015-2019

No	Tahun	Jumlah Penduduk (jiwa)	Pertumbuhan Penduduk (%)	Kepadatan (Jiwa/Km^2)	Sex Ratio
1	2015	350.218	0,90	117	96,34
2	2016	353.277	0,87	118	96,34
3	2017	356.305	0,86	119	96,34
4	2018	359.209	0,82	120	96,20
5	2019	362.027	0,78	120	96,34

Sumber: BPS Tahun 2020.

Kepadatan penduduk lebih terkonsentrasi pada wilayah perkotaan karena terkait dengan peran kota sebagai pusat pemerintahan, pendidikan, dan fasilitas publik. Pada tahun 2019, jumlah penduduk terbesar terdapat di Kecamatan Bua yaitu 36.191 jiwa atau sebesar 9,99%, diikuti Kecamatan Ponrang dengan jumlah penduduk 27.566 jiwa atau 7,61% dan Kecamatan Ponrang Selatan yaitu 24.899 jiwa atau 6,87%. Sedangkan kecamatan dengan penduduk terkecil adalah Kecamatan Latimojong dengan jumlah 5.650 jiwa atau 1,56%, diikuti Kecamatan Bassesangtempe dengan jumlah penduduk 7.363 jiwa atau 2,03%, dan Kecamatan Suli Barat dengan jumlah penduduk 9.339 jiwa atau 2,57%.

Tabel 2.9.
Kepadatan Penduduk Kabupaten Luwu Menurut Kecamatan
Tahun 2019

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas Wilayah (Km^2)	Kepadatan ($Jiwa/Km^2$)
1	Larompong	20.886	225,25	93
2	Larompong Selatan	16.277	131	124
3	Suli	19.202	81,75	235
4	Suli Barat	9.339	153,5	61
5	Belopa	17.879	59,26	302
6	Kamanre	11.971	52,44	228
7	Belopa Utara	17.368	34,73	500
8	Bajo	16.167	68,52	236
9	Bajo Barat	10.804	66,3	163
10	Bassesangtempe	7.363	178,12	41
11	Latimojong	5.650	467,75	12
12	Basse sangtempe Utara	8.583	122,88	70
13	Bupon	14.654	182,67	80
14	Ponrang	27.566	107,09	257
15	Ponrang Selatan	24.899	99,98	249
16	Bua	36.191	204,01	177
17	Walenrang	19.609	94,6	207
18	Walenrang Timur	15.885	63,65	250
19	Lamasi	21.077	42,2	499
20	Walenrang Utara	18.473	259,77	71
21	Walenrang Barat	9.673	247,13	39
22	Lamasi Timur	12.511	57,65	217
JUMLAH		**362.027**	**3.000,25**	**121**

Sumber : BPS Tahun 2020.

Tabel di atas menunjukkan bahwa kepadatan rata-rata penduduk di Kabupaten Luwu adalah 121 jiwa/km^2. Kecamatan dengan kepadatan tertinggi adalah Kecamatan Belopa Utara dengan tingkat kepadatan 500 jiwa/km^2, diikuti Kecamatan Lamasi dengan tingkat kepadatan 499 jiwa/km^2. Sedangkan kecamatan dengan kepadatan penduduk paling rendah adalah Kecamatan Latimojong yaitu 12 jiwa/km^2, diikuti Kecamatan Walenrang Barat dengan kepadatan 39 jiwa/km^2.

Proporsi penduduk menurut jenis kelamin di Kabupaten Luwu lebih didominasi oleh kaum perempuan. Jumlah penduduk perempuan pada tahun 2019 lebih banyak dibanding dengan jumlah penduduk laki-laki.

Penduduk laki-laki tercatat sebanyak 177.382 jiwa atau 48,99%, sedangkan penduduk perempuan sebanyak 184.645 jiwa atau 51,01%.

Tabel 2.10.
Jumlah Penduduk Kabupaten Luwu Berdasarkan Jenis Kelamin
Tahun 2019

No.	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Persentase Penduduk		Rasio Jenis Kelamin
					Laki-Laki	Perempuan	
1	Larompong	10.420	10.466	20.886	49,88	50,11	99,56
2	Larompong Selatan	7.958	8.319	16.277	48,89	51,10	95,66
3	Suli	9.112	10.090	19.202	47,45	52,54	90,31
4	Suli Barat	4.690	4.649	9.339	50,21	49,78	100,88
5	Belopa	8.340	9.539	17.879	46,64	53,35	87,43
6	Kamanre	5.693	6.278	11.971	47,55	52,44	90,68
7	Belopa Utara	8.449	8.919	17.368	48,64	51,35	94,73
8	Bajo	7.601	8.566	16.167	47,01	52,98	88,73
9	Bajo Barat	5.362	5.442	10.804	49,62	50,37	98,53
10	Bassesangtempe	3.744	3.619	7.363	50,84	49,15	103,45
11	Latimojong	2.907	2.743	5.650	51,45	48,54	105,98
12	Bassesangtempe Utara	4.486	4.097	8.583	52,26	47,73	109,49
13	Bupon	7.258	7.396	14.654	49,52	50,47	98,13
14	Ponrang	13.678	13.888	27.566	49,61	50,38	98,49
15	Ponrang Selatan	11.916	12.983	24.899	47,85	52,14	91,78
16	Bua	17.421	18.770	36.191	48,13	51,86	92,81
17	Walenrang	9.668	9.941	19.609	49,30	50,69	97,25
18	Walenrang Timur	7.846	8.039	15.885	49,39	50,60	97,60
19	Lamasi	10.403	10.674	21.077	49,35	50,64	97,46
20	Walenrang Utara	9.234	9.239	18.473	49,98	50,01	99,95
21	Walenrang Barat	5.055	4.618	9.673	52,25	47,74	109,46
22	Lamasi Timur	6.141	6.370	12.511	49,08	50,91	96,41
JUMLAH		**177.382**	**184.645**	**362.027**	**48,99**	**51,00**	**96,06**

Sumber : BPS Tahun 2020.

Dalam analisis demografi, terdapat suatu analisis menurut karakteristik umur melalui piramida penduduk. Piramida penduduk merupakan sebuah gambaran awal mengenai struktur umur penduduk baik untuk dianalisis mengenai produktivitas umurnya maupun analisis keberhasilan program-program kependudukan selama ini.

Kabupaten Luwu sudah memasuki periode bonus demografi, hal ini terlihat dari proporsi penduduk usia produktif (penduduk berusia 15-64 tahun) berjumlah 224.709 jiwa atau sebesar 62,07% pada tahun 2019. Penduduk berusia 0-14 tahun di Kabupaten Luwu jumlahnya adalah 115.804

jiwa atau 31,99% dari seluruh penduduk, sementara penduduk usia pensiun (usia 65 tahun ke atas) totalnya mencapai 21.514 jiwa atau 5,95%. Jika kelompok usia tidak produktif ini ditambahkan, maka proporsi penduduk berusia tidak produktif mencapai 137.318 atau 37,94%. Hal ini merupakan keuntungan dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Luwu untuk mempercepat kesejahteraan rakyat.

Grafik 2.2.

Piramida Penduduk Kabupaten Luwu Tahun 2019

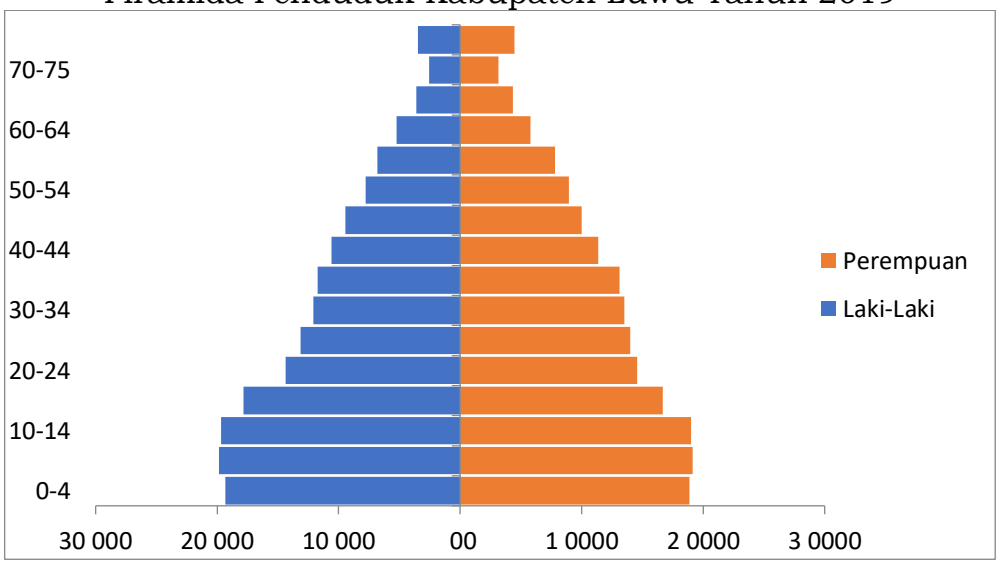

Sumber: Data Diolah, BPS Kabupaten Luwu Dalam Angka, Tahun 2020.

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu, penduduk yang memeluk agama Islam adalah sejumlah 322.586 jiwa atau 89,11%. Seluruh kecamatan di Kabupaten Luwu penduduknya mayoritas beragama Islam. Penduduk dengan jumlah terbesar kedua dan ketiga adalah beragama Kristen Protestan dan Katolik, masing-masing sebesar 13,15% dan 1,15%. Komposisi ini membutuhkan pembinaan untuk penumbuhan tenggang rasa antar pemeluk umat beragama agar tidak muncul konflik yang berpotensi mengganggu keamanan di Kabupaten Luwu.

Tabel 2.11.
Jumlah Penduduk berdasarkan Agama yang dianut Menurut Kecamatan Tahun 2019

No	Kecamatan	Islam	Kristen Protestan	Kristen Katolik	Hindu	Budha	Lainnya
1	Larompong	21.250	21	1	0	0	3
2	Larompong Selatan	17.776	212	9	0	0	
3	Suli	21.065	122	81	0	0	
4	Suli Barat	10.400	0	1	0	0	
5	Belopa	17.610	45	15	0	0	1
6	Kamanre	12.391	104	20	0	0	1
7	Belopa Utara	17.864	83	24	0	0	
8	Bajo	15.871	149	57	0	0	
9	Bajo Barat	10.285	104	0	1	0	
10	Basse sangtempe	5.649	419	8	0	0	
11	Latimojong	5.611	479	37	0	0	
12	Bassesangtempe Utara	3.645	4263	36	0	0	
13	Bupon	14.465	574	53	1	0	
14	Ponrang	21.269	5851	732	0	1	
15	Ponrang Selatan	25.257	268	240	0	0	1
16	Bua	29.799	1329	233	26	6	5
17	Walenrang	14.021	4713	430	14	0	
18	Walenrang Timur	11.463	6615	261	1	0	
19	Lamasi	17.050	5069	493	0	0	
20	Walenrang Utara	19.624	1125	253	1	0	
21	Walenrang Barat	3.895	6062	790	0	0	
22	Lamasi Timur	6.321	7699	379	0	0	
JUMLAH		**322.586**	**47.706**	**4.153**	**45**	**7**	**15**

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu, Tahun 2020.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa ada perbedaan jumlah penduduk antara data BPS dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun yang sama disebabkan berbedanya metode pengukuran.

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan utama di dalam pembangunan. Pemerintah dalam setiap implementasti kebijakan selalu menjadikan kesejahteraan sebagai tujuan yang dicapai. Pengukuran tingkat kesejahteraan masyarakat ditinjau dari berbagai aspek yaitu pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta seni budaya dan olahraga.

2.2.1 Pertumbuhan PDRB

Pembangunan Kabupaten Luwu tidak bisa dipisahkan dari pertumbuhan ekonomi, keduanya bersinergi dan saling terkait. Salah satu indikator penting yang digunakan untuk mengukur perkembangan ekonomi suatu daerah pada periode waktu tertentu adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yang merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah.

PDRB dapat dibedakan atas dasar harga konstan dan harga berlaku. PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada satu tahun tertentu. Sedangkan PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada tahun tersebut. Selanjutnya, PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk melihat pertumbuhan ekonomi suatu daerah dari tahun ke tahun. Sedangkan PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menandakan semakin bergairahnya kegiatan ekonomi di wilayah tersebut. Dengan asumsi pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan menyerap tenaga kerja yang tinggi pula, yang pada hakekatnya meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat.

PDRB Kabupaten Luwu menurut harga konstan mengalami peningkatan secara konsisten selama kurun waktu lima tahun terakhir (2015-2019). Pada tahun 2015, PDRB Harga Konstan Kabupaten Luwu sebesar Rp.7,43 triliun, meningkat menjadi 9,72 triliun pada tahun 2019 atau meningkat rata-rata 572,89 miliar setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai aktivitas ekonomi di daerah ini terus meningkat, yang berarti juga bahwa perekonomian daerah terus bergerak ke arah yang lebih baik.

Tabel 2.12.
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2015-2019

No	Sektor	Tahun									
		2015		2016		2017		2018		2019	
		Rp (Miliar)	%	Rp (Miliar)	%	Rp (Miliar)	%	Rp (Miliar)	%	Rp (Miliar)	%
1	Pertanian, Kehutanan & Perikanan	3.756,05	6,48	4.046,08	7,79	4.267,80	5,41	4.565,06	6,97	4.747,14	3,98
2	Pertambangan dan Penggalian	168,83	6,06	184,04	9,01	200,41	8,89	212,83	6,2	227,42	6,86
3	Industri Pengolahan	330,2	4,44	359,81	8,97	387,11	7,59	414,03	6,95	457,47	10,94
4	Pengadaan Listrik dan Gas	8,53	-7,24	10,07	18,13	10,67	5,90	11,47	7,49	11,93	4,09
5	Pengadaan Air	1,18	0,56	1,30	10,02	1,41	8,47	1,50	6,31	1,56	3,83
6	Konstruksi	646,04	5,31	676,59	4,99	712,78	5,09	756,96	6,2	823,64	8,81
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	864,50	9,33	943,16	8,60	999,37	6,44	1.080,04	8,07	1.173,45	8,65
8	Transportasi & Pergudangan	59,15	6,68	61,94	4,72	65,73	6,12	74,81	13,82	81,81	9,36
9	Penyedia Akomodasi & Makan Minum	54,01	6,30	58,20	7,77	61,63	5,89	68,40	10,98	72,56	6,09
10	Informasi dan Komunikasi	218,1	14,69	237,43	8,86	258,05	8,69	281,68	9,16	309,75	9,97
11	Jasa Keuangan	104,32	10,31	120,24	15,25	126,83	5,48	130,8	3,13	136,65	4,47
12	Real Estate	452,54	6,75	484,98	7,17	517,08	6,62	541,09	4,64	572,49	5,8
13	Jasa Perusahaan	1,79	11,67	1,95	9,14	2,19	12,34	2,37	7,99	2,56	8,09
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib	344,66	6,24	372,23	8,00	389,60	4,67	398,37	2,25	446,86	12,17
15	Jasa Pendidikan	255,29	13,57	279,76	9,59	302,25	8,04	329,74	9,09	354,86	7,62
16	Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	151,7	14,54	163,39	7,71	240,35	47,10	258,38	7,50	278,88	7,93
17	Jasa Lainnya	20,53	10,26	22,19	8,08	24,62	10,96	27,64	12,25	29,93	8,31
PDRB Kabupaten Luwu		**7.437,42**	**7,26**	**8.023,37**	**7,88**	**8.567,87**	**6,79**	**9.155,16**	**6,86**	**9.728,96**	**6,26**

Sumber: Kabupaten Luwu Dalam Angka 2020

Tabel 2.13.

Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2015-2019 Atas Dasar Harga Berlaku di Kabupaten Luwu

No.	Sektor	Tahun									
		2015		2016		2017		2018		2019	
		Rp (miliar)	%	Rp (miliar)	%	Rp (miliar)	%	Rp (miliar)	%	Rp (miliar)	%
1	Pertanian, Kehutanan & Perikanan	5.549,09	53,55	6.435,09	54,30	6.969,61	53,50	7.781,89	53,88	8.201,86	52,38
2	Pertambangan dan Penggalian	283,54	2,74	327,24	2,76	360,78	2,77	397,14	2,75	429,52	2,74
3	Industri Pengolahan	424,86	4,10	476,38	4,02	541,30	4,16	595,41	4,12	668,83	4,27
4	Pengadaan Listrik dan Gas	6,47	0,06	7,84	0,07	10,50	0,08	11,52	0,08	12,05	0,08
5	Pengadaan Air	1,44	0,01	1,63	0,01	1,80	0,01	1,96	0,01	2,07	0,01
6	Konstruksi	857,87	8,28	951,50	8,03	1.064,96	8,18	1.169,56	8,10	1.349,18	8,62
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.059,22	10,22	1.178,87	9,91	1.273,94	9,78	1.408,16	9,75	1.587,98	10,14
8	Transportasi & Pergudangan	87,60	0,85	97,56	0,82	103,92	0,80	121,37	0,84	135,69	0,87
9	Penyedia Akomodasi & Makan Minum	720	0,69	81,59	0,69	87,82	0,67	101,04	0,70	110,28	0,70
10	Informasi dan Komunikasi	228,54	2,21	250,04	2,11	273,55	2,10	301,95	2,09	335,04	2,14
11	Jasa Keuangan	143,18	1,38	169,80	1,43	187,17	1,44	201,94	1,40	218,61	1,40
12	Real Estate	606,20	5,85	682,49	5,76	759,59	5,83	821,14	5,69	881,80	5,63
13	Jasa Perusahaan	2,55	0,02	2,94	0,02	3,37	0,03	3,81	0,03	4,19	0,03
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib	492,42	4,75	550,17	4,64	590,17	4,53	628,83	4,35	726,50	4,64
15	Jasa Pendidikan	338,46	3,27	400,13	3,38	435,43	3,34	492,52	3,41	545,34	3,48
16	Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	179,71	1,73	208,19	1,76	324,66	2,49	358,49	2,48	398,30	2,54
17	Jasa Lainnya	29,40	0,28	34,38	0,29	38,25	0,29	45,20	0,31	50,38	0,32
PDRB Luwu		**10.362,55**	**100,00**	**11.855,84**	**100,00**	**13.026,82**	**100,00**	**14.441,93**	**100,00**	**15.657,62**	**100,00**

Sumber : Kabupaten Luwu Dalam Angka 2020.

Sejalan dengan peningkatan pendapatan masyarakat, jenis barang dan jasa yang diminta oleh masyarakat terus mengalami perubahan. Selain itu elastisitas permintaan barang dan jasa terhadap perubahan pendapatan masyarakat juga berbeda-beda. Perubahan tersebut selanjutnya mempengaruhi kontribusi sektoral terhadap PDRB dari tahun ke tahun. Perubahan kontribusi sektoral terhadap PDRB inilah yang sering disebut sebagai pergeseran struktur perekonomian.

Perubahan permintaan masyarakat serta perbedaan elastisitas permintaan berbagai barang dan jasa merupakan dua alasan utama terjadinya pergeseran struktur perekonomian di setiap daerah. Karena itu pergeseran struktur perekonomian daerah adalah sebuah keniscayaan bagi daerah-daerah yang perekonomiannya sedang mengalami perkembangan. Secara umum arah pergeseran struktur perekonomian di setiap daerah akan bergerak dari dominasi sektor pertanian menuju dominasi sektor industri dalam struktur perekonomiannya, kemudian berlanjut pergeserannya ke arah dominasi sektor jasa ketika kesejahteraan masyarakatnya sudah tinggi atau mapan.

Analisis pergeseran struktur ekonomi daerah, yang tercermin dari pergeseran kontribusi sektoral terhadap PDRB daerah, setidaknya dapat menjelaskan dua hal yang utama, yakni:

1. Struktur ekonomi menggambarkan sektor-sektor apa saja yang ada di dalam wilayah yang menjadi penopang utama perekonomian. Gambaran ini sekaligus menjelaskan ciri perekonomian daerah, apakah berciri agraris, industri atau jasa;
2. Analisis struktural dan pergeserannya juga memberikan informasi mengenai sektor-sektor apa saja yang kontribusi terhadap PDRB memiliki trend peningkatan, dan sektor apa saja yang memiliki kontribusi terhadap PDRB cenderung menurun atau tetap. Dengan analisis ini arah perkembangan perekonomian dapat diprediksi.

Struktur perekonomian atau kontribusi sektoral Kabupaten Luwu dihitung dengan membagi PDRB per sektor dengan total PDRB atas dasar harga berlaku. Berdasarkan Tabel 2.15. terlihat bahwa struktur perekonomian Kabupaten Luwu selama periode Tahun 2015-2019 masih bertumpu pada sektor pertanian. Kontribusi sektor pertanian mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2015 s/d 2016 meningkat dari 53,55% menjadi 54,30% namun menurun pada tahun 2017 menjadi 53,50% dan naik kembali menjadi 53,88% pada tahun 2018 dan turun kembali menjadi 52,38% pada tahun 2019. Dengan demikian, apabila dibandingkan antara 2015 dengan 2019 terjadi penurunan sebesar 1,17%. Penurunan kontribusi sektor pertanian disebabkan karena banjir yang mengakibatkan petani gagal panen.

Sektor penyumbang terbesar kedua adalah reparasi mobil dan motor yang mencapai 10,14% pada tahun 2019. Sektor ini mengalami peningkatan pada tahun 2019 setelah secara terus-menerus mengalami penurunan pada periode 2015-2018, yaitu dari 10,22% pada tahun 2015 menjadi 9,75% pada tahun 2018. Namun demikian, capaian pada tahun 2019 masih lebih kecil daripada capaian pada tahun 2015. Hal ini dipengaruhi oleh meningkatnya pengguna kendaraan dan adanya program KUR yang sedang bergulir.

Selanjutnya adalah sektor konstruksi yang pada tahun 2019 berkontribusi sebesar 8,62%. Sektor ini meskipun berfluktuasi selama periode 2015-2019, capaian pada tahun 2019 sudah lebih besar dari tahun 2015. Hal ini disebabkan karena program pemerintah dalam meningkatkan infrastruktur di daerah.

Berdasarkan pergeseran struktural perekonomian Kabupaten Luwu dalam lima tahun terakhir terlihat bahwa terdapat 8 (delapan) sektor yang memiliki kontribusi terhadap peningkatan PDRB daerah yakni: (1) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial yang mengalami kenaikan sebesar 0,81 poin; (2) Konstruksi dengan kenaikan sebesar 0,34 poin; (3) Jasa Pendidikan dengan kenaikan sebesar 0,21 poin; (4) Industri Pengolahan dengan kenaikan sebesar 0,17 poin; (5) Jasa Lainnya dengan kenaikan sebesar 0,04 poin; (6) Pengadaan Listrik dan Gas dengan kenaikan sebesar 0,02 poin; (7) Transportasi dan Pergudangan dengan kenaikan sebesar 0,02 poin, dan (8) Jasa Keuangan dengan kenaikan sebesar 0,02 poin. Sedangkan kontribusi sektor lainnya terhadap PDRB ada yang mengalami penurunan dan ada yang tidak berubah. Diantara yang kontribusinya menurun paling besar adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dengan penurunan sebesar 1,17 poin, sektor real estate dengan penurunan sebesar 0,22 poin, sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib dengan penurunan sebesar 0,11 poin, sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor dengan penurunan 0,08 poin, dan sektor Informasi dan Komunikasi dengan penurunan 0,07 poin.

Tingginya kontribusi sektor pertanian dalam PDRB Kabupaten Luwu dalam lima tahun terakhir (rata-rata sebesar 53,52%), mengisyaratkan bahwa sektor pertanian di daerah ini masih menjadi sektor kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pola pergeseran struktural Kabupaten Luwu seperti yang diuraikan sebelumnya sesungguhnya menunjukkan pola pergeseran struktural yang tidak lazim seperti halnya pola pergeseran ekonomi di daerah lainya, dimana lazimnya, pergeseran struktural umumnya dicirikan oleh merosotnya kontribusi sektor pertanian dalam PDRB sementra sektor lainnya cenderung meningkat kontribusinya.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro ekonomi yang penting karena indikator ini merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan tingkat keberhasilan suatu wilayah dalam meningkatkan output ekonomi yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi dari suatu waktu ke waktu yang lain. Pertumbuhan ekonomi dihitung dengan membandingkan besarnya PDRB atas dasar harga konstan suatu tahun dengan tahun yang lain. Selama kurun waktu 2015-2019, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Luwu memperlihatkan kinerja yang cukup baik. Selama periode tersebut perekonomian daerah tumbuh rata-rata 7,01% pertahun. Kinerja pertumbuhan tersebut lebih rendah dibandingkan kinerja pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan yang tumbuh sebesar 7,16% pertahun dalam periode yang sama. Berdasarkan rata-rata pertumbuhan ekonomi setiap sektor di Kabupaten Luwu, maka terdapat 7 (tujuh) sektor yang memiliki pertumbuhan lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah ini, masing-masing adalah sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 16,95% per tahun, diikuti sektor informasi dan komunikasi (10,27%), sektor jasa-jasa (9,97%), sektor jasa perusahaan (9,84%), sektor jasa pendidikan (9,58%), sektor reparasi mobil dan motor (8,22%), dan sektor transportasi dan pergudangan (8,14%). Melihat kontribusinya yang cukup tinggi terhadap PDRB, maka dapat diidentifikasi sektor mana yang memberikan andil paling besar dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi di daerah ini.

Tabel 2.14.
Pertumbuhan PDRB atas Dasar Harga Konstan
Tahun 2015- 2019

No	Sektor	Tahun					Rerata
		2015	2016	2017	2018	2019	
1	Pertanian, Kehutanan & Perikanan	6,48	7,79	5,41	6,97	3,98	6,13
2	Pertambangan dan Penggalian	6,06	9,01	8,89	6,2	6,86	7,40
3	Industri Pengolahan	4,44	8,97	7,59	6,95	10,94	7,78
4	Listrik dan Gas	-7,24	18,13	5,9	7,49	4,09	5,67
5	Pengadaan Air	0,56	10,02	8,47	6,31	3,83	5,84
6	Konstruksi	5,31	4,99	5,09	6,2	8,81	6,08
7	Reparasi Mobil & Motor	9,33	8,6	6,44	8,07	8,65	8,22
8	Transportasi & Pergudangan	6,68	4,72	6,12	13,82	9,36	8,14
9	Penyedia Akomodasi & Makan Minum	6,3	7,77	5,89	10,98	6,09	7,41
10	Informasi dan Komunikasi	14,69	8,86	8,69	9,16	9,97	10,27
11	Jasa Keuangan	10,31	15,25	5,48	3,13	4,47	7,73
12	Real Estate	6,75	7,17	6,62	4,64	5,8	6,20

13	Jasa Perusahaan	11,67	9,14	12,34	7,99	8,09	9,85
14	Administrasi Pemerintahan & Jaminan Sosial	6,24	8	4,67	2,25	12,17	6,67
15	Jasa Pendidikan	13,57	9,59	8,04	9,09	7,62	9,58
16	Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	14,54	7,71	47,1	7,5	7,93	16,96
17	Jasa-Jasa	10,26	8,08	10,96	12,25	8,31	9,97
PDRB Kabupaten Luwu		**7,26**	**7,88**	**6,79**	**6,86**	**6,26**	**7,01**

Sumber : Kabupaten Luwu Dalam Angka 2020.

Grafik 2.3.

Perbandingan Pertumbuhan PDRB Kabupaten Luwu dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan PDB Nasional Tahun 2016-2020

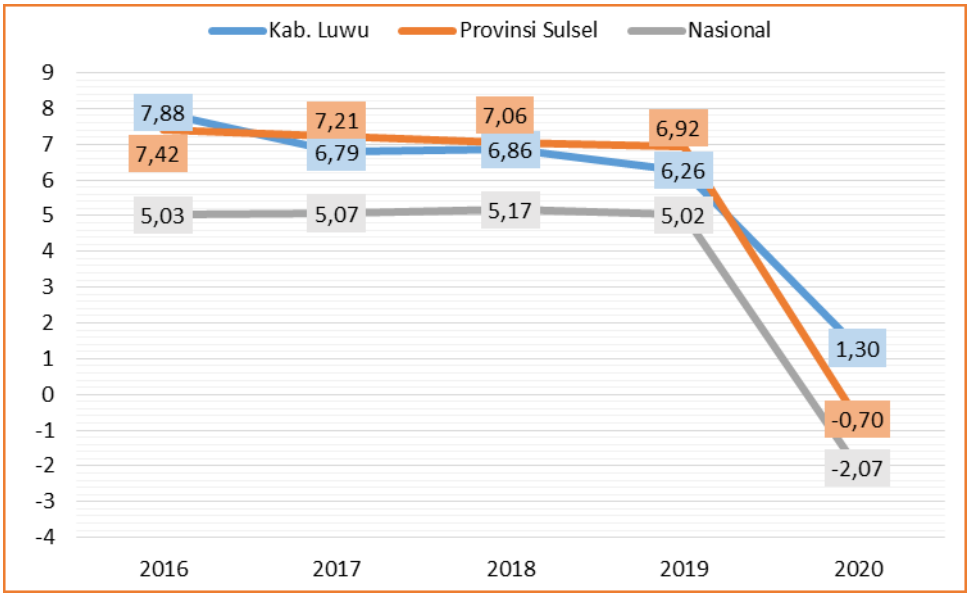

Sumber: BPS Tahun 2021

Pertumbuhan PDRB Kabupaten Luwu memperlihatkan kinerja yang cukup baik. Selama periode 2016-2020, rata-rata pertumbuhan PDRB Kabupaten Luwu mencapai 5,82% pertahun. Kinerja pertumbuhan tersebut lebih tinggi dibandingkan kinerja pertumbuhan PDRB Provinsi Sulawesi Selatan dan PDB Nasional yang masing-masing tumbuh sebesar 5,58% pertahun dan 3,64% pertahun.

2.2.2 Laju Inflasi

Inflasi merepresentasikan keadaan perekonomian dimana terdapat kecenderungan terjadinya kenaikan tingkat harga-harga secara umum. Dalam jangka panjang, tingkat inflasi yang cukup tinggi akan berdampak buruk bagi perekonomian karena menyebabkan menurunnya daya beli masyarakat. Selain itu inflasi juga menyebabkan harga barang domestik

relatif lebih mahal dibandingkan barang impor, dengan demikian barang domestik lebih sulit bersaing dengan barang impor.

Secara spasial, berdasarkan data BPS, inflasi tahun 2019 pada Zona Palopo (Kota Palopo, Kab. Luwu Timur, Luwu Utara, Luwu, Tana Toraja dan Toraja Utara) adalah 1,91% (yoy), lebih rendah daripada tahun sebelumnya yaitu sebesar 4,19%. Umumnya inflasi tertinggi terjadi pada bulan Juni dan Desember sebagai akibat meningkatnya kebutuhan konsumsi masyarakat pada bulan puasa dan menjelang tahun baru. Oleh karena itu, untuk menekan laju inflasi yang berulang setiap tahun tersebut, perlu dihimbau kepada masyarakat untuk tidak terlalu berlebihan dalam merayakan momen tersebut.

2.2.3 PDRB per kapita

PDRB per kapita merupakan salah satu tolok ukur tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah. PDRB per kapita mengindikasikan rata-rata nilai tambah ekonomi suatu daerah yang diterima oleh setiap penduduknya, karena itu PDRB per kapita sering digunakan sebagai pendekatan mengukur besarnya pendapatan yang dihasilkan oleh setiap penduduk di suatu daerah. PDRB per kapita diperoleh dari hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh sektor ekonomi di suatu daerah (PDRB) dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun. Karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk berpengaruh terhadap nilai PDRB per kapita. Di sisi lain besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut.

Nilai PDRB per kapita Kabupaten Luwu atas dasar harga berlaku selama kurun waktu 2015-2019 menunjukkan bahwa pendapatan yang dihasilkan oleh setiap penduduk di daerah ini terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2015 PDRB per kapita di daerah ini sebesar Rp.29,59 juta per tahun, meningkat menjadi 43,25 juta per tahun pada tahun 2019. Peningkatan pendapatan per kapita tersebut sejalan dengan kontribusi kelompok konsumsi pengeluaran rumah tangga yang memberikan kontribusi terbesar yakni 58,93 di tahun 2018 dan 59,15 di tahun 2019. Kondisi ini menindikasikan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Luwu semakin meningkat.

Tabel 2.15.
Perkembangan PDRB Per Kapita Kabupaten Luwu Tahun 2015-2019

Uraian	PDRB Per Kapita Kabupaten Luwu				
	2015	2016	2017	2018	2019
Nilai PDRB (HB : Rp milyar)	10.362,55	11.855,84	13.026,82	14.441,93	15.657,62
Jumlah penduduk (jiwa)	350.218	353.277	356.305	359.209	362.027
PDRB perkapita (HB: Rp Juta/jiwa)	29,59	33,57	36,60	40,16	43,25

Sumber: BPS Kabupaten Luwu, Tahun 2020.

Grafik 2.4.
Perbandingan PDRB Per Kapita Kabupaten Luwu
dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan PDB Nasional
Tahun 2016-2020

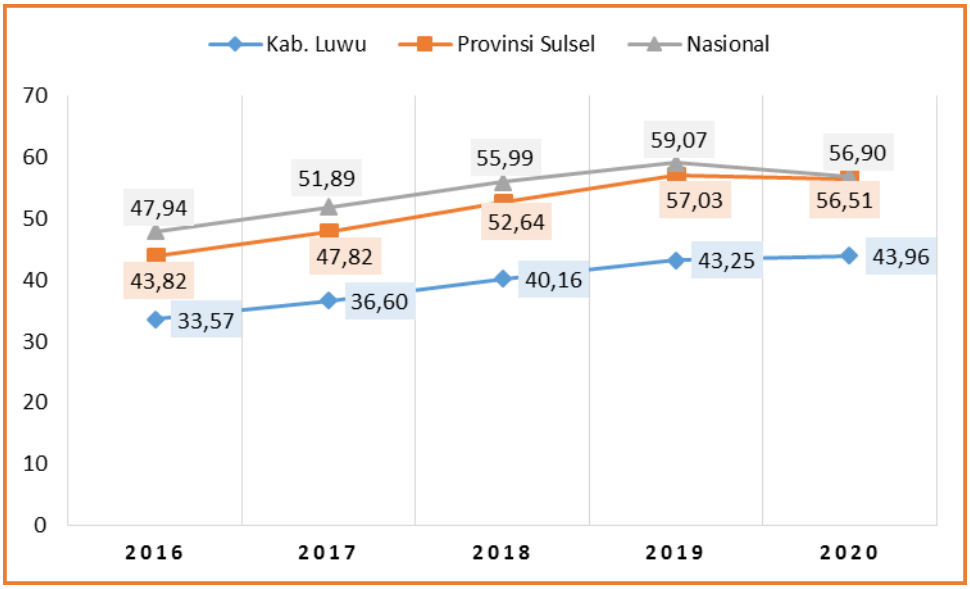

Sumber: BPS Tahun 2021

Pertumbuhan PDRB per kapita atas dasar harga berlaku Kabupaten Luwu selama periode 2016-2020 terus meningkat, namun masih dibawah capaian rata-rata PDRB per kapita Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional yang masing-masing sebesar Rp. 51,56 Juta per tahun dan Rp. 54,36 Juta per tahun.

2.2.4 Rasio Gini

Untuk melihat ketimpangan pendapatan penduduk, salah satu indikator yang sering dipakai adalah Rasio Gini. Ide dasar perhitungan Rasio Gini didasarkan pengukuran luas Kurva Lorenz yang menggambarkan distribusi pendapatan untuk seluruh kelompok pengeluaran. Nilai Rasio Gini berkisar antara 0 hingga 1. Semakin mendekati 1 maka dikatakan tingkat ketimpangan pendapatan penduduk makin melebar, atau mendekati

ketimpangan sempurna. Sebaliknya, semakin mendekati 0 distribusi pendapatan penduduk semakin merata, atau mendekati pemerataan sempurna. Todaro 1994 memberikan kriteria ketimpangan berdasarkan nilai Rasio gini sebagai berikut:

- Rasio gini < 0,35 : Kategori ketimpangan "rendah";
- Rasio gini 0,35 - 0,5 : Kategori ketimpangan "moderat"
- Rasio gini > 0,5 : Kategori ketimpangan "tinggi"

Nilai Rasio gini Kabupaten Luwu selama kurun waktu 2015-2019 mengalami fluktuasi, dimana nilai pada tahun 2016 lebih rendah dari tahun 2015 yaitu dari 0,361 menjadi 0,359. Tetapi pada tahun 2017 mengalami peningkatan menjadi 0,395. Salah satu penyebab meningkatnya ketimpangan pendapatan ini adalah turunnya nilai tukar rupiah terhadap US$ yang berdampak pada menurunnnya pendapatan masyarakat karena turunnya harga jual komoditas kakao, cengkeh, merica dan lain-lain yang menjadi mata pencaharian sebagian penduduk Kabupaten Luwu. Sedangkan pada tahun 2018-2019 berturut-turut mengalami penurunan yaitu dari 0,362 menjadi 0,352 sehubungan dengan kembali stabilnya nilai tukar rupiah terhadap US$. Perkembangan rasio gini Kabupaten Luwu dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Grafik 2.5.

Perkembangan Rasio gini
Tahun 2015-2019

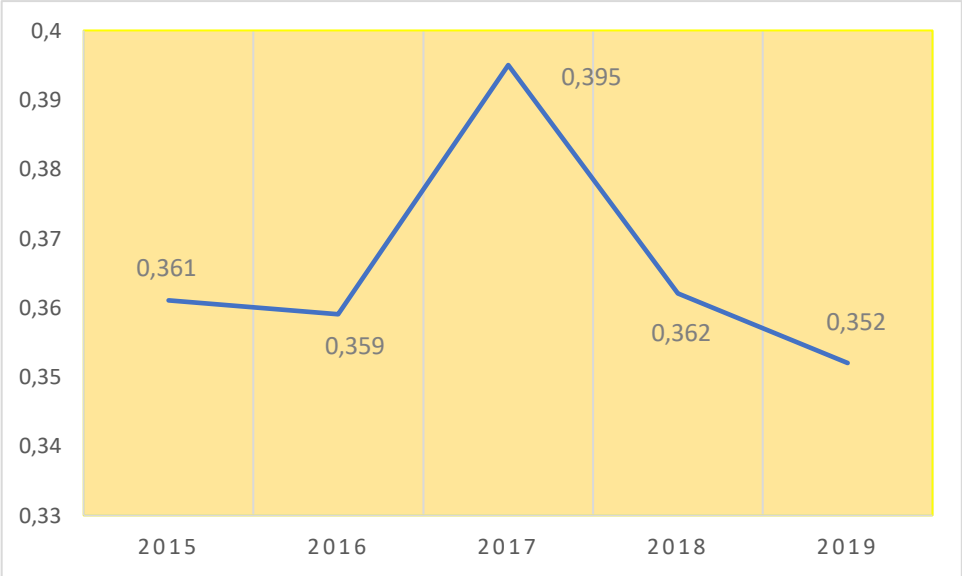

Sumber: Badan Pusat Statistik 2020.

Meskipun ada kecenderungan distribusi pendapatan daerah ini semakin baik, namun berdasarkan nilai Rasio gini yang dicapai ketimpangan pendapatan antar penduduk di daerah ini masuk dalam kategori "moderat".

Dibandingkan dengan Nasional dan Provinsi Sulawesi Selatan, nilai Rasio gini Kabupaten Luwu selama kurun waktu 2015-2019 relatif lebih rendah. Gambaran tersebut sekaligus menjelaskan bahwa ketimpangan pendapatan masyarakat di Kabupaten Luwu relatif lebih merata dibandingkan distribusi pendapatan rata-rata masyarakat Sulawesi Selatan dan Nasional. yang berarti ketimpangan pendapatan antar penduduk di daerah ini semakin membaik.

Grafik 2.6.

Perbandingan Rasio gini Kabupaten Luwu
dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2015-2019

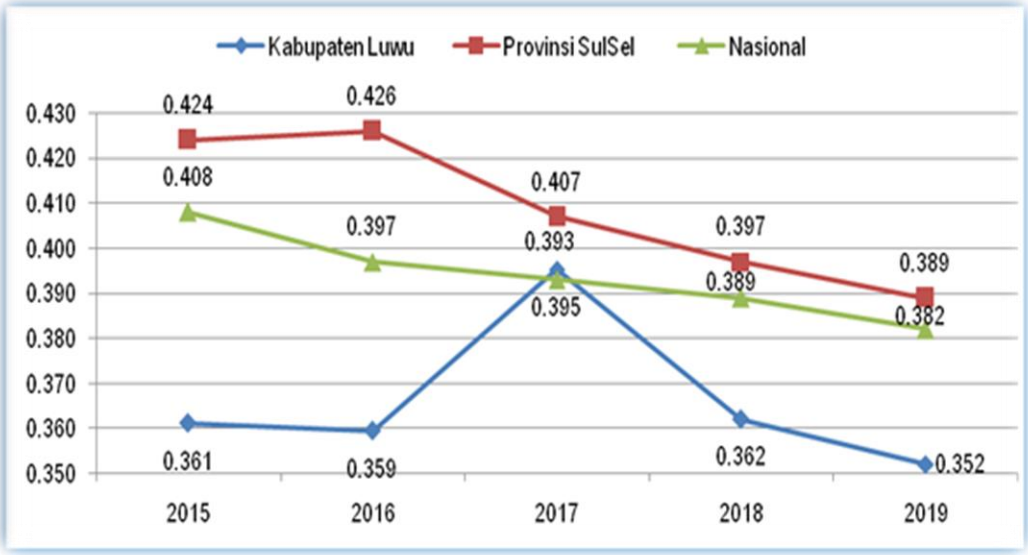

Sumber: BPS Tahun 2020.

2.2.5 Penduduk Diatas Garis Kemiskinan

Fenomena ketimpangan pendapatan dan kesejahteraan penduduk memang sudah menjadi hal yang biasa dalam perkembangan suatu wilayah. Salah satu ukuran dalam melihat peningkatan kesejahteraan penduduk dalam konteks ekonomi adalah apabila pendapatan penduduk suatu wilayah meningkat. Namun demikian meningkatnya pendapatan penduduk ini seharusnya merata dan dirasakan semua tingkat sosial masyarakat. Hal ini berarti bahwa aspek pemerataan pendapatan merupakan hal yang penting untuk dipantau, karena pemerataan pendapatan merupakan ukuran keberhasilan hasil pembangunan. Ketimpangan dalam menikmati hasil pembangunan diantara kelompok-kelompok penduduk dikhawatirkan akan menimbulkan masalah-masalah sosial.

Permasalahan kemiskinan masih menjadi salah satu tugas yang harus diselesaikan oleh pemerintah, tidak terkecuali juga bagi Pemerintah Kabupaten Luwu. Bermacam-macam program pengentasan kemiskinan yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun swasta diharapkan akan dapat

terus menekan angka kemiskinan sampai pada tingkat yang serendah-rendahnya. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilo kalori per kapita perhari. Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan.

Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran konsumsi per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Misal, Garis Kemiskinan Kabupaten Luwu tahun 2019 adalah sebesar Rp.318.911,00 artinya penduduk Kabupaten Luwu yang memiliki rata-rata pengeluaran konsumsi per kapita per bulan sebesar Rp.318.911,00 dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Grafik 2.7.

Garis Kemiskinan Kabupaten Luwu dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2015-2019

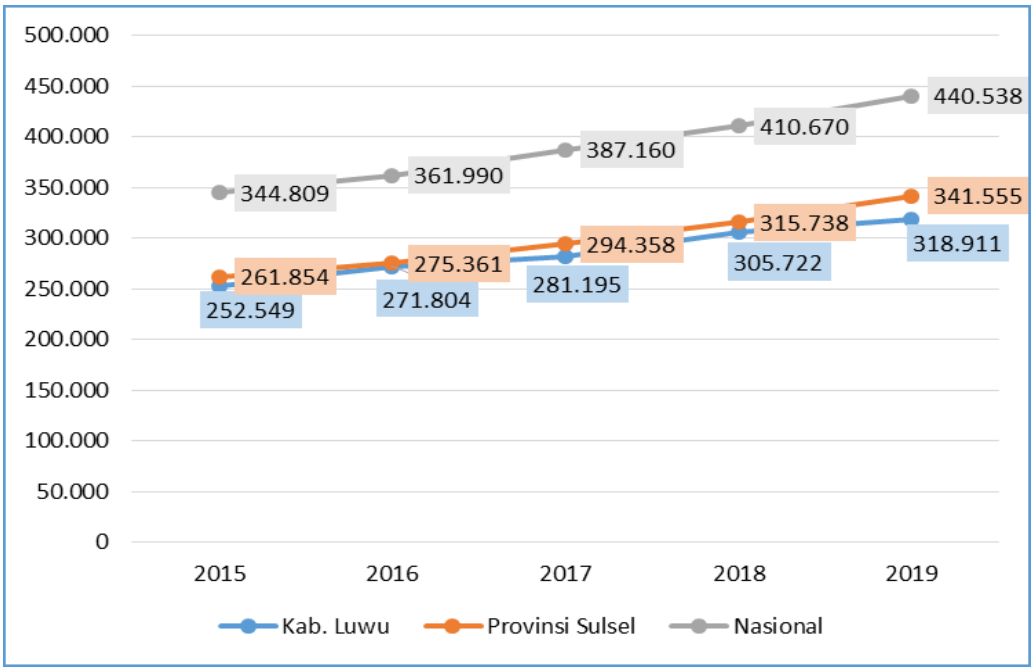

Sumber : BPS Tahun 2020.

Dalam kurun waktu 2 tahun, jumlah penduduk miskin Kabupaten Luwu berhasil diturunkan dari 49.810 jiwa atau 13,98% pada tahun 2017 menjadi 47.990 jiwa atau 13,36% pada tahun 2018 dan menjadi 46.180 jiwa atau 12,78% pada tahun 2019. Hal ini berarti bahwa pendapatan perkapita penduduk miskin mengalami peningkatan karena penentuan kategori miskin ditentukan oleh pendapatan masyarakat. Semakin tinggi penduduk miskin menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di suatu wilayah juga tinggi.

Pemerintah Kabupaten Luwu telah mengambil berbagai kebijakan dalam rangka mengentaskan kemiskinan, di antaranya adalah melalui

program pemberdayaan potensi Desa/Kelurahan, pemberian fasilitas dan kemudahan untuk UMKM, fasilitas Koperasi, serta pendirian Pusat Pelayanan Perizinan Terpadu (P2T) dengan tujuan menarik investor untuk menanamkan modalnya dan program-program anti kemiskinan yang sifatnya target sasaran (jaring-jaring pengaman sosial, seperti raskin, PKH, Jamkesmas, dll.). Semakin tingginya investasi diharapkan dapat membuka lapangan kerja baru yang dapat menyerap angkatan kerja sehingga dapat menurunkan kemiskinan.

2.2.6 Indeks Pembangunan Manusia

Salah satu alat ukur yang dianggap dapat merefleksikan status pembangunan manusia adalah Human Development Index (HDI) atau IPM. IPM merupakan suatu indeks komposit yang mencakup tiga bidang pembangunan manusia yang dianggap sangat mendasar yaitu usia hidup (*longevity*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent living*).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengetahui status kemampuan dasar penduduk, meliputi: Angka Harapan Hidup (AHH) untuk mengukur peluang hidup; rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf untuk mengukur status tingkat pendidikan; serta pengeluaran per kapita untuk mengukur akses terhadap sumberdaya untuk mencapai standar hidup layak.

Tabel 2.16.
Komponen IPM Kabupaten Luwu Tahun 2015-2019

Komponen IPM	Satuan	Capaian				
		2015	2016	2017	2018	2019
Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	69,44	69,52	69,60	69,84	70,19
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	12,88	13,27	13,28	13,30	13,32
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	7,74	7,75	7,89	7,97	8,15
Paritas Daya Beli (PPP)	-	9.160,00	9.301,00	9.381,00	9.705,00	10.085,00
IPM	-	68,11	68,71	69,02	69,60	70,39
Pertumbuhan IPM	%	0,77	0,60	0,31	0,58	0,79
Ranking Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan	-	9	9	9	9	9

Sumber: Data Diolah, BPS Kabupaten Luwu Dalam Angka, Tahun 2020.

Angka IPM memberikan gambaran komprehensif mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh suatu negara/daerah. Semakin tinggi

nilai IPM suatu negara/daerah, menunjukkan pencapaian pembangunan manusianya semakin baik.

IPM Kabupaten Luwu dari tahun ke tahun kondisinya selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2015 IPM Kabupaten Luwu adalah 68,11 meningkat menjadi 70,39 pada tahun 2019 atau mengalami peningkatan sebesar 2,28 poin. Hal tersebut menunjukkan terjadinya peningkatan kualitas hidup manusia di Kabupaten Luwu. Dengan tingkat IPM sebesar 70,39 dikategorikan dalam IPM tinggi. Namun demikian, IPM Kabupaten Luwu sepanjang periode tahun 2015-2019 masih berada dibawah angka IPM Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional. Adapun indeks pendidikan Kabupaten Luwu pada tahun 2019 adalah 64,17.

Grafik 2.8.

Perbandingan IPM Kabupaten Luwu
dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, Tahun 2015-2019

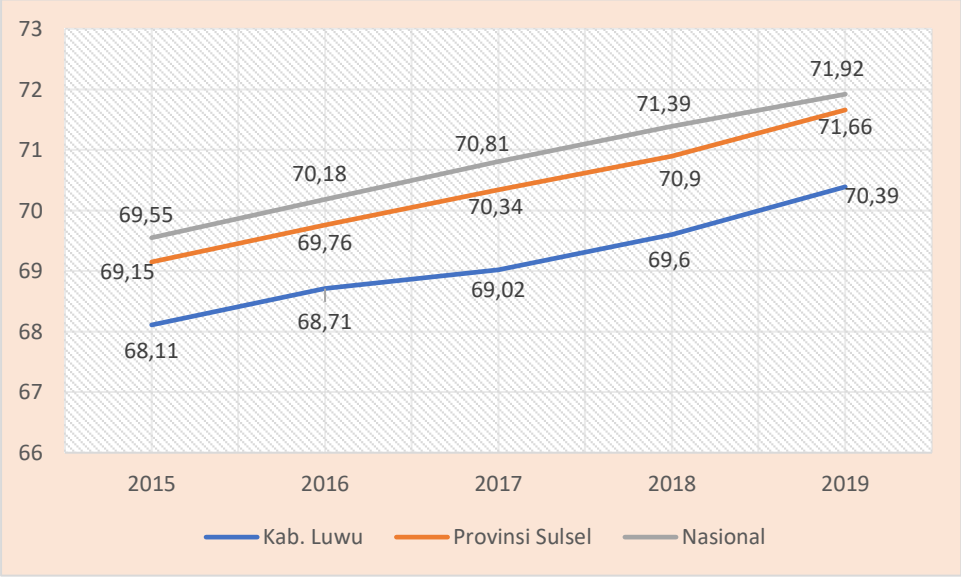

Sumber: Data Diolah, BPS Kabupaten Luwu Dalam Angka, 2020.

Pemerintah Kabupaten Luwu perlu terus mendorong peningkatan IPM. Peningkatan IPM merupakan hasil pencapaian pembangunan dalam bidang pendidikan, kesehatan dan perekonomian untuk jangka waktu yang panjang. Peningkatan IPM perlu diupayakan melalui perubahan pola pikir manusia, yaitu perubahan untuk semakin berperilaku hidup bersih dan sehat (bidang kesehatan), peningkatan intelektual (bidang pendidikan) dan peningkatan kemampuan bersaing secara ekonomi (bidang ekonomi).

2.2.7 Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)

Angka harapan lama sekolah didefinisikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka HLS dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Luwu selama periode tahun 2015 - 2019 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2015 Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Luwu mencapai 12,88 tahun, kemudian meningkat menjadi 13,32 tahun pada tahun 2019. Hal ini berarti bahwa saat ini infrastruktur pendidikan di Kabupaten Luwu semakin memadai dan pendapatan per kapita masyarakat juga meningkat tiap tahunnya.

Grafik 2.9.

Harapan Lama Sekolah Kabupaten Luwu Tahun 2015-2019

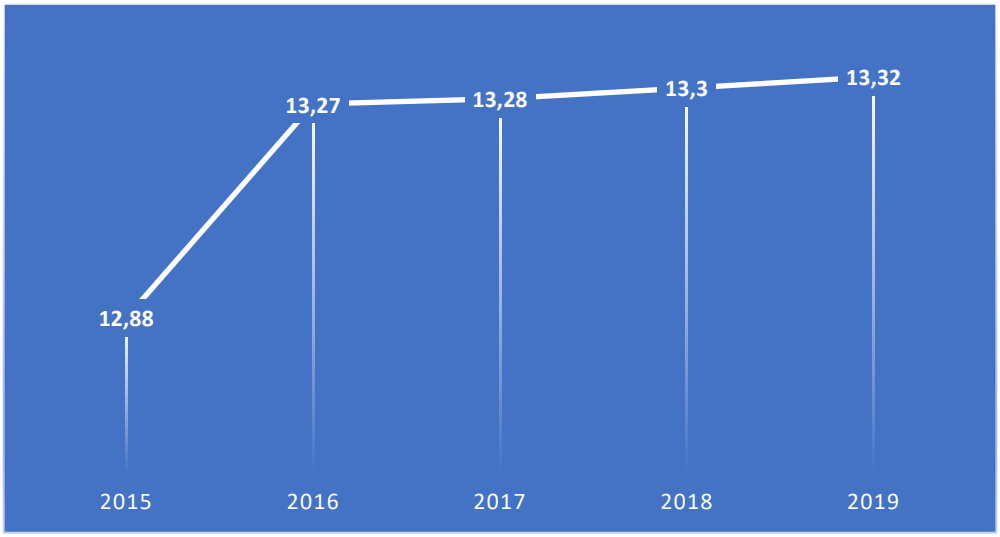

Sumber : Data Diolah, BPS Tahun 2020.

2.2.8 Angka Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah (RLS)/*Mean Years School* (MYS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Penduduk yang tamat SD diperhitungkan lama sekolah selama 6 tahun, tamat SMP diperhitungkan lama sekolah selama 9 tahun, tamat SMA diperhitungkan lama sekolah selama 12 tahun tanpa memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak. RLS dapat

digunakan untuk mengetahui kualitas pedididikan masyarakat dalam suatu wilayah.

Perkembangan rata-rata lama sekolah penduduk di Kabupaten Luwu menunjukkan angka yang semakin meningkat. Pada tahun 2015 rata-rata lama sekolah penduduk di daerah ini sebesar 7,74 tahun, kemudian meningkat menjadi 8,15 tahun pada tahun 2019. Hal ini berarti bahwa saat ini penduduk Kabupaten Luwu memiliki pendidikan formal hanya setara dengan duduk dibangku kelas dua SMP. Dibandingkan dengan capaian rata-rata lama sekolah penduduk Sulawesi Selatan yang pada tahun 2019 mencapai 8,26 tahun, menunjukkan bahwa pencapaian rata-rata lama sekolah penduduk di Kabupaten Luwu relatif lebih rendah dibandingkan dengan capaian pendidikan penduduk Sulawesi Selatan pada umumnya. Sedangkan apabila dibandingkan dengan Nasional, RLS Kabupaten Luwu selalu di bawah angka nasional, yang pada tahun 2019 mencapai 8,34 tahun.

Grafik 2.10.

Perbandingan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Luwu dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, Tahun 2015-2019

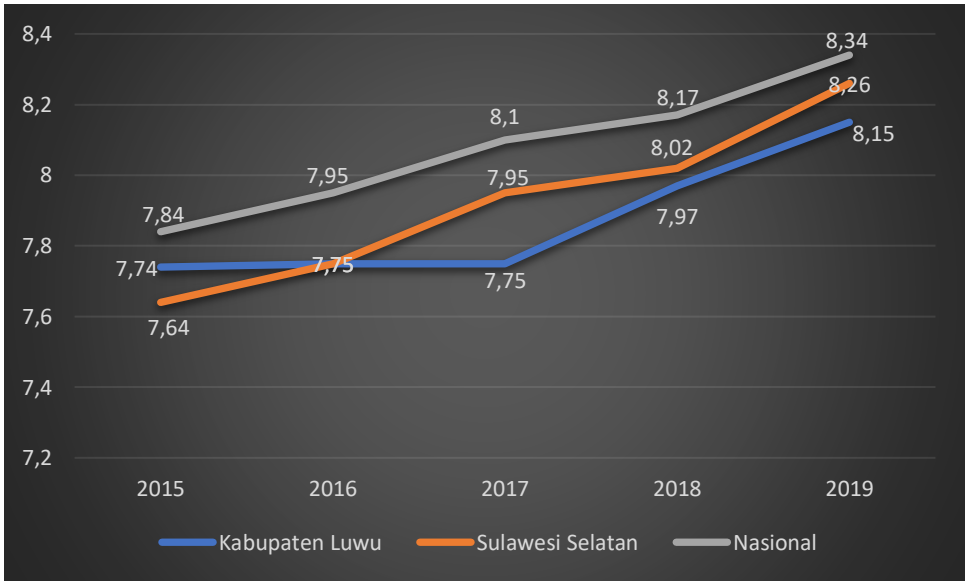

Sumber: Data Diolah, BPS Tahun 2020.

Persoalan RLS ini perlu mendapat perhatian semua pihak, mengingat keberhasilan dunia pendidikan merupakan salah satu amanat konstitusi yang harus diwujudkan.

2.2.9 Usia Harapan Hidup

Angka Usia Harapan Hidup mengindikasikan peluang bayi yang baru lahir akan mencapai usia harapan hidup hingga tahun tertentu. Tingkat kesehatan di suatu negara salah satunya dapat dilihat dari besarnya usia harapan hidup penduduknya. AHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat, semakin tinggi capaian angka harapan hidup penduduk disuatu wilayah, maka derajat kesehatan penduduk di daerah tersebut juga tinggi.

Membaiknya kondisi kesehatan masyarakat Kabupaten Luwu telah diiringi dengan peningkatan Angka Harapan Hidup. Angka Harapan Hidup Kabupaten Luwu dalam kurun waktu Tahun 2015 sampai dengan 2019 semakin lama semakin meningkat hingga mencapai menjadi 70,19 tahun. Angka ini berarti bahwa setiap bayi yang lahir pada Tahun 2019 memiliki harapan untuk hidup hingga usia mencapai 70,19 tahun. Peningkatan Angka Harapan Hidup di Kabupaten Luwu ini sangat dipengaruhi beberapa faktor, antara lain semakin baiknya akses pelayanan kesehatan bagi semua kelompok masyarakat, perilaku hidup sehat oleh masyarakat luas dan disertai semakin baiknya kondisi sosial ekonomi masyarakat disertai dukungan peningkatan kesehatan lingkungan, meskipun angka kelangsungan hidup bayi belum pernah mencapai 100%. Adapun indeks kesehatan Kabupaten Luwu pada tahun 2019 adalah 77,22.

Tabel 2.17.
Angka Harapan Hidup Kabupaten Luwu Tahun 2015-2019

No	Indikator	Capaian				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Angka Kelangsungan Hidup Bayi (%)	99,21	99,19	98,87	98,93	99,90
2	Angka usia Harapan Hidup (Tahun)	69,44	69,52	69,60	69,84	70,19

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu 2020.

2.2.10 Balita Gizi Buruk

Persentase balita gizi buruk merupakan perbandingan dari jumlah balita gizi buruk berdasarkan kriteria berat badan per umur dan jumlah balita yang ditimbang. Perhitungan ini berguna untuk mengetahui berapa persentase balita gizi buruk di suatu wilayah. Balita yang mengalami gizi buruk di Kabupaten Luwu periode tahun 2015-2019 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2015, balita gizi buruk sebesar 0,04%, meningkat menjadi 0,08% pada tahun 2016. Angka ini menurun pada tahun 2017 menjadi 0,05%, kemudian menurun menjadi 0,03% pada tahun 2018 dan tahun 2019.

Grafik 2.11.
Perkembangan Balita Gizi Buruk
Tahun 2015-2019

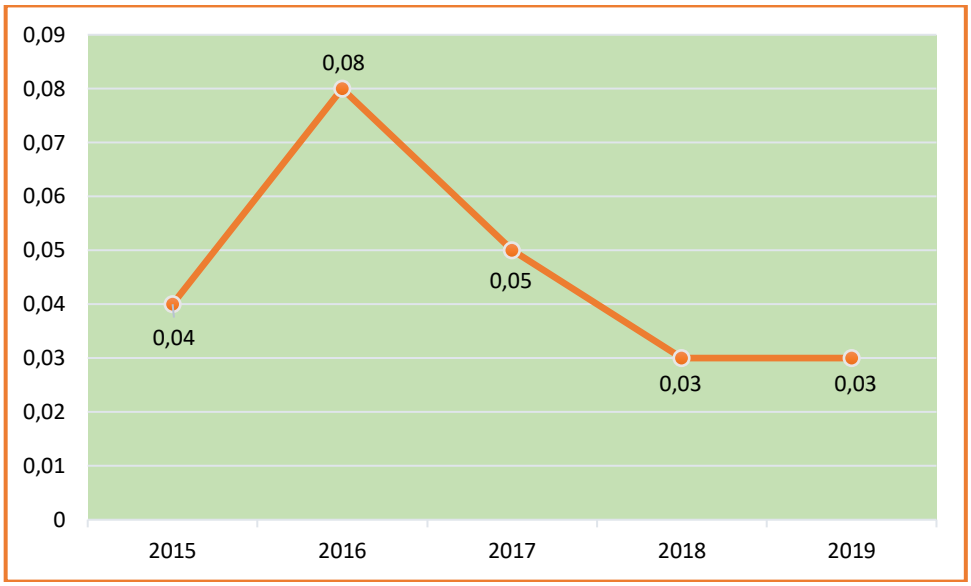

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu 2020.

Peningkatan persentase balita gizi buruk pada tahun 2015 dan tahun 2016 dari tahun sebelumnya disebabkan pendataan yang lebih baik setelah adanya kebijakan untuk melakukan pendataan kepada seluruh desa, yang sebelumnya hanya pasif menunggu laporan. Sedangkan penurunan persentase pada tahun 2017, 2018 dan 2019 adalah akibat adanya perbaikan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat di Kabupaten Luwu.

2.2.11 Balita Gizi Kurang

Kurang gizi berarti tubuh dalam kondisi kekurangan nutrisi penting yang diperlukan, baik makanan-makanan sumber kalori, vitamin ataupun mineral. Apabila hal ini terus dibiarkan maka status gizi bisa jatuh menjadi gizi buruk yang dapat menyebabkan kelemahan dan kerusakan pada fungsi vital tubuh. Persentase balita gizi kurang di Kabupaten Luwu tahun 2015-2018 cenderung mengalami kenaikan, dimana pada tahun 2015 sebesar 2,09% meningkat menjadi 6,50% pada tahun 2017. Pada tahun 2018 angka tersebut menurun menjadi 5,90%. Peningkatan balita gizi kurang terjadi karena minimnya pengetahuan orang tua tentang nutrisi yang tepat untuk balita. Hal ini menandakan balita gizi kurang di Kabupaten Luwu masih perlu mendapat perhatian dan penanganan yang baik agar dapat mewujudkan kehidupan yang sehat dan sejahtera di masa-masa mendatang.

Grafik 2.12.
Perkembangan Balita Gizi Kurang
Tahun 2015-2019

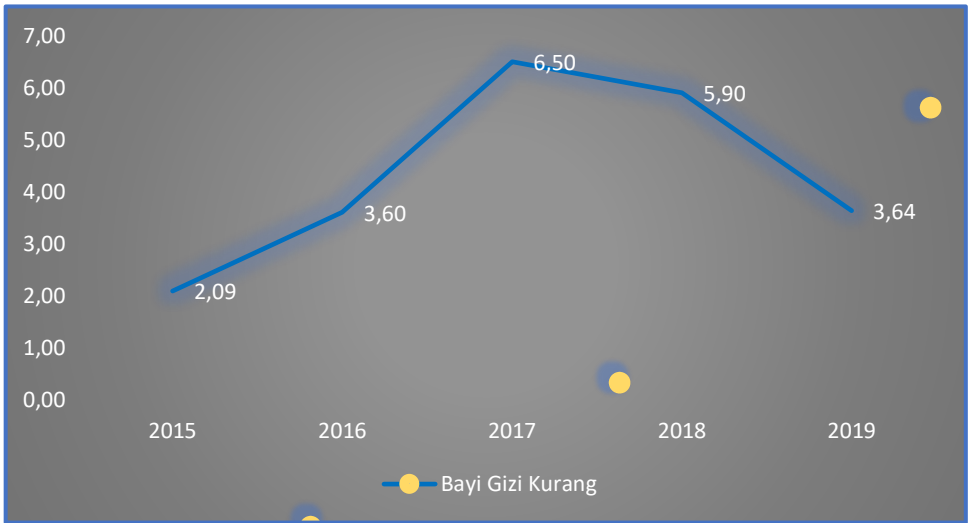

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu 2020.

2.2.12 Desa Siaga Aktif

Suatu kelurahan/desa dikatakan sebagai kelurahan/desa siaga aktif jika memenuhi indikator sebagai berikut:

1. penduduknya dapat mengakses pelayanan kesehatan dasar (Yankesdas) setiap hari;
2. penduduknya dapat mengembangkan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarat (UKBM);
3. melaksanakan Surveilance Berbasis Masyarakat (SBM);
4. penduduk dapat memahami dan mengatasi kedaruratan kesehatan;
5. penduduk dapat memahami cara penanggulangan bencana; dan
6. masyarakat menerapkan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS).

Cakupan desa siaga aktif di Kabupaten Luwu sejak tahun 2014 sudah mencapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa telah tumbuh kesadaran masyarakat desa/ kelurahan untuk aktif dalam upaya-upaya peningkatan derajat kesehatan diri sendiri dan lingkungan sekitarnya. Kondisi ini merupakan suatu keberhasilan daerah di dalam menyelenggarakan urusan kesehatan. Namun demikian, seyogyanya pencapaian ini lebih dimaknai sebagai pendorong untuk lebih meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat di Kabupaten Luwu.

2.2.13 Partisipasi Angkatan Kerja

Ukuran yang menunjukkan seberapa besar penduduk usia kerja terlibat dalam kegiatan ekonomi dapat dilihat pada Tingkat Partisipasi

Angkatan Kerja(TPAK). TPAK merupakan rasio antara angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. Semakin besar TPAK semakin baik karena menunjukkan lebih banyak penduduk yang masuk dalam golongan angkatan kerja. Dengan demikian semakin banyak pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk dapat meningkatkan perekonomian.

Berdasarkan data ketenagakerjaan Kabupaten Luwu selama kurun waktu 2015-2019, terlihat bahwa TPAK di daerah ini mengalami fluktuasi. Pada Tahun 2015, sebesar 60,78%, artinya dari 100 penduduk yang berusia 15 tahun ke atas terdapat 60 hingga 61 orang termasuk dalam golongan angkatan kerja. Selanjutnya pada tahun 2018 menurun menjadi 61,78 dan selanjutnya meningkat hingga mencapai 64,69% pada tahun 2019.

Tabel 2.18.
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
Tahun 2015-2019

Tahun	Penduduk Usia Kerja (Jiwa)	Angkatan Kerja 15 tahun Keatas (Jiwa)	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)
2015	234.992	142.839	60,78
2016	n.a	n.a	n.a
2017	241.127	155.978	64,69
2018	243.947	150.725	61,78
2019	246.707	159.605	64,69

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab.Luwu Tahun 2020.

Peningkatan TPAK periode tahun 2015-2019 dipengaruhi oleh adanya kebijakan pemerintah yaitu memberikan program yang menciptakan kualitas sumber daya manusia masyarakat kabupaten Luwu melalui anggaran dana desa. Sehingga menyebabkan penduduk desa/penduduk lokal yang tadinya bukan termasuk golongan angkatan kerja menjadi golongan angkatan kerja dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut.

2.2.14 Pengangguran Terbuka

Salah satu indikator keberhasilan pemerintah dalam bidang ekonomi dapat dilihat dari rendahnya tingkat pengangguran. Semakin rendah tingkat pengangguran maka akan menunjukkan semakin sejahteranya masyarakat dan stabilnya pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Selain itu, tingkat pengangguran yang rendah menyebabkan rata-rata pendapatan masyarakat meningkat.

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kabupaten Luwu periode 2015-2019 menunjukkan trend yang menurun. Pada tahun 2015, TPT Kabupaten Luwu adalah sebesar 7,86%, menurun menjadi 4,38% pada tahun 2019. Penurunan TPT dibarengi dengan peningkatan TPAK. Hal ini berarti

Kabupaten Luwu menunjukkan tingkat keberhasilan dalam program ketenagakerjaan, karena peningkatan TPAK mengindikasikan bahwa terjadi peningkatan penduduk usia kerja yang aktif di pasar tenaga kerja. Oleh karena itu, pemerintah harus tetap memperhatikan tingkat pengangguran Kabupaten Luwu agar tidak terjadi peningkatan kembali.

Tabel 2.19.
Tingkat Pengangguran Terbuka
Tahun 2015-2019

No	INDIKATOR	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	62,50	NA	64,69	61,79	64,69
2	Bekerja	Jiwa	131.615	NA	148.516	151.284	152.169
3	Tingkat Pengangguran Terbuka(TPT)	%	7,86	NA	4,78	3,59	4,38
4	Jumlah Penduduk Usia Kerja	Jiwa	234.992	NA	241.127	243.947	246.707

Sumber: Disnakertrans Kab.Luwu, 2020.

Selama periode 2015 sampai dengan 2019 jumlah penduduk usia kerja di Kabupaten Luwu cenderung meningkat. Pada tahun 2015, penduduk angkatan kerja di Kabupaten Luwu ada sebanyak 234.992 jiwa, kemudian pada tahun 2019 menjadi sebanyak 246.707 jiwa. Hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah agar bisa membuka lapangan pekerjaan bagi penduduk usia kerja agar menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas.

Grafik 2.13.
Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Luwu dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2016-2020

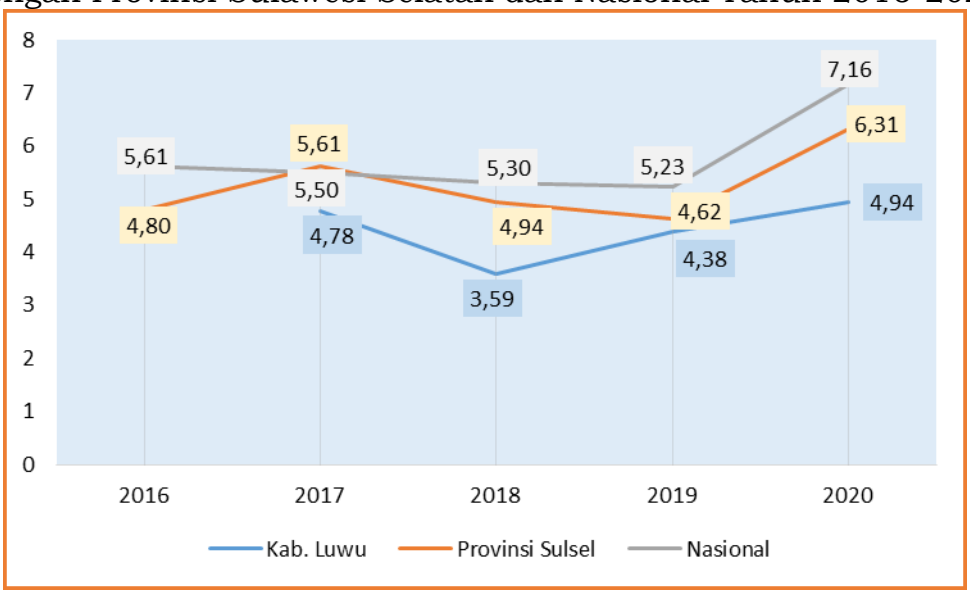

Sumber: BPS Tahun 2021

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) Kabupaten Luwu selama periode 2016-2020 cenderung rendah dengan rata-rata 4,42% per tahun

dibandingkan dengan TPT Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional yang masing-masing sebesar 5,26% per tahuna dan 5,76% per tahun.

Tabel 2.20.
Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin
Tahun 2019

No	INDIKATOR	Satuan	Laki-Laki	Perempuan
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	89,23	53,87
2	Bekerja	Jiwa	92.720	59.449
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	4,66	4,67
4	Jumlah Penduduk Usia Kerja	Jiwa	108.947	115.762

Sumber: Disnakertrans Kab.Luwu, 2020.

Tabel di atas menunjukkan bahwa TPAK penduduk laki-laki lebih besar dari TPAK penduduk perempuan, yang artinya lebih banyak penduduk laki-laki yang terlibat atau berusaha terlibat dalam kegiatan produktif dibandingkan penduduk perempuan. Penduduk perempuan memiliki TPAK yang lebih rendah dikarenakan banyak perempuan yang lebih mengurus rumah tangga dibandingkan bekerja atau mencari pekerjaan.

Dampak krisis global yang mencapai puncaknya pada tahun 2015 yang lalu sangat dirasakan oleh seluruh negara di dunia dan tidak terkecuali negara Indonesia yang ditunjukkan dengan adanya perlambatan pertumbuhan ekonomi. Melemahnya perekonomian secara global tak urung membuat ekspor Indonesia juga ikut menjadi lesu dan sangat mempengaruhi iklim investasi di Indonesia. Hal ini menyebabkan pada tahun 2015 tercatat bahwa terjadi penambahan jumlah penganggur di kabupaten Luwu sebanyak 7,86%.

Selain hal di atas, permasalahan lain yang mempengaruhi tingkat pengangguran di kabupaten Luwu adalah:

1. Minimnya informasi tentang tenaga kerja yang tersedia maupun kebutuhan dunia usaha dari sisi kualitas tenaga kerja termasuk di dalamnya tentang kondisi tenaga kerja di kabupaten Luwu yang dapat dikatakan relatif masih rendah yang tercermin dari kualitas pendidikan yang dimiliki oleh tenaga kerja;
2. Kurangnya keterampilan masyarakat dalam pekerjaan;
3. Masih adanya kesenjangan antara *supply* tenaga kerja yang tersedia dengan *demand* atau kebutuhan perusahaan/usaha;
4. Rendahnya kualitas tenaga kerja dan rendahnya permintaan (pasar) tenaga kerja;
5. Tingginya konflik ketenagakerjaan dalam penentuan UMK dan masih rendahnya perlindungan bagi tenaga kerja; dan

6. Kurang optimalnya pengawasan terhadap ketenagakerjaan (lembaga/ perusahaan, dan pekerja).

2.2.15 Penduduk yang Bekerja

Penduduk bekerja adalah penduduk dari kelompok angkatan kerja yang melakukan kegiatan pekerjaan paling sedikit satu jam berturut-turut selama seminggu dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan. Pekerja keluarga yang tidak dibayar termasuk kelompok penduduk yang bekerja.

Rasio penduduk bekerja yang diukur dari perbandingan penduduk bekerja dengan jumlah penduduk angkatan kerja di Kabupaten Luwu memperlihatkan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2015 rasio penduduk bekerja di daerah ini adalah 0,9214, meningkat menjadi 0,9534 pada tahun 2019. Meningkatnya rasio penduduk bekerja di daerah ini dalam lima tahun terakhir menunjukkan bahwa adanya peningkatan kesempatan kerja yang tersedia di daerah ini untuk memberikan penghidupan yang layak bagi penduduknya.

Tabel 2.21.
Rasio Penduduk Yang Bekerja
Tahun 2015 – 2019

No	Tahun	Uraian		Rasio
		Penduduk yang bekerja	Angkatan kerja	
1	2015	131.615	142.839	0,9214
2	2016	n.a	n.a	n.a
3	2017	148.516	155.978	0,9522
4	2018	144.859	150.725	0,9611
5	2019	152.169	159.605	0,9534

Sumber : BPS, Tahun 2020.

2.2.16 Pertumbuhan PDRB per Tenaga Kerja

PDRB per tenaga kerja merupakan indikator yang merepresentasikan produktivitas tenaga kerja. PDRB per tenaga kerja yang diukur dari rasio antara PDRB harga berlaku dengan jumlah penduduk bekerja merupakan besarnya nilai tambah berdasarkan harga berlaku yang diciptakan oleh setiap penduduk bekerja selama satu tahun. Indikator ini sekaligus menggambarkan besar pendapatan yang diterima setiap satu penduduk bekerja sesuai harga berlaku pada tahun analisa. Sedangkan laju pertumbuhan PDRB per tenaga kerja adalah rata-rata laju pertumbuhan PDRB per kapita tenaga kerja dalam periode waktu tertentu. PDRB yang digunakan adalah PDRB atas dasar harga konstan, sedangkan data tenaga

kerja yang diperlukan adalah jumlah orang yang bekerja. Indikator ini juga dapat digunakan untuk melihat tingkat produktivitas tenaga kerja.

Dapat dilihat pada tabel 2.24. yang menjelaskan tentang PDRB per tenaga kerja, bahwa tahun 2015-2019 menunjukkan jumlah tenaga kerja meningkat secara terus-menerus yaitu dari 131.615 orang menjadi 159.605 orang. Sehingga PDRB per tenaga kerja mencapai 60,96% pada tahun 2019. Hal ini mengindikasikan bahwa tenaga kerja di Kabupaten Luwu telah menghasilkan nilai tambah untuk perekonomian daerah.

Tabel 2.22.
PDRB per Tenaga Kerja
Tahun 2015 – 2019

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (Rp Juta)	7.437.417,27	8.023.365,31	8.567.872,02	9.155.576,30	9.728.969,45
2	Jumlah tenaga kerja (Jiwa)	131.615	n.a	148.516	151.284	159.605
PDRB per tenaga kerja (Rp Juta)		**56,51**	**n.a**	**57,69**	**60,51**	**60,96**

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab.Luwu Tahun 2020.

2.2.17 Kesempatan Kerja Penduduk Usia 15 tahun ke atas

Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun keatas, merupakan Persentase penduduk yang bekerja terhadap penduduk usia kerja 15 tahun keatas. Semakin tinggi rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun keatas, berarti semakin tinggi kesempatan kerja yang tersedia disuatu daerah.

Berdasarkan data ketenagakerjaan Kabupaten Luwu, selama kurun waktu 2015-2019, penduduk bekerja mengalami fluktuasi sedangkan penduduk usia kerja 15 tahun keatas menunjukkan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2015 penduduk usia 15 tahun keatas yang tersedia di daerah ini berjumlah 234.992 jiwa, meningkat menjadi 246.707 jiwa pada tahun 2019. Sedangkan untuk penduduk bekerja, meningkat dari 131.615 jiwa pada tahun 2015 menjadi 148.516 jiwa pada tahun 2017. Selanjutnya, pada tahun 2018 menurun menjadi 144.859 jiwa dan meningkat kembali menjadi 152.169 jiwa pada tahun 2019.

Fluktuasi jumlah penduduk bekerja dan jumlah penduduk usia kerja 15 tahun keatas tersebut berpengaruh terhadap rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun keatas. Pada tahun 2015 rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun keatas adalah sebesar 56,01%, artinya dari 100 penduduk usia 15 tahun keatas yang tersedia,

sebanyak 56 orang merupakan penduduk bekerja. Selanjutnya pada tahun 2019 rasio penduduk bekerja terhadap penduduk usia 15 tahun keatas meningkat menjadi 61,68% yang berarti hanya 61 orang hingga 62 orang penduduk di Kabupaten Luwu yang bekerja untuk memproduksi barang dan jasa, dari 100 penduduk usia 15 tahun keatas yang tersedia. Uraian tersebut sekaligus mengindikasikan bahwa dalam kurun waktu 2015-2019 kesempatan kerja yang tersedia di daerah ini mengalami perluasan, meskipun belum signifikan. Karena itu, sejumlah kebijakan diperlukan untuk mendukung perluasan kesempatan kerja.

Tabel 2.23.
Rasio Kesempatan Kerja Terhadap Penduduk Usia 15 Tahun ke atas
Tahun 2015 - 2019

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	Kesempatan kerja (Jiwa)	131.615	n.a	148.516	144.859	152.169
2	Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas (Jiwa)	234.992	n.a	241.127	243.947	246.707
Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun keatas		**56,01**	**n.a**	**61,59**	**59,38**	**61,68**

Sumber: Keadaan Angkatan Kerja Sulawesi Selatan, 2020.

Untuk meningkatkan kesempatan kerja, berbagai upaya dapat dilakukan di Kabupaten Luwu mengingat potensi untuk pengembangan industri besar sangat memungkinkan untuk direalisasikan di masa datang.

2.2.18 Tenaga Kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas

Indikator proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja, diukur dengan membandingkan penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja baik berstatus berusaha sendiri, pekerja bebas dan pekerja keluarga terhadap total penduduk 15 tahun ke atas yang bekerja (dinyatakan dalam format persentase). Indikator bertujuan untuk melihat proporsi penduduk bekerja yang memiliki pekerjaan pada kegiatan informal. Pengertian proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja, sebagai indikator pekerja informal sedikit berbrbeda dengan dengan definisi pekerja informal yang dijelaskan dalam Kepmen Ketenagakerjaan RI No. 206 Tahun 2017 tentang pedoman pengukuran indeks pembangunan ketenagakerjaan, bahwa Penduduk yang bekerja secara Informal adalah penduduk yang bekerja dengan status pekerjaan utama sebagai berusaha sendiri, berusaha dengan dibantu pekerja tidak tetap, pekerja bebas di pertanian, pekerja bebas di non-pertanian dan pekerja keluarga/pekerja tidak dibayar.

Tabel 2.24.
Proporsi Penduduk 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan
Terhadap Total Kesempatan Kerja, Tahun 2015-2019

No	Status Pekerjaan	Proporsi Penduduk 15 tahun keatas yang bekerja menurut status pekerjaan				
		2015	2016	2017	2018	2019
A	**Tenaga Kerja Formal**	**24,84**	**n.a**	**24,09**	**25,39**	**30,07**
1	Buruh/Karyawan/Pegawai	20,35	n.a	22,08	22,77	27,32
2	Berusaha dibantu buruh tetap/dibayar	4,49	n.a	2,01	2,61	2,75
B	**Tenaga Kerja Informal**	**75,16**	**n.a**	**75,91**	**74,62**	**70,02**
1	Berusaha Sendiri (BS)	27,26	n.a	23,07	22,76	22,32
2	Berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar	21,06	n.a	24,11	21,88	17,55
3	Pekerja bebas (PB)	2,49	n.a	3,65	6,15	8,94
4	Pekerja keluarga/tidak dibayar (PK)	24,35	n.a	25,08	23,83	21,21
C	**Total Penduduk Bekerja**	**100,00**	**n.a**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
D	**Berusaha Sendiri + Pek Bebas + Pek Keluarga**	**54,10**	**n.a**	**51,80**	**52,74**	**52,47**

Sumber: Keadaan angkatan kerja Sulawesi Selatan, 2020.

Perkembangan proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja di Kabupaten Luwu baik berstatus berusaha sendiri (BS), pekerja bebas (PB), dan pekerja keluarga (PK) terhadap total kesempatan kerja, serta perkembangan proporsi penduduk bekerja sebagai tenagakerja formal dan informal disajikan pada tabel berikut.

Berdasarkan tabel yang disajikan di atas, terlihat bahwa proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja di Kabupaten Luwu dengan status berusaha sendiri (BS), pekerja bebas (PB), dan pekerja keluarga (PK) terhadap total kesempatan kerja selama kurun waktu 2015-2019 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2015, proporsi tersebut sebesar 54,10% dan menurun menjadi 51,80% pada tahun 2017. Tetapi kembali meningkat pada tahun 2018 menjadi 52,74% dan terjadi penurunan sebesar 0,27 poin pada tahun 2019. Secara keseluruhan, proporsi penduduk 15 tahun keatas yang bekerja sebagai tenaga kerja informal mengalami penurunan, dimana dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 mengalami peningkatan dari 75,16% menjadi 75,91%, tetapi menurun menjadi 70,62% pada tahun 2019. Gambaran tersebut sekaligus menjelaskan bahwa proporsi pekerja formal di daerah ini relatif kecil yakni hanya 30,07% dari total Kesempatan Kerja di Kabupaten Luwu pada 2019.

2.2.19 Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I

Indikator keluarga pra Sejahtera dan Sejahtera I merupakan tolok ukur kemiskinan yang dikembangkan oleh BKKBN. Berbeda dengan indikator kemiskinan yang digunakan BPS yaitu kemiskinan diukur berdasarkan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*), BKKBN mendefinisikan miskin berdasarkan konsep/pendekatan kesejahteraan keluarga, yaitu dengan membagi kriteria keluarga ke dalam lima tahapan, yaitu keluarga prasejahtera (KPS), keluarga sejahtera I (KS-I), keluarga sejahtera II (KS-II), keluarga sejahtera III (KS-III), dan keluarga sejahtera III plus (KS-III Plus). Tahapan keluarga sejahtera didasarkan pada faktor-faktor dominan yang menjadi kebutuhan setiap keluarga, yang terdiri dari (1) pemenuhan kebutuhan dasar; (2) pemenuhan kebutuhan psikologi; (3) kebutuhan pengembangan; dan (4) kebutuhan aktualisasi diri dalam berkontribusi bagi masyarakat di lingkungannya. Dalam hal ini, kelompok yang dikategorikan penduduk miskin oleh BKKBN adalah KPS dan KS-I. Adapun pengertian dari tahapan keluarga sejahtera yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Keluarga Pra Sejahtera yaitu keluarga-keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya (*basic needs*) secara minimal, seperti kebutuhan akan pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan .
2. Keluarga Sejahtera Tahap I yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, tetapi belum dapat memenuhi keseluruhan kebutuhan sosial psikologisnya (*sociopsychological needs*), seperti kebutuhan ibadah, makan protein hewani, pakaian, ruang untuk interaksi keluarga, dalam keadaan sehat, mempunyai penghasilan, bisa baca tulis latin dan keluarga berencana.
3. Keluarga Sejahtera Tahap II yaitu keluarga-keluarga yang disamping telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, juga telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan sosial psikologisnya, akan tetapi belum dapat memenuhi keseluruhan kebutuhan pengembangannya (*development needs*) seperti kebutuhan untuk peningkatan agama, menabung, berinteraksi dalam keluarga, ikut melaksanakan kegiatan dalam masyarakat dan mampu memperoleh informasi dari media.
4. Keluarga Sejahtera Tahap III yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan dasar,kebutuhan social psikologisnya, akan tetapi belum dapat memenuhi keseluruhan kebutuhan pengembangannya, namun belum dapat memberikan sumbangan (kontribusi) yang maksimal terhadap masyarakat, seperti secara teratur (waktu tertentu) memberikan sumbangan dalam bentuk material dan keuangan untuk kepentingan

social kemasyarakatan serta berperan serta secara aktif dengan menjadi pengurus lembaga kemasyarakatan atau yayasan-yayasan social, keagamaan, kesenian, olahraga, pendidikan dan sebagainya.

5. Keluarga Sejahtera Tahap III Plus yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhannya, baik yang bersifat dasar, social psikologis maupun yang bersifat pengembangan serta telah dapat pula memberikan sumbangan yang nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Berdasarkan data perkembangan jumlah keluarga menurut tahapan keluarga Sejahtera di Kabupaten Luwu selama kurun waktu 2015-2019, menunjukkan bahwa jumlah keluarga pra-sejahtera (KPS) mengalami penurunan dari 19.361 keluarga pada tahun 2015 menjadi 14.963 keluarga tahun 2019. Dalam periode yang sama Keluarga Sejahtera I (KS-I) mengalami peningkatan dari 17.889 keluarga pada tahun 2015 menjadi 22.277 keluarga pada tahun 2019. Dengan adanya penurunan jumlah KPS, menyebabkan jumlah golongan keluarga miskin di Kabupaten Luwu mengalami penurunan dari 46,43% pada tahun 2015 menjadi 43,28% pada tahun 2019.

Tabel 2.25.
Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I
Tahun 2015-2019

Tahun	Jumlah Keluarga Pra Sejahtera	Jumlah Keluarga Sejahtera I	Jumlah Keluarga	Cakupan Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	
2015	19.361	17.889	80.232	37.250	46,43%
2016	18.213	17.437	80.700	35.650	44,18%
2017	17.780	17.072	80.992	34.852	43,03%
2018	15.014	23.209	85.994	38.223	44,45%
2019	14.963	22.277	86.029	37.240	43,28%

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Luwu, Tahun 2020.

Meskipun jumlah keluarga KPS mengalami penurunan, tetapi jumlah keluarga KS-I mengalami peningkatan yang mengindikasikan bahwa adanya keluarga dari kelompok sejahtera yang menjadi KS-I. Peningkatan tertinggi terhadap jumlah keluarga KS-I adalah pada tahun 2018 yaitu sebanyak 23.209 keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan status sosial keluarga di Kabupaten Luwu akibat adanya perubahan kebijakan nasional terhadap keluarga miskin.

2.2.20 Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat

dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Survey IKM bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya.

Pelaksanaan survey terhadap IKM didasarkan pada prinsip pelayanan sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Suatu pelayanan dinilai memuaskan bila pelayanan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna layanan. Kepuasan masyarakat dapat juga dijadikan acuan bagi berhasil atau tidaknya pelaksanaan program yang dilaksanakan pada suatu lembaga layanan publik.

Terdapat 8 (delapan) institusi yang dijadikan sebagai sampel dalam survey IKM tahun 2020 di Kabupaten Luwu, yaitu Dinas Pendidikan, Puskesmas, Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Perusda Air Minum, Kecamatan/Kelurahan/Desa, Dinas Lingkungan Hidup dan RSUD Batara Guru. Berdasarkan hasil survey tersebut, diperoleh angka IKM Kabupaten Luwu Tahun 2-2- yaitu 79,28.

2.2.21 Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah

Kemampuan keuangan dari suatu daerah dapat dilihat dari besar kecilnya PAD yang diperoleh dari daerah yang bersangkutan. Berkaitan dengan pemberian otonomi daerah yang lebih besar kepada daerah, PAD selalu dipandang sebagai salah satu indikator atau kriteria untuk mengukur ketergantungan suatu daerah kepada pusat. Prinsipnya, semakin besar sumbangan PAD kepada APBD maka akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah kepada pusat sebagai konsekuensi pelaksanaan otonomi daerah. PAD merupakan unsur yang penting dalam pendapatan daerah.

PAD merupakan salah satu komponen sumber penerimaan daerah selain penerimaan dana transfer dan lain-lain pendapatan yang sah. Keseluruhannya merupakan sumber pendaaan penyelenggaraan pemerintah di daerah. Rasio antara PAD terhadap total pendapatan daerah menunjukkan rasio ketergantungan suatu daerah. Semakin tinggi nilai rasio PAD terhadap total pendapatan maka semakin kecil ketergantungan suatu daerah terhadap transfer dana dari pihak eksternal baik itu pemerintah pusat maupun pemerintahan daerah lainnya. Dengan kata lain

persentase PAD terhadap total pendapatan daerah merupakanindikasi derajat kemandirian keuangan suatu pemerintah daerah.

Berdasarkan perkembangan data keuangan daerah Kabupaten Luwu selama periode 2015-2017, memperlihatkan bahwa realisasi PAD mengalami peningkatan yang cukup tinggi, tetapi pada tahun 2018 sedikit menurun, namun kembali meningkat di tahun 2019. Pada tahun 2015 pendapatan Kabupaten Luwu yang bersumber dari PAD sebesar Rp78,56 milliar, meningkat menjadi Rp109,17 miliar pada tahun 2017, menurun menjadi 106,87 miliar pada tahun 2018 dan kembali meningkat menjadi Rp113,77 miliar pada tahun 2019, yang berati selama periode 2015-2019 penerimaan PAD Kabupaten Luwu tumbuh sekitar 44,82% dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 10,06% per tahun. Peningkatan PAD yang cukup tinggi ini menyebabkan rasio PAD terhadap total pendapatan juga meningkat dari 6,37% pada tahun 2015 menjadi 7,85% pada tahun 2019.

Tabel 2.26.
Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2015-2019

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
PAD (Rp Juta)	78.558,30	95.564,29	109.172,77	106.865,74	113.768,44
Pendapatan Daerah (Rp Juta)	1.233.809,15	1.397.284,61	1.292.583,08	1.323.121,88	1.449.067,07
Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (%)	**6,37**	**6,84**	**8,45**	**8,08**	**7,85**

Sumber : BPKAD Kabupaten Luwu, 2020.

Kecenderungan rasio PAD terhadap total pendapatan daerah yang menurun pada 2 (dua) tahun terakhir menunjukkan bahwa ketergantungan Kabupaten Luwu terhadap transfer dana dari pihak eksternal (pemerintah pusat dan pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan) masih sangat tinggi, yang berarti pula bahwa derajat kemandirian keuangan pemerintah daerah Kabupaten Luwu selama periode 2017-2019 tidak semakin membaik. Hal ini harus menjadi perhatian untuk secara maksimal menggali potensi PAD sesuai kewenangan daerah, agar kemandirian daerah semakin meningkat dan pembiayaan pembangunan untuk mempercepat kesejahteraan rakyat semakin besar. Oleh karena itu, pengelolaan sumber-sumber pendapatan asli daerah perlu dikaji sejauhmana efektivitasnya dan strategi apa yang perlu dilakukan untuk menjadi kebijakan di masa depan. Berikut disajikan pertumbuhan PAD dan proporsinya terhadap pendapatan daerah.

Grafik 2.14.
Pertumbuhan PAD terhadap Pendapatan Daerah
Tahun 2015-2019

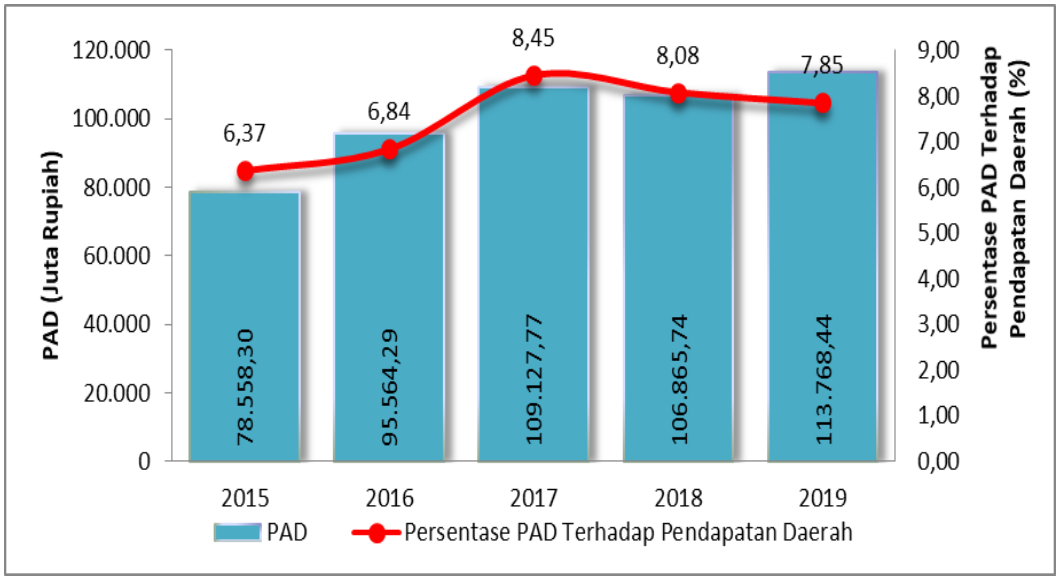

Sumber: Data diolah, BPKAD Kabupaten Luwu, Tahun 2020.

2.2.22 Opini BPK

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (disingkat Opini BPK) merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Terdapat empat jenis opini BPK yakni (1) Wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion); (2) Wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*); (3) Tidak wajar (*adversed opinion*) dan (4) Tidak menyatakan pendapat (*disclaimer of opinion*). Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kabupaten Luwu dalam lima tahun terakhir memporelh opini Wajar tanpa pengecualian (WTP).

2.2.23 Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

Kualitas konsumsi pangan penduduk ditingkat wilayah (makro) dicerminkan dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH). PPH merupakan instrumen sederhana untuk menilai situasi konsumsi pangan penduduk, baik jumlah maupun komposisi pangan menurut jenis pangan yang dinyatakan dalam skor PPH. Semakin tinggi skor PPH, konsumsi pangan semakin beragam dan bergizi seimbang (maksimal 100). PPH dapat digunakan sebagai pedoman dalam evaluasi dan perencanaan penyediaan, produksi dan konsumsi pangan penduduk, baik secara kuantitas, kualitas, maupun keragamannya.

Tabel 2.27.
Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)
Tahun 2015 – 2019

No	Kelompok Pangan	Perkembangan Skor PPH				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Padi-padian	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0
2	Umbi-umbian	1.7	1.7	1.7	1.5	2.1
3	Pangan Hewani	23.3	24.0	24.1	23.4	23.6
4	Minyak dan Lemak	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
5	Buah/Biji Berminyak	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3
6	Kacang-kacangan	4.8	5.2	5.8	5.8	6.2
7	Gula	1.9	2.1	2.0	1.9	2.2
8	Sayur dan Buah	23.2	24.1	24.0	23.5	24.8
9	Lain-lain	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Total Skor PPH		**85,2**	**87,4**	**87,8**	**86,3**	**89,2**

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Tahun 2020.

Skor PPH Kabupaten Luwu selama periode tahun 2015-2019 terus mengalami peningkatan, namun pada tahun 2018 mengalami penurunan dibanding tahun 2017. Pada tahun 2015 skor PPH didaerah ini sebesar 85,2 poin, meningkat menjadi 89,2 pada tahun 2019 yang berarti kualitas pangan masyarakat semakin baik dalam artian baik dari jumlah maupun komposisi pangan menurut jenis pangannya. Akan tetapi pada tahun 2018 turun 1,5 poin menjadi 86,3 poin.

2.2.24 Penguatan Cadangan Pangan

Ketersediaan pangan menjadi sasaran utama dalam kebijakan pangan bagi pemerintahan dalam rangka mewujudkan pemenuhan kebutuhan akan pangan bagi seluruh penduduk. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin ketersediaan pangan guna memenuhi kebutuhan pangan penduduk dari segi kuantitas, kualitas, keragaman dan keamanannya. Ketersediaan pangan dapat dipenuhi dari tiga sumber yaitu produksi dalam negeri, impor pangan, dan pengelolaan cadangan pangan. Salah satu sumber ketersediaan pangan yang dapat mengisi kesenjangan produksi dan kebutuhan masyarakat adalah cadangan pangan. Stabilitas pasokan pangan dapat dijaga dengan pengelolaan cadangan pangan yang tepat. Cadangan pangan terdiri atas cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan masyarakat.

Dasar hukum penguatan cadangan pangan telah diamanatkan dalam Pasal 32 ayat 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dimana disebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan cadangan pangan masyarakat sesuai kearifan lokal.

Pengembangan cadangan pangan masyarakat dilakukan dalam rangka pemberdayaan dan perlidungan masyarakat dari kerawanan pangan, dengan memfasilitasi pembangunan lumbung fisik, pengisian cadangan pangan dan penguatan kelembagaan kelompok.

Tabel 2.28.
Penguatan Cadangan Pangan, Tahun 2015 – 2019

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah cadangan pangan kabupaten (ton)	26,66	32,00	44,68	44,68	11,59
2	Target cadangan pangan kabupaten (ton)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	**Penguatan cadangan pangan (%)**	**26,66**	**32,00**	**44,68**	**44,68**	**11,59**

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Tahun 2020.

Penguatan cadangan pangan diukur dari jumlah cadangan pangan kabupaten per 100 ton yang dinyatakan dalam persen. Penguatan cadangan pangan Kabupaten Luwu menurun dari 26,66% pada tahun 2015 menjadi 11,59% pada tahun 2019. Hal ini berarti selama kurun waktu 5 tahun terakhir pemerintah daerah Kabupaten Luwu menyediakan cadangan pangan yang menurun, dari 26,66 ton menjadi 11,59 ton pada tahun 2019.

2.2.25 Penanganan daerah rawan pangan

Kerawanan pangan adalah suatu kondisi ketidakcukupan pangan yang dialami daerah, masyarakat, atau rumah tangga, pada waktu tertentu untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologi bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat. Kerawanan pangan dapat terjadi secara berulang-ulang pada waktu-waktu tertentu karena alasan ekonomi/kemiskinan (kronis), dan dapat pula terjadi akibat keadaan darurat seperti bencana alam maupun bencana sosial (transien). Target penanganan daerah rawan pangan di Kabupaten Luwu lebih diutamakan pada daerah rawan pangan kronis dan daerah rawan pangan transien. Daerah rawan pangan kronis adalah daerah yang mengalami keadaan rawan pangan yang berkelanjutan yang terjadi sepanjang waktu yang disebabkan oleh ketersediaan SDA dan keterbatasan kemampuan SDM sehingga menyebabkan kondisi masyarakat menjadi miskin dan tidak mampu memenuhi kebutuhan pangannya. Sedangkan rawan pangan transien adalah keadaan kerawanan pangan yang disebabkan oleh kondisi yang tidak terduga antara lain berbagai musibah seperti bencana alam, kerusuhan, musim yang menyimpang dan keadaan lain yang bersifat mendadak.

Penanganan rawan pangan di Kabupaten Luwu dilakukan dengan dua bentuk, pertama upaya pencegahan kerawanan pangan untuk menghindari terjadinya rawan pangan disuatu wilayah sedini mungkin dan kedua melakukan penanggulangan kerawanan pangan pada daerah yang rawan

kronis dan daerah rawan pangan transien. Adapun upaya penanganan daerah rawan pangan di Kabupaten Luwu adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi daerah-daerah yang berpotensi mengalami rawan pangan;
2. Pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pelatihan pengolahan pangan;
3. Pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan optimalisasi pemanfaatan pakarangan;
4. Penyaluran bantuan kepada keluarga yang mengalami kerawanan pangan kronis dan trasien;
5. Pemberian bantuan medis dan makanan tambahan pada keluarga yang memiliki balita gizi buruk
6. Dll.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2010 tentang Pedoman Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi, aspek kerawanan pangan didasarkan pada 3 pilar ketahanan pangan yaotu ketersediaan pangan, pemanfaatan pangan, dan akses pangan. Ketersediaan pangan ditunjukkan oleh rasio ketersediaan beras dengan kebutuhan beras. Semakin tinggi rasio, semakin tinggi tingkat ketersediaan pangan di suatu wilayah. Pemanfaatan pangan ditunjukkan oleh persentase jumlah bayi gizi kurang terhadap jumlah bayi yang ditimbang. Tingginya jumlah bayi yang menderita gizi kurang menunjukkan bahwa pemanfaaatan pangan di suatu wilayah masih rendah. Sedangkan akses pangan ditunjukkan oleh rasio antar jumlah KPS dengan jumlah KS-I. Semakin besar jumlah KPS dibandingkan dengan KS, maka akses pangan di suatu wilayah semakin rendah.

Perkembangan penanganan rawan pangan di Kabupaten Luwu selama kurun waktu tahun 2015 - 2019 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.29.
Penanganan Daerah Rawan Pangan
Tahun 2015 – 2019

No	Uraian	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1	Ketersediaan beras	Ton	189.2190	185.846	173.492	170.205	176.880
2	kebutuhan beras	Ton	56.756	57.252	57.743	58.213	58.670
Rasio Ketersediaan Pangan		Angka Rasio	333,39	324,61	300,46	292,38	301,48
Skor Ketersediaan Pangan		-	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
3	n gizi kurang < -2 SD	Orang	444	620	1.318	2.316	1.501
4	n balita yang dikumpulkan PSG	Orang	5.374	9.401	19.607	16.626	17.736
Nilai preferensi energi		-	8,45	8,26	6,60	13,93	8,46
Skor Preferensi Energi		-	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
5	Keluarga Pra-Sejahtera	Keluarga	16.928	17.640	17.072	16.922	14.963
6	Keluarga Sejahtera Satu	Keluarga	26.115	16.972	46.071	47.164	22.277
Nilai		-	72	58	105	107	

No	Uraian	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
	Kemiskinan karena prasejahtera dan sejahtera satu	-	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**
	Penanganan daerah rawan pangan	-	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu, Tahun 2020.

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa penanganan daerah rawan pangan di Kabupaten Luwu selama periode 2015-2019 stagnan pada skor 5, belum bergerak untuk mencapai skor ideal yang ditetapkan dalam Permentan Nomor 43 Tahun 2010 yaitu 3. Hal ini disebabkan antara lain: masih tingginya jumlah keluarga miskin di Kabupaten Luwu terutama pada Tahun 2016 yang meningkat cukup signifikan. Untuk mencapai skor ideal tersebut, hal yang perlu diupayakan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu antara lain adalah meningkatkan upaya pengentasan kemiskinan secara serius.

Pada Tahun 2018, Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian RI telah mengembangkan metode dalam penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi dengan melakukan beberapa perubahan indikator untuk mengukur situasi pangan dan gizi di suatu wilayah yaitu:

1. Pengukuran ketersediaan pangan yang sebelumnya menggunakan indikator rasio ketersediaan beras dengan kebutuhan beras, diubah dengan indikator luas tanam dan luas puso padi.
2. Pengukuran pemanfaatan pangan yang sebelumnya menggunakan indikator persentase jumlah bayi gizi kurang terhadap jumlah bayi yang ditimbang diubah dengan indikator angka balita ditimbang terkoreksi, angka balita naik berat badan, balita yang tidak naik berat badannya dalam dua kali penimbangan berturut-turut, dan angka balita dengan berat badan di bawah garis merah.
3. Pengukuran akses pangan yang sebelumnya menggunakan indikator rasio antar jumlah KPS dengan jumlah KS-I, diubah dengan indikator harga beras.

Adapun indeks ketahanan pangan Kabupaten Luwu pada tahun 2019 berada pada angka 78.

2.2.26 Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB

Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB merupakan ukuran untuk melihat peranan sektor pertanian/perkebunan dalam pembangunan ekonomi daerah, sekaligus sebagai ukuran untuk melihat kinerja pembangunan sektor pertanian/perkebunan itu sendiri. Indikator ini diukur dari rasio antara nilai tambah sektor pertanian/perkebunan dengan total PDRB menurut harga berlaku. Nilai tambah sektor pertanian/perkebunan mencakup nilai tambah dari sub sektor tanaman

pangan, sub sektor hortikultura dan sub sektor perkebunan, sub sektor peternakan dan sub sektor jasa pertanian.

Nilai tambah sektor pertanian/perkebunan di Kabupaten Luwu yang didasarkan pada nilai PDRB harga berlaku selama periode 2015-2019 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2015 nilai PDRB menurut harga berlaku sektor pertanian/ perkebunan sebesar Rp5,55 trilliun, meningkat menjadi Rp8,20 trilliun pada tahun 2019. Sedangkan angka kontribusinya terhadap PDRB harga berlaku mengalami penurunan dari 53,55% pada tahun 2015 menjadi 52,38% pada tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi sektor lain semakin mempengaruhi PDRB Kabupaten Luwu, dalam arti semakin kecil ketergantungannya terhadap sektor pertanian yang menunjukkan bahwa sektor industry telah mulai berkembang.

Berikut ini disajukan grafik kontribusi sektor pertanian/ perkebunan terhadap PDRB Kabupaten Luwu.

Grafik 2.15.

Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB
Tahun 2015-2019

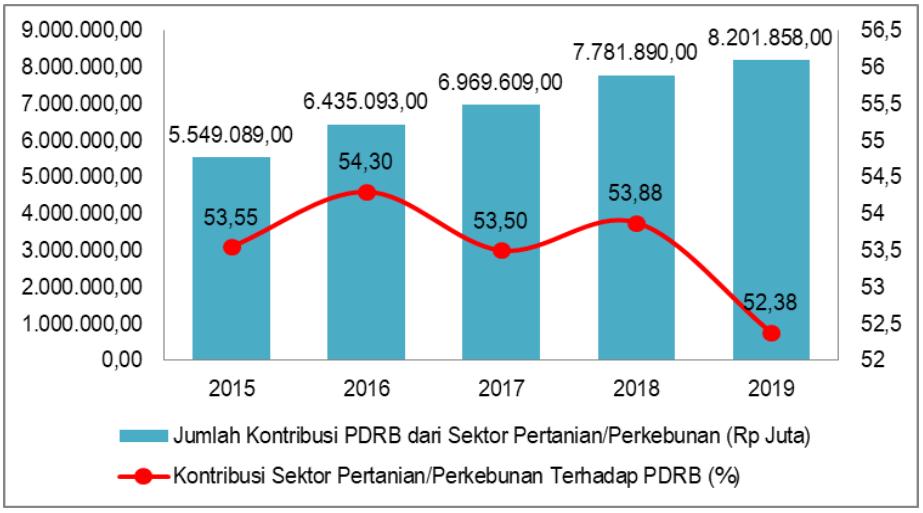

Sumber: BPS, PDRB Kabupaten Luwu Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020.

2.2.27 Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB

Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB Pertanian/perkebunan dimaksudkan untuk mengetahui porsi nilai tambah pertanian (palawija) terhadap total nilai tambah pertanian/perkebunan, sekaligus mengukur kinerja pembangunan sektor pertanian (palawija) itu sendiri. Indikator ini diukur dari rasio antara nilai tambah sektor pertanian (palawija) dengan total PDRB pertanian/perkebunan menurut harga berlaku. Nilai tambah sektor pertanian (palawija) mencakup nilai tambah dari semua kegiatan ekonomi yang menghasilkan komoditas bahan pangan. Komoditas

yang dihasilkan oleh kegiatan tanaman pangan meliputi padi, palawija (jagung, kedele, kacang tanah, kacang hijau, ubi jalar, ubi kayu, palawija lainnya), serta tanaman serelia lainnya. Berikut ini disajukan grafik kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB pertanian/perkebunan Kabupaten Luwu.

Nilai tambah sektor pertanian (palawija) menurut harga berlaku selama periode 2015-2019 mengalami peningkatan dari Rp.1,04 triliun pada tahun 2015 menjadi 1,16 triliun pada tahun 2019. Namun demikian, meskipun nilainya terus meningkat, besaran kontribusinya terhadap PDRB sektor pertanian/perkebunan mengalami penurunan secara terus-menerus pula, yaitu dari 9,58% pada tahun 2015 menjadi 7,40% pada tahun 2019. Kondisi ini menunjukkan bahwa produk olahan dari palawija kurang dapat dikembangkan dalam meningkatkan perekonomian Kabupaten Luwu. Hal ini perlu mendapat perhatian di masa depan, supaya potensi pertanian palawija yang sangat melimpah di Kabupaten Luwu diikuti dengan pengembangan produk olahannya.

Grafik 2.16.

Kontribusi Sektor Pertanian (palawija) Terhadap PDRB Pertanian/Perkebunan Tahun 2015 – 2019

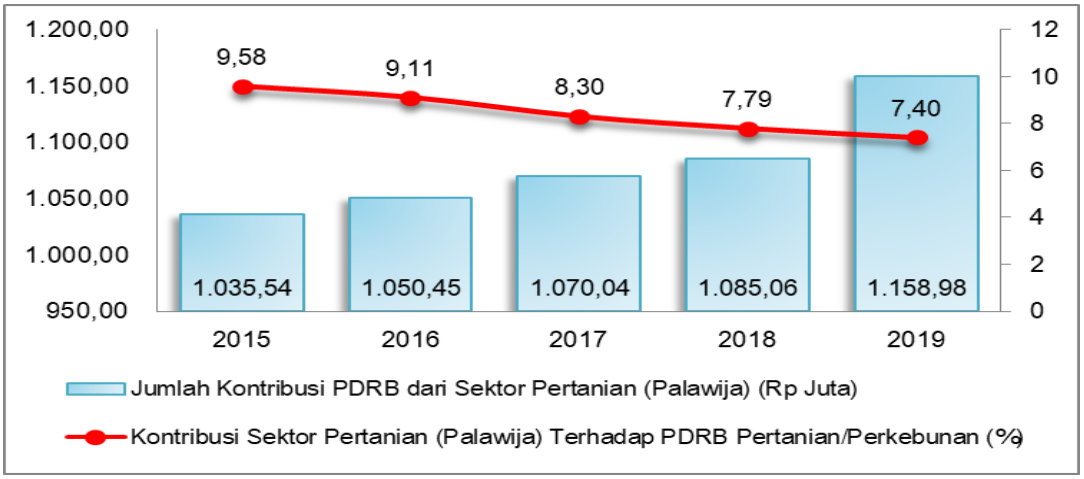

Sumber: BPS, PDRB Kabupaten Luwu Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020.

2.2.28 Produksi Sektor Pertanian

Kabupaten Luwu memiliki potensi untuk pengembangan komoditi pangan dan palawija karena didukung dengan sumber daya lahan yang cukup luas. Namun demikian, perkembangan produksi di sektor ini kurang menggembirakan, mengingat produksinya yang tidak bertumbuh, bahkan

cenderung menurun. Penurunan produksi sektor pertanian di Kabupaten Luwu antara lain disebabkan:

1. Harga komoditi yang tidak menentu/tidak menguntungkan secara ekonomi sehingga masyarakat beralih kepada jenis tanaman lain.
2. Kurang maksimalnya peran institusi yang mengemban tugas dalam peningkatan produksi di sektor pertanian.

Tabel 2.30.
Produksi Pertanian Pangan dan Palawija
Tahun 2015-2019

No	Uraian	Jumlah Produksi (ton)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Padi	308.380,00	312.382,00	294.586,00	390.239,03	389.056,30
2	Jagung	10.406,00	34.126,40	41.191,00	56.204,00	72.220,37
3	Ubi Kayu	1.895,00	1.946,60	1.872,00	1.614,53	1.642,57
4	Ubi Jalar	1.370,00	889,90	117,60	1.695,40	1.886,20
5	Kacang Tanah	48,00	59,20	50,50	48,10	57,80
6	Kacang Kedelai	263,00	16,40	31,70	134,80	50,00
7	Kacang Hijau	50,00	34,40	47,30	70,03	11,3

Sumber: BPS, Statistik Tanaman Pangan, Tahun 2020.

2.2.29 Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB

Kontribusi sektor perkebunan terhadap PDRB pertanian/perkebunan merupakan salah satu indikator kinerja pembangunan sektor perkebunan, yang sekaligus menggambarkan besarnya kontribusi nilai tambah yang diciptakan sektor perkebunan terhadap total nilai tambah pertanian/perkebunan. Indikator ini diukur dari rasio antara nilai tambah sektor perkebunan dengan total PDRB pertanian/perkebunan menurut harga berlaku. Nilai tambah sektor perkebunan mencakup nilai tambah dari semua kegiatan ekonomi yang menghasilkan komoditas dari tanaman Perkebunan yang terdiri dari tanaman perkebunan semusim dan tanaman perkebunan tahunan, baik yang diusahakan oleh rakyat maupun oleh perusahaan perkebunan. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan tanaman perkebunan diantaranya adalah tebu, tembakau, tanaman berserat, kelapa, kelapa sawit, karet, kopi, teh, kakao, lada, cengkeh, jambu mete, dan sebagainya.

Grafik 2.17.

Kontribusi Sektor Perkebunan Terhadap PDRB Pertanian/Perkebunan Tahun 2015 - 2019

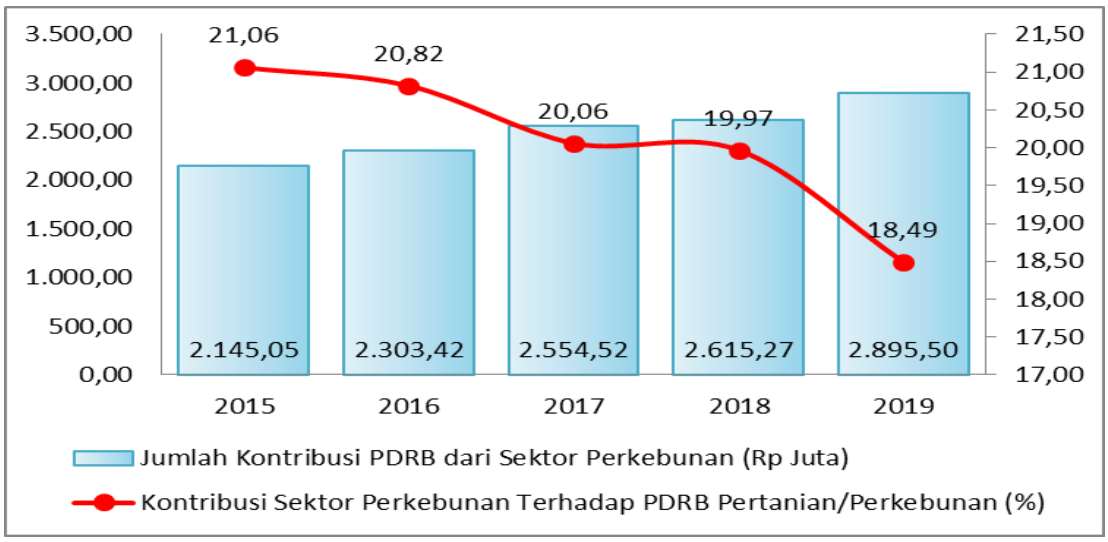

Sumber: BPS, PDRB Kabupaten Luwu Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020.

Nilai tambah sektor perkebunan menurut harga berlaku selama periode 2015-2019 memiliki kecenderungan meningkat. Pada tahun 2015 nilai PDRB menurut harga berlaku sektor perkebunan sebesar Rp2,15 trilliun, meningkat menjadi Rp2,90 trilliun pada tahun 2019. Sektor perkebunan merupakan sektor yang sangat penting di Kabupaten Luwu karena memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB sektor pertanian. Meskipun demikian, kinerja perkembangan sektor perkebunan di Kabupaten Luwu mengalami stagnansi pada tahun 2015-2016, bahkan cenderung menurun, yang ditunjukkan oleh kontribusi sektor perkebunan terhadap PDRB pertanian/perkebunan yang semakin menurun. Pada tahun 2015 kontribusi sektor ini terhadap PDRB pertanian/perkebunan sebesar 21,06%, sedangkan pada tahun 2016 menurun sedikit menjadi 20,82%, dan terus menurun hingga hanya mencapai 18,49% pada tahun 2019.

Meskipun terjadi penurunan, kinerja pertumbuhan sektor perkebunan masih lebih baik dari sektor sektor-sektor pertanian lainnya. Kecenderungan perlambatan ini bisa jadi terkait dengan trend perlambatan harga berbagai komoditi perkebunan di pasar internasional yang kemudian berimbas di pasar domestik, yang selanjutnya mempengaruhi produktivitas di tingkat petani.

2.2.30 Produksi sektor Perkebunan

Kabupaten Luwu merupakan sentra utama beberapa komoditi perkebunan, baik kelompok komoditi perkebunan tahunan, maupun komoditi perkebunan yang bersifat musiman. Pada kelompok komoditi perkebunan tahunan, daerah ini memiliki potensi produksi yang cukup besar untuk komoditi seperti : Kelapa, kakao, cengkeh, jambu mete dan aren. Kabupaten Luwu adalah merupakan sentra utama berbagai komoditi perkebunan di Sulawesi Selatan. Pada tahun 2016, produksi cengkeh di Kabupaten Luwu memberikan kontribusi terbesar terhadap produksi Sulawesi Selatan yaitu mencapai 44,48%, demikian halnya kakao, dengan kontribusi sebesar 19,15%.

Gambaran perkembangan produksi tanaman perkebunan tahun di Kabupaten Luwu, tahun 2015-2019 terlihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.31.
Produksi Tanaman Perkebunan
Tahun 2015-2019

No	Uraian	Produksi Tanaman Perkebunan Rakyat (ton)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Kelapa Dalam	3.735,23	3.793,00	3.764,00	N/A	3.730
2	Kelapa Hibrida	204,04	197,00	181,00	N/A	195
3	Kopi Robusta	449,72	342,00	400,00	423,72	450,00
4	Kopi Arabika	1.851.20	1.852,00	1.955,00	1.961,20	1.963,00
5	Cengkeh	9.006,35	7.856,00	6.976,00	8.006,35	9.120,25
6	Kakao	27.000,00	28.989,00	24.262,00	33.902,00	23.701,35
7	Pala	21.788,00	28,00	28,00	28,79	30,50
8	Lada	321,79	399,00	299,00	297,79	295,77
9	Kapuk	4,98	4,00	4,00	N/A	3,5
10	Kemiri	68,90	70,00	79,00	N/A	67
11	Jambu Mente	353,09	350,00	352,00	N/A	350
12	Kelapa Sawit	1.677,50	3.763,00	480,00	325,00	432
13	Sagu	687,62	876,00	876,00	N/A	889
14	Aren	149,06	172,00	172,00	N/A	176
15	Pinang	8,78	6,00	5,00	N/A	5
16	Tembakau	-	15,00	15,00	23,75	9,5

Sumber: BPS, Kabupaten Dalam Angka, Tahun 2020.

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa produksi sebagian besar komiditi perkebunan dalam kurun waktu tahun 2015-2019 meningkat, mengalami fluktuasi, bahkan ada yang menurun secara drastis. Komoditi yang meningkat produksinya secara terus menerus adalah kopi arabika dan kemiri. Komoditi yang mengalami fluktuasi adalah kelapa dalam, kopi

robusta, cengkeh, kakao, lada, jambu mente, dan kelapa sawit. Sedangkan komoditi yang mengalami penurunan produksi adalah kelapa hibrida, cengkeh, dan pinang. Kondisi yang demikian ini perlu mendapat perhatian pemerintah daerah Kabupaten Luwu di masa depan, mengingat salah satu isu utama Kabupaten Luwu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah optimalisasi potensi sektor perkebunan.

2.2.31 Kontribusi Produksi Kelompok Petani terhadap PDRB

Kelompok tani pada dasarnya adalah organisasi non formal di perdesaan yang ditumbuhkembangkan "dari, oleh dan untuk petani". Keberadaan organisasi non formal ini memiliki peran penting tidak hanya dalam peningkatan produksi pertanian dan kesejahteraan petani, tetapi juga memberi pengaruh terhadap kondisi perekonomian daerah, termasuk pada indikator PDRB daerah. Pengaruh keberadaan kelompok tani terhadap perekonomian daerah, terkait fungsi kelompok tani yang diemban yakni: (1) sebaga wadah belajar, dengan fungsi ini pengetahuan, keterampilan dan sikap anggota kelompok dapat berkembang lebih cepat; (2) sebagai wadah kerjasama, melalui kerjasama petani dapat meningkatkan efisiensi produksinya serta lebih mampu menghadapi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan; (3) sebaga unit produksi; usaha tani yang dilaksanakan oleh masing-masing anggota kelompok tani, secara keseluruhan harus dipandang sebagai satu kesatuan usaha yang dapat dikembangkan untuk mencapai skala ekonomi, baik dipandang dari segi kuantitas, kualitas maupun kontinuitas.

Pengukuran kontribusi produksi kelompok tani terhadap PDRB selain tidak disediakan oleh BPS, indikator ini juga sulit untuk diukur, karena dasar pembentukan kelompok tani bervariasi, diantarannya berdasarkan hamparan lahan, kelompok tani berdasarkan komoditi yang diusahakan, atau berdasarkan tempat tinggal petani. Keberadaan kelompok-kelompok tani tersebut banyak diantaranya tumpang tindih, sehingga estimasi produksinya menurut lokasi dan menurut komoditi sulit dilakukan. Sifat acak produksi kelompok tani ini menyulitkan untuk mengukur kontribusi produksi kelompok tani terhadap PDRB di Kabupaten Luwu. Namun demikian, mengingat strategisnya peran kelompok tani dalam peningkatan kesejahteraan petani, perlu dilakukan upaya-upaya untuk dapat mengukur seberapa besar dampak pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah mempengaruhi kesejahteraan petani.

2.2.32 Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB

Berdasarkan data BPS Tahun 2020, luas kawasan hutan di Kabupaten Luwu adalah 108.437,53 Ha, dan sekitar 23.144,22 Ha atau 21,34% merupakan kawasan hutan produksi terbatas dan hutan produksi tetap. Berbagai potensi ekonomi dari kawasan kehutanan di daerah ini diantaranya hutan rakyat dengan berbagai potensi kayu, jasa lingkungan seperti air terjun, dan hutan wisata. Selain itu kawasan hutan di daerah ini juga menghasilkan berbagai hasil hutan bukan kayu (HHBK) seperti rotan, lebah madu dan lainnya.

Grafik 2.18.

Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB
Tahun 2015 - 2019

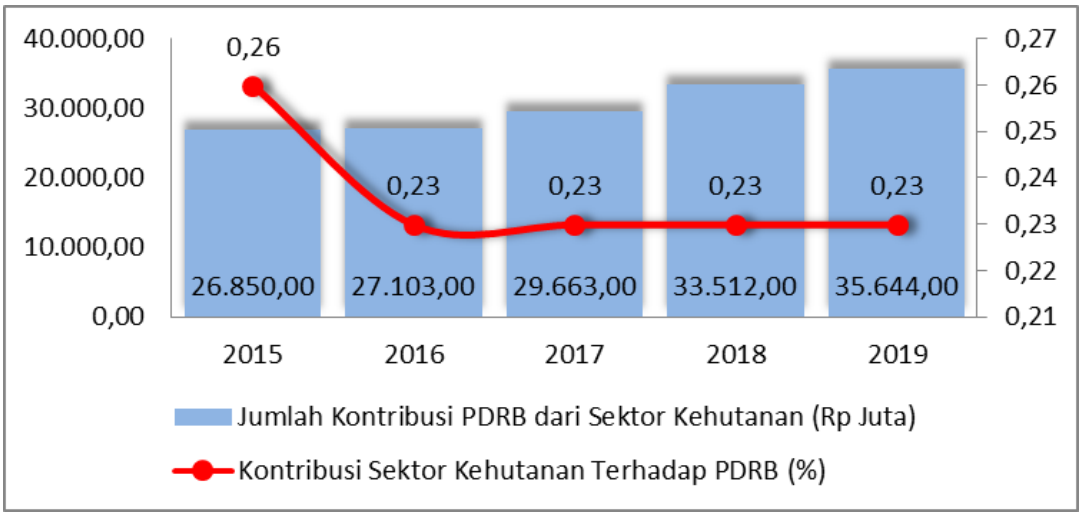

Sumber: BPS, PDRB Kabupaten Luwu Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020.

Data PDRB Harga berlaku Kabupaten Luwu selama kurun waktu 2015-2019 sebagaimana terlihat pada tabel di atas menunjukkan bahwa nilai tambah sektor kehutanan meningkat rata-rata 7,43% per tahun. Pada tahun 2015 nilai tambah yang diciptakan sektor ini sekitar 26,85 milliar dan meningkat menjadi 35,64 milliar pada tahun 2019. Namun demikian, kontribusi sektor kehutanan terhadap total PDRB harga berlaku Kabupaten Luwu mengalami penurunan, dimana pada tahun 2015 sebesar 0,26%, menurun menjadi 0,23% pada tahun tahun 2016 hingga tahun 2019.

2.2.33 Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB

Sektor pertambangan Kabupaten Luwu memiliki potensi yang cukup besar dan beragam. Potensi pertambangan di daerah ini terdiri sejumlah potensi mineral logam dan bukan logam. Potensi mineral logam diantaranya seperti potensi emas, Tembaga, Zeng, Mangan dan endapan besi. Selain itu daerah juga memiliki potensi batu baran dan berbagai mineral non logam seperti Batugamping, Marmer, Dolomit, Kuarsa, Batu Sabak dan Basal, Batu

tempel (ornamen stone) dari jenis riolit dan tufa hijau, yang tersebar dibeberapa wilayah. Adapun komoditas yang telah diusahakan diantaranya seperti bijih besi, mangan, pasir, sirtu, tanah timbun, batugamping dan lainnya. Berbagai potensi tambang yang ada di daerah ini telah berkontribusi terhadap penciptaan nilai tambah di Kabupaten Luwu.

Grafik 2.19.

Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB
Tahun 2015 - 2019

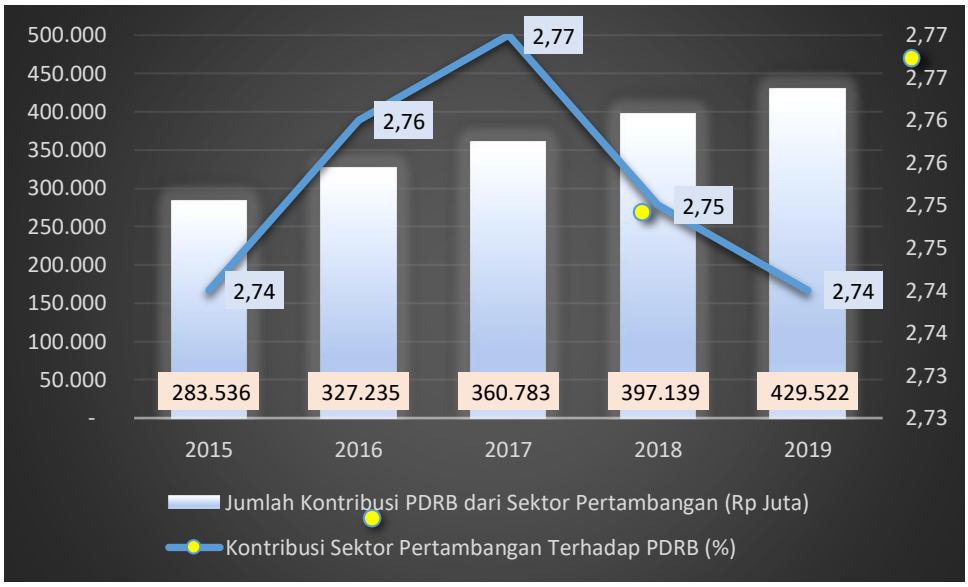

Sumber: BPS, PDRB Kabupaten Luwu Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020.

Selama kurun waktur 2015-2019, nilai PDRB sektor pertambangan di Kabupaten Luwu memiliki kecenderungan yang terus meningkat, dengan tingkat pertumbuhan yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan kinerja pertumbuhan sektor-sektor lainnya. Nilai PDRB sektor pertambangan menurut harga berlaku di Kabupaten Luwu pada tahun 2015 adalah sebesar Rp283,54 milliar, meningkat menjadi Rp.429,52 milliar pada tahun 2019. Meskipun pertumbuhan yang relatif tinggi yakni tumbuh rata-rata 10,97% per tahun, namun kontribusi sektor ini terhadap PDRB daerah cenderung stagnan.

2.2.34 Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB

Kabupaten Luwu memiliki garis pantai sepanjang 139,92 Km sehingga memiliki potensi besar dalam pengembangan kelautan dan perikanan, seperti potensi penangkapan ikan, budidaya laut dan air payau. Sektor perikanan merupakan salah satu sektor ekonomi yang telah memberikan kontribusi cukup besar dalam perekonomian Kabupaten Luwu. Pada tahun 2015 nilai tambah yang diciptakan oleh sektor kelautan dan perikanan sebesar Rp1,90

trilliun, meningkat menjadi Rp3,45 trlilliun pada tahun 2019, dengan rata-rata pertumbuhan sejumlah Rp.387,40 miliar atau sebesar 16,15%.

Kinerja pertumbuhan sektor ini dalam lima tahun terakhir juga relatif lebih tinggi dibandingkan kinerja pertumbuhan sektor lainnya di Kabupaten Luwu. Hal ini tercermin dari nilai kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2015 sektor ini berkontribusi sebesar 18,35% terhadap PDRB, kemudian meningkat menjadi 22,04% pada tahun 2019, atau memiliki rata-rata sebesar 20,48%.

Grafik 2.20.

Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap PDRB
Tahun 2015 - 2019

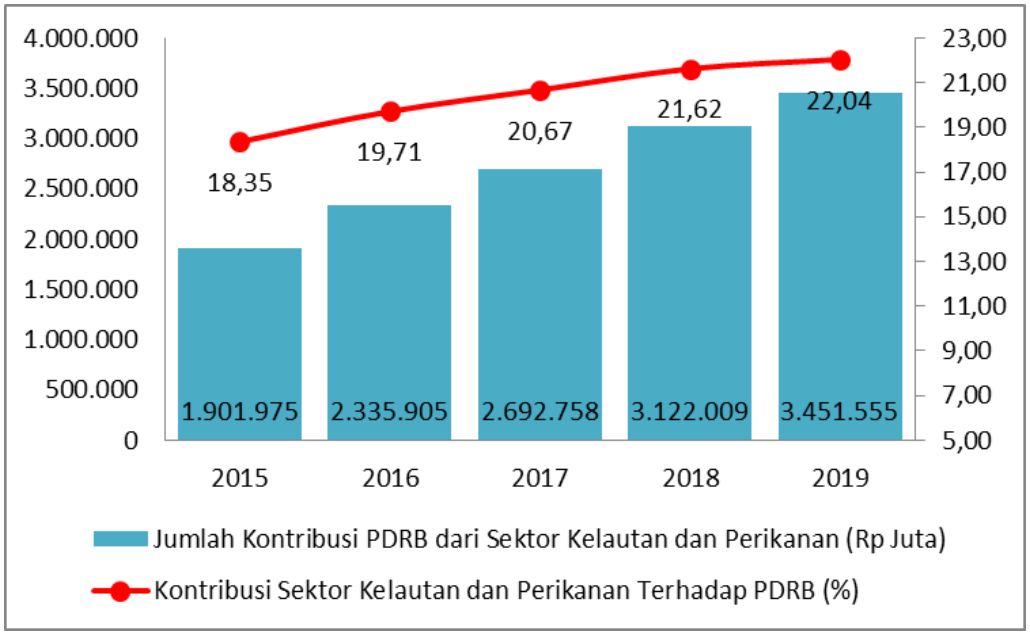

Sumber: BPS, PDRB Kabupaten Luwu Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020.

2.2.35 Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB

Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Luwu diukur dengan membagi nilai PDRB sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap total PDRB Kabupaten Luwu menurut harga berlaku. Berdasarkan nilai PDRB sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor di Kabupaten Luwu, tercatat pada tahun 2015 sebesar Rp1,06 triliun dan meningkat menjadi Rp1,59 trilliun pada tahun 2019, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 10,66% per tahun. Kontribusi sektor ini dalam penciptaan nilai tambah terus menurun periode 2015-2018 yaitu dari 10,22% menjadi 9,75%, kemudian pada tahun 2019 sedikit mengalami kenaikan menjadi 10,14%.

Nilai kontribusi sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap total PDRB yang terus menurun selama periode 2015-2019 menggambarkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat semakin rendah sehingga belanja pada sektor ini menjadi berkurang. Kondisi ini perlu menjadi perhatian seluruh pemangku kepentingan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan yang berpihak kepada rakyat.

Grafik 2.21.

Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB
Tahun 2015 - 2019

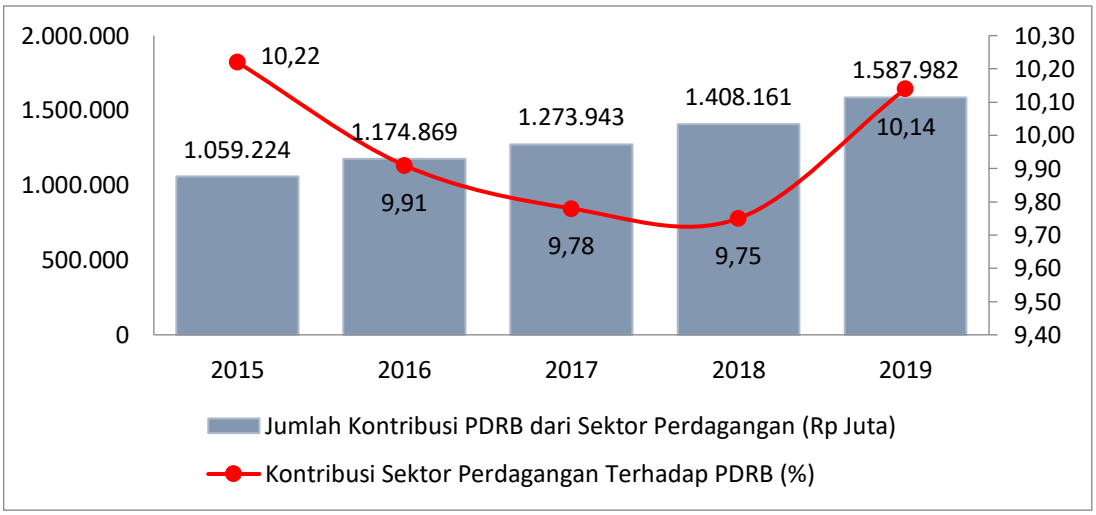

Sumber: BPS, PDRB Kabupaten Luwu Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020.

2.2.36 Pertumbuhan Industri

Kabupaten Luwu memiliki sejumlah industri, yaitu industri pengilangan migas, makanan dan minuman, tekstil dan pakaian jadi, barang dari kulit dan alas kaki, kayu, barang dan gabus, barang dari anyaman bambu, rotan dan sejenisnya, kertas dan barang dari kertas, percetakan dan reproduksi media, industri kimia, farmasi dan obat tradisional, industri karet, barang dari karet dan plastik, industri barang galian bukan logam, industri barang logam, dll. Perkembangan industri di Kabupaten Luwu berdasarkan besarnya nilai produksi seluruh unit usaha industri periode tahun 2014-2017 mengalami fluktuasi dan cenderung menurun. Pada tahun 2014 mencapai 7,49%, meningkat menjadi 8,51% pada tahun 2016, namun menurun menjadi 6,09% pada tahun 2017.

Hal ini perlu mendapat perhatian pemerintah Kabupaten Luwu di masa depan mengingat sektor industri merupakan sektor yang menyerap tenaga

kerja dalam jumlah besar. Terbukanya kesempatan kerja akan meningkatkan pemerataan pendapatan dan menumbuhkan perekonomian suatu wilayah.

2.2.37 Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB

Terdapat industri kecil dan industri rumah tangga yang beragam dan tersebar di 22 Kecamatan di Kabupaten Luwu, dengan kontribusi sejumlah Rp424,86 milyar pada tahun 2015. Pertumbuhan nilai tambah sektor industri terhadap PDRB di Kabupaten Luwu rata-rata sebesar 12,02% per tahun dan pada tahun 2019 nilainya mencapai Rp668,83 milyar. Kontribusi sektor ini terhadap PDRB Kabupaten Luwu pada periode tahun 2015-2019 berfluktuasi, tetapi mengalami peningkatan yaitu dari 4,10% pada tahun 2015 menjadi 4,27% pada tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa sektor industri belum begitu berkembang di Kabupaten Luwu.

Grafik 2.22.

Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB
Tahun 2015 - 2019

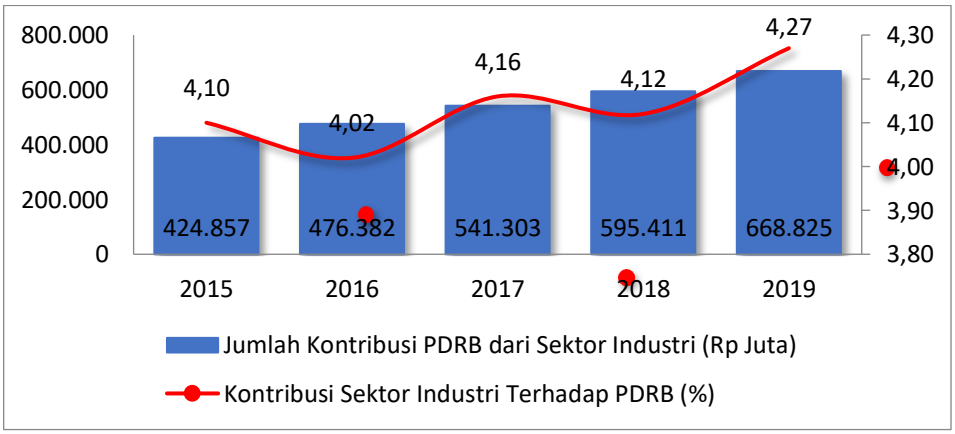

Sumber: BPS, PDRB Kabupaten Luwu Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020.

2.3. Aspek Pelayanan Umum

Di era globalisasi yang penuh tantangan dan peluang aparatur pemerintah hendaknya memberikan pelayanan optimal yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dan kepuasan penerima layanan yaitu masyarakat. Penyelenggaraan layanan oleh pemerintah oleh Undang-Undang 23 tahun 2014 dikategorikan dalam dua hal, urusan pemerintahan absolut dan urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib dibagi dalam urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak terkait pelayanan dasar.

Kinerja pembangunan pada aspek pelayanan umum ditandai diantaranya dengan meningkatnya taraf pendidikan, kesehatan, infrastruktur wilayah, perumahan, lingkungan hidup yang dilaksanakan menurut urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan pemerintah fungsi penunjang.Untuk melihat sejauh mana capaian penyelenggaraan pelayanan oleh pemerintah bisa dilihat pada indikator kinerja dari masing-masing sektor.

2.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib Dasar

Analisis kinerja atas layanan urusan wajib dasar dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelengaraan urusan wajib pemerintahan daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

1. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu modal yang sangat penting bagi seseorang untuk menjalani kehidupan bermasyarakat. Melalui pendidikan seseorang dapat memperoleh berbagai macam informasi dan ilmu pengetahuan yang sangat berguna untuk dirinya dalam menjalani kehidupan. Oleh karena itu pendidikan sebagai saluran perubahan masyarakat harus dijadikan prioritas. Selain itu, dengan pendidikan yang dimiliki seseorang diharapkan akan lebih memiliki kesejahteraan yang lebih baik. Mengingat peran pendidikan yang sangat penting, maka pembangunan di bidang pendidikan meliputi pembangunan pendidikan secara formal maupun non formal harus selalu ditingkatkan. Pembangunan di bidang pendidikan memerlukan peran serta yang aktif tidak hanya dari pemerintah, tetapi juga dari masyarakat. Sehingga semua program peningkatan pendidikan dapat berjalan lancar dan sesuai dengan tujuan semula.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional memberikan pengertian pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pendidikan merupakan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

Perkembangan penyelenggaraan bidang urusan pendidikan di Kabupaten Luwu periode tahun 2015-2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.32.
Data dan Informasi Penyelenggaraan Bidang Urusan Pendidikan
Tahun 2015-2019

No.	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1.	**Angka Partisipasi Sekolah (APS)**					
1.1.	**Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**					
	Jumlah siswa jenjang TK/ RA/TPA (orang)	5.383	5.465	6.336	7.484	7.384
	Jumlah anak usia 4-6 tahun (orang)	22.876	22.993	19.254	21.294	14.091
	APS PAUD (%)	**23,53**	**23,76**	**32,91**	**35,15**	**52,40**
1.2.	**Pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI)**					
	Jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SD/MI (orang)	48.224	47.900	46.960	46.287	47.211
	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun (orang)	47.131	47.226	47.358	47.451	47.491
	APS SD / MI (%)	**102,32**	**101,43**	**99,16**	**97,55**	**99,41**
1.3.	**Pendidikan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs)**					
	Jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SMP/MTs (orang)	24.257	23.239	23.162	22.883	22.276
	Jumlah penduduk kelompok usia 13 - 15 tahun (orang)	23.404	23.647	23.685	23.727	23.747
	APS SMP / MTs (%)	**103,64**	**98,27**	**97,79**	**96,44**	**93,81**
1.4.	**Pendidikan Sekolah Menengah Atas/Kejuruan/Madrasah Aliyah (SMA/SMK/MA)**					
	Jumlah siswa yang bersekolah di jenjang SMA/SMK/MA (orang)	11.406	12.370	13.855	15.561	16.274
	Jumlah penduduk kelompok usia 16 - 18 tahun (orang)	21.448	21.620	21.800	22.191	22.572
	APS SMA/SMK/MA (%)	**53,18**	**57,22**	**63,56**	**70,12**	**72,10**
2.	**Angka Partisipasi Kasar (APK)**					
2.1.	**SD/MI/Paket A**					
	Jumlah murid SD/MI/Paket A (orang)	48.257	47.964	47.070	46.397	44.857
	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun (orang)	47.131	47.226	47.358	47.451	47.491
	APK (%)	**102,39**	**102,39**	**102,39**	**97,78**	**94,45**
2.2.	**SMP/MTs/Paket B**					
	Jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SMP/MTs/Paket B (orang)	24.395	23.521	23.522	23.328	22.981
	Jumlah penduduk kelompok usia 13 - 15 tahun (orang)	23.404	23.647	23.685	23.727	23.747
	APK (%)	**104,23**	**99,47**	**99,31**	**98,32**	**96,77**
2.3.	**SMA/SMK/MA/Paket C**					
	Jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SMA/SMK/MA/ Paket C (orang)	11.406	12.370	13.855	15.561	16.274
	Jumlah penduduk kelompok usia 16 - 18 tahun (orang)	21.448	21.620	21.800	22.191	22.572
	APK (%)	**54,84**	**58,89**	**67,66**	**74,85**	**72,10**
3.	**Angka Partisipasi Murni (APM)**					

No.	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
3.1.	**SD/MI/Paket A**					
	Jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SD/MI/PAKET A (orang)	45.543	45.522	45.231	45.472	44.411
	Jumlah penduduk kelompok usia 7 - 12 tahun (orang)	47.131	47.226	47.358	47.451	47.491
	APM (%)	**96,63**	**96,39**	**95,51**	**95,83**	**93,51**
3.2.	**SMP/MTs/Paket B**					
	Jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SMP/MTs/PAKET B (orang)	18.882	18.918	18.967	19.361	19.646
	Jumlah penduduk kelompok usia 13 - 15 tahun (orang)	23.404	23.647	23.687	23.727	23.747
	APM (%)	**80,68**	**80,00**	**80,07**	**81,60**	**82.73**
3.3.	**SMA/SMK/MA/Paket C**					
	Jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SMA/SMK/MA/ PaketC (orang)	11.762	12.733	14.750	15.561	16.274
	Jumlah penduduk kelompok usia 16 - 18 tahun (orang)	21.448	21.620	21.800	22.191	22.572
	APM SMA/SMK/Paket C (%)	**54,84**	**58,89**	**67,77**	**74,85**	**72,10**
4.	**Angka Kelulusan**					
4.1.	**SD/MI**					
	Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI (orang)	8.194	8.043	8.235	7.723	7.723
	Jumlah siswa tingkat tertinggi pada tahun sebelumnya (orang)	8.489	8.398	8.263	7.893	7.822
	Angka Kelulusan SD/MI (%)	**96,52**	**95,77**	**99,66**	**97,85**	**98,73**
4.2.	**SMP/MTs**					
	Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs (orang)	6.926	7.345	7.305	7.348	7.394
	Jumlah siswa tingkat tertinggi pada tahun sebelumnya (orang)	7.231	7.393	7.761	7.670	7.640
	Angka Kelulusan SMP/MTs (%)	**95,78**	**99,35**	**94,12**	**95,80**	**76,78**
4.3.	**SMA/SMK/MA**					
	Jumlah lulusan pada jenjang SMA/SMK/MA (orang)	4.370	4.530	4.939	5.173	5.361
	Jumlah siswa tingkat tertinggi pada tahun sebelumnya (orang)	4.417	4.639	4.995	5.217	5.439
	Angka Kelulusan SMA/SMK/MA (%)	**98,94**	**97,65**	**98,88**	**99,16**	**98,57**
5.	**Angka Melanjutkan (AM)**					
5.1.	SD/MI ke SMP/MTs					
	Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI (orang)	8.194	8.043	8.235	7.723	7.394
	Jumlah siswa yang melanjutkan ke SMP/ Mts (orang)	7.821	7.711	7.735	7.352	7.221
	AM dari SD/MI ke SMP/MTs (%)	**95,45**	**95,87**	**93,93**	**95,29**	**97,66**
5.2.	**SMP/MTs ke SMA/SMK/MA**					
	Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs (orang)	6.926	7.345	7.305	7.348	5.642
	Jumlah siswa yang melanjutkan ke SMA/SMK/MA (orang)	6.602	6.820	6.905	6.998	5.442
	AM SMP/MTs keSMA/SMK/ MA (%)	**95,32**	**92,85**	**94,52**	**95,24**	**96,46**
6.	**Fasilitas Pendidikan**					

No.	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
6.1.	**SD/MI**					
	Jumlah ruang kelas SD/MI kondisi bangunan baik (unit)	522	574	574	536	519
	Jumlah seluruh ruang kelas SD/MI (unit)	2.220	2.289	2.293	2.243	2.617
	Persentase (%)	**23,51**	**25,08**	**25,03**	**23,90**	**19,83**
6.2.	**SMP/MTs**					
	Jumlah ruang kelas SMP/MTs kondisi bangunan baik (unit)	452	461	474	495	541
	Jumlah seluruh ruang kelas SMP/MTs (unit)	963	895	900	952	970
	Persentase (%)	**46.94**	**51.51**	**52.67**	**52.00**	**55.77**
6.3.	**SMA/SMK/MA**					
	Jumlah ruang kelas SMA/SMK/ MA kondisi bangunan baik (unit)	378	426	451	567	577
	Jumlah seluruh ruang kelas SMA/ SMK/MA (unit)	486	621	631	633	651
	Persentase (%)	**77,78**	**68,60**	**71,47**	**89,57**	**88,63**
7.	**Ketersediaan Sekolah**					
7.1.	**Pendidikan Dasar**					
	Jumlah Sekolah (unit)	453	454	456	467	467
	Jumlah penduduk kelompok usia (7 s/d 12 tahun) + (13 sd/ 15 tahun) (orang)	70.702	70.873	71.043	71.178	71.295
	Rasio	**64,07**	**64,06**	**64,19**	**65,61**	**65,50**
7.2.	**Pendidikan Menengah**					
	Jumlah Gedung Sekolah	64	67	68	68	68
	Jumlah penduduk kelompok usia (16 - 18 tahun)	21.448	21.620	21.800	22.191	22.572
	Rasio	**29,84**	**30,99**	**31,19**	**30,64**	**30,85**
8.	**Rasio Guru / Murid**					
8.1.	**Pendidikan Dasar**					
	Jumlah Guru (SD/MI +SMP/MTs	6.892	6.093	6.115	5.952	4.133
	Jumlah Murid (SD/MI+SMP/MTs)	71.787	72.139	70.122	69.200	54.161
	Rasio	**960,06**	**844,62**	**872,05**	**860,12**	**763,10**
8.3.	**Pendidikan Menengah**					
	Jumlah Guru (SMA/MA/SMK)	1.487	1.675	1.308	1.330	1.351
	Jumlah Murid (SMA/MA/SMK)	11.406	12.370	13.855	15.561	16.112
	Rasio	**1.303,70**	**1.354,08**	**944,06**	**854,70**	**838,51**
9.	**Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)**					
	Jumlah penduduk berusia >15 Tahun melek huruf se Kabupaten Luwu	Na	353.574	348.693	352.059	350.442
	Jumlah seluruh penduduk yang berusia>15 Tahun	Na	357.920	352.979	356.305	357.171
	Persentase	**Na**	**98,78**	**98,78**	**98,80**	**98,11**
10.	**Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV**					
	Jumlah guru berijazahberkualifikasi S1 dan D.IV	5.745	6.440	4.881	5.181	4.042
	Jumlah guru SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA	7.279	7.768	6.115	5.952	6.316
	Persentase	**78,93**	**82,90**	**79,82**	**87,05**	**98,12**
11.	**Pendidikan Non Formal**					

No.	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
	Paket A	33	64	40	110	92
	Paket B	138	282	360	445	454
	Paket C	356	363	895	1.050	1.185
	Jumlah	**527**	**709**	**1.295**	**1.605**	**1.731**

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu, Tahun 2020.

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat dijelaskan perkembangan pelayanan di bidang pendidikan di Kabupaten Luwu sebagai berikut.

a. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

APS merupakan ukuran daya serap pendidikan terhadap penduduk usia sekolah, dengan memperhitungkan adanya perubahan penduduk terutama pada usia muda. APS adalah perbandingan penduduk usia 4-6 Tahun (PAUD) 7-12 tahun (SD), 13-15 tahun (SLTP), dan 16-18 tahun (SLTA) yang sedang bersekolah terhadap total penduduk usia yang sama. Indikator ini memberikan gambaran tentang kemampuan dan kesadaran penduduk (dalam hal ini orang tua) dalam menyekolahkan anak-anaknya.

Ukuran yang banyak digunakan di sektor pendidikan seperti pertumbuhan jumlah murid lebih menunjukkan perubahan jumlah murid yang mampu ditampung di setiap jenjang sekolah. Sehingga, naiknya persentase jumlah murid tidak dapat diartikan sebagai semakin meningkatnya partisipasi sekolah. Kenaikan tersebut dapat pula dipengaruhi oleh semakin besarnya jumlah penduduk usia sekolah yang tidak diimbangi dengan ditambahnya infrastruktur sekolah serta peningkatan akses masuk sekolah sehingga partisipasi sekolah seharusnya tidak berubah atau malah semakin rendah. Namun, bila digunakan APS, maka akan ditemukan peningkatan partisipasi di tingkat SD. yang disebabkan semakin rendahnya jumlah penduduk usia SD.

Grafik 2.23.
Perkembangan APS PAUD
Tahun 2015-2019

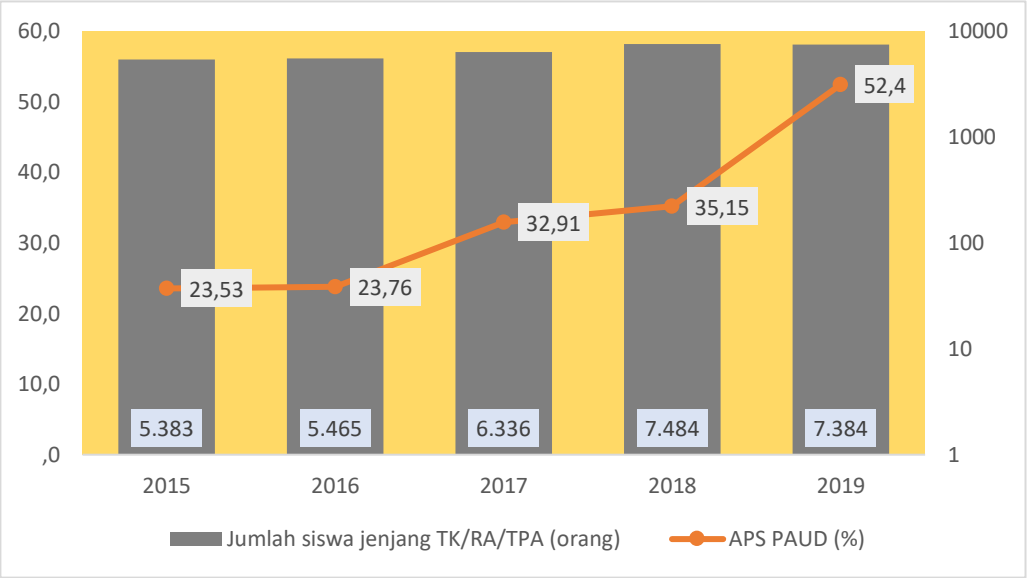

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu, Tahun 2020.

Pada tabel diatas diketahui bahwa pada tahun 2015 APS PAUD di Kabupaten Luwu sebesar 23,53%, meningkat menjadi 52,40% pada tahun 2019. Untuk jenjang pendidikan SD/MI, pada tahun 2015 mencapai 102,32%, sedangkan pada tahun 2019 APS SD sebesar 97,41%. Jenjang pendidikan SMP/MTs, pada tahun 2015 sebesar 103,64%, menjadi 93.81% pada tahun 2019. Menurunnya APS pada jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs adalah dikarenakan kebijakan yang tidak memperbolehkan anak bersekolah melebihi batas usianya.

Jika melihat dari data tersebut dapat dilihat bahwa jumlah peserta didik untuk PAUD di Kabupaten Luwu terus meningkat dari tahun ke tahun, menandakan masyarakat semakin ter-edukasi untuk menyekolahkan anaknya di tingkatan pra-sekolah, tentunya peningkatan ini adalah disebabkan peningkatan kesejahteraan masyarakat sehingga mampu menyekolahkan anaknya di jenjang pra-sekolah dan tersedianya sarana prasarana pendidikan pra sekolah secara inklusif yang difasilitasi oleh pemerintah.

Untuk jenjang pendidikan SD/MI, pada tahun 2015 jumlah peserta didik SD/MI di Kabupaten Luwu berjumlah 48.224 orang atau 102,32% dari jumlah anak usia 7-12 tahun yang berjumlah 47.131 orang. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat peserta didik SD/MI yang memiliki usia kurang dari 7 tahun atau lebih dari 12 tahun. Pada

tahun 2019, jumlah peserta didik SD/MI menjadi 47.211 orang atau 99,41% dari jumlah anak usia 7-12 tahun yang mencapai 47.491 orang. Penurunan angka partisipasi sekolah pendidikan SD/MI disebabkan adanya pembatasan usia masuk sekolah, dimana usia calon siswa yang hendak memasuki pendidikan SD/MI harus mencapai 7 tahun atau lebih.

Grafik 2.24.

Perkembangan APS Pendidikan Dasar dan Menengah
Tahun 2015-2019

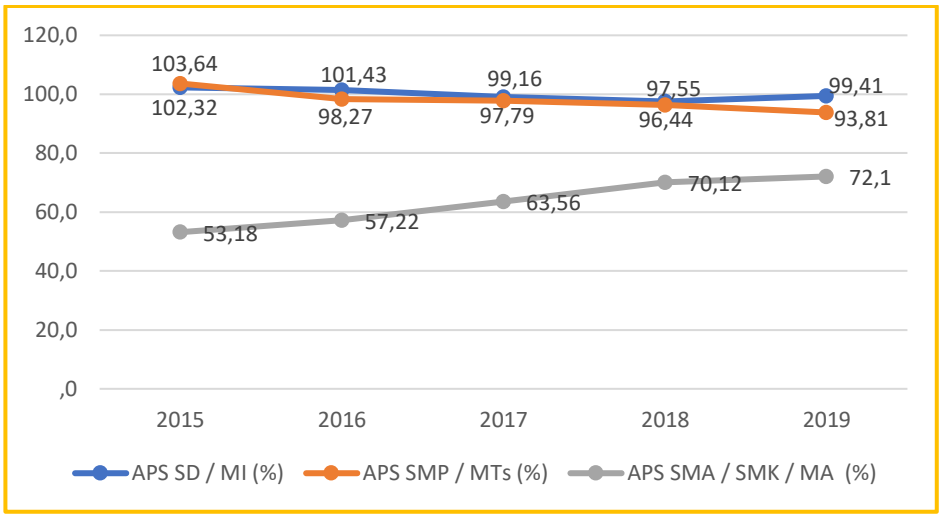

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu, Tahun 2020.

Untuk jenjang pendidikan SMP/MTs, pada tahun 2015 jumlah peserta didik berjumlah 24.257 orang dengan persentase terhadap jumlah anak usia 13-15 tahun adalah sebesar 103,64%, kemudian pada tahun 2019 peserta didik berjumlah 22.276 orang dengan persentase terhadap jumlah anak usia 13-15 tahun adalah sebesar 93,81%.

Sedangkan untuk jenjang pendidikan menengah pada periode tahun 2015-2019 mengalami peningkatan. Pada tahun 2015, jumlah peserta didik adalah 11.406 orang, sedangkan jumlah penduduk usia 16-19 tahun adalah 21.448 orang, sehingga APS sebesar 53,18%. Kondisi ini membaik pada tahun 2019 dengan APS menjadi 72,10% dimana peserta didik meningkat menjadi 16.274 orang, sedangkan jumlah penduduk pada usia yang sama mencapai 22.572 orang.

b. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Target dan realisasi indikator kinerja sasaran terjangkaunya dan terjaminnya kepastian memperoleh layanan pendidikan dasar berkualitas dengan memperhatikan inklusifitas dalam rangka

penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun adalah APK. APK mengindikasikan sejumlah penduduk yang mengikuti jenjang pendidikan formal tanpa melihat batasan umur usia sekolahnya.

APK di Kabupaten Luwu untuk jenjang pendidikan dasar cederung menurun, sedangkan untuk pendidikan menengah meningkat. Untuk jenjang pendidikan SD/MTs terjadi penurunan dari 102,39 pada tahun 2015 menjadi 94,45 pada tahun 2019. Untuk jenjang pendidikan SMP/MTs juga terjadi penurunan dari 104,23% menjadi 96,77%. Sedangkan jenjang pendidikan SMA/MA/SMK mengalami kenaikan dari 54,84% pada tahun 2015 menjadi 72,10% pada tahun 2019.

Ini menunjukkan bahwa persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut semakin menurun setiap tahunnya pada jenjang pendidikan dasar.

c. Angka Partisipasi Murni (APM)

APM adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk diusia yang sama. APM menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. APM di suatu jenjang pendidikan didapat dengan membagi jumlah siswa atau penduduk usia sekolah yang sedang bersekolah dengan jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang sekolah tersebut. APM sebagai salah satu indikator dalam layanan hak dasar masyarakat di bidang pendidikan yang digunakan untuk mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu sesuai usia sekolah. APM merupakan indikator daya serap yang baik karena APM melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2015 APM jenjang pendidikan SD di Kabupaten Luwu adalah sebesar 96,63% tetapi kemudian menurun menjadi 93,51% di tahun 2019. Untuk jenjang pendidikan SMP/MTs adalah sebesar 80,68% di tahun 2015, kemudian menurun menjadi 82,73% di tahun 2019. Sedangkan untuk jenjang pendidikan menengah terjadi peningkatan yaitu dari 54,84% pada tahun 2015 menjadi 72,10% pada tahun 2019. Penurunan APM pada jenjang pendidikan SD/sederajat dan SMP/ sederajat perlu dianalisis apa yang menjadi faktor penyebabnya, untuk kemudian dirumuskan kebijakan yang diperlukan.

d. Angka Kelulusan

Pelaksanaan evaluasi yang diselenggarakan setiap tahun pelajaran merupakan implementasi dari fungsi manajemen. Bahwa dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional dilakukan evaluasi sebagai bentuk akuntabilitas yang indikator outputnya adalah Angka Kelulusan (AL). Oleh karena itu angka kelulusan ini menggambarkan capaian atas keberhasilan satuan pendidikan menamatkan sejumlah peserta didik atas ketuntasan kriteria dan standar nilai yang ditetapkan.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa angka kelulusan pada jenjang pendidikan SD mengalami fluktuasi. Tahun 2015 angka kelulusan jenjang pendidikan SD di Kabupaten Luwu adalah sebesar 96,52% dan menjadi 98,73% di tahun 2019. Untuk jenjang pendidikan SMP/MTs juga mengalami fluktuasi. Angka kelulusan paling tinggi terjadi pada tahun 2016 yang mencapai 99,35%, tetapi menurun menjadi 76.78% pada tahun 2019. Namun demikian, angka kelulusan pada tahun 2018 ini lebih tinggi jika dibandingkan tahun 2015 yang hanya sebesar 95,78%. Sedangkan untuk jenjang SMA/SMK/MA menurun dari 98,94% pada tahun 2015 menjadi 98.57% pada tahun 2019.

e. Angka Melanjutkan (AM)

AM digunakan untuk mengetahui seberapa jauh lulusan dari satu jenjang pendidikan melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa angka melanjutkan dari jenjang pendidikan SD ke SMP di Kabupaten Luwu mengalami fluktuasi dan cenderung menurun yaitu dari 95,45% pada tahun 2015 menjadi 97.66% pada tahun 2019. Sedangkan angka melanjutkan dari SMP ke SMA cenderung meningkat, yaitu dari 95,32% pada tahun 2015 menjadi 96,46% pada tahun 2019.

Grafik 2.25.
Perkembangan Angka Melanjutkan Pendidikan
Tahun 2015-2019

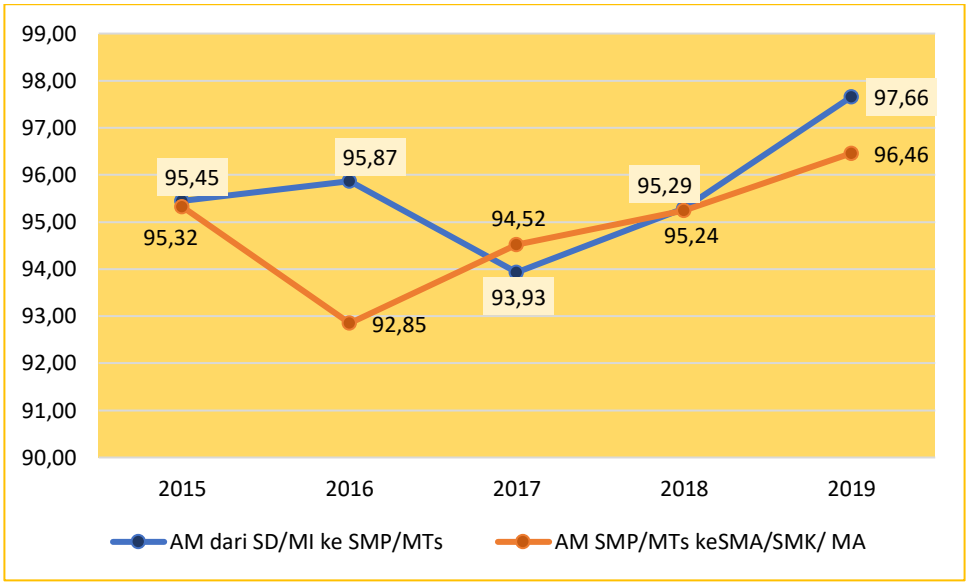

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu, Tahun 2020.

f. Fasilitas Pendidikan

Berdasarkan Tabel 2.32 tergambar bahwa kondisi ruang kelas dalam kondisi baik di Kabupaten Luwu cukup memprihatinkan.

Grafik 2.26.
Perkembangan Ruang Kelas SD/MI Dalam Kondisi Baik
Tahun 2015-2019

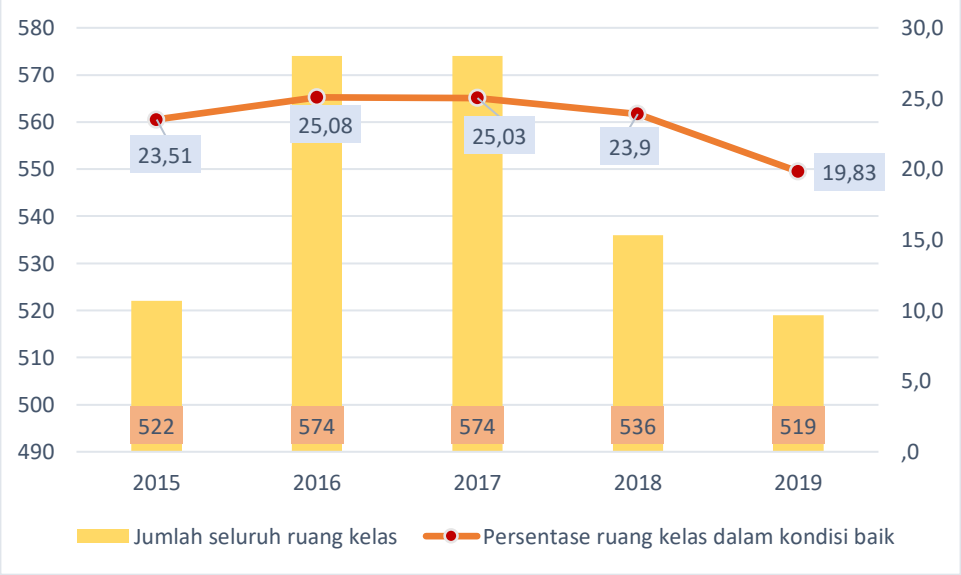

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu, Tahun 2020.

Untuk SD/MI pada tahun 2019 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2015, yaitu dari 23,51% menjadi 19,83%. Sedangkan untuk jenjang pendidikan SMA/sederajat mengalami peningkatan dari 77,78% pada tahun 2015 menjadi 88,63% pada tahun 2019.

g. Rasio Ketersediaan Sekolah Pendidikan Dasar

Rasio ketersediaan sekolah per jumlah penduduk rata-rata diartikan sebagai perbandingan dari jumlah sekolah pada satuan pendidikan per wilayah dengan jumlah rentang usia peserta didik pada suatu jenjang pendidikan. Hal ini digunakan untuk mengetahui rata-rata besarnya kepadatan siswa pada suatu sekolah atau daerah tertentu dengan interpretasi bahwa semakin tinggi nilai rasio, berarti tingkat kepadatan kelas makin tinggi tetapi kenyamanan belajar akibat terbatasnya ruang semakin tidak memadai.

Dari data pada Tabel 2.32 dapat diketahui bahwa rasio ketersediaan sekolah di tingkat pendidikan dasar semakin meningkat. Pada tahun 2015 adalah sebesar 64,07%, yang berarti bahwa tersedia 64 sampai 65 sekolah untuk setiap 10.000 penduduk pada usia sekolah pendidikan dasar. Angka ini menurun menjadi 38,57% pada tahun 2019. Untuk jenjang pendidikan menengah juga mengalami peningkatan dari 29,84% pada tahun 2015 menjadi 30,85% pada tahun 2019.

h. Rasio Guru/Murid

Pelayanan pendidikan dapat diamati dari rasio guru terhadap siswa. Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru pada suatu tingkat pendidikan per 10.000 jumlah murid pada jenjang pendidikan tersebut. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar. Selain itu juga untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran.

Berdasarkan data pada Tabel 2.32 dapat dilihat bahwa rasio guru terhadap murid pada jenjang pedidikan dasar semakin menurun, dari 960,06 pada tahun 2015 menjadi 763,10 pada tahun 2019. Ini berarti setiap 10.000 murid pendidikan dasar di Kabupaten Luwu, tersedia sejumlah 763 sampai dengan 764 orang guru. Sedangkan untuk pendidikan menengah mengalami penurunan dari 1.373,70 pada tahun 2015 menjadi 838,51 pada tahun 2019.

Grafik 2.27.

Perkembangan Rasio Guru terhadap Murid
Tahun 2015-2019

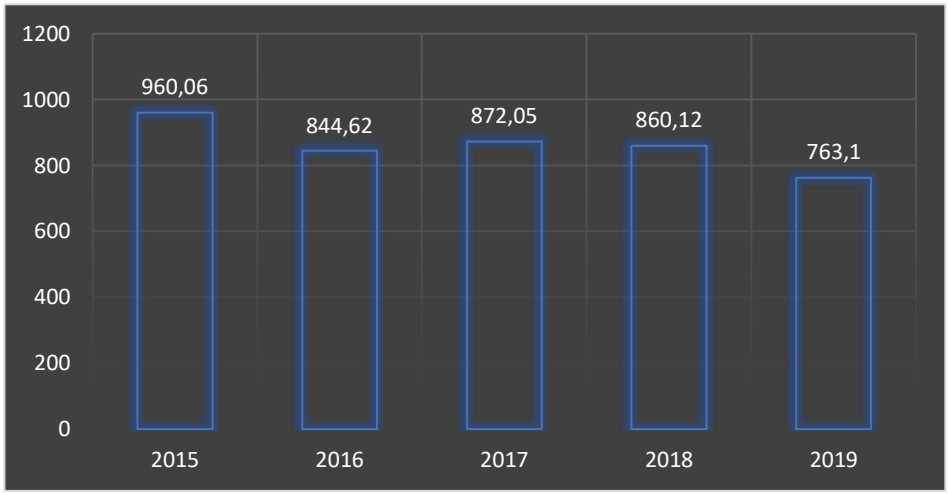

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2020.

i. Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)

Angka Melek Huruf (AMH) merupakan program keaksaraan fungsional yang membimbing masyarakat untuk berkemampuan menguasai keterampilan membaca dan menulis. Angka Melek Huruf (AMH) menunjukan trend yang signifikan meningkat tiap tahunnya hingga jika melihat data tabel yang ada di bawah menunjukkan angka melek huruf sudah hampir mencapai angka 100%.

Kenaikan ini disebabkan adanya kebulatan tekad di masing-masing daerah menjadikan program strategis dalam meningkatan Indekspembangunan manusia. Oleh karena itu bantuan pendanaan melalui dekonsentrasi memberikan alokasi dana yang signifikan untuk layanan bagi warga masyarakat yang tidak melek huruf setiap tahunnya.

j. Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV

Guru memegang peranan strategis terutama dalam membentuk karakter bangsa melalui pengembangan kepribadian dan nilai-nilai yang diinginkan. Oleh karena itu Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional dan memiliki kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Dengan peningkatan persentase guru yang berkesempatan memperoleh kualifikasi S1/D-IV disebabkan peran dan koordinasi

dari pusat ke provinsi dan Kabupaten/kota memberikan perhatian dan layanan dengan memberi kesempatan/izin untuk melanjutkan pendidikan sebagai tuntutan dari Satndar Pendidik dan Tenaga Kependidikan dan tuntutan Undang-Undang Guru dan Dosen. Kualifikasi guru adalah keahlian yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan guru dengan melalui pendidikan khusus keahlian. Guru pada tiap satuan pendidikan harus memenuhi kualifikasi akademik dengan bidang keilmuan yang relevan dengan bidang studi atau mata pelajaran yang mereka ajarkan di sekolahnya sehingga mereka disebut kompeten untuk bidang pekerjaannya.

Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV di Kabupaten Luwu pada tahun 2015-2019 mengalami kenaikan, yaitu dari 78,93% menjadi 98,12% pada tahun 2019. Hal yang perlu ditekankan pada masa mendatang adalah meningkatkan keberdayaan para guru yang telah memenuhi kualifasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

k. Pendidikan Non Formal

Berdasarkan data pada Tabel 2.32 dapat dilihat bahwa Jumlah peserta didik non formal mengalami peningkatan dari tahun 2015 sampai dengan 2019, yaitu dari 527 orang menjadi 1.731 orang. Peningkatan tertinggi adalah pada Paket C yaitu dari 356 orang pada tahun 2015 menjadi 1.185 orang pada tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa diperlukan upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menyekolahkan anaknya pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usia anak didik.

2. Kesehatan

Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, disebutkan bahwa pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Tingkat kualitas kesehatan merupakan indikator penting untuk menggambarkan mutu pembangunan manusia suatu daerah. Semakin sehat kondisi suatu masyarakat, maka akan semakin mendukung proses dan dinamika pembangunan ekonomi suatu daerah semakin baik. Beberapa indikator penting yang dapat menggambarkan kondisi kesehatan suatu daerah

antara lain; ketersediaan fasilitas kesehatan, angka kesakitan (morbiditas), pemberian ASI, imunisasi dan penolong kelahiran.

Perkembangan penyelenggaraan bidang urusan kesehatan di Kabupaten Luwu periode tahun 2015-2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.33.
Data dan Informasi Penyelenggaraan Bidang Urusan Kesehatan
Tahun 2015-2019

No	Indikator	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	**Puskesmas dan Puskesmas Pembantu**					
	Jumlah Puskesmas (unit)	22	22	22	22	22
	Jumlah Puskesmas Pembantu (unit)	105	105	105	110	112
	Jumlah seluruh kecamatan	22	22	22	22	22
	Jumlah desa / kelurahan	227	227	227	227	227
	Cakupan Puskesmas	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	Cakupan Puskesmas Pembantu	**46,26**	**46,26**	**46,26**	**48,46**	**49,34**
2.	**Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) per 1000 Kelahiran Bayi**					
	Jumlah kematian bayi (berumur kurang 1 Tahun) pada 1 thn tertentu (jiwa)	52	54	75	68	57
	Jumlah kelahiran hidup pada 1 thn tertentu (jiwa)	6.554	6.603	6.599	6.355	6.273
	Angka Kematian Bayi (AKB)	**0,0079**	**0,0081**	**0,0113**	**0,0107**	**0,0091**
	AKHB (1-AKB)	**0,9921**	**0,9919**	**0,9887**	**0,9893**	**0,9990**
3.	**Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran Hidup**					
	Jumlah kematian bayi (berumur kurang 5 Tahun) pada 1 tahun tertentu (jiwa)	56	62	82	69	61
	Jumlah kelahiran hidup pada 1 Tahun tertentu (jiwa)	6.554	6.603	6.599	6.355	6,273
	Rasio	**8,54**	**9,39**	**12,43**	**10,86**	**9,72**
4.	**Angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran Hidup**					
	Jumlah kematian bayi (berumur kurang 1 Bulan) pada 1 tahun tertentu (jiwa)	41	40	47	48	41

No	Indikator	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
	Jumlah kelahiran hidup pada 1 Tahun tertentu (jiwa)	6.554	6.603	6.599	6.355	6,273
	Rasio	**6,29**	**6,06**	**7,12**	**7,55**	**6,54**
5.	**Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup**					
	Jumlah Ibu Hamil yang meninggal karena Hamil, bersalin dan Nifas di suatu wilayah tertentu selama 1 Thn	11	7	7	6	6
	Jumlah kelahiran hidup di wilayah tersebut dan pada kurun waktu yg sama (jiwa)	6.554	6.603	6.599	6.353	6,273
	AKI	**167,80**	**106,01**	**106,08**	**94,40**	**95,65**
6.	**Jumlah Posyandu dan Balita**					
	Jumlah Posyandu (unit)	365	365	416	418	420
	Jumlah Balita (orang)	21.186	17.103	18.866	18.522	29.127
	Rasio per satuan balita	**0,0172**	**0,0213**	**0,0221**	**0,0226**	**0,0144**
7.	**Puskesmas, Poliklinik dan Pustu**					
	Jumlah Puskesmas, poliklinik, pustu (unit)	218	218	218	224	254
	Jumlah penduduk (orang)	350.218	353.277	356.305	359.209	362.027
	Rasio per satuan penduduk	**0,0006**	**0,0006**	**0,0006**	**0,0006**	**0,0007**
8.	**Jumlah dan Rasio Rumah Sakit Per jumlah Penduduk**					
	Jumlah Rumah Sakit Umum (unit)	1	2	2	2	2
	Jumlah Rumah Sakit AD/AU/ AL/POLRI/Swasta (unit)	0	0	0	0	1
	Jumlah Rumah Sakit Daerah (unit)	1	1	1	1	1
	Jumlah seluruh Rumah Sakit (unit)	1	2	2	2	2
	Jumlah Penduduk (orang)	350.218	353.277	356.305	359.209	362.027
	Rasio	**1:350.2187**	**1:176.638**	**1:182.652**	**1:179.604**	**1:181.013**
9.	**Dokter/Tenaga Medis**					
	Jumlah Dokter (orang)	70	67	80	84	104
	Jumlah Penduduk (orang)	350.218	353.277	356.305	359.209	362.027
	Rasio per satuan penduduk	**0,00020**	**0,00019**	**0,00022**	**0,00023**	**0,00029**
10.	**Komplikasi kebidanan yang ditangani**					
	Jumlah komplikasi kebidanan yang	610	954	1.112	1.048	1.188

No	Indikator	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
	mendapat penanganan difinitif di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu					
	Jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan di satu wilayahkerja pada kurun waktu yang sama (orang)	1.162	1.451	1.451	1.476	1.476
	Cakupan	**52,50**	**65,75**	**76,64**	**71,00**	**80,49**
11.	**Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan**					
	Jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu (jiwa)	6.585	6.585	6.528	6.326	6.237
	Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama (jiwa)	7.392	6.925	6.925	7.046	7.046
	Cakupan	**89,00**	**95,01**	**94,27**	**89,78**	**88,52**
12.	**Desa / kelurahan Universal Child Immunization (UCI)**					
	Jumlah Desa/Kelurahan UCI	220	219	199	199	203
	Jumlah Desa/Kelurahan	227	227	227	227	227
	Cakupan	**96,91**	**96,47**	**87,67**	**87,67**	**89,42**
13.	**Balita Gizi Buruk mendapat perawatan**					
	Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan disarana pelayanan kesehatan disatu wilayah kerja (jiwa)	9	13	9	5	30
	Jumlah seluruh balita gizi buruk disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu (jiwa)	9	13	9	5	30
	Cakupan	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
14.	**Anak Usia 1 Tahun Yang Diimunisasi Campak**					
	Jumlah anak usia 1 Tahun yang mendapat Imunisasi Campak di suatu wilayah	6.551	6.531	6.272	6.272	6.768

No	Indikator	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
	selama 1 Tahun (jiwa)					
	Jumlah anak usia 1 tahun pada wilayah dan tahun yang sama (jiwa)	6.643	7.047	6.817	6.475	7.554
	Persentase	**98,61**	**92,67**	**92,00**	**96,86**	**89,59**
15.	**Cakupan Balita Pneumonia Yang Ditangani**					
	Jumlah penderita Pneumonia balita (jiwa)	102	101	121	116	158
	Jumlah penderita Pneumonia balita yang ditangani (jiwa)	102	101	121	116	158
	Jumlah perkiraan penderita Pneumonia balita di suatu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama (jiwa)	1.091	1.092	1.166	1.104	1.338
	Persentase	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
16.	**Penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA**					
	Jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang ditemukandan diobati di satu wilayah kerja selama 1 Tahun (orang)	286	324	320	300	606
	Jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+) dalam Kurun wkt yang sama (orang)	533	537	602	690	1.005
	Cakupan	**53,66**	**60,34**	**53,16**	**43,48**	**60,30**
17.	**Tingkat prevalensi tuberkulosis (per 100.000 penduduk)**					
	Banyaknya kasus penderita TBC (baru dan lama) (orang)	489	489	592	637	640
	Jumlah penduduk pada kurun waktu yang sama (orang)	350.218	353.277	356.305	359.209	362.027
	Persentase (%)	**0,14**	**0,14**	**0,17**	**0,18**	**0,19**
18.	**Tingkat kematian karena tuberkulosis (per 100.000 penduduk)**					
	Jumlah pasien TB yang meninggal (orang)	8	29	19	n.a.	28
	Jumlah penduduk pada kurun waktu yang sama (orang)	350.218	353.277	356.305	359.209	362.027
	Persentase (%)	**0,002**	**0,008**	**0,005**	**n.a**	**0,008**
19.	**Kasus tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS**					
	Jumlah pasien Tuberkulosis BTA yang mendapat	488	489	592	637	640

No	Indikator	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
	pengobatan melalui DOTS (orang)					
	Jumlah pasien baru TB paru BTA yang diperkirakan ada dalam wilayah tersebut (orang)	533	537	602	690	1.005
	Persentase	**74,90**	**91,56**	**91,06**	**98,34**	**63,68**
20.	**Kasus tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS**					
	Jumlah pasien tuberkulosis paru BTA yang sembuh disuatu wilayah selama 1 tahun (orang)	198	208	206	232	231
	Jumlah pasien TB Paru BTA yang diobati di wilayah dan pada kurun waktu yang sama (orang)	325	287	324	334	300
	Persentase	**60,92**	**72,47**	**63,58**	**69,46**	**77,00**
21.	**Penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD**					
	Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP di satu wil. Kerja selama 1 Tahun (orang)	41	60	67	14	28
	Jumlah penderita DBD yang ditemukan di satu wilayah dalam Kurun waktu yang sama (orang)	41	60	67	14	28
	Cakupan	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
22.	**Prevalensi HIV/AIDS (%) dari total populasi**					
	Jumlah pasien HIV dan AIDS disuatu wilayah pada kurun waktu tertentu (orang)	10	5	31	19	16
	Jumlah penduduk dalam kurun waktu yang sama (orang)	350.218	353.277	356.305	359.209	362.027
	Persentase	**0,003**	**0,001**	**0,009**	**0,005**	**0,004**
23.	**Pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin**					
	Jumlah kunjungan pasien miskin di sarana Kesehatan Strata 1 (orang)	129.275	123.085	119.972	127.985	183.314
	Jumlah seluruh penduduk miskin di Kabupaten (orang)	166.575	153.088	184.734	188.121	253.441
	Cakupan	**77,59**	**80,40**	**64,94**	**68,03**	**72,33**
24.	**Kunjungan bayi**					

No	Indikator	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
	Jumlah kunjungan bayi memperoleh pelayanan kes. sesuai standar di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu (orang)	6.452	7.393	6.355	6.776	6.352
	Jumlah seluruh bayi lahir hidup di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama (orang)	6.554	6.603	6.599	6.355	6.273
	Cakupan	**98,44**	**111,96**	**96,30**	**106,62**	**101,26**
25.	**Kunjungan Ibu hamil K4**					
	Jumlah ibu hamil yang memperoleh pelayanan antenatal K4 di satu wilayah kerja pada waktu tertentu (orang)	6.564	6.457	6.412	6.270	5.978
	Jumlah sasaran ibu hamil di suatu wilayah kerja dalam kurun waktu sama (orang)	7.744	7.254	7.254	7.380	7.380
	Cakupan	**84,76**	**89,01**	**88,39**	**84,96**	**81,00**
26.	**Pelayanan nifas**					
	Jumlah peserta ibu nifas yang telah memperoleh 3 kali pelayanan nifas sesuai standar di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu (orang)	6.368	6.480	6.482	6.336	6.106
	Seluruh ibu nifas di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama (orang)	7.392	6.925	6.925	7.046	7.046
	Cakupan	**86,15**	**93,57**	**93,60**	**89,92**	**86,66**
27.	**Neonatus dengan komplikasi yang ditangani**					
	Jumlah neonates dengan komplikasi yang tertangani (orang)	171	389	534	586	491
	Jumlah seluruh neonitas dengan komplikasi yang ada (orang)	1.408	989	989	1.006	1.006
	Cakupan	**12,14**	**39,33**	**53,99**	**58,25**	**48,81**
28.	**Pelayanan anak balita**					
	Jumlah anak balita yang memperoleh pelayanan pemantauan minimal 8 kali di	12.482	16.786	18.881	20.457	20.849

No	Indikator	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
	satu wilayah kerja pada waktu tertentu (orang)					
	Jumlah seluruh anak balita di satu wilayah kerja dalam waktu yang sama (orang)	28.809	28.809	30.754	29.132	29.306
	Cakupan	**43,33**	**58,27**	**61,39**	**70,22**	**71,14**
29.	**Penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat**					
	Jumlah murid SD dan setingkat yang diperiksa kesehatannya oleh tenaga kesehatan atau tenaga terlatih disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu (orang)	4.852	5.759	6.910	6.508	6.499
	Jumlah murid SD dan setingkat disatu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama (orang)	4.945	5.759	7.378	7.248	7.248
	Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat	**98,11**	**100,00**	**93,66**	**89,79**	**89,67**

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu, Tahun 2020.

Berdasatkan data pada tabel di atas, dapat dijelaskan perkembangan pelayanan di bidang kesehatan di Kabupaten Luwu sebagai berikut.

a. Cakupan Puskesmas

Keberadaan puskesmas dan puskesmas pembantu merupakan bentuk pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan. Melalui puskesmas dan puskesmas pembantu, masyarakat baik di daerah perkotaan maupun di daerah pedesaan akan dengan mudah memperoleh berbagai pelayanan dan informasi kesehatan. Rasio puskesmas dan pustu merupakan perhitungan untuk mengetahui suatu wilayah dalam cakupannya untuk memenuhi pelayanannya kepada penduduk. Tujuannya adalah agar pelayanan kesehatan dapat terpenuhi sesuai dengan standar pelayanan.

Dalam Pasal 10 Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat dinyatakan bahwa Puskesmas harus didirikan pada setiap kecamatan, dan dalam kondisi tertentu pada satu kecamatan dapat didirikan lebih dari satu puskesmas yang dapat ditetapkan berdasarkan pertimbangan

kebutuhan pelayanan, jumlah penduduk dan aksesibilitas. Sementara berdasarkan Permenkes Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik pada pasal 5 disebutkan bahwa Pemerintah Daerah kabupaten/kota mengatur persebaran klinik yang diselenggarakan masyarakat di wilayahnya dengan memperhatikan kebutuhan pelayanan. Sehingga dalam hal ini tidak ada penetapan rasio jumlah penduduk per puskesmas, mengingat kebutuhan fasilitas pelayanan kesehatan di daerah berbeda-beda termasuk luas wilayah pada kabupaten/kota tersebut serta mempertimbangkan ketersediaan SDM kesehatan sesuai kompetensi.

Jika melihat Tabel 2.33, jumlah puskesmas yang terdapat di Kabupaten Luwu sudah cukup memadai sebab jumlah puskesmas telah sama dengan jumlah kecamatan sehingga telah memenuhi PMK. Pemerintah Kabupaten Luwu ke depan akan fokus untuk meningkatkan sarana dan prasarana puskesmas di setiap kecamatan agar dapat dicapai peningkatan kualitas layanan puskesmas.

Puskesmas merupakan kewenangan Kabupaten/Kota. Distribusi tenaga kesehatan (jumlah dan jenis tenaga) tidak merata di seluruh Puskesmas, banyak terpusat di kawasan perkotaan. Tingginya mutasi petugas yang sudah dilatih terkait manajemen dan akreditasi Puskesmas serta penempatan Pejabat/Petugas di Puskesmas tidak sesuai dengan kompetensi kesehatan. Permasalahan terkait capaian indikator kinerja:

1) Distribusi tenaga kesehatan (jumlah dan Jenis tenaga) tidak merata di seluruh Puskesmas, banyak terpusat di Kawasan perkotaan;
2) Tingginya mutasi petugas yang sudah dilatih terkait manajemen dan akreditasi Puskesmas;
3) Penempatan penjabat/Petugas di Puskesmas tidak sesuai dengan kompetensi menurut Permenkes 75 Tahun 2014;

Dari data Tabel 2.33 tersebut dapat diketahui bahwa cakupan puskesmas di Kabupaten Luwu telah mencapai 100% artinya bahwa jumlah puskesmas yang terdapat di Kabupaten Luwu telah sama banyak atau telah mengcover semua jumlah kecamatan yang terdapat di Kabupaten Luwu, kedepannya pemerintah akan lebih meningkatkan lagi kualitas sarana prasarana dan pelayanan puskesmas di Kabupaten Luwu sehingga bukan hanya cukup dari segi kuantitas namun juga cukup dari segi kualitas.

Cakupan puskesmas pembantu terhadap jumlah seluruh desa di Kabupaten Luwu masih rendah, hal ini menyebabkan pelayanan

kesehatan dasar di wilayah perdesaan masih memerlukan perhatian dari pemerintah khususnya bagi daerah terisolir. Dari data yang ada dapat diketahui cakupan puskesmas pembantu dari tahun ke tahun pertumbuhan jumlahnya kurang signifikan. Pada tahun 2015 jumlah puskesmas pembantu dibandingkan dengan total desa/kelurahan yang terdapat di Kabupaten Luwu adalah sebesar 46,26%, kemudian angka tersebut meningkat 3,08% menjadi 49,34 di tahun 2019. Pemerintah akan berfokus untuk menambah jaringan puskesmas pembantu sehingga setiap desa yang terdapat di Kabupaten Luwu dapat tercover dengan baik.

b. Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) per 1000 Kelahiran Bayi

Kejadiaan kematian dalam masyarakat dari waktu ke waktu dapat memberi gambaran perkembangan derajat kesehatan masyarakat atau dapat digunakan sebagai indikator penilaian keberhasilan pelayanan kesehatan dan program pembangunan kesehatan lainnya. Tinggi rendahnya angka kematian, secara umum dipengaruhi erat dengan tingkat kesakitan golongan bayi, balita dan ibu maternal (hamil, melahirkan, nifas). Angka kematian bayi merupakan indikator penting untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat, karena bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat orang tua si bayi tinggal dan sangat erat kaitannya dengan status sosial orang tua si bayi. Kemajuan yang dicapai dalam bidang pencegahan dan pemberantasan berbagai penyakit penyebab kematian akan tercermin secara jelas dengan menurunnya tingkat AKB. Dengan demikian angka kematian bayi merupakan tolok ukur yang sensitif dari semua upaya intervensi yang dilakukan pemerintah khususnya di bidang kesehatan

Berdasarkan Tabel 2.33 di atas dapat disimpulkan bahwa keselamatan kelahiran bayi telah sangat baik di Kabupaten Luwu sebab angka kelangsungan hidup bayi pada tahun 2015 adalah sebesar 99,21%, kemudian tahun 2016 menurun menjadi sebesar 99,19%, tahun 2017 menurun menjadi sebesar 98,87%, tahun 2018 meningkat kembali menjadi sebesar 98,93% dan tahun 2019 meningkat lagi menjadi sebesar 99,90%. Walaupun keselamatan kelahiran bayi telah sangat baik di Kabupaten Luwu tetapi terjadi fluktuasi angka kelangsungan hidup bayi dengan kecenderungan menurun. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus berkomitmen untuk lebih meningkatkan lagi kualitas pelayanan kelahiran hingga di masa yang akan datang diharapkan angka kelangsungan hidup bayi dapat mencapai angka 100%.

c. Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran Hidup

Berdasarkan Tabel 2.33, dapat dilihat bahwa pada tahun 2015 angka kematian balita per-1000 kelahiran hidup dengan angka rasio sebesar 8,54, selanjutnya naik menjadi 10,86 pada tahun 2018 dan kemudian turun menjadi 9,72 pada tahun 2019.

Dalam usaha meminimalkan AKB diperlukan penanganan yang intensif baik dari faktor eksternal maupun internal, antara lain melalui keberadaan penolong persalinan yang mumpuni dan kemudahan akses ke tempat pelayanan kesehatan serta peningkatan perawatan bayi seperti pemberian asupan makanan yang cukup serta pemberian ASI dan imunisasi.

Kasus kematian Balita dari tahun 2015 sampai 2019 di Kabupaten Luwu berfluktuasi. Kematian balita pada umumnya disebabkan oleh Diare dan Phneumonia, yang dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dan perilaku hidup sehat masyarakat yang belum optimal serta bagaimana masyarakat dalam mendapatkan pertolongan pada anak sakit. Disamping itu hal ini juga berkaitan dengan deteksi dini faktor risiko serta tatalaksana dalam penanganan balita sakit.

d. Angka Kematian Neonatal Per 1000 Kelahiran Hidup

Berdasarkan Tabel 2.33, pada tahun 2015 hingga 2019 Cakupan Kematian Neonatus masih fluktuatif, hal ini disebabkan diantaranya adalah kualitas kesehatan ibu hamil yang masih rendah, kompetensi petugas dalam penatalaksanaan bayi baru lahir masih kurang, dukungan sarana prasarana yang kurang memadai serta deteksi faktor resiko yang belum akurat. Dapat dilihat pada tahun 2015-2016 terjadi penurunan rasio angka kematian neonatal dengan angka berturut-turut yakni 6,29, dan 6,06, kemudian meningkat di tahun 2017 dan 2018 dengan masing-masing angka rasio yakni 7,12 dan 7,55. Dan menurun kembali pada tahun 2019 menjadi 6,54.

Kematian neonatal dari tahun 2015 hingga 2019 rata-rata disebabkan oleh BBLR dan Asfiksa, hal ini berkaitan dengan kualitas kesehatan ibu hamil yang melahirkan bayi BBLR dan kemampuan petugas dalam penanganan awal bayi beresiko serta dukungan sarana prasarana dalam penanganan bayi baru lahir bermasalah. Kondisi bayi baru lahir bermasalah disebabkan oleh kualitas kesehatan ibu pada masa sebelum dan saat hamil yang mempengaruhi kondisi kesehatan bayi baru lahir, sementara kualitas kesehatan ibu hamil ini juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan sosial budaya.

e. Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup

Kematian ibu atau maternal adalah kematian wanita yang terjadi pada saat kehamilan, atau dalam 42 hari setelah berakhirnya kehamilan. Kematian ibu disebabkan oleh apapun yang berhubungan dengan kehamilan, atau yang diperberat oleh kehamilan tersebut atau penanganannya. Kematian ibu bukan kematian yang disebabkan oleh kecelakaan atau kebetulan. Angka Kematian Ibu (AKI) menjadi salah satu indikator yang mendapatkan perhatian global. AKI menjadi indikator dalam pencapaian *Sustainable Development Goals (SDGs)* yaitu Meningkatkan Kesehatan Ibu. SDGs menargetkan bahwa setiap negara yang telah menyepakati SDGs harus berhasil mengurangi ¾ resiko jumlah kematian ibu. Oleh karena itu, Indonesia harus berhasil menurunkan angka kematian ibu menjadi 167,8 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2015. Kasus kematian ibu di Kabupaten Luwu pada tahun 2015 adalah 167,80 per 100.000 kelahiran hidup, tahun 2016 meningkat menjadi 106,01, kemudian meningkat menjadi 106,08 pada tahun 2017, dan jumlah kematian ibu menurun menjadi 94,40 per 100.000 pada tahun 2018. Selanjutnya jumlah kematian ibu meningkat menjadi 95,65 pada tahun 2019.

Capaian penurunan angka kematian ibu per 100.000 kelahiran dikarenakan makin maksimalnya deteksi dini risiko bagi ibu hamil dan semakin meningkatnya kualitas pelayanan baik kualitas pelayanan dari sisi tenaga medis maupun sisi pelayanan sarana dan prasarana, kedepan pemerintah berkomitmen untuk semakin meningkatkan hal tersebut.

f. Jumlah Posyandu dan Balita

Posyandu adalah suatu wadah komunikasi alih teknologi dalam pelayanan kesehatan masyarakat dari Keluarga Berencana, oleh masyarakat dan untuk masyarakat dengan dukungan pelayanan serta pembinaan teknis dari petugas kesehatan dan keluarga berencana yang mempunyai nilai strategis untuk pengembangan sumber daya manusia sejak dini.

Pemeliharaan dan perawatan kesejahteraan ibu dan anak-anak sejak usia dini, merupakan suatu strategi dalam upaya pemenuhan pelayanan dasar yang meliputi peningkatan derajat kesehatan dan gizi yang baik, lingkungan yang sehat dan aman, pengembangan psikososial/emosi, kemampuan berbahasa dan pengembangan kemampuan kognitif (daya pikir dan daya cipta) serta perlindungan anak. Pengalaman empirik dibeberapa tempat menunjukan, bahwa strategi pelayanan kesehatan dasar masyarakat dengan fokus pada ibu dan anak seperti itu, dapat dilakukan pada Posyandu.

Karena Posyandu merupakan wadah peran serta masyarakat untuk menyampaikan dan memperoleh pelayanan kesehatan dasarnya, maka diharapkan pula strategi operasional pemeliharaan dan perawatan kesejahteraan ibu dan anak secara dini, dapat dilakukan di setiap posyandu. Terkait dengan hal tersebut diatas perlu dilakukan analisis rasio posyandu terhadap jumlah balita dalam upaya peningkatan fasilitasi pelayanan pemenuhan kebutuhan tumbuh kembang anak sejak dalam kandungan, dan agar status gizi maupun derajat kesehatan ibu dan anak dapat dipertahankan dan atau ditingkatkan.

Pembentukan Posyandu sebaiknya tidak terlalu dekat dengan Puskesmas agar pendekatan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat lebih tercapai dan idealnya satu Posyandu melayani 100 balita. Oleh karena itu perlu dihitung rasio ketersediaan posyandu per balita. Kegunaannya untuk mengetahui berapa selayaknya jumlah posyandu yang efektif tersedia sesuai dengan tingkat penyebarannya serta sebagai dasar untuk merevitalisasi fungsi dan peranannya dalam pembangunan daerah.

Keberadaan posyandu merupakan upaya peningkatan kualitas kesehatan ibu, bayi, dan balita. Berdasarkan Tabel 2.33, terlihat bahwa jumlah posyandu di Kabupaten Luwu relatif meningkat. Pada tahun 2015 jumlah posyandu sebanyak 365 unit, meningkat menjadi 420 unit pada tahun 2019. Sedangkan jumlah balita pada tahun 2015 sebanyak 21.186 jiwa, meningkat pada tahun 2019 sebanyak 29.127 jiwa. Rasio Posyandu persatuan Balita pada tahun 2015 adalah 0,172 dan menurun menjadi 0,0144 per 1000 balita pada tahun 2019. Permasalahan dalam fungsi pelayanan posyandu diantaranya:

a. Masyarakat tidak membawa balitanya kembali ke Posyandu setelah imunisasi dasarnya lengkap;
b. Pelayanan posyandu kurang inovatif;
c. Keterlibatan lintas sektor (Tim Pokjanal Posyandu) kurang maksimal dalam melakukan pembinaan dan pengembangan Posyandu.

g. Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Pustu

Berdasarkan Tabel 2.33, dapat dilihat bahwa jumlah sarana pelayanan kesehatan yang terdiri Puskesmas, Poliklinik dan Pustu di Kabupaten Luwu mengalami peningkatan. Pada tahun 2015 jumlah sarana pelayanan kesehatan adalah 218 unit dan meningkat menjadi 254 unit pada tahun 2019. Jika dibandingkan dengan jumlah

penduduk, dapat diukur rasio ketersediaan sarana pelayanan kesehatan di Kabupaten Luwu yaitu sebesar 0,0007.

h. Jumlah dan Rasio Rumah Sakit Per jumlah Penduduk

Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Rumah Sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan karateristik tersendiri yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan kesehatan, kemajuan teknologi, dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang harus tetap mampu meningkatkan pelayanan yang lebih bermutu dan terjangkau oleh masyarakat agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya; oleh karena itu, peningkatan terhadap mutu dan jangkauan pelayanan Rumah Sakit merupakan hak rakyat yang harus terus menerus memperoleh perhatian pemerintah.

Dari data tersebut pada Tabel 2.33 tersebut di atas, dapat diketahui bahwa semenjak bertambahnya jumlah Rumah Sakit di tahun 2016 rasio pelayanan rumah sakit terhadap jumlah penduduk di Kabupaten Luwu semakin meningkat dari sebelumnya 1 unit Rumah Sakit harus melayani hingga 300.000 lebih penduduk pada tahun 2016 menjadi 1 rumah sakit melayani sekitar 150.000 lebih penduduk. Disamping jumlah, mutu layanan merupakan hal yang penting juga untuk diperhatikan pada masa-mada mendatang.

i. Dokter/Tenaga Medis

Indikator rasio dokter per jumlah penduduk menunjukkan tingkat pelayanan yang dapat diberikan oleh dokter dibandingkan jumlah penduduk yang ada. Apabila dikaitkan dengan standar sistem pelayanan kesehatan terpadu, idealnya satu orang dokter melayani 7.484 penduduk. Jumlah dokter umum dan dokter spesialis di Indonesia belum memenuhi kebutuhan sesuai rasio jumlah penduduk Indonesia. Selain itu distribusi dokter umum dan dokter spesialis tidak merata serta kualitasnya masih perlu ditingkatkan.

Dari data tersebut pada Tabel 2.33, dapat diketahui bahwa jumlah dokter di Kabupaten Luwu terus meningkat pada periode tahun 2015-2019, dari 70 orang menjadi 104 orang. Apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk, rasio dokter terhadap jumlah penduduk adalah sebesar 0,00029. Akan tetapi apabilia dilihat dari perbandingan antara dokter dan penduduk terdapat peningkatan dari sebelumnya

di tahun 2015 setiap dokter harus melayani sebanyak 5.003 penduduk menjadi sebanyak 3.481 penduduk di tahun 2019.

j. Komplikasi kebidanan yang ditangani

Berdasarkan data pada Tabel 2.33 dapat dilihat bahwa cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani pada tahun 2015 baru mencapai 52,50%, namun pada tahun 2019 telah meningkat menjadi 80,49%. Hal ini berarti masih terdapat 19,51% yang tidak tertangani.

Kondisi ini disebabkan tenaga kesehatan belum sepenuhnya melaksanakan Program Perencanaan Persalinan dan Penanganan Komplikasi (P4K) yang merupakan suatu kegiatan yang difasilitasi oleh bidan di Desa dalam rangka peningkatan peran aktif suami, keluarga dan masyarakat dalam merencanakan persalinan yang aman dan persiapan menghadapi komplikasi bagi ibu hamil termasuk perencanaan penggunaan KB pasca persalinan dengan menggunakan stiker sebagai media notifikasi sasaran dalam rangka meningkatkan cakupan dan mutu pelayanan kesehatan bagi ibu dan Bayi Baru Lahir.

k. Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan

Cakupan pertolongan persalinan oleh tanaga medis pada tahun 2015 sebesar 89,00% dan 11,00% ditangani oleh bidan swasta, kemudian pada tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 95,01% berarti ada sekitar 4,99% yang ditangani oleh Non Kesehatan. Sedangkan pada tahun 2017-2019 cakupan pertolongan persalinan mengalami penurunan yaitu pada tahun 2017 sebesar 94,27% dan ada sekitar 6% yang ditangani oleh bukan dari tim medis non kesehatan, di tahun 2018 ada sekitar 89,78% sehingga yang ditangani oleh tenaga Non medis sebesar 10%, dan pada tahun 2019 cakupan pertolongan persalinan sebesar 88,52%.

Dari data tersebut pada Tabel 2.33, dapat dilihat bahwa dari tahun 2015 sampai tahun 2019 sangat fluktuatif. Sehingga upaya penolongan oleh tenaga kesehatan dengan kompetensi kebidanan paling menurun terjadi pada tahun 2019 dengan cakupan 88,52%, dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang pernah mencapai 95,01% pada tahun 2016.

l. Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

Cakupan Desa/Kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI) selama 5 (Lima) tahun terakhir mengalami penurunan. Dari data tersebut

pada Tabel 2.33, dapat dilihat bahwa cakupan desa/kelurahan UCI pada tahun 2015 mencapai 96,91%, tetapi menurun menjadi 89,42% pada tahun 2019. Kondisi ini menunjukan bahwa upaya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan belum maksimal dalam rangka mencapai dan mempertahankan status imunisasi masyarakat yang lengkap sehingga kualitas kesehatan masyarakat belum mengalami peningkatan yang maksimal.

m. Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan

Jumlah balita gizi buruk di Kabupaten Luwu dari tahun 2015 sampai 2019 mengalami fluktuasi. Cakupan balita gizi buruk di Kabupaten Luwu yang mendapat perawatan sudah mencapai angka 100% sejak tahun 2015 hingga tahun 2019. Hal ini berarti bahwa semua balita gizi buruk sudah mendapatkan perawatan medis melalui sarana pelayanan kesehatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerintah telah merespon dengan cepat setiap kejadian gizi buruk di masyarakat. Beberapa upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan antara lain:

1) Pelatihan penatalaksanaan kasus gizi buruk dengan output terbentuknya Tim Tata Laksana Gizi Buruk Terlatih di tingkat Puskesmas maupun RS;
2) Peningkatan deteksi dini kasus-kasus gizi buruk di Posyandu;
3) Pemberian Makanan Tambahan pada balita kurus dan bumil KEK selama 90 hari makan;
4) Melaksanakan konseling menyusul dan konseling gizi di Puskesmas.

Adapun kendala yang ditemukan adalah:

1) Program Penanggulangan Kasus Gizi Buruk masih sectoral (kesehatan) padahal permasalahannya multifactor bukan hanya dari aspek kesehatan/Gizi tetapi juga dari aspek Kemiskinan, Lingkungan, Air Bersih (Intervensi Sensitif dan Spesifik);
2) Tim Tata Laksana Kasus Gizi Buruk yang sudah dilatih di Tingkat Provinsi banyak yang sudah berpindah tugas (mobilitas tinggi) sehingga upaya penanganan kasus gizi buruk menjadi tidak optimal;
3) Banyak orang tua penderita gizi buruk menolak saat anaknya dirujuk untuk intervensi penatalaksanaan kasus gizi buruk melalui rawat inap.

Program Penanggulangan Kasus Gizi Buruk masih sektoral (kesehatan) padahal permasalahannya multifaktor bukan hanya dari apek kesehatan/Gizi tapi juga dari aspek kemiskinan, lingkungan, air

bersih dll (intervensi sensitif dan spesifik). Tim Tata Laksana Kasus Gizi Buruk yang sudah dilatih di tingkat provinsi banyak yang sudah berpindah. Beberapa upaya yang dilakukan antara lain:

1) Pelatihan penatalaksanaan kasus gizi buruk dengan output terbentuknya Tim Tata Laksana Gizi Buruk Terlatih di tingkat Puskesmas maupun RS;
2) Peningkatan deteksi dini kasus-kasus gizi buruk di Posyandu;
3) Pemberian Makanan Tambahan pada balita kurus dan bumil KEK selama 90 hari makan;
4) Melaksanakan konseling menyusul dan konseling gizi di Puskesamas.

n. Persentase Anak Usia 1 Tahun Yang Diimunisasi Campak

Terjadi fluktuasi pada jumlah anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak selama periode tahun 2015-2019. Jumlah anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak pada tahun 2019 hanya mencapai 89,59%, lebih rendah jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini terjadi karena belum adanya dukungan dalam upaya-upaya pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu. Diharapkan Pemerintah Kabupaten Luwu dapat meningkatkan kinerjanya pada tahun-tahun mendatang mengingat pemberian kekebalan anak terhadap penyakit campak ini merupakan investasi masa depan. Pelaksanaan imunisasi campak pada kelompok sasaran di Kabupaten Luwu, masih menemukan beberapa kendala antara lain:

1) Adanya kelompok-kelompok penolakan terhadap imunisasi;
2) Usaha (berita) anti vaksin semakin gencar.

Salah satu hal penting dalam menjaga kesehatan bayi adalah imunisasi, persentase balita yang mendapat imunisasi lengkap di Sulsel tahun 2019 sebesar 49,94%.

Dari data tersebut pada Tabel 2.33 dapat diketahui bahwa capaian imunisasi campak di Kabupaten Luwu dari tahun 2015-2019 masih di bawah angka 100% hal ini menggambarkan bahwa pemerintah belum fokus dalam memperhatikan kesehatan anak dengan menggalakkan program imunisasi Diharapkan pemerintah dapat meningkatkan kinerjanya pada tahun-tahun mendatang mengingat pemberian kekebalan anak terhadap penyakit campak ini merupakan investasi masa depan.

o. Cakupan Balita Pneumonia Yang Ditangani

Dari data tersebut pada Tabel 2.33 dapat diketahui bahwa cakupan balita pneumonia yang ditangani dari tahun 2015 s.d tahun 2019 selalu berada di angka 100% artinya pemerintah telah melaksanakan respon yang cepat terhadap kasus pneumonia yang terjadi pada balita, hal ini perlu dipertahankan di masa depan mengingat generasi muda adalah merupakan investasi masa depan yang harus dijaga.

p. Penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA

Dari data tersebut pada Tabel 2.33, dapat dilihat bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu memperkirakan bahwa penderita baru TBC TBA (+) pada tahun 2015 hingga tahun 2019 mengalami kenaikan yaitu dari 533 pada tahun 2015 menjadi 1.005 pada tahun 2019. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA di Kabupaten Luwu periode tahun 2015-2019 mengalami peningkatan. Secara keseluruhan sepanjang periode ini mengalami peningkatan, dari 53,66% pada tahun 2015 menjadi 60,30% pada tahun 2019.

Untuk mencegah terjadinya kasus baru, tentunya diperlukan kesadaran masyarakat untuk saling menjaga kondisi lingkungan sekitarnya. Dalam upaya penemuan dan penanganan pasien TBC dibutuhkan strategi yang tepat yaitu strategi DOTS. Pengobatan TBC yang diberikan di fasilitas kesehatan DOTS dilakukan secara gratis oleh pemerintah dengan pendampingan yang dilakukan oleh PMO selama 6 bulan masa pengobatan hingga tuntas. Beberapa permasalahan yang dihadapi selama ini adalah:

1) Data penemuan dan pengobatan pada RS dan fasilitas kesehatan swasta masih ada yang belum masuk dalam system pelaporan program TBC;
2) Beberapa fasilitas kesehatan swasta tidak memberikan penanganan yang tepat sesuai standar ISTC.

q. Tingkat Prevalensi Tuberkulosis

Target program penanggulangan TBC secara nasional telah ditetapkan eliminasi TBC akan dicapai pada tahun 2030. Dalam roadmap eliminasi TBC menunjukkan sampai tahun 2020 diharapkan adanya upaya akselerasi untuk meningkatkan penemuan kasus TBC. Angka penemuan kasus berdasarkan data yang telah didapatkan menunjukkan peningkatan setiap tahunnya dari tahun 2015-2019. Hal ini menggambarkan jumlah kasus yang telah didapatkan di pelayanan keshatan dan dilaporkan di program terus meningkat.

Dari data tersebut pada Tabel 2.33, dapat diketahui bahwa persentase tingkat prevalensi tuberkulosis terus meningkat dari sebelumnya di tahun 2015 angka prevalensi sebesar 0,14 menjadi 0,19 di tahun 2019. Kondisi ini menggambarkan kemampuan layanan kesehatan untuk mendeteksi pengidap tuberkulosis semakin baik, sehingga diharapkan dengan penemuan lebih dini penyebaran tuberkulosis dapat dicegah.

r. Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis

Laporan kematian yang masuk tidak semua penyebab utamanya adalah Tuberkulosis. Berdasarkan data pada Tabel 2.33, angka kematian pada penderita TBC dari tahun 2015-2019 mengalami fluktuatif, yaitu 0,002% pada tahun 2015, pada tahun 2016 meningkat menjadi 0,008%, kembali menurun menjadi 0,005% pada tahun 2017, dan meningkat menjadi 0,008% pada tahun 2019. Beberapa hal yang menjadi penyebab kematian penderita TBC masih tinggi antara tahun 2015-2019:

1) Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk memeriksakan diri lebih dini bila telah ditemukan gejala awal TBC.
2) Keterlambatan dalam mengakses fasilitas kseshatan karena sigma yang masih ada dia masayarakat.
3) Pengobatan yang tidak tuntas sehingga kematian semakin tinggi.

s. Kasus Tuberkulosis Yang Terdeteksi Dalam Program DOTS

Proporsi jumlah kasus TBC menggambarkan banyaknya kasus TBC yang terjangkau oleh program. Berdasarkan data pada Tabel 2.33 dapat dilihat bahwa periode tahun 2015-2019 persentase proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS mengalami fluktuasi, namun cenderung meningkat yaitu 74,90% pada tahun 2015, kemudian meningkat menjadi 98,34 pada tahaun 2018 dan kembali menurun di tahun 2019 menjadi 63,68%.

t. Kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS

Pada tahun 2015 jumlah pasien baru tuberkulosis paru BTA mencapai 198 kasus dan mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2018 sedangkan jumlah pasien tuberkulosis BTA yang mendapat pengobatan mengalami fluktuasi, dari 325 pasien pada tahun 2015, kemudian menurun menjadi 287 pasien pada tahun 2016. Selanjutnya pada tahun 2017 meningkat menjadi 334 pasien dan kembali menurun pada tahun 2019 menjadi 300 pasien.

Dari data tersebut pada Tabel 2.33, juga diketahui bahwa persentase proporsi jumlah kasus tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS semakin meningkat dari sebelumnya sebesar 60,92% di tahun 2015 menjadi 77,00% di tahun 2019. Peningkatan jumlah pendeteksian kasus ini memudahkan upaya dan program yang dilaksanakan untuk mengeliminasi penyakit tuberkulosis.

u. Penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD

Berdasarkan data pada Tabel 2.33, jumlah penderita penyakit DBD yang ditemukan pada tahun 2015 mengalami kenaikan dari tahun 2014 dengan jumlah temuan 41 kasus. Jumlah penderita penyakit DBD yang ditemukan dan yang ditangani sesuai SOP pada tahun 2016 sebanyak 60 kasus. Dan mengalami penurunan yaitu 14 kasus pada tahun 2018. Pada tahun 2017 jumlah penderita dan penangannya sebesar 67 kasus. Persentase cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD di Kabupaten Luwu tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 mencapai 100%, karena jumlah penderita DBD yang ditemukan disuatu wilayah seluruhnya dapat ditangani sesuai standar/SOP. Hal ini dapat tercapai karena penanganan penderita DBD dapat langsung dilakukan oleh rumah sakit (RS) dan puskesmas yang ada. Kesadaran dari masyarakat untuk segera membawa penderita sedini mungkin ke RS atau puskesmas sangat berperan dalam penanganan berdasarkan standar/SOP yang ada.

v. Prevalensi HIV/AIDS (%) Dari Total Populasi

Penemuan kasus HIV/AIDS secara akurat dapat membantu pemerintah untuk melaksanakan kebijakan pencegahan dan pengendalian penyakit HIV/AIDS, dengan basis data penderita HIV/AIDS yang akurat akan memudahkan untuk mengatur pola kebijakan pengobatan bagi penderita HIV/AIDS

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa persentase prevalensi HIV/AIDS dari total populasi bergerak secara fluktuatif dengan kecenderungan meningkat yakni pada tahun 2015 angka prevalensi sebesar 0,003% kemudian meningkat menjadi 0,004% pada tahun 2019. Peningkatan ini didorong oleh semakin baiknya pelayanan kesehatan dalam men-surveillance dan menemukan penderita HIV/AIDS.

w. Pelayanan Kesehatan Rujukan Masyarakat Miskin

Pelayanan rujukan antara lain meliputi Konsultasi medis, pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan oleh dokter spesialis/umum, Rehabilitasi medis, Penunjang diagnostic seperti pemeriksaan laboratorium klinik, radiologi dan elektromedik, Tindakan medis kecil dan sedang. Operasi sedang dan besar, Pemeriksaan dan pengobatan gigi tingkat lanjutan, Pelayanan KB seperti pelayanan pasca persalinan/keguguran, Pemeriksaan kehamilan dengan risiko tinggi dan penyulit, Pemberian obat yang mengacu pada Formularium Rumah Sakit, Pelayanan darah dan Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL) pada ruang perawatan kelas III. Diterapkannya sistem rujukan online oleh BPJS yang memetakan wilayah rujukan untuk Pasien, hal ini menimbulkan adanya batasan masyarakat untuk memilih Rumah Sakit karena sudah ditentukan oleh BPJS Kesehatan.Ketersediaan RS Tipe C di Makassar sangat kurang sehingga merugikan pasien yang diterapkan sistem rujukan berjenjang, akhirnya pasien dirujuk ke RS Khusus dengan fasilitas yang tidak memadai.

Dari data tesebut pada Tabel 2.33, dapat diketahui bahwa cakupan pelayanan kesehatan rujukan masyarakat miskin di Kabupaten Luwu bergerak secara fluktuatif dengan trend yang meningkat. Hal ini menggambarkan Kabupaten Luwu telah menjalankan amanah undang-undang terkait dengan penjaminan kesehatan masyarakat miskin dan pemerintah Kabupaten Luwu telah menganggarkan belanja daerah untuk membiayai program KIS/JKN.

x. Kunjungan bayi

Berdasarkan data pada Tabel 2.33, jumlah kunjungan bayi memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standard pada tahun 2015-2019 di Kabupaten Luwu yaitu pada tahun 2015 jumlah kunjungan sebanyak 98,44% dan pada tahun 2019 meningkat sebesar 101,26%.

Keterlibatan Lintas Sektor dalam pelayanan Posyandu dirasakan belum maksimal. Kegiatan di Posyandu perlu inovasi/kreatifitas, pembinaan belum optimal dalam rangka revitalisasi Posyandu. Berdasarkan data capaian dari tahun 2015 sampai 2019, cakupan kunjungan bayi mengalami peningkatan yang cukup baik, hal ini di karenakan pelayanan kesehatan dasar pada anak bayi salah satunya adalah pemberi Imunisasi Dasar Lengkap (IDL), hal Ini yang menarik ibu atau keluarga untuk datang berkunjung ke Posyandu sehingga anak bayi mendapatkan pelayanan berkualitas dan terstandar sampai

usia satu tahun. Oleh karena itu, perlu dukungan dan keterlibatan masyarakat dalam menigkatkan kualitas pelayanan kesehatan pada anak bayi khususnya peran kader dan PKK dalam Pelayanan kesehatan anak bayi saat permasalahan yang dihadapi antara lain:

1) Keterlibatan lintas sektor dalam pelayanan Posyandu belum maksimal;
2) Kegiatan di Posyandu perlu inovasi/kreatifitas;
3) Pembinaan belum optimal dalam rangka revitalisasi Posyandu

y. Kunjungan Ibu hamil K4

Belum semua ibu hamil dan keluarga memahami tentang kehamilan yang sehat dan persalinan yang aman sehingga terlambat kontak dengan petugas kesehatan. Adanya ibu hamil yang berpindah tempat sehingga tidak terpantau sampai persalinannya. Berdasarkan data pada Tabel 2.33, dapat dilihat bahwa Cakupan Kunjungan ibu hamil K4 tahun 2015 sebesar 84,76% yang berarti ada sekitar 15,24% yang tidak melakukan kunjungan ibu hamil K4, Tahun 2016 cakupan kunjungan ibu hamil K4 sebesar 89,01%, ada sekitar 10,99% yang tidak melakukan kunjungan ibu hamil K4, tahun 2017 cakupan kunjungan ibu hamil sebesar 88,39%, ada sekitar 11,61% yang tidak melakukan kunjungan ibu hamil K4. Pada tahun 2018 cakupan kunjungan ibu hamil K4 sebesar 84,96%, ada sekitar 15.14% yang tidak melakukan kunjungan ibu hamil K4. Sedangkan pada tahun 2019 cakupan kunjungan ibu hamil K4 sebesar 81,00 atau ada sekitar 19,00% yang tidak melakukan kunjunga ibu hamil.

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa cakupan kunjungan ibu hamil lengkap (K4) masih berfungsi dari tahun ke tahun dan masih ada disparitas/kesenjangan antar wilayah yang variasinya cukup besar, ditemukan juga ibu hamil yang tidak menerima pelayanan dimana seharusnya diberikan saat kontak dengan tenaga kesehatan (*missed opportunity*). Selain faktor tersebut adanya pernikahan dini menyebabkan ibu hamil malu kontak dengan petugas kesehatan dan pada akhirnya terlambat memperoleh pelayanan antenatal lengkap sesuai standar yang seharusnya diperoleh oleh ibu hamil, kondisi grografis yang sulit akses ke fasilitas kesehatan sehingga ibu hamil tidak rutin datang memeriksakan kehamilannya yang mempunyai kompotensi sesuai standar minimal 4 kali selama kehamilannya dengan distribusi waktu: 1 kali pada trimester ke -1 (0-12 Minggu), 1 kali pada trimester ke-2 (12-24 Minggu), dan 2 kali pada trimester ke-3 (> 24 minggu sampai dengan kelahirannya). Jika ibu hamil tidak memperoleh pelayanan seperti

tersebut diatas pada masa kehamilan, maka tidak dapat dilaporkan sebagain cakupan kunjungan ibu hamil lengkap (K4). Kunjungan antenatal bisa lebih dari 4 kali sesuai kebutuhan jika ada keluhan, penyakit dan gangguan kehamilan. Secara umum penyebab masih adanya ibu hamil yang tidak memperoleh pelayanan kunjungan ibu hamil lengakp (K4) adalah :

1) Belum semua ibu hamil dan keluarga memahami tentang kehamilan yang sehat dan persalinan yang aman sehingga terlambat kontak dengan petugas kesehatan
2) Adanya ibu hamil yang berpindah tempat sehingga tidak terpantau saspai persalinannya

z. Pelayanan Nifas

Masih ada ibu bersalin tidak melahirkan di fasilitas kesehatan serta ibu bersalin berpindah tempat setelah bersalin sehingga tidak dapat dipantau. Berdasarkan data pada Tabel 2.33, Cakupan pelayanan nifas tahun 2015 sebesar 86,15% atau masih ada sekitar 13,85% yang tidak mendapatkan pelayanan nifas. Meskipun mengalami fluktuasi, cakupan pelayanan nifas pada tahun 2019 lebih besar dibandingkan tahun 2015 yaitu sebesar 86,66%, yang berarti bahwa masih ada sekitar 13,34% yang tidak mendapatkan pelayanan nifas. Berdasarkan data tersebut terjadi fluktuasi cakupan pelayanan nifas dari tahun 2015 sampai dengan 2019 oleh tenaga kesehatan walaupun masih ada ibu nifas yang belum memperoleh pelayanan nifas. Hal ini disebabkan masih adanya persalinan yang tidak ditolong oleh tenaga kesehatan sehingga ibu nifas tidak terpantau oleh nakes dan tidak memperoleh pelayanan nifas yang seharusnya. Secara umum penyebab yang mempengaruhi cakupan kunjungan nifas yaitu:

1) Masih ada ibu bersalin tidak melahirkan di fasilitas kesehatan;
2) Ibu bersalin berpindah tempat setelah bersalin sehingga tidak dapat dipantau.

aa. Neonatus Dengan Komplikasi Yang Ditangani

Dari data tersebut pada Tabel 2.33, dapat diketahui persentase cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani terus mengalami peningkatan yakni pada tahun 2015 jumlahnya adalah 12,14% kemudian terus meningkat dari tahun ketahun hingga pada tahun 2018 telah mencapai angka 58,25%. Namun, menurun pada tahun 2019 menjadi 48,81%. Hal ini menggambarkan bahwa kualitas pelayanan kesehatan semakin baik sehingga mampu untuk melayani lebih banyak jumlah seluruh neonitas dengan komplikasi yang ada.

bb. Pelayanan anak balita

Dari data tersebut pada Tabel 2.33, dapat diketahui persentase cakupan pelayanan anak balita yang ditangani terus mengalami peningkatan yakni pada tahun 2015 jumlahnya adalah 43,33% kemudian terus meningkat dari tahun ketahun hingga pada tahun 2019 telah mencapai 71,14%. Hal ini menggambarkan bahwa kualitas pelayanan kesehatan semakin baik sehingga mampu untuk melayani lebih banyak anak balita.

cc. Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat

Dari data tersebut pada Tabel 2.33, dapat diketahui persentase cakupan pejaringan kesehatan siswa SD dan setingkat terus mengalamin penurunan yakni pada tahun 2015 jumlahnya adalah 98,11% kemudian meningkat pada tahun 2016 menjadi 100%. Selanjutnya terus mengalami penurunan menjadi 89,67% pada tahun 2019. Menyikapi hal ini pemerintah kedepannya akan meningkatkan edukasi dan promosi kesehatan dengan mentangi sekolah-sekolaha terutama pada jenjang pendidikan dasar untuk memaksimalkan cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat.

dd. Jumlah Tenaga Kesehatan / Medis Menurut Jenis dan Kecamatan

Tersedianya tenaga kesehatan/medis yang cukup untuk melayani kebutuhan masyarakat merupakan salah satu sasaran yang hendak dicapai oleh Dinas Kesehatan dalam menyelenggarakan urusan kesehata. Untuk mengetahui hal tersebut, berikut disajikan tabel jumlah tenaga kesehatan/medis menurut jenis dan kecamatan.

Tabel 2.34.
Jumlah Tenaga Kesehatan / Medis Menurut Jenis, Tahun 2019

No.	Kecamatan	Tenaga Kesehatan								
		Dokter Umum	Dokter Gigi	Dokter Ahli	Apoteker	Bidan	Perawat	Kader Posyandu	Dukun Bersalin	Lainnya
	RSUD Batara Guru	13	3	21	44	111	268	-	-	-
1.	Larompong	2	0	-	1	4	15	89	30	-
2.	Larompong Selatan	2	1	-	2	4	9	74	22	-
3.	Suli	2	1	-	0	6	16	190	15	-
4.	Suli Barat	0	0	-	0	1	9	140	8	-
5.	Belopa	1	0	-	1	4	15	130	9	-
6.	Kamanre	2	0	-	1	7	14	184	9	-
7.	Belopa Utara	1	1	-	1	8	10	90	8	-
8.	Bajo	1	1	-	1	4	12	150	12	-
9.	Bajo Barat	0	0	-	1	5	4	144	8	-
10.	Bassesangtempe	0	1	-	0	1	8	84	12	-
11.	Latimojong	0	1	-	0	1	9	144	11	-
12.	Bassesangtempe Utara	0	1	-	0	3	8	0	12	-
13.	Bupon	1	1	-	0	8	6	154	10	-
14.	Ponrang	2	1	-	1	10	10	171	10	-
15.	Ponrang Selatan	2	0	-	1	5	10	222	13	-
16.	Bua	3	0	-	1	11	27	308	15	-
17.	Walenrang	1	0	-	0	6	9	230	9	-
18.	Walenrang Timur	3	1	-	0	6	5	101	8	-
19.	Lamasi	1	1	-	1	11	20	169	10	-
20.	Walenrang Utara	1	0	-	0	5	14	77	11	-
21.	Walenrang Barat	1	1	-	0	4	10	104	6	-
22.	Lamasi Timur	1	1	-	1	13	15	126	9	-
Jumlah		**40**	**16**	**21**	**58**	**289**	**523**	**3.081**	**257**	**0**

Sumber: BPS, Kabupaten Luwu Dalam Angka, Tahun 2020.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sub urusan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang merupakan kewenangan kabupaten/ kota adalah Sumber Daya Air (SDA), air minum, air limbah, drainase, permukiman, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, jalan, jasa konstruksi, dan penataan ruang. Data dan informasi penyelenggaraan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.35.
Data dan Informasi
Penyelenggaraan Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	**Sumber Daya Air (SDA)**					
1.1.	**Irigasi kabupaten dalam kondisi baik**					
	Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik (Ha)	1.618	2.268	2.797	3.225	3.585
	Luas irigasi kabupaten (Ha)	8.904	8.904	8.904	8.904	8.904
	Persentase (%)	**18,17**	**25,47**	**31,41**	**36,33**	**40,26**
1.2.	**Rasio Jaringan Irigasi**					
	Jaringan primer (km)	1.750	5.000	4.435	5.337	6.046
	Jaringan Sekunder (km)	8.904	8.904	8.904	8.904	8.904
	Jaringan Tersier (km)	NA	NA	NA	NA	NA
	Total Panjang Jaringan Irigasi (1+2+3)	NA	NA	NA	NA	NA
	Luas lahan budidaya (Ha)	NA	NA	NA	NA	NA
	Rasio Jaringan Irigasi	NA	NA	NA	NA	NA
2.	**Air Minum**					
2.1	**Penduduk berakses Air Minum**					
	Penduduk berakses air minum (orang)	140.087	166.040	249.415	296.850	289.720
	Jumlah penduduk (orang)	350.218	353.277	356.305	359.209	362.027
	Persentase	**40,00**	**47,00**	**70,00**	**82,64**	**80,03**
2.2	**Rumah Tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak Perkotaan dan Perdesaan**					
	Jumlah penduduk dengan akses terhadap sumber air minum yang terlindungi dan berkelanjutan (RT)	141.883	147.337	140.463	169.601	172.251
	Persentase	**40,51**	**41,71**	**39,42**	**47,22**	**47,94**
3.	**Air Limbah**					
	Persentase rumah tinggal bersanitasi (%)	71,00	76,00	75,45	82,46	84,52
4.	**Jalan**					
4.1.	**Panjang Jalan di Kabupaten Luwu**					
	Jalan Kabupaten (Km)	2.142,07	2.312,96	2.444,02	2.541,39	2.748,84
	Jalan Provinsi (Km)	32,00	32,00	32.00	79,00	83,90
	Jalan Nasional (Km)	115,5	115,5	115,5	115,5	115,5
	Total Panjang Jalan (Km)	**2.289,57**	**2.460,46**	**2.591,52**	**2.735,89**	**2.948,24**
4.2.	**Jalan Kabupaten Menurut Kondisi**					
	Kondisi Baik (Km)	385,5	424,81	533,48	538,02	585,26
	Kondisi Sedang (Km)	512,25	480,41	50,75	73,42	78,62
	Kondisi Rusak Ringan (Km)	570,4	614,95	1.048,68	1.063,09	1.118,42
	Kondisi Rusak Berat (Km)	673,92	792,79	811,11	866,86	966,54
	Rasio panjang jalan kondisi baik	**0,18**	**0,17**	**0,21**	**0,21**	**0,21**

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
	Panjang jalan kondisi mantap (km)	897,75	905,22	584,23	611,44	663,88
	Panjang jalan seluruhnya (km)	2.142,07	2.312,96	2.444,02	2.541,39	2.748,84
	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap	**41,91**	**39,14**	**23,90**	**24,06**	**24,15**
4.3.	**Panjang jalan dengan jumlah penduduk**					
	Jumlah panjang jalan (km)	2.142,07	2.312,96	2.444,02	2.541,39	2.748,84
	Jumlah penduduk (jiwa)	350.218	353.277	356.305	359.209	362.027
	Rasio	**0,00612**	**0,00655**	**0,00686**	**0,00707**	**0.00759**
4.4.	**Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)**					
	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (km)	385,5	424,81	533,48	538,02	585.26
	Panjang seluruh jalan kabupaten di daerah tersebut (km)	2.142,07	2.312,96	2.444,02	2.541,39	2.748,84
	Persentase	**18,00**	**18,37**	**21,83**	**21,17**	**21,29**
4.5.	**Panjang jalan yang memiliki drainase/saluran pembuangan air (minimal1,5 m)**					
	Panjang jalan yang memiliki drainase (Km)	NA	NA	1.380	1.380	1.382,26
	Persentase	**-**	**-**	**56,46**	**54,30**	**50,30**
5.	**Penataan Ruang**					
5.1	**Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah**					
	Luas ruang terbuka hijau (ha)	1,00	1,00	9,15	10,20	24,70
	Luas wilayah ber HPL/HGB	NA	NA	NA	NA	NA
	Rasio	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**
5.2	**Bangunan ber- IMB per satuan bangunan**					
	Jumlah bangunan ber – IMB	90,00	91,00	93,00	93,00	98,05
	Jumlah bangunan (unit)	NA	NA	NA	NA	NA
	Rasio	NA	NA	NA	NA	NA

Sumber: Dinas PU dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu, Tahun 2020.

Berikut diuraikan perkembangan penyelenggaraan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang di Kabupaten Luwu.

a. Sumber Daya Air (SDA)

1) Penyediaan air baku dan irigasi

Penyediaan air baku untuk kebutuhan masyarakat diutamakan guna memenuhi kebutuhan air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangan pengelolaannya. Penyediaan air irigasi adalah penentuan volume air per satuan waktu yang dialokasikan dari suatu sumber air untuk suatu daerah irigasi yang didasarkan waktu, jumlah, mutu sesuai dengan kebutuhan menunjang pertanian dan keperluan lainnya.

2) Luas Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik

Luas irigasi Kabupaten Luwu pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 tidak mengalami penambahan luas yaitu 8,904 Ha. Sedangkan luas irigasi dalam kondisi baik dari periode tahun 2015-2019 secara terus menerus mengalami peningkatan. Pada tahun 2015, irigasi kabupaten dalam kondisi baik adalah 1.618 Ha atau 18,17%, meningkat menjadi 3.585 Ha atau 40,26% pada tahun 2019.

3) Rasio Jaringan Irigasi

Dalam upaya memenuhi kebutuhan irigasi untuk mendukung pencapaian target "*overstock* pangan" dan mendukung ketahanan pangan nasional dilakukan peningkatan luas layanan jaringan irigasi dan optimalisasi fungsi irigasi di Kabupaten Luwu dengan luas areal Daerah Irigasi jaringan primer mengalami peningkatan dari tahun ke tahun yang signifikan, dari 1.750 km pada tahun 2015 menjadi 6.046 km pada tahun 2019. Sedangkan jaringan sekunder tidak mengalami penambahan.

b. Air Minum

1) Persentase Penduduk Berakses Air Minum

Peningkatan kualitas kesehatan sangat dipengaruhi oleh kualitas air minum. Pada tahun 2015, persentase penduduk terhadap akses air bersih/air minum di Kabupaten Luwu adalah sebesar 40,00%. Kondisi tersebut semakin membaik di tahun-tahun berikutnya hingga mencapai 80,03% pada tahun 2019.

2) Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak Perkotaan dan Persesaan

Jumlah penduduk dengan akses terhadap sumber air minum yang terlindungi dan berkelanjutan di Kabupaten Luwu pada tahun 2015 adalah 141.883 jiwa, meningkat menjadi 172.251 jiwa pada tahun 2019. Sedangkan proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan, meningkat dari 40,51% pada tahun 2015 menjadi 47,94% pada tahun 2019.

c. Air Limbah

Air limbah adalah air yang telah mengalami penurunan kualitas karena pengaruh manusia. Oleh karena itu, air limbah harus dialirkan di saluran air kombinasi atau saluran sanitasi, dan diolah di fasilitas pengolahan air limbah atau *septic tank*. Air limbah yang telah diolah dilepaskan ke badan air penerima melalui saluran pengeluaran. Air limbah, terutama limbah perkotaan, dapat tercampur dengan berbagai kotoran seperti feses maupun urin.

Untuk menghindari pencemaran lingkungan akibat air limbah khususnya diperkotaan, pemerintah Kabupaten Luwu melakukan berbagai upaya dalam rangka meningkatkan kondisi sanitasi setiap rumah tangga. Persentase rumah tangga bersanitasi di Kabupaten Luwu pada tahun 2015 adalah sebesar 71,00%, kemudian mengalami peningkatan secara terus menerus hingga mencapai 84,52% pada tahun 2019.

d. Jalan

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang

diperuntukkan bagi lalulintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

Menurut Peraturan Menteri PU No.13 Tahun 2011 disebutkan bahwa kriteria kondisi jalan mantab meliputi kondisi jalan baik dan sedang, sedangkan kriteria kondisi jalan tidak mantab meliputi kondisi rusak ringan dan rusak berat. Kriterianya adalah jalan yang memiliki kerataan permukaan jalan memadai untuk dapat dilalui oleh kendaraan dengan cepat, aman dan nyaman. Nilai kondisi jalannya diukur menggunakan alat ukur kerataan jalan (menghasilkan nilai IRI) atau diukur secara visual (menghasilkan nilai RCI).

Grafik 2.28.

Perkembangan Jalan Dalam Kondisi Baik
Tahun 2015 - 2019

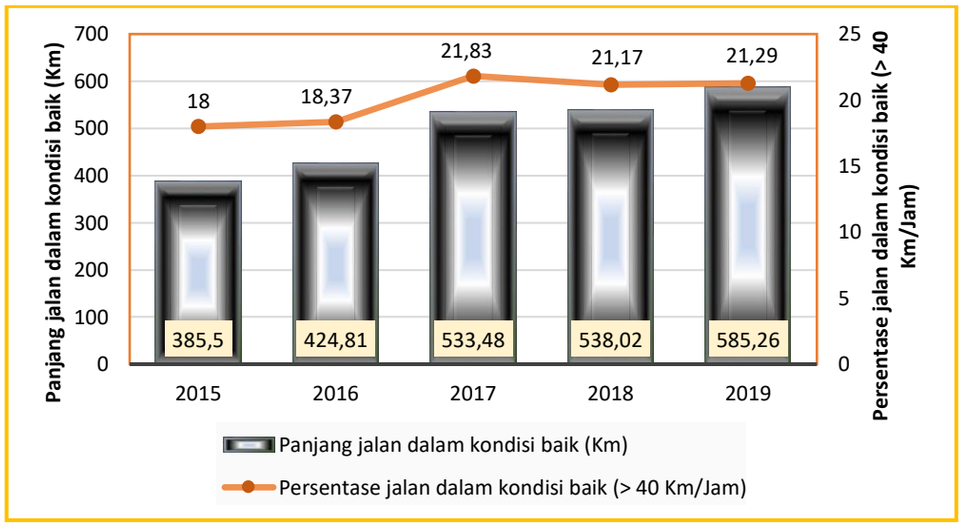

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang 2020.

Jalan raya yang melintas di wilayah Luwu pada tahun 2019 adalah 2.948,24 Km, yang terdiri dari jalan negara 115,50 Km, jalan provinsi sepanjang 83,90 Km dan jalan kabupaten 2.748,84 Km. Berdasarkan kondisi jalan pada tahun 2019, jaringan jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Luwu adalah 585,26 Km atau 21,29% dari total panjang jalan. Sedangkan jalan dalam kondisi sedang adalah 78,62 Km atau 2,86%, rusak ringan sepanjang 1.118,42 Km atau 40,69%, dan kondisi rusak berat sepanjang 966,54 km atau 35,16%.

Jika dibandingkan dengan tahun 2015 dengan persentase jalan dalam kondisi baik sebesar 18,00%, keadaan pada tahun 2019 sudah menunjukkan adanya peningkatan. Namun tidak demikian halnya dengan proporsi jalan dalam kondisi mantap, yang justru mengalami penurunan dari 41,91 menjadi 24,15.

Secara umum, jalan di Kabupaten Luwu yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air minimal 1,5 m tahun 2017 adalah 1,380 km atau 56,46%. Kondisi tersebut tidak berubah pada tahun

2018, sedangkan pada tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 1.382 km.

e. Jembatan

Jembatan merupakan struktur yang dibuat untuk menyeberangi jurang atau rintangan seperti sungai, rel kereta api ataupun jalan raya. Jembatan dibangun untuk penyeberangan pejalan kaki, kendaraan atau kereta api di atas halangan. Jembatan merupakan bagian dari infrastruktur transportasi darat yang sangat vital dalam aliran perjalanan. Jembatan sering menjadi komponen kritis dari suatu ruas jalan, karena sebagai penentu beban maksimum kendaraan yang melewati ruas jalan tersebut. Jumlah jembatan di Kabupaten Luwu pada tahun 2015 sejumlah 13 buah, tahun 2016 bertambah 7 buah dan tahun 2017 bertambah lagi 8 buah sehingga secara keseluruhan berjumlah 28 buah.

f. Penataan Ruang

Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Luwu sejak tahun 2015 hingga tahun 2019 telah meningkat secara signifikan dari 1,00 Ha menjadi 24,70 Ha. Rasio Bangunan ber-IMB persatuan Bangunan juga mengalami pertumbuhan dari 90,00% pada tahun 2015 menjadi 98,05 pada tahun 2019.

Izin mendirikan bangunan gedung adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah kabupaten/kota kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.

Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Rumah adalah struktur fisik terdiri dari ruangan, halaman dan area sekitarnya yang digunakan sebagai tempat tinggal dan sarana pembinaan keluarga (Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman). Menurut WHO, rumah adalah struktur fisik atau bangunan untuk tempat berlindung, dimana lingkungan berguna untuk kesehatan jasmani dan rohani serta keadaan sosialnya baik demi kesehatan keluarga dan individu (Komisi WHO Mengenai Kesehatan dan Lingkungan).

Perumahan dan permukiman merupakan kebutuhan dasar manusia dan mempunyai peranan yang sangat strategis dalam pembentukan watak serta kepribadian bangsa, dan perlu dibina serta dikembangkan demi kelangsungan dan peningkatan kehidupan dan penghidupan masyarakat.

Perumahan dan permukiman tidak dapat dilihat sebagai sarana kebutuhan kehidupa semata-mata, tetapi lebih dari itu merupakan proses bermukim manusia dalam menciptakan ruang kehidupan untuk memasyarakatkan dirinya, dan menampakkan jati diri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, perumahan merupakan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Terkait dengan pelaksanaan urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman di Kabupaten Luwu periode 2015-2019, dapat disajikan data sebagai berikut.

Tabel 2.36.
Data dan Informasi
Penyelenggaraan Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
Tahun 2015-2019

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1.	**Rumah Layak Huni**					
	Jumlah rumah layak huni (unit)	67.773	68.313	69.313	72.868	75.231
	Jumlah penduduk (orang)	350.218	353.277	356.305	359.209	362.027
	Rasio	**0,196**	**0,196**	**0,196**	**0,203**	**0,208**
2.	**Permukiman Layak Huni**					
	Luas pemukiman layak huni (ha)	7.119,95	7.119,55	7.119,95	7.119,55	7.030,64
	Luas wilayah permukiman (ha)	7.237	7.237	7.237	7.237	7.237
	Rasio	**0,98**	**0,98**	**0,98**	**0,98**	**0,97**
3.	**Permukiman yang Tertata**					
	Luas area permukiman tertata (ha)	0,3	0,3	0,3	2,57	11,2
	Luas area permukiman keseluruhan (ha)	7.237	7.237	7.237	7.237	7.237
	Persentase	**0,004**	**0,004**	**0,004**	**0,036**	**0,155**
4.	**Pemukiman Kumuh**					
	Luas lingkungan permukiman kumuh (ha)	117,45	117,45	117,45	206,36	206,36
	Luas wilayah (ha)	3000,25	3000,25	3000,25	3000,25	300,000,25
	Persentase	**0,0391**	**0,0391**	**0,0391**	**0,0688**	**0,07**
5.	**Permukiman kumuh di perkotaan**					
	Luasan pemukiman kumuh kota yang tertangani (Ha)	8	8	8	8	8
	Luas pemukiman kumuh Kota (Ha)	117,45	117,45	117,45	206,36	206,36
	Persentase	**6,81**	**6,81**	**6,81**	**3,87**	**3,87**
6.	**Rumah tangga kumuh perkotaan**					
	Jumlah rumah tangga kumuh perkotaan (unit)	NA	NA	1.328	1.339	1.339
	Jumlah seluruh rumah (unit)	117,45	117,45	80.663	83.511	83,511
	Proporsi	**NA**	**NA**	**0,164**	**0,0164**	**0,0164**

Sumber *: Dinas Perkimtan Tahun 2020.*

Berikut diuraikan perkembangan penyelenggaraan urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman di Kabupaten Luwu.

a. Rumah Layak Huni

Berdasarkan Peraturan Kemeterian Perumahan Rakyat RI No. 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, kriteria permukiman

tidak layak huni antara lain : luasan lantai bangunan paling rendah 36 m^2 paling tinggi 45 m^2, bahan lantai, dinding atau atap tidak memenuhi standar layak huni, tidak memenuhi MCK.

Pada tahun 2015 jumlah rumah layak huni di Kabupaten Luwu adalah 67.773 rumah, angka ini meningkat menjadi 75.231 pada tahun 2019. Sedangkan rasio rumah layak huni mengalami peningkatan sejak tahun 2015 dengan rasio 0,196 menjadi 0,208 pada tahun 2019.

Masih besarnya jumlah rumah tangga yang menempati rumah tidak layak huni akibat keterbatasan akses MBR terhadap penguasaan lahan dan pembiayaan perumahan dan tidak adanya kesediaan data terkait jumlah rumah layak huni di Kabupaten Luwu.

b. Permukiman Layak Huni

Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

Rasio permukiman layak huni dari tahun pertama ke tahun cenderung stagnan, bahkan menurun sedikit pada tahun 2019 yaitu dari 0,98 menjadi 0,97. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan luas areal permukiman tidak seiring dengan peningkatan kualitas rumah layak huni. Perbandingan Permukiman Layak Huni dengan Luas wilayah Permukiman tidak sebanding dengan rasio permukiman layak huni.

c. Permukiman yang tertata

Permukiman adalah tempat bermukim masyarakat baik di perkotaan maupun di perdesaan. Tertata adalah Permukiman perkotaan dan perdesaan yang serasi, harmoni, saling menunjang dan mendukung. Peningkatan pembangunan dan pengelolaan air minum, air limbah, drainase permukiman dan persampahan melalui peningkatan peran serta masyarakat

Permukiman di Kabupaten Luwu secara umum belum dilakukan penataan dalam rangka meningkatkan fungsinya. Hal ini terlihat dari kondisi bahwa sampai dengan tahun 2019, luas area permukiman yang tertata baru mencapai 11,2 Ha dari 7.237 Ha luas permukiman yang ada.

d. Permukiman Kumuh

Penataan lingkungan permukiman kumuh di Kabupaten Luwu periode 2015-2019 belum terlaksana dengan maksimal. Berdasarkan data pada Tabel 2.36 dapat dilihat bahwa luas permukiman kumuh di Kabupaten Luwu pada tahun 2019 adalah 206,36 Ha, meningkat dari kondisi pada tahun 2015 yaitu seluas 117,75 Ha.

e. Permukiman Kumuh di Perkotaan

Luasan pemukiman kumuh kota yang tertangani pada tahun 2015 sampai dengan 2019 tidak mengalami peningkatan dan tidak mengalami penurunan yaitu seluas 8 Ha. Sedangkan persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan mengalami penurunan, yaitu dari 6,81 % pada tahun 2015-2017 menjadi 3,87% pada tahun 2019.

Rumah tinggal yang dapat dikategorikan ke dalam rumah yang layak huni sebagai tempat tinggal harus memenuhi beberapa kriteria kualitas rumah tempat tinggal. Beberapa di antaranya yaitu rumah yang memiliki dinding terluas yang terbuat dari tembok atau kayu, dengan beratapkan beton, genteng, sirap, seng maupun asbes, dan memiliki lantai terluas bukan tanah.

5. Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Penyelenggaraan bidang urusan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat dilakukan untuk mewujudkan kondisi masyarakat yang tertib dan dapat mendukung pelaksanaan pembangunan. Kondisi ketentraman dan ketertiban masyarakat sangat berkaitan erat dengan aspek sosial, politik, dan hukum. Berbagai organisasi kemasyarakatan dan lembaga keswadayaan masyarakat berkembang dan berperan dalam berbagai bidang, baik budaya, keagamaan, pendidikan, kesehatan, dan aktivitas sosial lainnya. Meskipun masih terdapat pertentangan dalam kehidupan bermasyarakat, tetapi masih dapat ditolerir. Kententraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat merupakan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Data dan informasi penyelenggaraan bidang urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.37.
Data dan Informasi Penyelenggaraan Bidang Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
Tahun 2015-2019

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1.	**Perlindungan Masyarakat**					
1.1.	**Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)**					
	Jumlah Petugas Perlindungan Masyarakat (orang)	1.580	1.645	1.850	1.850	2.344
	Jumlah Penduduk (orang)	350.218	353.277	356.305	359.209	362.027
	Rasio	**0,45**	**0,47**	**0,52**	**0,52**	**0,86**
1.2.	**Penegakan PERDA**					
	Jumlah Penyelesaian Penegakan PERDA (kasus)	28	31	31	46	127
	Jumlah Pelanggaran PERDA (kasus)	28	31	31	46	127
	Persentase	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
2.	**Pelayanan Bencana Kebakaran**					
	Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran (unit)	3	4	4	6	8

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
	Jumlah Personil Pemadam Kebakaran (orang)	98	98	98	98	324
2.1.	**Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota**					
	Jangkuan luas wilayah manajemen kebakaran (km²)	554,80	911,05	911,05	2.165,20	3.000,5
	Luas wilayah kabupaten/kota (km²)	3.000,25	3.000,25	3.000,25	3.000,25	3.000,25
	Cakupan	**18,49**	**30,37**	**30,37**	**72,17**	**100,00**
2.2.	**Tingkat waktu tanggap (*response time rate*) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)**					
	Jumlah Ketepatan Waktu Tindakan Pemadam Kebakaran (<1 jam setelah pengaduan) (kasus)	30	30	30	30	30
	Jumlah Kejadian Kebakaran (kasus)	30	8	13	16	68
	Tingkat waktu tanggap (menit)	**15**	**15**	**15**	**15**	**15**

Sumber: - Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Luwu, Tahun 2020.
- Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu, Tahun 2020.

Berikut diuraikan perkembangan penyelenggaraan bidang urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Luwu Tahun 2015-2019.

a. Perlindungan Masyarakat

Penyelenggaraan perlindungan masyarakat adalah pengorganisasian dan pemberdayaan perlindungan masyarakat. Sedangkan perlindungan masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan. Perlindungan masyarakat erat kaitannya dengan aspek hukum, dimana penegakkan hukum yang lemah dan tidak konsisten mempengaruhi pula kondisi ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dapat mengakibatkan tingkat kriminalitas dan pelanggaran hukum lainnya menjadi tinggi. Di samping itu protes ketidakpuasan terhadap suatu masalah yang mengarah pada perusakan fasilitas umum seringkali terjadi. Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa penyelenggaraan perlindungan masyarakat di Kabupaten Luwu sudah cukup baik, dimana jumlah petugas yang meningkat secara signifikan dengan rasio antara petugas dan jumlah penduduk sudah mencapai 0,86.

Selanjutnya, penegakan perda juga dilakukan dengan baik, dimana seluruh Perda yang ada sudah dilakukan penegakan pelaksanaannya. Hal penting yang perlu diperhatikan dalam penegakan Perda, antara lain adalah pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat, agar partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Perda semakin meningkat.

b. Pelayanan Bencana Kebakaran

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah armada modil pemadam kebakaran dan jumlah personil yang ada telah dapat memenuhi kebutuhan akan pelayanan bencana kebakaran di Kabupaten

Luwu. Dengan kata lain, bahwa seluruh wilayah Kabupaten Luwu yang mencapai 3.000,25 km² telah dapat dijangkau pelayanan pemadam kebakaran.

Sedangkan tingkat waktu tanggap (*response time*) pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran telah memenuhi standar mutu pekayanan dasar sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 yakni dengan waktu tanggap sebanyak 15 menit (untuk daerah perkotaan dan sekitarnya). Hal ini menggambarkan bahwa manajemen penanggulangan kebakaran di Kabupaten Luwu sudah cukup baik.

6. Sosial

Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan perwujudan dari upaya mencapai tujuan bangsa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Pelayanan dan pemberdayaan sosial merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Layanan urusan sosial menjadi kewenangan Dinas Sosial dengan capaian indikator kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.38.
Data dan Informasi Penyelenggaraan Bidang Urusan Sosial
Tahun 2015-2019

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1.	**PMKS yang memperoleh Bantuan Sosial**					
	Jumlah PMKS yang menerima bantuan	4.684	9.936	23.771	40.514	91.500
	Jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan	9.253	10.000	198.922	206.215	205.264
	Persentase	**50,62**	**99,36**	**11,95**	**19,65**	**44,58**
2.	**PMKS skala kabupaten yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar**					
	Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial dalam 1 tahun	149	250	270	23.620	91.500
	Jumlah PMKS dalam 1 tahun yang seharusnya memperolah bantuan sosial	9.253	10.000	198.922	206.215	205.260
	Persentase	**1,61**	**2,50**	**0,14**	**11,45**	**44,58**
3.	**PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis Lainnya**					
	Jumlah PMKS dalam 1 (satu) tahun yang menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis	2.165	875	1.160	300	357
	Jumlah PMKS yang seharusnya menjadi peserta program	2.500	1.000	50.413	50.413	20,475
	Persentase	**86,6**	**87,5**	**2,30**	**0,60**	**1,74**
4.	**Panti Sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial**					
	Jumlah panti sosial dalam 1 (satu) tahun yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesos (unit)	8	8	8	8	8

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
	Jumlah panti sosial dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya menyediakan sarana prasarana pelayanan kesos (unit)	8	8	8	8	8
	Persentase	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
5.	**Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial**					
	Jumlah WKBSM dalam 1 (satu) tahun yang menyediakan sarana dan prasrana pelayanan kesos	0	0	0	0	0
	Jumlah yang seharusnya menyediakan sarana prasrana pelayanan kesos	0	0	0	0	0
	Persentase	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**Korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat**					
	Jumlah Sarana dan Prasana Tanggap Darurat (unit)	6	10	10	29	29
	Jumlah kejadian bencana (kasus)	10	12	17	22	24
	Jumlah korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dalam 1 (satu) tahun (orang)	480	1.318	978	186	159
	Jumlah korban bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial slama masa tanggap darurat dalam 1 (satu) tahun (orang)	480	1.318	978	186	159
	Persentase	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
7.	**Korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap**					
	Jumlah korban bencana dalam 1 (satu) tahun yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap dalam 1 tahun (orang)	148	396	197	6	8
	Jumlah seharusnya dievakuasi dengan mengunakan sarana prasarana tanggap darurat skala (orang)	480	1.318	978	186	40
	Persentase	**30,83**	**30,04**	**20,14**	**3,22**	**0,20**
8.	**Penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial**					
	Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial dalam 1 tahun (orang)	100	150	150	150	2.483
	Jumlah yang seharusnya menerima jaminan sosial (orang)	228	228	228	228	3.749
	Persentase	**43,86**	**65,79**	**65,79**	**65,79**	**66,23**

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Luwu, Tahun 2020.

Berikut diuraikan perkembangan penyelenggaraan bidang urusan sosial di Kabupaten Luwu Tahun 2015-2019.

a. PMKS yang memperoleh bantuan sosial

PMKS adalah seseorang, kelompok maupun masyarakat yang karena hambatan, kesulitan atau gangguan sehingga tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, yang mengakibatkan tidak terpenuhi kebutuhan hidup, baik jasmani, rohani maupun sosial dengan wajar. Berdasarkan data pada tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2019 baru sebesar

44,58% PMKS yang menerima bantuan. Jumlah PMKS di Kabupaten Luwu melonjak tajam sejak tahun 2017. Hal ini diakibatkan adanya perubahan format dalam penentuan warga masyarakat sebagai PMKS. Sampai saat ini, pemerintah Kabupaten Luwu masih terus mengupayakan penyesuaian data, agar dapat dilakukan penanganan PMKS sebagaimana mestinya.

b. PMKS skala kabupaten yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar

Dari data pada tabel di atas terlihat bahwa jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2019 terjadi peningkatan yang signifikan hingga mencapai 91.500. Begitupun dengan PMKS yang seharusnya memperoleh bantuan sosial juga terus mengalami peningkatan yang pada tahun 2019 telah mencapai angka 205.260. Setiap masalah sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat tidak lain bersumber dari ketidakmampuan seseorang atau kelompok dalam menjalankan fungsi dan peran sosialnya. Oleh sebab itu pemerintah perlu untuk memberikan bimbingan sosial kepada masyarakat untuk mengurangi jumlah PMKS di Kabupaten Luwu.

c. PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis Lainnya

Persentase PMKS yang menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis di Kabupaten Luwu pada tahun 2019 baru mencapai 1,74%. Kondisi ini diakibatkan adanya kerancuan data PMKS yang seharusnya menjadi peserta program.

d. Panti Sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial

Terdapat 8 panti sosial di seluruh wilayah Kabupaten Luwu dan seluruhnya telah menyediakan sarana prasarana yang memadai untuk memaksimalkan pelayanan kesehatan sosial.

e. WKBSM yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial

WKBSM adalah sistem kerjasama antarkeperangkatan pelayanan sosial di akar rumput yang terdiri atas usaha kelompok, lembaga maupun jaringan pendukungnya. Saat ini, belum ada WKBSM di Kabupaten Luwu.

f. Korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat

Selama periode lima tahun terakhir, seluruh korban bencana telah menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat. Korban bencana di Kabupaten Luwu yang paling tinggi adalah pada tahun 2016 yaitu mencapai 1.318 jiwa, selanjutnya pada tahun 2017 mencapai 978 jiwa. Sedangkan pada tahun 2019 terdapat 159 jiwa yang diberikan bantuan sosial.

g. Korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap

Pada tahun 2015, masih terdapat 30,83% korban bencana yang dievakuasi secara mandiri oleh masyarakat dan menurun menjadi 0,20% pada tahun 2019. Kondisi ini diakibatkan kurangnya sarana prasarana evaluasi maupun karena sulitnya lokasi bencana.

h. Penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial

Jumlah penyandang cacat yang memperolah jaminan sosial di Kabupaten Luwu adalah 2.483 orang atau 66,23% dari yang seharusnya menerima jaminan sosial yaitu 3.749 orang. Kondisi ini perlu ditangani dengan baik, agar seluruh masyarakat yang seharusnya menerima jaminan sosial dapat memperoleh haknya sesuai ketentuan.

2.3.2. Fokus Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

Analisis kinerja atas layanan urusan wajib non pelayanan dasar dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelengaraan urusan wajib pemerintahan daerah yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

1. Tenaga Kerja

Pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materiil maupun spiritual. Dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan itu sendiri. Sesuai dengan peranan dan kedudukan tenaga kerja, diperlukan pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan peransertanya dalam pembangunan serta peningkatan perlindungan tenaga kerja dan keluarganya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha.

Sejalan dengan maksud Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di atas, pemerintah Kabupaten Luwu secara terus-

menerus melaksanakan kewenangan di bidang ketenagakerjaan. Berbagai data tentang kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Luwu telah diuraikan pada bagian terdahulu.

Penyelenggaraan urusan tenaga kerja menjadi kewenangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.39.
Data dan Informasi Penyelenggaraan Bidang Urusan Tenaga Kerja
Tahun 2015 - 2019

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Angka sengketa pengusaha pekerja per tahun (kasus)	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
2.	Besarnya kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3.	Besaran pencarian kerja yang terdaftar yang ditempatkan (%)	4,70	14,34	8,44	16,15	17,08
4.	Keselamatan dan perlindungan (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5.	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program jamsostek (%)	65	70	75	78	100,00
6.	Penanganan perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7.	Besaran pemeriksaan perusahaan (%)	65,9	87,9	89,5	Provinsi	Provinsi
8.	Besaran pengujian peralatan di perusahaan (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	Provinsi
9.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompotensi (%)	27,00	50,00	27,00	79,60	79,27
10.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan (orang)	35	47	41	47	48

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Luwu, Tahun 2020.

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat dijelaskan berbagai capaian pembangunan di bidang ketenagakerjaan, antara lain sebagai berikut:

a. Tidak tersedia data terkait dengan angka sengketa pengusaha-pekerja selama periode tahun 2015-2019.
b. Semua kasus yang terkait dengan perjanjian bersama antara pengusaha dan pekerja dalam 5 tahun terakhir dapat diselesaikan.
c. Persentase antara pencari kerja yang terdaftar dan yang ditempatkan dalam 5 tahun terakhir mengalami peningkatan dari 4,70% pada tahun 2015 menjadi 17,08% pada tahun 2019.
d. Terkait dengan jaminan keselamatan dan perlindungan terhadap tenaga kerja, telah mencapai seratus persen sejak tahun 2015.
e. Pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek telah mencapai 100% pada tahun 2019.
f. Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah seluruhnya dapat diselesaikan sesuai ketentuan.
g. Pemeriksaan perusahaan yang dilakukan Pemda Kabupaten Luwu dari tahun 2015 sampai tahun 2017 semakin meningkat dari 65,90 persen

menjadi 87,90 persen ditahun 2016 dan pada tahun 2017 sebesar 89,50 persen. Sedangkan pada Tahun 2018 sampai pada Tahun 2019 ditangani oleh Provinsi Sulawesi Selatan.

h. Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan telah dilakukan 100% selama periode tahun 2015-2018. Sedangkan tahun 2019 kewenangannya dilimpahkan ke Provinsi Sulawesi Selatan.

i. Tenaga kerja terdaftar yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi dalam 5 tahun terakhir mengalami peningkatan yaitu dari 27,00% pada tahun 2015 menjadi 79,27% pada tahun 2019.

j. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan pada tahun 2019 mencapai 48 orang. Angka ini meningkat dari tahun 2015 yang mencapai 35 orang.

Salah satu tujuan utama dari pembentukan daerah otonom adalah untuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakatnya. Oleh karena itu, berbagai kebijakan untuk meningkatkan kualitas dan daya saing pekerja, serta penciptaan lapangan kerja harus menjadi prioritas pembangunan.

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan dapat digambarkan dalam pemberdayaan dan kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Luwu. Meningkatkan ketahanan keluarga dan penegakan hukum terkait ketentuan persyaratan pernikahaan mempengaruhi pembentukan kebijakan pemerintah daerah yang *family friendly* dan responsif gender, khususnya untuk memberikan akses kepada perempuan untuk lebih berperan dalam pembangunan bangsa, baik secara sosial, budaya, dan politik. Sedangkan pembangunan keluarga bertujuan untuk meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tenteram, dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan lahir batin. Perkembangan penyelenggaraan bidang urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Luwu periode tahun 2015-2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.40.
Data dan Informasi Penyelenggaraan Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2015-2019

No.	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1.	**Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah**					
	Pekerja Perempuan di Lembaga Pemerintah (orang)	3.552	3.651	3.821	4.143	4.237
	Jumlah Pekerja Perempuan (orang)	108.546	108.546	113.419	187.605	165.037
	Persentase	**3,27**	**3,36**	**3,37**	**2,21**	**2,56**
2.	**Kursi yang di Duduki Perempuan di DPRD**					
	Jumlah Kursi DPRD yang diduduki perempuan (orang)	3	3	3	3	2
	Jumlah total kursi di keanggotaan DPRD (orang)	35	35	35	35	35
	Proporsi	**8,57%**	**8,57%**	**8,57%**	**8,57%**	**5,71%**
3.	**Partisipasi perempuan di lembaga swasta**					

No.	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
	Pekerja perempuan di lembaga swasta (orang)	10.652	10.750	11.450	11.750	11.800
	Jumlah pekerja perempuan (orang)	108.546	108.546	113.419	187.605	165.037
	Persentase	**9,81**	**9,90**	**10,10**	**6,26**	**7,15**
4.	**Rasio KDRT**					
	Rasio KDRT	0,001	0,009	0,001	0,001	0,0027
	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Bantuan Hukum (%)	100	100	100	100	100
	Jumlah Korban Kekerasan Perempuan dan Anak (kasus)	1	1	44	15	27
	Peyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan (kasus)	92	10	15	20	27
5.	**Perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu**					
	Jumlah pengaduan/laporan yang ditindaklanjuti oleh unit pelayanan terpadu (kasus)	9	10	12	30	27
	Jumlah laporan/pengaduan yang masuk ke unit pelayanan terpadu (kasus)	9	10	12	30	27
	Cakupan (%)	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
6.	**Penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak**					
	Jumlah perkara yang diputuskan pengadilan dengan dasar perundang-undangan yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak (kasus)	Na	Na	Na	8	16
	Jumlah perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak yang disidangkan (kasus)	Na	Na	Na	8	16
	Cakupan (%)	**Na**	**Na**	**Na**	**100**	**100**
7.	**Perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum**					
	Jumlah korban mendapat layanan bantuan hokum (orang)	5	7	8	17	16
	Jumlah korban yang membutuhkan bantuan hokum (orang)	7	10	25	31	16
	Cakupan (%)	**71,42**	**70,00**	**32,00**	**54,84**	**100**
8.	**Layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan**					
	Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan pemulangan (kasus)	Na	Na	1	3	11
	Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang tercatat di UPT (kasus)	Na	Na	33	48	27
	Cakupan (%)	**Na**	**Na**	**3,03**	**6,25**	**40,70**
9.	**Layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan**					
	Jumlah Perempuan dan anak korban kekerasan yang disatukan kembali ke keluarga, keluarga pengganti dan masyarakat lainnya (kasus)	3	3	3	3	11
	Jumlah korban yang membutuhkan rentegrasi social (kasus)	3	3	3	3	11
	Cakupan (%)	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
10.	**APM perempuan/laki-laki di SD**					
	APM-SD Perempuan (orang)	20.873	21.254	22.045	23.033	n.a
	APM-SD Laki Laki (orang)	20.995	21.362	22.456	23.584	n.a
	Persentase	**99,42**	**99,49**	**98,17**	**97,66**	**n.a**
11.	**Perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor nonpertanian**					

No.	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
	Banyaknya pekerja upahan perempuan di sektor pertanian (orang)	150	168	185	270	144
	Banyaknya pekerja upahan di sektor non pertanian (orang)	78	85	80	76	60
	Kontribusi (%)	**19,23**	**19,76**	**23,12**	**35,51**	**24,00**
12.	**Indeks Pembangunan Gender (%)**	**91,89**	**n.a**	**92,52**	**92,28**	**92,00**
13.	**Indeks Pemberdayaan Gender (%)**	**62,47**	**n.a**	**61,61**	**63,58**	**n.a**

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu, Tahun 2020.

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat dijelaskan berbagai capaian pembangunan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, antara lain sebagai berikut:

a. Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah

Pekerja perempuan dilembaga pemerintah dari tahun ke tahun semakin meningkat jumlahnya, yaitu dari 3.552 orang pada tahun 2015 menjadi 4.237 orang pada tahun 2019, sedangkan jumlah total pekerja perempuan meningkat dari 108.546 orang pada tahun 2015 menjadi 165.037 orang pada tahun 2019. Meskipun terjadi peningkatan dari sisi jumlah pekerja, namun persentasenya semakin menurun yaitu dari 3,27% menjadi 2,56%.

b. Kursi yang diduduki perempuan di DPRD

Jumlah kursi DPRD yang diduduki perempuan mengalami penurunan di tahun 2019 menjadi 2 orang dimana sebelumnya adalah 3 orang. Dengan demikian, dari sejumlah 35 orang anggota DPRD pada tahun 2019, hanya sebesar 5,71% yang diwakili oleh perempuan. Kondisi ini perlu mendapat perhatian mengingat pembangunan nasional di bidang politik menargetkan keterlibatan perempuan sebesar 30%.

c. Partisipasi perempuan di lembaga swasta

Pekerja perempuan dilembaga swasta mengalami peningkatan dari 10.652 orang pada tahun 2015 menjadi 11.800 orang pada tahun 2019. Meskipun demikian, secara agregat jika dibandingkan dengan jumlah pekerja perempuan, kondisi ini menurun jika dibandingkan dengan tahun 2015 yaitu dari 9,81% menjadi 7,15%.

d. KDRT

1) Rasio KDRT pada tahun 2015 lebih kecil dibandingkan tahun 2019, yaitu 0,001% dengan 0,0027%, bahkan pada tahun 2016 mencapai 0,009%.
2) Sejak tahun 2015 s/d 2019, Perempuan dan Anak Korban Kekerasan telah mendapatkan layanan bantuan hukum yang maksimal.
3) Jumlah korban kekerasan perempuan dan anak sejak tahun 2017 cukup tinggi dan berfluktuasi. Pada tahun 2017, terdapat 44 kasus,

menurun menjadi 15 kasus pada tahun 2018 tetapi kembali meningkat menjadi 27 kasus pada tahun 2019.

4) Jumlah kasus pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan yang diselesaikan pada tahun 2019 adalah 27 kasus. Angka ini terus-menerus meningkat dari tahun 2016 yang hanya 10 kasus.

e. Jumlah laporan dan kasus yang ditindaklanjuti oleh unit pelayanan terpadu dalam 5 tahun terakhir mengalami peningkatan dari 9 kasus pada tahun 2015 menjadi 27 kasus pada tahun 2019.

f. Penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak pada tahun 2019 adalah 16 kasus, meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya 8 kasus.

g. Perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan hukum telah mencapai 100% pada tahun 2019.

h. Layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang dilakukan oleh Pemda Kabupaten Luwu pada tahun 2019 mencapai 40,70% dari total 27 kasus.

i. Layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang dilakukan oleh Pemda Kabupaten Luwu pada tahun 2019 mencapai 100% dari total 11 kasus.

j. APM perempuan di jenjang pendidikan SD pada tahun 2019 adalah 97,66% dibandingkan APM laki-laki.

k. Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan disektor non pertanian pada tahun 2019 adalah 24,00%.

l. Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Luwu pada tahun 2019 adalah 92,00%, sedangkan Indeks Pemberdayaan Gender pada tahun 2018 adalah 63,58%, sebagaimana terlihat pada gambar di bawah.

Grafik 2.29.
IPG dan IDG Tahun 2015 - 2019

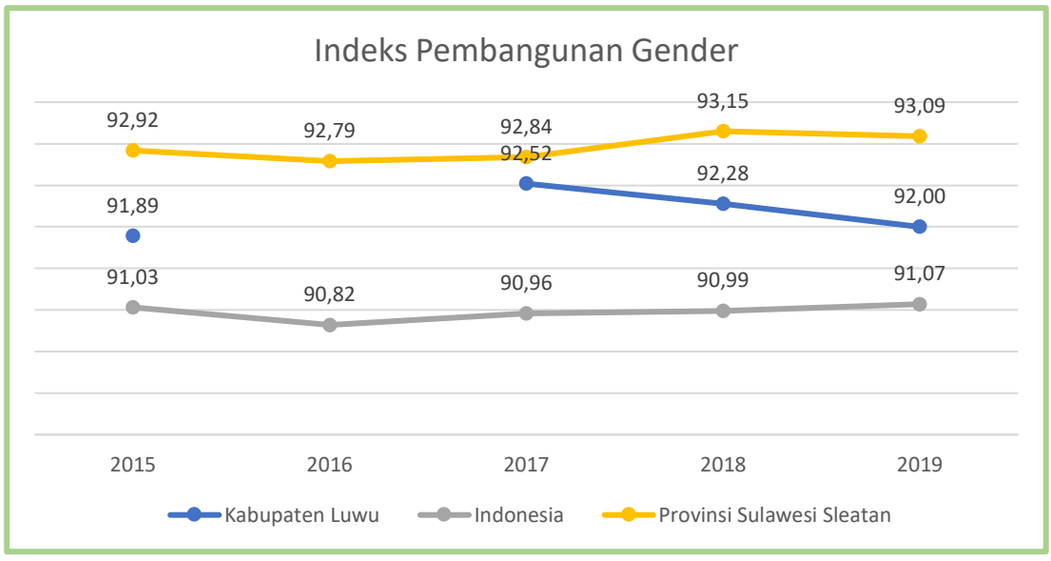

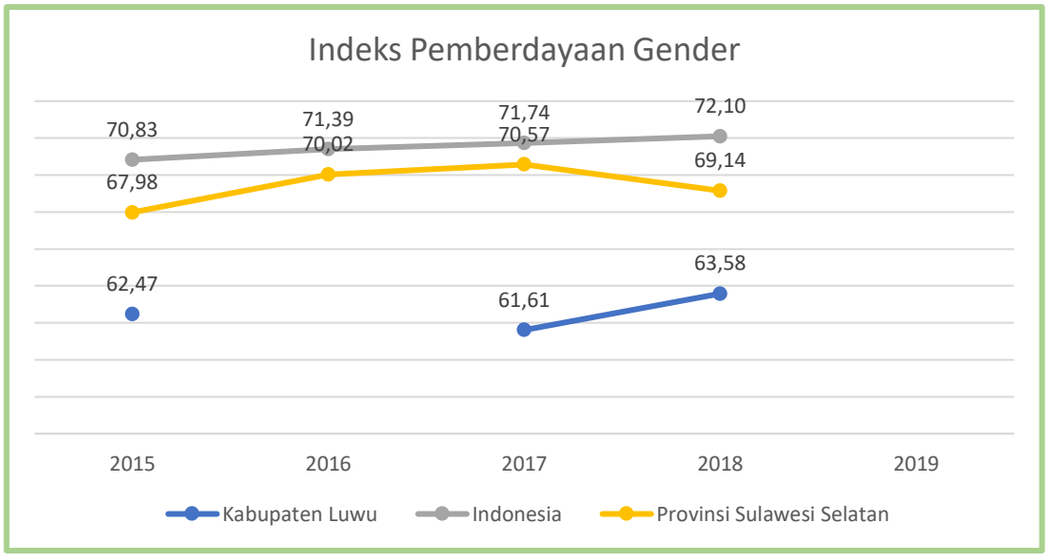

Sumber: Data diolah, BPS, Tahun 2020 (belum ada data 2016 IPG IDG & 2019 IDG)

3. Pangan

Situasi ketersediaan pangan wilayah antara lain tercermin dari jumlah ketersediaan pangan, yang digambarkan dari ketersediaan pangan maupun mutu keanekaragaman ketersediaan pangan yang digambarkan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH). Situasi ketersediaan pangan tersebut dapat digunakan sebagai salah satu acuan dalam perencanaan kebijakan penyediaan kebutuhan pangan dan gizi penduduk menuju kemandirian dan kestabilan pangan. Data dan informasi penyelenggaraan bidang urusan pangan periode tahun 2015-2019 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.41.
Data dan Informasi Penyelenggaraan Bidang Urusan Pangan
Tahun 2015-2019

No.	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1.	**Cakupan Desa Mandiri Pangan**	**70,93**	**71,81**	**73,57**	**73,57**	**85,90**
2.	**Ketersediaan pangan utama**					
	Rata2 jumlah ketersediaan pangan utama per Tahun (kg)	208.905.465	218.867.796	212.930.862	223.291.313	298.497.393
	Jumlah penduduk (orang)	350.218	353.277	356.305	359.209	362.027
	Ketersediaan pangan utama (Kg)	59.650	61.954	59.761	62.162	82.452
3.	**Ketersediaan energi dan protein perkapita**					
	Ketersediaan Protein (gram/kapita/hari):	68	69	69	69	69
	Ketersediaan energi (ka/kapita/hari)	3.306	3.327	3.322	3.294	3.406
4.	**Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan**					
	Pencapaian skor pola pangan harapan (skor)	85,20	87,40	87.80	86,30	89,20
	Ketersedian informasi pasokan, harga dan akses pangan (%)	100	100	100	100	100
	Pengembangan Cadangan Pangan Daerah	26,66	32,00	44,68	44,68	11,59

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu, Tahun 2020.

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat dijelaskan berbagai capaian pembangunan di bidang pangan, antara lain sebagai berikut:

a. Cakupan Desa Mandiri Pangan

Cakupan desa mandiri pangan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yaitu dari 70,93 persen pada tahun 2015 menjadi 85,90 persen pada tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa desa yang masuk kategori mandiri pangan di Kabupaten Luwu semakin meningkat. Desa Mandiri Pangan adalah desa yang masyarakatnya mempunyai kemampuan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan gizi melalui pengembangan subsistem ketersediaan, subsistem distribusi, dan subsistem konsumsi dengan memanfaatkan sumberdaya setempat secara berkelanjutan.

b. Ketersediaan Pangan Utama

Ketahanan pangan adalah ketersediaan pangan dan kemampuan untuk mengaksesnya. Ketersediaan pangan utama pertahun (kg) di Kabupaten Luwu semakin meningkat dari tahun ke tahun pada periode tahun 2015-2019, yaitu dari 59.650 Kg pada tahun 2015 menjadi 82.452 Kg pada tahun 2019. Hal ini sebanding dengan jumlah penduduk yang semakin meningkat.

c. Ketersediaan energi dan protein perkapita

Ketersediaan protein perkapita cenderung stagnan, hanya berkisar 69 gram/ perkapita/hari. Sedangkan ketersediaan energi secara umum mengalami peningkatan dari 3.306 ka/kapita/hari pada tahun 2015 menjadi 3.406 ka/kapita/hari pada tahun 2019.

d. Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan

1) Pencapaian skor pola pangan harapan dari tahun ke tahun juga mengalami peningkatan, yaitu dari 85,20 pada tahun 2015 menjadi 89,20 pada tahun 2019.
2) Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan telah dilakukan maksimal setiap tahunnya.
3) Pengembangan cadangan pangan daerah menurun pada tahun 2019 menjadi 11,59. Angka ini lebih rendah dibanding tahun 2015 yang mencapai 26,66.

4. Pertanahan

Permasalahan pertanahan erat kaitannya dengan surat atau bukti kepemilikan atas tanah, sehingga Kabupaten Luwu selalu berusaha untuk untuk mensertifikatkan hak atas tanah yang dikuasai dan dimiliki pemerintah daerah. Namun kemauan pemerintah daerah terhalang atau terhambat dengan pihak lain yang memiliki kewenangan dalam menerbitkan sertifikat atau bukti kepemilikan atas tanah dengan alasan kapasitas dan kemampuannya yang terbatas. Data dan informasi penyelenggaraan bidang urusan pertanahan periode tahun 2015-2019 di Kabupaten Luwu disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.42.
Data dan Informasi Penyelenggaraan Bidang Urusan Pertanahan
Tahun 2015-2019

No.	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1.	**Luas lahan bersertifikat**					
	Jumlah Luas Lahan Bersertifikat (Ha)	15.454	15.666	133.030	144.864	298.919
	Jumlah Luas Wilayah (km²)	3.000,25	3.000,25	3.000,25	3.000,25	3.000,25
	Persentase	**5,15**	**5,22**	**44,34**	**48,28**	**99,63**
2.	**Penyelesaian Kasus Tanah Negara**					
	Jumlah Kasus yang diselesaikan (kasus)	1	1	1	3	4
	Jumlah kasus yang terdaftar	4	2	3	3	6
	Penyelesaian kasus tanah Negara	**45,00**	**50,00**	**33,33**	**100,00**	**66,67**
3.	**Penyelesaian izin lokasi**					
	Jumlah Izin Lokasi	7	3	4	6	10
	Permohonan Izin Lokasi	7	3	4	6	10
	Persentase	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Sumber : Dinas Pertanahan Kabupaten Luwu, Tahun 2020.

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat dijelaskan berbagai capaian pembangunan di bidang pertanahan, antara lain sebagai berikut:

a. Luas lahan bersetifikat

Lahan yang memiliki setifikat dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yaitu dari 15.454 Ha pada tahun 2019 menjadi 298.919 Ha pada tahun 2019. Dengan demikian, kondisi ini telah mencapai 99,63% dari luas wilayah Kabupaten Luwu.

b. Penyelesaian kasus tanah Negara

Jumlah kasus yang terdaftar selama periode tahun 2015-2019 mengalami peningkatan yaitu dari 4 kasus pada tahun 2015 menjadi 6 kasus pada tahun 2019. Dari sejumlah kasus tersebut, yang dapat diselesaikan mengalami peningkatan yaitu dari 45,00% menjadi 66,67% pada tahun 2019.

c. Penyelesaian izin lokasi

Penyelesaian Ijin lokasi selalu mencapai 100% sepanjang periode tahun 2015-2019. Sedangkan permohonan yang diselesaikan terus meningkat pada periode 2016-2019 yaitu dari 3 permohonan menjadi 10 permohonan.

5. Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengamanatkan bahwa pembangunan ekonomi nasional diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Selanjutnya juga dinyatakan bahwa kualitas lingkungan hidup telah semakin menurun dan mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas: (a) pengurangan sampah; dan (b) penanganan sampah. Upaya pengelolaan sampah bertujuan bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

Data dan informasi penyelenggaraan bidang urusan lingkungan hidup periode tahun 2015-2019 di Kabupaten Luwu disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.43.
Data dan Informasi Penyelenggaraan Bidang Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2015-2019

No.	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Tersusunnya RPPLH Kab/Kota	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.	Terintegrasinya RPPLH dalam Rensana Pembangunan kab/Kota	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3.	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah bupaten/kota	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

No.	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
4.	Peningkatan Indeks Kualitas Air	26,55	26,56	26,65	26,65	26,65
5.	Pembinaan dan Pengawasan izin PPLH dan PUU LH					
	Pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.	38,45	39,65	39,50	39,22	37,89
	Jumlah Ketaatan terhadap izin lingkungan,izin PPLH dan PUU LH dari izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi yang ditangani	8	10	41	40	36
	Total penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang dibina dan diawasi terhadap izin lingkungan,izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten	1	36	57	102	95
	Persentase	**26,45**	**27,78**	**71,93**	**39,22**	**37,89**
6.	Pendidikan dan pelatihan masyarakat					
	Jumlah pelatihan yang diberikan kepada lembaga kemasyarakatan yang ada di satu kabupaten	1	1	2	2	3
7.	Pemberian penghargaan lingkungan hidup					
	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	1	1	2	2	3
8.	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten					
	Pengaduan Masyarakat yang ditangani	1	1	1	2	3
	Jumlah pengaduan masyarakat yang teregistrasi	1	1	1	2	3
	Persentase	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
9.	Persentase Timbunan Sampah yang tertangani (%)	76,03	80,50	83,75	83,75	67,30
10.	Persentase Jumlah Sampah yang terkurangi melalui 3R (%)	23,70	19,50	16,27	16,27	23,40
11.	Persentase Cakupan Area Pelayanan (%)	76,03	80,50	83,75	83,75	83,75
12.	Nilai Operasionalisasi TPA/ TPST/SPA	67,00	71,00	83,00	83,00	85,00
13.	Persentase Izin Pengolahan Sampah oleh Swasta yang diterbitkan	Tidak ada izin yang dikeluarkan sehubungan belum ada pihak swasta yang kerjasama dengan Pemkab mengenai pengelohan sampah				

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu, Tahun 2020.

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat dijelaskan berbagai capaian pembangunan di bidang lingkungan hidup, antara lain sebagai berikut:

a. Kabupaten Luwu telah memiliki Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dan telah terintegrasi dengan rencana pembangunan kabupaten.
b. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) telah diselenggarakan sejak tahun 2015.
c. Indeks kualitas air sejak tahun 2015 adalah 26,55.
d. Pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penaggung jawab usaha dan kegiatan terhadap ketaatan izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH

yang diterbitkan oleh pemerintah Kabupaten Luwu dari tahun 2015 sampai tahun 2019 mengalami fluktuasi.

e. Pelatihan yang diberikan kepada lembaga kemasyarakatan dalam pengelolaan lingkungan hidup pada tahun 2019 mencapai 3 kegiatan.
f. Pemberian penghargaan lingkungan hidup diberikan kepada 3 orang pada tahun 2019.
g. Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH, dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di daerah Kabupaten telah dapat ditangani seluruhnya.
h. Timbunan sampah yang tertangani baru mencapai 67,30% pada tahun 2019.
i. Sampah yang terkurangi melalui 3R baru mencapai 23,40% pada tahun 2019.
j. Cakupan area pelayanan persampahan baru mencapai 83,75% pada tahun 2019.
k. Nilai operasionalisasi TPA/TPST/SPA baru mencapai 85,00 pada tahun 2019.
l. Tidak ada izin yang dikeluarkan untuk pengolahan sampah karena belum ada pihak swasta yang kerjasama dengan pemerintah daerah mengenai pengolahan sampah.

6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Urusan administrasi kependudukan merupakan urusan yang sangat penting dalam tata pemerintahan nasional. Data administrasi kependudukan akan menjadi rujukan penting bagi kebijakan-kebijakan di sektor lain bidang politik, sosial dan ekonomi. Administrasi kependudukan merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan yang hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Tabel 2.44.
Data dan Informasi Penyelenggaraan Bidang Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2015-2019

No.	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1.	**Penduduk ber-KTP**					
	Jumlah penduduk yang ber-KTP (jiwa)	165.466	203.081	211.958	229.974	239.663
	Jumlah penduduk > 17 tahun atau telah menikah (jiwa)	247.420	252.943	256.791	261.879	254.355
	Rasio	**0,67**	**0,80**	**0,83**	**0,88**	**0,94**
2.	**Penduduk ber-KK**					
	Jumlah penduduk ber-KK (jiwa)	91.735	90.604	92.364	92.997	82.540
	Jumlah penduduk yang telah menikah (jiwa)	148.336	146.284	148.346	150.482	149.570
	Rasio	**0,62**	**0,62**	**0,62**	**0,62**	**0,55**
3.	**Bayi ber-Akte Kelahiran**					
	Jumlah bayi yang ber-akte kelahiran (jiwa)	4.326	4.234	4.576	5.851	6.707
	Jumlah bayi (jiwa)	6.964	6.979	6.390	7.196	7.779

No.	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
	Rasio	**0,62**	**0,61**	**0,72**	**0,81**	**0,86**
4.	**Pasangan ber-Akte Nikah**					
	Jumlah pasangan nikah ber-akte nikah	14.186	15.768	18.073	22.402	35.662
	Jumlah keseluruhan pasangan nikah	151.076	152.452	154.871	153.080	152.365
	Rasio	**0,09**	**0,10**	**0,12**	**0,15**	**0,23**
5.	**Ketersediaan database kependudukan skala Kabupaten**	**Ada**	**Ada**	**Ada**	**Ada**	**Ada**
6.	**Penerapan KTP Nasional berbasis NIK**	**Sudah**	**Sudah**	**Sudah**	**Sudah**	**Sudah**
7.	**Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)**					
	Jumlah KTP ber-NIK yang diterbitkan (unit)	165.466	203.081	211.958	229.974	239.663
	Jumlah penduduk wajib KTP (jiwa)	247.420	252.943	256.791	261.879	254.355
	Cakupan	**66,88**	**80,29**	**82,54**	**87,82**	**94,22**
8.	**Penerbitan Akte Kelahiran**					
	jumlah penduduk lahir dan memperoleh akta kelahiran di tahun bersangkutan (jiwa)	4.326	4.234	4.576	5.851	6.707
	Jumlah kelahiran di tahun bersangkutan (jiwa)	6.964	6.979	6.390	7.196	7.779
	Cakupan	**62,12**	**60,67**	**71,61**	**81,31**	**86,22**

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tahun 2020 .

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat dijelaskan berbagai capaian pembangunan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil, antara lain sebagai berikut:

a. Penduduk Ber-KTP

Perkembangan jumlah penduduk yang ber-KTP pada tahun 2019 meningkat hingga mencapai 239.663 jiwa dengan jumlah penduduk usia > 17 tahun atau yang telah menikah sebanyak 254.355 jiwa atau dengan rasio 0,94. Kondisi ini jauh lebih baik dibanding capaian pada tahun 2015 yaitu 0,67.

b. Penduduk Ber-KK

Jumlah penduduk ber-KK pada tahun 2019 rasionya menurun sampai 0,55 dibanding tahun sebelumnya 0,62. Ini menandakan bahwa kinerja dalam mengadakan KK masih kurang dan diperlukan adanya peninjauan kembali terhadap progres pendataan keluarga yang masih belum mepunyai KK.

c. Bayi Ber-Akte Kelahiran

Perbandingan antara Tahun 2019 dan 2018 cukup jelas terlihat adanya peningkatan dimana Tahun 2018 rasio bayi yang ber-akte kelahiran 0,81 dan mencapai 0,86 pada Tahun 2019.

d. Pasangan Ber-Akte Nikah

Berdasarkan data yang tertera pada tabel memperlihatkan sangat jelas rendahnya rasio pada pasangan yang ber-Akta nikah. Bahkan tahun terakhir hanya mencapai 0,23 akan tetapi dibandingkan Tahun 2018 yang jauh lebih rendah dengan rasio 0,15.

e. Database kependudukan skala kabupaten telah tersedia sejak tahun 2015.

f. Untuk penerapan KTP nasional berbasis NIK sudah menyeluruh dalam 5 tahun terakhir.

g. Perkembangan penerbitan KTP dari tahun ketahun sudah terbilang baik. Melihat data yang disajikan dalam 5 tahun terakhir terus megalami peningkatan beriringan dengan fluktuatifnya jumlah penduduk wajib KTP.

h. Hampir sama halnya dengan penerbitan KTP, penerbitan akte kelahiran juga sudah terbilang baik dalam 5 tahun terakhir. Namun berdasarkan cakupannya ditahun terakhir, masih tetap harus dilakukan pengoptimalan.

7. Pemberdayaan Masyarakat Desa

Lembaga Kemasyarakatan Desa merupakan wadah partisipasi masyarakat Desa sebagai mitra Pemerintah Desa yang bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat Desa, ikut serta merencanakan dan melaksanakan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa. Data dan informasi penyelenggaraan bidang urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa periode tahun 2015-2019 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.45.
Data dan Informasi Penyelenggaraan
Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Tahun 2015-2019

No.	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1.	**Sarana prasaran perkantoran pemerintahan desa yang baik**					
	Jumlah kantor pemerintahan desa yang baik (unit)	195	198	198	198	202
	Jumlah seluruh pemerintahan desa	207	207	207	207	207
	Cakupan	**94,20**	**95,65**	**95,65**	**95,65**	**97,58**
2.	**Kelompok Binaan LPM**					
	Jumlah Kelompok Binaan LPM (kelompok)	207	207	207	207	207
	Jumlah LPM (lembaga)	207	207	207	207	207
	Rata-rata	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3.	**Kelompok Binaan PKK**					
	Jumlah Kelompok Binaan PKK (kelompok)	229	229	229	229	229
	Jumlah PKK (kelompok)	229	229	229	229	229
	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
4.	**LSM Aktif**					
	Jumlah LSM aktif	1	9	12	12	12
	Jumlah LSM	48	56	59	59	59
	Persentase	**2,08**	**16,07**	**20,34**	**20,34**	**20,34**
5.	**LPM Berprestasi**					
	Jumlah LPM berprestasi	0	0	0	0	0
	Jumlah LPM	207	207	207	207	207
	Persentase	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**PKK Aktif**					

No.	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
	Jumlah PKK aktif	229	229	229	229	249
	Jumlah PKK	229	229	229	229	249
	Persentase	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
7.	**Posyandu Aktif**					
	Jumlah posyandu aktif	417	417	417	417	418
	Jumlah posyandu	417	417	417	417	418
	Persentase posyandu aktif	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu, Tahun 2020.

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat dijelaskan berbagai capaian pembangunan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, antara lain sebagai berikut:

a. Cakupan dalam program sarana dan prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik pada Tahun 2019 mengalami peningkatan cakupan yaitu 97,58. Perbandingannya dengan Tahun 2016-2018 yang hanya stagnan di angka 95,65.
b. Kelompok binaan LPM sudah maksimal terbukti dari 5 tahun terakhir sudah mencapai 207 kelompok.
c. Pada tahun terakhir kelompok binaan PKK juga sudah maksimal, yaitu mencapai 229 PKK di 22 kecamatan.
d. Jumlah LSM aktif di perdesaan pada Tahun 2019 baru mencapai 20,34%. Hal ini menyebabkan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Luwu dalam rangka meningkatkan taraf hidup penduduk perdesaan kurang berhasil sebagaimana yang diharapkan. Hal ini menjadi perhatian dan sebagai input untuk perumusan kebijakan di masa depan, mengingat potensi perdesaan di Kabupaten Luwu untuk berkembang sangat besar.
e. Tidak ada LPM berprestasi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.
f. Semua PKK yang ada sudah tergolong aktif dalam 5 tahun terakhir.
g. Semua posyandu sudah tergolong aktif dalam 5 tahun terakhir.

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kehadiran perangkat daerah yang melaksanakan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Kabupaten Luwu adalah dalam rangka melakukan upaya-upaya menekan laju pertumbuhan penduduk, antara lain dengan menggunakan strategi pembinaan keluarga berencana. Layanan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana menjadi kewenangan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan capaian indikator kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.46.
Data dan Informasi Penyelenggaraan
Bidang Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Tahun 2015-2019

No.	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1.	**Laju Pertumbuhan Penduduk**	**0,90**	**0,87**	**0,86**	**0,82**	**0,82**
2.	**Total Fretility Rate (TFR)**	**2,67**	**2,83**	**2,86**	**2,96**	**2,96**
3.	**Dukungan Perangkat Daerah (Dinas/Badan) dalam Kebijakan Pengendalian Penduduk Penduduk**					

No.	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
	Perangkat Daerah yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	3	3	3	3	3
	Jumlah perangkat daerah yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	0	0	0	0	0
	Jumlah kebijakan daerah yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	0	0	0	0	0
	Jumlah semua perangkat daerah	33	34	34	34	34
	Jumlah sektor yang menyepakati pemanfaatan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	4	4	4	4	4
	Jumlah Kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal dan Informasi yang melakukan pendidikan kependudukan	3	3	3	3	3
	Jumlah Kampung KB	1	1	23	59	59
	Persentase OPD yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	**8,82**	**8,82**	**8,82**	**8,82**	**8,82**
	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan induk pengendalian Penduduk	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**Rata-rata jumlah anak per keluarga**	**2,9**	**2,8**	**2,7**	**2,4**	**2,4**
5.	**Akseptor KB**					
	Jumlah Akseptor KB	42.401	42.615	38.615	38.755	38.366
	Jumlah Pasangan Subur	51.175	50.666	50.721	50.849	50.580
	Ratio	**82,85**	**84,11**	**76,13**	**76,22**	**75,85**
6.	**Pemakaian Kontrasepsi/CPR bagi Perempuan Menikah Usia 15-49 Tahun**					
	Jumlah Peserta KB Aktif	34.560	32.415	32.575	33.029	33.473
	Jumlah Pasangan Usia Subur	51.175	50.666	50.721	50.849	50.580
	Angka (%)	**67,53**	**63,98**	**64,22**	**64,96**	**66,18**
7.	**Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun**					
	Jumlah pasangan usia subur dengan istri dibawah 20 tahun	1.158	1.000	609	500	537
	Jumlah Pasangan Usia Subur	51.175	50.666	50.721	50.849	50,622
	Cakupan	**2,26**	**1,97**	**1,20**	**0,98**	**1,06**
8.	**Pasangan Usia Subur yang Ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (*Unmet Need)***					
	Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani	6.853	7.096	7.882	7.624	7.216
	Jumlah Pasangan Usia Subur	51.175	50.666	50.721	50.849	50.580
	Cakupan	**13,39**	**14,01**	**15,54**	**14,99**	**14,27**
9.	**Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)**					
	Jumlah Akseptor KB yang menggunakan MKJP	7.390	7.301	7.840	8.564	9.399
	Jumlah Akseptor KB	42.401	42.615	38.615	38.755	38.366
	Persentase	**17,43**	**17,13**	**20,30**	**22,10**	**24,50**
10.	**Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi**					
	Jumlah Pasangan Usia Subur yang masih menggunakan kontrasepsi	34.560	32.415	32.575	33.029	33.473
	Jumlah Akspetor KB	42.401	42.615	38.615	38.755	38.366
	Persentase	**81,51**	**76,06**	**84,36**	**85,23**	**84,25**
11.	**Anggota Bina Keluarga Balita**					
	Jumlah Anggota Kelompok BKB yang ber-KB	3.051	4.556	4.438	4.015	3.849

No.	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
	Jmlah Anggota Kelompok BKB	4.896	8.134	7.672	6.455	6.291
	Cakupan	**62,32**	**56,01**	**57,85**	**62,20**	**61,18**
12.	**Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB**					
	Jumlah Anggota Kelompok BKR yang ber-KB	771	2.144	2.217	1.947	1.871
	Jmlah Anggota Kelompok BKR	2.875	4.429	4.358	3.785	3.681
	Cakupan	**26,82**	**48,41**	**50,87**	**51,44**	**50,83**
13.	**Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB**					
	Jumlah Anggota Kelompok BKL yang ber-KB	469	1.792	1.746	1.271	1.283
	Jmlah Anggota Kelompok BKL	2.962	4.246	4.175	3.567	3.460
	Cakupan (%)	**15,83**	**42,20**	**41,82**	**35,63**	**37,08**
14.	**Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di Setiap Kecamatan**					
	Jumlah PPKS	2	2	2	2	2
	Jumlah Kecamatan	22	22	22	22	22
	Persentase	**9,09**	**9,09**	**9,09**	**9,09**	**9,09**
15.	**Remaja Dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa**					
	Jumlah PIK R/M	25	25	25	34	34
	Jumlah Kecamatan	22	22	22	22	22
	Cakupan	**113,64**	**113,64**	**113,64**	**154,55**	**154,55**
16.	**PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk**					
	Jumlah PKB dan PLKB yang didayagunakan	49	48	47	47	44
	Jumlah PKB/PLKB	49	48	47	47	44
	Cakupan	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
17.	**Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan**					
	Jumlah petugas Pembantu Pembina KB Desa	227	227	227	227	227
	Jumlah desa/kelurahan	227	227	227	227	227
	Rasio	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
18.	**Ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat**					
	Jumlah alkon per mix kontrasepsi yang tersedia di Faskes dan gudang Alkon kab/kota	21.713	33.707	36.500	32.676	23.826
	Perkiraan Permintaan Masyarakat	20.650	30.643	31.577	26.095	21.644
	Cakupan	**105,15**	**110,00**	**115,59**	**125,22**	**110,08**
19.	**Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan**					
	Jumlah Faskes dan jejaring yang bekerjasama dengan BPJS	21	42	42	42	42
	Jumlah Faskes dan jejaring	84	85	96	96	96
	Persentase	**25,00**	**49,41**	**43,75**	**43,75**	**43,75**
20.	**Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa**					
	Jumlah informasi data mikro keluarga yang tersedia	80.232	80.700	80.992	85.915	86.029
	Jumlah seluruh informasi	83.412	84.171	84.673	85.915	86.029
	Cakupan	**96,19**	**95,88**	**95,65**	**100,00**	**100,00**
21.	**Tahapan Keluarga Sejahtera**					
	Keluarga Pra Sejahtera	19.361	18.213	17.780	15.014	14.963
	Keluarga Sejahtera I	17.889	17.437	17.072	23.209	22.277
	Keluarga Sejahtera II	42.982	45.050	46.140	47.771	48.789
	Total Keluarga	**80.232**	**80.700**	**80.992**	**85.994**	**86.029**
22.	**Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I (%)**	**46,43**	**44,18**	**43,03**	**44,45**	**43,28**

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Luwu, Tahun 2020.

Berdasarkan tabel di atas, berikut ini diuraikan perkembangan penyelenggaraan bidang urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Kabupaten Luwu Tahun 2015-2019.

a. Laju Pertumbuhan Penduduk

Sepanjang Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019, pemerintah daerah perlahan berhasil mengendalikan jumlah penduduk di Kabupaten Luwu. Pada Tahun 2015, penduduk Kabupaten Luwu naik 0,90% dibandingkan tahun sebelumnya, namun secara konsisten menurun meski cenderung lambat menjadi 0,82% pada tahun 2019. Hal ini menunjukkan cukup luasnya cakupan program keluarga berencana di Kabupaten Luwu.

Apabila dilihat berdasarkan kecamatan, pada tahun 2017 terdapat 10 kecamatan dengan LPP diatas rata-rata Kabupaten Luwu, bahkan terdapat 6 kecamatan dengan LPP di atas 1%.

Grafik 2.30.

Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan
Tahun 2019

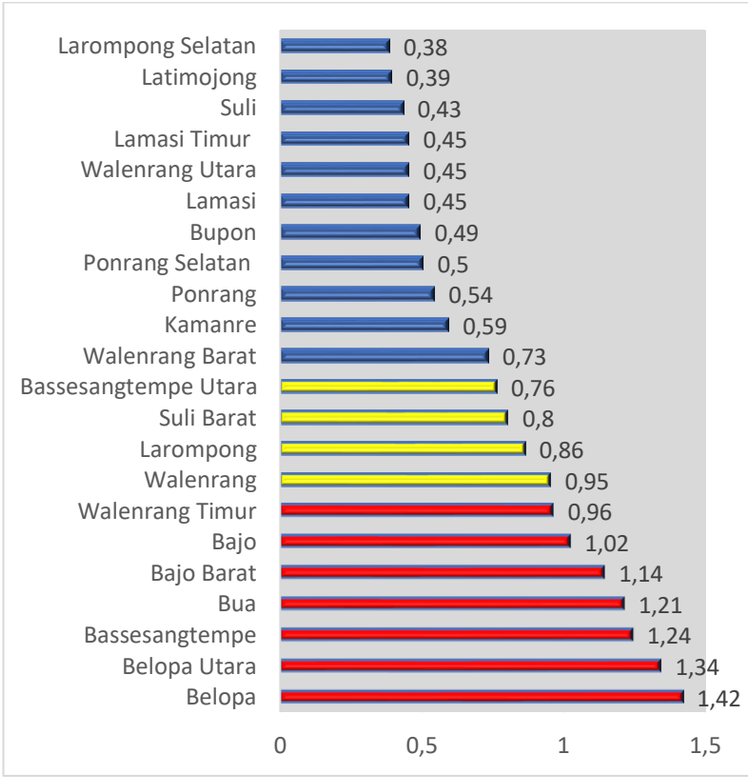

Sumber: BPS, Tahun 2020.

b. Total Fretility Rate (TFR)

TFR adalah Angka Kelahiran Total. TFR mengindikasikan rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang wanita usia subur (15-49 tahun) di suatu wilayah dalam suatu waktu tertentu. TFR Kabupaten Luwu pada tahun 2019 adalah 2,96.

c. Dari data yang disajikan mengenai dukungan perangat daerah dalam kebijakan pengendalian penduduk stagnan dalam 5 tahun terakhir yaitu 3 perangkat daerah.

d. Rata-rata jumlah anak per keluarga

Rata-rata jumlah anak per keluarga di Kabupaten Luwu pada tahun 2019 adalah 2,4 anak. Hal Ini yang harus menjadi perhatian, dan terus diupayakan untuk diturunkan, agar tiap keluarga juga Pemerintah daerah di Luwu memiliki kesempatan lebih besar dalam membentuk, membangun keluarga maupun sumber daya manusia yang lebih berkualitas. Sehingga generasi penerus yang tumbuh dan berkembang ini memiliki daya saing dan kemampuan yang lebih baik.

e. Rasio Akseptor KB

Program keluarga berencana (KB) merupakan program pemerintah yang dirancang untuk menyeimbangkan antara kebutuhan dan jumlah penduduk. Program keluarga berencana oleh pemerintah adalah agar keluarga sebagai unit terkecil kehidupan bangsa diharapkan menerima Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera (NKKBS) yang berorientasi pada pertumbuhan yang seimbang.

Grafik 2.31.

Perkembangan Akseptor KB
Tahun 2015-2019

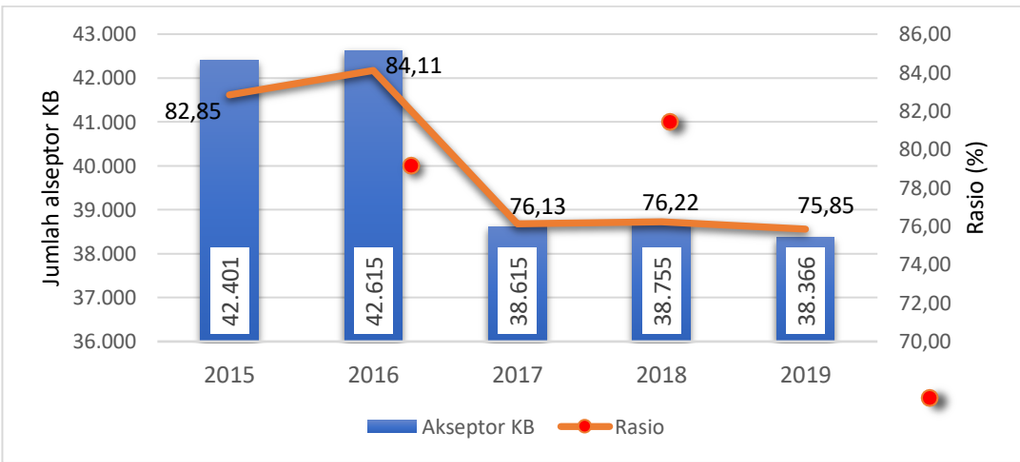

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Luwu Tahun 2020.

Perencanaan jumlah keluarga dengan pembatasan yang bisa dilakukan dengan penggunaan alat-alat kontrasepsi atau penanggulangan kelahiran. Indikator yang sering digunakan dalam melihat keberhasilan program KB adalah Rasio Akseptor KB. Rasio akseptor KB digunakan untuk mengetahui tingkat Partisipasi Pasangan Usia Subur (PUS) terhadap penggunaan alat/cara KB. Besarnya angka partisipasi KB (akseptor KB) menunjukkan adanya keberhasilan program KB dan pengendalian jumlah penduduk.

f. Pemakaian Kontrasepsi/CPR bagi Perempuan Menikah Usia 15-49 Tahun pada tahun 2019 lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun 2015 yaitu 66,18% dan 67,53%.

g. Pasangan usia subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun di Tahun 2019 berjumlah 537 pasangan atau mencakup 1,06%, angka ini menurun dibandingkan tahun 2015 yang mencapai 1.158 atau dengan cakupan 2,26%.

h. Jumlah PUS yang ber-KB tetapi tidak dilayani pada tahun 2015 mencapai 13,39% dan pada tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 14,27%.

i. Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

   Jumlah pasangan yang menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) sempat mengalami penurunan ditahun 2016 dan terus meningkat ditahun-tahun berikutnya hingga mencapai 24,50% ditahun 2019.

j. Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi

   Keberlangsungan pemakaian kontrasepsi di Kabupaten Luwu periode tahun 2015-2019 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2015 baru mencapai 81,51% dan pada tahun 2019 dapat ditingkatkan menjadi 84,25%.

k. Anggota Bina Keluarga Balita

   Jumlah anggota kelompok BKB ditahun 2016 merupakan cakupan terendah dengan nilai 56,01 dan tertinggi pada Tahun 2015 dengan nilai 62,32, hal ini tidak jauh berbeda dengan Tahun 2018 yang nilainya 62,20 kemudian sedikit turun di tahun 2019 dengan nilai 62,18.

l. Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB

   Cakupan anggota bina keluarga remaja ber-KB mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Untuk 2 tahun terakhir yaitu 2018 dan 2019 terjadi sedikit penurunan dimana nilai cakupan pada Tahun 2018 mencapai 51,44% dan di tahun 2019 50,83%.

m. Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB

   Perkembangan anggota BKL ber-KB juga terjadi fluktuasi dari tahun ke tahun dimana pada tahun 2019 mencakup 37,08%, yang terbilang masih rendah jika dibandingkan dengan Tahun 2016 yang mencapai 42,20%. Kondisi ini menjadi perhatian bagi pemerintah Kabupaten Luwu untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan KB.

n. Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di Setiap Kecamatan

   Persentase cakupan PPKS dalam 5 Tahun terakhir stagnan pada 9,09%, yaitu hanya 2 PPKS dari 22 kecamatan yang ada.

o. Remaja Dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa

   Cakupan remaja dalam PIK R/M di Tahun 2015-2017 stagnan pada 113,64% kemudian naik di Tahun 2018 dengan persentase 154,55% sampai di Tahun 2019. Artinya, dari 22 kecamatan yang ada, terdapat 34 PIK RM.

p. Cakupan jumlah PKB/PLKB yang didayagunakan perangkat daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah dibidang pengendalian penduduk dalam 5 tahun terakhir stagnan mencapai angka maksimal 100%

q. Rasio petugas pembantu Pembina KB Desa dalam 5 tahun sudah maksimal yaitu mencapai 100%.

r. Jumlah alkon per mix kontrasepsi yang tersedia di faskes dan gudang alkon Kabupaten melebihi perkiraan permintaan masyarakat. Di Tahun 2019 ketersediaan dan perkiraan permintaan masyarakat menurun secara beriringan namun tetap ketersediaan masih lebih banyak dibandingkan permintaan masyarakat.

s. Cakupan faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR di 3 tahun terakhir stagnan pada 43,75%. Nilai ini menurun dari tahun sebelumnya yaitu 2016 yang mencapai 49,41%.

t. Penyediaan informasi data mikro keluarga disetiap desa terus mengalami peningkatan dan mencapai nilai maksimal ditahun terakhir dengan persentase 100%.

u. Perkembangan tahapan keluarga sejahtera dari tahun ke tahun terbilang cukup baik ditandai dengan menurunnya nilai keluarga Pra Sejahtera dan meningkatnya keluarga Sejahtera I dan II. Dimana ditahun 2019 mencapai 48.789 Keluarga Sejahtera II, 22.277 Keluarga Sejahtera I, dan 14.963 keluarga Pra Sejahtera dengan total jumlah keluarga pada tahun yang sama sebanyak 86.029.

v. Keluarga Pra Sejahtera I di tahun terakhir adalah sebesar 43,28% dimana nilai ini merupakan nilai rata-rata dalam 5 tahun terakhir.

9. Perhubungan

Fasilitas perlengkapan jalan memberi informasi kepada pengguna jalan tentang peraturan dan petunjuk yang diperlukan untuk mencapai arus lalu lintas yang selamat, seragam dan beroperasi dengan efisien. Fasilitas perlengkapan jalan diantaranya adalah marka jalan; rambu-rambu lalu lintas; alat pemberi isyarat lalu lintas; dan fasilitas penerangan jalan.

Pelaksanaan urusan perhubungan di Kabupaten Luwu periode tahun 2015-2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.47.
Data dan Informasi Penyelenggaraan Bidang Urusan Perhubungan
Tahun 2015-2019

No.	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1.	**Penumpang Angkutan Umum**					
	Jumlah penumpang angkutan umum	396.457	476.639	499.782	346.014	212.582

No.	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
	Jumlah penumpang Pesawat udara	830	8.301	44.825	65.041	47.201
	Total Jumlah Penumpang	**397.287**	**484.840**	**544.607**	**411.055**	**259.201**
2.	**Ijin Trayek**					
	Jumlah ijin trayek yang dikeluarkan	402	528	430	470	540
	Jumlah penduduk	350.218	353.277	356.305	359.209	362.027
	Rasio	**0,0011**	**0,0015**	**0,0012**	**0,0013**	**0,0014**
3.	**Jumlah Uji kir angkutan umum**	**1.975**	**1.989**	**1.884**	**1.878**	**1,926**
4.	**Pelabuhan Laut/Terminal Bis**					
	Jumlah pelabuhan laut	1	1	1	1	1
	Jumlah terminal bis	2	2	1	1	0
	Jumlah	**3**	**3**	**2**	**2**	**1**
5.	**Layanan Angkutan Darat**					
	Jumlah angkutan darat	31.062	34.968	37.795	41.124	45.287
	Jumlah penumpang angkutan darat	396.457	476.539	499.782	511.328	212.582
	Persentase	**7,83**	**7,34**	**7,56**	**8,04**	**21,30**
6.	**Kepemilikan KIR angkutan umum**					
	Jumlah angkutan umum yang tidak memiliki KIR	100	215	897	1.037	1.598
	Jumlah Penduduk	350.218	353.277	356.305	359.209	362.027
	Jumlah angkutan umum	2.075	2.204	2.781	2.915	3.524
	Persentase	**4,80**	**9,70**	**32,20**	**35,60**	**45,35**
7.	**Pemasangan Rambu-rambu**					
	Jumlah pemasangan rambu-rambu pada Tahun n	81	157	223	332	450
	Jumlah rambu-rambu yang seharusnya tersedia	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	Persentase	**3,52**	**6,83**	**9,70**	**14,43**	**19,56**
8.	**Panjang jalan per jumlah kendaraan**					
	Panjang Jalan (Km)	2.049,45	2.049,45	2.049,45	2.049,45	2.049,45
	Jumlah Kendaraan	31.062	34.968	37.795	41.124	45.287
	Rasio	**0,066**	**0,059**	**0,054**	**0,049**	**0,045**
9.	**Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum**					
	Jumlah orang yang terangkut angkutan umum (Orang)	396.457	476.539	499.782	346.014	212.582
	Jumlah barang yang terangkut angkutan umum (Ton)	221	301	386	204	167
10.	**Orang/Barang Melalui Dermaga/Bandara/Terminal**					
	Jumlah Orang	397.287	484.840	544.607	411.055	259.783
	Jumlah Barang (kg)	221,9	312,01	426,25	518,6	449,46
11.	**Layanan Urusan Perhubungan**					
	Angkutan Darat	31.062	34.968	37.795	41.124	45.287
	Kepemilikan KIR Angkutan Umum	1.975	1.989	1.884	1.874	1.926

No.	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
	Traffic Light	1	4	4	4	4
	Warning Light	8	10	10	10	10
	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	0,066	0,059	0,054	0,049	0,045

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu, Tahun 2020.

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat dijelaskan berbagai capaian pembangunan di bidang perhubungan periode tahun 2015-2019, antara lain sebagai berikut:

a. Jumlah penumpang angkutan umum di Tahun 2015-2017 mengalami peningkatan hingga mencapai 544.607 penumpang. Sedangkan di Tahun 2018 dan 2019 menurun sampai mencapai angka terendah pada Tahun 2019 yaitu 259.201 penumpang. Hal ini juga dipengaruhi dengan meningkatnya jumlah kendaraan milik pribadi.
b. Ijin trayek yang dikeluarkan dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi dan jumlah tertinggi terjadi di Tahun 2016 yang mencapai 528, Tahun 2019 meningkat menjadi 540 ijin yang mencakup 0,0014 dari jumlah penduduk.
c. Jumlah uji KIR angkutan umum dalam 5 tahun terakhir mengalami fluktuasi dan jumlah tertinggi terjadi di Tahun 2016 dengan jumlah 1.989 kendaraan.
d. Jumlah pelabuhan laut/terminal bus stagnan di Tahun 2015 dan 2016 masing-masing berjumlah 3, dalam 2016 dan 2017 masing-masing berjumlah 2, dan di Tahun terakhir terdapat penambahan 1 pelabuhan laut.
e. Persentase layanan angkutan darat mengalami peningkatan dari tahun ke tahun namun sempat turun sedikit di Tahun 2016. Selebihnya meningkat dan pada Tahun 2019 mencapai persentase tertinggi 21,30%.
f. Persentase kepemilikan KIR terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dan pada Tahun 2019 mecapai 45,35%.
g. Rasio pemasangan rambu-rambu masih terbilang minim namun terus terjadi peningkatan dari tahun ke tahun dalam 5 tahun terakhir dan pada tahun 2019 telah mencapai 19,56%.
h. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan dari tahun ke tahun mengalami penurunan dari 0,066 pada tahun 2015 menjadi 0,045 pada tahun 2019.
i. Terjadi penurunan jumlah orang yang terangkut angkutan umum yaitu dari 396.457 orang pada tahun 2015 menjadi 212.582 orang pada tahun 2019. Sedangkan terhadap barang mengalami fluktuasi dan kondisi tahun 2019 yang mencapai 167 ton lebih rendah dibandingkan tahun 2015 yang mencapai 221 ton.
j. Jumlah orang/barang yang melalui dermaga/bandara/terminal sangat fluktuatif. Untuk jumlah orang sendiri menurun sangat jelas di Tahun 2019 dengan jumlah 259.783 orang dan untuk barang 449,46 ton.
k. Capaian angkutan darat dari tahun ketahun terus mengalami peningkatan, sedangkan untuk kepemilikan KIR angkutan umum

terbilang fluktuatif , *traffic light* mengalami peningkatan pada Tahun 2015 ke Tahun 2016 dan stagnan di 4 tahun berikutnya. Demikian halnya dengan *warning light*, sedangkan untuk panjang jalan per jumlah kendaraan mengalami penurunan dari tahun ke tahun.

10. Komunikasi dan Informatika

Pembangunan di bidang komunikasi dan informatika di Kabupaten Luwu terus berjalan. Layanan komunikasi dan informatika melalui media cetak dan media elektonik telah banyak dinikmati oleh masyarakat.

Secara umum, persentase dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 masyarakat yang menggunakan jaringan komunikasi secara stimulan meningkat. Masyarakat kini cenderung memilih telepon seluler karena praktis, dapat dibawa bepergian kemana-mana, lebih bersifat pribadi, dan tersedianya kecanggihan teknologi dalam telepon seluler yang dapat mengakses internet, menyimpan dan mendengarkan musik, menyimpan gambar (foto) dan video, serta merekam gambar dan suara, dan lain-lain.

Tabel 2.48.
Data dan Informasi Penyelenggaraan Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika,Tahun 2015-2019

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Server yang dikelola	0	0	1	7	7
Jumlah Aplikasi Pemerintah yang dikembangkan	0	0	1	5	4
Cakupan Layanan Internet pada OPD yang dikelola	0	0	0	0	8
Cakupan Akses Layanan Internet di Desa dengan Baik	0	0	0	20%	40%
Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Internet	-	-	-	-	-
Tersedianya Website Pemerintah Daerah	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Persentase Website OPD	0	20,00	40,00	50,00	50,00

Sumber: Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu, Tahun 2020.

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat dijelaskan berbagai capaian pembangunan di bidang komunikasi dan informatika periode tahun 2015-2019, antara lain sebagai berikut:

a. Sehubungan dengan semakin canggihnya perkembangan tekonologi komunikasi, maka beberapa indikator yang menjadi tolok ukur kinerja yang ditetapkan di bidang komunikasi dan informatika sudah tidak relevan dan tidak tersedia datanya.
b. Jumlah server yang dikelola mengalami peningkatan dan stagnan di dua tahun terakhir dengan jumlah 7 server.
c. Jumlah aplikasi pemerintah darah yang dikembangkan dari Tahun 2016 ke Tahun 2018 mencakup 5 aplikasi, kemudian berkurang di Tahun 2019 menjadi 4 aplikasi.

d. Cakupan layanan internet pada OPD yang dilekola hanya terdapat pada Tahun 2019 dengan cakupan 8 OPD.
e. Akses layanan internet di desa meningkat dalam 2 tahun terakhir dengan persentase masing-masing 20% dan 40%
f. Website Pemerintah Daerah telah tersedia sejak lima tahun terakhir.
g. OPD yang memiliki *website* meningkat dalam 5 tahun terakhir dan untuk 2 tahun terakhir stagnan di 20%.
h. Indeks kematangan keamanan informasi (IKKI) meningkat dalam 3 tahun terakhir dan stagnan di 50% pada Tahun 2018 dan 2019

11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Struktur ekonomi Luwu ke depan akan didominasi oleh empat sektor utama yaitu sektor pertanian, industri, perdagangan dan pariwisata. Seiring dengan era perdagangan bebas yang akan terus mewarnai perkembangan ekonomi dunia di masa mendatang, penguatan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah akan menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah.

Bidang urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian dengan capaian indikator kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.49.
Data dan Informasi Penyelenggaraan Bidang Urusan
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Tahun 2015-2019

No.	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1.	**Koperasi Aktif**					
	Jumlah Koperasi	412	413	413	424	423
	Jumlah Koperasi Aktif	201	206	127	187	210
	Persentase	**48,81**	**49,95**	**30,71**	**44,10**	**44,60**
2.	**Usaha Mikro, Kecil dan Menengah**					
	Jumlah UMKM	18.080	18.117	18.183	18.406	19.250
	Jumlah UMKM Aktif	16.290	15.399	15.637	15.921	16.761
	Persentase	**90,10**	**85,00**	**86,00**	**86,50**	**87,07**
3.	**Jumlah Produk Asli Daerah Hasil dari UKM**	**18**	**18**	**18**	**18**	**18**

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian, Tahun 2020.

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat dijelaskan berbagai capaian pembangunan di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah periode tahun 2015-2019, antara lain sebagai berikut:

a. Jumlah koperasi aktif di Kabupaten Luwu pada Tahun 2019 masih sangat rendah yatu 44,60% dari koperasi yang ada.

b. Jumlah UMKM terus mengalami perkembangan, meskipun keaktifannya mengalami fluktuasi. Secara umum, UMKM aktif pada Tahun 2019 lebih besar dibandingkan pada Tahun 2015. Hal ini tentu saja harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah Kabupaten Luwu dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah.

c. Jumlah produk asli daerah hasil dari UKM stagnan dalam 5 tahun terakhir dengan jumlah 18 komoditi.

12. Penanaman Modal

Iklim investasi di Luwu menunjukkan perkembangan yang terus membaik. Posisi Luwu yang strategis menempatkan Luwu menjadi tujuan investasi, baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Namun demikian, pertumbuhan investasi belum mampu meningkatkan keterkaitan dengan usaha ekonomi lokal dan kesempatan kerja. Hal ini diakibatkan belum efisien dan efektifnya birokrasi, belum adanya kepastian hukum dan kepastian berusaha dalam bidang penanaman modal, masih rendahnya infrastruktur pendukung adalah merupakan kendala dalam upaya peningkatan investasi di Luwu.

Tabel 2.50.
Data dan Informasi Penyelenggaraan Bidang Urusan Penanaman Modal, Tahun 2015-2019

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
Jenis dan Jumlah Bank dan Cabang	7	7	7	7	7
Jenis dan jumlah perusahaan asuransi	2	2	2	2	2
Jenis, Kelas dan Jumlah Penginapan/ Hotel	13	14	14	14	14
Lama Proses perizinan	1-3 hari	1-15 hari	1-15 hari	1-15 hari	1-15 hari
Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha	3	3	4	4	4
Jumlah/ Macam Pajak	7/7	7/7	7/7	7/7	7/7
Jumlah/ Macam Retribusi	3	3	3	3	2
Presentase indeks kepuasan masyarakat	50,45	73,66	75,45	87,01	91,12
Jumlah investor dalam negeri (PMDN)	17	17	12	13	13
Jumlah investor asing (PMA)	1	2	0	0	0
Nilai investasi (miliar Rp)	567,97	30.45	22,39	16,69	16,69
Rasio daya serap tenaga kerja	27,10	15,01	22,01	20,01	25,48

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab.Luwu, Tahun 2020.

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat dijelaskan berbagai capaian pembangunan di bidang penanaman modal periode tahun 2015-2019, antara lain sebagai berikut:

a. Sejak tahun 2015 tidak ada penambahan jenis dan jumlah bank dan cabang serta jumlah perusahaan asuransi yang beroperasi di Kabupaten Luwu.
b. Pada Tahun 2015 terdapat 13 jenis, kelas dan jumlah penginapan/hotel dan sejak tahun 2016 bertambah menjadi 14.
c. Pada tahun 2015 lama proses perizinan hanya 1-13 hari dan diperpnjang lagi pada tahun-tahun berikutnya yaitu 1-15 hari.

d. Terdapat 4 Perda yang mendukung iklim usaha di Kabupaten Luwu sejak tahun 2017.
e. Terdapat 7 jenis/macam pajak dan 2 jenis/macam retribusi yang diselenggarakan Pemda Kabupaten Luwu.
f. Indeks kepuasan masyarakat atas layanan perizinan mencapai 91,12 pada tahun 2019.
g. Investasi di Kabupaten Luwu pada tahun 2019 lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2015. Hal ini merupakan tantangan bagi pemerintah Kabupaten Luwu di masa depan mengingat investasi adalah salah satu faktor pendukung dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah.
h. Realisasi investasi menurun secara signifikan, yaitu dari Rp.567,97 milyar dengan jumlah investor 17 perusahaan pada tahun 2015 menjadi 13 perusahaan dengan nilai investasi 16,69 milyar pada tahun 2019.
i. Rasio daya serap berfluktuasi dari tahun ke tahun yaitu dari 27,10 menjadi 25,48.

13. Kepemudaan dan Olah Raga

Pembangunan pemuda sebagai salah satu unsur sumberdaya manusia dan tulang punggung bangsa serta penerus cita-cita bangsa, disiapkan dan dikembangkan kualitas kehidupannya, mulai dari tingkat pendidikan, kesejahteraan hidup dan tingkat kesehatannya.

Pemuda merupakan penerus perjuangan generasi terdahulu untuk mewujukan cita-cita bangsa. Pemuda menjadi harapan dalam setiap kemajuan di dalam suatu bangsa, Pemuda lah yang dapat merubah pandangan orang terhadap suatu bangsa dan menjadi tumpuan para generasi terdahulu untuk mengembangkan suatu bangsa dengan ide-ide ataupun gagasan yang berilmu, wawasan yang luas, serta berdasarkan kepada nilai-nilai dan norma yang berlaku di dalam masyarakat.

Penyelenggaraan urusan kepemudaan dan olah raga di Kabupaten Luwu dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olah Raga, dengan capaian indikator sebagai berikut:

Tabel 2.51.
Data dan Informasi Penyelenggaraan Bidang Urusan Kepemudaan dan Olah Raga, Tahun 2015-2019

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Organisasi Pemuda	20	25	30	30	30
Jumlah Kegiatan Kepemudaan	4	6	7	4	4
Jumlah Kegiatan Olahraga	6	5	6	2	2
Jumlah Organisasi Olahraga	15	15	15	15	15
Persentase Organisasi Olahraga yang Aktif (%)	32,00	40,00	50,00	55,00	55,00
Cakupan Pembinaan Olahraga (cabang olahraga unggulan yang dibina)	2	2	5	3	3
Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi (jumlah cabang olah raga yang	4	4	7	10	15

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
memiliki pelatih yang telah sertifikasi)					
Cakupan Wasit yang Bersertifikasi	40	50	50	65	60
Jumlah atlet yang berprestasi	8	9	9	11	11
Jumlah Klub Olahraga	22	22	22	22	22
Jumlah Gedung/Lapangan Olahraga	2	1	1	1	1
Cakupan Pembinaan atlet muda	4	4	7	10	15
Jumlah prestasi olahraga	8	9	9	11	11
Jumlah atlet yang memenangi kejuaraan tingkat nasional dan internasional dalam satu tahun	8	9	9	11	11

Sumber : Dinas Pemuda & Olahraga Kab. Luwu, Tahun 2020.

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat dijelaskan berbagai capaian pembangunan di bidang kepemudaan dan olahraga periode tahun 2015-2019, antara lain sebagai berikut:

a. Sejak tahun 2017, jumlah organisasi pemuda di Kabupaten Luwu adalah 30 organisasi.
b. Kegiatan kepemudaan yang difasilitasi Pemda rata-rata 4 s/d 7 kegiatan setiap tahun.
c. Jumlah kegiatan olahraga yang dilaksanakan di Kabupaten Luwu berkisar antara 2 s/d 6 event.
d. Sejak tahun 2015, terdapat 15 organisasi olahraga yang ada di Kabupaten Luwu, dari jumlah tersebut 55,00% diantaranya merupakan organisasi yang aktif.
e. Pada tahun 2019, terdapat 3 cabang olahraga unggulan yang dibina.
f. Sejak tahun 2019, semua cabang olahraga sudah memiliki pelatih yang telah tersertifikasi.
g. Pada tahun 2019, terdapat 60 wasit yang bersertifikat.
h. Terdapat 11 atlet yang berprestasi pada tahun 2019.
i. Sejak tahun 2015 terdapat 22 klub olahraga.
j. Terdapat 1 gedung/lapangan olahraga yang ada di Kabupaten Luwu.
k. Pada tahun 2019, terdapat 15 atlet muda yang dibina.
l. Pada tahun 2019 terdapat 11 orestasi olahraga di Kabupaten Luwu
m. Terdapat 11 atlet yang memenangi kejuaraan tingkat nasional dan internasional pada tahun 2019.

14. Kebudayaan

Kedatuan Luwu adalah kerajaan Bugis tertua, pada tahun 1889, Gubernur Hindia Belanda di Makassar menyatakan bahwa masa kejayaan Luwu antara abad ke-10 sampai 14, tetapi tidak ada bukti lebih lanjut. Luwu bersama-sama dengan Wewang Nriwuk dan Tompotikka adalah tiga kerajaan Bugis pertama yang tertera dalam epik I La Galigo, sebuah karya orang suku bugis. Namun begitu, I La Galigo tidak dapat diterima sepenuhnya sebagai teks sejarah karena dipenuhi dengan mitos, maka keberadaan kerajaan-kerajaan ini dipertanyakan. Pusat kerajaan ini terletak di Malangke yang kini menjadi wilayah Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi

Selatan. Kerajaan Luwu juga disebutkan dalam kitab Kakawin Nagarakretagama, teks pada abad ke-14 sebagai daerah di bawah pengaruh kerajaan Majapahit bersama Lombok Mirah (Lombok), Bantayan (Bantaeng) dan Udamakatraya (Kepulauan Talaud) dan pulau-pulau disekitarnya pada periode Prabu Hayam Wuruk (1350-1389 M).tetapi bukti sejarah penaklukan Kerajaan Luwu oleh majapahit melainkan perkawinan kerajaan

Kebudayaan dapat didefinisikan sebagai sebuah hasil cipta, rasa dan karsa manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang kompleks yang mencakup pengetahuan, keyakinan, seni, susila, hukum adat serta setiap kecakapan, dan kebiasaan. Pembangunan kebudayaan di Kabupaten Luwu ditujukan untuk melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah serta mempertahankan jati diri dan nilai-nilai budaya daerah di tengah-tengah semakin derasnya arus informasi dan pengaruh negatif budaya global. Disisi lain upaya peningkatan jati diri masyarakat Luwu seperti solidaritas sosial, kekeluargaan, penghargaan terhadap nilai budaya dan bahasa masih perlu terus ditingkatkan. Budaya berperilaku positif seperti kerja keras, gotong royong, kebersamaan dan kemandirian dirasakan makin memudar.

Urusan kebudayaan diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan capaian indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.52.
Data dan Informasi Penyelenggaraan Bidang Urusan Kebudayaan
Tahun 2015-2019

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	4	6	6	7	8
2.	Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	3	3	4	5	7
3.	Total Benda, situs & kawasan yang dimiliki daerah	3	3	4	5	7
4.	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	4	6	6	7	8
5.	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	4	6	6	7	8

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu, Tahun 2020.

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat dijelaskan berbagai capaian pembangunan di bidang kebudayaan periode tahun 2015-2019, antara lain sebagai berikut:

a. Penyelenggaraan festival seni dan budaya pada tahun 2019 lebih banyak dari tahun-tahun sebelumnya yaitu mencapai 8 kali.
b. Jumlah benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan meningkat dari 3 menjadi 7 pada tahun 2019.

c. Karya budaya yang direvitalisasi dan dinventarisasi setiap tahunnya berkisar antara 4 s/d 8 karya budaya.
d. Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu meningkat dari 4 menjadi 8 cagar budaya.

15. Statistik

Statistik adalah suatu kumpulan data yang berbentuk angka dan disusun dalam bentuk diagram dan/atau tabel yang isinya menjelaskan mengenai masalah tertentu. Dalam merumuskan kebijakan dan program pembangunan, ketersediaan data dan informasi yang memadai dapat memberikan dasar dan arahan supaya kebijakan dan program yang dicanangkan dapat tepat sasaran.

Urusan statistik diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dengan capaian indikator kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.53.
Data dan Informasi Penyelenggaraan Bidang Urusan Statistik
Tahun 2015-2019

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.	Buku ”kabupaten dalam angka”	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3.	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4.	Buku ”kabupaten dalam angka”	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5.	Buku ”PDRB”	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Dinas Informasi Komunikasi, Statistki & Persandian Kabupaten Luwu 2020.

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa seluruh indikator kinerja yang ditetapkan telah terpenuhi secara berkelanjutan selama periode tahun 2015-2019.

16. Persandian

Persandian adalah kegiatan di bidang pengamanan data/informasi yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori, seni dan ilmu kripto beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis dan konsisten serta terkait pada etika profesi sandi, yaitu:

a. Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten.
b. Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah Kabupaten.

Sehubungan dengan hal tersebut, berikut ini dapat dilihat perkembangan pelaksanaan urusan persandian di Kabupaten Luwu periode tahun 2015-2019.

Tabel 2.54.
Data dan Informasi Penyelenggaraan Bidang Urusan Persandian
Tahun 2015 – 2019

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah perangkat daerah yang telah mengunakan sandi dalam komunikasi antar Perangkat Daerah	3	3	3	4	6
2	Jumlah total perangkat daerah	35	35	35	35	35
3	Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunkasi Perangkat Daerah	8,57	8,57	8,57	11,43	17,14

Sumber: Dinas Informasi Komunikasi, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu, Tahun 2020.

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat dijelaskan berbagai capaian pembangunan di bidang persandian periode tahun 2015-2019 antara lain sebagai berikut:

1) Perangkat daerah yang telah mengunakan sandi dalam komunikasi antar Perangkat Daerah pada tahun 2019 sudah mencapai 6 OPD.
2) Perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu yang telah menggunakan sandi dalam komunkasi Perangkat Daerah adalah sebesar 17,14%.

17. Perpustakaan

Perpustakaan merupakan upaya untuk memelihara dan meningkatkan efisiensi dan efektifitas proses belajar-mengajar. Perpustakaan yang terorganisasi secara baik dan sistematis, secara langsung atau pun tidak langsung memberikan kontribusi terhadap peningkatan literasi masyarakat. Hal ini, terkait dengan kemajuan bidang pendidikan dan dengan adanya perbaikan metode belajar-mengajar yang dirasakan tidak bisa dipisahkan dari masalah penyediaan fasilitas dan sarana pendidikan.

Berikut ini ditampilkan data terkait data dan informasi pelaksanaan urusan bidang perpustakaan di Kabupaten Luwu periode tahun 2015-2019.

Tabel 2.55.
Data dan Informasi Penyelenggaraan Bidang Urusan Perpustakaan
Tahun 2015-2019

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1.	**Pengunjung Perpustakaan**					
	Jumlah pengunjung perpustakaan milik pemerintah daerah (pemda)	27.395	30.157	31.685	25.789	26.694
	Jumlah pengunjung perpustakaan milik non pemda	1.447.533	1.769.251	1.859.205	1.879.815	1.998.931

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
	Total	**1.474.928**	**1.799.408**	**1.890.890**	**1.905.604**	**2.025.625**
	Jumlah Rata-Rata Pengunjung per Bulan (orang)	**2.283**	**2.513**	**2.640**	**2.149**	**168.802**
2.	Jumlah Koleksi Buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah (exp)	45.830	47.674	48.912	49.746	52.067
3.	**Rasio perpustakaan per satuan penduduk**					
	Jumlah Perpustakaan	513	520	525	525	529
	jumlah Penduduk	350.218	353.277	356.305	359.209	362.027
	Rasio	**0,00146**	**0,00147**	**0,00147**	**0,00146**	**0,00146**
4.	**Pustakawan, tenaga teknis, dan penilai memiliki sertifikat (orang)**					
	Jumlah putakawan, tenaga teknis dan penilai yang bersertifikat	3	3	3	3	7
	jumlah seluruh pustakawan tenaga teknis dan penilai	3	3	3	3	12
	Jumlah	**6**	**6**	**6**	**6**	**19**
5.	Jumlah Perpustakaan di Desa/Kelurahan yang dikelolah	111	-	2	2	2
6.	Jumlah Perpustakaan Desa/ Kelurahan yang Berprestasi	1	1	1	0	0
7.	Jumlah Armada Perpustakaan Keliling yang dikelola	2	2	2	2	2

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kab. Luwu, Tahun 2020.

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat dijelaskan berbagai capaian pembangunan di bidang perpustakaan pada periode tahun 2015-2019 antara lain sebagai berikut:

a. Pengunjung perpustakaan terus meningkat setiap tahun dan dalam tahun terakhir mencapai 2.025.625 total pengunjung dengan rata-rata perbulan 168.802 orang.
b. Jumlah koleksi buku yang tersedia juga meningkat tiap tahunnya hingga mencapai 52.067 di tahun 2019.
c. Rasio perpustakaan per satuan penduduk stagnan dalam 3 tahun terakhir dengan rasio 0,00147.
d. Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai memiliki sertifikat (orang) stagnan dengan jumlah 6 pada tahun 2015-2018 dan meningkat pada tahun 2019 dengan jumlah 19.
e. Jumlah perpustakaan di Desa/Kelurahan yang dikelolah stagnan dengan jumlah 2 dalam 3 tahun terakhir.
f. Jumlah Perpustakaan Desa/Kelurahan yang berprestasi pada tahaun 2015-2017 masing-masing hanya ada 1 dan tidak ada dalam 2 tahun terakhir.
g. Jumlah Armada Perpustakaan Keliling yang dikelola stagnan dengan jumlah 2 dalam 5 tahun terakhir.

18. Kearsipan

Sistem pengarsipan atau sistem kearsipan adalah cara pengaturan atau penyimpanan arsip secara logis dan sistematis dengan memakai abjad, numerik/ nomor, huruf ataupun kombinasi huruf dan nomor sebagai identitas arsip yang terkait. Sistem ini dibuat untuk mempermudah dalam penyimpanan dan penemuan kembali arsip. Hal ini merupakan bagian dari pekerjaan kantor yang sangat penting. Informasi yang tertulis yang tepat harus tersedia apabila diperlukan, agar kantor dapat memberikan pelayanan yang efektif. Kearsipan juga sangat dibutuhkan dalam pelakasanaan administrasi, karena arsip merupakan pusat ingatan bagi setiap kegiatan dalam suatu kantor.

Urusan kearsipan diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah dengan capaian indikator kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.56.
Data dan Informasi Penyelenggaraan Bidang Urusan Kearsipan
Tahun 2015-2019

Indikator	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	25,45	45,12	52,45	75,15	85,12
Jumlah Arsip daerah yang dikelola	7 OPD	7 OPD	7 OPD	7 OPD	7 OPD
Jumlah SDM Pengelola Kearsipan	3	3	7	4	4
Jumlah Sarana Kearsipan Daerah	7	7	13	13	13

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip Kab.Luwu, Tahun 2020.

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat dijelaskan berbagai capaian pembangunan di bidang kearsipan pada periode tahun 2015-2019 antara lain sebagai berikut:

a. Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan hingga pada tahun 2019 mencapai 85,12%.
b. Jumlah Arsip daerah yang dikelola dalam 5 tahun terakhir berjumlah 7 OPD.
c. Jumlah SDM pengelola kearsipan stagnan dan sempat mengalami peningkatan pada tahun 2017 dan kembali menurun dalam 2 tahun terakhir.
d. Jumlah Sarana Kearsipan Daerah stagnan pada tahun 2015 dan 2016 dengan jumlah 7 sarana dan meningkat serta stagnan dalam 3 tahun terakhir dengan jumlah 13 sarana.

2.3.3. Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Pilihan

Analisis kinerja atas layanan urusan pemerintahan pilihan dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelengaraan urusan pemerintahan pilihan.

1. Kelautan dan Perikanan

Sumber daya perikanan dan kelautan merupakan aset penting yang dimiliki oleh Indonesia. demikian juga dengan Kabupaten Luwu. Sumberdaya perikanan dengan kekayaan hayatinya akan memberikan suatu nilai kesejahteraan bagi masyarakat pesisir, tentunya dengan sistem pengelolaan dan pemanfaatan yang benar.Upaya pengembangan kawasan pantai terutama untuk wisata bahari, wisata pantai, perikanan tangkap, perikanan budidaya, industri pengolahan hasil kelautan. Pengembangan kawasan perikanan baik tangkap, budidaya maupun bahari dilaksanakan dengan pendekatan minapolitan, komoditas utama yang dikembangkan adalah rumput laut, ikan bandeng dan kekerangan.

Kabupaten Luwu memiliki potensi perikanan tangkap maupun budidaya yang potensial dan telah dikelola dengan baik. Hal ini terlihat dari tingginya kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB sektor pertanian dan perikanan.

Dalam rangka perumusan kebijakan, data dan informasi penyelenggaraan bidang urusan kelautan dan perikanan periode tahun 2015-2019 di Kabupaten Luwu disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.57.
Data dan Informasi Penyelenggaraan Bidang Urusan Kelautan dan Perikanan
Tahun 2015-2019

No.	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1.	**Produksi Perikanan**					
	Produksi perikanan (ton)	667.410,50	537.487,00	648.650,33	628.748,61	644.357,48
	Target Daerah (Ton)	597.741,00	624.845,00	655.427,00	687.531,00	653.154,45
	Persentase Produksi Perikanan	**111,66**	**86,02**	**98,97**	**91,45**	**98,65**
2.	**Konsumsi Ikan**					
	Jumlah Konsumsi Ikan (Kg)	48,05	50,32	52,00	53,04	53,57
	Target Daerah (Kg)	48,81	49,29	49,79	49,79	49,87
	Konsumsi ikan	**98,44**	**102,09**	**104,44**	**106,53**	**107,42**
3.	**Cakupan bina kelompok nelayan**					
	Jumlah kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan pemda tahun n (kelompok)	41	32	15	8	9
	Jumlah kelompok nelayan	187	204	224	232	241

No.	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
	Cakupan bina kelompok nelayan	**58,82**	**69,61**	**70,09**	**71,12**	**72,20**
	Persentase Produksi Perikanan Kelompok Nelayan	11,98	11,00	10,83	10,68	10,54
	Bantuan Alat Tangkap	50	33	15	25	38
4.	**Produksi perikanan kelompok nelayan**					
	Jumlah Produksi Ikan (Ton) kontribusi hasil kelompok nelayan	1.496,00	1.632,00	1.792,00	1.856,00	11.329,44
	Jumlah produksi ikan di daerah	12.486,20	14.842,80	16.552,70	17.379,30	17.429,90
	Produksi perikanan kelompok nelayan	**11,98**	**11,00**	**10,83**	**10,68**	**65,00**
5.	**Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman**					
	Jumlah tangkapan ikan	12.486,20	14.842,80	16.552,70	17.379,30	17.429,90
	80% dari tangkapan maksimum lestari	Na	Na	Na	Na	Na
	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	**Na**	**Na**	**Na**	**Na**	**Na**

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Luwu, Tahun 2020.

Berikut diuraikan perkembangan penyelenggaraan bidang urusan kelautan dan perikanan di Kabupaten Luwu Tahun 2015-2019.

a. Produksi nelayan sangat fluktuatif dalam 5 tahun terakhir dan di tahun terakhir tidak mencapai target yang ditetapkan, yaitu 644.357,48 ton, masih lebih rendah dibanding tahun 2015 yang mencapai 667.410,50 ton.
b. Konsumsi ikan meningkat secara terus menerus dalam 5 tahun terakhir dan mencapai 53,57 Kg di tahun 2019 atau 107,42% dari target yang ditetapkan.
c. Cakupan bina kelompok nelayan juga meningkat tiap tahunnya dimana tahun terakhir mencapai 72,20%.
d. Persentase produksi perikanan kelompok nelayan sempat mengalami penurunan pada tahun 2016-2018 kemudian kembali mengalami peningkatan di tahun selanjutnya hingga pada tahun 2019 mencapai 65,00% dari total produksi perikanan.
e. Jumlah tangkapan ikan pada tahun 2015 sebanyak 12.486,20 ton, meningkat menjadi 17.429,90 ton pada tahun 2019.

2. Pariwisata

Kabupaten Luwu merupakan salah satu kabupaten yang berpotensi untuk menjadi daerah utama tujuan wisata karena memiliki beragam obyek dan daya tarik wisata terutama wisata pantai, alam dan budaya serta ditunjang oleh sarana dan prasarana akomodasi yang memadai. Kegiatan pariwisata di Luwu cukup potensial untuk menunjang pendapatan dan pembangunan daerah.

Terdapat beberapa objek wisata yang tahun ini di intervensi Pemkab Luwu untuk dibuatkan fasilitas dasar, yaitu berupa tempat peristirahatan (gazebo) untuk para pengunjung dan menyiapkan pula tempat wudhu, toilet dan ruang ganti baju, maupun gapura atau pintu gerbang. Objek wisata yang mendapatkan perhatian dari Pemkab Luwu diantaranya, pengembangan destinasi air terjun Desa Riwang Selatan. Berupa pembukaan jalan pariwisata dan pembuatan MCK dengan memanfaatkan alokasi DAU. Sementara untuk pembuatan gazebo dialokasikan untuk objek wisata air terjun sarassa sebanyak 2 unit, objek wisata pantai hutan mangrove Desa Temboe, objek wisata air terjun Siteba Kecamatan Walenrang utara, objek wisata sungai Pakkalolo Kecamatan Bua sebanyak 2 unit.

Dinas Pariwisata akan membangun area parkir objek wisata Buntu Matabing Kecamatan Larompong, pembuatan gapura air terjun Sarassa Kecamatan Latimojong, pembangunan gapura objek wisata pantai hutan mangrove, pembangunan gapura objek wisata bahari Buntu Matabing, gapura objek wisata Air Terjun Sarassa Desa Ulusalu Kecamatan Latimojong, pembuatan MCK objek wisata pantai hutan mangrove Desa Temboe, MCK di objek wisata Siteba Desa Siteba Kecamatan Walenrang Utara, MCK Objek Wisata Permandian Alam Pakalolo Kecamatan Bua.

Potensi pariwisata di kabupaten Luwu sangat beranekaragam jenisnya sehingga daerah ini cukup memberi kontribusi terhadap peningkatan pendapatan daerah. Hal ini terlihat dari jumlah kunjungan wisatawan domestik yang cukup meningkat dari Tahun 2015 yaitu sebanyak 11.117 orang dan meningkat menjadi 12.573 orang pada Tahun 2018.

Tabel 2.58.
Kunjungan Wisatawan Tahun 2015-2019

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
Kunjungan Wisatawan Domestik	11.117	10.423	12.436	12.573	2.960
Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	333	180	224	311	276

Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Luwu, Tahun 2020.

Hal ini tentu tidak terlepas dari program pemerintah kabupaten Luwu yang setiap tahunnya melaksanakan event-event pariwisata.

Dalam era globalisasi saat ini, sektor pariwisata telah menjadi salah satu industri terbesar dan terkuat di dunia. Bahkan pariwisata merupakan penyumbang terbesar dalam pemasokan pendapatan terutama dalam hal perekonomian masyarakat dan negara. Sekarang kegiatan pariwisata sudah

menjadi bagian dari kehidupan masyarakat mulai dari masyarakat kota sampai pada masyarakat desa. Kegiatan pariwisata yang dilakukan masyarakat dapat mendorong kemajuan perekonomian masyarakat.

Tabel 2.59.
PAD Sektor Pariwisata Tahun 2015 – 2019

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	PAD sektor pariwisata (Rp)	50.160.000	50.350.000	50.160.000	149.975.000	10.585.000
2	Total PAD (Juta Rp)	78.558,30	95.564,29	109.172,77	106.865,74	119.000.000
3	PAD Sektor Pariwisata (%)	0,06	0,05	0,05	0,14	0.07

Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Luwu, Tahun 2020.

PAD dari sektor pariwisata di Kabupaten Luwu perioe tahun 2015-2019 meningkat cukup signifikan. Namun demikian, perlu terus dikembangkan mengingat Kabupaten Luwu memiliki potensi pariwisata yang dapat diandalkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Tabel 2.60.
Jumlah Objek Wisata di Kabupaten Luwu,Tahun 2015 – 2019

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Objek Wisata Pantai yang terdata dan terdaftar	7	8	9	10	11
Jumlah Objek Wisata Alam yang terdata dan terdaftar	27	27	27	27	27
Jumlah Objek Wisata Sejarah yang terdata dan terdaftar	12	12	12	12	12
Jumlah Objek Wisata Budaya yang terdata dan terdaftar	2	2	2	2	2
Jumlah Objek Wisata Seni yang terdata dan terdaftar	3	3	3	3	3
Jumlah Objek Agrowisata yang terdata dan terdaftar	2	2	2	2	2
Jumlah Objek Wisata Buatan yang Terdata dan Terdaftar	2	2	2	2	2
Jumlah Objek Wisata dikelolah dengan sistem bagi hasil pemerintah setempat	3	3	3	3	3
Jumlah Objek Wisata yang dikelola oleh Pemda	1	1	1	1	1
Jumlah Objek wisata yang dikelolah oleh Swasta	2	2	2	3	3

Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Luwu, Tahun 2020.

Kabupaten Luwu memiliki daya tarik dan sumber daya wisata yang dapat dikembangkan menjadi wisata unggulan daerah, yaitu:

a. Wisata Tirta
   Wisata tirta adalah obyek wisata dengan obyek utama dapat berupa laut, pantai dan sungai. Dengan letak geografis yang berbatasan langsung dengan Teluk Bone, Kabupaten Luwu memiliki banyak potensi wisata tirta terutama pantai berpasir dan hutan bakau.

b. Wisata Alam

Objek wisata alam adalah objek wisata yang berbasi pada alam, baik panorama alam, kondisi alam, keunikan alam dan bentukan alam.

c. Wisata Sejarah

Obyek wisata sejarah di Kabupaten Luwu berupa peninggalan sejarah zaman kerajaan sampai peninggalan zaman Belanda. Obyek wisata sejarah yang beragam ini menjadi daya tarik tersendiri untuk mendatangkan wisatawan.

d. Wisata Seni

Obyek wisata seni adalah segala bentuk kesenian yang dapat dinikmati dan dapat dijadikan obyek dan daya tarik wisata berupa ; seni suara, seni tari, seni kreasi, seni gerak dan seni drama, yaitu tari Paja'ga, tari Langkankuajang, dan seni kreasi.

e. Agrowisata

Agrowisata adalah wisata yang berkaitan dengan kegiatan pertanian berupa perkebunan, peternakan, perikanan dan persawahan.

1) Kawasan Agrowisata Latimojong
2) Hutan Penelitan dan Wisata Kayu Lara Temboe

Kawasan Pengembangan Pariwisata (KPP) Kabupaten Luwu merupakan kawasan wisata yang diunggulkan di tingkat Kabupaten Luwu yang berperan dalam menjawab isu-isu pokok pembangunan kepariwisataan Kabupaten Luwu. KPP berperan strategis karena keunikan lokasi maupun tingginya intensitas kunjungan wisatawan. Pemerintah Kabupaten Luwu menjadi pemain utama dalam hal pembinaan dan pengembangan KPP serta ikut bertanggung jawab dalam merencanakan dan mendukung pengembangannya. Berdasarkan pertimbangan aksesibilitas jalur jalan utama dan sumber daya tarik wisata unggulan yang membentuk tema produk wisata kawasan, maka KPP Kabupaten Luwu terdiri dari 4 (empat) kawasan wisata dengan tema produk dan uraian sebagai berikut:

a. Kawasan Pengembangan Pariwisata Selatan

Karakteristik Kawasan Pengembangan Pariwisata selatan menempatkan wilayah tersebut sebagai pusat unggulan wisata Tirta, wisata alam (air terjun), budaya dan kehidupan masyarakat pantai dan minat khusus berbasis perikanan. Wilayah kecamatan dalam kawasan ini meliputi:

1) Kecamatan Belopa
2) Kecamatan Belopa Utara
3) Kecamatan Larompong
4) Kecamatan Larompong Selatan
5) Kecamatan Suli
6) Kecamatan Suli Barat
7) Kecamatan Bajo
8) Kecamatan Kamanre

b. Kawasan Pengembangan Pariwisata Tengah

Karakteristik Kawasan Pengembangan Pariwisata Tengah menempatkan wilayah tersebut sebagai pusat unggulan wisata Tirta, wisata alam (air terjun), budaya dan kehidupan masyarakat pantai dan minat khusus berbasis perikanan. Wilayah kecamatan dalam kawasan ini meliputi :

1) Kecamatan Ponrang
2) Kecamatan Ponrang Selatan
3) Kecamatan Bua
4) Kecamatan Bupon.

c. Kawasan Pengembangan Pariwisata Barat

Karakteristik Kawasan Pengembangan Pariwisata Barat menempatkan wilayah tersebut sebagai pusat unggulan wisata alam (air terjun), Agro wisata, budaya dan kehidupan masyarakat dan minat khusus berbasis perikanan. Wilayah kecamatan dalam kawasan ini meliputi :

1) Kecamatan Latimojong
2) Kecamatan Bajo Barat
3) Kecamatan Bastem
4) Kecamatan Bastem Utara

d. Kawasan Pengembangan Pariwisata Utara

Karakteristik Kawasan Pengembangan Pariwisata Utara menempatkan wilayah tersebut sebagai pusat unggulan wisata alam (air terjun), Agro wisata, budaya dan kehidupan masyarakat pantai dan minat khusus berbasis perikanan. wilayah kecamatan dalam kawasan ini meliputi :

1) Kecamatan Walenrang
2) Kecamatan Walenrang Barat
3) Kecamatan Walenrang Timur
4) Kecamatan Walenrang Utara
5) Kecamatan Lamasi
6) Kecamatan Lamasi Timur

3. Pertanian

Sektor pertanian yang berkembang sangat bervariatif mulai dari tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan. Tanaman pangan dan palawija merupakan salah satu bidang yang sangat strategis dan berkembang dengan baik. Sektor pertanian yang terdiri dari sub sektor tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, perikanan, dan peternakan, memiliki peranan yang cukup penting dalam perekonomian Kabupaten Luwu, diantaranya adalah penyumbang PDRB terbesar di Kabupaten Luwu, penyerapan tenaga kerja yang besar, serta pembangunan ekonomi daerah.

Penentuan komoditas basis dilakukan pada komoditas yang ada di masing-masing sub sektor di Kabupaten Luwu. Dari hasil analisa LQ dan shift share, didapat 15 komoditas unggulan yang tersebar di masing-masing kecamatan di Kabupaten Luwu yang dapat dilihat. Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Tahun 2011-2031, diantara 15 komoditas terpilih dari hasil analisa LQ dan SSA yang sudah dilakukan sebelumnya, yang termasuk komoditas unggulan pertanian adalah komoditas durian, pisang, sawo,

kacang panjang, jagung, ubi jalar, kambing/ domba, dan sapi. Selanjutnya dipilih lagi yang paling unggul dan dapat dikembangkan untuk selanjutnya.

Tabel 2.61.
Produksi Padi Kabupaten Luwu Tahun 2015-2019

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	Produksi tanaman padi/ bahan pangan utama lokal lainnya (ton)	308.380	312.382	294.586	288.273	389.056,30
2	Luas areal Panen padi/ bahan pangan utama lokal lainya (ha)	3.023	69.635	66.234	58.066	33.333,26
3	**Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per Ha**	**4,89**	**4,49**	**4,45**	**4,97**	**11,67**

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Luwu, Tahun 2020.

Produktivitas padi atau bahan pangan utama lainnya pada tahun 2015-2019 berfluktuatif dan mengalami penurunan dari tahun 2017 hingga tahun 2018. Kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2019 hingga mencapai 389.056,30 ton.

Cakupan bina kelompok tani di Kabupaten Luwu pada periode tahun 2015-2019 semakin menurun sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.62.
Cakupan Bina Kelompok Petani Tahun 2015-2019

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah kelompok petani yang mendapatkan bantuan pemda Tahun n	273	147	118	155	144
2.	Jumlah kelompok tani	2.045	1.887	2.109	1.948	2.502
3.	**Cakupan Bina Kelompok Petani**	**13,35**	**7,79**	**6,25**	**7,35**	**5,75**

Sumber: Dinas Pertanian Kab. Luwu, Tahun 2020.

4. Perdagangan

Perdagangan adalah sektor jasa yang menunjang kegiatan ekonomi antaranggota masyarakat. Sektor perdagangan merupakan salah satu sektor yang penting dalam perekonomian daerah. Penyelenggaraan urusan perdagangan oleh Dinas Perdagangan mencatat bahwa ekspor bersih perdagangan Kabupaten Luwu tahun 2019 adalah Rp.38.611.486,07.

5. Perindustrian

Sektor Industri merupakan salah satu sektor yang berperan penting dalam pembangunan nasional. Kontribusi sektor Industri terhadap pembangunan nasional dari tahun ke tahun menunjukkan kontribusi yang signifikan. Upaya yang dilakukan yaitu dengan mendorong pengembangan wilayah wilayah tertentu sebagai pusat pertumbuhan kegiatan industri. Pengembangan wilayah wilayah tersebut diharapkan selain dapat sebagai kegiatan ekonomi utama (*prime mover*) juga dapat memberikan efek ganda (multiplier effect) terhadap tumbuhnya sektor sektor yang lain.

Tabel 2.63.
Pertumbuhan Industri di Kabupaten LuwuTahun 2015 -2019

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
Pertumbuhan Industri	Na	Na	Na	6,09	Na
Cakupan bina kelompok pengrajin	Na	Na	Na	35,00	Na
Jumlah Kemasan Lokal yang tercipta	Na	Na	Na	20	Na

Sumber: Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu, Tahun 2020.

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa capaian atas indikator yang dijadikan sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan di bidang perindustrian hanya tersedia untuk tahun 2018, yaitu pertumbuhan industri sebesar 6,09%, cakupan bina kelompok pengrajin mencapai 35,00 persen, dan jumlah kemasan lokal yang tercipta sejumlah 20 kemasan.

6. Transmigrasi

Persentase Transmigrasi Swakarsa di Kabupaten Luwu cenderung tidak berubah selama periode tahun 2015-2019 sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.64.
Data dan Informasi Penyelenggaraan Bidang Urusan Urusan Transmigrasi Tahun 2015-2019

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
Transmigran Swakarsa	50 KK	50 KK	50 KK	50 KK	50 KK
Luas Areal Lahan Transmigrasi yang dikelola	101 Ha	102 Ha	103 Ha	104 Ha	104 Ha
Luas Areal Lahan Transmigrasi yang disiapkan	251 Ha	252 Ha	253 Ha	254 Ha	254 Ha

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Luwu, Tahun 2020.

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat dijelaskan berbagai capaian pembangunan di bidang transmigrasi pada periode tahun 2015-2019 antara lain sebagai berikut:

a. Setiap tahun terdapat 50 KK transmigran swakarsa.
b. Luas lahan transmigrasi yang dikelola meningkat dari 101 Ha menjadi 104 Ha.
c. Areal lahan transmigrasi yang disiapkan saat ini adalah 254 Ha.

2.3.4. Fokus Penunjang Urusan

Kinerja layanan penunjang urusan diukur dari Indikator-Indikator kinerja penyelenggaraan penunjang urusan pemerintahan daerah. Penunjang Urusan terdiri dari :

1. Perencanaan Pembangunan

Data dan informasi pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan periode tahun 2017-2019 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.65.
Data dan Informasi Penyelenggaraan Urusan
Bidang Perencanaaan Pembangunan, Tahun 2017-2019

No	URAIAN	SATUAN	2017	2018	2019
1	Nilai SAKIP Kabupaten	Angka dan predikat			70,03 (B)
2	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/ Tidak Ada	Ada	Ada	Ada
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada/ Tidak Ada	Ada	Ada	Ada
4	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada/ Tidak Ada	Ada	Ada	Ada
5	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/ Tidak Ada	Ada	Ada	Ada
6	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD	%	53,69	100,00	100,00
7	Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD	%	53,69	100,00	100,00
8	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	%	53,69	100,00	100,00

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah Kabupaten Luwu, Tahun 2020

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa capaian seluruh indikator yang ditetapkan telah dipenuhi secara maksimal.

2. Keuangan

Pengelolaan keuangan dan aset daerah merupakan salah satu fungsi penunjang urusan pemerintahan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian kinerja di bidang keuangan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.66.
Data dan Informasi Penyelenggaraan Penunjang Urusan Bidang Keuangan
Tahun 2015 - 2019

No	Keuangan	Capaian Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Persentase SILPA terhadap APBD	11,67%	3,95%	2,55%	1,31%	2,18%
2	Persentase program/ kegiatan yang tidak terlaksana	0,35%	0,54%	0,20%	0,20%	0.20%

No	Keuangan	Capaian Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
3	Persentase belanja pendidikan	36,92%	28,58%	25,76%	26,16%	27,13%
4	Persentase belanja kesehatan	11,20%	13,46%	13,41%	14,54%	14,71%
5	Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung (%)	47,36 / 52,64	50,83 / 49,17	43,03 / 56,97	41,73 / 58,27	45,53 / 54,47
6	Persentase Bagi hasil Kabupaten/Kota dan Desa	0,33%	0,34%	0,20%	0,22%	0,20%
7	Penetapan APBD Pokok	Desember 2014	Desember 2015	Desember 2016	Desember 2017	Desember 2018
8	Penetapan APBD Perubahan	September 2015	September 2016	Oktober 2017	Oktober 2018	September 2019`

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Luwu, Tahun 2020.

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat dijelaskan berbagai capaian pembangunan di bidang keuangan pada periode tahun 2015-2019 antara lain sebagai berikut:

a. Persentase SILPA terhadap APBD sebesar 1,31% pada tahun 2018 merupakan nilai terendah dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, sedangkan tahun 2019 adalah sebesar 2,18%.
b. Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana di 3 tahun terakhir stagnan di 0,20%.
c. Alokasi belanja pendidikan dari tahun 2015-2017 mengalami penurunan dari 36,92% menjadi 25,76%, tetapi meningkat kembali pada tahun 2019 menjadi sebesar 27,13%.
d. Alokasi belanja kesehatan dari tahun ketahun semakin meningkat dari tahun 2015 sampai tahun 2019 yaitu dari 11,20% menjadi 14,71%.
e. Pada tahun 2016, belanja langsung lebih tinggi dbanding belanja tidak langsung yaitu 50,83% berbanding 49,17%.
f. Alokasi Bagi Hasil Kabupaten/Kota dan Desa menurun dari 0,33% pada tahun 2015 menjadi 0,20% pada tahun 2019.
g. Penetapan APBD Pokok dan APBD Perubahan selalu dilakukan tepat waktu.

3. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM dengan capaian indikator kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.67.
Data dan Informasi Penyelenggaraan Penunjang Urusan
Bidang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan
Tahun 2015-2019

No.	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1.	**Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan (JP)**	**3,23**	**2,41**	**2,73**	**1,97**	**1,70**
2.	**Pendidikan dan Pelatihan Struktural**					
	Jumlah pejabat ASN yang telah mengikuti diklat struktural	35	101	91	92	95
	Jumlah Total Jabatan	538	591	728	696	662
	Persentase	**6,51**	**17,09**	**12,51**	**13,21**	**14,35**
3.	**Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintahan**	**34**	**35**	**40**	**29**	**38**
4.	**Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah**	**Na**	**Na**	**Na**	**Na**	**215**
5.	**Pendidikan dan Pelatihan Formal**					
	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan formal (orang)	92	74	83	45	36
	Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan formal (orang)	1.011	91	92	209	145
	Jumlah ASN (orang)	6.896	6.707	5.981	5.778	6.629
	Persentase	**1,33**	**1,10**	**1,38**	**0,78**	**0,54**

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Luwu, Tahun 2020.

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat dijelaskan berbagai capaian pembangunan di bidang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan pada periode tahun 2015-2019 antara lain sebagai berikut:

a. Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan terus menurun sejak tahun 2015 hingga tahun 2019, dimana pada tahun 2015 mencapai 3,23 JP menjadi 1,70 JP pada tahun 2019.

b. Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti diklat struktural di tahun 2015 ke tahun 2016 mengalami peningkatan yang cukup drastis yaitu dari 6,51% menjadi 17,09%. Kemudian di tahun 2017 terjadi penurunan menjadi 12,51%, tetapi kemudian meningkat kembali di tahun-tahun berikutnya hingga mencapai 14,35% pada tahun 2019. Sedangkan dari total jabatan yang ada pada tahun 2019 yaitu 662 jabatan, terdapat 135 jabatan administrasi dan 16 jabatan pengawas yang belum diisi secara defenitif. Apabila dilihat dari jumlah ASN yang mencapai 6.629 orang, maka terlihat bahwa tersedia sumber daya manusia yang cukup untuk mengisi jabatan tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa belum terselenggaranya pembinaan ASN dengan sistem merit yaitu kebijakan dan manajemen SDM aparatur negara yang berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar.

c. Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintahan dari tahun 2015-2017 mengalami peningkatan hingga mencapai 40 jabatan,

kemudian turun di tahun 2018 menjadi 29 jabatan, selanjunya kembali naik ditahun 2019 menjadi 38 jabatan.

d. Terdapat sejumlah 215 pejabat fungsional tertentu pada instansi pemerintah di Kabupaten Luwu pada tahun 2019.

e. Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan formal pada tahun 2019 adalah 36 orang, merupakan terendah selama lima tahun terakhir. Sedangkan yang mengikuti pelatihan formal tercatat sejumlah 145 orang pada tahun 2019.

4. Pengawasan

Urusan pengawasan diselenggarakan oleh Inspektorat Daerah dengan capaian indikator kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.68.
Data dan Informasi Penyelenggaraan Penunjang Urusan Bidang Pengawasan
Tahun 2015 - 2019

No	Pengawasan	Capaian Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Persentase tindak lanjut temuan BPK	86.20	70.17	92.71	69.50	94,46
2	Persentase tindak lanjut temuan BPKP	75.00	85.00	90.00	100,00	100,00
3	Persentase tindak lanjut temuan Inspektorat Provinsi	75.00	85.00	90.00	100,00	100,00
4	Persentase pelanggaran pegawai yang diproses	75.00	85.00	90.00	100,00	100,00
5	Jumlah temuan BPK	20	15	11	19	12

Sumber: Inspektorat Kabupaten Luwu, Tahun 2020.

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat dijelaskan berbagai capaian pembangunan di bidang pengawasan pada periode tahun 2015-2019 antara lain sebagai berikut:

a. Tindak lanjut terhadap temuan BPK dari tahun ke tahun berfluktuasi, namun demikian capaian tahun 2019 sebesar 94,46% merupakan angka tertinggi yang pernah dicapai.

b. Tindak lanjut temuan BPKP terjadi peningkatan sejak tahun 2015 dengan nilai 75,00% dan mecapai 100,00% ditahun 2018 sampai 2019.

c. Tindak lanjut temuan inspektorat provinsi terjadi peningkatan mulai dari tahun 2015 dengan nilai 75,00% dan mecapai 100,00% ditahun 2018 sampai di 2019.

d. Pelanggaran pegawai yang diproses mengalami peningkatan dari tahun 2015 dengan nilai 75,00% dan mencapai 100.00% ditahun 2018 sampai di 2019.

e. Jumlah temuan BPK pada tahun 2019 lebih kecil dibanding tahun sebelumnya yaitu 12 kasus berbanding 19 kasus.

5. Sekretariat DPRD

Capaian indikator yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.69.
Data dan Informasi Penyelenggaraan Penunjang Urusan Bidang Sekretariat DPRD Tahun 2015 - 2019

No	Indikator	Capaian Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	103	152	119	70	72
2	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan	117	170	137	197	185
3	Terintegrasi program- program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	98.5%	95.6%	97%	94%	95%

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu, Tahun 2020.

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat dijelaskan berbagai capaian kinerja Sekretariat DPRD pada periode tahun 2015-2019 antara lain sebagai berikut:

a. Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD telah tersedia setiap tahun. Adapun realisasi dari rencana kerja tersebut adalah 72 kegiatan pada tahun 2019.
b. Program-program Kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan Perda, dan fungsi anggaran dalam dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun dokumen rencana tahunan DPRD telah tersusun dan terintegrasi setiap tahun meliputi 185 program pada tahun 2019.
c. Program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam dokumen perencanaan dan dokumen anggaran Setwan DPRD telah dilaksanakan dengan capaian 95%.

6. Sekretariat Daerah

Capaian indikator yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.70.
Data dan Informasi Penyelenggaraan Penunjang Urusan Bidang Sekretariat Daerah Tahun 2015 - 2019

No	Sekretariat Daerah	Capaian Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Na	Na	Na	Na	Na
2	Persentase Penyelesaian Tapal batas antar kecamatan	50%	50%	60%	60%	60%
3	Jumlah analisa berita dan kebutuhan publik yang disampaikan kepada kepala daerah	225	238	248	250	252
4	Jumlah UMKM yang memperoleh akses ke lembaga keuangan	Na	Na	Na	Na	1.067
5	Persentase Potensi Sumber Daya Alam yang telah dimanfaatkan	Na	Na	Na	Na	90%
6	Persentase Ketersediaan Sistem Informasi Tender	100%	100%	100%	100%	100%
7	Persentase Aset Sekertariat yang sudah direkonsiliasi	Na	Na	Na	Na	90%
8	Persentase paket tender yang diselesaikan tepat waktu	85%	85,20 %	85,25 %	87,21 %	87,21 %
9	Persentase besaran efisiensi nilai kontrak terhadap nilai pagu	4%	4%	4%	4%	4%
10	Nilai LPPD	Na	Na	Na	2.771	2.975
11	Persentase produk hukum daerah yang difasilitasi dalam kurun waktu tahun yang sama	100%	100%	100%	100%	100%
12	Persentase pejabat yang menyampaikan LHKPN	25%	25%	25%	25%	80%
13	Persentase ketersediaan analisis jabatan	100%	100%	100%	100%	100%
13	Persentase RKA unit kerja lingkup sekertariat daerah yang diverifikasi	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu, Tahun 2020.

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat dijelaskan berbagai capaian kinerja Sekretariat Daerah pada periode tahun 2015-2019 antara lain sebagai berikut:

a. Persentase penyelesaian tapal batas antar kecamatan dari tahun 2015 sampai tahun 2016 hanya mencapai 50% penyelesaiannya dan pada tahun 2017 sampai tahun 2019 naik 10% atau menjadi 60%.
b. Jumlah analisis yang dilakukan terhadap berita dan kebutuhan publik yang disampaikan kepada kepala daerah dari tahun ketahun semakin meningkat yaitu dari 225 kali pada tahun 2015 menjadi 252 kali pada tahun 2019.
c. Jumlah UMKM yang difasilitasi untuk memperolah akses ke lembaga keuangan pada tahun 2019 adalah 1.067 unit usaha.
d. Berdasarkan kajian yang dilakukan, telah diperoleh data pemanfaatan potensi sumber daya alam Kabupaten Luwu sebesar 90%.

e. Ketersediaan sistem informasi tender dari tahun 2015 sampai tahun 2019 telah mencapai 100%.
f. Aset Sekertariat Daerah yang sudah direkonsiliasi pada tahun 2019 telah mencapai 90%.
g. Paket tender yang diselesaikan tepat waktu dari tahun ke tahun semakin meningkat yaitu dari 85% pada tahun 2015 menjadi 87,21% pada tahun 2019.
h. Besaran efisiensi nilai kontrak dari nilai pagu dari tahun 2015 sampai tahun 2019 rata-rata sebesar 4%.
i. Nilai LPPD Kabupaten Luwu pada tahun 2019 adalah 2.975.
j. Fasilitasi terhadap pembentukan produk hukum daerah dari tahun 2015 sampai tahun 2019 mencapai 100%
k. Pejabat yang menyampaikan Laporan harta kekayaan penyelenggaraan Negara (LHKPN) telah mencapai 80% pada tahun 2019.
l. Ketersediaan dokumen analisis jabatan dari 5 tahun terakhir mencapai 100%
m. Rencana Kerja Anggaran (RKA) unit kerja lingkup Sekertariat Daerah telah dilakukan verifikasi sesuai ketentuan.

2.4. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan kekhasan dan keunggulan daerah. Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia. Indikator variabel aspek daya saing daerah dijelaskan berikut ini sebagai bahan untuk analisis selanjutnya.

2.4.1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita (Angka Konsumsi RT per Kapita)

Pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita menggambarkan kemampuan ekonomi penduduk suatu wilayah. Konsumsi masyarakat yang tinggi menjadi daya tarik investor untuk berinvestasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Di Indonesia, hampir seluruh daerah masih mengandalkan pengeluaran konsumsi rumah tangga sebagai penggerak perekonomian. Nilai rata-rata pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita sebulan di Kabupaten Luwu mencapai Rp.852.041 pada tahun 2019. Nilai ini terus meningkat dari tahun 2015 yang hanya sebesar Rp.599.311. Meningkatnya pengeluaran konsumsi rumah tangga terutama dipengaruhi oleh meningkatnya pendapatan rumah tangga, kebijakan pemerintah seperti kebijakan menaikkan pajak juga dapat mempengaruhi pengeluaran konsumsi rumah tangga. secara ringkas perkembangan pengeluaran konsumsi rumah tangga dapat dilihat pada gambar berikut:

Grafik 2.32.

Perkembangan Pengeluaran Konsumsi RumahTangga per Kapita
Tahun 2015-2019

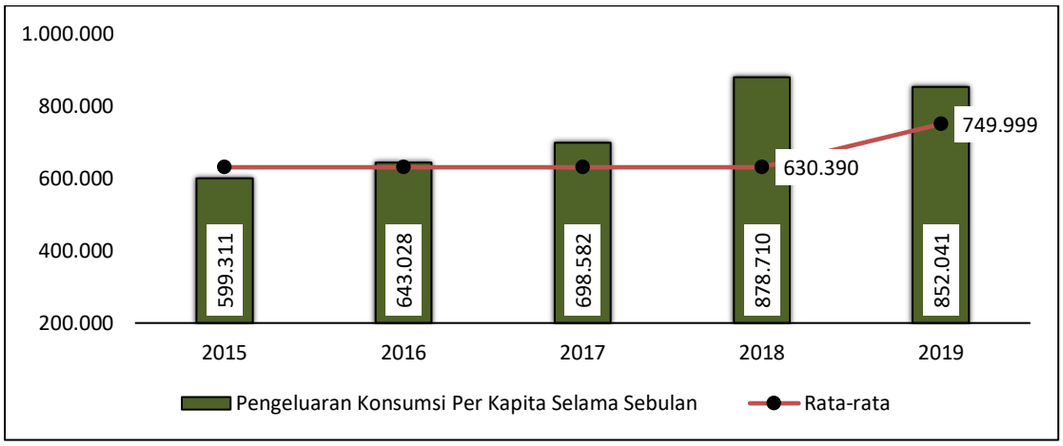

Sumber : Data diolah, BPS Kabupaten Luwu, Tahun 2020.

2.4.2 Persentase desa Swasembada terhadap total desa

Jumlah kecamatan yang berstatus swasembada belum mencapai 100%. Sejak tahun 2013 sampai dengan 2017, kecamatan yang berstatus swasembada hanya 70% dan meningkat menjadi 75% pada tahun 2016. Kecamatan yang berstatus swasembada pada tahun 2017 telah mencapai 81%. Kondisi ini menunjukkan adanya peningkatan kesejahteraan dalam dua tahun terakhir di Kabupaten Luwu.

2.4.3 Angka Kriminalitas Yang Tertangani

Dalam berbagai survei tentang daya tarik investor, ada beberapa faktor yang dapat menentukan baik atau tidaknya keamanan investasi di Indonesia, tidak hanya stabilitas politik tetapi penegakan hukum, kejelasan regulasi, perijinan ilegal, korupsi yang dilakukan birokrasi, premanisme, terorisme, perburuhan bahkan sengketa lahan dengan masyarakat setempat sangat mempengaruhi keuntungan netto atas biaya resiko yang akan mempengaruhi para investor untuk menentukan sikap apakah akan berinvestasi di Indonesia dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Ketersediaan data ini juga sangat bermanfaat sebagai dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan sektoral di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat serta perencanaan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan mendorong investasi di daerah. Data ini dapat memberikangambaran secara makro mengenai situasi dan kondisi keamanan masyarakat terkini serta perkembangannya selama beberapa tahun terakhir di Kabupaten Luwu. Data menunjukkan angka kriminalitas mengalami perubahan secara fluktuatif dan cenderung menurun pada tahun 2016 baik dari segi jumlah kejahatan maupun jenis kejahatannya daripada tahun 2014 sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 2.71.
Angka Kriminalitas Tahun 2015-2019

No	Jenis	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Pengeroyokan	22	20	34	46	20
2.	Penghinaan	1	1	3	23	3
3.	Surat Palsu	2	1	-	-	-
4.	Uang Palsu	1	1	-	-	-
5.	Perampasan	-	7	1	1	1
6.	Pemerkosaan	-	-	2	2	3
7.	Perjudian	28	16	4	11	14
8.	Penculikan	-	-	-	-	-
9.	Pembunuhan	3	1	5	-	-
10.	Penganiayaan Berat	1	1	-	-	-
11.	Penganiayaan Ringan	21	8	-	-	-
12.	Pencurian dengan kekerasan	3	0	-	-	-
13.	Pencurian dengan Pemberatan	37	-	-	-	-
14.	Pencurian Ringan	1	1	41	78	42
15.	Pencurian Kendaraan Bermotor	114	81	9	15	8
16.	Pencurian Hewan Ternak	6	-	2	1	1
17.	Pemerasan dan Pengancaman	2	-	2	3	1
18.	Penggelapan	55	41	17	24	8
19.	Penipuan	19	29	13	35	21
20.	Penadahan	-	3	-	-	-
21.	Pengrusakan	5	5	12	20	3
22.	Menerima Suap	51	59	-	-	-
23.	Narkotik	-	-	-	-	-
24.	Aborsi	-	1	-	-	1
25.	Ledakan Petasan	-	-	-	-	-
26.	Sengketa Tanah	5	-	11	-	-
27.	Perzinahan	1	-	-	5	-
28.	Kejahatan dengan senjata tajam	20	14	6	7	2
29.	Kejahatan dalam rumah tangga	24	-	8	11	3
Jumlah		**422**	**290**	**170**	**282**	**131**

Sumber: Polres Luwu Tahun 2020.

2.4.4 Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) dapat digunakan sebagai indikator yang menunjukkan keadaan ekonomi suatu daerah dan merupakan indikator demografi yang penting. Semakin tingginya prosentase *dependency ratio* menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif (usia 15-64 tahun) untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif (usia <15 tahun) dan tidak produktif lagi (>64 tahun). Sedangkan prosentase *dependency ratio* yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif.

Tabel 2.72.
Rasio Ketergantungan, Tahun 2015 - 2019

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah penduduk usia < 15 tahun	115.732	115.682	115.688	115.738	115.804
2.	Jumlah penduduk usia > 65 tahun	19.231	19.756	20.305	20.888	21.514
3.	Jumlah penduduk usia tidak produktif (1) + (2)	134.963	135.438	135.993	136.626	137.318
4.	Jumlah penduduk Usia 15-64 tahun	213.988	217.839	220.312	222.583	224.709
Rasio ketergantungan (3) / (4)		**0,6307**	**0,6217**	**0,6173**	**0,6138**	**0,6111**

Sumber : Data diolah, BPS Kabupaten Luwu, Tahun 2020.

2.5. Standar Pelayanan Minimal

Standar Pelayanan Minimal atau disingkat dengan SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

Pelayanan dasar dalam Standar Pelayanan Minimal merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi jenis SPM terdiri atas: Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman, Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarkat, dan Sosial.

2.5.1. Bidang Urusan Pendidikan

SPM pada Bidang Pendidikan terdiri dari 3 (tiga) jenis pelayanan dasar, dengan rincian dan capaian sebagai berikut:

Tabel 2.73.
Target dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Pendidikan

INDIKATOR PENCAPAIAN	Target Nasional	Capaian SPM			Interpretasi
		2017	2018	2019	
1. Jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi,SMP/MTs)	100%	87,79	88,71	96,78	Sudah tercapai
2. Jumlah Warga Negara Usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%	79,86	82,73	17,70	Belum tercapai
3. Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%	32,9	58,58	52,40	Belum tercapai

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Luwu, Tahun 2020.

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 3 (tiga) indikator SPM Bidang Pendidikan, terdapat 1 (satu) indikator yang telah mencapai target sesuai mutu yang ditetapkan, sedangkan 2 (dua) indikator belum tercapai. Hal ini menjadi perhatian melalui pembangunan pendidikan yang berkelanjutan, sejak perumusan kebijakan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi, agar standar pendidikan masyarakat Kabupaten Luwu sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan zaman.

2.5.2. Bidang Urusan Kesehatan

SPM pada Bidang Kesehatan terdiri dari 12 (dua belas) jenis pelayanan dasar, dengan rincian dan capaian sebagai berikut:

Tabel 2.74.
Target dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Kesehatan

INDIKATOR PENCAPAIAN	Target Nasional	Capaian SPM			Interpretasi
		2017	2018	2019	
1. Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	88,39%	84,96	93,94	Belum tercapai
2. Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	94,27%	89,78	88,52	Belum tercapai
3. Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	98,87%	98,93	100,00	Sudah tercapai
4. Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100%	100,00	71,14	Belum tercapai
5. Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	88,39%	84,96	87,05	Belum tercapai
6. Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100%	100,00	53,50	Sudah tercapai
7. Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100%	100,00	39,57	Belum tercapai
8. Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100,00	100,00	44,90	Belum tercapai
9. Jumlah Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100,00	100,00	67,90	Belum tercapai
10. Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	100%	100,00	100,00	95,70	Belum tercapai
11. Jumlah Warga Negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100,00	100,00	77,00	Belum tercapai
12. Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human	100%	100,00	100,00	64,54	Belum tercapai

INDIKATOR PENCAPAIAN	Target Nasional	Capaian SPM			Interpretasi
		2017	2018	2019	
Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan					

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Tahun 2020.

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 12 (indikator) SPM pada Bidang Kesehatan yang ditetapkan targetnya secara nasional, seluruhnya belum mampu dicapai Kabupaten Luwu.

2.5.3. Bidang Urusan Pekerjaan Umum

SPM pada Bidang Pekerjaan Umum terdiri dari 4 (empat) jenis pelayanan dasar, dengan rincian dan capaian sebagai berikut:

Tabel 2.75.
Target dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum

INDIKATOR PENCAPAIAN	Target Nasional	Capaian SPM			Interpretasi
		2017	2018	2019	
1. Warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%	100%	100%	100,00%	Sudah tercapai
2. Warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%	100%	100%	100%	Sudah tercapai
3. Peresentase tingkat kondisi jalan kabupaten baik dan sedang	60,00%	23,00%	24,00%	24,15%	Sudah tercapai
4. Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangannya	70%	75,45	82,46	84,52	Sudah tercapai

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Tahun 2020.

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 4 indikator SPM pada bidang pekerjaan umum, seluruhnya telah mencapai target yang ditetapkan. Kondisi ini perlu dipertahankan secara terus-menerus untuk terwujudnya penyelenggaraan pembangunan yang mensejahterakan masyarakat.

2.5.4. Bidang Urusan Perumahan Rakyat

SPM pada Bidang Perumahan Rakyat terdiri dari 2 (dua) jenis pelayanan dasar, dengan rincian dan capaian sebagai berikut:

Tabel 2.76.
Target dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat

INDIKATOR PENCAPAIAN	Target Nasional	Capaian SPM			Interpretasi
		2017	2018	2019	
1. Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	NA	NA	100%	Sudah tercapai

2. Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kab/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%	Tidak ada warga yang terkena relokasi

Sumber: Dinas Perumahan dan Permukiman Kab. Luwu, 2020.

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 2 indikator SPM pada Bidang Perumahan Rakyat, terdapat satu indikator yang sudah tercapai targetnya. Sedangkan indikator lainnya tidak ada kejadian yang dimaksudkan. Hal ini menjadi perhatian dalam perumusan kebijakan selanjutnya.

2.5.5. Bidang Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum

SPM pada Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum terdiri dari 5 (lima) jenis pelayanan dasar, dengan rincian dan capaian sebagai berikut:

Tabel 2.77.
Target dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum

INDIKATOR PENCAPAIAN	Target Nasional	Capaian SPM			Interpretasi
		2017	2018	2019	
1. Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum	100%	100%	100%	100,00	Sudah tercapai
2. Perda dan perkada	100%	42%	47%	100,00	Sudah tercapai
3. Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	100%	100%	100,00	Sudah tercapai
4. Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	-	22%	100,00	Sudah tercapai
5. Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	100%	100%	100,00	100,00	Sudah tercapai

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Pemadan Kebakaran Kab. Luwu, Tahun 2020.

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 5 indikator SPM pada Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, dalam pelaksanaannya di Kabupaten Luwu seluruhnya telah mencapai target yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

2.5.6. Bidang Urusan Sosial

SPM pada Bidang Sosial terdiri dari 5 (lima) jenis pelayanan dasar, dengan rincian dan capaian sebagai berikut:

Tabel 2.78.
Target dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial

INDIKATOR PENCAPAIAN	Target Nasional	Capaian SPM			Interpretasi
		2017	2018	2019	
1. Warga negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	100,00	100,00	100,00	Sudah tercapai
2. Warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	100,00	100,00	100,00	Sudah tercapai
3. Warga negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasis sosial dasar tuna sosial di luar panti	100%	-	100,00	100,00	Sudah tercapai
4. Warga tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti	100%	Tidak ada warga		100,00	Sudah tercapai
5. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana Kab/Kota	100%	100,0	100,00	100,00	Sudah tercapai

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Luwu Tahun 2020.

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 5 indikator SPM pada Bidang Sosial, dalam pelaksanaannya di Kabupaten Luwu seluruhnya telah mencapai target yang ditetapkan. Kondisi ini harus dipertahankan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan.

2.6. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / *Sustainable Developmant Goals* (TPB/SDGs)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau dalam bahasa Inggris dikenal sebagai *Sustainable Development Goals* disingkat dengan *SDGs* adalah 17 tujuan dengan 169 capaian yang terukur dan tenggat yang telah ditentukan oleh PBB sebagai agenda dunia pembangunan untuk kemaslahatan manusia dan planet bumi. Tujuan ini dicanangkan bersama oleh negara-negara lintas pemerintahan pada resolusi PBB yang diterbitkan pada 21 Oktober 2015 sebagai ambisi pembangunan bersama hingga tahun 2030. Tujuan ini merupakan kelanjutan atau pengganti dari Tujuan Pembangunan Milenium yang ditandatangani oleh pemimpin-pemimpin dari 189 negara sebagai Deklarasi Milenium di markas besar PBB pada tahun 2000 dan tidak berlaku lagi sejak akhir 2015.

Agenda pembangunan berkelanjutan yang baru dibuat untuk menjawab tuntutan kepemimpinan dunia dalam mengatasi kemiskinan, kesenjangan, dan perubahan iklim dalam bentuk aksi nyata. Konsep Tujuan Pembangunan Berkelanjutan lahir pada Konferensi Pembangunan Berkelanjutan PBB, Rio+20, pada 2012 dengan menetapkan rangkaian target yang bisa diaplikasikan secara universal serta dapat diukur dalam menyeimbangkan tiga dimensi pembangunan berkelanjutan; (1) lingkungan, (2) sosial, dan (3) ekonomi.

Agenda 2030 terdiri dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) atau Tujuan Global, yang akan menjadi tuntunan kebijakan dan pendanaan untuk 15 tahun ke depan (2030). Capaian Kabupaten Luwu terhadap indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.79.
Capaian, Target Indikator, TPB/SDGs Kabupaten Luwu 2015-2019

No	Tujuan / Indikator	Target Nasional	Target Kabupaten	Capaian TPB/SDGs					OPD
				2015	2016	2017	2018	2019	Penanggung Jawab
1	**Tujuan 1 : Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun**								
1.1	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	7-8%	11%	13,89%	14,35%	14,01%	13,36%	12,78%	Dinas Sosial
1.2	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	90%	100%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Kesehatan
1.3	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas	17,12%	20,15%	41,95%	41,95%	41,95%	41,95%	20,86%	Dinas Sosial
1.4	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan	2,8 Juta Rumah Tangga	10.000 KSM	4.684 KSM	9.936 KSM	9.903 KSM	16.879 KSM	16.526 KSM	Dinas Sosial
1.5	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan	70%	97,96%	86,2%	93,57%	93,57%	89,90%	97,96%	Dinas Kesehatan
1.6	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap	63%	73%	95%	100%	100%	94%	73%	Dinas Kesehatan
1.7	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15- 49 tahun yang berstatus kawin	65%	69,90%	64,93%	66,27%	69,20%	70,00%	69,90%	Dinas Kesehatan
1.8	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan	100%	75,45%	71,00%	76,00%	75,45%	75,45%	75,45%	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.9	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/sederajat	91,63%	72,10%	54,48%	58,89%	67,66%	74,85%	72,10%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.10	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran	77,40%	55,26%	75,18%	75,96%	55,26%	52,45%	55,26%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,
1.11	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN	100%	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Tujuan / Indikator	Target Nasional	Target Kabupaten	Capaian TPB/SDGs					OPD
				2015	2016	2017	2018	2019	Penanggung Jawab
1.12	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	Menurun	• 0 • 0 • 0,0005	• 0 • 0 • 0,02	• 0 • 0 • 0,04	• 0,00001 • 0,00002 • 0,01101	• 0,00001 • 0 • 0,00618	• 0 • 0,0001 • 0,03901	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.13	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah	39 Daerah	8 Kecamatan	0 Kecamatan	1 Kecamatan	2 Kecamatan	4 Kecamatan	1 Kecamatan	BadanPenanggulangan Bencana Daerah
1.14	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah	Ada	Ada	-	-	-	-	-	
1.15	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Dinas Sosial
2	**Tujuan 2 : Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan**								
2.1	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita	17%	15%	N/A	N/A	15,90%	13,40%	9,80%	Dinas Kesehatan
2.2	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan	Menurun	12,50%	14,40%	14,20%	13,80%	13,60%	13,05%	Dinas Ketahanan Pangan,
2.3	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.	8,50%	8,50%	13,60%	12,70%	9,10%	9,00%	8,50%	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
2.4	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun /balita	Menurun	14,00%	N/A	N/A	14,30%	27,90%	18,40%	Dinas Kesehatan
2.5	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/balita	28%	11%	N/A	N/A	12,35%	10,21%	14,67%	Dinas Kesehatan
2.6	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe	N/A	3,50%	N/A	N/A	8,06%	6,03%	4,04%	Dinas Kesehatan
2.7	Prevalensi anemia pada ibu hamil	28%	15%	-	8,40%	6,25%	14,30%	11,01%	Dinas Kesehatan
2.8	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif	50%	91,29%	-	67,3%	66,00%	74,5%	86,4%	Dinas Kesehatan
2.9	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan	Skor PPH = 92,5; Tingkat Konsumsi Ikan = 54,5	89,2 50,32	81,9 48,32	85,2 48,81	87,8 49,29	86,3 49,79	89,2 50,32	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Dinas Perikanan

No	Tujuan / Indikator	Target Nasional	Target Kabupaten	Capaian TPB/SDGs					OPD
				2015	2016	2017	2018	2019	Penanggung Jawab
		kg/kapita/tahun							
3	**Tujuan 3 : Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia**								
3.1	Angka Kematian Ibu (AKI)	306	92,00 per 100,00.000 penduduk	167,8 per 100.000 penduduk	106,01 per 100.000 penduduk	106,08 per 100.000 penduduk	94,40	95,65	Dinas Kesehatan
3.2	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih	95%	88,52%	89,7	86,2	93,57	89,9	88,52%	Dinas Kesehatan
3.3	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan	85%	97,96%	89,75%	86,93%	95,51%	87,65%	97,96%	Dinas Kesehatan
3.4	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup	Menurun	9,08	1 ;117	1;106	1;80	1;92	9,72	Dinas Kesehatan
3.5	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup	Menurun	Menurun	1; 160	1;165	1;140	1;132	1;54	Dinas Kesehatan
3.6	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran Hidup	24	0,0091	0,0079	0,0081	0,0113	0,0107	0,0091	Dinas Kesehatan
3.7	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi	95%	Mencapai 80%	Mencapai 80%	Mencapai 80%	Mencapai 80%	Mencapai 80%	Mencapai 80%	Dinas Kesehatan
3.8	Prevalensi HIV pada populasi dewasa	<0,5%	0,005 dari total populasi	0,003 dari total populasi	0,001 dari total populasi	0,009 dari total populiasi	0,005 dari total populasi	0,005	Dinas Kesehatan
3.9	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk	245	125	370	484	489	592	183	Dinas Kesehatan
3.10	Kejadian Malaria per 1000 orang	Menurun	47	36	34	40	59	52	Dinas Kesehatan
3.11	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria	300 Kab/Kota	Mencapai Eliminasi Malaria	Tidak Mencapai	Tidak Mencapai	Tidak Mencapai	Mencapai	Tidak Mencapai	Dinas Kesehatan
3.12	Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B	-	100,00%	-	-	-	100,00%	100,00%	Dinas Kesehatan
3.13	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta)	Menurun	15	27	10	29	24	18	Dinas Kesehatan
3.14	Jumlah Provinsi/Kab/Kota dengan eliminasi Kusta	34 Provinsi	34 Provinsi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Dinas Kesehatan

No	Tujuan / Indikator	Target Nasional	Target Kabupaten	Capaian TPB/SDGs					OPD
				2015	2016	2017	2018	2019	Penanggung Jawab
3.15	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I)	35 Kab/Kota	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Dinas Kesehatan
3.16	Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun	5,40%	4,00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Dinas Kesehatan
3.17	Prevalensi tekanan darah tinggi	24,30%	20%	N/A	14,8%	26,1%	18,2%	34,6%	Dinas Kesehatan
3.18	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥ 18 tahun	15,40%	12,90%	N/A	1,00%	17,20%	8,20%	12,90%	Dinas Kesehatan
3.19	Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri	Menurun	-	N/A	-	-	-	-	Dinas Kesehatan
3.20	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa kesehatan	280 Kab/Kota	4	N/A	-	2	4	6	Dinas Kesehatan
3.21	Prevalensi penyalahgunaan narkoba	0,02%	1,00%	N/A	-	-	-	-	Dinas Kesehatan
3.22	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern	66%	69,90%	N/A	66,27%	69,20%	70,00%	69,90%	Dinas Kesehatan
3.23	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin	65%.	69,90	64,93	66,27	76,06	84,36	69,90	Dinas Kesehatan
3.24	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern	23,50%	18,77%	N/A	15,44%	17,15%	19,10%	20,88%	Dinas Kesehatan
3.25	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk	Meningkat	100,00	100,00	100,00	100	100,00	100,00	Dinas Kesehatan
3.26	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	95%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Kesehatan
3.27	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas	Meningkat	90%	N/A	80	100,00	90	90	Dinas Kesehatan
3.28	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan	Meningkat	1:443	1:9.915	1:11.039	1:7.580	1:7.484	1:443	Dinas Kesehatan
4	**Tujuan 4 : Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua**								
4.1	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/ MA/ sederajat	91,63%		93,60%	98,50%	96,50%	70,12%	72,10%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Tujuan / Indikator	Target Nasional	Target Kabupaten	Capaian TPB/SDGs					OPD
				2015	2016	2017	2018	2019	Penanggung Jawab
4.2	Rata-rata lama sekolah penduduk umur 15 tahun	8,8 Tahun	8,15 Tahun	7,74	7,75	7,75	7,97	8,15	Dinas Pendidikan
4.3	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/sederajat; (2) SMP/MTs/sederajat; (3) Rasio Angka Partispasi Kasar Tinggi	Meningkat	• 93,51 • 82,73	• 91,39 • 77,13	• 94,50 • 86,60	• 95,51 • 80,07	• 95,83 • 81,60	• 93,51 • 82,73	Dinas Pendidikan
4.4	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun	96,10%	98,12%	NA	98,78%	98,78%	98,80%	98,12%	Dinas Pendidikan
4.5	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun	Meningkat	• 99% • 92,66	N/A	N/A	N/A	• 98,86 • 91,80	• 98,83 • 92,50	Dinas Pendidikan
5	**Tujuan 5 : Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan**								
5.1	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan	16 Kebijakan	2	NA					Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
5.2	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif	70%	100%	100	100%	100%	100,00%	100,00%	Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
5.3	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat	91,63%	Provinsi	74,75%	53,18%	57,22%	63,56%	70,12%	Dinas Pendidikan
5.4	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah	16,60%	11%	8,57	8,57	8,57	8,57	5,71	Dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
6	**Tujuan 6 : Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan**								
6.1	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak	100%	75,45%	71,00%	76,00%	75,45%	75,45%	75,45%	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
6.2	Kualitas Air Danau	Meningkat	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup
6.3	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku	Meningkat	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
6.4	Luas lahan kritis dalam Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang direhabilitasi	5,5 Juta Ha	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Dinas Kehutanan
7	**Tujuan 7 : Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua**								

No	Tujuan / Indikator	Target Nasional	Target Kabupaten	Capaian TPB/SDGs					OPD
				2015	2016	2017	2018	2019	Penanggung Jawab
7.1	Rasio elektrifikasi	96,60%	99%	88,11%	89,60%	97,82%	98,02%	98,66%	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
8	**Tujuan 8 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua**								
8.1	Laju pertumbuhan PDB per kapita (%)	Meningkat	7,65%	7.26%	7.88%	6.79%	6,86%	6,62%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
8.2	PDB per kapita	50 Juta	43,25	29,59	33,57	36,60	40,20	43,25	
8.3	Persentase tenaga kerja formal	Meningkat	62,23%	60,78	61,03	64,69%	64,89%	61,75%	Dinas Ketenagakerjaa dan Transmigrasi
8.4	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian	Meningkat			60,49%			64,84	Dinas Ketenagakerjaa dan Transmigrasi
8.5	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan	25%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Dinas Koperasi UKM dan perindustrian
8.6	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur	Menurun	4,08%	7,87		4,78%	3,89%	4,66%	Dinas Ketenagakerjaa dan Transmigrasi
8.7	Tingkat setengah pengangguran	Menurun	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
8.8	Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET)	Meningkat	Meningkat	N/A	22,867	23,131	23,392	23,283	
8.9	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB	8%	Meningkat	0,06%	0,05%	0,05%	0,14%	0,07%	Dinas Pariwisata
8.10	Jumlah wisatawan mancanegara	20 Juta (skala nasional)	N/A	333 Skala Kabuapten	180 Skala Kabuapten	224 Skala Kabuapten	311 Skala Kabuapten	276 Skala Kabupaten	
8.11	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	Meningkat	2.960	11.117	10.700	12.477	12.573	2.960	Dinas Pariwisata
8.12	Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja	Meningkat	21.584	N/A	18.867	19.967	20.921	21.584	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
8.13	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit	Meningkat	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Dinas Koperasi UKM dan perindustrian
9	**Tujuan 9 : Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi**								
9.1	Panjang jalur kereta api	3.258 Km		NA					Dinas Perhubungan

No	Tujuan / Indikator	Target Nasional	Target Kabupaten	Capaian TPB/SDGs					OPD
				2015	2016	2017	2018	2019	Penanggung Jawab
9.2	Jumlah dermaga penyeberangan	275 Unit					10	10	Dinas Perhubungan
9.3	Jumlah pelabuhan strategis	24 Pelabuhan (skala nasional)	1	1	1	1	1	1	Dinas Perhubungan
9.4	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita	Meningkat	10%	4,44%	8,97%	7,59%	6,95%	10,94%	Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian
9.5	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur	4,3% (2015)	10,49	N/A	8,97	7,59	6,95	10,49	
9.6	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur	Meningkat	7.161	N/A	6.162	6.367	6.848	7.161	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
9.7	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri	Meningkat	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian
9.8	Persentase Perubahan Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca	26%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Dinas Lingkungan Hidup
10	**Tujuan 10 : Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antarnegara**								
10.1	Koefisien Gini	0,36	0,355	0,361	0,359	0,395	0,362	0,352	BPS
10.2	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	7-8%	11%	13,89%	14,35%	14,01%	13,36%	12,78%	BPS
10.3	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal	Meningkat	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	BPS
10.4	Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal	14%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	BPS
11	**Tujuan 11 : Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan**								
11.1	Persentase pengguna modal di perkotaan	32%	N/A	NA	N/A	N/A	N/A	N/A	Dinas PMPTSP
11.2	Jumlah kota sedang di luar Jawa yang diarahkan sebagai pengendali (buffer) arus urbanisasi dan sebagai pusat pertumbuhan utama	20 kota sedang (skala nasional							Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
11.3	Jumlah Metropolitan baru di luar Jawa sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN)	5 Metropolitan (skala nasional)							

No	Tujuan / Indikator	Target Nasional	Target Kabupaten	Capaian TPB/SDGs					OPD
				2015	2016	2017	2018	2019	Penanggung Jawab
11.4	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	Menurun	• 0 • 0 • 0,0005	• 0 • 0 • 0,02	• 0 • 0 • 0,04	• 0,00001 • 0,00002 • 0,01101	• 0,00001 • 0 • 0,00618	• 0 • 0,0001 • 0,03901	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
11.5	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)	30%	25%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
11.6	Persentase sampah perkotaan yang tertangani	80%	70%	76,03%	80,50%	83,75%	83,75%	67,30%	Dinas Lingkungan Hidup
11.7	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah	Ada	Ada	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
12	**Tujuan 12 : Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan**								
12.1	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri)	150 Juta Ton	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Dinas Lingkungan Hidup
12.2	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang	20 Ton/Hari		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Dinas Lingkungan Hidup
13	**Tujuan 13 : Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya**								
13.1	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah	Ada	Ada	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
13.3	Dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK)	Biennial Update Report (BUR Ke3)	Ada	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Dinas Lingkungan Hidup
14	**Tujuan 14 : Melestarikan dan Memanfaatkan secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera untuk Pembangunan Berkelanjutan**								
14.1	Jumlah nelayan yang terlindungi	Meningkat	644	NA	112	2.389	129	692	Dinas Perikanan
15	**Tujuan 15 : Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati**								
15.1	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan	Meningkat	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Dinas Lingkungan Hidup
15.2	Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Meningkat	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Dinas Lingkungan Hidup
15.3	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati	Meningkat	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Dinas Lingkungan Hidup
16	**Tujuan 16 : Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan**								

No	Tujuan / Indikator	Target Nasional	Target Kabupaten	Capaian TPB/SDGs					OPD
				2015	2016	2017	2018	2019	Penanggung Jawab
16.1	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui	Meningkat							Badan Pengelola Keuangan Daerah
16.2	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota)	75%	BB	C	C	81,94	CC	CC	Bag Organisasi dan Pendaya Gunaa Aparatur Setda Kab. Luwu
16.3	Persentase penggunaan E- procurement terhadap belanja pengadaan	80%	100%	N/A	100	100	100	100,00	Bag. ...PBJ
16.4	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	16,60%	11%	8,57	8,57	8,57	8,57	8,57	Dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak
17	**Tujuan 17 : Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan**								
17.1	Total pendapatan pemerintah PDB sumbernya	Meningkat	Meningkat	7.437,42	8.023,37	8.567,87	9.155,16	9.728,96	Badan Pengeloa Keuaangan Daerah
17.2	Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan	Meningkat	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Dinas Komunikasa, Informatika, Statistik, dan Persandian
17.3	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik	Meningkat	BPS	N/A	N/A	N/A	100,00	93,5	BPS
17.4	Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama	Meningkat	BPS	N/A	N/A	N/A	100,00	100,00	BPS
17.5	Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi rujukan statisktik	Meningkat	BPS	N/A	N/A	N/A	6	9	BPS
17.6	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)	Ada		N/A	-	-	-	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,
17.7	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website	Meningkat	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	BPS
17.8	Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS)	Meningkat	BPS	N/A	N/A	N/A	98,89	100,00	BPS

2.7. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kabupaten Luwu Tahun 2015 -2019

Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Luwu Tahun 2015-2019 diukur melalui indikator kinerja yang tertuang dalam peraturan perundangan dan dituangkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Luwu pada periode berkenaan. Evaluasi dilakukan berdasarkan aspek penyelenggaraan pemerintahan yaitu aspek kesejahtraan dan pemerataan ekonomi, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing.

Secara umum, pencapaian target dimaksud di Kabupaten Luwu belum dapat dilakukan dengan baik mengingat target yang ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2014-2019 belum ditetapkan dengan baik. Gambaran pencapaian sebagaimana dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.80
Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Kabupaten Luwu Tahun 2015-2019

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/	Satuan	Target Kinerja						Capaian Kinerja							Interpretasi
			2014	2015	2016	2017	2018	2019**)	2013	2014	2015	2016	2017	2018**)	2019	
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT																
1	Pertumbuhan PDRB	%	7,90	8,30	8,70	8,90	9,20	9,50		8,81	7,26	7,88	6,79	6,86	6,26	
2	Laju inflasi		7,56	7,56	7,56	7,56	7,56	7,56			3,38	2,74	3,95	4,19	1,91	
3	PDRB per kapita :		18,66	19,78	21,12	22,80	24,20	25,80								
	- PDRB per kapita Atas Dasar harga Berlaku (ADHB)	Rp								25982	29.588.856	33.559.615	36.560.868	40.204.811	43.249.868	
	- PDRB per kapita Atas Dasar harga Konstan(ADHK)	Rp								19977	21.236.544	22.711.272	24.046.449	25.487.001	26.873.576	
4	Indeks Gini		0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39			0,361	0,359	0,395	0,362	0,352	
5	Pemerataan pendapatan versi Bank Dunia															
6	Indeks ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional)															
7	Persentase penduduk diatas garis kemiskinan	%	87	87	88	88	89	89		86,03	86,11	85,65	86,02	86,64	87,22	
8	Rasio kesenjangan kemiskinan															
9	Proporsi penduduk dengan pendapatan kurang dari USD 1,00 (PPP) per kapita per hari															
10	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	skor indeks	75,78	76,23	76,68	77,13	77,58	78,03		67,34	68,11	68,71	69,02	69,6	70,39	
11	Angka melek huruf	%	91,90	92,00	92,10	92,20	92,30	92,40		91,91	92,00	92,10	90,93	90,74	92,23	
12	Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	7,89	7,93	7,97	8,01	8,05	8,09			7,74	7,75	7,89	7,97	8,15	
13	Angka usia harapan hidup	Tahun	74,20	74,40	74,60	74,80	75,00	75,20		69,14	69,44	69,52	69,60	69,84	70,19	
14	Persentase balita gizi buruk	%	100	100	100	100	100	100			0,04	0,08	0,05	0,03	0,03	
15	Prevalensi balita gizi kurang	%									2,09	3,60	6,50	5,90	3,64	
16	Cakupan Desa Siaga Aktif	%									100	100	100	100	100	
17	Angka partisipasi angkatan kerja	%								96,67						
18	Tingkat partisipasi angkatan kerja	%								65,20	60,78	n.a	64,69	61,78	64,69	
19	Tingkat pengangguran terbuka	%	2,5	2	1,7	1,5	1,3	1		5,10	7,86	n.a	4,78	3,59	4,38	
20	Rasio penduduk yang bekerja	angka rasio	0,89	0,89	0,90	0,90	0,91	0,91		94,94	0,9214	n.a	0,9522	0,9611	0,9534	
21	Laju pertumbuhan PDRB per tenaga kerja	Rp. Juta									56,51	n.a	57,69	60,51	60,96	
22	Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas	angka rasio									56,01	n.a	61,59	59,38	61,68	
23	Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja	%									54,1	n.a	51,8	52,74	52,47	
24	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	%	0,29	0,28	0,27	0,26	0,25	0,24			46,43	44,18	43,03	44,45	43,28	
25	Indeks Kepuasan Masyarakat	skor indeks									50,45	73,66	75,45	87,01	91,12	
26	Persentase PAD terhadap pendapatan	%									6,37	6,84	8,45	8,08	7,85	

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/	Satuan	Target Kinerja						Capaian Kinerja							Interpretasi
			2014	2015	2016	2017	2018	2019**)	2013	2014	2015	2016	2017	2018**)	2019	
27	Opini BPK										WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
28	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	skor									85,2	87,4	87,8	86,3	89,2	
29	Penguatan cadangan pangan	%								19,00	26,66	32,00	44,68	44,68	11,59	
30	Penanganan daerah rawan pangan										5	5	5	5	5	
31	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	%	50,60	50,90	51,30	51,50	51,70	51,90		53,22	53,55	54,30	53,50	53,88	52,38	
32	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB	%									9,58	9,11	8,30	7,79	7,40	
33	Produksi sektor pertanian	ton									322.412,00	349.454,90	337.896,10	450.005,89	464.924,54	
34	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	%									21,06	20,82	20,06	19,97	18,49	
35	Produksi sektor perkebunan	ton									65.455,06	48.697,00	39.833,00	44.944,85	41.408,37	
36	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB															
37	Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB	%									0,26	0,23	0,23	0,23	0,23	
38	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB	%									2,74	2,76	2,77	2,75	2,74	
39	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB															
40	Kontribusi sector kelautan dan perikanan terhadap PDRB	%									18,35	19,71	20,67	21,62	22,04	
41	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	12,1	12,1	12,5	13,1	13,3	13,5			10,22	9,91	9,78	9,75	10,14	
42	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	%									4,10	4,02	4,16	4,12	4,27	
43	Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri		5,87	5,89	5,92	5,97	6	6,05								
44	Pertumbuhan Industri	%	7,98	8	8,02	8,04	8,09	8,12		7,49	Na	Na	Na	6,09	Na	
45	Kontribusi transmigrasi terhadap PDRB															
ASPEK DAYA SAING DAERAH																
1	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	Rp.									599.311	643.028	698.582	878.710	852.041	
2	Nilai tukar petani															
3	Persentase pengeluaran konsumsi non pangan perkapita															
4	Produktivitas total daerah															
5	Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa															
6	Rasio Ekspor + Impor terhadap PDB (indikator keterbukaan ekonomi)															
7	Rasio pinjaman terhadap simpanan di bank umum															
8	Rasio pinjaman terhadap simpanan di BPR															
9	Angka kriminalitas yang tertangani	kasus									422	290	170	282	131	
10	Rasio ketergantungan	angka rasio									0,6307	0,6217	0,6173	0,6138	0,6111	

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/	Satuan	Target Kinerja						Capaian Kinerja							Interpretasi
			2014	2015	2016	2017	2018	2019**)	2013	2014	2015	2016	2017	2018**)	2019	
ASPEK PELAYANAN UMUM																
Layanan Urusan Wajib Dasar																
1	**Pendidikan**															
1,01	PAUD	%								23,76	23,53	23,76	32,91	35,15	52,40	
1,02	Angka partisipasi kasar :		96,00	97,30	98,50	99,40	100	100		95,67						
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	%								106,48	102,39	102,39	102,39	97,78	94,45	
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	%								100,82	104,23	99,47	99,31	98,32	96,77	
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C	%									54,84	58,89	67,66	74,85	72,10	
1,03	Angka pendidikan yang ditamatkan:															
	Angka pendidikan yang ditamatkan SD/MI/PAKET A									8187						
	Angka pendidikan yang ditamatkan SLTP									7241						
	Angka pendidikan yang ditamatkan SLTA									4752						
	Angka Kelulusan:															
	Angka Kelulusan SD/MI	%									96,52	96,26	99,66	97,85	101,20	
	Angka Kelulusan SMP/MTs	%									95,78	99,35	94,12	95,80	96,78	
	Angka Kelulusan SMA/SMK/MA	%									98,94	97,65	98,88	99,16	98,57	
1,04	Angka Partisipasi Murni (APM):	APM	81,50	82,76	84,20	86,00	87,80	90,00								
01.04.01	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	92,50	93,70	94,50	96,50	98,50	99,50		92,16	96,63	96,39	95,51	95,83	93,51	
01.04.02	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	83,50	84,70	86,40	88,64	91,30	93,20		82,37	80,68	80,00	80,07	81,60	82,73	
01.04.03	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	%	54,50	56,70	58,50	61,40	63,70	66,30		55,22	54,84	58,89	67,77	74,85	72,10	
1,05	Angka partisipasi sekolah :		97,50	98,00	98,50	98,62	98,74	99,00								
01.05.01	Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A	%								93,91	102,32	101,43	99,16	97,55	99,41	
01.05.02	Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	%	89,54	90,00	91,00	92,00	93,00	94,00			103,64	98,27	97,79	96,44	93,81	
01.05.03	Angka partisipasi sekolah (APS) SMA/SMK/MA/Paket C	%	66,00	67,00	68,00	69,00	70,00	71,00			53,18	57,22	63,56	70,12	72,10	
1,06	Angka Putus Sekolah:															
01.06.01	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	%								0,18						
01.06.02	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	%								0,06						
01.06.03	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA									0,19						
1,07	Angka Kelulusan:															
01.07.01	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%								99,03	96,52	96,26	99,66	97,85	101,20	
01.07.02	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%								93,73	95,78	99,35	94,12	95,80	96,78	
01.07.03	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	%									98,94	97,65	98,88	99,16	98,57	
1,08	Angka Melanjutkan (AM):															
01.08.01	Angka Melanjutkan (AM) dariSD/MI ke SMP/MTs	%								95,44	95,45	95,87	93,93	95,29	97,66	
01.08.02	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	%									95,32	92,85	94,52	95,24	96,46	
1,09	Fasilitas Pendidikan:	%														
01.09.01	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	%								55,20	23,51	25,08	25,03	23,9	19,83	

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/	Satuan	Target Kinerja						Capaian Kinerja							Interpretasi
			2014	2015	2016	2017	2018	2019**)	2013	2014	2015	2016	2017	2018**)	2019	
01.09.02	Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	%								20,31	46,94	51,51	52,67	52	55,77	
	Sekolah pendidikan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik	%									77,78	68,6	71,47	89,57	88,63	
1,1	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	angka rasio	170	160	150	140	130	120			64,07	64,06	64,19	65,61	65,50	
1,11	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah SMA/SMK/MA	angka rasio	200	180	160	140	120	120			29,84	30,99	31,19	30,64	30,85	
1,12	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs)	angka rasio	0	38	36	34	32	30			960,06	844,62	872,05	860,12	763,1	
1,13	Rasio guru terhadap murid pendidikan menengah (SMA/SMK/MA)	angka rasio	12,20	13,40	14,20	15,30	16,40	17,50			1.303,70	1.354,08	944,06	854,7	838,51	
1,14	Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar (SD/MI dan SMP/MTs)		4,17	4,38	4,63	4,90	5,20	5,56								
1,15	Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata (SMA/SMK/MA)		32,00	31,00	29,60	28,20	27,40	26,00								
1,16	Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar															
1,17	Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki															
1,18	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	%								na	Na	98,78	98,78	98,80	98,11	
1,19	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%								5.309	78,93	82,90	79,82	87,05	98,12	
2	**Kesehatan**															
2,01	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup									0,0094	0,0079	0,0081	0,0113	0,0107	0,0091	
2,02	Angka kelangsungan hidup bayi		100	100	100	100	100	100			0,9921	0,9919	0,9887	0,9893	0,9990	
2,03	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	angka rasio								1:100	8,54	9,39	12,43	10,86	9,72	
2,04	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	angka rasio								1:139	6,29	6,06	7,12	7,55	6,54	
2,05	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	angka rasio								140,30	167,80	106,01	106,08	94,40	95,65	
2,06	Rasio posyandu per satuan balita	angka rasio								1:58	0,0172	0,0213	0,0221	0,0226	0,0144	
2,07	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	angka rasio								1:1.660	0,0006	0,0006	0,0006	0,0006	0,0007	
2,08	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	angka rasio								1:347.046	1:350.218	1:176.638	1:182.652	1:179.604	1:181.013	
2,09	Rasio dokter per satuan penduduk	angka rasio								1:9.915	0,0002	0,00019	0,00022	0,00023	0,00029	
2,1	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	angka rasio								1:9.915	0,0002	0,00019	0,00022	0,00023	0,00029	
2,11	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%								54	52,50	65,75	76,64	71,00	80,49	
2,12	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%								91,59	89,00	95,01	94,27	89,78	88,52	
2,13	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%								95,2	96,91	96,47	87,67	87,67	89,42	
2,14	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	%								100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/	Satuan	Target Kinerja						Capaian Kinerja							Interpretasi
			2014	2015	2016	2017	2018	2019**)	2013	2014	2015	2016	2017	2018**)	2019	
2,15	Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum (standar yang digunakan Indonesia 2.100 Kkal/kapita/hari)															
2,16	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	%								104,6	98,61	92,67	92,0	96,86	89,59	
2,17	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk															
2,18	Cakupan balita pneumonia yang ditangani	%								100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
2,19	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	%								64,2	53,66	60,34	53,16	43,48	60,30	
2,2	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	%								0,1	0,14	0,14	0,17	0,18	0,19	
2,21	Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	%								0,003	0,002	0,008	0,005	n.a	0,008	
2,22	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	%								74,9	91,55	91,10	98,34	98,31	63,68	
2,23	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	%								74,9	60,92	72,47	63,58	69,46	77,00	
2,24	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	%								100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
2,25	Penderita diare yang ditangani															
2,26	Angka kejadian Malaria															
2,27	Tingkat kematian akibat malaria															
2,28	Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida	%								0,74						
2,29	Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat															
2,3	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	%								0,003	0,003	0,001	0,009	0,005	0,004	
2,31	Penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko tinggi terakhir															
2,32	Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS															
2,33	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00	77,59	80,40	64,94	68,03	72,33	
2,34	Cakupan kunjungan bayi	%	90,00	92,00	94,00	95,00	96,00	97,00		97,3	98,44	111,96	96,30	106,62	101,26	
2,35	Cakupan puskesmas	%	90,00	95,00	97,00	100,00	100,00	100,00		100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
2,36	Cakupan pembantu puskesmas	%	85	95	95	100	100	100		45,4	46,26	46,26	46,26	48,48	49,34	
2,37	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	%								85,33	84,76	89,01	88,39	84,96	81,00	
2,38	Cakupan pelayanan nifas	%								89,70	86,15	93,57	93,6	89,92	86,66	
2,39	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	%								23,70	12,14	39,33	53,99	58,25	48,81	
2,4	Cakupan pelayanan anak balita	%								32,60	43,33	58,27	61,39	70,22	71,14	
2,41	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin															
2,42	Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat	%								116,80	98,11	100,00	93,66	89,80	89,67	
2,43	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin															

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/	Satuan	Target Kinerja						Capaian Kinerja							Interpretasi
			2014	2015	2016	2017	2018	2019**)	2013	2014	2015	2016	2017	2018**)	2019	
2,44	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)															
2,45	Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam									66,70						
3	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**															
3,01	Pekerjaan Umum:															
03.01.01	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%	15,50	19,35	22,65	25,15	27,75	30,00		0,15	0,17	0,17	0,21	0,21	0,21	
03.01.02	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	angka rasio								0,00591	0,00612	0,00655	0,00686	0,00708	0,00759	
03.01.03	Persentase kawasan pemukiman yang yang belum dapat dilalui kendaraan roda 4															
03.01.04	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	km		22,21	27,76	29,32	27,76	26,65		16,15	18,00	18,37	21,83	21,17	21,29	
03.01.05	Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	%									-	-	56,46	54,30	50,30	
03.01.06	Persentase sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar															
03.01.07	Persentase rumah tinggal bersanitasi	%	65,8	71	76	81	86	92		40,12	71,00	76,00	75,45	82,46	84,52	
03.01.08	Persentase sempadan sungai yang dipakai bangunan liar															
03.01.09	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat															
03.01.10	Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun															
03.01.11	Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor															
03.01.12	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%								15,25	18,17	25,47	31,41	36,33	40,26	

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/	Satuan	Target Kinerja						Capaian Kinerja							Interpretasi
			2014	2015	2016	2017	2018	2019**)	2013	2014	2015	2016	2017	2018**)	2019	
03.01.13	Rasio Jaringan Irigasi	%	8	9	10	12	12	12		14,04	19,65	56,15	49,81	59,94	63,30	
03.01.14	Persentase penduduk berakses air minum	%								20,00	40,00	47,00	70,00	82,64	80,03	
03.01.15	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	%								45,69	40,51	41,71	39,42	47,22	47,94	
03.01.16	Persentase areal kawasan kumuh															
03.01.17	Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan															
03.01.18	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk		1,5mx2m	1,5mx2m	1,5mx2m	1,5mx2m	1,5mx2m	1,5mx2m								
03.01.19	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk															
3,02	Penataan Ruang:															
03.02.01	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	angka rasio								na	na	na	13,30	16,40	4,18	
03.02.02	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan															
03.02.03	Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan	%	89	90	91	93	94	95			90,00	91,00	93,00	93,00	98,05	
03.02.04	Ruang publik yang berubah peruntukannya	%	5	5	5	5	5	5								
03.02.05	Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan															
03.02.06	Ketaatan terhadap RTRW	%	90	91	92	93	94	95								
4	**Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman**															
4,01	Rasio rumah layak huni	angka rasio								na	0,196	0,196	0,196	0,203	0,208	
4,02	Rasio permukiman layak huni	angka rasio								0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,97	

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/	Satuan	Target Kinerja						Capaian Kinerja							Interpretasi
			2014	2015	2016	2017	2018	2019**)	2013	2014	2015	2016	2017	2018**)	2019	
4,03	Cakupan ketersediaan rumah layak huni															
4,04	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau															
4,05	Persentase pemukiman yang tertata	%									0,004	0,004	0,004	0,036	0,155	
4,06	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	%								0,0391	0,039	0,039	0,039	0,068	0,068	
4,07	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	%									6,81	6,81	6,81	3,87	3,87	
4,08	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan	%									na	na	0,0164	0,0164	0,0164	
4,09	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU															
5	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat															
5,01	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	%									0,45	0,47	0,52	0,52	0,86	
5,02	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)															
5,03	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	%									18,49	30,37	30,37	72,17	100,00	
5,04	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	menit									15	15	15	15	15	
5,05	Persentase Penegakan PERDA	%	55x	60x	65x	70x	75x	80x			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
6	**Sosial**															
6,01	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	%	100	100	150	200	200	250		73,54	50,62	99,36	11,95	19,65	44,58	
6,02	Persentase PMKS yang tertangani															
6,03	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%								2,13	1,61	2,50	0,14	11,45	44,58	
6,04	Persentase yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	%								2.000	86,60	87,50	2,30	0,60	1,74	
6,05	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial	%								100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
6,06	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	%									0	0	0	0	0	
6,07	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%								100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
6,08	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan mengunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	%								31,65	30,83	30,04	20,14	3,22	0,20	
6,09	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	%								43,86	43,86	65,79	65,79	65,79	66,23	
Layanan Urusan Wajib Non Dasar																

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/	Satuan	Target Kinerja						Capaian Kinerja							Interpretasi
			2014	2015	2016	2017	2018	2019**)	2013	2014	2015	2016	2017	2018**)	2019	
1	**Tenaga Kerja**															
1,01	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	kasus	2	2	2	2	2	2			na	na	na	na	na	
1,02	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	%									100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
1,03	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	%	1.000	1.500	2.000	22.000	2.500	2.500			4,7	14,34	8,44	16,15	17,08	
1,04	Keselamatan dan perlindungan	%	80%	90%	90%	95%	95%	95%			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
1,05	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	%									65,00	70,00	75,00	78,00	100,00	
1,06	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	%	3	3	2	2	1	1			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
1,07	Besaran Pemeriksaan Perusahaan	%									65,9	87,9	89,5	Provinsi	Provinsi	
1,08	Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan	%									100,00	100,00	100,00	100,00	Provinsi	
1,09	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%									27,00	50,00	27,00	79,60	79,27	
1,1	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat															
1,11	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	orang									35	47	41	47	48	
1,12	Rasio lulusan S1/S2/S3															
2	**Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak**															
2,01	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	14,8	15,2	15,5	16,3	16,8	17,6		3,409	3,27	3,36	3,37	2,21	2,56	
2,02	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	%								8,57	8,57	8,57	8,57	8,57	5,71	
2,03	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	%	9,6	9,8	10,2	10,5	11,2	11,9		10,66	9,81	9,90	10,10	6,26	7,15	
2,04	Rasio KDRT	angka rasio	0,12	0,1	0,09	0,07	0,05	0,02		0,001	0,001	0,009	0,001	0,001	0,0027	
2,05	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur															
2,06	Partisipasi angkatan kerja perempuan															
2,07	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	%									100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
2,08	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit															
2,09	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.															

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/	Satuan	Target Kinerja						Capaian Kinerja							Interpretasi
			2014	2015	2016	2017	2018	2019**)	2013	2014	2015	2016	2017	2018**)	2019	
2,1	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus- kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	%									Na	Na	Na	100,00	100,00	
2,11	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	%									71,42	70,00	32,00	54,84	100,00	
2,12	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%									Na	Na	3,03	6,25	40,70	
2,13	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%									100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
2,14	Rasio APM perempuan/laki-laki di SD	%									99,42	99,49	98,17	97,66	n.a	
2,15	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP															
2,16	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA															
2,17	Rasio APM perempuan/laki-laki di Perguruan Tinggi															
2,18	Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun															
2,19	Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sector nonpertanian															
3	**Pangan**															
3,01	Ketersediaan pangan utama	Kg								396,083	596,5	619,54	597,61	621,62	824,52	
3,02	Ketersediaan energi dan protein perkapita	Kkal/kapita/ hari									3.306	3.327	3.322	3.294	3.406	
		gram/kapita/ hari									68	69	69	69	69	
3,03	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan:															
	Pencapaian skor pola pangan harapan (skor)	skor	87,4	87.80	86,3	89,2					85,20	87,40	87,80	86,30	89,20	
	Ketersedian informasi pasokan, harga dan akses pangan (%)	%	100	100	100	100					100	100	100	100	100	
	Pengembangan Cadangan Pangan Daerah		32	44,68	44,68	11,59					26,66	32	44,68	44,68	11,59	
4	**Pertanahan**															
4,01	Persentase luas lahan bersertifikat	%								0,0078	5,15	5,22	44,34	48,28	99,63	
4,02	Penyelesaian kasus tanah Negara	%									45	50	33,33	100	66,67	
4,03	Penyelesaian izin lokasi	%								11	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
5	**Lingkungan Hidup**															
5,01	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota										Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
5,02	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota										Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
5,03	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah kabupaten/kota										Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
5,04	Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Air										26,55	26,56	26,65	26,65	26,65	

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/	Satuan	Target Kinerja						Capaian Kinerja							Interpretasi
			2014	2015	2016	2017	2018	2019**)	2013	2014	2015	2016	2017	2018**)	2019	
5,05	Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Udara															
5,06	Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Tutupan Lahan															
5,07	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota									1	38,45	39,65	39,5	39,22	37,89	
5,08	Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota															
5,09	Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA															
5,1	Terverifikasinya MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional															
5,11	Terverifikasi hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional															
5,12	Penetapan hak MHA															
5,13	Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan															
5,14	Terfasilitasi penyediaan sarana/prasarana															
5,15	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat															
5,16	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup															
5,17	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota.	%									100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
5,18	Timbulan sampah yang ditangani	%									76,03	80,50	83,75	83,75	67,30	
5,19	Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R	%									23,70	19,50	16,27	16,27	23,40	
5,2	Persentase cakupan area pelayanan	%									76,03	80,50	83,75	83,75	83,75	
5,21	Persentase jumlah sampah yang tertangani															
5,22	Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota															
5,23	Persentase izin pengelolaan sampah oleh swasta yang diterbitkan															
5,24	Persentase pengelolaan sampah oleh swasta yang taat terhadap peraturan perundang-undangan															
6	**Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**															
6,01	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	angka rasio	82,16	82,16	96,52	96,85	97,82	98,79		72,76	0,67	0,80	0,83	0,88	0,94	
6,02	Rasio bayi berakte kelahiran	angka rasio	75,19	75,18	75,19	75,18	75,19	75,19		67,32	0,62	0,61	0,72	0,81	0,86	
6,03	Rasio pasangan berakte nikah	angka rasio	3,303	3,392	3,879	4,189	4,524	5,866		9,45	0,09	0,10	0,12	0,15	0,23	

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/	Satuan	Target Kinerja						Capaian Kinerja							Interpretasi
			2014	2015	2016	2017	2018	2019**)	2013	2014	2015	2016	2017	2018**)	2019	
6,04	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi															
6,05	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK										Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	
6,06	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	%									66,88	80,29	82,54	87,82	94,22	
6,07	Cakupan penerbitan akta kelahiran															
7	**BPMD**															
7,01	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	%								94,20	94,20	95,65	95,65	95,65	97,58	
7,02	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	Satuan	1	1	2	2	3	3			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
7,03	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	Satuan	5	6	7	8	9	10			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
7,04	Persentase LSM aktif	%								2,08	2,08	16,07	20,34	20,34	20,34	
7,05	Persentase LPM Berprestasi	%	19	41	63	85	107	130			0	0	0	0	0	
7,06	Persentase PKK aktif	%	100	100	100	100	100	100		100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
7,07	Persentase Posyandu aktif	%									100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
7,08	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	%	10	12	14	16	18	20								
7,09	Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat	%	45	50	55	60	65	70								
8	**KB**															
8,01	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	%								1,06	0,90	0,87	0,86	0,82	0,82	
8,02	Total Fertility Rate (TFR)										2,67	2,83	2,86	2,96	2,96	
8,03	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	%									8,82	8,82	8,82	8,82	8,82	
8,04	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	%									0	0	0	0	0	
8,05	Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk															
8,06	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan															
8,07	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan															
8,08	Rata-rata jumlah anak per keluarga	Orang	3,2	3,1	3,0	2,8	2,7	2,4			2,9	2,8	2,7	2,4	2,4	
8,09	Ratio Akseptor KB	%	0,57	0,56	0,56	0,55	0,54	1,54		65,98	82,85	84,11	76,13	76,22	75,85	
8,1	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49	%									67,53	63,98	64,22	64,96	66,18	
8,11	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19)															

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/	Satuan	Target Kinerja						Capaian Kinerja							Interpretasi
			2014	2015	2016	2017	2018	2019**)	2013	2014	2015	2016	2017	2018**)	2019	
8,12	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	%								2.949	2,26	1,97	1,20	0,98	1,06	
8,13	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	%								6.321	13,39	14,01	15,54	14,99	14,27	
8,14	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%									17,43	17,13	20,30	22,10	24,50	
8,15	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	%									81,51	76,06	84,36	85,23	84,25	
8,16	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	%									62,32	56,01	57,85	62,20	61,18	
8,17	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	%									26,82	48,41	50,87	51,44	50,83	
8,18	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	%									15,83	42,20	41,82	35,63	37,08	
8,19	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	%									9,09	9,09	9,09	9,09	9,09	
8,2	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa	%									113,64	113,64	113,64	154,55	154,55	
8,21	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	%									100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
8,22	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri															
8,23	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	%									100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
8,24	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	%									105,15	110,00	115,59	125,22	110,08	
8,25	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	%									25,00	49,41	43,75	43,75	43,75	
8,26	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa	%									96,19	95,88	95,65	100,00	100,00	
8,27	Persentase remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS)															
8,28	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga															
8,29	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan danpembinaan tumbuh kembang anak															
8,3	Rata-rata usia kawin pertama wanita															
8,31	Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes															
9	**Perhubungan**															
9,01	Jumlah arus penumpang angkutan umum	Orang	412	470	525	600	680	750		390,118	397.287	484.840	544.607	411.055	259.201	

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/	Satuan	Target Kinerja						Capaian Kinerja							Interpretasi
			2014	2015	2016	2017	2018	2019**)	2013	2014	2015	2016	2017	2018**)	2019	
9,02	Rasio ijin trayek	angka rasio	30	40	55	70	85	100		0,7	0,0011	0,0015	0,0012	0,0013	0,0014	
9,03	Jumlah uji kir angkutan umum									1,845	1.975	1.989	1.884	1.878	1,926	
9,04	Jumlah Pelabuhan Laut dan Terminal	Satuan	01/09/2001	01/10/2001	01/11/2001	01/12/2001	13/01/2001	14/01/2001		3	3	3	2	2	1	
9,05	Persentase layanan angkutan darat	%	800	1000	1200	1400	2000	22000		01:15	7,83	7,34	7,56	8,04	21,30	
9,06	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	%	1200	1400	1600	1800	2000	2200		5,70	4,80	9,70	32,20	35,60	45,35	
9,07	Pemasangan Rambu-rambu	%	2 Pasang	3 Pasang	4 Pasang	6 Pasang	8 Pasang	10 Pasang		2,298	3,52	6,83	9,7	14,43	19,56	
9,08	Rasio panjang jalan perjumlah kendaraan	angka rasio	5	5	5	5	5	5		01:13	0,066	0,059	0,054	0,049	0,045	
9,09	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum	Orang	336	450	500	650	800	950		390,118	396.457	476.539	499.782	346.014	212.582	
9,1	Jumlah orang/barang melalui dermaga dan terminal per tahun	Orang									397.287	484.840	544.607	411.055	259.783	
10	**Kominfo**															
10,01	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan															
10,02	Cakupan Layanan Telekomunikasi															
10,03	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon															
10,04	Proporsi rumah tangga dengan akses internet										-	-	-	-	-	
10,05	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi															
11	**Koperasi**															
11,01	Persentase koperasi aktif	%	7,28	9,04	9,95	11,32	9,09	5		49,76	48,81	49,95	30,71	44,10	44,60	
11,02	Persentase UKM non BPR/LKM aktif															
11,03	Persentase BPR/LKM aktif															
11,04	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	%	32,195	32,791	33,015	33,975	34,217	35,178		99,76	90,10	85,00	86,00	86,50	87,07	
12	**Penanaman Modal**															
12,01	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Satuan	9	10	10	10	12	12			18	19	12	13	13	
12,02	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Miliar Rp									567,97	30,45	22,39	16,69	16,69	
12,03	Rasio daya serap tenaga kerja	angka rasio	16,374	16,381	16,381	16,381	16,5	16,5			27,10	15,01	22,01	20,01	25,48	
12,04	Kenaikan/penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)															
13	**Kepemudaan dan Olah Raga**															
13,01	Persentase organisasi pemuda yang aktif															
13,02	Persentase wirausaha muda															
13,03	Cakupan pembinaan olahraga	%								4	2	2	5	3	3	
13,04	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	%									4	4	7	10	15	
13,05	Cakupan pembinaan atlet muda	%									4	4	7	10	15	
13,06	Jumlah atlet berprestasi	Orang									8	9	9	11	11	
13,07	Jumlah prestasi olahraga									53	8	9	9	11	11	

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/	Satuan	Target Kinerja						Capaian Kinerja							Interpretasi
			2014	2015	2016	2017	2018	2019**)	2013	2014	2015	2016	2017	2018**)	2019	
14	**Statistik**															
14,01	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi									Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
14,02	Buku "kabupaten dalam angka"		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
14,03	Buku "PDRB"		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
15	**Persandian**															
15,01	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunkasi Perangkat Daerah	%									8,57	8,57	8,57	11,43	17,14	
16	**Kebudayaan**															
16,01	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Satuan	5	5	6	6	7	7		3	4	6	6	7	8	
16,02	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Satuan	2	2	3	4	4	5		10	3	3	4	5	7	
16,03	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	Satuan									4	6	6	7	8	
16,04	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	Satuan									4	6	6	7	8	
17	**Perpustakaan**															
17,01	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Orang	26,745	28,745	30,745	32,745	34,745	36,745		1.282.184	1.474.928	1.799.408	1.890.890	1.905.604	2.025.625	
17,02	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Buku	25,085	26,558	28,058	29,558	31,058	32,558		44.789	45.830	47.674	48.912	49.746	52.067	
17,03	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	angka rasio								0,00146	0,00146	0,00147	0,00147	0,00146	0,00146	
17,04	Jumlah rata-rata pengunjung pepustakaan/tahun															
17,05	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan															
17,06	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	Orang								6	6	6	6	6	19	
18	**Kearsipan**															
18,01	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	%								13,7	25,45	45,12	52,45	75,15	85,12	
18,02	Peningkatan SDM pengelola kearsipan															
Layanan Urusan Pilihan																
1	**Pariwisata**															
1,01	Kunjungan wisata															
1,02	Lama kunjungan Wisata															
1,03	PAD sektor pariwisata	%								0,00078	0,06	0,05	0,05	0,14	0,07	
2	**Pertanian**															
2,01	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	%	50,60	50,90	51,30	51,50	51,70	51,90		53,22	53,55	54,30	53,50	53,88	52,38	
2,02	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB	%									9,58	9,11	8,30	7,79	7,40	
2,03	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	%									21,06	20,82	20,06	19,97	18,49	

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/	Satuan	Target Kinerja						Capaian Kinerja							Interpretasi
			2014	2015	2016	2017	2018	2019**)	2013	2014	2015	2016	2017	2018**)	2019	
2,04	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB															
2,05	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	%	6,20	6,51	6,83	7,17	7,53	7,60			4,89	4,49	4,45	4,97	11,67	
2,06	Cakupan bina kelompok petani	%									13,35	7,79	6,25	7,35	5,75	
3	**Kehutanan**															
3,01	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis															
3,02	Kerusakan Kawasan Hutan															
3,03	Rasio luas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan															
4	**Energi Dan Sumber Daya Mineral**															
4,01	Persentase rumah tangga pengguna listrik															
4,02	Rasio ketersediaan daya listrik															
4,03	Persentase pertambangan tanpa ijin															
5	Perdagangan															
5,01	Ekspor Bersih Perdagangan															
5,02	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal															
6	**Perindustrian**															
6,01	Cakupan bina kelompok pengrajin	%	29 klp	30 klp	31 klp	33 klp	34 klp	35 klp			Na	Na	Na	35	Na	
7	**Transmigrasi**															
7,01	Persentase transmigran swakarsa															
8	**Kelautan dan Perikanan**															
8,01	Produksi perikanan	%	574.654	602.770	632.254	663.206	695.698	729.809			111,66	86,02	98,97	91,45	98,65	
8,02	Konsumsi ikan	%	47,85	48,32	48,81	49,29	49,79	50,29			98,44	102,09	104,44	106,53	107,42	
8,03	Cakupan bina kelompok nelayan	%	26	26	26	26	26	26			58,82	69,61	70,09	71,12	72,2	
8,04	Produksi perikanan kelompok nelayan	%									11,98	11,00	10,83	10,68	65,00	
8,05	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	%									Na	Na	Na	Na	Na	
8,06	Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial															
8,07	Nilai tukar nelayan															
Penunjang Urusan																
1	**Perencanaan Pembangunan**															
1,01	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada					Ada	Ada	Ada	
1,02	Tersedianya Dokumen Perencanaan :RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA												Ada	Ada	Ada	

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/	Satuan	Target Kinerja						Capaian Kinerja							Interpretasi
			2014	2015	2016	2017	2018	2019**)	2013	2014	2015	2016	2017	2018**)	2019	
1,03	Tersedianya Dokumen Perencanaan :RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada					Ada	Ada	Ada	
1,04	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA												Ada	Ada	Ada	
1,05	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	%	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada					53,69	100,00	100,00	
1,06	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	%											53,69	100,00	100,00	
1,07	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	%											53,69	100,00	100,00	
2	**Keuangan**															
2,01	Opini BPK terhadap laporan keuangan	opini								WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
2,02	Persentase SILPA									7,74						
2,03	Persentase SILPA terhadap APBD	%								7,74	11,67	3,95	2,55	1,31	2,18	
2,04	Persentase Program/kegiatan yang tidak terlaksana	%								0,18	0,35	0,54	0,20	0,20	0,20	
2,05	Persentase belanja pendidikan (20%)	%								41,8	36,92	28,58	25,76	26,16	27,13	
2,06	Persentase belanja kesehatan (10%)	%								12,92	11,20	13,46	13,41	14,54	14,71	
2,07	Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung :	%									47,36	50,83	43,03	41,73	45,53	
		%									52,64	49,17	56,97	58,27	54,47	
2,08	Bagi hasil kabupaten/kota dan desa	%								3,50	0,33	0,34	0,20	0,22	0,20	
2,09	Penetapan APBD										Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	
3	**Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan**															
3,01	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	JP								6,221	3,23	2,41	2,73	1,97	1,70	
3,02	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%									1,33	1,10	1,38	0,78	0,54	
3,03	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	%								15,58	6,51	17,09	12,51	13,21	14,35	
3,04	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah									35	34	35	40	29	38	
3,05	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah									3,864						
3,06	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah										Na	Na	Na	Na	215	
4	**Penelitian dan pengembangan**															
4,01	Persentase implementasi rencana kelitbangan.															
4,02	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan.															
	Penerapan SIDa															
4,03	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.															
4,04	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah.															

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/	Satuan	Target Kinerja						Capaian Kinerja							Interpretasi
			2014	2015	2016	2017	2018	2019**)	2013	2014	2015	2016	2017	2018**)	2019	
5	**Pengawasan**															
5,01	Persentase tindak lanjut temuan	%								87,60	86,20	70,17	92,71	69,50	94,46	
5,02	Persentase pelanggaran pegawai	%								0	75,00	85,00	90,00	100,00	100,00	
5,03	Jumlah temuan BPK									21	20	15	11	19	12	
6	**Sekretariat Dewan**															
6,01	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota										Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
6,02	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakanFungsi Pengawasan,Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)										Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
6,03	Terintegrasi program- program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran kedalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD										Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	

BAB III
GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Gambaran Keuangan Daerah bertujuan untuk mendeskripsikan proyeksi kerangka pendanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam horizon waktu perencanaan jangka menengah daerah dengan pertimbangan utama kondisi kinerja keuangan daerah yang telah dihasilkan selama ini, baik itu aspek realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun analisis terhadap perkembangan neraca daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 memberikan pengertian keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Sedangkan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungiawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, terdapat dua kata kunci utama dalam memahami keuangan daerah, yaitu hak dan kewajiban. Yang dimaksud dengan hak adalah hak daerah untuk menggali sumber-sumber pendapatan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang telah ditetapkan meliputi pungutan pajak, retribusi daerah, dan sumber-sumber pendapatan lainnya. Sementara kewajiban adalah kewajiban daerah untuk membelanjakan uang untuk tujuan kesejahteraan masyarakat. Dengan pengertian tersebut, maka dalam setiap periode pemerintahan, analisis keuangan daerah penting untuk dilakukan. Keuangan daerah merupakan motor penggerak percepatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.

Analisis keuangan daerah dimaksudkan untuk memperoleh gambaran tentang kemampuan fiskal pemerintah daerah meliputi aspek pendapatan daerah, aspek belanja daerah, dan aspek pembiayaan daerah. Untuk memahami kinerja keuangan daerah dalam suatu periode tertentu, maka penting untuk menganalisis struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan laporan Neraca Daerah. Dengan demikian, APBD merupakan cerminan dari analisis keuangan daerah. Untuk itu, substansi mendasar yang dibahas dalam bab ini adalah: (i) Analisis kinerja keuangan daerah lima tahun sebelumnya, (ii) Analisis kebijakan keuangan daerah masa lalu. Perhitungan kerangka pendanaan dimaksudkan untuk memperoleh gambaran kemampuan fiskal riil dalam mendanai program-program prioritas pembangunan dalam lima tahun ke depan yang akan diuraikan pada bab berikutnya.

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

Keuangan daerah merupakan faktor strategis yang turut menentukan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat kemampuannya akan mencerminkan daya dukung manajemen pemerintahan daerah terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawabnya. Guna memahami tingkat kemampuan keuangan daerah, maka perlu dicermati kondisi kinerja keuangan daerah, baik kinerja keuangan masa lalu maupun kebijakan yang melandasi pengelolaannya.

Analisis pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Mengingat bahwa pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam APBD maka analisis pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan laporan keuangan daerah pada umumnya, sehingga dibutuhkan pemahaman yang baik tentang realisasi kinerja keuangan daerah sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebelumnya.

Pendapatan daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah.

Belanja daerah merupakan kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih, yang meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Daerah.

Pembiayaan daerah yaitu semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

Guna mengetahui perkembangan kinerja keuangan pemerintah daerah di masa lalu, tidak terlepas dari batasan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020. Sesuai ketentuan tersebut, kinerja keuangan pemerintah daerah akan berkaitan dengan aspek kinerja pelaksanaan APBD serta aspek kondisi neraca daerahnya. Guna melihat kinerja pelaksanaan APBD, tidak terlepas dari struktur pendapatan daerah dan akurasi belanjanya. Sementara itu neraca daerah akan mencerminkan perkembangan dari kondisi aset pemerintah daerah, kondisi kewajiban pemerintah daerah serta kondisi ekuitas dana yang tersedia. Kinerja

pelaksanaan APBD Kabupaten Luwu periode tahun 2016-2020 secara umum dapat dilihat dalam uraian berikut ini.

Tabel 3.1.

Rata-rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

Kabupaten Luwu, Tahun 2016-2020

(Dalam jutaan rupiah)

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
1	**Pendapatan**	**1.397.284,61**	**1.292.583,08**	**1.323.121,88**	**1.614.765,02**	**1.452.458,83**	**1,21**
1.1	**Pendapatan Asli Daerah**	**95.564,29**	**109.172,77**	**106.865,74**	**251.302,54**	**112.603,49**	**4,39**
1.1.1.	Pajak Daerah	18.990,36	24.970,80	23.225,73	22.865,00	21.370,00	4,1
1.1.2.	Retribusi Daerah	43.080,54	72.814,49	82.620,82	96.100,00	87.500,00	22,46
1.1.3.	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang dipisahkan	49.917,24	58.551,48	51.463,03	54.622,62	52.201,62	1,72
1.1.4.	Lain-lain PAD yang Sah	28.501,67	71.065,38	70.231,62	77.714,92	77.263,34	39,56
1.2	**Dana Perimbangan**	**994.067,31**	**905.261,28**	**922.578,72**	**1.051.464,39**	**949.583,54**	**-0,68**
1.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak/bagi hasil bukan pajak	24.007,46	17.232,16	15.973,08	17.691,27	16.348,91	-8,09
1.2.2.	Dana Alokasi Umum	689.096,79	676.991,58	680.212,38	718.676,59	659.004,99	-0,98
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	280.963,06	211.037,55	226.393,26	315.096,53	274.229,64	2,15

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
1.3	**Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**	**307.653,01**	**278.149,02**	**293.677,43**	**311.998,09**	**390.271,80**	**6,83**
1.3.1	Hibah	6.504,63	9.647,77	51.717,05	54.070,00	83.549,73	135,86
1.3.2.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	45.089,35	43.883,98	42.812,90	55.034,00	52.002,65	4,48
1.3.3.	Dana Penyesuaian dan OtoNomormi khusus	241.007,23	218.126,53	192.040,06	195.242,49	220.436,24	-1,72
1.3.4.	Bantuan keuangan dari provinsi pemerintah daerah lainnya	15.051,80	6.490,75	7.107,41	7.651,60	34.283,19	77,08
1.3.5	Pendapatan Lainnya	-	-	-	-	-	-
2	**Belanja**	**1.481.088,37**	**1.283.421,69**	**1.333.858,53**	**1.219.599,86**	**1.225.939,13**	**-4,37**
2.1	**Belanja Tidak Langsung**	**728.180,28**	**731.112,09**	**777.190,41**	**788.034,66**	**805.855,45**	**2,59**
2.1.1	Belanja Pegawai	517.105,81	472.020,21	489.997,52	476.578,73	486.652,95	-1,38
2.1.2	Belanja Hibah	6.170,30	21.977,27	45.452,08	36.310,63	45.566,56	92,09
2.1.3.	Belanja Bantuan Sosial	226,65	371,75	382,70	1.081,00	1.133,00	63,56

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
2.1.4.	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten /Kota dan Pemerintah Desa	5.061,16	2.586,25	2.881,32	3.247,50	2.997,50	-8,12
2.1.5.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/kabupaten /kota dan pemerintah desa	199.423,57	233.989,95	238.416,52	270.266,80	260.505,45	7,24
2.1.6.	Belanja tidak terduga	192,80	166,67	60,27	550,00	9.000,00	567,89
2.2	**Belanja Langsung**	**752.908,09**	**552.309,59**	**556.668,12**	**705.079,50**	**683.586,62**	**-0,56**
2.2.1	Belanja Pegawai	17.647,72	19.390,79	10.344,14	43.528,70	31.478,41	64,09
2.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	349.739,39	311.756,29	346.509,58	354.288,61	355.084,55	0,69
2.2.3.	Belanja Modal	385.520,98	221.162,52	199.814,40	307.262,19	297.023,67	-0,46
3	**Pembiayaan Daerah**	**145.477,65**	**25.111,52**	**28.736,15**	**13.999,51**	**36.983,23**	**11,15**
3.1.	Penerimanaan Pembiayaan	153.171,14	61.676,00	34.253,77	17.999,51	39.983,23	-7,38
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan	7.693,49	36.564,48	5.517,62	4.000,00	3.000,00	59,46

Sumber: BPKAD Kabupaten Luwu, Tahun 2020

3.1.1.1 Pendapatan Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan daerah merupakan komponen APBD yang memiliki peranan penting dalam menunjang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan daerah.

Guna mendorong peningkatan Pendapatan Daerah pemerintah telah melakukan berbagai upaya. Selama periode 2016-2020 pemerintah daerah telah menetapkan arah kebijakan pengelolaan pendapatan daerah, dimana arah kebijakan tersebut meliputi:

a. Intensifikasi dan ekstensifikasi penggalian sumber-sumber pendapatan daerah, terutama melalui usaha daerah dan pendayagunaan asset daerah namun dengan tetap menjaga agar peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah tidak menambah beban masyarakat dan tidak menimbulkan distrorsi ekonomi baik angka pendek maupun jangka panjang;
b. Peningkatan kemampuan dan optimalisasi organisasi di bidang pendapatan atau organisasi penghasil, antara lain dengan memberikan kewenangan yang lebih luas dalam mengoptimalkan perolehan pendapatan daerah;
c. Perubahan manajemen keuangan dengan memberikan peran lebih pada kas umum daerah, sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas yang dimiliki;
d. Sosialisasi melalui pemanfaatan berbagai media komunikasi dalam rangka intensifikasi pungutan pajak daerah, retribusi daerah dan penerimaan lain-lain yang sah;
e. Peningkatan koordinasi dengan segenap instansi dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah baik ditingkat Daerah dan Provinsi Sulawesi Selatan maupun Pemerintah Pusat.

Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu tahun 2016-2020 mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar (0,15%). Pertumbuhan tertinggi adalah pada tahun 2019 sebesar 11,37% sedangkan terendah pada tahun 2017 sebesar (7,49%), hal ini menunjukkan bahwa terjadi surplus pada pendapatan daerah dari yang ditargetkan. Capaian target pendapatan daerah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2016-2020 selengkapnya terlihat pada tabel berikut.

Sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Meskipun mengalami fluktuasi selama periode tahun 2016-2020, secara keseluruhan ketiga sumber pendapatan tersebut mengalami pertumbuhan.

Tabel 3.2.
Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu, Tahun 2016-2020

(Dalam jutaan rupiah)

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
1	**Pendapatan**	**1.397.284,61**	**1.292.583,08**	**1.323.121,88**	**1.614.765,02**	**1.452.458,83**	**1,21**
1.1	**Pendapatan Asli Daerah**	**95.564,29**	**109.172,77**	**106.865,74**	**251.302,54**	**112.603,49**	**4,39**
1.1.1.	Pajak Daerah	18.990,36	24.970,80	23.225,73	22.865,00	21.370,00	4,1
1.1.2.	Retribusi Daerah	43.080,54	7.281,44	8.262,08	9.610,00	8.750,00	-15,57
1.1.3.	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang dipisahkan	49.917,24	58.551,48	51.463,03	54.622,62	52.201,62	1,72
1.1.4.	Lain-lain PAD yang Sah	28.501,67	71.065,38	70.231,62	77.714,92	77.263,34	39,56
1.2	**Dana Perimbangan**	**994.067,31**	**905.261,28**	**922.578,72**	**1.051.464,39**	**949.583,54**	**-0,68**
1.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak/bagi hasil bukan pajak	24.007,46	17.232,16	15.973,08	17.691,27	16.348,91	-8,09
1.2.2.	Dana Alokasi Umum	689.096,79	676.991,58	680.212,38	718.676,59	659.004,99	-0,98
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	280.963,06	211.037,55	226.393,26	315.096,53	274.229,64	2,15

1.3	**Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**	**307.653,01**	**278.149,02**	**293.677,43**	**311.998,09**	**390.271,80**	**6,83**
1.3.1	Hibah	6.504,63	9.647,77	51.717,05	54.070,00	83.549,73	135,86
1.3.2.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	45.089,35	43.883,98	42.812,90	55.034,00	52.002,65	4,48
1.3.3.	Dana Penyesuaian dan OtoNomormi khusus	241.007,23	218.126,53	192.040,06	195.242,49	220.436,24	-1,72
1.3.4.	Bantuan keuangan dari provinsi pemerintah daerah lainnya	15.051,80	6.490,75	7.107,41	7.651,60	34.283,19	77,08
1.3.5	Pendapatan Lainnya	-	-	-	-	-	-

Sumber: BPKAD Kabupaten Luwu, Tahun 2020

Sumber pendapatan dengan pertumbuhan terbesar adalah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yaitu rata-rata 6,83%, diikuti PAD dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 4,39%, sedangkan dana perimbangan pertumbuhan sebesar (0,68%). Namun demikian, meskipun pertumbuhannya paling kecil, dana perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang paling besar, diikuti Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dan kemudian PAD.

Pendapatan asli daerah mengalami fluktuasi dari tahun 2016-2020. PAD tahun 2016 senilai Rp.95,564 Milyar meningkat menjadi Rp.109,17 Milyar di tahun 2017, sedangkan pada tahun 2018 mengalami penurunan senilai 106,17 Milyar. Kemudian meningkat kembali menjadi Rp.113,77 Milyar pada tahun 2019, dan penurunan kembali terjadi pada tahun 2020 senilai Rp.112,60 Milyar. Hal ini dikarenakan adanya pengalihan belanja pemerintah (*refocusing*) untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), tingkat komsumsi masyarakat yang rendah dan sektor usaha yang belum bergerak ke arah positif.

Dana perimbangan mengalami fluktuasi dari tahun 2016-2020, tahun 2016 mengalami penurunan dari Rp.994,07 Milyar menjadi Rp.905,26 Milyar pada tahun 2017 kemudian mengalami peningkatan yang signifikan menjadi Rp.1.051,46 Triliun rupiah pada tahun 2019. Dan terjadi lagi penurunan pada tahun 2020 senilai Rp.949,58 Miliar. Turunnya realisasi dana perimbangan tersebut disebabkan karena realisasi Dana Alokasi Umum lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun 2019, sama halnya dengan Dana Alokasi Khusus yang mengalami penurunan tahun 2020.

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah mengalami trend peningkatan dari tahun 2016-2020. Walaupun pada tahun 2016 terjadi penurunan dari Rp.307,65 Milyar menjadi Rp.278,15 Milyar di tahun 2017. Tetapi, pada tahun 2018-2020 terus mengalami peningkatan menjadi Rp.390,27 Milyar. Peningkatan lain-lain pendapatan daerah yang sah disebabkan oleh adanya pertumbuhan positif dari komponen hibah dan bantuan keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya.

Sepanjang periode tahun 2016-2020, proporsi masing-masing komponen pendapatan daerah terhadap total pendapatan daerah mengalami fluktuasi, sebagaimana terlihat pada gambar berikut.

Grafik 3.1.
Proporsi Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu
Tahun Anggaran 2016-2020

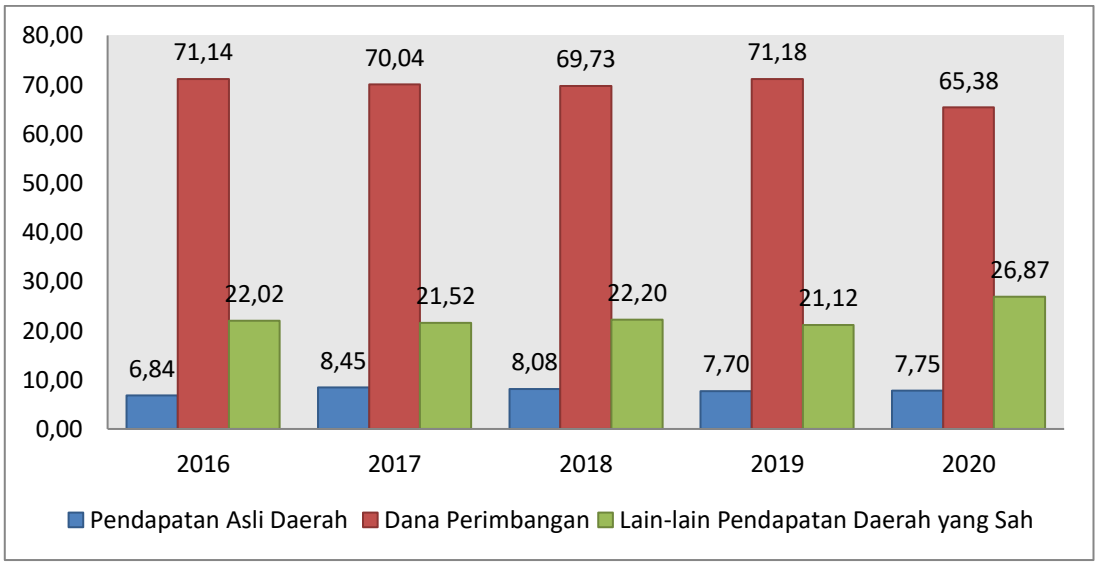

Sumber: BPKAD Kabupaten Luwu, Tahun 2020.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa meskipun proporsi PAD terhadap pendapatan daerah mengalami fluktuasi, namun jika dibandingkan dengan tahun 2016, proporsi PAD terhadap pendapatan daerah pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 0,91 poin. Demikian halnya dengan Lain-lain pendapatan daerah yang sah, juga mengalami peningkatan sebesar 4,85 poin. Peningkatan proporsi kedua sumber pendapatan tersebut, mengakibatkan proporsi Dana Perimbangan terhadap pendapatan daerah mengalami penurunan dari 71,14% pada tahun 2016 menjadi 65,38% pada tahun 2020 atau turun sebesar 5,77 poin. Penurunan Dana Perimbangan disebabkan oleh kontribusi penurunan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 69,40% dan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 28,88%.

Analisis lebih lanjut tentang pendapatan daerah Kabupaten Luwu periode tahun 2014-2018 adalah sebagaimana diuraikan di bawah ini.

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bersumber dari 4 (empat) komponen, yaitu: (a) Pajak Daerah, (b) Retribusi Daerah, (c) Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan (d) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Tabel 3.3. menunjukkan PAD Kabupaten Luwu periode tahun 2016-2020 berdasarkan sumber pendapatan. Nilai PAD Kabupaten Luwu

selama periode 2016-2020 mengalami peningkatan dari Rp95,56 milyar pada tahun 2016 menjadi Rp112,60 milyar pada tahun 2020 atau meningkat sejumlah Rp17,04 milyar. PAD pada tahun 2019 yang mencapai Rp115,65 merupakan jumlah PAD yang paling tinggi selama periode 2016-2020.

Tabel 3.3.
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Luwu
Tahun 2016-2020

(Dalam jutaan rupiah)

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rerata Pertumbuhan (%)
Pajak Daerah	18.990,36	24.970,80	23.225,73	22.865,00	21.370,00	**2,67**
Retribusi Daerah	43.080,54	7.281,45	8.262,08	9.610,00	8.750,00	**-41,92**
Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang dipisahkan	4.991,72	5.855,15	5.146,30	5.462,26	5.220,16	**1,72**
Lain-lain PAD yang Sah	28.501,67	71.065,38	70.231,62	77.714,91	77.263,34	**39,56**
Total	**95.564,29**	**109.172,77**	**106.865,74**	**115.652,17**	**112.603,5**	
Pertumbuhan (%)		**14,24**	**-2,11**	**8,22**	**-2,64**	**4,43**

Sumber: BPKAD Kabupaten Luwu, Tahun 2020

Berdasarkan data diatas terlihat bahwa perkembangan pajak daerah pada grafik 3.2. mengalami trend penurunan dilihat dari tahun 2017-2020 senilai 24.970,80 juta rupiah menjadi 21.370 juta rupiah pada tahun 2020. Penurunan yang tejadi di Kab, Luwu. Penurunan ini disebabkan karena seluruh komponen mengalami penurunan dari periode sebelumnya dan disebabkan dengan adanya pandemi virus corona atau Covid-19 penerimaan pendapatan asli daerah juga harus terkoreksi cukup dalam.

Retribusi daerah mengalami fluktuasi, tahun 2016 mengalami penurunan signifikan dari Rp.43,08 Milyar menjadi Rp.7,28 Milyar pada tahun 2017 kemudian mengalami peningkatan menjadi Rp.9,61 Milyar pada tahun 2019. Sedangkan tahun 2020 mengalami penurunan menjadi Rp.8,75 Milyar. Penurunan yang terjadi pada retribusi daerah karena seluruh komponen retribusi daerah mengalami pertumbuhan negatif dan yang paling berkontribusi negative yaitu retribusi jasa usaha.

Hasil pengelolaan keuangan yang dipisahkan mengalami fluktuasi sejak tahun 2016-2020. Tahun 2016 senilai Rp.4,99 Milyar meningkat menjadi Rp.5,88 Milyar tahun 2017. Sedangkan tahun 2018 mengalami penurunan yaitu senilai Rp.5,15 Milyar. Kemudian pada tahun 2019

kembali mengalami peningkatan yaitu senilai Rp.5,46 Milyar dan kembali menurun pada tahun 2020 senilai Rp.5,22 Milyar.

Grafik 3.2.
Perkembangan Komponen PAD Kab. Luwu
Tahun 2016-2020

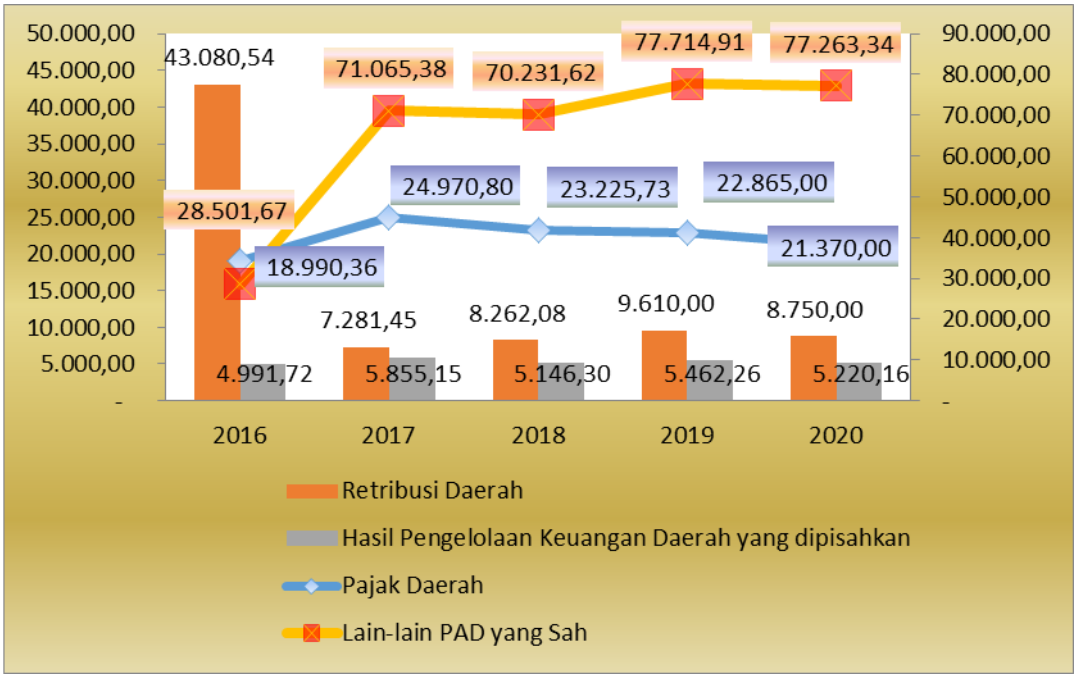

Sumber: BPKAD Kabupaten Luwu, Tahun 2020

Komponen Lain-lain PAD yang sah juga mengalami fluktuasi sejak tahun 2016-2020. Tahun 2016 senilai Rp.28,50 Milyar meningkat menjadi Rp.71,06 tahun 2017. Sedangkan tahun 2018 mengalami penurunan yaitu senilai Rp.70,23 Milyar. Kemudian pada tahun 2019 kembali mengalami peningkatan yaitu senilai Rp.77,71 Milyar dan kembali menurun pada tahun 2020 seniali Rp.77,26 Milyar. Penurunan yang tejadi pada tahun 2020 disebabkan adanya ketidakstabilan perekonomian daerah akibat pandemi Covid-19.

Apabila dilihat dari proporsi masing-masing komponen terhadap total PAD, terjadi perubahan yang signifikan antara retribusi daerah dengan Lain-lain PAD yang sah. Retribusi daerah memberikan kontribusi paling tinggi terhadap PAD pada tahun 2016 dengan kontribusi masing-masing sebesar 45,08%, tetapi terjadi penurunan yang signifikan pada tahun 2017-2020 sebesar 7,77%. Sedangkan pada tahun 2017-2018, kontribusi terbesar diberikan oleh Lain-lain PAD yang sah yaitu masing-masing sebesar 22,87%, 65,09%, 65,72%, 67,20% dan 68,62. Komponen PAD yang paling rendah kontribusinya selama periode tersebut adalah

hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan, yaitu rata-rata 4,95%. Sedangkan pajak daerah berkontribusi rata-rata sebesar 20,65%. Proporsi komponen PAD terhadap PAD sebagaimana terlihat pada gamber berikut.

Grafik 3.3.
Proporsi Komponen PAD terhadap PAD
Tahun 2016-2020

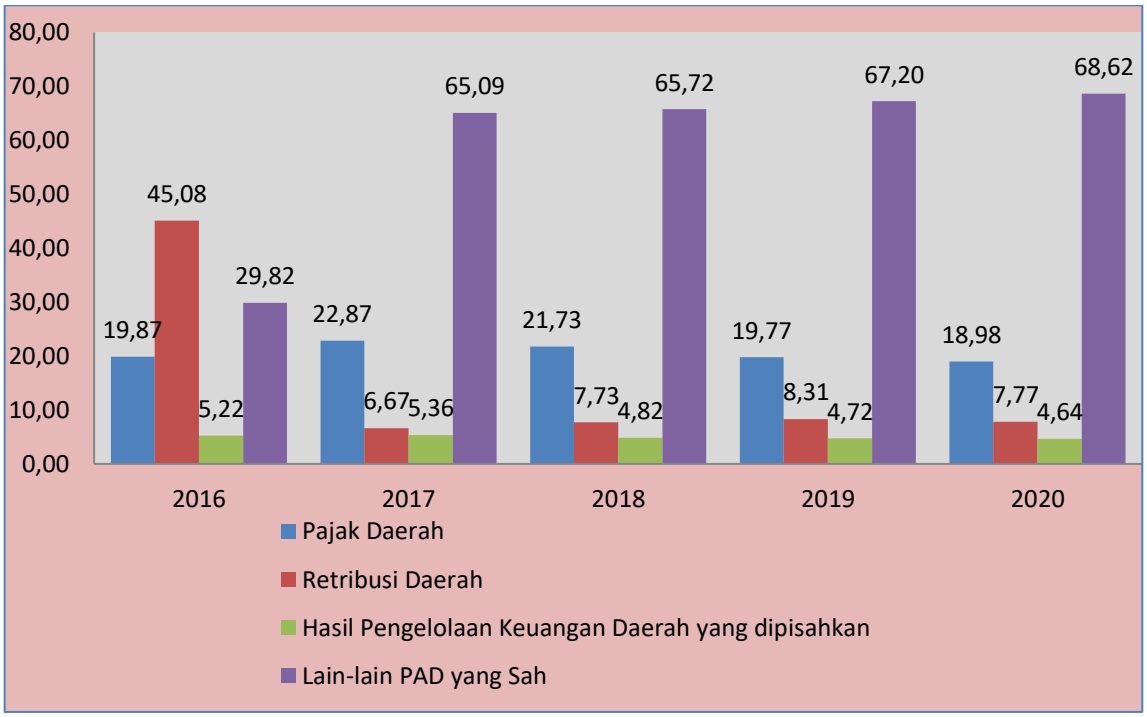

Sumber: BPKAD Kabupaten Luwu, Tahun 2020

Analisis lebih lanjut tentang PAD Kabupaten Luwu periode tahun 2016-2020 adalah sebagaimana diuraikan di bawah ini.

a. Pajak Daerah

Selama periode tahun 2016-2020, pajak daerah di Kabupaten Luwu berkembang positif dan tumbuh dengan rata-rata sebesar 6,71%, dengan nilai Rp.18.99 milyar pada tahun 2016 meningkat menjadi 23.59 milyar pada tahun 2020. Total pendapatan daerah dari pajak daerah selama periode tersebut adalah sejumlah 91,23 milyar.

Jenis-jenis Pajak Daerah di Kabupaten Luwu terdiri dari: 1) Pajak Hotel, 2) Pajak Restoran, 3) Pajak Hiburan, 4) Pajak Reklame, 5) Pajak Penerangan Jalan, 6) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, 7) Pajak Air Bawah Tanah, 8) Pajak Sarang Burung

Walet, 9) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan 10) Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Selama periode tahun 2016-2020, terdapat 6 komponen pajak daerah yang mengalami pertumbuhan, sedangkan sisanya mengalami penurunan yaitu pajak hotel,pajak restoran, pajak air bawah tanah dan pajak pengambilan bahan galian golongan C. Sumber pajak dengan rata-rata pertumbuhan tertinggi selama periode tersebut adalah Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang mencapai 88,51%, diikuti pajak sarang burung walet yaitu rata-rata tumbuh sebesar 35,82%, dan pajak hiburan yang tumbuh rata-rata 34,51%.

Dapat kita lihat pada tabel 3.4. bahwa pajak sarang burung walet dimulai pada tahun 2018 namun memiliki trend peningkatan dari tahun 2018 sebesar Rp.1,90 juta menjadi Rp.3,95 Juta pada tahun 2020. Sedangkan pajak hotel mengalami penurunan dari tahun 2016 sebesar Rp.94,25 Juta menjadi Rp.59,62 Juta pada tahun 2020 sehingga mengalami rata-rata pertumbuhan yang negative sebesar -6,17%. Selain itu pajak restoran juga mengalami pertumbuhan negative sebesar (4,19%).

Tabel 3.4.
Realisasi PAD dari Pajak Daerah
Tahun 2016-2020

(Dalam jutaan rupiah

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rerata Pertumbuhan (%)
1	Pajak Hotel	94,25	115,48	107,79	116,94	59,620	**-6,17**
2	Pajak Restoran	1.975,57	1.959,56	2.065,63	2.116,96	1.620,64	**-4,09**
3	Pajak Hiburan	15,05	8,75	11,71	37,50	9,68	**34,51**
4	Pajak Reklame	535,12	658,85	632,70	641,98	586,41	**2,99**
5	Pajak Penerangan Jalan	6.806,00	8.704,67	10.309,06	10.560,17	10.686,18	**12,49**
6	Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	3.336,80	3.909,61	3.192,28	4.089,84	2.675,56	**-1,91**
7	Pajak Air Bawah Tanah	16,28	18,15	19,59	18,64	14,46	**-1,96**
8	Pajak Sarang Burung Walet	-	-	1,90	5,03	3,95	**35,82**
9	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	5.389,78	5.552,04	5.401,74	6.488,98	6.084,24	**3,55**
10	Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	821,50	4.043,68	1.483,34	1.472,67	1.853,01	**88,51**
Total		**18.990,36**	**24.970,80**	**23.225,73**	**25.548,71**	**23.593,75**	
Pertumbuhan (%)			**31,49**	**-6,99**	**10,00**	**-7,65**	**6,71**

Sumber: Data diolah, BPKAD Kabupaten Luwu, Tahun 2020

Apabila dijumlah berdasarkan nilainya, komponen pajak yang memberikan nilai kontribusi terbesar adalah Pajak Penerangan Jalan yaitu Rp.47,07 milyar atau 40,45% dari total pendapatan dari pajak daerah, diikuti Pajak Bumi dan Bangunan dengan nilai Rp28,92 milyar atau 24,85%, dan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C dengan nilai Rp17,20 milyar atau 14,79%.

Grafik 3.4.
Postur Pajak Daerah Kabupaten Luwu
Tahun 2017-2020

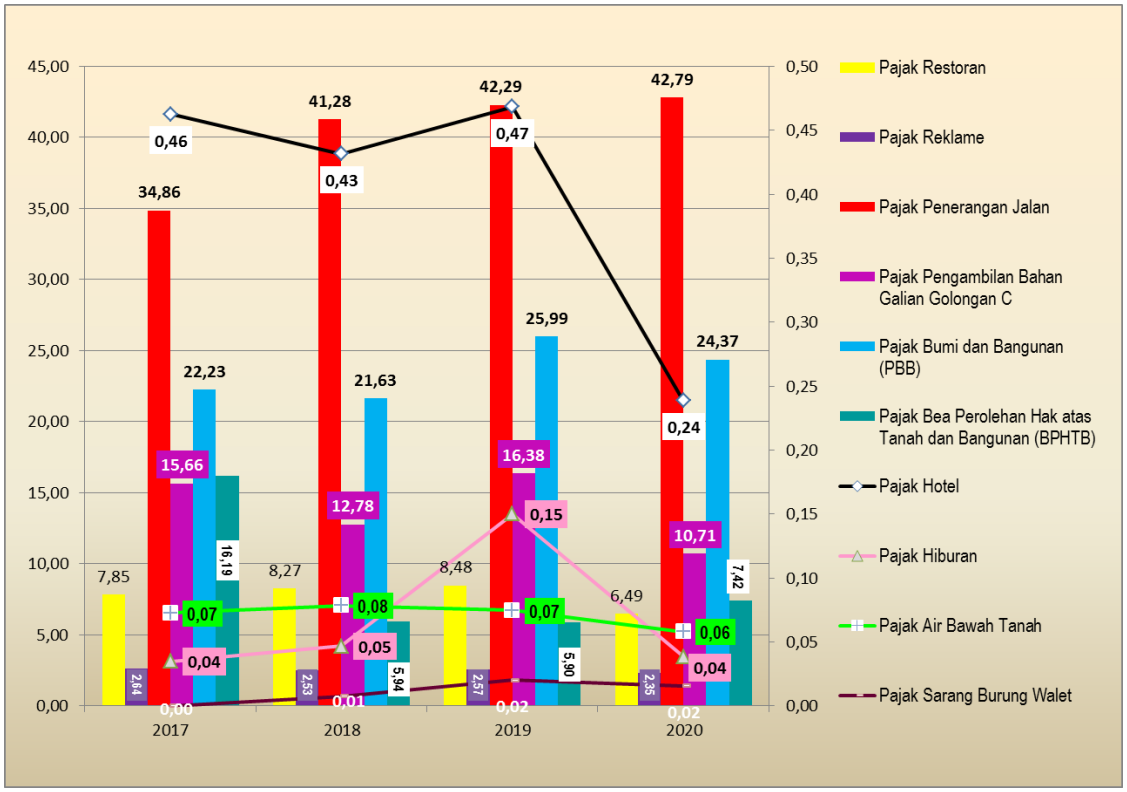

Sumber: Data diolah, BPKAD Kabupaten Luwu, Tahun 2020

Pada grafik 3.4. pajak hotel mengalami penurunan kontribusi terhadap pajak daerah sebesar 0,24% pada tahun 2020 dari 0,47%. Penurunan ini diakibatkan oleh pandemi covid-19 yang menyebabkan terjadinya ketidakstabilan pada perekonomian Kabupaten Luwu. Sama halnya dengan pajak reklame yang menyebabkan penurunan kontribusi terhadap pajak daerah yaitu sebesar 10,71% pada tahun 2020 dari 16,38% tahun 2019. Dikarenakan menurunnya seluruh aktifitas yang berkaitan dengan reklame akibat dari Covid-19. Sedangkan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) mengalami peningkatan kontribusi terhadap pajak daerah sebesar 7,42% tahun 2020. Hal ini

ditandai dengan adanya pembangunan perumahan baru yaitu perumahan Diamond Topokka di Kab. Luwu.

Jika dilihat grafik 3.5. bahwa perkembangan pajak daerah dari tahun 2017-2020 mengalami fluktuasi. Tahun 2017 pajak daerah senilai Rp.24,97 Milyar menjadi Rp.23,23 Milyar di tahun 2018. Sedangkan pada tahun 2019 mengalami peningkatan senilai 25,55 Milyar dan kembali menurun menjadi 23,59 Milyar pada tahun 2020. Hal ini disebabkan karena perekonomian daerah sedang mengalami lesuh, penerimaan pendapatan yang berasal dari pajak juga menurun khususnya dibidang pajak hotel dan hiburan. Pada tahun 2020 Kab. Luwu mengalami kontraksi akibat dari banyaknya tempat hiburan yang tutup pada awal masa pandemi Covid-19 dan merosot tajam jumlah pengunjung hotel akibat pembatasan aktivitas masyarakat.

Grafik 3.5.
Perkembangan Pajak Daerah Kabupaten Luwu
Tahun 2017-2020

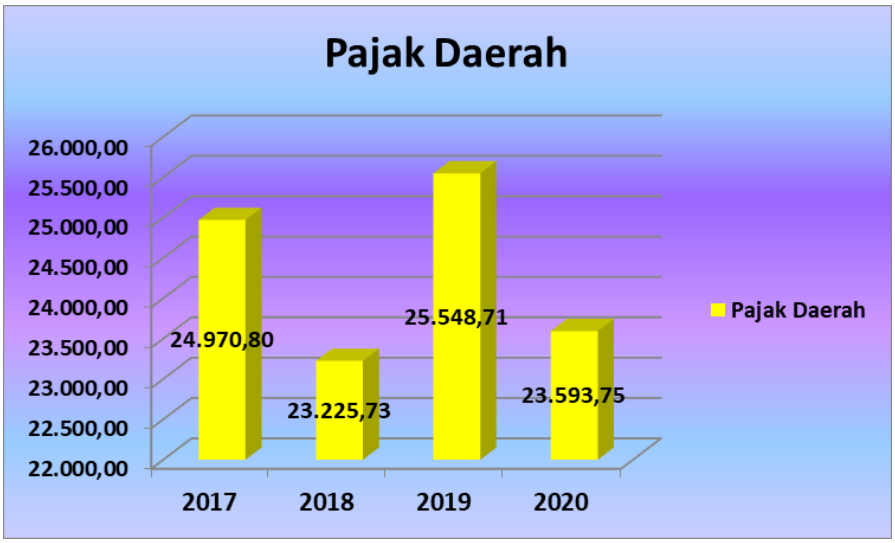

Sumber: Data diolah, BPKAD Kabupaten Luwu, Tahun 2020

b. Retribusi Daerah

Rata-rata pertumbuhan penerimaan daerah Kabupaten Luwu yang bersumber dari retribusi daerah selama periode 2016-2020 menunjukkan angka yang menurun yaitu (22,78%). Kondisi ini disebabkan adanya perubahan penatausahaan penerimaan yang bersumber dari pendapatan Rumah Sakit Umum Daerah. Sebelum tahun 2017, pendapatan rumah sakit tersebut dikelompokkan kedalam Retribusi Jasa Umum yang merupakan komponen dari retribusi daerah. Maka dari itu retribusi jasa umum mengalami

penerimaan yang tinggi sebesar Rp.40,11 Milyar pada tahun 2016. Tetapi sejak tahun 2017, sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit, seluruh rumah sakit dialihkan menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), sehingga tahun 2017-2020 terjadi penurunan signifikan menjadi Rp.5,32 Milyar.

Dari tabel 3.1 terlihat bahwa selama periode tahun 2016-2020, komponen retribusi daerah hanya mengalami pertumbuhan yang negatif. Retribusi daerah yang paling rendah yaitu retribusi jasa usaha sebesar (21,12%), kemudian retribusi jasa umum sebesar (16,39%). Apabila dijumlah berdasarkan nilainya, komponen pajak yang memberikan nilai kontribusi terbesar adalah Retribusi Jasa Umum yaitu Rp. 60,37 Milyar atau 82,95% dari total pendapatan daerah dari retribusi daerah yang mencapai Rp72,71 Milyar. Sedangkan yang paling kecil memberikan kontribusi adalah Retribusi Perizinan Tertentu, dengan nilai Rp4,75 Milyar atau 6,53%.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan salah satu sumber PAD yang berasal dari bagian laba hasil penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD. Selama periode tahun 2016-2020, komponen PAD ini tumbuh sebesar 1,72% dengan total nilai Rp26,68 miliar, yang diperoleh dari dividen BPD Sulselbar.

Tabel 3.5.
Realisasi PAD dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Tahun 2016-2020

(Dalam jutaan rupiah)

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rerata Pertumbuhan (%)
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	4.991,72	5.855,15	5.146,30	5.462,26	5.220,16	1,72
Pertumbuhan (%)		**17,30**	**-12,11**	**6,14**	**-4,43**	

Sumber: BPKAD Kabupaten Luwu, Tahun 2020

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain PAD yang Sah meliputi: 1) hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; 2) hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dapat dipisahkan; 3) jasa giro; 4) pendapatan bunga; 5) tuntunan ganti rugi; 6) keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan 7) komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

Tabel 3.6.
Realisasi PAD dari Lain-lain PAD yang Sah
Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rerata Pertumbuhan (%)
1	Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan	197,44	1.103,86	612,20	308,95	727,63	**125,13**
2	Hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dapat dipisahkan	-	-	-			
3	Jasa Giro	5.027,59	3.101,29	2.446,69	3.223,49	2.841,12	**-9,88**
4	Pendapatan Bunga	4.516,28	3.306,23	2.444,85	3.442,95	3.163,09	**-5,04**
5	Tuntutan Ganti Rugi	1.092,48	559,84	1.142,10	1.390,04	310,87	**-0,17**
6	Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing						
7	Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah	17.667,88	62.994,15	63.585,78	66.823,03	80.480,91	**70,75**
Total		**28.501,67**	**71.065,38**	**70.231,62**	**75.188,46**	**87.523,62**	
Pertumbuhan (%)			**149,34**	**-1,17**	**7,06**	**16,41**	**42,91**

Sumber: Data diolah, BPKAD Kabupaten Luwu, Tahun 2020

Selama periode tahun 2016-2020, terdapat komponen yang mengalami fluktuasi yaitu hasil penjualankekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, tuntutan ganti rugi. Sedangkan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah mengalami

peningkatan. Secara keseluruhan komponen ini tumbuh sebesar 42,91% dengan nilai total Rp332,51 Milyar.

Komponen dengan rata-rata pertumbuhan tertinggi adalah Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan yaitu 125,13%, diikuti Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah yang tumbuh sebesar 70,75%. Sedangkan komponen yang memberikan kontribusi paling tinggi terhadap total Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dengan nilai Rp291,55 Milyar atau sebesar 87,68% yaitu Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah .

2. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dana Perimbangan terbagi atas tiga komponen utama meliputi: 1) Dana Bagi Hasil (DBH); 2) Dana Alokasi Umum (DAU); dan 3) Dana Alokasi Khusus (DAK).

Pada tabel 3.7. Nilai Dana Perimbangan Kabupaten Luwu selama periode 2019-2020 mengalami penurunan dari 994,07 Milyar pada tahun 2016 menjadi Rp935,06 Milyar pada tahun 2020, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar (1,08%). Komponen dana perimbangan dengan pertumbuhan tertinggi adalah DAK, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 1,39%. Sedangkan DAU dan DBH mengalami pertumbuhan yang negatif sebesar (8,10%) dan (1,22%).

Tabel 3.7.
Realisasi Dana Perimbangan Kabupaten Luwu
Tahun 2016-2020

(Dalam jutaan rupiah)

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rerata Pertumbuhan (%)
Dana Bagi Hasil Pajak/bagi hasil bukan pajak	24.007,46	17.232,16	15.973,08	13.831,26	16.117,17	**-8,10**
Dana Alokasi Umum	689.096,79	676.991,58	680.212,38	718.676,59	652.082,66	**-1,22**
Dana Alokasi Khusus	280.963,06	211.037,55	226.393,26	310.976,42	266.859,99	**1,39**
Total	**994.067,31**	**905.261,28**	**922.578,72**	**1.043.484,27**	**935.059,82**	
Pertumbuhan (%)		**-8,93**	**1,91**	**13,11**	**-10,39**	**-1,08**

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Luwu

Selama periode tahun 2016-2020, kontribusi masing-masing komponen terhadap total dana perimbangan mengalami fluktuasi. Komponen yang paling besar memberikan kontribusi terhadap dana perimbangan adalah DAU dengan rata-rata kontribusi sebesar 71,29%, sedangkan komponen yang memberikan kontribusi paling rendah adalah Dana Bagi Hasil Pajak/bagi hasil bukan pajak yaitu sebesar 1,82%.

Grafik 3.6.
Proporsi Komponen Dana Perimbangan
Tahun 2016-2020

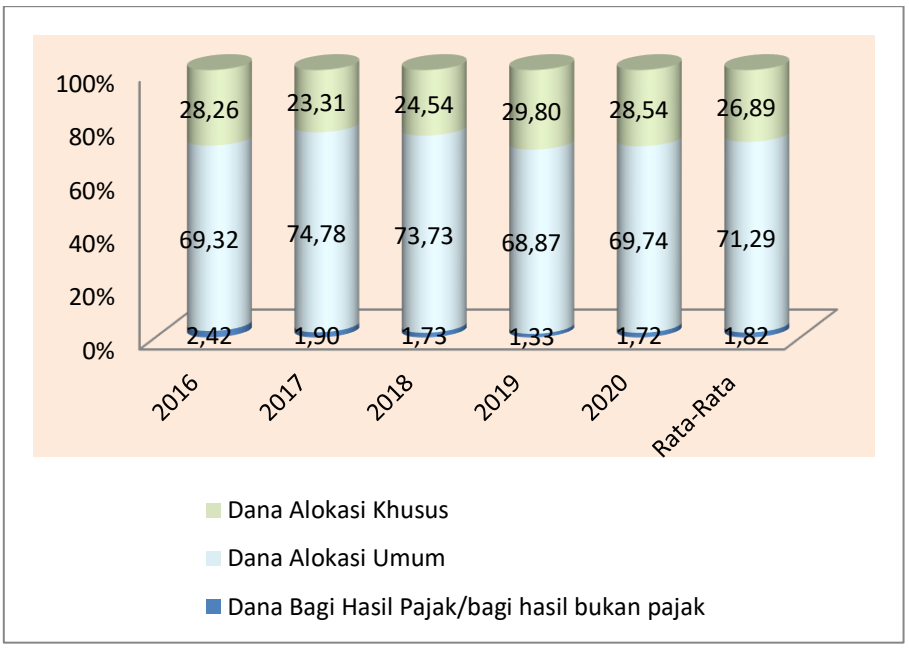

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Luwu. (2020)

Pada grafik 3.7. realisasi komponen dana perimbangan secara garis besar mengalami penurunan. Pada komponen Dana Alokasi Khusus (DAK) dilihat dari Trend mengalami peningkatan dari tahun 2017-2020. Namun pada tahun 2020 mengalami penurunan dari periode sebelumnya. Hal ini disebabkan karena adanya untuk *refocusing* dan simplifikasi bidang/kegiatan dalam pemenuhan gap layanan dasar pendidikan dan kesehatan. Komponen Dana Alokasi Umum juga mengalami penurunan dari tahun 2019 senilai Rp.718,67 Milyar menjadi Rp.652,08 Milyar. Hal ini disebabkan oleh terkontraksinya pendapatan daerah akibat pandemi Covid-19. Sedangkan realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) mengalami peningkatan dari tahun 2019 senilai Rp.13,83 Milyar menjadi Rp.16,12 Milyar. kenaikan pada pos DBH merupakan hasil penyesuaian dengan kenaikan target penerimaan pajak penghasilan dan cukai hasil tembakau (CHT).

Grafik 3.7.
Perkembangan Komponen Dana Perimbangan
Tahun 2017-2020

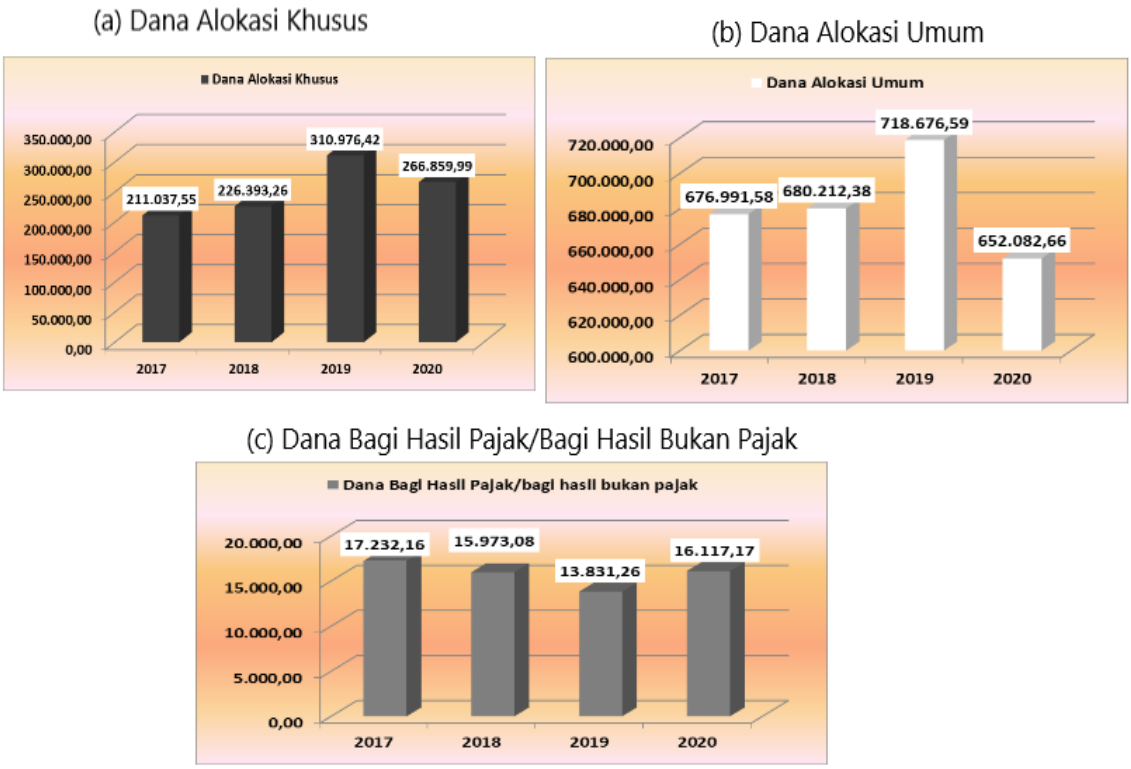

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Luwu. (2020)

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan seluruh pendapatan Daerah selain pendapatan asli Daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014). Selama periode tahun 2016-2020, jumlah pendapatan daerah Kabupaten Luwu dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah mengalami trend penurunan.

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah ditunjukkan pada Tabel 3.8. Dapat dilihat terjadi penurunan dari tahun 2016 menuju tahun 2020 yaitu senilai Rp. 307,65 Milyar menjadi Rp. 300,94 Milyar pada tahun 2020. Meskipun memiliki trend yang menurun, tapi pada tahun 2017-2020 mengalami peningkatan yaitu senilai Rp. 278,15 Milyar menjadi Rp. 300,94 Milyar.

Jika dilihat dari komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah yang memiliki rata-rata pertumbuhan positif yaitu Hibah yang mencapai 134,08%, yang artinya setiap tahun mengalami peningkatan signifikan. Kemudian dilanjutkan oleh Bantuan Keuangan dari Provinsi Pemerintah Daerah yang mencapai 21,10%. Sedangkan untuk Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus mengalami pertumbuhan negatif yaitu (7,34%) dan yang paling terendah adalah dana bai hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya mencapai (11,73%). Hal ini dikarenakan dari tahun 2016-2020 mengalami trend penurunan pada realisasi pendapatan daerah yang sah.

Tabel 3.8.
Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Tahun 2016-2020

(Dalam jutaan rupiah

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rerata Pertumbuhan (%)
Hibah	6.504,63	9.647,77	51.717,05	57.882,20	81.050,04	134,08
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	45.089,35	43.883,98	42.812,90	38.716,66	26.229,41	-11,73
Dana Penyesuaian dan Otonormi khusus	241.007,23	218.126,53	192.040,06	195.242,48	176.516,82	-7,34
Bantuan keuangan dari provinsi pemerintah daerah lainnya	15.051,80	6.490,75	7.107,41	7.646,09	17.143,71	21,10
Pendapatan Lainnya	-	-	-			
Total	**307.653,01**	**278.149,02**	**293.677,43**	**299.487,43**	**300.939,98**	
Pertumbuhan (%)		**-9,59**	**5,58**	**1,98**	**0,49**	**-0,39**

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Luwu

Struktur Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah ditujukkan pada table 3.10 dapat dilihat bahwa yang paling dominan yaitu Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus serta Hibah. Sementara Bantuan Keuangan dari Provinsi Pemerintah Daerah Lainnya meemiliki kontribusi yang paling rendah terhadap total Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Tabel 3.9.
Struktur Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Hibah	2,11	3,47	17,61	19,33	26,93
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	14,66	15,78	14,58	12,93	8,72
Dana Penyesuaian dan Otonormi khusus	78,34	78,42	65,39	65,19	58,66
Bantuan keuangan dari provinsi pemerintah daerah lainnya	4,89	2,33	2,42	2,55	5,70
Pendapatan Lainnya					
Total	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Luwu

3.1.1.2 Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Mengacu pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah tahun anggaran 2016-2020, disusun dengan menggunakan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan.

Analisis Belanja Daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan pada periode tahun 2016-2020 yang digunakan sebagai bahan untuk menentukan rencana Belanja Daerah dimasa yang akan datang dalam rangka peningkatan kapasitas pembangunan daerah. Dengan memperhatikan perkembangan kebijakan umum anggaran serta realisasi penggunaan anggaran, maka diperoleh perbandingan belanja daerah seperti yang disajikan pada grafik dibawah ini.

Grafik 3.8.
Perbandingan Belanja Langsung dan Tidak Langsung
Tahun 2016-2020

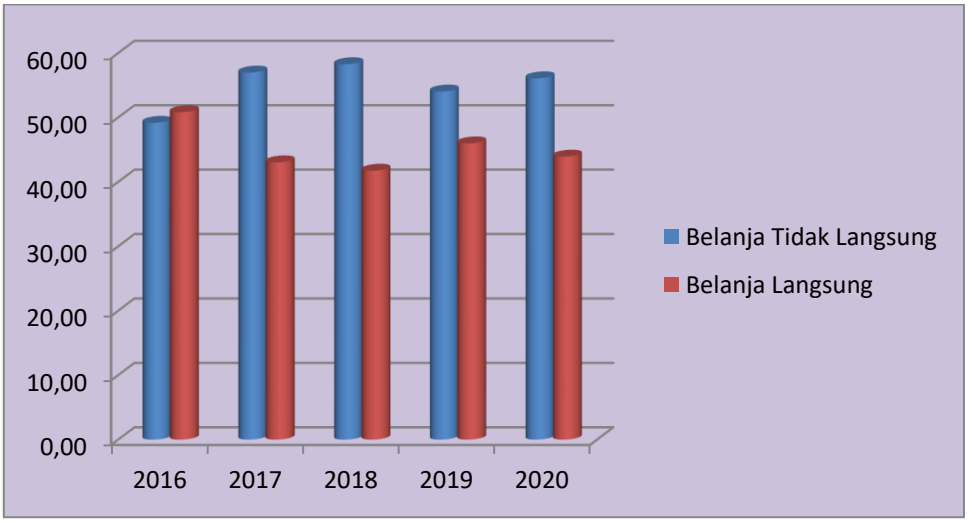

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Luwu (diolah)

Berdasarkan grafik 3.8. terlihat bahwa selama periode tahun 2016-2020 anggaran belanja daerah yang disediakan untuk belanja tidak langsung adalah di atas 50% yang diperuntukkan untuk membiayai Belanja Pegawai, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa, Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Belanja

Tidak Terduga. Sedangkan untuk belanja langsung di atas 40% yang diperuntukkan untuk membiayai Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Modal.

Selama periode 2016 sampai 2020, belanja tidak langsung tercatat terus mengalami peningkatan mulai tahun 2016-2018 baik dari sisi anggaran maupun dari sisi realisasi, sementara pada tahun 2019 mengalami penurunan dan untuk tahun 2020 kembali meningkat. Pada tahun 2016, realisasi belanja tidak langsung mencapai Rp728,18 Milyar dari anggaran Rp.745,82 Milyar dan mengalami peningkatan hingga tahun 2020 menjadi sebesar Rp. 751,90 Milyar dari anggaran Rp.805,85 Milyar. Komponen yang memberikan kontribusi atas peningkatan belanja tidak langsung adalah belanja hibah yang memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 101,77%. Hal ini menunjukkan bahwa setiap tahun mengalami peningkatan.

Sama halnya dengan belanja tidak langsung, untuk belanja langsung dari tahun 2016 sampai 2020, mengalami fluktuasi. Pada tahun 2016 menuju tahun 2017 mengalami penurunan kemudian pada tahun 2018-2019 terjadi peningkatan pada realisasi senilai Rp. 666,21 Milyar dan tahun 2020 kembali mengalami penurunan realisasi menjadi Rp. 588,90 Milyar. Belanja Pegawai memiliki pertumbuhan yang positif sebesar 46,28%, sedangkan untuk belanja modal memiliki pertumbuhan yang negatif sebesar (2,32%) yang artinya setiap tahun mengalami penurunan realisasi.

Selama kurun waktu tahun 2016-2020 secara proporsi realisasi terhadap anggaran menunjukkan bahwa realisasi belanja tidak langsung lebih tinggi dibandingkan realisasi belanja langsung, hal ini dikarenakan belanja langsung tidak sepenuhnya diserap yang disebabkan adanya hambatan pada proses pengadaan barang dan jasa serta pengadaan belanja modal. Sedangkan dari sisi pertumbuhan realisasi, belanja daerah memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 0,68%. Pertumbuhan belanja daerah terbesar bersumber dari belanja tidak langsung sebesar 3,33%, sedangkan belanja langsung memiliki pertumbuhan yang negative sebesar (1,38%).

Belanja pegawai memiliki realisasi trend penurunan dimana pada tahun 2016-2020 yaitu senilai Rp.517,11 Milyar rupiah pada tahun 2016 menjadi Rp.462,99 Milyar rupiah pada tahun 2020. Sedangkan belanja hibah memiliki peningkatan yang signifikan yaitu dari tahun 2016 senilai Rp.6,17 Milyar rupiah menjadi Rp.33,95 Milyar pada tahun 2020. Belanja bantuan sosial meningkat tajam dari Rp.226,65 Juta pada tahun 2016 menjadi Rp.1.00 Milyar pada tahun 2020. Hal ini disebabkan karena adanya pandemi sehingga pemerintah mengalokasikan anggaran untuk memberikan bantuan kepada masyarakat di Kab. Luwu. Belanja bagi hasil

kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan pemerintah Desa mengalami penurunan dari tahun 2016-2020 yaitu senilai Rp.5,06 Milyar di tahun 2016 menjadi Rp.2,65 Milyar pada tahun 2020. Belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan pemerintah Desa mengalami peningkatan yaitu senilai Rp.199,42 Milyar pada tahun 2016 menjadi Rp.247,85 Milyar di tahun 2020. Belanja tidak terduga mengalami peningkatan yang cukup tajam dari Rp.192,8 Juta pada tahun 2016 menjadi Rp.9,0 Milyar rupiah pada tahun 2020.

Belanja pegawai pada komponen belanja langsung mengalami peningkatan pada tahun 2016-2020 yaitu senilai Rp.17,65 Milyar meningkat menjadi Rp.27,86 Milyar pada tahun 2020. Sedangkan realisasi belanja barang dan jasa senilai Rp.349,74 Milyar pada tahun 2016 menurun menajdi Rp.311,35 Milyar pada tahun 2020. Sama halnya dengan realisasi belanja modal mengalami penurunan yaitu tahun 2016 senilai Rp.385,52 Milyar menjadi Rp.249,69 Milyar. hal ini disebabkan karena anggaran lebih diutamakan kepada bidang kesehatan dan bantuan sosial. sebagaimana ditunjukkan dalam proporsi realisasi belanja daerah terhadap anggaran belanja berikut.

Tabel 3.10.
Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Luwu
Tahun 2016-2020

(Dalam Jutaan Rupiah)

No.	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
1	**Belanja**	**1.481.088,37**	**1.283.421,69**	**1.333.858,53**	**1.219.599,86**	**1.225.939,13**	**-4,37**
1.1	**Belanja Tidak Langsung**	**728.180,28**	**731.112,09**	**777.190,41**	**788.034,66**	**805.855,45**	**2,59**
1.1.1	Belanja Pegawai	517.105,81	472.020,21	489.997,52	476.578,73	486.652,95	-1,38
1.1.2	Belanja Hibah	6.170,30	21.977,27	45.452,08	36.310,63	45.566,56	92,09
1.1.3.	Belanja Bantuan Sosial	226,65	371,75	382,70	1.081,00	1.133,00	63,56
1.1.4.	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	5.061,16	2.586,25	2.881,32	3.247,50	2.997,50	-8,12
1.1.5.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa	199.423,57	233.989,95	238.416,52	270.266,80	260.505,45	7,24
1.1.6.	Belanja tidak terduga	192,80	166,67	60,27	550,00	9.000,00	567,89
1.2	**Belanja Langsung**	**752.908,09**	**552.309,59**	**556.668,12**	**705.079,50**	**683.586,62**	**-0,56**
1.2.1	Belanja Pegawai	17.647,72	19.390,79	10.344,14	43.528,70	31.478,41	64,09
1.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	349.739,39	311.756,29	346.509,58	354.288,61	355.084,55	0,69
1.2.3.	Belanja Modal	385.520,98	221.162,52	199.814,40	307.262,19	297.023,67	-0,46

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Luwu, Tahun 2020.

3.1.1.3 Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Struktur Pembiayaan terdiri dari Penerimaan daerah dan Pengeluaran daerah. Komponen Penerimaan Daerah meliputi 1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya; 2) Pencairan Dana Cadangan; 3) Hasil Penjualan Aset Daerah yang Dipisahkan; 4) Penerimaan Pinjaman Daerah; 5) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman; 6) Penerimaan Piutang Daerah; dan 7) Penerimaan Pihak Ketiga. Sedangkan komponen Pengeluaran Daerah meliputi: 1) Pembentukan Dana Cadangan; 2) Penyertaan Modal (investasi) Daerah; 3) Pembayaran Pokok Utang; 4) Pemberiaan Pinjaman Daerah; 5) Sisa Lebih Sementara Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan; dan 6) Pengeluaran Pihak Ketiga.

Secara garis besar analisis Pembiayaan Daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defesit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan di masa yang akan datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Pada tabel 3.11. penerimaan pembiayaan mengalami penurunan yang signifikan dari Rp.153,17 Milyar pada tahun 2016 menjadi Rp.38,46 Milyar, sehingga mengalami pertumbuhan yang negatif sebesar 6,28%. Hal ini disebabkan penerimaan pajak di daerah merosot akibat pandemi. Sedangkan realisasi pengeluaran pembiayaan mengalami peningkatan dari Rp.7,69 Milyar pada tahun 2019 menjadi Rp.11,25 Milyar pada tahun 2020, sehingga mengalami pertumbuhan yang positif sebesar 110,94%.

Tabel 3.11.
Realisasi Pembiayaan Daerah
Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata pertumbuhan (%)
Pembiayaan Daerah	**145.477,65**	**25.111,52**	**28.736,15**	**13.991,04**	**27.209,69**	**-6,28**
Penerimanaan Pembiayaan	153.171,14	61.676,00	34.253,77	18.000,66	38.465,64	-9,49
Pengeluaran Pembiayaan	7.693,49	36.564,48	5.517,62	4.009,62	11.255,95	110,94

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Luwu, Tahun 2020.

Pada grafik 3.9. Komponen penerimaan pembiayaan yang mempunyai porsi paling besar adalah SiLPA tahun anggaran sebelumnya. SiLPA tahun anggaran sebelumnya Kabupaten Luwu mencapai Rp.38,46 Milyar pada tahun 2020 atau sebesar 99,9% dari total penerimaan pembiayaan. Sama halnya dengan pengeluaran pembiayaan daerah mengalami peningkatan sebesar Rp.11,25 Milyar pada tahun 2020. Hal ini disebabkan karena kontribusi dari pengeluaran pembiayaan lainnya senilai Rp.8,26 Juta tahun 2020 atau sebesar 73,35%.

Grafik 3.9.
Realisasi Komponen Pembiayaan Daerah Kabupaten Luwu
Tahun 2017-2020

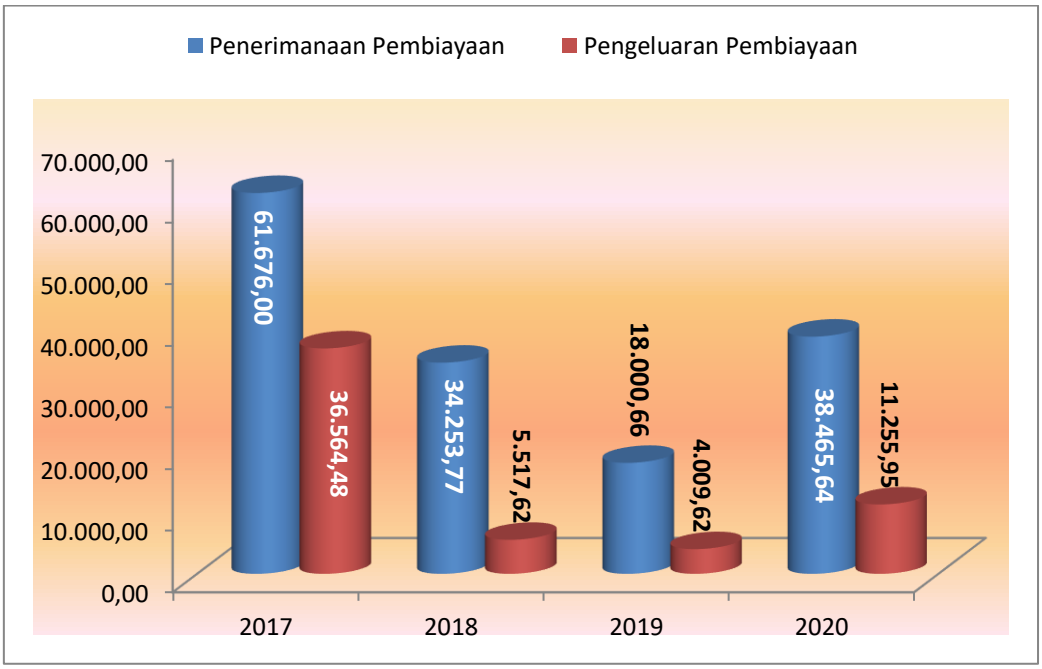

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Luwu, Tahun 2020.

3.1.2. Neraca Daerah

Neraca daerah mengambarkan posisi keuangan pemerintah daerah mengenai asset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Laporan Neraca daerah akan memberikan informasi penting kepada manajemen pemerintahan daerah, pihak legeslatif daerah maupun para pemberi pinjaman kepada daerah serta masyarakat luas lainnya tentang keadaan kekayaan atau asset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Elemen utama neraca daerah meliputi asset, kewajiban, dan ekuitas dana.

Analisis neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan Pemerintah Daerah melalui perhitungan rasio likuiditas, solvabilitas dan rasio aktivitas serta kemampuan asset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah. Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Jenis rasio likuiditas yang digunakan antara lain rasio lancer *(current ratio)* dan rasio quick *(quick ratio).* Rasio solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya. Jenis rasio solvabilitas yang digunakan antara lain: rasio total hutang terhadap total asset *(debt to asset ratio)* dan rasio hutang terhadap modal *(debt to equity ratio).* Rasio aktivitas adalah rasio untuk melihat tingkat aktivitas tertentu pada kegiatan pelayanan Pemerintah Daerah. Jenis rasio aktivitas yang digunakan dalam analisis antara lain: rata-rata umur piutang dan rata-rata umur persediaan.

Perkembangan neraca daerah Kabupaten Luwu serta rata-rata pertumbuhannya secara rinci ditunjukkan pada tabel 3.15.

Tabel 3.12.
Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Luwu
Tahun 2017-2019

No.	Uraian	2017	2018	2019	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
1	**ASET**				
1.1	**ASET LANCAR**	**68.482.513.858,24**	**59.189.962.307,86**	**82.070.878.520,16**	**12,54**
1.1.1.	Kas	34.659.325.761,09	18.390.249.700,15	38.918.959.761,51	32,34
1.1.2.	Piutang	20.900.318.427,74	31.039.150.525,45	33.729.673.526,75	28,59
1.1.3.	Beban Dibayar Dimuka	46.206.220,30	27.668.151,88	123.287,67	-69,84
1.1.4.	Persediaan	12.876.663.449,11	9.732.893.930,38	9.422.121.944,23	-13,8
1.2	**ASET TETAP**	**1.931.578.718.102,46**	**1.997.487.381.922,10**	**2.315.857.996.217,36**	**9,68**
1.2.1.	Tanah	400.576.134.240,00	405.755.027.640,00	407.530.246.441,00	0,87
1.2.2.	Peralatan dan Mesin	340.062.601.339,13	383.986.760.730,52	454.238.831.994,98	15,61
1.2.3.	Gedung dan Bangunan	657.911.372.388,39	715.286.124.498,84	914.886.195.544,03	18,31
1.2.4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.025.948.372.911,80	117.954.658.281,76	1.321.010.229.934,29	465,71
1.2.5.	Aset Tetap Lainnya	61.343.154.003,20	70.983.655.954,20	83.101.230.873,20	16,39
1.2.6.	Konstruksi dalam Pekerjaan	4.737.007.010,00	40.000.124.119,75	7.141.276.127,46	331,14

No.	Uraian	2017	2018	2019	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
1.2.7.	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	-558.999.923.790,06	-736.478.969.302,97	-872.050.014.697,60	25,08
1.3	**ASET LAINNYA**	**50.360.673.670,00**	**46.116.441.255,07**	**40.134.345.997,00**	**-10,7**
1.3.1	Tagihan Penjualan Angsuran				
1.3.2.	Tagihan Jangka Panjang	139.549.310,00	139.549.310,00	30.450.400,00	-39,09
1.3.3.	Aset Tak Berwujud	11.455.278.590,00	20.369.528.728,00	9.938.467.062,00	13,3
1.3.4.	Aset Lain-lain	38.765.845.770,00	25.607.363.217,07	30.165.428.535,00	-8,07
1.4	**INVESTASI JANGKA PANJANG**	**50.164.313.810,00**	**52.247.608.635,00**	**53.077.945.089,00**	**2,87**
1.4.1	Investasi Non Permanen	1.025.858.590,00	746.036.220,00	456.093.975,00	-33,07
1.4.2.	Investasi Permanen	49.138.455.220,00	51.501.572.415,00	52.621.851.114,00	3,49
	JUMLAH ASET DAERAH	**2.100.586.219.440,70**	**2.155.041.394.120,03**	**2.491.141.165.823,51**	**9,09**
2	**KEWAJIBAN**				
2.1	**KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**	**10.879.043.867,40**	**12.322.729.007,57**	**17.097.378.328,22**	**26,01**
2.1.1.	Utang Perhitungan Pihak Ketiga	390.306.729,00	390.742.547,00	390.671.455,00	0,05
2.1.2.	Pendapatan Diterima DiMuka	565.285.175,95	511.946.825,12	542.405.479,86	-1,74
2.1.3.	Utang Beban	8.467.533.488,00	10.296.788.918,00	16.090.370.093,36	38,93
2.1.4.	Utang Jangka Pendek Lainnya	1.386.628.173,45	1.049.319.417,45		-62,16
2.1.5.	Utang Kepada Pihak Ketiga	69.290.301,00	73.931.300,00	73.931.300,00	3,35
3	**EKUITAS**	**2.089.707.175.573,30**	**2.142.718.665.112,46**	**2.474.043.787.495,29**	**9**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA		**2.100.586.219.440,70**	**2.155.041.394.120,03**	**2.491.141.165.823,52**	**9,09**

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Luwu, Tahun 2020.

Berdasarkan tabel di atas dapat diuraikan perkembangan pengelolaan neraca daerah Kabupaten Luwu sebagai berikut.

1. **Aset**

Aset daerah adalah semua kekayaan daerah yang dimiliki maupun yang dikuasai pemerintah daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Secara umum asset terbagi atas asset lancar, surat berharga baik berupa investasi jangka panjang maupun jangka pendek, asset tetap dan asset lainnya.

Selama periode 2017-2020 rata-rata pertumbuhan asset Pemerintah Kabupaten Luwu sebesar 9,09% per tahun, dengan rata-rata pertumbuhan untuk masing-masing jenis asset antara lain asset lancer, dimana asset ini setiap tahunnya mengalami kenaikan dengan rata-rata pertumbuhannya 12,54% per tahun, investasi jangka panjang naik sebesar 2,87% per tahun, asset tetap rata-rata naik sebesar 9,68% per tahun. Sedangkan asset lainnya rata-rata memiliki pertumbuhan negative sebesar -10,70% per tahun.

2. **Kewajiban**

Kewajiban adalah hutang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesainnya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban yang penyelesainnya setelah dua belas bulan dari tanggal pelaporan diklasifikasikan sebagai jangka panjang.

Kewajiban Pemerintah Kabupaten Luwu meliputi: 1) Utang Perhitungan Pihak Ketiga; 2) Pendapatan diterima di muka; 3) Utang beban; 4) Utang Jangka Pendek Lainnya; dan 5) Utang pada Pihak Ketiga, dimana kewajiban ini termasuk kedalam kewajiban jangka pendek. Kewajiban Jangka Pendek Pemerintah Kabupaten Luwu selama periode 2017-2020 mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 26,01% per tahun. Sedangkan untuk kewajiban jangka panjang, sampai akhir tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Luwu tidak memiliki kewajiban.

3. **Ekuitas**

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara asset dan kewajiban pemerintah. Perkembangan ekuitas Pemerintah Kabupaten Luwu selama periode 2017-2020 tumbuh rata-rata sebesar 9,00% setiap tahunnya.

Analisis likuiditas yang diperoleh dari neraca daerah Kabupaten Luwu dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Rasio Lancar (*Current Ratio*), yang menunjukkan kemampuan untuk membayar hutang yang segera harus dipenuhi dengan aktiva lancar. Semakin besar nilai current ratio artinya semakin likuid, dengan nilai proporsional berada pada batas 200%. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa pada tahun 2017 sebesar 6,29% dan menurun pada tahun 2019 sebesar 4,8%.
2. Rasio Cepat (*Quick Ratio*), yaitu ukuran kemampuan pemerintah daerah dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva yang lebih likuid, dimana nilai yang baik berada pada batas 100 persen. Dengan melihat pada tabel tersebut, *quick ratio* tahun 2017 sebesar 5,11 % dan terjadi penurunan pada tahun 2019 sebesar 4,25%.
3. Rasio Kas (*Cash Ratio*), yaitu Analisis ini memberi informasi posisi kas yang dapat menutupi utang lancar dengan membandingkan antara kas dan aktiva lancar yang dapat segera menjadi uang kas dengan utang lancar. Rasio kas juga mengalami penurunan dari 3,2% menjadi 2,28% pada tahun 2019.

Tabel 3.13.

Analisi Rasio Solvabilitas Kabupaten Luwu
Tahun 2017-2019

No	Uraian	2017	2018	2019
	Rasio Solvabilitas			
1.	Rasio Total Utang terhadap Modal	0,5206	0,5751	0,6911
2.	Rasio Total Hutang terhadap Aset	0,5179	0,5718	0,6863

Sumber: BPKAD Kab. Luwu (diolah)

Analisis Solvabilitas yang diperoleh dari neraca daerah Kabupaten Luwu sebagaimana tercantum dalam tabel 3.13, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Rasio Hutang terhadap Modal (*Debt to Equity Ratio*) digunakan untuk mengukur seberapa perlunya hutang jika dibandingan dengan kemampuan modal yang dimiliki, dimana semakin kecil nilainya berarti semakin mandiri, tidak tergantung pembiayaan dari kreditur. Tahun 2017 sebesar 0,52 tahun 2018 sebesar 0,57 dan tahun 2019 sebesar 0,69.
2. Rasio Total Hutang terhadap Total Aset (*Debt to Asset Ratio*), yang menunjukkan seberapa besar pengaruh hutang terhadap aktiva, dimana semakin besar nilainya diartikan semakin besar pula pengaruh hutang terhadap pembiayaan, juga menandakan semakin besar resiko yang

dihadapi oleh kreditur. Pengaruh hutang terhadap aktiva tahun 2017 sebesar 0,51, tahun 2018 sebesar 0,57, dan tahun 2019 sebesar 0,68.

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan kesadaran untuk secara efektif memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis secara tepat. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan menghasilkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah secara garis besar akan tercermin pada kebijakan pendapatan, pembelanjaan serta pembiayaan APBD. Pengelolaan keuangan daerah yang baik menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi dan efektivitas belanja daerah serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah. Kebijakan Pendapatan Daerah senantiasa memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana lancar sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran;
2. Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto, dalam pengertian bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan dan/atau dikurangi dengan bagi hasil;
3. Pendapatan daerah adalah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan dalam kurun waktu satu tahun anggaran.

Kebijakan pendapatan daerah disesuaikan dengan kewenangannya, struktur pendapatan daerah dan asal sumber penerimaannya dapat dibagi berdasarkan 3 (tiga) kelompok, yaitu :

1. PAD yang merupakan hasil penerimaan dari sumber-sumber pendapatan yang berasal dari potensi daerah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki dalam rangka membiayai urusan rumah tangga daerahnya. Sedangkan kebijakan pendapatan asli daerah dilakukan dalam berbagai upaya yang diarahkan untuk meningkatkan pendapatan daerah meliputi:

a. Mengoptimalkan penerimaan PAD dengan cara membenahi manajemen data penerimaan PAD, meningkatkan penerimaan pendapatan Non-konvensional, melakukan evaluasi dan revisi secara berkala peraturan daerah tentang pajak dan retribusi yang perlu disesuaikan, menetapkan target penerimaan berdasarkan potensi penerimaan, mengembangkan kelembagaan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan kebutuhan daerah;
b. Optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan PBB, BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya;
c. Menetapkan sumber pendapatan daerah unggulan yang bersifat elastis terhadap perkembangan basis pungutannya dan less distortive terhadap perekoNomormian;
d. Pemantapan kelembagaan dan Sistem Operasional Pemungutan Pendapatan Daerah;
e. Peningkatan pendapatan daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi;
f. Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang pendapatan daerah dengan Pemerintah Provinsi, SKPD Penghasil dan Kecamatan;
g. Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah untuk memberikan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah;
h. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi daerah;
i. Meningkatkan kualitas pengelolaan aset dan keuangan daerah.

2. Dana Perimbangan, yaitu merupakan pendapatan daerah yang berasal dari APBN yang bertujuan untuk menutup celah fiskal *(fiscal gap*) sebagai akibat selisih kebutuhan fiskal *(fiscal need)* dengan kapasitas fiskal *(fiscal capacity).* Kebijakan yang akan ditempuh dalam upaya peningkatan pendapatan daerah dari dana perimbangan adalah sebagai berikut:
   a. Optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh OPDN), dan PPh Pasal 21;
   b. Meningkatkan akurasi data sumber daya alam sebagai dasar perhitungan pembagian dalam Dana Perimbangan;
   c. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan kabupaten/kota dalam pelaksanaan Dana Perimbangan.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah adalah penerimaan yang berasal dari pihak ketiga, dalam hal ini meliputi bagi hasil yang diperoleh dari pajak pemerintah provinsi, dana penyesuaian dan otonormi khusus,

bantuan keuangan dari pemerintah provinsi dan bagi hasil retribusi dengan pemerintah provinsi serta pendapatan lainnya yang tidak termasuk kelompok PAD dan dana perimbangan.

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program/kegiatan.

Kebijakan belanja daerah diarahkan untuk mendukung pencapaian target IPM, dimana dengan mempertimbangkan pencapaian IPM, diperlukan perencanaan kegiatan-kegiatan yang berorientasi pencapaian IPM. Perencanaan pembangunan yang mendukung pencapaian IPM diarahkan untuk memperkuat bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur dan suprastruktur. Kebijakan belanja daerah diarahkan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif. Upaya tersebut antara lain adalah:

1. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan;
2. Efisiensi belanja dilakukan dengan mengoptimalkan belanja untuk kepentingan publik, melaksanakan *proper budgeting* melalui analisis *cost benefit* dan tingkat efektifitas setiap program/kegiatan serta melaksanakan *prudent spending* melalui pemetaan profil resiko atas setiap belanja kegiatan beserta perencanaan langkah antisipasinya;
3. Penyusunan belanja kecamatan diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan kecamatan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu;
4. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib diarahkan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum;
5. Pemenuhan dan pemanfaatan anggaran untuk pendidikan sebesar 20% dari volume anggaran APBD tiap tahunnya, dengan fokus pada penuntasan WAJAR DIKDAS 9 tahun dan penuntasan buta aksara serta menciptakan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau;

6. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dilaksanakan dengan memperbaiki fasilitas dan pengadaan untuk pelayanan dasar kesehatan terutama untuk keluarga miskin serta kesehatan ibu dan anak, memperbanyak tenaga medis terutama untuk daerah-daerah yang sulit dijangkau, serta memperbaiki kualitas lingkungan dan pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat;
7. Dalam rangka peningkatan daya beli masyarakat, anggaran belanja diarahkan pada revitalisasi sektor pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan, penguatan struktur ekonomi perdesaan berbasis "desa membangun", pemberdayaan koperasi dan KUKM, serta dukungan infrastruktur perdesaan;
8. Pengurangan persentase jumlah angkatan kerja yang menganggur hingga dibawah 10%, diantaranya melalui penyiapan SDM yang siap kerja, peningkatan investasi program multi sektor, peningkatan sarana dan prasarana balai pelatihan ketenagakerjaan;
9. Dalam mendukung pengembangan aktifitas ekonomi, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur akan diarahkan pada wilayah sentra produksi di pedesaan, aksesibilitas sumber air baku dan listrik;
10. Kebijakan untuk belanja tidak langsung meliputi hal-hal sebagai berikut:
    a. Mengalokasikan belanja pegawai yang merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    b. Mengalokasikan belanja Non pegawai seperti belanja subsidi yang digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu, agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak, belanja bantuan sosial yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan belanja tidak terduga yang merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya.

3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

Untuk melihat upaya pemenuhan kebutuhan aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu selama 5 (lima) tahun terakhir, dapat dilihat sebagaiman yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.14.
Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata Pertumbuhan (%)
A	**Belanja Tidak Langsung**	**423.127.516.476,00**	**391.307.199.973,00**	**407.849.325.585,00**	**417.891.880.738,00**	**405.949.993.743,00**	**-0,92**
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	395.163.624.976,00	361.129.918.265,00	365.892.837.648,00	380.445.288.448,00	377.340.888.273,00	-1,03
2	Belanja Tambahan Penghasilan	25.016.141.500,00	25.958.406.708,00	40.534.262.937,00	35.904.592.290,00	27.857.497.971,00	6,52
3	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH	2.143.000.000,00	3.193.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	450.000.000,00	-6,49
4	Belanja Pemungutan Pajak Daerah	804.750.000,00	1.025.875.000,00	1.022.225.000,00	1.142.000.000,00	301.607.499,00	-8,69
B	**Belanja Langsung**	**102.007.829.039,00**	**100.149.468.958,00**	**122.909.057.064,00**	**153.881.738.169,00**	**123.089.397.639,00**	**6,52**
1	Belanja Honorarium PNS	15.710.612.177,00	17.486.239.500,00	7.914.239.000,00	7.455.814.121,00	6.756.319.500,00	-14,65
2	Belanja Uang Lembur	1.788.903.000,00	1.904.546.000,00	2.429.902.069,00	2.303.485.600,00	1.289.561.000,00	-3,79
3	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	91.700.000,00	30.000.000,00	63.750.000,00	15.000.000,00	20.000.000,00	0,52
4	Belanja Kursu, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	3.930.669.000,00	1.935.207.750,00	1.854.285.700,00	1.495.136.597,00	1.116.640.300,00	-24,91
5	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	14.646.750.100,00	16.561.465.290,00	26.503.113.818,00	25.227.292.053,00	25.808.753.557,00	17,65
6	Belanja Makanan dan Minuman Pegawai	-	-	-	17.412.232.694,00	10.600.816.599,00	-39,12
7	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	1.268.354.600,00	1.107.171.500,00	1.196.349.882,00	1.487.905.545,00	893.412.500,00	-5,06
8	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu	726.201.850,00	1.015.315.400,00	1.121.737.636,00	2.168.906.181,00	155.143.000,00	12,70
9	Belanja Perjalanan Dinas	40.492.772.533,00	48.055.467.818,00	57.415.933.915,00	50.637.492.218,00	27.743.058.824,00	-4,72
10	Belanja Perjalanan Pindah Tugas	-	-	-			
11	Belanja Pemulangan Pegawai	-	-	-			
12	Belanja Modal (Kantor, Mobil Dinas, Meubelair, Peralatan dan Perlengkapan	23.351.865.779,00	12.054.055.700,00	24.409.745.044,00	45.678.473.160,00	48.705.692.359,00	36,97
TOTAL		**525.135.345.515,000**	**491.456.668.931,000**	**530.758.382.649,000**	**571.773.618.907,00**	**529.039.391.382,00**	**0,46**

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Luwu, Tahun 2020.

Pada tabel 3.19 Realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur dari tahun 2016 sampai dengan 2020 berfluktuatif baik dari sisi Belanja Tidak Langsung maupun Belanja Langsung. Rata-rata pertumbuhan untuk belanja tidak langsung lebih kecil jika dibandingkan dengan pertumbuhan belanja langsung dengan angka pertumbuhan masing-masing sebesar (0,92%) per tahun dan 6,52% per tahun

Selanjutnya dijelaskan mengenai proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur untuk 5 (lima) tahun terakhir yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.15.

Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Luwu Tahun 2016-2020

No	Tahun	Total Belanja untuk pemenuhan kebutuhan Aparatur	Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran)	Persentase (a/b)*100
		(a)	(b)	©
1	2016	525.135.345.515,000	1.488.781.858.138,00	35,27
2	2017	491.456.668.931,000	1.319.986.167.523,00	37,23
3	2018	530.758.382.649,000	1.339.376.148.125,39	39,63
4	2019	509.307.545.818,000	1.179.967.686.353,00	43,16
5	2020	490.846.163.172,000	1.101.551.198.736,13	44,56

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Luwu(diolah)

Dari persentase belanja pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total pengeluaran, pada tabel 3.20. dapat disimpulkan bahwa belanja untuk pembangunan semakin besar proporsinya setiap tahun terhadap APBD dibandingkan dengan belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur.

Selain analisis tentang pemenuhan kebutuhan aparatur juga perlu dilakukan analisis terhadap realisasi pengeluaran wajib dan mengikat, untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam suatu tahun anggaran seperti gaji dan tunjangan pegawai serta anggota dewan, bunga, belanja jasa kantor, sewa kantor yang telah ada kontrak jangka panjang atau belanja sejenis lainnya. Analisis terhadap realisasi pengeluaran wajib dan mengikat Pemerintah Kabupaten Luwu disajikan dalam tabel 3.21. berikut:

Tabel 3.16.
Analisis terhadap Realisasi Pengeluaran Wajib dan Mengikat
Tahun 2016-2020

(dalam jutaan rupiah)

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rerata Pertumbuhan (%)
A	**Belanja Tidak Langsung**	**608.188,30**	**623.248,13**	**653.425,46**	**689.821,31**	**663.250,48**	**2,26**
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	395.163,62	361.129,92	365.892,84	380.445,28	377.340,88	-1,03
2	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH	2.143,00	3.193,00	400,00	400,00	450,00	-6,49
3	Belanja Hibah	6.170,30	21.977,27	45.452,08	35.000,54	33.952,85	84,25
4	Belanja Bantuan Sosial	226,65	371,75	382,70	866,50	1.004,03	52,31
5	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	5.061,16	2.586,25	2.881,32	2.842,20	2.650,33	-11,40
6	Belanja bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	199.423,57	233.989,95	238.416,52	270.266,79	247.852,39	6,07
B	**Pembiayaan Pengeluaran**	**7.693,49**	**36.564,48**	**5.517,62**	**4.009,62**	**3.008,26**	**59,51**
1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	7.000,00	7.000,00	5.500,00	4.000,00	3.000,00	-18,43
2	Pembayaran Utang Pemda		29.445,13				
3	Pengeluaran Pembiayaaan Lainnya	693,49	119,35	17,62	9.62	8,26	-56,89
TOTAL (A+B)		**615.881,79**	**659.812,61**	**658.943,08**	**693.830,93**	**666.258,74**	**2,08**

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Luwu, Tahun 2020.

Dapat dilihat pada tabel 3.21. bahwa rata-rata pertumbuhan belanja tidak langsung lebih kecil dari pembiayaan pengeluaran yaitu sebesar 2,26% dan 59,51%. Pada pembiayaan pengeluaran terdapat pembayaran utang pemda pada tahun 2017, namun pada tahun 2018-2020 sudah tidak terdapat data tersebut. Maka dari itu, realisasi pada tahun 2017 meningkat secara signifikan mencapai Rp. 36,56 Milyar. Sedangkan pada tahun 2018 mengalami penurunan yang signifikan senilai Rp. 5,52 Milyar.

3.2.2 Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan keuangan daerah Kabupaten Luwu berdasarkan surplus ataupun defesit anggaran. Kondisi surplus berarti pendapatan daerah lebih besar dari belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah, sebaliknya kondisi defesit berarti belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah lebih besar dari pendapatan daerah. Analisis pembiayaan daerah meliputi: a) Analisis Sumber Penutup Defisit Riil; b) Analisis Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA); c) Analisis Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA); dan d) Analisis Proyeksi Pembiayaan Daerah

a. Analisis Sumber Penutup Defesit Riil

Analisis ini dilakukan untuk memberi gambaran masa lalu tentang kebijakan anggaran untuk defisit riil anggaran. Perkembangan defisit riil anggaran Pemerintah Kabupaten Luwu disajikan pada tabel 3.17. berikut:

Tabel 3.17.
Penutup Defesit Riil Anggaran
Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Realisasi Pendapatan Daerah	1.397.284.611.385,39	1.292.583.077.131,60	1.323.121.884.246,45	1.473.541.520.417,36	1.372.899.156.935,71
	Dikurangi					
2	Belanja Daerah	1.481.088.366.252,00	1.283.421.687.609,00	1.333.858.528.125,39	1.175.958.066.703,00	1.090.295.246.636,13
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	7.693.491.886,00	36.564.479.914,00	5.517.620.000,00	4.009.619.650,00	11.255.952.100,00
A	**Defesit Riil**	**(91.497.246.752,61)**	**(27.403.090.391,40)**	**(16.254.263.878,94)**	**20.464.829.153,36**	**20.845.226.813,58**
	Ditutup oleh Realisasi Penerimaan Pembiayaan :					
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran sebelumnya	153.165.357.869,10	61.673.896.116,49	34.252.571.032,09	17.999.507.153,15	38.465.486.306,51
2	Pencairan Dana Cadangan					
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	0,00				
4	Penerimaan Pinjaman Daerah					
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	5.785.000,00	2.108.400,00	1.200.000,00	1.150.000,00	150.000,00
6	Penerimaan Piutang Daerah					
B	**Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah**	**153.171.142.869,10**	**61.676.004.516,49**	**34.253.771.032,09**	**18.000.657.153,15**	**38.465.636.306,51**
A-B	**Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun Berkenan**	**61.673.896.116,49**	**34.272.914.125,09**	**17.999.507.153,15**	**38.465.486.306,51**	**59.310.863.120,09**

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Luwu.

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa selama kurun waktu 2016-2018 APBD Kabupaten Luwu mengalami defisit, yang artinya realisasi pendapatan daerah kurang dari realisasi belanja daerah. Sedangkan pada tahun 2019-2020 APBD Kabupaten Luwu mengalami surplus, yang artinya realisasi pendapatan daerah lebih besar dari realisasi belanja daerah.

Defesit riil dapat ditutupi dengan berbagai komponen, yaitu SiLPA tahun anggaran sebelumnya, Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah, dan Penerimaan Piutang Daerah. Komponen-komponen tersebut termasuk dalam Penerimaan Pembiayaan Daerah, sehingga pada tahun 2016 sampai dengan 2018 diperoleh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan masing-masing sebesar Rp61,67 Milyar pada tahun 2016, Rp.34,27 Milyar pada tahun 2017 dan Rp.17,99 Milyar pada tahun 2018. Sedangkan Pada tahun 2019 – 2020 memiliki tambahan dana yang diperoleh dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran sebesar Rp. 38,47 Milyar pada tahun 2019 dan Rp. 59,10 Milyar pada tahun 2020.

Komposisi penutup defesit riil anggaran (tabel 3.18) menunjukkan bahwa pada tahun 2016 defisit riil tidak dapat ditutup oleh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran sebelumnya sebesar -1,67%, begitupun pada tahun 2017 sebesar -2,25% dan pada tahun 2018 sebesar -2,11%. Sedangkan surplus pada tahun 2019 memiliki nilai SILPA sebesar 0,88% dan tahun 2020 sebesar 1,85%.

Tabel 3.18.
Komposisi Penutup Defesit Riil Anggaran
Tahun 2016-2020

No	Uraian	Proporsi dari Total defesit Riil (%)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran sebelumnya	-1,67	-2,25	-2,11	0,88	1,85
2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00		
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan					
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00		
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	(0,0000632)	(0,0000769)	(0,0000738)	0,0000561	0,0000072
6	Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00	0,00		

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Luwu.

Dengan memperhatikan data defisit dan surplus riil anggaran dan komposisi penutup defisit riil anggaran selama tahun 2016 sampai dengan 2020, maka dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten

Luwu memiliki Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan sebagai akumulasi surplus/defisit riil anggaran ditambah penerimaan pembiayaan.

b. Analisis Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan

Analisis Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenaan dilakukan untuk memberi gambaran tentang komposisi sisa lebih perhitungan anggaran. Dengan mengetahui SiLPA realisasi anggaran periode sebelumnya, dapat diketahui kinerja APBD tahun sebelumya yang lebih rasional dan terukur. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 mendefinisikan SiLPA sebagai selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran, sehingga keberadaan SiLPA tersebut dapat bermakna positif dan negatif. Bermakna positif jika SiLPA tersebut merupakan hasil dari efektifnya penerimaan PAD sehingga terjadi over target dan dibarengi oleh efesiensi anggaran pemerintah daerah. Sedangkan SiLPA bermakna negatif bila berasal dari tertundanya belanja langsung program dan kegiatan Pemerintah Daerah. Perolehan SiLPA Kabupaten Luwu selama tahun tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 diperoleh dari sisa penghematan dan Pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan daerah yang Sah, sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 3.19.
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016		2017		2018		2019		2020	
		Rp	% dari SILPA	Rp	% dari SILPA	Rp	% dari SILPA	Rp	% dari SILPA	Rp	% dari SILPA
	Jumlah SILPA	**61.673.896.116,49**	**100,00**	**34.272.914.125,09**	**100,00**	**17.999.507.153,15**	**100,00**	**38.465.486.306,51**	**100,00**	**59.310.863.120,09**	**100,00**
1	Pelampauan Penerimaam PAD	(4.034.726.380,01)	-6,54	2.374.833.922,60	6,93	(3.090.275.921,55)	-17,17	-5.573.134.190,64	(14,49)	10.312.843.213	17,39
2	Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan	(28.287.789.842,00)	-45,87	(8.468.207.088,000)	-24,71	(4.457.493.983,00)	-24,76	-7.501.599.849,27	(19,50)	(87.372.847.659)	(147,31)
3	Pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	22.472.928.494,40	36,44	15.276.910.917,00	44,57	(9.840.630.090,00)	-54,67	3.812.203.943,00	9,91	(2.499.690.606)	(4,21)
4	Sisa Penghematan Belanja atau akibat lainnya	71.129.395.572,10	115,33	24.699.069.644,49	72,07	34.997.164.600,70	194,43	48.133.309.618,42	125,13	125.870.342.558	212,22
5	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	394.088.272,00	0,64	390.306.729,00	1,14	390.742.547,00	2,17	-405.293.215,00	(1,05)	13.000.215.614	21,92
6	kegiatan lanjutan										

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Luwu, Tahun 2020.

c. Analisis Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Berkenaan

Analisis Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan bertujuan untuk memperoleh gambaran secara riil sisa lebih pembiayaan anggaran yang dapat digunakan dalam penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Hasil analisis ini dapat digunakan untuk menghitung kapasitas penerimaan pembiayaan daerah dengan proyeksi 5 (lima) tahun kedepan.

Tabel 3.20.
Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan
Tahun 2016-2019

(dalam juta rupiah)

NO	URAIAN	2016	2017	2018	2019
1	Saldo Kas Neraca Daerah	62.067,98	34.663,22	18.390,25	38.918,95
	dikurangi				
2	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	394,09	390,31	390,74	390,67
3	Kegiatan Lanjutan				
Sisa Lebih (Riil) PembiayaanAnggaran		**61.673,90**	**34.272,91**	**17.999,51**	**38.528,28**

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Luwu

3.3 Kerangka Pendanaan

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Tahapan awal yang dilakukan adalah mengidentifikasi seluruh penerimaan daerah dan sumber penerimaan. Kapasitas riil keuangan daerah adalah total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama.

Kebijakan Alokasi Anggaran secara umum diarahkan untuk mendanai kebutuhan belanja Pemerintah Daerah, baik melalui belanja langsung Perangkat Daerah yang ada dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, maupun melalui belanja tidak langsung yang mengikutsertakan peran aktif pihak-pihak pemangku kepentingan. Pembiayaan ditetapkan untuk menutup defisit yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat. Kebijakan pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Dalam upaya pencapaian sasaran ataupun target rancangan struktur APBD, baik yang menyangkut Pendapatan, Belanja maupun Pembiayaan Daerah, maka Pemerintah Daerah mengembangkan strategi sebagai berikut:

a. Memantapkan kinerja pembangunan ekonomi sebagai upaya untuk meningkatkan investasi dan optimalisasi pemanfaatan potensi daerah, sehingga akan berdampak positif pada pendapatan daerah termasuk juga PAD;
b. Menciptakan iklim investasi yang kondusif dan pengkajian peluang investasi dan adanya kepastian hukum untuk meningkatkan minat investor menanamkan modalnya di kabupaten Luwu;
c. Identifikasi dan penggalian sumber-sumber obyek pajak dan retribusi daerah untuk meningkatkan PAD;
d. Pengkajian dan penyesuaian Perda-Perda yang berkaitan dengan pajak dan retribusi daerah;
e. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah atasan guna meningkatkan sumber-sumber pendapatan daerah;
f. Menyusun agenda prioritas pembangunan untuk memantapkan dan memfokuskan kinerja pelaksanaan pembangunan;
g. Menyusun dan memantapkan indikator kinerja program dan kegiatan pembangunan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan APBD;
h. Meningkatkan partisipasi/pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.
i. Melakukan pinjaman daerah untuk percepatan pembangunan infrastruktur yang memiliki daya ungkit yang besar terhadap peningkatan perekonomian daerah.

3.3.1.Asumsi Ekonomi, Sosial dan Fiskal

Proyeksi pendapatan dan belanja daerah didasarkan atas asumsi makro ekonomi daerah, asumsi kondisi sosial masyarakat, dan asumsi pokok-pokok kebijakan fiskal untuk tahun 2020-2024. Ketiga asumsi ini memiliki korelasi secara langsung dan secara tidak langsung pada keuangan daerah ke depan, baik dari sisi pendapatan daerah maupun belanja daerah. Artinya, asumsi tersebut, selain akan menuntun proyeksi besaran pendapatan daerah, juga akan menetukan besarnya kebutuhan belanja daerah untuk jangka waktu lima tahu ke depan.

Tabel 3.21.
Asumsi Indikator Makro Ekonomi dan Sosial
Kabupaten Luwu 2019-2024

No	Indikator	Tahun					
		2019 Capaian	2020 Capaian	2021 Target	2022 Target	2023 Target	2024 Target
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,26	1,30	4,50	5,84	5,99	7,85
2	Tigkat Pengangguran (%)	3,59	4,94	3,77	3,39	3,04	2,78
3	Inflasi (%)	4,06	3,96	3,86	3,76	3,57	3,39
4	PDRB per Kapita (Rp Juta)	43,25	43,96	45,30	48,05	51,20	54,05
5	Tingkat Kemiskinan (%)	12,78	12,65	12,30	12,10	11,97	11,92
6	Indeks Pembangunan Manusia	70,39	70,80	71,44	72,01	72,58	72,91

Asumsi makro ekonomi daerah Kabupaten Luwu yang diaharapkan memberikan dampak positif pada kondisi keuangan daerah Kabupaten Luwu lima tahun kedepan, yakni mencakup asumsi pertumbuhan ekonomi daerah, tingkat pengangguran, tingkat inflasi dan PDRB per kapita. Keempat indikator makro ekonomi daerah tersebut, bukan hanya berimplikasi pada kebutuhan belanja pembangunan daerah yang juga tidak sedikit, tetapi juga diharapkan dapat memberi dampak langsung pada peningkatan kapasitas keuangan daerah. Kemudian secara tidak langsung menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat secara luas, melalui pertumbuhan konsumsi rumah tangga, kegiatan ekonomi sektor swasta, serta meningkatkan aktivitas perdagangan domestik dan luar negeri.

Pertumbuhan ekomoni daerah Kabupaten Luwu untuk lima tahun kedepan diasumsikan dan ditargetkan bertumbuh secara konsisten melebihi pertumbuhan ekonomi Provinsi dan Nasional, sehingga Kabupaten Luwu diharapkan menjadi salah satu pilar perekonomian Provinsi dan Nasional. Asumsi pertumbuhan ekonomi ini tidak hanya diharapkan secara konsisten terus meningkat, tetapi juga diharapkan menjadi lebih inklusif dan berkualitas tinggi sehingga tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan diharapkan menurun secara signifikan untuk lima tahun kedepan. Dengan demikian, stabilitas harga-harga dapat tercipta dan daya beli masyarakat tetap terjaga pada level lebih tinggi, melebihi capaian dalam beberapa tahun terakhir.

Capaian Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Luwu pada tahun 2020 sebesar 1,30%. Walaupun pertumbuhan ekonomi tidak mengalami peningkatan dari periode sebelumnya, namun masih lebih tinggi dibandingkan Provinsi Sulawesi Selatan yaitu -0,70%. Tingkat pengangguran pada tahun 2019 mencapai 4,66, lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya. Sehingga pada tahun 2020 ditargetkan akan menurun

dari periode sebelumnya. Sedangkan angka kemiskinan pada tahun 2019 sampai 2020 mengalami penurunan dari periode sebelumnya yakni 12,78% dan 12,65%.

Melalui capaian indikator makro ekonomi daerah yang menjadi asumsi dasar tersebut, diharapkan tingkat pembangunan manusia melalui pengukuran IPM Kabupaten Luwu akan terus membaik bukan hanya pada nilai indeksnya tetapi juga peningkatannya secara regional dan nasional. Indikator makro ekonomi daerah yang tinggi akan menjamin kemampuan keuangan rumah tangga masyarakat juga meningkat dan kemampuan kapasitas keuangan daerah Kabupaten Luwu juga akan semakin besar. Kondisi ini akan menciptakan keadaan yang kondusif untuk meningkatkan layanan sosial ekonomi masyarakat dalam segala aspek, seperti layanan dasar pendidikan, kesehatan, ketertiban serta aksesibilitas ekonomi yang semakin baik. Kondisi ini menjadi syarat mutlak pencapaian kualitas manusia Kabupaten Luwu yang semakin tinggi, yang ditunjukkan dengan angka IPM yang semakin membaik, setara dengan daerah-daerah maju lainnya baik di tataran regional dan nasional.

Indeks pembangunan manusia tahun 2019 lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya yaitu sebesar 70,39. Hal ini sudah sesuai dengan target yang akan dicapai. Pada tahun 2020 pemerintah Kab. Luwu menargetkan sebesar 70,80 danpeningkatan ini akan terus berlanjut pada tahun-tahun berikutnya. Sama halnya komponen indeks pembangunan manusia juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun sehingga kualitas manusia Kabupaten Luwu semakin baik.

Selanjutnya, asumsi-asumsi pokok kebijakan fiskal juga diperkirakan menunjukkan tren positif. Pertumbuhan PAD secara rata-rata diperkirakan akan bertumbuh 4,01 persen pertahun dengan kecenderungan yang meningkat. Sedangkan, dana perimbangan diperkirakan bertumbuh rata-rata 2,50 persen selama periode 2020-2024 dengan kecenderungan yang melambat. Perkiraan melambatnya pertumbuhan Dana Perimbangan bersumber dari pertumbuhan DAU dan DAK yang diperkirakan akan melambat karena kondisi penerimaan negara yang tidak mencapai target.

Tabel 3.22.
Asumsi Pokok-pokok Kebijakan Fiskal
Kabupaten Luwu 2020-2024

No	Indikator	Tahun				
		2020 Capaian	2021 Target	2022 Target	2023 Target	2024 Target
1	Pertumbuhan PAD	4,70%	3,78%	3,78%	3,79%	3,79%
2	Pertumbuhan Dana Perimbangan:	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A	Pertumbuhan DBH	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
B	Pertumbuhan DAU	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
C	Pertumbuhan DAK	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%

3.3.2.Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah

Struktur Pendapatan dan Belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2021 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Pendapatan Daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Sedangkan komponen belanja daerah dibagi atas belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer, sebagaimana terlihat pada tabel III.28.

Pendapatan dan belanja daerah dalam perspektif rencana disajikan melalui hasil proyeksi pendapatan dan belanja daerah. Dasar utama dalam proyeksi pendapatan daerah mencakup empat determin, yakni: (1) asumsi indikator makro ekonomi daerah; (2) kebijakan di bidang keuangan negara; (3) kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi keuangan daerah; serta (4) angka rata-rata pertumbuhan setiap obyek pendapatan daerah. Sedangkan untuk proyeksi belanja daerah, selain mengacu pada analisis asumsi indikator makro ekonomi daerah, juga mengacu, pada analisis kebijakan. Berikut ini disajikan hasil proyeksi pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Luwu untuk periode 2020-2024 yang akan datang.

Selama periode 2020-2024, pendapatan daerah Kabupaten Luwu diharapkan meningkat secara signifikan dari Rp1,45 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp1,59 triliun pada tahun 2024. Peningkatan ini diyakini akan lebih banyak didorong oleh pertumbuhan pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak daerah serta dari dana lain-lain pendapatan daerah yang sah yang bersumber dari bantuan keuangan dari provinsi pemerintah daerah lainnya. Sedangkan dana perimbangan meskipun masih cukup dominan, tetapi dengan tingkat pertumbuhan yang lebih kecil. Hal ini karena komponen dana perimbangan tidak sepenuhnya mampu dikontrol oleh pemerintah daerah, karena merupakan komponen yang berasal dari luar daerah. Sedangkan PAD dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan komponen pendapatan yang betul-betul berasal dari dalam Kabupaten Luwu sendiri, sehingga lebih mampu dikontrol oleh pemerintah melalui kebijakan keuangan daerahnya.

Optimisme pertumbuhan pendapatan daerah, khususnya yang berasal dari daerah sendiri di Kabupaten Luwu untuk lima tahun kedepan didasari pada berbagai aspek. Salah satunya dari besarnya pertumbuhan sumber-sumber pendapatan daerah yang baru, didorong oleh pertumbuhan ekonomi daerah yang diasumsikan akan bertumbuh signifikan kedepan. Potensi pendapatan daerah dari berkembangnya aktivitas ekonomi

masyarakat, akan direspon dengan kebijakan pengelolaan keuangan daerah berupa intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah yang semakin membaik.

Komponen Pendapatan diproyeksikan berdasarkan data pendapatan dari masing-masing Perangkat Daerah yang menghasilkan Pendapatan Daerah. Data tersebut ditabulasi dan diproyeksi dengan beberapa asumsi:

1. Retribusi daerah meningkat rata-rata 2,00% per tahun, meliputi retribusi pelayanan kesehatan, pemakaian kekayaan daerah, pelayanan kebersihan, pelayanan perparkiran, izin trayek, pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), penjualan hasil perikanan dan pertanian, tempat pelalangan ikan, tempat rekrasi, pelayanan tera/tera ulang, dan retribusi pasar.
2. Pajak daerah meningkat rata-rata 5% pertahun.

Selain itu, diperkirakan kebijakan keuangan Negara ke depan, akan semakin mendorong optimalnya pelaksanaan desentralisasi fiskal. Peluang mengembangkan sumber-sumber pendapatan baru dan pengalihan pengelolaan pajak yang semakin beragam akan membuka potensi peningkatan kapasitas fiskal Kabupaten Luwu yang semakin besar. Pada saat yang sama upaya pemerintah pusat dalam berbagai kebijakan fiskal nasional, nampaknya akan berpeluang meningkatkan pendapatan dalam negeri, sehingga transfer fiskal ke daerah juga akan semakin meningkat.

Ekspektasi pertumbuhan kinerja pendapatan daerah yang harapkan sebagian besar dikontribusi dari dalam daerah sendiri. Kondisi ini akan semakin memperbaiki tingkat kemandirian fiskal Kabupaten Luwu lima tahun kedepan. Ketergantungan pada sumber pendapatan dari luar daerah diharapkan akan semakin mengecil, sehingga akan menuju keseimbangan sumber keuangan daerah yang baik pada periode-periode pembangunan selanjutnya.

Pada saat yang sama, seiring dengan pertumbuhan pendapatan daerah, dimana potensinya terutama didorong oleh pertumbuhan ekonomi daerah yang tinggi, akan berdampak pada pertumbuhan belanja daerah yang juga pesat .Asumsi makro ekonomi dan kondisi sosial yang telah ditetapkan dan diharapkan mampu dicapai selama periode lima tahun ke depan, berimplikasi pada besarnya kebutuhan belanja daerah, terutama pada program-program strategis yang mendorong pertumbuhan kegiatan ekonomi masyarakat.

Kebutuhan belanja daerah yang besar ini,mengharuskan pemerintah daerah mengambil kebijakan anggaran defisit, sebagai langkah ekspansi fiskal guna menjaga *trend* pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita

masyarakat yang tinggi. Menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif ditandai dengan penurunan tingkat penganggaran dan tingkat kemiskinan yang signifikan, serta peningkatan IPM yang konsisten. Artinya kebijakan penganggaran daerah yang Defisit untuk lima tahun kedepan harus dapat memastikan pada pencapaian tujuan dan sasaran peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Luwu secara menyeluruh. Hal ini ditunjukkan dengan peningkatan signifikan pada alokasi belanja langsung khususnya pada alokasi belanja modal, melebihi pertumbuhan alokasi belanja tidak langsung.

Perhitungan kemampuan anggaran Pemerintah Daerah terkait erat dengan kewajiban untuk membangun dan memberikan pelayanan publik. Pelaksanaan pembangunan daerah bergantung pada anggaran selama lima tahun kedepan. Proyeksi pendapatan dilakukan berdasarkan histori pendapatan lima tahun ke belakang. Proyeksi keuangan juga didasarkan pada rencana dan target pemerintah daerah, seperti target peningkatan PAD, rencana investasi dan lain sebagainya. Perkiraan pendapatan daerah disajikan secara indikatif dan disesuaikan dengan kondisi dan informasi terbaru pada saat perencanaan dan penganggaran setiap tahunnya. Tabel proyeksi keuangan Kabupaten Luwu 2019-2024 ditunjukkan pada tabel 3.23 di bawah ini.

Tabel 3.23.
Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu
Tahun 2019-2020

No	Uraian	2019	2020
1	**PENDAPATAN**	**1.479.114.654.608,00**	**1.452.458.851.988,00**
1.1	**Pendapatan Asli Daerah**	**115.652.178.540,00**	**112.603.499.146,00**
	Pajak Daerah	22.865.000.000,00	21.370.000.000,00
	Retribusi Daerah	9.610.000.000,00	8.750.000.000,00
	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang dipisahkan	5.462.261.986,00	5.220.161.952,00
	Lain-lain PAD yang Sah	77.714.916.554,00	77.263.337.194,00
1.2	**Dana Perimbangan**	**1.051.464.387.068,00**	**949.583.544.714,00**
	Dana Bagi Hasil Pajak/bagi hasil bukan pajak	17.691.267.715,00	16.348.911.413,00
	Dana Alokasi Umum	718.676.594.000,00	659.004.993.000,00

No	Uraian	2019	2020
	Dana Alokasi Khusus	315.096.525.353,00	274.229.640.301,00
1.3	**Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**	**311.998.089.000,00**	**390.271.808.128,00**
	Hibah	54.070.000.000,00	83.549.731.200,00
	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	55.034.000.000,00	52.002.645.331,00
	Dana Penyesuaian dan OtoNomormi khusus	195.242.489.000,00	220.436.237.000,00
	Bantuan keuangan dari provinsi pemerintah daerah lainnya	7.651.600.000,00	34.283.194.597,00
	Pendapatan Lainnya	-	-
2	**Belanja**	**1.219.599.863.687,15**	**1.225.939.130.948,00**
2.1	**Belanja Tidak Langsung**	**788.034.660.996,15**	**805.855.454.290,00**
	Belanja Pegawai	476.578.734.770,15	486.652.945.036,00
	Belanja Hibah	36.310.628.100,00	45.566.562.254,00
	Belanja Bantuan Sosial	1.081.000.000,00	1.133.000.000,00
	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	3.247.500.000,00	2.997.500.000,00
	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa	270.266.798.126,00	260.505.447.000,00
	Belanja tidak terduga	550.000.000,00	9.000.000.000,00
2.2	**Belanja Langsung**	**705.079.500.817,00**	**683.586.623.658,00**
	Belanja Pegawai	43.528.700.393,00	31.478.405.826,00
	Belanja Barang dan Jasa	354.288.614.024,00	355.084.546.964,00
	Belanja Modal	307.262.186.400,00	297.023.670.868,00
3	**Pembiayaan Daerah**	**13.999.507.205,15**	**36.983.225.960,00**
	Penerimanaan Pembiayaan	17.999.507.205,15	39.983.225.960,00
	Pengeluaran Pembiayaan	4.000.000.000,00	3.000.000.000,00

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Luwu

Tabel 3.24.
Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu
Tahun 2021-2024

No	Uraian	2021 (Rencana Capaian)	2022 (Rencana Capaian)	2023 (Rencana Capaian)	2024 (Rencana Capaian)
1	**PENDAPATAN**	**1.450.029.784.249,00**	**1.610.207.103.070,61**	**1.791.613.351.323,11**	**2.000.215.893.162,88**
1.1	**Pendapatan Asli Daerah**	**120.060.000.000,00**	**150.075.000.000,00**	**188.513.750.000,00**	**240.079.006.250,00**
1.1.1	Pajak Daerah	25.350.000.000	31.687.500.000,00	40.243.125.000,00	52.114.846.875,00
1.1.2	Retribusi Daerah	10.150.000.000	12.687.500.000,00	16.113.125.000,00	20.866.496.875,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang dipisahkan	5.200.000.000	6.500.000.000,00	8.157.500.000,00	10.237.662.500,00
1.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	79.360.000.000	99.200.000.000,00	124.000.000.000,00	156.860.000.000,00
1.2	**Pendapatan Transfer**	**1.256.524.929.209,00**	**1.381.546.108.177,81**	**1.519.012.586.787,81**	**1.670.163.781.360,12**
1.2.1	Pendapatan Transfer Pusat	1.193.393.534.000	1.312.732.887.400,00	1.444.006.176.140,00	1.588.406.793.754,00
1.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	63.131.395.209	68.813.220.777,81	75.006.410.647,81	81.756.987.606,12
1.3	**Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**	**73.444.855.040,00**	**78.585.994.892,80**	**84.087.014.535,30**	**89.973.105.552,77**
1.3.1	Hibah	12.936.439.040	13.841.989.772,80	14.810.929.056,90	15.847.694.090,88
1.3.2	Lain-lain pendapatan	60.508.416.000	64.744.005.120,00	69.276.085.478,40	74.125.411.461,89
2	**BELANJA**	**1.474.495.791.073,00**	**1.610.207.103.070,61**	**1.791.613.351.323,34**	**2.000.215.893.162,95**
2.1	**Belanja Operasi**	**940.279.448.301,00**	**1.020.568.803.757,71**	**1.124.256.348.458,38**	**1.269.685.971.796,15**
2.1.1	Belanja Pegawai	592.843.691.345	655.092.400.111,38	734.031.087.301,80	836.795.439.524,05
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	317.342.882.052	334.652.694.818	358.428.383.455	392.130.643.949
2.1.3	Belanja Hibah	29.470.374.904	30.165.097.603,14	31.093.277.401,94	40.000.000.000,00
2.1.4	Belanja Bantuan Sosial	622.500.000	658.611.225,00	703.600.299,17	759.888.323,10
2.2	**Belanja Modal**	**271.267.892.772**	**301.386.618.442**	**338.153.012.655**	**373.945.657.636**
2.3.	**Belanja Tak Terduga**	**3.000.000.000**	**3.285.306.000,00**	**3.679.542.720,00**	**3.910.294.203,06**
2.4.	**Belanja Transfer**	**259.948.450.000**	**284.966.374.870,90**	**325.524.447.489,93**	**352.673.969.526,00**
2.1.4	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	3.443.000.000	3.721.986.290,00	4.205.844.507,70	4.627.270.127,37

No	Uraian	2021 (Rencana Capaian)	2022 (Rencana Capaian)	2023 (Rencana Capaian)	2024 (Rencana Capaian)
2.1.5	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa	256.505.450.000	281.244.388.580,90	321.318.602.982,23	348.046.699.398,63
3	**PEMBIAYAAN**	**24.466.006.824,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.1	Penerimanaan Pembiayaan	29.966.006.824,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	5.500.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
Pembiayaan Netto					
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)		-	-	-	-

Sumber: Hasil Proyeksi

3.3.3.Perhitungan Kerangka Pendanaan

Berdasarkan hasil proyeksi pendapatan dan belanja daerah, dapat dirumuskan kerangka pendanaan keuangan daerah Kabupaten Luwu untuk lima tahun kedepan. Kerangka pendanaan ini memaparkan hasil penghitungan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah beserta dengan alokasi prioritas pembangunan daerah Kabupaten Luwu selama periode 2020-2024 yang akan datang.

Tabel 3.25.
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah
Tahun 2020-2024

No	Uraian	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah				
		Sesuai PP 58 Tahun 2005	Sesuai PP 12 Tahun 2019			
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Pendapatan	**1.452.458.851.988,00**	**1.450.029.784.249,00**	**1.610.207.103.070,61**	**1.791.613.351.323,11**	**2.000.215.893.162,88**
2	Pencairan Dana Cadangan (Sesuai Perda)	0	0	0	0	0
3	Sisa Lebih Rill Perhitungan Anggaran	0	0	0	0	0
4	Penerimaan Pembiayaan	39.983.225.960,00	29.966.006.824,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
	Total Penerimaan	1.492.442.077.948,00	1.479.995.791.073,00	1.615.207.103.070,61	1.796.613.351.323,11	2.005.215.893.162,88
	Dikurangi					
5	Belanja Operasi + BTT + Belanja Transfer	**1.192.418.407.080,00**				
6	Pengeluaran Pembiayaan	3.000.000.000,00	5.500.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
7	Kapasitas Riil kemampuan Keuangan Daerah	**297.023.670.868,00**	**1.450.029.784.249,00**	**1.610.207.103.070,61**	**1.791.613.351.323,11**	**2.000.215.893.162,88**

Sumber: Hasil Proyeksi Tim Penyusun

Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kabupaten Luwu diharapkan meningkat menjadi Rp725,31 miliar pada tahun 2024. Peningkatan kapasitas riil keuangan daerah ini selain diharapkan didorong oleh pertumbuhan pendapatan daerah, khususnya pendapatan dalam daerah sendiri, juga diharapkan dari sejumlah pelampauan target pendapatan dari kreatifitas dan inovasi pemerintah daerah sebagai konsekuensi dari penganggaran defisit. Pelampauan sejumlah komponen pendapatan daerah, antara lain pelampauan PAD, pelampauan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, dan lain sebagainya diharapkan dari efektifnya pelaksanaan kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah.

Selain itu, ada rasa optimisme yang tinggi dari bertumbuhnya aktivitas ekonomi masyarakat dari capaian pertumbuhan ekonomi daerah yang tinggi sehingga mampu menghadirkan sumber-sumber pendapatan daerah yang baru. Tantangan terbesarnya adalah pemerintah daerah dituntut untuk secara kreatif dan inovatif menghadirkan sejumlah alokasi belanja daerah yang secara nyata mampu menciptakan sumber-sumber pendapatan baru tersebut, baik berupa pajak dan retribusi daerah,obyek bagi hasil pajak/nonpajak, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Tabel 3.26.

Rencana Penggunaan Kapasitas Rill Kemampuan Keuangan Daerah
Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kapasitas Rill Kemampuan	**297.023.670.868,00**	**1.474.495.791.073,00**	**1.610.207.103.070,61**	**1.791.613.351.323,11**	**2.000.215.893.162,88**
Prioritas I	33,78	30%	28%	26%	23%
Proporsi Priorotasi I	**277.656.062.156,21**	**436.269.644.000**	**445.206.239.000**	**463.270.191.000**	**465.015.896.000**
Prioritas II	49,71	33%	37%	42%	48%
Proporsi Prioritas II	**408.614.445.581,21**	**481.282.149.073**	**597.976.613.070,61**	**757.141.933.323,11**	**957.540.908.162,88**
Prioritas III	16,51	38%	35%	32%	29%
Proporsi Prioritas III	**135.742.963.720,81**	**556.943.998.000**	**567.024.251.000**	**571.201.227.000**	**577.659.089.000**

Selanjutnya kapasitas riil kemampuan keuangan daerah ini dirumuskan rencana penggunaannya ke dalam kategori tiga prioritas. Mengacu pada ketentuan peraturan perundangan, prioritas I dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar. **Prioritas I** ini ditujukan untuk urusan wajib pelayanan dasar dari pemerintah daerah. **Prioritas II** dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi kepala daerah. Dalam hal pemenuhan pokok visi dan misi kepala daerah termasuk dalam kategori urusan wajib pelayanan dasar, maka dikelompokkan dalam prioritas I. Sedangkan **prioritas III** dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya, khususnya yang terkait dengan fungsi penunjang urusan.

Untuk periode 2020-2024 yang akan datang, prioritas kapasitas riil keuangan daerah Kabupaten Luwu akan dominan dialokasikan untuk prioritas I, terutama untuk belanja urusan pendidikan, urusan kesehatan, belanja pembangunan infrastruktur daerah, dan belanja urusan wajib pelayanan dasar lainnya. Hal ini diharapkan untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi inklusif, yang ditandai dengan penurunan tingkat kemiskinan, rasio gini, dan penurunan tingkat pengangguran. Pada saat yang sama, dalam periode ini mampu tetap menjaga kualitas pembangunan daerah yang tinggi untuk memastikan peningkatan pembangunan manusia berjalan baik dan berkesinambungan yang ditandai peningkatan IPM yang konsisten. Artinya, secara teknokratik pemerintah daerah dituntut untuk menghadirkan desain dan rancangan program-program pembangunan daerah yang memastikan pencapaian tujuan dan sasaran peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan berkesinambungan.

3.4. Dampak Pandemi Terhadap Pendapatan Kabupaten Luwu Tahun 2020

Perekonomian Kabupaten Luwu Tahun 2020 mengalami perlambatan yang sangat signifikan disebabkan pandemi *Covid-19* sehingga secara tidak langsung memicu penurunan pendapatan daerah. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa sektor lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan negatif (kontradiksi) diantaranya ialah sektor lapangan usaha industri pengolahan. Sektor lapangan usahan ini mengalami penurunan secara umum disebabkan oleh banyaknya toko-toko yang menjual hasil industri pengolahan seperti makanan dan camilan tutup atau mengamali penurunan penjualan sehingga kontribusi terhadap pendapatan daerah menurun. Sektor transportasi dan pergudangan juga memberikan kontribusi penurunan diakibatkan pandemi *Covid-19*. Berkurangnya pemasukan pada angkutan darat dan penerbangan dikarenakan seluruh mobilitas

masyarakat pada triwulan II dan III sangat terbatas. Hal ini dipicu karena adanya penurunan retribusi izin trayek dari 10.880,00 pada tahun 2019 menurun menjadi 3.605 juta rupiah tahun 2020. Sektor penyediaan akomodasi dan makan minum mengalami pertumbuhan negatif akibat banyaknya restoran dan jumlah pengunjung hotel akibat pembatasan aktivitas masyarakat. Sehingga menyebabkan penurunan pada pajak hotel dan pajak restoran dari periode sebelumnya.

Sektor yang memberikan kontribusi positif terhadap pendapatan daerah yaitu informasi dan komunikasi. Data pelanggan yang didpatkan dari PT. Telkom (Perseo) Cabang Palopo untuk wilayah Belopa menunjukkan bahwa terdapat peningkatan yang cukup drastis yaitu sebesar 63,21% kenaikan jumlah pengguna layan internet Rumah Tangga. Hal ini disebabkan karena seluruh aktivitas pendidikan dan sebagian besar perkantoran dilaksakanakan secara daring, Jasa kesehatan dan kegiatan sosial juga memberikan kontribusi positif terhadap pendapatan daerah Kabupaten Luwu. Hal ini disebabkan adanya peningkatan penjualan obat-obatan dan vitamin di apotek selain untuk penyembuhan juga untuk menambah imunitas tubuh. Selain itu intensitas pelaksanaan *rapid test* oleh instansi daerah yang bekerjasama dengan klinik-klinik swasta dalam melakukan juga memberikan kontribusi. Disubsektor Pengadaan air juga memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah. Hal ini disebakan adanya peningkatan jumlah pelanggan pada tahun 2020 sebesar 4,49%.

Dapat disimpulkan, situasi pandemi *covid 19* cukup berdampak pada pendapatan daerah yang mengalami penurunan dari tahun 2019 senilai 1.473.541,52 juta rupiah menjadi 1.372.899,16 juta rupiah di tahun 2020. Sehingga pemerintah daerah akan melakukan pemulihan ekonomi agar realisasi pendapatan daerah akan meningkat pada tahun 2021.

BAB IV
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

Suatu perencanaan yang baik, adalah yang dapat merumuskan permasalahan dan dimana permasalahan itu berada dengan baik karena tujuan mendasar pembangunan daerah adalah untuk mengatasi dan mengantisipasi berbagai permasalahan di daerah. Oleh karena itu, pelaksanaan pembangunan daerah yang berkualitas akan membuat masyarakat merasakan dampaknya, yaitu peningkatan kesejahteraan.

Bab ini menjelaskan tentang permasalahan-permasalahan pembangunan daerah yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Luwu berdasarkan gambaran umum kondisi daerah, hasil evaluasi pembangunan daerah pada periode yang lalu, serta isu-isu strategis yang perlu mendapatkan perhatian. Perumusan permasalahan pembangunan daerah dan analisis isu strategis merupakan dasar untuk merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan daerah dimasa datang.

Meskipun pada periode RPJMD yang lalu telah cukup membawa perubahan positif yang sangat signifkan bagi pembangunan di Kabupaten Luwu, baik dari aspek infrastruktur, ekonomi maupun dari sosial dan kemasyarakatan, namun demikian masih terdapat permasalahan dan tantangan yang harus diselesaikan dan dihadapi kedepan.

4.1 Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah merupakan "*gap expectation*" antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dilakukan. Dalam menganalisis permasalahan pembangunan, dilakukan kajian dan telaahan terhadap Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

Perumusan permasalahan pembangunan mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi bagaimana keberhasilan maupun kegagalan dalam kinerja pembangunan pada masa lalu, termasuk hubungan dengan kemampuan manajemen pemerintah dalam memberdayakan kewenangan yang dimiliki. Identifikasi permasalahan pembangunan dilakukan kepada seluruh bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara terpisah maupun sekaligus terhadap beberapa urusan, yang bertujuan untuk memetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Permasalahan pembangunan diklasifikasi menurut dua tingkatan, yaitu permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah (permasalahan pada level makro daerah) dan permasalahan untuk penentuan program prioritas daerah (permasalahan pada level mikro sektoral atau permasalahan menurut urusan pemerintahan, baik urusan wajib dan urusan

pilihan maupun urusan penunjang). Perbedaan pengklasifikasian permasalahan pembangunan ini selanjutnya akan menuntun dan mengarahkan pada formulasi tujuan dan sasaran, perumusan strategi, arah kebijakan, dan program prioritas pembangunan daerah untuk lima tahun ke depan.

4.1.1. Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Penuntasan permasalahan pembangunan merupakan salah satu esensi dari tujuan pembangunan yang dilakukan tahap demi tahap. Oleh karena itu, permasalahan pembangunan menjadi salah satu rujukan utama dalam merumuskan setiap arah kebijakan pembangunan daerah. Permasalahan pembangunan daerah bersifat kompleks, baik bersumber dari permasalahan sektoral maupun wilayah. Dengan kebijakan yang tepat otomatis akan menghasilkan rumusan program dan kegiatan yang efektif dan efisien dalam menyelesaikan permasalahan pembangunan. Untuk itu, hasil pengendalian dan evaluasi hasil-hasil pembangunan periode lalu sangat penting untuk memahami sejauhmana kebijakan pembangunan di masa lalu mampu memecahkan berbagai permasalahan.

Berdasarkan analisis dan hasil evaluasi, serta memperhatikan visi Bupati dan Wakil Bupati Luwu masa bhakti Tahun 2019-2024, dapat dirumuskan bahwa permasalahan utama pembangunan daerah Kabupaten Luwu adalah **"Pembangunan di Kabupaten Luwu belum optimal dalam mewujudkan masyarakat yang Maju, Sejahtera, dan Mandiri".** Melihat gambaran umum kondisi daerah dan hasil evaluasi pembangunan daerah yang dihubungkan dengan rumusan misi pembangunan daerah Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024, dapat diidentifikasi lebih lanjut permasalahan pokok atas permasalahan utama dimaksud dan menjadi perhatian utama dalam perumusan kebijakan pembangunan dalam lima tahun mendatang, yaitu sebagai berikut.

1. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan daerah;
2. Akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan yang berkualitas belum merata;
3. Kualitas dan ketersediaan infrastruktur masih rendah;
4. Masih rendahnya pendapatan masyarakat;
5. Produktivitas dan nilai tambah produk pertanian belum maksimal;
6. Masih tingginya jumlah desa dengan predikat tertinggal dan sangat tertinggal;
7. Rendahnya nilai investasi;
8. Belum optimalnya partisipasi publik dalam pembangunan;
9. Kebijakan pengelolaan SDA masih kurang memperhatikan kelestarian lingkungan; dan
10. Risiko yang ditimbulkan akibat bencana masih tinggi.

Optimalisasi pengelolaan potensi sumber daya yang ada di Kabupaten Luwu merupakan realisasi dari pelaksanaan desentralisasi atau otonomi daerah dalam mencapai tujuan pembangunan nasional dan daerah. Oleh sebab itu, setiap hambatan dalam mengembangkan potensi sumber daya harus diminimalisir dengan mengetahui permasalahan-permasalahan yang

membebani pencapaian pembangunan daerah. Rangkaian permasalahan tersebut nantinya akan menjadi sebuah kerangka dasar dalam penentuan perencanaan kebijakan ke depan dengan disempurnakan oleh evaluasi pembangunan periode-periode sebelumnya beserta kajian-kajian pembangunan nasional maupun regional.

Berikut ini pemetaan permasalahan-permasalahan pokok Kabupaten Luwu dalam merealisasikan terwujudnya visi pembangunan daerah.

Gambar 4.1
Mata Rantai Permasalahan Utama Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu

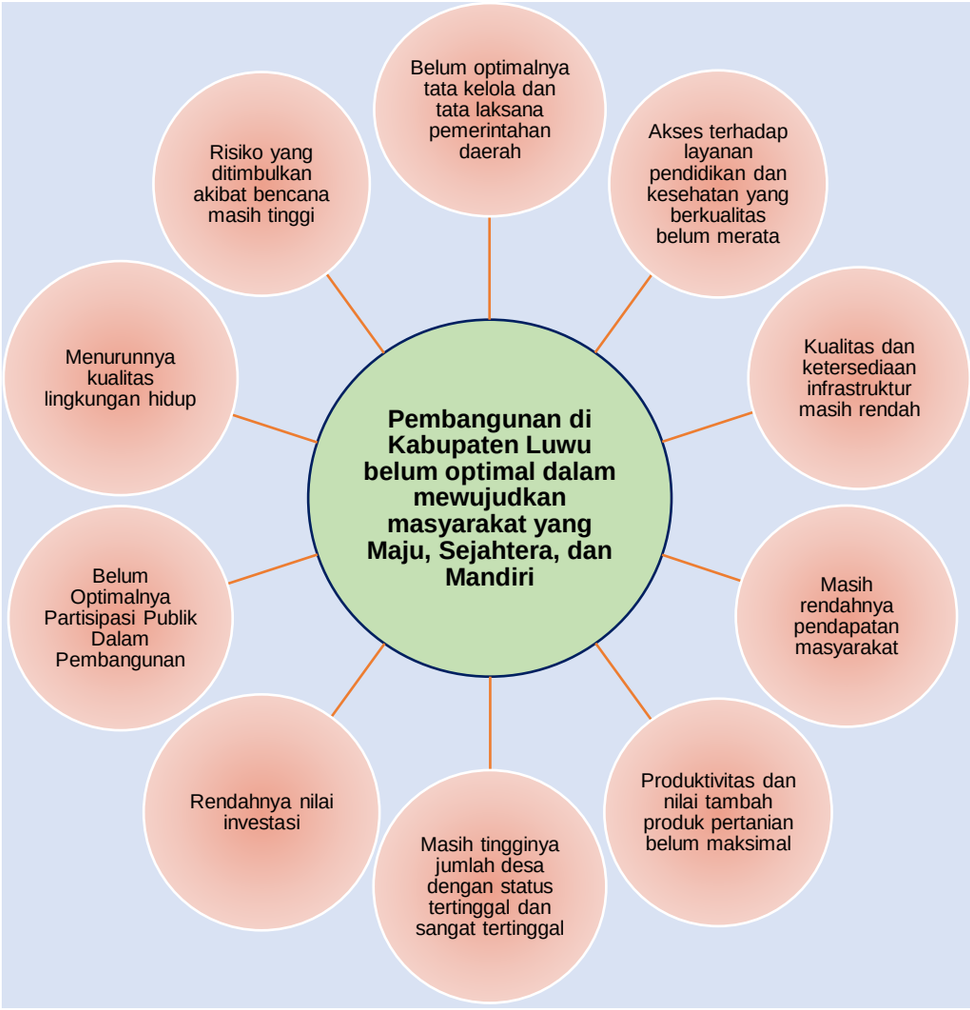

Permasalahan pokok pembangunan daerah sebagaimana terlihat pada gambar di atas, akan dijabarkan ke dalam permasalahan pembangunan daerah dan akar permasalahannya, sebagai berikut:

1. **Belum optimalnya tata kelola dan tata laksana pemerintahan daerah**

   Pemerintahan yang baik adalah pemerintah yang mengaplikasikan prinsip-prinsip *clean* and *good governance*, dimana antara lain prinsipnya adalah tranparansi dan akuntabilitas. Pemerintah Kabupaten Luwu dalam penilaian akuntabilitas kinerja pemerintah pada tahun 2019 masih mendapatkan nilai CC atau predikat “kurang” dari Kementerian PAN dan RB, yang mengindikasikan bahwa akuntabilitas kinerja masih rendah.

Belum maksimalnya nilai akuntabilitas ini disebabkan kualitas laporan yang masih rendah, penyelesaian laporan yang belum tepat waktu, laporan yang belum taat azas dan indikator kinerja utama yang belum ditetapkan secara jelas dan terukur. Hal tersebut diatas menunjukkan bahwa kualitas perencanaan belum baik, kemudian belum optimalnya kualitas pengukuran kinerja, dan masih lemahnya Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP). Tolak ukur lainnya adalah angka Indeks Kepuasan Masyarakat atas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemberi pelayanan publik, yang pada tahun 2020 baru mencapai angka 79,28.

Dibalik sebuah sistem tentu ada manusia yang harus menjalankan. Untuk Kabupaten Luwu, sistem merit belum maksimal dijalankan dalam pembinaan dan pengembangan pegawai. Hal ini menandakan masih rendahnya kompetensi aparatur dalam melaksanakan pelayanan kepada publik. Aparatur sipil negara yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal setiap tahunnya semakin sedikit yang mengakibatkan rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan terus menurun sejak tahun 2015 hingga tahun 2019, dimana pada tahun 2015 mencapai 3,23 JP menjadi 1,70 JP pada tahun 2019. Dari aspek pejabat yang telah menduduki jabatan dan telah mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan jabatannya, tidak tersedia data. Selanjutnya, juga tidak diketahui seberapa besar kesesuaian antara kompetensi yang dimiliki pejabat dengan jabatan yang didudukinya.

Dari aspek pengelolaan keuangan daerah, rata-rata pertumbuhan PAD Kabupaten Luwu selama periode 2016-2020 adalah sebesar 4,39%, dengan nilai realisasi sebesar Rp95,56 milyar pada tahun 2016, meningkat menjadi Rp112,60 milyar pada tahun 2020. Sedangkan rata-rata kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah pada periode yang sama baru mencapai 7,76%. Pajak daerah pada periode tahun 2017-2020 mengalami penurunan dari 24,97 miliar menjadi 21,37 miliar pada tahun 2020. Retribusi daerah mengalami penurunan dari 9,61 miliar pada tahun 2019 menjadi 8,75 miliar pada tahun 2020. Hasil pengelolaan keuangan yang dipisahkan juga mengalami penurunan dari 5,46 miliar pada tahun 2019 menjadi 5,22 miliar pada tahun 2020. Penyebab utama penurunan PAD tersebut adalah adanya pandemi COVID-19.

Berdasarkan uraian diatas, dapat digambarkan permasalahan dan akar masalah dari permasalahan pokok “Belum optimalnya tata kelola dan tata laksana pemerintahan daerah” sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 4.1
Identifikasi Permasalahan dan Akar Masalah
"Belum optimalnya tata kelola dan tata laksana Pemerintahan Daerah"

Permasalahan	Akar masalah
Praktik pemerintahan belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip *Good Governance*	Belum maksimalnya perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, yang terlihat dari masih rendahnya nilai SAKIP, LPPD.
	Belum diterapkannya *merit system* dalam pembinaan dan pengembangan pegawai
Rendahnya kapasitas fiskal daerah	Belum optimalnya penerimaan yang bersumber dari pendapatan asli daerah, terlihat dari tingginya ketergantungan keuangan daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat
Indeks kepuasan masyarakat belum terukur dengan baik.	Kurangnya penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik terintegrasi terlihat dari belum adanya sistem informasi pemerintah daerah yang terintegrasi dan tidak adanya sistem basis data pembangunan daerah yang terpusat.

2. Akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan yang berkualitas belum merata

Sumber daya manusia adalah aset yang mempunyai andil besar terhadap kemajuan pelaksanaan pembangunan daerah dimana manusia sebagai subjek pembangunan harus memiliki kualifikasi pada bidang tertentu dalam meningkatkan segala bentuk pencapaian pembangunan pada aspek kehidupan. Daya saing sumber daya manusia menilai bagaimana kualitas masyarakat Kabupaten Luwu dapat berperan di berbagai sektor penting dalam pembangunan daerah. Hal yang terpenting dalam meningkatkan daya saing sumber daya manusia diwujudkan melalui kesejahteraan masyarakat.

Perwujudan kesejahteraan masyarakat pada umumnya ditandai dengan kemampuan masyarakat mengakses pelayanan dasar terutama pendidikan dan kesehatan. Akses masyarakat terhadap pelayanan dasar didefinisikan melalui perspektif jarak maupun keterjangkauan layanan, diantaranya layanan pendidikan dan layanan kesehatan

Kesejahteraan masyarakat secara umum dihubungkan dengan bagaimana kualitas pendidikan di suatu wilayah. Begitu juga dengan Kabupaten Luwu, belum optimalnya peningkatan kualitas pendidikan memiliki dampak yang tinggi terhadap rendahnya daya saing dan kualitas sumber daya manusia. Permasalahan dalam bidang pendidikan antara lain dapat dilihat dengan rendahnya angka rata-rata lama sekolah yang disebabkan sulitnya mengakses pendidikan di sebagian wilayah terpencil, belum tersedianya sarana dan prasarana pendidikan yang memadai secara merata, serta partisipasi masyarakat dalam menyekolahkan anak sesuai usia.

Hal ini dapat dilihat dari angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di Kabupaten Luwu yang lebih rendah dibandingkan angka nasional dan angka yang dicapai Provinsi Sulawesi Selatan. Meskipun mengalami peningkatan dari 7,74 tahun di tahun 2015 menjadi 8,15 tahun pada tahun 2019, yang berarti bahwa penduduk Kabupaten Luwu rata-rata mengenyam jenjang

pendidikan sekolah sampai dengan kelas 2 SMP, masih jauh dari tercapainya program pemerintah yaitu wajib belajar 12 tahun. RLS Kabupaten Luwu yang lebih rendah dari rata-rata regional menunjukkan bahwa perkembangan pendidikan di Kabupaten Luwu masih perlu ditingkatkan. Hal ini dapat dilihat dari kurang baiknya perkembangan beberapa indikator pendidikan.

Pada tahun 2019, APS PAUD baru mencapai 52,40% dari seluruh anak usia 4-6 tahun, APS pendidikan dasar mencapai 99,55% untuk SD/sederajat dan 93,81% untuk SMP sederajat. Sedangkan APS untuk pendidikan menengah adalah 72,10%. Jika melihat data APK yang juga belum maksimal (94,45% untuk SD/sederajat, 96,77% untuk SMP/sederajat, dan 72,10% untuk SMA/ sederajat), dapat disimpulkan bahwa kondisi APS tersebut di atas menunjukkan bahwa kemauan orang tua untuk menyekolahkan anaknya masih belum maksimal dan perlu terus ditingkatkan.

Terkait dengan sarana dan prasarana pendidikan di Kabupaten Luwu juga perlu perhatian serius. Persentase ruang kelas SD/Mi kondisi bangunan baik pada tahun 2019 lebih rendah dibanding tahun 2015 yaitu 19,83% berbanding 23,51%. Ketersediaan sekolah untuk pendidikan dasar di Kabupaten Luwu pada tahun 2019 adalah sebesar 38,57 yang berarti bahwa setiap 10.000 penduduk usia pendidikan dasar, tersedia sejumlah 38 sampai dengan 39 unit sekolah. Sedangkan rasio guru/murid adalah 763,10 yang berarti setiap 10.000 murid terdapat 763 orang guru.

Kesehatan merupakan aspek penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, mengingat masyarakat memerlukan kondisi tersebut agar dapat memaksimalkan potensi yang dimilikinya. Perlu adanya peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat dengan menyediakan pusat kesehatan masyarakat pada tingkat Kecamatan, menyeimbangkan ketersediaan tenaga medis, meningkatkan kualifikasi tenaga medis, hingga mengefisiensikan pelayanan kesehatan terhadap pasien.

Angka harapan hidup merupakan salah satu indikator keberhasilan suatu daerah dalam pembangunan kesejahteraan rakyat terutama pada sektor kesehatan. Angka harapan hidup di Kabupaten Luwu cenderung naik perlahan. Pada tahun 2015 sebesar 69,44 tahun, meningkat menjadi 70,19 tahun pada tahun 2019. Angka ini lebih rendah jika dibandingkan dengan angka harapan hidup Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun yang sama yaitu 70,43 tahun dan capaian angka harapan hidup Indonesia yaitu 71,25 tahun.

Balita gizi kurang di Kabupaten Luwu masih perlu mendapat perhatian dan penanganan yang baik agar dapat mewujudkan kehidupan yang sehat dan sejahtera di masa-masa mendatang karena angkanya yang cenderung meningkat yaitu dari 2,06% pada tahun 2014 menjadi 6,50% pada tahun 2017, meskipun menurun pada tahun 2018 menjadi 5,90%. Angka kematian bayi periode tahun 2015-2019 adalah 99,20 kasus per tahun, sedangkan angka kematian ibu rata-rata 7 kasus per tahun. Dari sisi tenaga medis, 1 orang tenaga medis di Kabupaten Luwu melayani 3.448 orang. Indikator kesehatan lainnya yang perlu mendapat perhatian adalah cakupan

kunjungan ibu hamil K4 yang baru mencapai 81,00%, cakupan pelayanan nifas 86,66%, cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani 48,81%, dan cakupan pelayanan anak balita yang baru mencapai 71,14%.

Dari aspek sarana dan prasarana pelayanan kesehatan, meskipun telah ada Puskesmas di seluruh kecamatan, tetapi kualitas layanan masih belum merata. Distribusi tenaga kesehatan (jumlah dan Jenis tenaga) yang tidak merata di seluruh Puskesmas, banyak terpusat di Kawasan perkotaan serta tingginya mutasi petugas yang sudah dilatih terkait manajemen dan akreditasi Puskesmas, menjadi salah satu penyebab rendahnya layanan kesehatan.

Meskipun demikian, kualitas sumber daya manusia yang dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM Kabupaten Luwu pada tahun 2019 sudah mencapai kategori "tinggi" yaitu 70,39, meskipun masih berada pada posisi ke-9 dari 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan, bahkan masih di bawah IPM Provinsi Sulawesi Selatan yaitu 71,66 dan Nasional yang mencapai 71,92. Hal ini perlu menjadi perhatian bagi pemerintah daerah mengingat angka IPM yang cukup rendah tersebut.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat digambarkan permasalahan dan akar masalah dari permasalahan pokok "Akses terhadap pendidikkan dan layanan kesehatan yang berkualitas belum merata" sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 4.2
Identifikasi Permasalahan dan Akar Masalah
"Akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan yang berkualitas Belum Merata"

Permasalahan	Akar masalah
Pembangunan pendidikan perlu ditingkatkan	Rendahnya peran serta masyarakat terhadap kegiatan pendidikan formal yang terlihat dari rendahnya angka rata-rata lama sekolah dan APS PAUD
	Sulitnya akses untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas di sebagian daerah, khususnya daerah terluar dan terpencil.
	Rendahnya kualitas penyelenggaraan pendidikan yang ditandai dengan rendahnya APS PAUD, menurunnya APS SMP/sederajat, APK, pendidikan kesetaraan, angka kelulusan SMP, serta kondisi bangunan SD/sederajat dalam kondisi baik yang juga rendah, serta kurangnya pemerataan guru.
Layanan kesehatan yang berkualitas belum merata	Rendahnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat, terlihat dari angka usia harapan hidup masih berada di bawah angka provinsi Sulawesi Selatan dan nasional, AKI meningkat; rasio posyandu menurun; pertolongan persalinan oleh bidan menurun; anak yang diimunisasi menurun; kunjungan bayi menurun; kunjungan ibu hamil menurun; pelayanan nifas menurun.
	Ketersediaan dokter/tenaga medis di beberapa kecamatan masih sangat kurang.

3. Kualitas dan ketersediaan infrastruktur masih rendah.

Untuk mewujudkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat yang prima, pemerintah daerah harus mampu merumuskan program/kegiatan yang penunjang peningkatan kualitas infrastruktur maupun sumber daya manusia. Infrastruktur merupakan urat nadi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur tidak dilihat dari sekadar berapa kuantitasnya, tetapi juga harus dijamin kualitasnya sesuai dengan standar dan dilakukan secara berkelanjutan. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur dapat meningkatkan pelayanan, menumbuhkan seluruh sektor yang mendukung kesejahteraan masyarakat.

Dibidang air minum, persentase penduduk berakses air minum di Kabupaten Luwu pada tahun 2019 baru mencapai 80,64%, sedangkan rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak Perkotaan dan Perdesaan baru mencapai 47,94%, sedangkan rumah tangga bersanitasi pada tahun 2019 baru mencapai 84,52%.

Di bidang perumahan dan permukiman, dapat dilihat bahwa pada tahun 2019 setiap 1.000 penduduk baru sejumlah 200 orang yang menempati rumah layak huni, kemudian masih terdapat 206,36 ha pemukiman kumuh dan cenderung mengalami peningkatan, hal ini terlihat dari meningkatnya rumah tangga kumuh di perkotaan dari 1.328 pada tahun 2017 menjadi 1.339 pada tahun 2019.

Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah maupun terhadap kondisi sosial budaya kehidupan masyarakat. Infrastruktur jalan yang baik adalah modal sosial masyarakat dalam menjalani roda perekonomian sehingga pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak mungkin dicapai tanpa ketersediaan infrastruktur jalan yang baik dan memadai. Panjang jalan kabupaten di Kabupaten Luwu adalah 2.748,84 km, pada tahun 2019 jaringan jalan yang dalam kondisi baik hanya mencapai 585,26 km atau 21,29%, jauh dari angka provinsi Sulawesi Selatan yang di atas 80%. Hal ini tentu saja menyebabkan terganggunya aksesibilitas orang, barang maupun jasa di daerah ini.

Ketimpangan antar wilayah, terutama antara wilayah perkotaan dengan wilayah perdesaan tampak jelas. Konsentrasi aktivitas ekonomi di wilayah perkotaan menjadi penyebab terjadinya ketimpangan antar wilayah. Konektivitas dan aksesibilitas wilayah yang cenderung timpang juga berkontribusi terhadap ketimpangan wilayah. Alokasi anggaran pemerintah yang cenderung ke wilayah perkotaan, juga menjadi penyebab lain terjadinya ketimpangan antar wilayah, disamping perbedaan kondisi dan karakteristik geografis dan demografis di Kabupaten Luwu. Hal lainnya yang perlu mendapat perhatian adalah optimalisasi penyelenggaraan infrastruktur perhubungan meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat digambarkan permasalahan dan akar masalah dari permasalahan pokok "Kualitas dan ketersediaan infrastruktur masih rendah" sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 4.3
Identifikasi Permasalahan dan Akar Masalah
"Kualitas dan ketersediaan infrastruktur Masih Rendah"

Permasalahan	Akar masalah
Pembangunan Infrastruktur masih kurang berkualitas dan berkelanjutan	Lemahnya pengawasan, terlihat dari rendahnya kualitas jalan yang mengakibatkan besarnya angka jaringan jalan dalam kondisi tidak baik (sedang/ buruk)
Ketimpangan pembangunan antara wilayah perkotaan dan perdesaan	Lemahnya perencanaan, terlihat dari rendahnya ketersediaan infrastruktur dasar seperti infrastruktur air minum dan jaringan irigasi, serta kawasan permukiman yang tertata

4. Masih rendahnya pendapatan masyarakat.

Pemerataan kemakmuran rakyat merupakan salah satu tujuan pembangunan, yang antara lain dilakukan melalui koperasi. Pada tahun 2019, jumlah koperasi di Kabupaten Luwu adalah 423 unit, namun yang aktif hanya sejumlah 210 unit atau 44,60%. Hal ini tentunya perlu memperoleh perhatian pemerintah daerah agar koperasi sebagai soko guru pembangunan nasional dapat berperan lebih besar dalam rangka pengembangan ekonomi kerakyatan.

Secara rata-rata, setiap penduduk di Kabupaten Luwu mengeluarkan uang untuk membeli makanan dan non-makanan sebesar Rp852.041,00 sebulan (2019). Angka ini lebih rendah dari angka Provinsi Sulawesi Selatan (Rp927.908,00). Rendahnya pengeluaran per kapita sebulan disebabkan oleh rendahnya pendapatan per kapita, dan rendahnya pendapatan per kapita disebabkan oleh rendahnya tingkat produktivitas penduduk yang bekerja. Rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan yang dimiliki oleh angkatan kerja yang bekerja, menjadi penyebab rendahnya balas jasa ekonomi yang diterima oleh setiap pekerja.

Hal ini setidaknya ditandai oleh tingginya tingkat pengangguran terbuka di satu sisi (pada tahun 2019 sebesar 4,66%). Ini mengindikasikan bahwa mereka yang bekerja belum sanggup menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi dari garis kemiskinan. Dengan kata lain, balas jasa ekonomi yang diterima dari bekerja belum sanggup mengangkat taraf hidupnya di atas garis kemiskinan.

Data BPS menunjukkan bahwa lebih dari 50 persen dari angkatan kerja yang bekerja hanya tamat Sekolah Dasar (SD), tidak tamat SD atau tidak pernah sekolah. Oleh karena itu, rendahnya tingkat produktivitas pekerja tampaknya terkait dengan rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan yang dimiliki, status pekerja (pada umumnya adalah buruh tani, petani penyakap, dsb.), dan metode produksi yang masih tradisional.

Periode tahun 2015-2019 terjadi peningkatan TPAK dari 60,78% pada tahun 2015 menjadi 64,69% pada tahun 2019, sebagai akibat adanya dana desa yang menyebabkan penduduk desa/penduduk lokal yang tadinya bukan termasuk golongan angkatan kerja menjadi golongan angkatan kerja dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang didanai dengan dana desa. Sedangkan rasio daya serap tenaga kerja pada tahun 2019 sebesar 25,48%, angka ini lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar 27,1%. Hal yang menyebabkan turunnya rasio tersebut karena turunnya jumlah PMA maupun PMDN di Kabupaten Luwu sehingga menyebabkan turunnya jumlah tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan tersebut. Namun jika dibandingkan dengan tahun 2018, dimana rasionya adalah 20,01% dengan jumlah PMA/PMDN 264 perusahaan, rasio daya serap tetap menurun meskipun jumlah PMA/PMDN meningkat menjadi 264 perusahaan. Hal ini semakin menunjukkan bahwa kualitas tenaga kerja di Kabupaten Luwu memang relatif rendah.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada dasarnya diharapkan dapat memajukan pertumbuhan ekonomi pada satu wilayah. Usaha kreatifitas dari masyarakat dalam pengembangan produk baru dan berdaya saing tinggi pada akhirnya dapat memajukan perekonomian mereka dan meningkatkan pendapatan yang dimilikinya. Jika melihat kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB yang stagnan pada 2 tahun terakhir (2017-2018) pada angka 4,52%, bahkan menurun jika dibandingkan dengan angka pada tahun 2014 yang berada pada 4,56%, menunjukkan bahwa perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah di Kabupaten Luwu tidak berkembang bahkan cenderung melemah.

Adanya pengembangan wirausaha setidaknya membutuhkan bantuan permodalan dari sektor lembaga keuangan maupun dari pemerintah daerah setempat yang menginginkan adanya perbaikan taraf hidup masyarakat. Sepanjang tahun 2015 hingga tahun 2019, tidak terdapat data terkait dengan akses UMKM terhadap layanan keuangan baik oleh BPS maupun oleh institusi terkait. Kondisi ini menunjukkan bahwa hubungan antara UMKM dengan lembaga keuangan belum mendapat perhatian yang cukup. Secara kasat mata dapat dilihat bahwa laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Luwu pada tahun 2019 sebesar 6,26% memang masih lebih rendah dibandingkan dengan yang dicapai Provinsi Sulawesi Selatan yaitu 6,92%. Namun demikian, terjadi pertumbuhan nilai tambah sektor industri sebesar 0,17 poin dari tahun 2015 ke tahun 2019.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat digambarkan permasalahan dan akar masalah dari permasalahan pokok “Masih rendahnya pendapatan masyarakat” sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 4.4
Identifikasi Permasalahan dan Akar Masalah
"Masih rendahnya pendapatan Masyarakat"

Permasalahan	Akar masalah
Koperasi dan UMKM belum berkembang dengan baik	Pengelolaan koperasi belum profesional
	Masih rendahnya kemampuan UMKM terhadap akses permodalan dan layanan perbankan
Tingginya angka pengangguran	Rendahnya daya serap tenaga kerja pada sektor industri
	Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia

5. Produktivitas dan nilai tambah produk pertanian belum maksimal.

Peningkatan poduktivitas masyarakat melalui peningkatan potensi lahan yang luas, serta peningkatan kualitas produksi melalui pemanfaatan teknologi merupakan tujuan pembangunan dibidang pertanian. Untuk mendukung pertanian, Kabupaten Luwu memiliki jaringan irigasi dengan luas 8.904 Ha. Irigasi yang tersedia tersebut baru mencakup 67,90% dari lahan budidaya di Kabupaten Luwu. Selanjutnya, irigasi dalam kondisi baik pada tahun 2019 hanya sebesar 40,26%.

Rasio jaringan irigasi merupakan perbandingan panjang jaringan irigasi terhadap lahan jaringan irigasi meliputi jaringan primer, sekunder, dan tersier. Selama 5 tahun terakhir rasio jaringan irigasi masih berada dibawah standar yang diharuskan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Sehingga perlu ada penambahan jaringan irigasi untuk menyesuaikan luas lahan pertanian.

Salah satu masalah utama yang dihadapi sektor pertanian adalah rendahnya tingkat produktivitas. Apabila dibandingkan antara tahun 2014 dan 2016, terlihat bahwa produksi pertanian pangan dan palawija mengalami penurunan dari 371.142,00 ton menjadi 349.454,90 ton. Penyebab rendahnya tingkat produktivitas pertanian adalah tingginya proporsi lahan sawah yang masih tadah hujan. Serangan hama dan bencana kekeringan yang semakin sering terjadi, juga menyumbang terhadap rendahnya tingkat produktivitas pertanian. Selain itu, berkurangnya luas lahan sawah akibat terjadinya alih fungsi lahan juga menjadi penyebab lainnya rendahnya tingkat produktivitas pertanian di Kabupaten Luwu.

Nilai tambah sektor pertanian (pangan dan palawija) menurut harga berlaku selama periode 2015-2017 mengalami peningkatan dari Rp992,93 miliar menjadi Rp1,09 trilliun. Namun demikian kontribusinya terhadap PDRB sektor pertanian/perkebunan mengalami penurunan pada 2 tahun terakhir. Pada tahun 2015 kontribusi sektor ini terhadap PDRB pertanian/perkebunan sebesar 27,43%, namun pada tahun 2016 dan 2017

mengalami penurunan menjadi 26,61% dan 25,51%. Hal ini mengisyaratkan bahwa sektor pertanian (pangan dan palawija) kurang berkembang.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat digambarkan permasalahan dan akar masalah dari permasalahan pokok "Produktivitas dan nilai tambah produk pertanian belum maksimal" sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 4.5
Identifikasi Permasalahan dan Akar Masalah
"Produktivitas dan nilai tambah produk pertanian belum maksimal"

Permasalahan	Akar masalah
Belum terwujudnya kemandirian pangan dan ekonomi kerakyatan yang tangguh berbasis agribisnis	Produktivitas berbagai komoditi pertanian cenderung menurun/stagnan
	Belum maksimalnya pembinaan terhadap kelompok tani maupun masyarakat
	Masih kurangnya kreativitas dan inovasi dalam pengelolaan produk pertanian

6. Masih tingginya jumlah desa dengan predikat tertinggal dan sangat tertinggal.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dewasa ini, desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dinyatakan bahwa tujuan pengaturan desa antara lain adalah :

a. melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa;
b. mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama;
c. membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
d. meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
e. meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;

f. memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan
g. memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas: kepastian hukum; tertib penyelenggaraan pemerintahan; tertib kepentingan umum; keterbukaan;proporsionalitas; profesionalitas; akuntabilitas; efektivitas dan efisiensi; kearifan lokal; keberagaman; dan partisipatif. Oleh karena itu, untuk terwujudnya desa dan penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan yang diharapkan, kompetensi aparatur desa menjadi kunci penting.

Kompetensi tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan tetapi melakukan apa yang diketahui, menyangkut tanggung jawab lahiriah dan bathiniah. Kompetensi dimaknai sebagai keterampilan, pengetahuan, sikap dasar serta nilai yang dicerminkan kedalam kebiasaan berpikir dan bertindak yang sifatnya berkembang, dinamis, kontinyu sehingga membuat seseorang menjadi kompeten.

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, rendahnya kompetensi ini sangat dirasakan dimasa kini. Bergulirnya dana desa sejak tahun 2016, tidaklah terlihat semakin meningkatkan keberdayaan masyarakat desa, tetapi justru semakin pasif dan cenderung menunggu apa yang hendak dilakukan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Hal ini terlihat dari kurangnya prestasi desa maupun desa yang berprestasi, baik secara regional maupun nasional. Berdasarkan data Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal untuk tahun 2020, dari 207 desa di Kabupaten Luwu, jumlah desa dengan status mandiri hanya 1 desa, dengan status maju 5 desa, berkembang sejumlah 107 desa, dan selebihnya adalah desa dengan status tertinggal dan sangat tertinggal.

Disisi lain, jumlah penduduk miskin Kabupaten Luwu yang mencapai 47.990 jiwa atau 13,36% pada tahun 2018 sebagian besar adalah penduduk desa, mengingat di Kabupaten Luwu terdapat 207 desa dan 20 kelurahan. Oleh karena itu, jika angka kemiskinan Kabupaten Luwu, yang memiliki persentase terbesar ke-5 di Provinsi Sulawesi Selatan ingin diturunkan, maka peran pemerintahan desa yang aktif menjadi suatu keharusan. Pemerintahan desa harus mampu memberdayakan masyarakat desa dan meyakinkan masyarakat desa untuk bebas dari belenggu kemiskinan maupun golongan penduduk miskin.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat digambarkan permasalahan dan akar masalah dari permasalahan pokok “Masih tingginya angka kemiskinan di perdesaan” sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 4.6
Identifikasi Permasalahan dan Akar Masalah
"Masih tingginya jumlah desa dengan predikat tertinggal dan sangat tertinggal"

Permasalahan	Akar masalah
Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan desa serta pemberdayaan masyarakat desa	Kurangnya pemahaman perangkat desa atas peranannya dalam meningkatkan kualitas pembangunan
	Kurang berhasilnya implementasi kebijakan dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa
	Masih kurangnya infrastruktur pendukung perekonomian desa

7. Rendahnya nilai investasi.

Tumbuhnya perekonomian daerah merupakan ukuran utama keberhasilan pembangunan daerah. Pertumbuhan ekonomi merupakan kemampuan dari perkembangan suatu perekonomian dari satu periode ke periode berikutnya. Kemampuan daerah dalam mengalokasikan factor-faktor produksi yang dimilikinya melalui pertambahan jumlah dan kualitas berakibat kepada penambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan. Faktor-faktor produksi yang antara lain ketersediaan sumber daya alam, tenaga kerja yang handal, adanya kemudahan akses dalam memperoleh permodalan serta peran serta wirausaha yang pada akhirnya dapat meningkatkan nilai dari investasi dan mendorong masyarakat untuk mampu berusaha meningkatkan pendapatan harus dimaksimalkan melalui rumusan kebijakan yang berpihak dan berkelanjutan.

Realisasi investasi berskala nasional (PMDN/PMA) antara tahun 2015 hingga tahun 2018 di Kabupaten Luwu mengalami penurunan drastis. Pada tahun 2015, realisasi investasi mencapai Rp567,97 milyar, tetapi pada tahun 2018 hanya Rp16,69 milyar. Mengingat potensi sumber daya alam yang dimiliki Kabupaten Luwu maupun perhitungan perekonomian oleh berbagai kalangan, maka diperlukan upaya yang lebih maksimal dari pemerintah daerah untuk meningkatkan investasi di daerah ini.

Wirausaha dikalangan generasi muda juga belum berkembang, dimana pada tahun 2018 wirausaha muda hanya sebesar 0,50% dari jumlah penduduk. Hal ini juga mempengaruhi investasi dari luar karena investor membutuhkan tenaga-tenaga yang memiliki kemampuan berusaha untuk memberikan keyakinan merealisasikan investasi.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat digambarkan permasalahan dan akar masalah dari permasalahan pokok "Rendahnya nilai investasi" sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 4.7
Identifikasi Permasalahan dan Akar Masalah
"Rendahnya Nilai Investasi"

Permasalahan	Akar masalah
Belum terciptanya iklim investasi yang kondusif berbasis pembangunan berkelanjutan	Belum optimalnya promosi investasi daerah terlihat dari menurunnya nilai riil investasi
	Rendahnya kemampuan ber-wirausaha dikalangan generasi muda
	Infrastruktur yang belum mantap

8. Belum Optimalnya Partisipasi Publik Dalam Pembangunan.

Hakikat penegakan hukum antara lain adalah mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran. Penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Dalam kaitannya dengan hukum publik, pemerintah daerah memegang tanggung jawab atas tegaknya hukum di daerah tersebut. Oleh karenanya, pemerintah harus menjadi teladan dalam ketaatan maupun penegakan terhadap hukum.

Terdapat berbagai peraturan perundangan di tingkat daerah menjadi tanggung jawab perangkat daerah diberbagai bidang untuk ditegakkan. Tidak hanya yang terkait dengan keamanan dan ketertiban, tetapi juga pada aspek lain seperti perlindungan terhadap warga negara, tata ruang, lingkungan, perizinan, dan lain-lain. Tingkat penegakan hukum di Kabupaten Luwu saat ini kondisinya kurang dapat dijelaskan karena kurangnya data yang dapat digunakan sebagai bahan analisis. Oleh karena itu, hal ini menjadi perhatian pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum dan keadilan ditengah-tengah masyarakat.

Terkait dengan pemenuhan hak azasi manusia, hal yang menjadi pokok permasalahan adalah pemberdayaan perempuan serta perlindungan terhadap perempuan dan anak. Meskipun belum tersedia data yang lengkap, beberapa indikator dapat dijadikan sebagai dasar untuk merumuskan bahwa pemenuhan hak azasi manusia, khususnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan perempuan dan anak menjadi suatu permasalahan pembangunan di Kabupaten Luwu. Rangkaian data tersebut antara lain adalah, indeks pemberdayaan perempuan Kabupaten Luwu pada tahun 2017 lebih rendah dibandingkan Provinsi Sulawesi Selatan yaitu 61,61 berbanding 71,74, bahkan angka tahun 2017 ini lebih rendah dari capaian pada tahun 2013 yang mencapai 63,05.

Data lainnya adalah kejahatan dalam rumah tangga yang menimpa perempuan dan anak pada tahun 2014 dan 2015 mencapai 56 kasus, perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu pada

tahun 2018 mencapai 30 korban, sedangkan jumlah perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak yang disidangkan mencapai 8 kasus, dan terdapat 31 perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum. Oleh karena itu, berbagai kebijakan perlu dirumuskan dan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak di Kabupaten Luwu.

Pembangunan daerah membutuhkan partisipasi dari semua pihak. Oleh karena itu pemerintah daerah harus mampu membangun kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian maupun evaluasi pembangunan daerah.

Salah satu permasalahan utama di Kabupaten Luwu adalah meningkatkan partisipasi publik dibidang perencanaan, yang ditunjukkan dengan keterlibatan dalam perumusan kebijakan, misalnya dalam Musrenbang maupun forum perangkat daerah. Dalam kaitan itu, perangkat daerah ke depan harus mendata aspirasi masyarakat dan merumuskan formula untuk menentukan mana yang didahulukan. Hal ini dilakukan agar masyarakat tetap percaya bahwa forum partisipasi yang dilaksanakan adalah benar-benar dijadikan sebagai bahan dalam perencanaan pembangunan.

Dalam kaitan pengendalian dan evaluasi, partisipasi masyarakat ditunjukkan antara lain dengan adanya pengaduan ataupun keluhan atas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah. Sama halnya dengan keterlibatan dibidang perencanaan, dari aspek pengendalian dan evaluasi ini juga perlu mendapat perhatian yang serius dengan memberikan tanggapan dan penyelesaian atas segala pengaduan/keluhan yang disampaikan oleh masyarakat, agar tidak tumbuh rasa pesimis ataupun apatis dihati masyarakat terhadap penyelenggaraan pembangunan daerah.

Selain itu, kebutuhan akan regulasi sebagai pedoman dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah belum terpenuhi secara maksimal. Penyusunan regulasi di Kabupaten Luwu masih menghadapi kendala. Rancangan reguliasi yang telah disusun perangkat daerah tidak dapat segera ditetapkan menjadi peraturan daerah.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat digambarkan permasalahan dan akar masalah dari permasalahan pokok “Belum optimalnya partisipasi publik dalam pembangunan” sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 4.8
Identifikasi Permasalahan dan Akar Masalah
“Belum optimalnya partisipasi publik dalam Pembangunan”

Permasalahan	Akar masalah
Kurang optimalnya pengundangan dan penegakan produk hukum daerah	Masih rendahnya kompetensi aparatur
	Kurangnya sosialisasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan PERDA
Rendahnya pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak	Kurangnya kesempatan dan motivasi bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan
	Masih kurangnya fasilitas maupun kelembagaan untuk memenuhi kebutuhan anak yang layak

9. Menurunnya kualitas lingkungan hidup.

Kabupaten Luwu memiliki potensi pembangunan berupa luas wilayah yang cukup besar dan sumber daya alam yang terkandung didalamnya. Selain tanahnya yang subur, juga terdapat pasir, batu kali/pasir kerikil/pasir timbunan, sirtu, kalsit, dan batu gunung/batu kali untuk diolah. Potensi tambang emas, Batu Gamping, Granodiorit, Kuarsa, Batu Sabak, Andesit, Basalt, Gabro, Diorit, Monzonit, Besi, dan Lempung merupakan bahan galian yang terdapat di daerah ini. Kabupaten Luwu juga mempunyai potensi sumber daya logam dan sumber daya non logam, yaitu Galena, Hematit, Tembaga, Besimanganis dan Emas.

Pengelolaan sumber daya alam tersebut di atas secara maksimal tentu dapat menunjang pelaksanaan pembangunan untuk mempercepat kesejahteraan rakyat. Akan tetapi, pemerintah Kabupaten Luwu harus menjaga keseimbangan daya dukung lingkungan dalam memanfaatkan potensi tersebut. Kebijakan pembangunan yang didasarkan dengan pertimbangan daya dukung lingkungan dapat menghasilkan kebijakan yang lebih ramah terhadap lingkungan sehingga kerusakan lingkungan dapat diminimalkan.

Penilaian daya dukung lingkungan berbasis jasa ekosistem secara gamblang dapat memperlihatkan kondisi spasial nilai manfaat dari tiap ruang pada suatu wilayah. Sebaran nilai manfaat dari setiap ruang dapat tergambar dengan jelas sehingga dalam penentuan arahan kebijakan pembangunan dapat langsung di-*overlay*-kan untuk mengetahui kecocokan suatu ruang untuk suatu peruntukan lahan. Di samping itu, penilaian jasa ekosistem ini juga menghasilkan nilai manfaat dari suatu ruang baik secara langsung dan tidak langsung yang dapat digunakan dalam penentuan kebijakan pembangunan suatu wilayah. Penentuan kebijakan pembangunan dengan melihat nilai manfaat suatu ruang secara komprehensif dapat menghasilkan kebijakan yang lebih tepat guna, efektif, dan efisien sehingga pada akhirnya kebijakan pembangunan tidak hanya berkiblat pada nilai ekonomis saja, tetapi juga aspek lingkungan dan sosial kemasyarakatan juga ikut diperhatikan.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Luwu selama periode tahun 2015-2019 belum maksimal. Hal ini terlihat dari data yang menunjukkan bahwa persentase pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten pada tahun 2019 baru mencapai 37,89%, meningkat dibandingkan angka pada tahun 2015 yang mencapai 26,45%. Demikian halnya dengan pengelolaan sampah, meskipun dari tahun ke tahun semakin meningkat tetapi masih belum maksimal, dimana pada tahun 2018 rata-rata penanganan sampah masih di bawah 84%.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat digambarkan permasalahan dan akar masalah dari permasalahan pokok “Menurunnya kualitas lingkungan hidup” sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 4.9
Identifikasi Permasalahan dan Akar Masalah
"Menurunnya kualitas lingkungan Hidup"

Permasalahan	Akar masalah
Implementasi kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kurang maksimal	Kurangnya pembinaan dan pengawasan dalam rangka perlindungan lingkungan hidup terhadap berbagai kegiatan yang mengeksplorasi SDA
	Kurangnya pemahaman masyarakat atas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

10. Risiko yang ditimbulkan akibat bencana masih tinggi.

Bencana alam atau musibah yang menimpa disuatu daerah dapat saja datang secara tiba-tiba, sehingga masyarakat yang berada di lokasi musibah bencana, tidak sempat melakukan antisipasi pencegahan terhadap musibah tersebut. Bencana alam seperti banjir, tanah longsor, angin topan dan kebakaran sering terjadi yang mengakibatkan penderitaan dan kerugian bagi masyarakat. Dengan seringnya bencana alam yang terjadi, diperlukan manajemen risiko bencana (*disaster risk management*) yang baik untuk penanganan bantuan terhadap bencana secara lebih baik dan sistematis. Permasalahan yang timbul adalah masih banyaknya warga masyarakat yang belum mengetahui dan memahami tentang apa itu bencana, bagaimana cara mengantisipasi dan mengatasi bencana, sehingga risiko yang ditimbulkan akibat bencana tersebut seminimal mungkin, dan siapa yang bertanggung jawab terhadap penanganan bencana tersebut.

Manajemen Risiko Bencana adalah pengelolaan bencana sebagai suatu ilmu pengetahuan terapan (aplikatif) yang mencari, dengan melakukan observasi secara sistematis dan analisis bencana untuk meningkatkan tindakan-tindakan (*measures*), terkait dengan pencegahan (*preventif*), pengurangan (mitigasi), persiapan, respon darurat dan pemulihan. Manajemen dalam bantuan bencana merupakan hal-hal yang penting bagi manajemen puncak yang meliputi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), kepemimpinan (*directing*), pengorganisasian (*coordinating*) danpengendalian (*controlling*). Tujuan dari manajemen risiko bencana antara lain: (1) mengurangi atau menghindari kerugian secara fisik, ekonomi maupun jiwa yang dialami oleh perorangan atau masyarakat; (2) mengurangi penderitaan korban bencana; (3) mempercepat pemulihan; dan (4) memberikan perlindungan kepada pengungsi atau masyarakat yang kehilangan tempat ketika kehidupannya terancam.

Pada tahun 2015, korban bencana merupakan yang paling tinggi selama periode tahun 2015-2019 yaitu mencapai 1.318 jiwa, sedangkan pada tahun 2019 mencapai 159 jiwa. Dalam hal penanganan korban bencana, pemerintah daerah Kabupaten Luwu masih belum mampu bekerja secara maksimal, terlihat dari korban bencana yang dievakuasi dengan

menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap pada tahun 2019 hanya mencapai 20,00% dari 159 korban, sedangkan pada tahun 2018 baru mencapai 69,14% dan 22,00% pada tahun 2017.

Berfluktuasinya kemampuan penanganan bencana menunjukkan kurangnya kapasitas manajemen penanggulangan bencana. Oleh karena itu, hal ini perlu mendapatkan perhatian dalam pembangunan di masa mendatang.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat digambarkan permasalahan dan akar masalah dari permasalahan pokok "Risiko yang ditimbulkan akibat bencana masih tinggi" sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 4.10
Identifikasi Permasalahan dan Akar Masalah
"Risiko yang ditimbulkan akibat bencana masih Tinggi"

Permasalahan	Akar masalah
Belum optimalnya manajemen penanggulangan bencana	Masih terbatasnya sarana prasarana dan kualitas aparatur penanggulangan bencana
	Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui dan memahami tentang bagaimana cara mengantisipasi dan mengatasi bencana
	Belum optimalnya penanangan korban bencana

4.1.2. Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Berdasarkan analisis terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota periode tahun 2015-2019, dapat diidentifikasi permasalahan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Luwu.

4.1.2.1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar yang pemenuhannya ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

1. Pendidikan
   a. Angka melek huruf baru mencapai 92,23%, lebih rendah dibanding tahun 2017 yang sudah mencapai 93,14%.
   b. Rata-rata lama sekolah baru mencapai 8,15 tahun, lebih rendah dibandingkan dengan capaian nasional dan Provinsi Sulawesi Selatan;
   c. Angka Partisipasi Sekolah (APS) PAUD baru mencapai 52,40%, SD/sederajat 99,41%, SMP/sederajat 93,81%, dan SMA/sederajat 72,10%.
   d. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/sederajat baru mencapai 94,45%, SMP/sederajat 96,77%, SMA/sederajat 72,10%.

e. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/sederajat baru mencapai 95,51%, SMP/sederajat 82,73%, dan SMA/sederajat 72,10.
f. Angka kelulusan SD/sederajat baru mencapai 98,73%, SMP/sederjaat 76,78%, SMA/sederajat 98,57%.
g. Angka Melanjutkan jenjang pendidikan SD/sederajat ke SMP/sederajat baru mencapai 97,66%, dari SMP/sederajat ke SMA/sederajat baru mencapai 96,46%.
h. Persentase ruang kelas SD/MI kondisi bangunan baik hanya 19,83%.
i. Minimnya guru di daerah pedalaman atau yang disebut daerah 3T (Terluar, Terdepan, dan Tertinggal).
j. Kurangnya ketersediaan guru dan murid pada jenjang pendidikan menengah dan khusus.
k. Belum terpenuhinya kebutuhan tenaga kependidikan.

2. Kesehatan

a. Kasus kematian bayi masih tinggi, yaitu rata-rata 61,20 kasus per tahun.
b. Rasio kematian balita per 1000 kelahiran hidup masih tinggi, yaitu rata-rata 10,19 per tahun.
c. Balita gizi buruk mencapai 30 kasus pada tahun 2019.
d. Cakupan Puskesmas Pembantu baru mencapai 54,11%.
e. Rasio dokter/tenaga medis per satuan penduduk baru mencapai 0,0002.
f. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani baru mencapai 80,49%.
g. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan baru mencapai 88,52%.
h. Cakupan Desa / kelurahan Universal Child Immunization (UCI) baru mencapai 89,42%.
i. Cakupan Penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA baru mencpaai 60,30%.
j. Tingkat prevalensi tuberkulosis (per 100.000 penduduk) mencapai 0,19%.
k. Tingkat kematian karena tuberkulosis (per 100.000 penduduk) mencapai 0,008.
l. Kasus tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS baru mencapai 63,68%.
m. Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 baru mencapai 81,00%.
n. Cakupan pelayanan nifas baru mencapai 86,66%.
o. Cakupan pelayanan anak balita baru mencapai 71,14%.
p. Belum optimalnya Pengembangan Rumah Sakit Rujukan.
q. Minimnya pengetahuan pengembangan lingkungan sehat dan peningkatan pola hidup sehat.
r. Belum optimalnya kinerja SDM kesehatan dan Kefarmasian.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan ruang

a. Irigasi kabupaten dalam kondisi baik baru mencapai 40,26%.
b. Penduduk berakses air minum baru mencapai 80,03%.

c. Rumah Tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak Perkotaan dan Perdesaan baru mencapai 47,94%.
d. Rumah tinggal bersanitasi baru mencapai 84,52%.
e. Rasio panjang jalan dalam kondisi baik hanya sebesar 0,21.
f. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap hanya sebesar 0,24.
g. Jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam) baru mencapai 21,29%.
h. Panjang jalan yang memiliki drainase/saluran pembuangan air (minimal1,5 m) baru mencapai 50,30%.
i. Belum tersedia data terkait dengan panjang jaringan tersier, luas lahan budidaya, drainase, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, panjang jalan yang memiliki trotoar, jasa konstruksi, penyelenggaraan RTRW, bangunan ber-IMB.
j. Belum efektifnya penanggulangan dan pemulihan banjir dan abrasi.
k. Belum optimalnya penyediaan air baku.

4. Perumahan dan Kawasan Pemukiman

a. Rasio rumah layak huni baru mencapai 0,208.
b. Permukiman yang tertata baru mencapai 0,155%.
c. Luas lingkungan pemukiman kumuh masih mencapai 206,36 Ha.
d. Luasan permukiman kumuh di perkotaan yang tertangani baru mencapai 0,03%.
e. Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan mencapai 0,0164.
f. Masih kurang optimalnya penanganan air limbah domestik (rumah tangga) regional.
g. Belum optimalnya penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis kabupaten.
h. Masih rendahnya ketersediaan infrastruktur pendukung hunian di wilayah perkotaan.
i. Tingginya *backlog* (kepemilikan rumah) di Kabupaten Luwu.

5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

a. Rasio petugas perlindungan masyarakat (Linmas) pada tahun baru mencapai 0,86.
b. Belum tersedia data terkait dengan penegakan Perda.
c. Masih kurangnya kompetensi anggota Satpol PP dan petugas pemadam kebakaran.

6. Sosial

a. Masih tingginya jumlah PMKS sebagai akibat kurang akuratnya pendataan.
b. Masih kurangnya bimbingan sosial dan pelatihan keterampilan bagi PSKS.
c. Belum optimalnya pemberdayaan sosial terhadap masyarakat.
d. Kurangnya kelembagaan kesejahteraan sosial yang dibina.
e. Masih kurangnya pembinaan pemberdayaan keluarga.

f. Belum optimalnya masyarakat miskin yang memperoleh pemberdayaan sosial.

4.1.2.2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang substansinya bukan merupakan Pelayanan Dasar yang pelaksanaannya mengikuti Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) untuk dijadikan pedoman bagi Daerah dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan.

1. Tenaga Kerja
   a. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja baru mencapai 64,69%.
   b. Tingkat Pengangguran Terbuka mencapai 4,66%.
   c. Rasio penduduk yang bekerja baru mencapai 95,34.
   d. PDB per tenaga kerja baru mencapai Rp60,96 juta.
   e. Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun keatas baru mencapai 61,68.
   f. Penduduk Berusaha Sendiri, Pekerja Bebas, Pekerja Keluarga mencapai 52,47%.
   g. Masih kurang aktifnya pembinaan terkait dengan hubungan industrial, kesejahteraan pekerja dan perlindungan tenaga kerja.
   h. Masih kurangnya pelatihan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja.
   i. Belum optimalnya pengelolaan data dan informasi kerja dan tenaga kerja.
   j. Terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) maupun tidak terserapnya angkatan kerja sebagai akibat pandemi Covid-19.
2. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
   a. Masih rendahnya Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Luwu.
   b. Belum terpenuhinya data terpilah gender dan anak.
   c. Belum efektifnya perencanaan responsif gender.
   d. Kurangnya partisipasi perempuan di lembaga legislatif, swasta dan pemerintah.
   e. Banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
   f. Kurangnya penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan.
   g. Belum meningkatnya perlindungan hak perempuan.
   h. Kurangnya perlindungan khusus anak.
   i. Masih kurangnya pemenuhan hak anak.
3. Pangan
   a. Desa mandiri pangan baru mencapai 85,90% dari 227 desa/kelurahan yang ada.
   b. Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) baru mencapai 89,20.
   c. Penanganan daerah rawan pangan masih berada pada 5 poin.
   d. Kebutuhan energi dan protein masyarakat yang semakin meningkat membutuhkan stabilitas dalam jumlah dan mutu keamanan pangan

e. Belum optimalnya pemanfaatan lahan pekaranganseba gai sumber ketersediaan dan cadangan pangan masyarakat
f. Distribusi pangan yang kurang merata dan harga pangan yang fluktuatif berakibat menurunnya akses pangan dan menimbulkan kerawanan pangan
g. Pola konsumsi pangan masyarakat belum spenuhnya Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA).
h. Masih rendahnya cakupan pengawasan bahan pangan segar dan olahannya
i. Masih rendahnya Kapasitas peternak sebagai penghasil pangan dari segi pengetahuan, keterampilan dan permodalan
j. Belum tersedianya sarana promosi ternak dan produk pangan asal ternak

4. Pertanahan

a. Persentase lahan bersertifikat baru mencapai 9,96%.
b. Luas lahan Pemda Kabupaten Luwu yang sudah bersertifikat baru mencapai 26 Ha.
c. Masih banyak aset Pemda Kabupaten Luwu yang belum lengkap status kepemilikannya.

5. Lingkungan Hidup

a. Upaya untuk meningkatkan kualitas air dan udara perlu ditingkatkan.
b. Belum optimalnya pengelolaan sampah perkotaan.
c. Kurangnya Ketaatan usaha/kegiatan terhadap peraturan perundangan dan ketentuan izin
d. Masih kurangnya ketaatan industri terhadap baku mutu air limbah dan emisi udara.
e. Minimnya Kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan.
f. Lemahnya pengelolaan data.

6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

a. Rasio penduduk ber-KTP baru mencapai 0,94.
b. Rasio penduduk ber-KK baru mencapai 0,55.
c. Rasio bayi ber-akte kelahiran baru mencapai 0,86.
d. Rasio pasangan ber-akte nikah baru mencapai 0,23.
e. Cakupan penerbitan KTP baru mencapai 94,22%.
f. Cakupan penerbitan akte kelahiran baru mencapai 86,22%.

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

a. Masih terdapat 9 desa yang belum memiliki kantor pemerintahan desa.
b. LSM aktif baru mencapai 20,34% dan belum ada yang berprestasi.
c. Masih banyaknya desa tertinggal
d. Belum meningkatnya jumlah desa mandiri
e. Belum optimalnya penataan, pembinaan dan pengembangan kerjasama Lembaga Desa dan Pemerintahan Desa
f. Belum optimalnya upaya realisasi lembaga kemasyarakatan desa katagori baik

g. Belum optimalnya upaya realisasi masyarakat desa yang berhasil setelah diberdayakan

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

a. Jumlah Kampung KB baru mencapai 59.
b. OPD yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB baru mencapai 8,82%.
c. Ratio akseptor KB semakin menurun dari sebesar 76,22% pada tahun 2018 menjadi 75,85% sedangkan tahun 2019.
d. Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 tahun cenderung stagnan dan baru mencapai 66,18%.
e. Pasangan Usia Subur yang Ingin ber-KB tidak terpenuhi (*unmet need*) semakin meningkat dan mencapai 14,27%.
f. Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) baru mencapai 24,50%.
g. Tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi baru mencapai 84,25%.
h. Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita baru mencapai 50,83%.
i. Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB baru mencapai 51,44%
j. Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB baru mencapai 37,08%.
k. Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di Kecamatan baru mencapai 9,09%.
l. Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan baru mencapai 43,75%.
m. Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I masih tinggi yaitu 43,28%.

9. Perhubungan

a. Rasio ijin trayek baru mencapai 0,0014.
b. Layanan angkutan darat baru mencapai 21,30%.
c. Kepemilikan KIR angkutan umum baru mencapai 45,35%.
d. Pemasangan rambu-rambu baru mencapai 19,56%.
e. Masih kurangnya keselamatan dan kenyamanan dijalan raya.
f. Belum optimalnyapembinaan, pemantauandan pengendalian angkutan darat.
g. Masih tingginya angka kecelakaan pada LLAJR di Ruas Jalan Kabupaten.
h. Kurangnya pengembangan sistem transportasi wilayah.
i. Masih banyaknya kendaraan umum tidak layak jalan yang tetap beroperasi.

10. Komunikasi dan informatika

a. Belum optimalnya aksesibilitas serta kapasitas telekomunikasi, informasi dan teknologi informatika.

b. Masih kurangnya ketersediaan perangkat teknologi informasi.
c. Belum optimalnya realisasi data Rencana Induk Komunikasi.
d. Masih kurangnya pelayanan dalam penyebarluasan informasi pembangunan daerah.
e. Belum optimalnya peran Pusat Informasi Kecamatan (PIK) dalam pembangunan daerah.

11. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
    a. Masih kurangnya realisasi koperasi aktif dan sehat dalam kewenangan Kabupaten
    b. Masih minimnya realisasi usaha kecil yang menjadi usaha menengah.
    c. Masih kurangnya realisasi tingkat kesehatan koperasi KSP/USP dan KSPPS/ UKSPPS.
    d. Masih sedikitnya koperasi aktif binaan yang cukup berkualitas.
    e. Masih kurangnya realisasi kinerja koperasi binaan (volume usaha, kapasitas produksi, aset dan keuntungan).
    f. Masih rendahnya laju pertumbuhan omset UKM.

12. Penanaman Modal
    a. Masih rendahnya realisasi PMA maupun PMDN menunjukkan bahwa minat calon investor untuk berinvestasi di Kabupaten Luwu masih kurang.
    b. Masih kurangnya MOU kerjasama investasi.
    c. Belum optimalnya sistem informasi penanaman modal daerah.
    d. Belum tersedianya recana strategis pengembangan penanaman modal daerah.
    e. Kurang efektifnya pengendalian dan pembinaan pelaksanaan penanaman modal.

13. Olah Raga dan Kepemudaan
    a. Masih kurangnya pembinaan olahraga di tingkat daerah.
    b. Masih lemahnya pembinaan organisasi kepemudaan.
    c. Masih lemahnya pembinaan kepramukaan.
    d. Masih kurangnya penyelenggaraan event olahraga.
    e. Masih kurang sarana dan prasarana olahraga
    f. Masih kurangnya pembinaan terhadap kewirausahaan pemuda.

14. Statistik
    a. Belum meningkatnya penyelenggaraan dan pelayanan Statistik.
    b. Terbatasnya ketersediaan data statistik.

15. Persandian
    a. Belum meningkatnya dukungan layanan Persandian.
    b. Belum baiknya kinerja persandian statistik dan layanan Pengadaan.

16. Kebudayaan
    a. Masih rendahnya pelestarian dan pemanfaatan nilai budaya daerah
    b. Masih kurangnya pelestarian event masyarakat adat

c. Kurangnya pembinaan organisasi kesenian (sanggar/kelompok seni dan budaya)

17. Perpustakaan

a. Masih kurangnya kepuasan pengunjung perpustakaan Kabupaten.
b. Peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan daerah.
c. Masih kurangnya beberapa sarana prasarana di perpustakaan daerah.

18. Kearsipan

a. Belum optimalnya OPD kabupaten yang pengelolaan arsipnyasesuai dengan ketentuan.
b. Belum optimalnya penyelenggaraan layanan kearsipan.
c. Masih kurangnya khasanah arsip Statis di Depo Arsip Luwu.

4.1.2.3 Urusan Pilihan

Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.

1. Kelautan dan Perikanan

a. Belum optimalnya pertumbuhan sektor perikanan.
b. Belum optimalnya pemanfaatan potensi perikanan baik tangkap, budidaya dan garam
c. Belum optimalnya pelaksanaan pemberdayaan pelaku usaha perikanan
d. Larangan penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan
e. SDM dan kelompok pelaku usaha perikanan yang belum mandiri dan berdaya saing

2. Pariwisata

a. Belum bertambah dan berkembangnya destinasi daya tarik wisata.
b. Kurangnya promosi wisata dalam negeri dan luar negeri.
c. Belum berkembangnya Industri ekonomi kreatif.
d. Belum berkembangnya Industri pariwisata sebagai destinasi utama.
e. Masih rendahnya kapasitas dan kualitas SDM kepariwisataan dan ekonomi kreatif.
f. Terhambatnya pertumbuhan sektor pariwisata sebagai akibat pembatasan aktivitas masyarakat dalam rangka pencegahan dan penanggulangan pandemi Covid-19.

3. Pertanian

a. Belum optimalnya pengelolaan potensi pertanian tanaman pangan (± 52.738 Ha) dan hortikultura (± 7.953 hektar).
b. Belum optimalnya pengelolaan potensi perkebunan yaitu: Kakao (± 36.762 Ha), Kelapa (± 4.711 Ha), Cengkeh (± 14.280 Ha), Kopi (± 4.627 Ha), Lada (± 321 Ha), Sagu (± 1.462 Ha), komoditas lain-lain (± 2.833 Ha).
c. Total produksi pertanian pangan dan palawija menurun dari 371.142,00 ton (2015) menjadi 349.454,90 ton (2017).

d. Total produksi tanaman perkebunan menurun dari 65.455,06 ton (2015) menjadi 39.848,00 ton (2017).
e. Masih kurangnya penerapan inovasi teknologi hortikultura.
f. Produksi dan produktivitas ternak lokal relatif rendah dan penerapan teknologi peternakan oleh masyarakat belum berkembang.
g. Belum terpenuhinya kebutuhan bibit ternak unggul.
h. Masih kurangnya ketersediaan hijauan pakan ternak unggul yang tahan kekeringan.
i. Mutu dan keamanan produk pangan asal ternak belum sepenuhnya terjamin.

4. Perdagangan

a. Masih lambatnya pertumbuhan dan rendahnya kinerja pengembangan usaha perdagangan.
b. Belum efektifnya pembinaan terhadap pelaku usaha perdagangan.
c. Belum optimalnya pengawasan distribusi barang.
d. Masih kurangnya sarana dan prasarana pasar.
e. Belum optimalnya perlindungan konsumen, dan pengawasan barang beredar/jasa.
f. Belum optimalnya pengamanan tata niaga komoditas penting.

5. Perindustrian

a. Belum optimalnya pembangunan industri.
b. Kurangnya penguatan struktur industri pada industri unggulan daerah.
c. Masih rendahnya SDM pelaku IKM.
d. Masih kurangnya promosi produk unggulan daerah.

4.1.2.4 Fungsi Penunjang Urusan

Fungsi penunjang urusan pemerintahan merupakan fungsi yang melekat pada pemerintah daerah dalam rangka menunjang pelaksanaan urusan pemerintahan.

1. Perencanaan Pembangunan

a. Masih rendahnya pemahaman dan perhatian terhadap kualitas perencanaan pembangunan daerah;
b. Belum dilaksanakannya pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan;
c. Masih lemahnya penyelenggaraan kelitbangan daerah;
d. Lemahnya pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah; dan
e. Rendahnya kapasitas sumber daya manusia.

2. Keuangan

a. Masih rendahnya pendapatan asli daerah.
b. Belum baiknya pengelolaan keuangan pemerintah terhadap pencapaian kinerja daerah.
c. Kurangnya pengelolaan keuangan dan aset daerah.
d. Masih kurangnya pelaksanaan manajemen aset daerah.

e. Belum efektifnya perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah terhadap potensi daerah yang tersedia.
f. Masih kurangnya Ketersediaan jumlah sistem/data/dokumen/informasi penunjang peningkatan pendapatan daerah.
g. Belum optimalnya Hasil Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain PAD yang Sah.
h. Masih kurangnya ketersediaan regulasi pengelolaan bagi hasil pajak/non pajak.

3. Kepegawaian

a. Belum optimalnya pengelolaan data kepegawaian.
b. Belum optimalnya distribusi pegawai sesuai hasil pemetaan.
c. Belum optimalnya penempatan pegawai sesuai dengan kebutuhan dan kompetensinya.
d. Belum maksimalnya penerapan *reward and punishment*.

4. Pendidikan dan Pelatihan

a. Masih kurangnya kompetensi dan profesionalisme penyelenggara diklat.
b. Masih kurangnya peserta Diklat Teknis Umum, Substantif, dan Fungsional yang lulus berkategori baik.
c. Masih kurangnya peserta Diklat kepemimpinan dan prajabatan, manajemen dan pemerintahan yang lulus berkategori baik.

5. Penelitian dan Pengembangan

a. Masih terbatas pejabat fungsional peneliti, pejabat fungsionalrekayasa dan fungsional analisis kebijakan publik yang mendukung pelaksanaan kelitbangan.
b. Belum optimalnya penguasaan metodologi dan analisis penelitian bagi Pejabat Fungsional Peneliti, Pejabat Fungsional Perekayasa dan staf Balitbangda Kabupaten Luwu yang mengacu pada Permendagri RI Nomor 17 Tahun 2016.
c. Belum optimalnya sinkronisasi dan koordinasi hasil-hasil penelitian dan dalam perencanaan, pelaksanaan danevaluasi kebijakan pemerintah Daerah.
d. Belum optimalnya sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan kelitbangan

6. Pengawasan

a. Belum optimalnya tindak lanjut terhadap temuan BPK dan BPKP.
b. Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan.
c. Belum efektifnya kebijakan sistem dan prosedur pengawasan.

7. Sekretariat DPRD

a. Belum efektifnya penataan perundang undangan dan layanan aspirasi.
b. Belum tepatnya laporan akuntabilitas kegiatan.
c. Belum efektifnya layanan administrasi, pemeliharaaan sarpras, Kapasitas SDM dan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.

d. Belum efektifnya pelaksanaan peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah.

8. Administrasi Pemerintahan

a. Masih rendahnya kinerja pelayanan pemerintahan
b. Masih kurangnya kinerja Pelayanan hukum yang ditangani
c. Belum lengkapnya dokumen peraturan perundang-undangan daerah dan kurangnya produk hukum yang terdokumentasikan.
d. Masih kurangnya dokumen kebijakan dan evaluasi.
e. Masih kurangnya pembinaan terhadap kelembagaan kelompok/badan/ lembaga/organisasi
f. Masih kurangnya implementasi kebijakan daerah di berbagai bidang.
g. Lemahnya kinerja pengendalian pelaksanaan pembangunan.
h. Belum optimalnya kinerja pengadaan barang/jasa.
i. Belum baiknya Laporan akuntabilitas kinerja institusi pemerintahan (LAKIP).
j. Masih kurangnya penerapan *E-GOVERNMENT*.
k. Masih rendahnya kualitas dokumen akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

Faktor yang umum sebagai penyebab permasalahan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan tersebut di atas adalah kurangnya kapasitas maupun kompetensi aparatur pada setiap perangkat daerah dan belum teralokasikannya anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah. Oleh karena itu, salah satu faktor yang menjadi prioritas dalam rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten Luwu adalah meningkatkan kualitas penyelenggaraan tata pemerintahan melalui peningkatan kompetensi aparatur, termasuk kesejahteraan pegawai.

4.2 Isu Strategis

Isu-isu strategis merupakan berbagai persoalan yang menjadi perbincangan baik internasional, nasional, hingga regional karena krusialnya kondisi atau perihal dalam pembangunan daerah masa kini maupun mendatang. Terkait dengan hal tersebut, isu-isu strategis menjadi salah satu acuan pokok dalam menyusun prioritas pembangunan agar pencapaian tujuan pembangunan daerah lebih terstruktur, tepat, dan cepat. Diharapkan dengan memperhatikan setiap isu strategis yang muncul, dalam waktu lima tahun ke depan pembangunan Kabupaten Luwu lebih signifikan dan memiliki keterkaitan dengan perwujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.

Isu-isu strategis jika diprioritaskan penanganan maupun antisipasinya, maka akan menjadi kelebihan tersendiri dalam meningkatkan peluang tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan, namun sebaliknya jika isu strategis tidak diindahkan maka bukan hal yang mustahil terjadi beberapa kegagalan dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Suatu isu strategis dirumuskan melalui identifikasi berbagai permasalahan pembangunan daerah yang bersifat strategis dari berbagai bidang dan memiliki pengaruh terhadap

agenda pembangunan lima tahun ke depan. Rumusan dari isu strategis mencakup isu internasional, isu nasional, dan isu regional yang memiliki keterkaitan.

4.2.1 Isu Strategis Global

4.2.1.1 Pandemi Covid-19

World Health Organization (WHO) menjelaskan bahwa Coronaviruses (Cov) adalah virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus Corona menyebabkan penyakit flu biasa sampai penyakit yang lebih parah seperti Sindrom Pernafasan Timur Tengah (MERS-CoV) dan Sindrom Pernafasan Akut Parah (SARS-CoV). Sampai saat ini terdapat 93 negara yang mengkorfirmasi terkena virus Corona. Merebaknya pandemi Covid-19, memunculkan permasalahan baru bagi seluruh dunia termasuk Indonesia. Salah satunya pada aspek ketenagakerjaan Indonesia. Banyak pekerja yang terpaksa dirumahkan dan menyebabkan angka pengangguran melonjak tajam.

Di Sulawesi Selatan, pada Bulan Juli 2020, angka pekerja yang dirumahkan dan yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) mencapai 15.485 orang dari 1.174 perusahaan dan terbanyak terdampak pada sektor perdagangan, industri dan pariwisata. Kondisi ini pada akhirnya berdampak pula terhadap peningkatan jumlah penduduk miskin di Sulawesi Selatan, dimana pada Bulan Maret 2020, jumlah penduduk miskin 776,83 ribu jiwa atau mengalami peningkatan sebesar 17,250 jiwa terhadap September 2019 dan meningkat 9,030 ribu jiwa terhadap Maret 2019. Kegiatan ekspor impor juga terkena dampak dengan adanya Covid-19.Selama ini, China merupakan negara eksportir terbesar di dunia. Indonesia melakukan kegiatan impor dari China dan China merupakan salah satu mitra dagang terbesar Indonesia.Adanya virus Corona yang terjadi di China menyebabkan perdagangan China memburuk.Permintaan bahan mentah seperti komoditi batu bara dan minyak sawit mengalami penurunan.Hal ini mempengaruhi pula eksporIndonesia bahkanberimbas terhadappenurunan harga komoditi ekspor.Komoditi ekspor ke Chinaadalah rumput laut, udang, telur ikan terbang, ikan laut, kakao, kacang mete, merica, dan marmer.Kondisi ini tentunyamenjadi tantangan tersendiri untuk mengevaluasi pergerakan ekspor impor daerah, sekaligus mencari peluang pasar baru sehingga kondisi tidak stagnan. Sedangkan di Kabupaten Luwu, dampak pandemi ini lebih besar pada aspek sosial, yaitu terganggunya aktivitas masyarakat sebagai upaya pencegahan penularan. Sedangkan dari sisi perekonomian tidak terlalu terlihat mempengaruhi kehidupan masyarakat. Meskipun demikian, kondisi terakhir menunjukkan jumlah masyarakat yang tertular semakin meningkat secara signifikan.

4.2.1.2 Perubahan Iklim

Kesadaran global tentang kondisi lingkungan dan sumber daya alam yang semakin buruk, telah mendesak seluruh negara untuk merubah paradigma pembangunan dengan tetap memperhatikan kelestarian alam dan lingkungan. Dalam mendukung upaya tersebut, Kabupaten Luwu melakukan berbagai upaya untuk menjaga hutan lindung dan serapan air yang ada di seluruh

wilayah. Hal ini dilakukan untuk menjaga ketersediaan air bagi kehidupan dan juga mengurangi resiko bencana banjir dan longsor. Namun demikian, dampak perubahan iklim di Kabupaten Luwu telah berdampak kepada menurunnya produktivitas perkebunan seperti durian pada tahun-tahun terakhir ini.

4.2.1.3 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (SDG's)

Isu strategis internasional yang relevan pada sebagian besar perencanaan pembangunan daerah adalah pencapaian *Sustainable Development Goals* (*SDGs*). Tahun 2016 merupakan tahun pertama implementasi agenda pembangunan dunia Post-2015 (SDGs). Sidang Umum PBB pada 4 Desember 2014 telah menyetujui platform agenda pembangunan dunia Post-2015 berdasar pada hasil *Open Working Group (OWG) on Sustainable Development Goals* yang akan menjadi target dan tujuan pembangunan dunia sampai 2030. Rumusan SDG terdiri dari 17 tujuan dan 169 target dimana pencapaian lebih terukur untuk menciptakan masyarakat dunia 2030 jauh lebih baik dari saat ini. Ke-17 tujuan SDGs tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menghapus segala bentuk kemiskinan dimana pun berada;
2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi, dan mencanangkan pertanian berkelanjutan;
3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan penduduk di segala usia;
4. Menjamin kualitas pendidikan yang adil dan inklusif serta meningkatkan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua;
5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan;
6. Memastikan ketersediaan dan pengelolaan yang berkelanjutan dari air dan sanitasi untuk semua;
7. Memastikan seluruh penduduk mendapat akses untuk energi yang terjangkau, dapat diandalkan, dan berkelanjutan;
8. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, lapangan kerja yang penuh dan produktif, dan pekerjaan yang layak untuk semua secara berkelanjutan;
9. Membangun infrastruktur tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif berkelanjutan, dan inovasi asuh;
10. Mengurangi ketimpangan di dalam dan antar negara-negara;
11. Membuat pemukiman kota dan pemukiman manusia yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan;
12. Pastikan pola konsumsi dan produksi berkelanjutan;
13. Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya;
14. Pelestarian dan pemanfaatan samudera, laut dan sumber daya kelautan berkelanjutan dalam rangka pembangunan berkelanjutan;
15. Melindungi, memulihkan dan mempromosikan pemanfaatan ekosistem darat, lestari mengelola hutan, memerangi pengguruan, dan menghentikan dan membalikkan degradasi lahan dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati;

16. Meningkatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua, dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan; serta
17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Target pembangunan universal yang tertuang dalam SDGs membutuhkan dukungan dari semua elemen masyarakat dunia, termasuk dari pemerintahan, Lembaga Swadaya Masyarakat, swasta, perguruan tinggi, dan masyarakat. Di setiap negara, tidak hanya negara miskin dan berkembang tetapi juga negara maju, rumusan SDGs merupakan sumber penting untuk menyelaraskan strategi dan kebijakan demi membuat kehidupan di muka bumi menjadi lebih baik. Berdasarkan persentase capaian SDGs pada tahun 2020 di Kabupaten Luwu, yang sudah dilaksanakan dan mencapai target 62 indikator (32,46%), yang sudah dilaksanakan dan belum mencapai target 69 Indikator (36,13%), yang belum dilaksanakan 9 indikator (4,71%) dan yang tidak ada data 51 indikator (26,70%).

4.2.1.4 Transformasi Digital

Saat ini dunia sedang memasuki era revolusi industri 4.0 yang mempengaruhi berbagai kehidupan masyarakat. Sejarah menunjukkan bahwa kemajuan teknologi pada revolusi industri 1, 2, dan 3 secara umum telah membuat hidup manusia menjadi lebih mudah dalam melakukan berbagai pekerjaan.Revolusi industri 4.0 memberikan dampak efisiensi dalam proses bisnis dan cara baru di setiap value chain dari suatu produk, walaupun juga menimbulkan disrupsi di berbagai industri.Revolusi Industri 4.0 kini telah masuk seiring dengan transformasi proses bisnis yang cepat ke arah ekonomi digital.Indonesia menjadi salah satu target bagi para pemain industri dunia yang tengah berebut masuk pasar Indonesia.

Salah satu transformasi model bisnis di era Industri 4.0 adalah penggunaan platform e-commerce oleh pelaku ekonomi. Melalui e-commerse, segala aktivitas transaksi jual-beli barang, promosi, dan pembayaran dilakukan dengan menggunakan elektronik yang terhubung dengan internet.E-commerce mengalami perkembangan cepat dengan kemudahan yang ditawarkan. Kecanggihan teknologi komunikasi dan informasi mampu memangkas keterbatasan sarana, jarak dan waktu antara penjual dan pembeli. Saat ini telah banyak bermunculan start up e-commerce dan marketplace yang memudahkan konsumen untuk berbelanja, seperti Lazada, Tokopedia, Bukalapak dan lainnya. Perkembangan e-commercesejatinya dapat dinikmati oleh segenap masyarakat, termasuk pelaku usaha.Pelaku usaha Usaha MIkro Kecil (UMK) menjadi bagian penting dalam perekonomian di Indonesia.

Berdasarkan Sensus Ekonomi 2016 (SE2016) jumlah usaha UMK mencapai 98,89 persen dan mampu menyerap tenaga kerja sekitar 85,29 persen dari total tenaga kerja non pertanian di Sulawesi Selatan.Namun,

pemasaran menjadi kesulitan terbesar untuk Industri Mikro dan Kecil (IMK) di Sulawesi Selatan. Hal ini terlihat dari hasil Survei Industri Mikro Kecil tahun 2017. Selain itu, produk IMK yang dihasilkan masih dipasarkan secara lokal, hanya 8 persen produk IMK yang dipasarkan ke luar kabupaten/kota. Transformasi digital para pelaku UMK di Sulawesi Selatan tidak bisa ditawar lagi. Hal ini perlu untuk meningkatkan kinerja usaha dan daya saing UMK itu sendiri sehingga tetap menjadi pilar yang kuat bagi perekonomian.

Teknologi digital juga bisa dimanfaatkan selama proses on farm dan off farm dalam bidang pertanian. Potensi sistem pertanian digital juga memiliki peluang besar untuk meningkatkan minat dan kreativitas anak muda menggeluti bidang pertanian yang selama ini mulai menurun.Potensi generasi muda memiliki andil besar dalam perubahan sistem pertanian, karena pemuda lebih adaptif terhadap adanya perubahan dan memiliki semangat yang lebih besar sehingga bisa lebih produktif. Dengan adanya sistem pertanian digital pemerintah dapat mengontrol komoditas apa yang ditanam dan dipanen dari daerah satu ke daerah lainnya. Melalui sistem ini, pemerintah dapat lebih mudah mengetahui wilayah mana yang sedang surplus dan defisit pangan, mempermudah distribusi dari petani hingga konsumen dengan memperpendek sistem rantai pasok pangan serta tidak ada keterbatasanwaktu dan tempat untuk mengakses segala informasi sehingga berpeluang meningkatkan keberdayaan petani.

4.2.2 Isu Strategis Nasional

Daerah yang maju, mandiri dan berdaya saing menjadi kekuatan utama dalam membangun kemajuan dan kemandirian bangsa serta memperkuat daya saing antarbangsa khususnya menghadapi ekonomi ASEAN merupakan salah satu yang sedang diperjuangkan pencapaiannya di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, beberapa isu strategis nasional yang perlu diperhatikan dalam perumusan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Luwu antara lain adalah sebagai berikut:

1. Bonus Demografi

   Bonus demografi adalah suatu fenomena dimana struktur penduduk sangat menguntungkan dari sisi pembangunan karena jumlah penduduk usia produktif sangat besar, sedang proporsi usia muda sudah semakin kecil dan proporsi usia lanjut belum banyak. Keadaan pada saat Rasio Ketergantungan semakin menurun hingga berada di bawah 50% disebut ‘Jendela Kesempatan’ yang hanya berlangsung satu kali dalam seluruh perjalan kehidupan penduduk. Ledakan usia produktif yang akan dijelang oleh Indonesia pada tahun 2020-2035 adalah sebuah peluang dan tantangan. Pada periode itu, setidaknya 64 persen dari total jumlah penduduk Indonesia berada pada usia produktif. Namun, bukan semata peluang untuk bangkit, jika tidak dikelola dengan baik, bonus demografi juga bisa menjadi awal keruntuhan sebuah bangsa.

Bonus demografi adalah peluang yang sangat strategis bagi daerah untuk melakukan percepatan pembangunan, karena tersedianya sumber daya manusia produktif. Sebaliknya bonus demografi akan menjadi kejatuhan suatu bangsa atau daerah jika tidak dimanfaatkan dengan mempersiapkan diri dalam menyongsong era tersebut.

Pentingnya pembangunan generasi muda harus merupakan objek utama dari program penguatan pendidikan pemerintah saat ini. Perbaikan SDM pemuda perlu terus ditingkatkan agar cita-cita mencetak generasi kreatif dapat terwujud. Kehadiran bonus demografi menjadi suatu peluang sekaligus tantangan yang harus dikelola secara baik agar memberikan keuntungan maksimal di masa mendatang. Agar bonus itu juga menjadi peluang yang menguntungkan di daerah, diperlukan upaya serius semua pihak terutama yang menyangkut peningkatan kualitas SDM, penyiapan tenaga kerja berkualitas dan pembangunan kependudukan. Ketidakmampuan menyiapkan lapangan kerja dan peningkatan kualitas SDM seperti pendidikan yang tinggi dan pelayanan kesehatan dan gizi yang memadai, maka akan terjadi permasalahan, yaitu teradinya pengangguran yang besar dan akan menjadi beban daerah.

2. Pencapaian Standar Pelayanan Minimun (SPM)

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 maka SPM tidak lagi dimaknai dalam kontekstual sebagai norma, standar, prosedur, dan kriteria. Batasan pengertian SPM secara tekstual memang tidak berubah, yaitu bahwa SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, namun terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar, kriteria penetapan SPM, dan mekanisme penerapan SPM. Penetapan SPM dilakukan berdasarkan kriteria barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang bersifat mutlak dan mudah distandarkan yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar. Penerapan SPM didasarkan pada pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang terdiri atas: (1) Pendidikan; (2) Kesehatan; (3) Pekerjaan umum dan penataan ruang; (4) Perumahan rakyat dan kawasan permukiman; (5) Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan (6) Sosial.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal telah dijelaskan bahwa target pencapaian setiap indikator adalah 100% (seratus persen) setiap tahun dari enam urusan tersebut. Dari target tersebut maka menjadi isu pokok yang harus menjadi perhatian bagi pemerintah daerah adalah capaian indikator mutu pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar yang belum mencapai 100% sebagaimana capaian kinerja tersebut

Adapun yang menjadi isu strategis yaitu upaya pencapaian setiap jenis Pelayanan Dasar untuk daerah Kabupaten/Kota yaitu terdiri atas:

a. Pendidikan anak usia dini
b. Pendidikan dasar
c. Pendidikan kesetaraan
d. Pelayanan kesehatan ibu hamil
e. Pelayanan kesehatan ibu bersalin
f. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir
g. Pelayanan kesehatan balita
h. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar
i. Pelayanan kesehatan pada usia produktif
j. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut
k. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi
l. Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus
m. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat
n. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis;
o. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus);
p. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari;
q. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestic;
r. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah kabupaten/kota
s. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
t. Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
u. Pelayanan informasi rawan bencana;
v. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
w. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
x. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran;
y. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
z. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
aa. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
bb. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
cc. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota.

Pencapaian SPM Kabupaten Luwu pada tahun 2019 pada bidang pendidikan dan kesehatan belum mencapai target yang ditetapkan.

4.2.3 Isu Strategis Daerah

4.2.3.1 Provinsi Sulawesi Selatan

Isu strategis pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut:

1. Mendekatkan Pelayanan Kesehatan bagi Seluruh Masyarakat

   Syarat pokok pelayanan kesehatan yang baik adalah pelayanan kesehatan tersebut harus tersedia di masyarakat (*available*) serta bersifat

berkesinambungan (*continously*). Artinya semua jenis pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat tidak sulit ditemukan, serta keberadaannya dimasyarakat senantiasa tersedia setiap saat bila dibutuhkan. Syarat pelayanan kesehatan yang baik lainnya adalah yang mudah dicapai (*accessible*) oleh masyarakat. Pengertian ketercapaian yang di maksud disini terutama dari sudut lokasi. Dengan demikian untuk dapat mewujudkan pelayanan kesehatan yang baik, maka kehadiran dan pengaturan distribusi sarana kesehatan yang berkualitas menjadi sangat penting.

Meskipun pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin telah tersedia, belum semua penduduk miskin memanfaatkan pelayanan ini karena mereka tidak mampu menjangkau fasilitas pelayanan kesehatan akibat kendala biaya, faktor jarak dan transportasi. Untuk itu dibutuhkan RS Regional sehinggal menjangkau pelayanan kesehatan antar wilayah Kabupate/Kota, Ibu Kota Makassar tidak lagi selalu dijadikan rujukan dalam pelayanan kesehatan.

2. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Sulawesi Selatan.

   Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan harus memastikan perekonomian terus bertumbuh secara cepat. Posisi Sulawesi Selatan yang secara historis menjadi penghubung Kawasan Indonesia Timur menjadi kekuatan yang tidak dimiliki daerah lain, namun hal tersebut tidaklah cukup. Kemudahan dalam berinvestasi, mendapatkan izin, dan kondisi yang stabil serta kondusif menjadi pra syarat utama sebuah perekonomian yang dinamis dan mendatangkan kesejahteraan bagi warganya. Kondisi Pemerintahan yang cenderung birokratis, tidak melayani, dan kaku hal ini membuat Sulawesi Selatan tidak menjadi pilihan utama untuk membuka usaha. Dalam survey tahun 2017 yang dibuat oleh lembaga penelitian Asia Competitiveness Institute, Sulawesi Selatan berada di Posisi ke-9 terkait kemudahan berbisnis, tertinggal dari Provinsi lain seperti Jawa Timur, Jawa Barat dan DKI Jakarta.

3. Kualitas Infrastruktur yang menunjang kegiatan perekonomian.

   Sulawesi Selatan memiliki luas 46.000 Km persegi, dengan daratan yang luas dan gugusan pulau-pulau. Untuk menunjang perekonomian, dibutuhkan interkonektivitas antar daerah yang ditunjang oleh Infrastruktur yang mumpuni. Saat ini di Sulawesi Selatan terdapat 62 Pelabuhan Laut dan 13 Bandara, namun karena kualitas yang kurang baik di daerah lain, satu-satunya yang menjadi tumpuan untuk pertumbuhan ekonomi adalah Kota Makassar. Selain itu, keberadaan infrastruktur berkualitas di bidang sumber daya air juga masih sangat dibutuhkan, mengingat Sulawesi Selatan sampai saat ini masih menjadi Provinsi yang rawan terdampak bencana banjir.

   Di samping itu kondisi infrastruktur jalan yang belum optimal, dimana jaringan jalan dalam kondisi baik pada tahun 2017 baru mencapai 37,07% dari panjang jalan 2.009,35 Km. Sedangkan pada kondisi jalan rusak cendrung mengalami peningakatan pada tahun 2016 yakni 25,58 dan

meningkat tahun 27,86 persen. kondisi jalan rusak berat pada tahun 2013 adalah 7,35 persen turun pada tahun 2014 yakni 7,15 persen hingga tahun 2015 sebesear 4,85. Hal ini disebabkan karena ada peralihan kewenangan beberapa ruas jalan kabupaten menjadi ruas jalan provinsi dengan kondisi rusak parah yang berakibat menurunnya capaian kinerja ruas jalan provinsi secara akumulasi. Masih rendahnya persentase jalan provinsi dalam kondisi baik antara lain dikarenakan masih terdapat jalan provinsi dengan perkerasan berupa kerikil sepanjang 152,6 Km (7,59%) dan perkerasan berupa tanah sepanjang 211,52 Km (10,53%). Kondisi jalan ini terdapat di Kabupaten Pinrang, Luwu Utara, Luwu Timur, Luwu, Toraja Utara, Tana Toraja, Enrekang, Barru, Soppeng, Bone, Sinjai, dan Bulukumba. Tentunya dengan hal ini perlunya adanya penanganan terhadap jalan yang rusak ini dapat segera diperbaiki agar tidak membahayakan para pengguna jalan.

4. Pemerataan Perdapatan bagi warga Sulawesi Selatan.

   Selain fokus terhadap pertumbuhan ekonomi, sebuah pemerintahan tidak bias melupakan pemerataan pendapatan warganya. Pemerataan dilakukan terhadap pendapatan perkapota maupun pemerataan terhadap pembangunan wilayah. Pendapatan per kapita warga Sulawesi Selatan saat ini memang sudah meningkat mencapai 44 juta per tahunnya , tetapi jika dianalisa lebih mendalam, pendapatan ini belum dirasa oleh semua warga Sulawesi Selatan. Berdasarkan data yang dirilis oleh BPS, pada tahun 2017 Sulawesi Selatan menjadi Provinsi yang memiliki ketimpangan pendapatan warga tertinggi kedua di Indonesia (0,429). Selain itu, jumlah orang miskin di Sulawesi Selatan masih cukup tinggi sebesar 9,48% pada tahun 2016, diatas target yang ingin dicapai oleh Pemprov Sulawesi Selatan pada akhir masa periode tiga RPJPD, yaitu 6%.

5. Keberadaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas.

   Untuk mengakselerasi pembangunan, kunci utama yang harus dimiliki adalah keberadaan SDM yang berkualitas. Sulawesi Selatan memiliki potensi pertembuhan yang sering dinamakan oleh bonus demografi, di mana mayoritas warga berada pada usia produktif. Di Sulawesi Selatan pada tahun 2016, jumlah penduduk yang berada pada usia produktif (15-64 Tahun) berada di angka 5,6 Juta, atau 65% dati total warga Sulawesi Selatan. Data tersebut menunjukkan sebuah potensi besar dari sisi kuantitas sumber daya manusia, jika dibarengi oleh kualitas SDM tersebut. Namun IPM Sulawesi Selatan saat ini berada di angka 69,76 yang artinya Sulawesi Selatan berada diperingkat 14 dibandingkan Provinsi lain di Indonesia. Lebih dalam lagi, angka rata-rata lama sekolah di Sulawesi Selatan adalah 7,75 tahun, yang artinya rata-rata anak sekolah di Sulawesi Selatan hanya bersekolah sampai sekolah menengah pertama dan menemui hambatan mengenyam sekolah menengah atas.

6. Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumberdaya Alam.

   Letak geografis yang strategis dan kondisi biofisik wilayah yang mendukung menyebabkan Sulawesi Selatan memiliki sumberdaya alam yang berlimpah.

Potensi sumberdaya alam yang menjadi unggulan di Sulawesi Selatan antara lain; di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, kelautan/ perikanan, pariwisata, energi dan pertambangan. Untuk sektor pangan, surplus hasil pertanian (padi/beras) selama 2 dekade terakhir memantapkan status sulawesi selatan sebagai salah satu lumbung pangan nasional dan penghasil tanaman pangan terbesar di wilayah Indonesia Timur. Potensi sumberdaya alam sektor perikanan/kelautan juga menjadi sektor unggulan Sulawesi Selatan. Komoditi unggulan untuk sektor perikanan/kelautan antara lain; ikan laut, udang tambak dan rumput laut. Produksi rumput laut sulawesi selatan mampu memenuhi 30% dari kebutuhan nasional. Sektor pariwisata juga menjadi sektor yang perlu dioptimalkan pengelolaannya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Namun demikian, sumberdaya alam yang dimiliki belum dimanfaatkan dan dikelola dengan baik. Hasil produksi sumberdaya alam sebagian besar dikirim/diekspor dalam kondisi bahan mentah/bahan baku (belum diolah), padahal ada potensi pengolahan yang dapat memberikan nilai tambah (added value) dan meningkatkan pendapatan masyarakat di Sulawesi Selatan. Tantangan lain terkait sumber daya alam adalah bagaimana menjaga agar pemanfaatan sumberdaya alam memberikan manfaat secara ekonomi namun tetap memperhatikan kemampuan daya dukung sumberdaya alam dan daya tampung lingkungan hidup sehingga kelestarian lingkungan tetap terjaga. Kebijakan pembangunan ekonomi harus berjalan bersama dengan upaya menjaga kelestarian sumberdaya alam sehingga pembangunan berkelanjutan dapat diwujudkan.

7. Revitalisasi Paradigma pengelolaan Komoditi (Petik, Olah, Jual)

Industri merupakan salah satu komponen penting dalam pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, perlu terus dilakukan berbagai upaya strategis untuk meningkatkan daya saing industri nasional, sebagai katalis utama dalam pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan. Dengan demikian "Peningkatan Nilai Tambah Industri Lokal untuk Mendongkrak Daya Saing Ekonomi”, yang seharusnya lebih meningkat.

Akselerasi industrialisasi dilaksanakan melalui lima strategi utama. Yang pertama yaitu hilirisasi komoditi pertanian sebagai bahan mentah menjadi produk yang bernilai tambah di dalam negeri. Kedua, mendorong peningkatan produktivitas dan daya saing industri dalam negeri. Ketiga, mendorong partisipasi dunia usaha dalam pembangunan infrastruktur. Keempat, percepatan proses pengambilan keputusan untuk menyelesaikan hambatan birokrasi (Debottlenecking), serta kelima adalah meningkatkan integrasi pasar domestik.

Hilirisasi komoditi bertujuan untuk meningkatkan produksi, meningkatkan kapasitas pengolahan, dan meningkatkan kapasitas pasar. Dengan demikian akan menghasilkan nilai tambah, memperkuat struktur industri, serta menyediakan lapangan kerja dan peluang usaha.

Hilirisasi komoditas yang akan dikembangkan adalah program hilirisasi berbasis sektor pertanian meliputi pertanian tanaman pangan, perikanan, peternakan, perkebunan, kehutanan. Dengan program hilirisasi ini diharapkan akan dapat mengembalikan kejayaan Sulawesi selatan dalam hal produksi, industri pengolahan berbasis pertanian dan keunggulan pemasaran hasil.

8. Sulawesi Selatan sebagai poros maritim

Sulawesi Selatan sebagai provinsi yang wilayahnya berbatasan dengan laut memiliki garis pantai sepanjang 1.973,7 km serta luas wilayah laut dan pesisir kurang lebih 60.000 km² diyakini memiliki kekayaan maritim yang besar. Potensi ekonomi yang terkandung di dalam laut dan sepanjang pesisir Sulawesi Selatan bila dikelola secara bijak akan mendatangkan devisa daerah. Sulawesi Selatan memiliki pulau-pulau kecil yang tersebar dari Pangkep hingga Selayar dan sepanjang Teluk Bone yang merupakan destinasi wisata bahari yang tak kalah dengan destinasi pulau yang lain. Pembangunan infrastruktur konektivitas pendukung seperti shortsea shipping untuk mempercepat konektivitas antar pulau di Sulawesi Selatan.

Untuk dapat menjadi poros utama pertumbuhan maritim di nusantara, Sulawesi Selatan harus membangun dan meningkatkan daya dukung sistem pelayaran, menghidupkan pelabuhan-pelabuhan perikanan yang terbengkalai di Selayar hingga Palopo, perbaikan tata kelola kepelabuhanandan memodernisasinya sesuai standar internasional, perbaikan pelayanan dan akses di seluruh pelabuhan yang ada. Dengan memaksimalkan hal tersebut, akan menguatkan posisi Sulawesi Selatan sebagai poros maritim dan pusat konektivitas kawasan timur Indonesia.

Aspek sosial dan budaya bagi masyarakat maritim sangat diperlukan dalam mempercepat pembangunan kemaritiman secara komprehensif dan terpadu. Tantangannya adalah mengubah kebiasaan masyarakat maritim yang tertutup, berpikir sempit dan tidak berkembangmenjadi masyarakat maritim yang dinamis, kreatif dan produktif sehingga taraf hidup masyarakat lebih baik tanpa meninggalkan jati dirinya sebagai masyarakat maritim dan nilai-nilai positif yang selama ini telah ada. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Sulawesi Selatan memprioritaskan proses pada sektor sosial dan budaya dalam membangun kemaritiman.

Disamping itu jasa kelautan merupakan salah satu sektor yang berpotensi menjadi sumber penerimaan devisa negara melalui beberapa kegiatan yang menunjang dan memperlancar kegiatan pengangkutan sebagai upaya membangun jasa kelautan yang efektif dan efisien di Sulawesi Selatan.

4.2.3.2 Kabupaten Luwu

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah/masyarakat pada masa yang akan datang.Ada 7 (tujuh) kriteria yang digunakan untuk memilih isu strategis, yaitu: bersifat lintas sektor, bersifat lintas wilayah, dapat berupa fenomena atau persoalan

nyata, berdampak negatif jangka panjang jika tidak diselesaikan, berpotensi mengganggu pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, potensi dampaknya kumulatif dan berefek ganda, dan potensi dampaknya lebih luas dari wilayah perencanaan. Di samping itu, kondisi lingkungan eksternal, kebijakan pembangunan nasional, provinsi, kabupaten, rencana tata ruang, dan rencana pembangunanjangka panjang sebagaimana diuraikan di atas, merupakan referensi untuk memperkaya perumusan isu strategis.

Berdasarkan hasil analisis dan perumusan permasalahan yang mengiringi pembangunan daerah selama ini, isu-isu strategis internasional, isu dan kebijakan strategis nasional, isu dan kebijakan strategis regional, dan telaahan terhadap RTRW Kabupaten Luwu, maka dapat dirumuskan isu-isu strategis pembangunan Kabupaten Luwu sebagai berikut:

1. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Penerapan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK)

   SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. SPM ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran. Penetapan SPM dilakukan berdasarkan kriteria barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang bersifat mutlak dan mudah distandarkan yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar. Untuk mekanisme penerapan SPM didasarkan pada: (i) pengumpulan data secara empiris dengan tetap mengacu secara normatif sesuai standar teknis; (ii) penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar; (iii) penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar; dan (iv) pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar, yang kesemuanya itu dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

   NSPK merupakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan pemerintah pusat sebagai pedoman dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan daerah. Tujuannya antara lain adalah menghindari tumpang tindih penyelenggaraan dan pengelolaan urusan pemerintahan, meminimalisasi konflik masing-masing tingkatan pemerintahan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. Disamping itu, NSPK juga memperjelas arah kebijakan pemerintah daerah menjadi pedoman dan acuan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.

   Untuk mencamin pencapaian SPM dan penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai NSPK, dibutuhkan kebijakan yang sungguh-sungguh dan konseisten serta aparatur yang smart, professional, inovatif, unggul, responsif dan bersih. Tata kelola pemerintah yang baik merupakan *core business* dalam mengimplementasikan pembangunan daerah mengingat aparatur pemerintah adalah subyek utama dalam pembangunan daerah. Pengelolaan pemerintahan yang baik menciptakan pelayanan publik yang cepat dan

bersih sehingga tercipta kondisi yang kondusif antara pemerintah dan masyarakat. Sekurang-kurangnya terdapat empat elemen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang harus diperhatikan untuk mencapai *good governance*, yakni *accountability, transparency, predictability,* dan *participation*. Empat hal tersebut akan menjadikan pelaksanaan pemerintahan menjadi efektif dan efisien.

Terkait dengan hal ini, berbagai upaya terus dilakukan di Kabupaten Luwu, seiring dengan semakin kuatnya penekanan terhadap upaya membentuk birokrasi yang ideal serta kondusif untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Namun demikian, banyak permasalahan yang masih menjadi pekerjaan rumah antar lain: *pertama*, masih rendahnya profesionalisme aparatur daerah yang menyebabkan pelayanan kepada masyarakat belum optimal, serta waktu yang ada tidak digunakan secara produktif.

Kedua, rendahnya kualitas pelayanan publik yang memperburuk citra birokrasi dan semakin kehilangan kepercayaan dari masyarakat. Budaya birokrasi yang masih buruk serta birokrasi yang tambun berimplikasi pada kurang efisien dan efektif dalam melaksanakan tugasnya. *Ketiga*, pengaruh politik yang kuat terhadap birokrasi, juga menjadi penyumbang terhadap masih terhambatnya kinerja birokrasi sehingga lemah dalam merespon agenda dan tantangan dalam pembangunan daerah.

Salah satu isu yang perlu diperhatikan dalam perumusan kebijakan pembangunan adalah meningkatkan daya saing orang per orang, dengan menekan berkembangnya sikap yang pragmatis. Masyarakat harus diarahkan untuk memiliki keahlian yang kompeten, agar dapat berperan maksimal dalam pembangunan, baik sebagai objek maupun subjek pembangunan. Seluruh lapisan masyarakat harus dilibatkan dalam proses ini, termasuk ASN. Khusus untuk ASN, pemberlakuan *reward and punishment* merupakan salah satu yang perlu diaktualisasikan.

2. Ketersediaan Infrastruktur

   Kabupaten Luwu memiliki luas 3.000,25 Km persegi, mencakup 22 kecamatan dan 207 desa. Untuk menunjang perekonomian, dibutuhkan interkonektivitas antar daerah yang ditunjang oleh Infrastruktur yang mumpuni. Meskipun seluruh desa sudah dapat dilalui kendaraan roda 4, namun kualitas infrastruktur jalan masih banyak yang sangat buruk. Selain itu, keberadaan infrastruktur berkualitas di bidang sumber daya air juga masih sangat dibutuhkan, mengingat Kabupaten Luwu sampai saat ini masih menjadi daerah yang rawan terdampak bencana banjir. Untuk mendukung pemenuhan hak-hak dari masyarakat, maka dibutuhkan pengintegrasian, pemerataan dan peningkatan infrastruktur bersamaan dengan pengendalian dan pengawasan agar pembangunan terwujud secara berkelanjutan.

3. Pemanfaatan Sumber Daya Alam Berbasis Pembangunan Keberlanjutan

Keberadaan Sumber Daya Alam belum dimanfaatkan secara baik dan belum didasarkan pada pemanfaatan berbasis pada pembangunan keberlanjutan. Kabupaten Luwu diberkahi dengan sumber daya alam yang berlimpah. Kabupaten Luwu merupakan penghasil beras, sagu, dan cengkeh yang potensial sejak dulu. Di samping itu juga terdapat potensi pertambangan yaitu emas dan marmer. Namun, sumber daya alam yang dimiliki belum termanfaatkan dengan baik. Hasil sumber daya alam dikirim dalam kondisi tidak diolah, padahal ada potensi pengolahan yang bisa meningkatkan nilai tambah dan menambah pendapatan petani. Tantangan lain terkait sumber daya alam adalah menjaga kelestarian alam, karena lebih dari 50% wilayah Kabupaten Luwu adalah kawasan hutan dengan berbagai peruntukan. Kebijakan pembangunan ekonomi harus berjalan bersama dengan upaya menjaga kelestarian sumber daya alam yang ada.

Industri merupakan salah satu komponen penting dalam pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, perlu terus dilakukan berbagai upaya strategis untuk meningkatkan daya saing industri, sebagai katalis utama dalam pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian peningkatan niilai tambah produk lokal untuk mendongkrak daya saing ekonomi harus dilakukan.

4. Transformasi Digital

Transformasi Digital merupakan proses dari perkembangan teknologi yang pesat, yang penerapannya mengakibatkan perubahan yang sangat signifikan pada seluruh aspek kehidupan masyarakat. Pada akhirnya transformasi digital ini merupakan penggambaran secara total atau secara keseluruhan efek digitalisasi dalam masyarakat. Singkatnya, transformasi digital/*digital transformation* adalah perubahan yang terjadi dalam sebuah sistem atau alur proses, dari semula menggunakan cara manual ke sistem yang lebih mudah dan memotong proses yang tidak perlu. Transformasi digital pada saat ini selalu dikaitkan dengan kemudahan pemakaian aplikasi dalam smartphone yang memberikan *new experience* terhadap penggunanya. Saat ini, tak hanya cara berkomunikasi yang ada dalam genggaman (*smartphone*), namun telah menyentuh aspek lainnya seperti transportasi, pendidikan, bisnis, penyelenggaraan pemerintahan, dan lain sebagainya.

Para ahli kreator di bidang ini tidak ada hentinya memikirkan inovasi apalagi yang akan diciptakan. Di satu sisi hal ini tentu bermanfaat untuk dapat membuat suatu pekerjaaan lebih efektif dan efesien dan memanjakan masyarakat dalam kehidupan yang lebih mudah. Namun, masyarakat juga harus mengetahui dampak dari berkembang pesatnya teknologi digital. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus melakukan langkah-langkah untuk mengantisipasi perkembangan ini, agar dampak negatifnya tidak sampai mengganggu ketentraman dan ketertiban serta merugikan pihak-pihak tertentu. Selain itu, hal penting lainnya adalah memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas sumber daya, tanpa menghilangkan kearifan lokal ditengah-tengah masyarakat.

5. Pengembangan Infrastruktur Perkotaan

Belopa ditetapkan menjadi ibukota Kabupaten Luwu pada tanggal 30 Desember 2005 berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2005 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Luwu dari wilayah Kota Palopo ke Belopa Kabupaten Luwu. Secara administratif, saat ini Belopa terdiri dari 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Belopa dan Belopa Utara, meliputi 11 Desa dan 6 Kelurahan, dengan luas wilayah 93,99 km2 atau 3,14% dari luas Kabupaten Luwu. Jumlah penduduk kedua kecamatan ini adalah 35.247 jiwa.

Meskipun telah 15 menjadi ibukota, infrastruktur Belopa masih jauh tertinggal dari ibukota kabupaten lainnya di Sulawesi Selatan, khususnya apabila dibandingkan dengan kabupaten di bagian selatan wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Kondisi ini tentunya kurang maksimal bagi masyarakat Kabupaten Luwu pada umumnya dan warga Belopa pada khususnya. Masyarakat sangat membutuhkan infrastruktur pendukung kehidupan, agar layak dan sejajar dengan masyarakat di kota-kota lainnya. Di samping itu, perkembangan suatu kota akan berdampak kepada perekonomian dan kesejahteraan masyarakatnya. Oleh karena itu, perlu diupayakan pembangunan infrastruktur yang memadai dan secara berkesinambungan melalui kebijakan penganggaran yang mendukung Belopa sebagai pusat perekonomian dan peradaban di Kabupaten Luwu.

BAB V
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1. Visi

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah. Dalam konteks RPJMD, visi pembangunan daerah adalah visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang disampaikan pada waktu Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Oleh karena itu, visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 merupakan penjabaran dari visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Visi RPJMD menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun.

Visi yang hendak dicapai Kabupaten Luwu dalam periode Tahun 2019–2024 adalah:

"Kabupaten Luwu Yang Maju, Sejahtera Dan Mandiri Dalam Nuansa Religi"

Rumusan Visi Kabupaten Luwu 2019-2024 tersebut di atas, mengandung 4 (empat) frasa yang penting untuk diberikan penjabaran makna atau terdapat 4 (empat) pilar pokok yang penting untuk diberikan penjelasan, yaitu :

Maju : Kondisi masyarakat yang menikmati standar hidup yang relatif tinggi, yang ditandai dengan pemanfaatan teknologi, ekonomi yang merata, sumber daya manusia yang berkualitas (adaptif dan kompetitif), derajat kesehatan yang membaik, dan terpenuhinya hak pendidikan dasar, tercapainya tujuan pembangunan fisik dan non fisik, serta birokrasi yang profesional, inovatif, dan responsif.

Sejahtera : Kondisi dimana masyarakat Kabupaten Luwu memiliki tata kehidupan dan penghidupan, mampu memenuhi kebutuhan dasar secara berkelanjutan (material maupun spiritual), yang dilingkupi dengan suasana kehidupan yang religius, aman dan tentram.

Mandiri : Mampu memberdayakan seluruh potensi yang ada untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat secara berkelanjutan.

Religi : Kehidupan masyarakat Kabupaten Luwu yang mengamalkan nilai-nilai agama dan budaya, yang tercermin dalam tatanan kehidupan masyarakat yang aman, tenteram dan nyaman.

Berdasarkan pernyataan visi diatas dengan beberapa elemen pokok visi yang terkait maka dapat digambarkan hubungan antar elemen visi yang digambarkan sebagai berikut:

Gambar 5.1
Keterkaitan Antar Elemen Pokok Visi

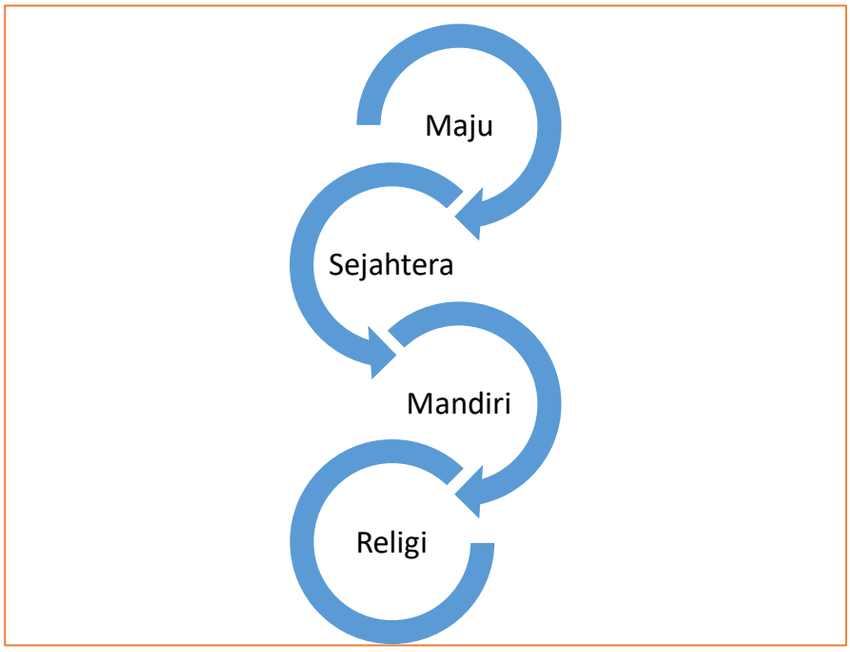

Elemen visi Kabupaten Luwu merupakan kondisi masyarakat yang diamanatkan dalam konstitusi, yaitu kehidupan yang cerdas dan sejahtera. Manusia yang sejahtera adalah manusia yang memiliki tata kehidupan dan penghidupan, dapat memenuhi kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosialnya. Daerah yang maju ditopang oleh kecerdasan manusia, dan kecerdasaran ini akan memberikan kehidupan yang sejahtera. Dengan sumber daya manusia yang berdaya saing dan didukung pengelolaan potensi sumber daya alam yang maksimal, maka akan terwujud daerah yang mandiri. Selanjutnya kemajuan, kesejahteraan, kemandirian, akan meneguhkan kehidupan masyarakat yang religius.

5.2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi melalui rumusan strategi dan arah kebijakan.

Memperhatikan visi serta perubahan paradigma pembangunan daerah dan kondisi yang akan dicapai pada masa yang akan datang, maka dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024, misi

pembangunan daerah Kabupaten Luwu beserta penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. **Mewujudkan Pemerintahan Yang Profesional, Berwibawa, Amanah, Transparan, dan Akuntabel.**

   Tata kelola pemerintahan bersih pada prinsipnya adalah sebuah model penyelenggaran pemerintahan yang paling diminati bahkan dijadikan nilai kerja untuk memperoleh kepercayaan publik. Oleh karenanya Pemerintah Kabupaten Luwu melalui misi ini tidak hanya menjadikan hal tersebut sebagai narasi melainkan tercermin dalam penyelenggaraan pemerintahan. Untuk mendukung tercapainya pemerintahan yang bersih salah satu hal yang paling esensial adalah penyelenggaraan pemerintahan secara profesional.

   Secara umum, upaya-upaya yang dilakukan untuk mewujudkan misi ini antara lain adalah peningkatan kualitas sistem perencanaan pembangunan, meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, penerapan *merit system* dalam pengisian jabatan, pembinaan dan pengawasan melekat, pengembangan inovasi, peningkatan kualitas SDM aparatur, penguatan regulasi, meningkatkan pengelolaan keuangan daerah.

   Dengan pelaksanaan misi ini, akan terwujud penyelengaraan pemerintahan yang amanah dan transparan, yang memuaskan masyarakat. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan publik kepada pemerintah, sehingga terwujud pemerintahan yang berwibawa.

2. **Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pendidikan Dan Kesehatan Yang Terjangkau Bagi Semua Lapisan Masyarakat.**

   Misi kedua merupakan misi yang essensial dalam pencapain Visi Luwu yang Maju. Pada pokoknya misi ini adalah upaya pemerintah menghadirkan pelayanan secara maksimal agar masyarakat Luwu dapat menikmati pendidikan dan kesehatan yang berkualitas. Misi ini juga dimaksudkan untuk memberikan pelayanan dasar yang Inklusif. Secara umum misi kedua ini diarahkan untuk mencapai tujuan teciptanya suatu kondisi masyarakat Luwu yang cerdas, adaptif, dan kompetitif dengan derajat pengetahuan yang maju serta menguasai perkembangan teknologi. Melalui misi ini peran manajemen pendidikan yang berkualitas adalah kunci utama, peningkatan kualitas ini diharapkan akan memberikan pelayanan pendidikan sesuai SPM.

   Selain ditandai dengan masyarakat yang cerdas, Luwu yang maju juga diarahkan untuk mencapai derajat masyarakat yang sehat. Upaya peningkatan derajat kesehatan yang berkualitas diharapkan terwujud melalui manajemen kesehatan yang berkualitas dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang merata di seluruh wilayah.

3. **Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas dan Berkelanjutan.**

   Melalui misi ini akan menjawab kebutuhan beberapa daerah yang masih pelosok dan terisolir disebabkan belum adanya pembangunan infrastruktur yang representatif, terintegrasi dan berkeadilan sehingga berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang tidak merata. Dengan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan, akan mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi, bahkan juga diarahkan untuk pertumbuhan wilayah ekonomi baru guna menghindari kesenjangan ekonomi antarwilayah.

   Sehubungan dengan itu, berbagai infrastruktur dasar yang diprioritaskan melalui misi ini adalah:

   a. Infrastruktur yang berhubungan dengan pembangunan fasilitas umum berwujud fisik antara lain jalan raya, saluran irigasi, dan lain-lain.
   b. Infrastruktur yang berhubungan dengan fungsi utilitas publik, antara lain: pengadaan air bersih, penyediaan jaringan telekomunikasi, dan lain-lain.
   c. Infrastruktur yang berhubungan dengan sistem, nilai, norma, peraturan, dan pelayanan publik, yang disediakan oleh berbagai pihak, khususnya pemerintah, antara lain: etika kerja, peraturan lalu lintas, pelayanan publik yang berkualitas, peraturan perundangan, dan lain-lain.

   Infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah maupun swasta terdiri dari berbagai komponen yang saling mendukung satu sama lainnya. Beberapa komponen infrastruktur tersebut antara lain adalah: perencanaan kota, jalan kota, air minum, drainase, air limbah, persampahan, pengendalian banjir, perumahan, perbaikan kampong, perbaikan prasarana kawasan pasar, dan lain-lain.

   Percepatan pembagunan infrastruktur secara substansial adalah bagian perwujudan perlakuan adil bagi seluruh masyarakat Luwu. Pengembangan dan percepatan pembagunan infrastruktur berpedoman pada tata ruang dan tujuan pembangunan berkelanjutan.

4. **Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Melalui Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah Dan Perluasan Lapangan Kerja.**

   Pada misi keempat ini diarahkan untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat. Peningkatan kesejahteraan rakyat dilakukan melalui peningkatan pendapatan masyarakat dengan mengoptimalkan peran koperasi dan UMKM yang sudah semakin berkembang di Kabupaten Luwu dengan merespon perubahan yang terjadi dimasyarakat dengan melakukan pembinaan dan peningkatan kualitas usaha mikro kecil menengah, promosi dan perluasan pasar bagi produk unggulan daerah. Misi ini juga semakin penting peranannya dalam rangka penanganan dampak pandemic Covid-19. Diharapkan melalui misi

ini mampu menciptakan lapangan kerja yang mengalami kemerosotan pada kondisi akhir-akhir ini.

5. **Mewujudkan Ketahanan Pangan Dan Perekonomian Daerah Yang Tangguh Berbasis Agribisnis.**

   Amanah yang terkandung pada misi kelima adalah Kabupaten Luwu yang memiliki ketahanan pangan yang tangguh dan agribisnis yang tumbuh dengan baik, sehingga meningkatkan perekonomian daerah. Hal ini dapat diwujudkan dengan meningkatkan produksi dan daya saing produk pertanian. Untuk meningkatkan produksi dilakukan dengan peningkatan jaringan irigasi dan ekstensifikasi dengan pembukaan lahan baru, sementara intensifikasi dilakukan dengan memaksimalkan fungsi penyuluh pertanian.

   Sedangkan untuk meningkatkan daya saing produk pertanian dilakukan dengan pengembangan inovasi pada sektor-sektor unggulan daerah dan juga pemanfaatan nilai-nilai kearifan lokal secara berkelanjutan berdasarkan *grand design* yang tepat dan efektif. Kabupaten Luwu memiliki berbagai jenis produk olahan makanan yang sudah dikenal masyarakat luas, baik di Provinsi Sulawesi Selatan maupun Indonesia.

6. **Meningkatkan Kuaitas Kehidupan Beragama Dalam Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Luwu Yang Religius.**

   Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kehidupan masyarakat yang taat dan taqwa kepada Tuhan YME sebagai cerminan dari pengamalan nilai-nilai agama, sehingga terwujud kehidupan masyarakat yang religius. Ukuran yang dapat digunakan untuk hal ini antara lain adalah kondisi ketentraman, ketertiban dan kenyamanan lingkungan. Oleh karena itu, upaya-upaya yang dilakukan dapat berbentuk fisik maupun non fisik seperti fasilitasi terhadap pembangunan/ pemeliharaan sarana peribadatan maupun pihak-pihak yang terkait, peningkatan kegiatan-kegiatan keagamaan, penegakan hukum dan lain-lain.

   Melalui misi ini, manusia yang berakhlak secara terus-menerus dibangun sejak usia dini. Disamping itu, ditumbuhkembangkan rasa saling percaya, kemauan untuk saling nasehat menasehati, serta kesadaran untuk menjadi teladan bagi masyarakat disekitarnya. Dengan demikian, kehidupan masyarakat yang religius menjadi penopang dalam mewujudkan kondisi Luwu yang kodusif dan harmonis. Oleh karena itu, dalam rangka mewujudkan misi ini, Belopa sebagai ibukota kabupaten dikembangkan sebagai pusat peradaban kabupaten Luwu.

7. **Optimaslisasi Otonomi Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.**

   Arah dari misi ialah memaksimalkan penyelengaraan pemerintahan desa untuk memperkuat berbagai bentuk partispasi masyarakat desa. Mengingat bahwa pengertian otonomi desa adalah kewenangan yang diberikan kepada desa secara luas untuk dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, maka upaya yang dilakukan adalah meningkatkan kemampuan pemerintahan desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan

pemanfaatan dana desa. Sehingga jumlah desa dengan status tertinggal dan sangat tertinggal dapat ditingkatkan statusnya dan desa dengan status maju dan mandiri semakin bertambah jumlahnya.

Untuk mendukung capaian arah misi tersebut dibutuhkan kolaborasi, melibatkan partisipasi seluruh pemangku kepentingan sesuai dengan fungsinya, dan juga inovasi masyarakat desa itu sendiri, terutama dalam pemberdayaan kaum perempuan dan kaum pemuda desa. Kolaborasi ini akan diproyeksikan tidak hanya sekedar melibatkan masyarakat saja, tetapi partisipasi dengan kolaborasi akan menghasilkan suatu tindakan maupun kebijakan yang mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi desa, dan juga meningkatkan kesejahteraa masyarakat desa.

8. **Menciptakan Iklim Investasi dan Usaha Yang Kondusif Berwawasan Lingkungan.**

Investasi atau penanaman modal menjadi salah satu faktor penentu pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Dengan meningkatnya investasi, baik asing/PMA maupun domestik/PMDN, maka diharapkan terjadi akselerasi roda perekonomian yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi. Iklim investasi adalah semua kebijakan, kelembagaan, dan lingkungan, baik yang sedang berlangsung maupun yang diharapkan terjadi di masa datang, yang bisa mempengaruhi tingkat pengembalian dan risiko suatu investasi.

Misi ini merupakan rumusan kebijakan yang menitikberatkan pada peningkatan investasi tetapi daya dukung lingkungan tetap terjaga. Oleh karena itu, upaya yang dilakukan adalah mengundang investor untuk berinvestasi di Kabupaten Luwu dengan memaksimalkan kondisi yang mendukung iklim investasi. Sebagai daerah yang kaya akan sumber daya alam, Kabupaten Luwu mendominasi kawasan berbasis agrobisnis dan perikanan, hal ini menciptakan daya dukung yang kuat terhadap pemanfaatan alam sebagai poros penunjang peningkatan perekonomian daerah yang berorientasi pada pelestarian sumber daya alam. Sinergi antara Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Luwu telah berhasil mencanangkan kawasan agrobisnis yang bertujuan memusatkan varietas jenis tanaman yang disesuikan dengan kondisi lahan, dalam sektor perikanan Kabupaten Luwu sudah dipercaya sebagai salah satu penyumbang hasil perikanan tangkap terbesar di Provinsi Sulawesi Selatan. Sehingga dengan upaya tersebut diharapkan mampu menarik investor baik domestik ataupun mancanegara untuk berinvestasi di Kabupaten Luwu.
Menurut Asian Development Bank (2005), terdapat tiga faktor utama dalam iklim investasi mencakup: (1) Kondisi ekonomi makro termasuk stabilitas ekonomi makro, keterbukaan ekonomi, persaingan pasar, dan stabilitas sosial dan politik; (2) Kepemerintahan dan kelembagaan termasuk kejelasan dan efektivitas peraturan, perpajakan, sistem hukum, sektor keuangan, fleksibilitas pasar tenaga kerja dan keberadaan tenaga kerja yang terdidik dan terampil; (3) Infrastruktur mencakup antara lain sarana transportasi, telekomunikasi, listrik, dan air.

Selanjutnya menurut KPPOD dan Asia Foundation (2009), terkait dengan daya tarik investasi di suatu daerah, ada beberapa faktor dan variabel penentu daya tarik tersebut. Faktor dan variabel tersebut adalah: (1) Faktor kelembagaan (variabel kepastian hukum, keuangan daerah, aparatur, perda); (2) Faktor sosial politik (variable stabilitas politik, konflik masyarakat, unjuk rasa, partisipasi masyarakat, keamanan, dan budaya); (3) Faktor ekonomi daerah (variabel potensi ekonomi dan struktur ekonomi); (4) Faktor tenaga kerja dan produktivitas (variabel biaya tenaga kerja, ketersediaan tenaga kerja, dan produktivitas tenaga kerja); dan (5) Faktor infrastruktur fisik (variabel ketersediaan dan kualitas pelabuhan udara, pelabuhan laut, jalan, telepon, dan listrik).

9. Penegakan Supremasi Hukum, Hak Asasi Manusia, Untuk Mendorong Partispasi Publik.

Misi kesembilan secara spesifik adalah perwujudan dari target pembangunan berkelanjutan terutama tentang penengakan Perda, perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak, serta pemenuhan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin. Selain itu misi ini diarahkan untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah, sehingga akan menstimulus keterlibatan masyarakat dalam membangun daerah.

Untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan Masyarakat, perlu dilakukan berbagai upaya peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah memiliki fungsi penting, antara lain sebagai sarana bagi masyarakat baik orang perseorangan, kelompok masyarakat, maupun organisasi kemasyarakatan dalam mengekspresikan kebutuhan dan kepentingannya sehingga proses pembentukan kebijakan daerah lebih responsif terhadap kebutuhan dan kepentingan Masyarakat. Partisipasi Masyarakat juga merupakan hal penting dalam mewujudkan kepedulian dan dukungan Masyarakat untuk keberhasilan pembangunan di daerahnya. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 dinyatakan bahwa masyarakt mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam setiap perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk dalam penyusunan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan daerah.

Terkait dengan pencapaian misi ini, seluruh perangkat daerah diarahkan untuk meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi penyelenggaraan tugas dan fungsi, khususnya dalam pelayanan kepada masyarakat untuk meningkatkan kepuasan publik. Setiap perangkat daerah harus memiliki *grand design* dalam pelaksanaan kewenangannya agar tercipta keberlanjutan akitivitas pembangunan. Disamping itu, akuntabilitas setiap perangkat daerah juga menjadi hal yang difokuskan dalam misi ini.

10. Mewujudkan Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Serta Penanggulangan Bencana.

Misi kesepuluh ini pada prinsipnya mengarahkan pemanfaatan seluruh potensi sumber daya alam untuk kepentingan masyarakat Luwu melalui peningkatan investasi pihak swasta. Dalam penyelenggaraan pemanfaatan sumber daya alam harus didasarkan pada kaidah-kaidah hasil kajian lingkungan hidup, selain itu merupakan keniscayaan dalam konteks pengambilan kebijakan terutama dalam hal pemanfaatan sumber daya alam harus mempedomani rencana pembangunan berkelanjutan dengan tujuan untuk tetap menjaga keseimbangan alam guna mencegah dan meminimalisir terjadinya bencana alam.

Terkait dengan penanggulangan bencana, diarahkan untuk meningkatkan manajemen pengelolaan bencana, baik infrastruktur maupun kemampuan sumber daya manusia. Dengan demikian, diharapkan resiko yang ditimbulkan akibat kejadian bencana dapat diminimalisir.

Keterkaitan antara pokok Visi dengan Misi dan Program Kerja yang dituangkan sebagaimana diuraikan di atas, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1.
Keterkaitan Antara Misi dengan Pokok Visi

No	Misi	Penjelasan Misi	Pokok Visi
1	Mewujudkan pemerintahan yang profesional, berwibawa, amanah, transparan, dan akuntabel	Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, melalui peningkatan kompotensi aparatur dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah serta kapasitas perangkat daerah	Maju
2	Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat	Menyelenggarakan penataan manajemen pendidikan dan kesehatan, peningkatan kualitas dan kuantitas SDM aparatur, menjamin akses layanan pendidikan dan kesehatan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat serta mengupayakan kemudahan memperoleh pendidikan bagi masyarakat tidak mampu	Sejahtera
3	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan	Membangun infrastruktur berkeadilan yang menghubungkan antar lapisan wilayah (pelosok dan terisolir) guna menunjang pertumbuhan ekonomi dan penunjang pemberian layanan yang reponsif, memenuhi kebutuhan masyarakat akan prasarana dan sarana utilitas, serta regulasi yang mendukung pelayanan publik dibidang infrastruktur	Maju
4	Pengembangan ekonomi kerakyatan melalui pengembangan koperasi, usaha mikro kecil menengah dan perluasan lapangan kerja	Meningkatan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang sejahtera, melalui pengaktifan koperasi dan pembukaan lapangan kerja dengan mengembangkan usaha mikro kecil dan menengah	Mandiri dan Sejahtera
5	Mewujudkan ketahanan pangan dan perekonomian daerah yang tangguh berbasis agribisnis	Mengembangkan inovasi pada pengelolaan pangan dari hulu hingga hilir berbasis agribisnis guna meningkatan daya saing produktivitas perekonomian Luwu.	Mandiri
6	Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dalam mewujudkan masyarakat Kabupaten Luwu yang religius	Mengarahkan kehidupan beragama masyarakat Luwu mencerminkan pengamalan nilai-nilai agama untuk melahirkan manusia berakhlak	Religi
7	Optimalisasi otonomi desa dan pemberdayaan masyarakat desa	Memperkuat bentuk partispasi masyarakat desa dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi anggaran dana desa. Kolaborasi yang melahirkan inovasi-inovasi masyarakat desa, terutama pemberdayaan kaum perempuan dan kaum pemuda di desa.	Mandiri

No	Misi	Penjelasan Misi	Pokok Visi
8	Menciptakan iklim investasi dan usaha yang kondusif	Meningkatnya nilai investasi dan penyerapan tenaga kerja tanpa mengabaikan keberlanjutan pembangunan daerah untuk memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian Luwu.	Sejahtera
9	Penegakan supremasi hukum, hak asasi manusia, untuk mendorong partispasi publik yang dinamis dan konstruktif	Mewujudkan pembangunan berkelanjutan terutama penengakan Perda, perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak, serta pemenuhan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin guna meningkatkan kepercayaan publik untuk turut berpartisipasi	Maju
10	Mewujudkan kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan serta penanggulangan bencana	Mengarahkan pemanfaatan seluruh potensi sumber daya alam untuk kepentingan masyarakat, dengan memperhatikan kaidah-kaidah pemanfaatan lingkungan hidup dengan maksud mencegah terjadinya bencana alam.	Sejahtera

5.3. Tujuan dan Sasaran

Merujuk pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, tujuan dan sasaran dapat dimaknai sebagai rumusan strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Secara skematik, selain menerjemahkan Visi dan Misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, RPJMD memuat sasaran pokok RPJPD. Selain itu, dalam tataran penyelenggaraan pemerintahan daerah, RPJMD menjadi dokumen yang penting mengingat muatannya yang merupakan keseluruhan prioritas dan sasaran pembangunan selama 5 (lima) tahun.

Perumusan tujuan dan sasaran dari visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah juga akan menjadi landasan perumusan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Tujuan merupakan pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah atau tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Kriteria rumusan tujuan pembangunan antara lain sebagai berikut: (1) diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan memperhatikan visi; (2) untuk mewujudkan misi dapat dicapai melalui beberapa tujuan; (3) disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah; (4) dapat diukur dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan; dan (5) disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Merujuk dari berbagai penjelasan diatas dan untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 maka dirumuskan tujuan dan indikator beserta target sebagai berikut:

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program. Kriteria sasaran memperhatikan hal-hal

sebagai berikut: (1) dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan; (2) untuk mencapai satu tujuan dapat dicapai melalui beberapa sasaran; (3) disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah; dan memenuhi kriteria SMARTC.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu hasil yang akan dicapai Kabupaten Luwu dari masing-masing tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator beserta targetnya. Oleh karena itu, sasaran dinyatakan sesuai indikator secara spesifik, fokus, terukur, dan dapat dicapai dengan indikator kinerja atau tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan selama 5 (lima) tahun. Setiap sasaran mencerminkan indikator kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Merujuk dari berbagai penjelasan diatas dan berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah maka sasaran beserta indikator pada tiap tujuan yang dijabarkan sebagai berikut:

T1. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih

Tata kelola pemerintahan yang akan diwujudkan adalah orientasi pada kepentingan masyarakat, khususnya keberpihakan pada masyarakat yang lemah, memperteguh mkeharmonisan, kepemimpinan dan martabat manusia. Selain itu juga ditekankan adanya partisipasi, keadilan, persamaan hak, transparansi, supremasi hukum dan akuntabilitas, didukung dengan sumber daya aparatur yang profesional, mandiri dan bertanggung jawab. Dibidang keuangan, diupayakan untuk terus mengembangkan pengelolaan keuangan daerah sehingga semakin mandiri dan mampu mengembangkan potensi daerah.

Tujuan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi, dicapai dengan sasaran sebagai berikut:

- ✓ S1.1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah, dengan indikator “Nilai SAKIP Kabupaten”.
- ✓ S1.2. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, dengan indikator “Ikhtisar Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI”.

T2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia

Untuk menyiapkan generasi emas, pendidikan menjadi jalan utama. Dalam hal ini, pendidikan untuk semua (*education for all*) menjadi pekerjaan yang perlu dituntaskan. Bukan sekadar pemerataan, tetapi juga peningkatan kualitas. Upaya yang dilakukan antara lain gerakan pendidikan anak usia dini serta penuntasan dan peningkatan kualitas pendidikan dasar. Di samping itu perluasan akses ke perguruan tinggi juga diupayakan dengan memberikan akses secara khusus kepada masyarakat yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi, tetapi berkemampuan akademik.

Selain pendidikan, aspek kesehatan juga perlu mendapat prioritas melalui peningkatan kualitas layanan dengan menyediakan pusat kesehatan masyarakat pada tingkat desa, menyeimbangkan ketersediaan tenaga

medis, meningkatkan kualifikasi tenaga medis, hingga mengefisiensikan pelayanan kesehatan.

Tujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia, dicapai dengan sasaran sebagai berikut:

- ✓ S2.1. Meningkatkan derajat pendidikan masyarakat, dengan indikator "Indeks Pendidikan".
- ✓ S2.2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, dengan indikator "Indeks Kesehatan".

T3. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang berkualitas

Infrastruktur merupakan aset (fisik dan non fisik) yang dirancang dalam sistem agar mampu melayani masyarakat. Mengacu pada manfaat infrastruktur bagi masyarakat tersebut, karakteristik dari peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur diprioritaskan untuk yang menghasilkan masukan/input bagi masyarakat (sarana air bersih, jaringan irigasi), mengambil keluaran/output dari masyarakat (saluran drainase, tempat pembuangan sampah, sanitasi), dan yang dapat memberikan input dan mengambil output dari masyarakat (jaringan komunikasi, jalan raya).

Disamping itu, pembangunan infrastruktur lainnya adalah terkait dengan infrastruktur permukiman, yaitu infrastruktur yang terdiri dari infrastruktur fisik dan layanan yang diperoleh darinya untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dan meningkatkan kualitas hidup seperti air bersih dan perumahan.

Tujuan meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang berkualitas dengan indikator Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur, dicapai dengan sasaran sebagai berikut:

- ✓ S3.1. Meningkatkan aksebilitas dan konektifitas wilayah, dengan indikator "Tingkat Mobilitas".
- ✓ S3.2. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman, dengan indikator "Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU".

T4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Pembangunan merupakan tindakan aktif yang harus dilakukan oleh suatu daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Dengan demikian, sangat dibutuhkan semua elemen untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan.

Ada beberapa faktor yang memengaruhi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, namun pada hakikatnya faktor-faktor tersebut dapat dikelompokan menjadi dua, yaitu faktor ekonomi dan faktor nonekonomi. Faktor ekonomi yang mempengaruhi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi diantaranya adalah sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya modal, dan keahlian atau kewirausahaan. Sumber daya alam, yang meliputi tanah dan kekayaan alam seperti kesuburan tanah, keadaan iklim/cuaca, hasil hutan, tambang, dan hasil laut, sangat memengaruhi pertumbuhan industri, terutama dalam hal penyediaan bahan baku

produksi. Sementara itu, keahlian dan kewirausahaan dibutuhkan untuk mengolah bahan mentah dari alam, menjadi sesuatu yang memiliki nilai lebih tinggi.

Sumber daya manusia juga menentukan keberhasilan pembangunan nasional melalui jumlah dan kualitas penduduk. Jumlah penduduk yang besar merupakan pasar potensial untuk memasarkan hasil-hasil produksi, sementara kualitas penduduk menentukan seberapa besar produktivitas yang ada. Namun demikian, harus diupayakan kebijakan yang menciptakan lapangan kerja bagi seluruh penduduk sehingga jumlah penduduk yang besar tidak menjadi beban bagi pertumbuhan perekonomian daerah.

Tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan indikator Angka Kemiskinan, dicapai dengan sasaran sebagai berikut:

- ✓ S4.1. Meningkatkan pendapatan masyarakat, dengan indikator "PDRB Perkapita ADHB"".

T5. Meningkatkan produksi dan kemandirian pangan sebagai penopang kesejahteraan masyarakat

Kemandirian pangan dapat diartikan sebagai kemampuan daerah dalam memproduksi pangan yang beraneka ragam yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat. Kemandirian pangan dipengaruhi oleh hasil produksi dan selanjutnya kemandirian pangan juga merupakan penopang/ukuran kesejahteraan masyarakat di suatu daerah.

Tujuan meningkatkan produksi dan kemandirian pangan sebagai penopang kesejahteraan masyarakat dengan indikator Indeks Ketahanan Pangan, dicapai dengan sasaran sebagai berikut:

- ✓ S5.1. Meningkatkan kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, dengan indikator "Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan Dan Perikanan".

T6. Terwujudnya kehidupan masyarakat yang tertib, aman dan religius

Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan dalam rangka tercapainya tujuan pembangunan yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

Toleransi merupakan suatu sikap saling menghormati dan menghargai antarkelompok atau antarindividu dalam masyarakat atau dalam lingkup

lainnya. Sikap toleransi dapat menghindari terjadinya diskriminasi, walaupun banyak terdapat kelompok atau golongan yang berbeda dalam suatu kelompok masyarakat. Toleransi merupakan salah satu ciri kehidupan yang religius.

Tujuan terwujudnya kehidupan masyarakat yang tertib, aman dan religious dengan indikator Indeks Kerukunan Umat Beragama, dicapai dengan sasaran sebagai berikut:

- ✓ S6.1. Menurunnya angka kriminalitas, dengan indikator "Angka Kriminalitas per 10.000 Penduduk".

T7. Meningkatkan pembangunan Desa

Pembangunan desa diarahkan untuk meningkatkan kemandirian desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Setidaknya terdapat tiga dimensi untuk mengukur kemandirian desa. Pertama, dimensi kelembagaan pemerintah desa. Pada dimensi ini akan diketahui bagaimana tingkat kemandirian kelembagaan pemerintah desa terhadap pemerintah di atasnya. Ketergantungan kelembagaan pemerintah desa terhadap pemerintah di atasnya harus semakin kecil.

Kedua, dimensi kelembagaan ekonomi masyarakat desa. Pada dimensi ini akan diketahui bagaimana tingkat kemampuan kelembagaan ekonomi masyarakat dalam upaya memajukan kondisi perekonomian. Semakin berjalan fungsi-fungsi kelembagaan ekonomi dalam menjawab semua kebutuhan material masyarakat, kelembagaan ekonomi itu semakin mandiri.

Ketiga, kelembagaan sosial masyarakat. Pada dimensi ini akan tergambar dengan jelas bagaimana fungsi-fungsi kelembagaan sosial ini berjalan. Berbeda dengan dua dimensi lainnya yang cenderung material, dimensi ketiga ini cenderung abstrak. Bagaimana nilai-nilai kearifan lokal, nilai-nilai universal dianut dan dijalankan oleh masyarakat dalam kelembagaan sosial akan sangat menentukan bagaimana keberhasilan kelembagaan sosial ini berperan di masyarakat.

Tujuan meningkatkan pembangunan desa dengan indikator jumlah desa dengan predikat tertinggal dan sangat tertinggal, dicapai dengan sasaran sebagai berikut:

- ✓ S7.1. Meningkatkan kemandirian desa, dengan indikator "Persentase desa mandiri".

T8. Meningkatkan perekonomian daerah

Investasi merupakan salah satu indikator yang penting untuk menjadi penentu apakah pertumbuhan perekonomian daerah meningkat, sehingga berbagai kebijakan pemerintah harus bisa membantu kalangan investor. Investasi adalah penanaman aset atau dana yang dilakukan oleh sebuah perusahaan atau perorangan untuk jangka waktu tertentu demi memperoleh imbal balik yang lebih besar di masa depan. Ada banyak hal yang terlibat dalam aktivitas ini, dan beberapa di antaranya adalah jumlah dana dan tujuan dari investasi itu sendiri. Beberapa hal yang perlu

diperhatikan dalam rangka meningkatkan investasi di suatu daerah adalah situasi yang kondusif, infrastruktur, dan jaminan berinvestasi.

Tujuan meningkatkan perekonomian daerah dengan indikator Pertumbuhan Ekonomi, dicapai dengan sasaran sebagai berikut:

- ✓ S8.1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas industri pengolahan, dengan indikator "Kontribusi Lapangan Usaha Industri Pengolahan Terhadap PDRB".

T9. Meningkatkan kepuasan masyakkat atas Penegakan Supremasi Hukum dan Hak Asasi Manusia

Globalisasi, demokratisasi, informasi dan tekonologi komunikasi telah membawa perubahan dan memabngun kesadaran publik terhadap pemerintah. Kompleksitas kebutuhan dan mobilitas yang tinggi meningkatkan tuntutan publik terhadap pemerintah. Ketidakmampuan pemerintah memenuhi espektasi publik mengakibatkan persepsi publik terhadap pemerintah cenderung negatif, yang menimbulkan turunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Ketika harapan publik tidak sesuai dengan kenyataan, ketidakpercayaan masyarakat sangat mudah terbentuk. Kepercayaan publik bukan suatu hal yang dating dengan sendirinya, namun sesuatu yang bersifat sangat dinamis dan harus dikelola.

Kepercayaan publik merupakan variable penting terwujudnya good gocernance. Kepercayaan menghasilkan legitimasi publik yang dapat menciptakan modal sosial bagi pemerintah yang digunakan sebagai instrument untuk mendapakan dukungan politik maupun sosial dalam aktivitas pemerintahan.

Tujuan Meningkatkan kepuasan masyakkat atas Penegakan Supremasi Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat atas Penegakan Hukum, dicapai dengan sasaran sebagai berikut:

- ✓ S9.1. Menurunnya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, dengan indikator "Cakupan kasus hukum yang difasilitasi".

T10. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan

Masalah lingkungan hidup merupakan kewajiban asasi manusia untuk dikelola sebagaimana mestinya, sehingga setiap manusia baik secara langsung maupun tidak langsung bertanggung jawab terhadap kelangsungan lingkungan hidup. Pemerintah daerah harus melakukan upaya-upaya konkrit untuk menjaga kualitas lingkungan hidup sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya kemampuan dan kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan. Sebagai contoh, untuk menghindari bencana atau mengurangi resiko dan kerugian khususnya bencana banjir, diperlukan adanya pemahaman tentang pengelolaan sungai yang baik dengan kerja sama semua pihak.

Tujuan Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, dicapai dengan sasaran sebagai berikut:

- ✓ S10.1. Meningkatnya ketangguhan daerah menghadapi bencana, dengan indikator "Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)".

Dengan rumusan tujuan, sasaran dan indikator diatas maka keterkaitan antara visi, misi, tujuan, sasaran beserta targetnya dapat dilihat pada tabel yang disajikan berikut ini.

Tabel 5.2.

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024

Visi : **Kabupaten Luwu Yang Maju, Sejahtera Dan Mandiri Dalam Nuansa Religi**									
Misi	**Tujuan/Sasaran**	**Indikator Tujuan/Sasaran**	**Kondisi Awal (2019)**	**Capaian Tahun 2020**	**Rencana Capaian 2021**	**Target Tahun ...**			**Kondisi Akhir (2024)**
						2022	**2023**	**2024**	
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8)**	**(9)**	**(10)**
M1. Mewujudkan Pemerintahan Yang Profesional, Berwibawa, Amanah, Transparan, dan Akuntabel;	T1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	1. Indeks Reformasi Birokrasi	n.a	53,01 (CC)	56,31 (CC)	59,80 (CC)	64,22 (B)	67,25 (B)	67,25 (B)
	S1.1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	2. Nilai SAKIP Kabupaten	51,78 (CC)	60,04 (B)	64,76 (B)	69,51 (B)	72,02 (BB)	78,80 (BB)	78,80 (BB)
	S1.2. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	3. Ikhtisar Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
M2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Yang Terjangkau Bagi Semua Lapisan Masyarakat	T2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	4. Indeks Pembangunan Manusia	70.39	70,51	70,79	71,09	71,40	71,88	71,88
	S2.1. Meningkatkan derajat pendidikan masyarakat	5. Indeks Pendidikan	64,17	64,49	64,98	65,44	65,90	66,35	66,35
	S2.2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	6. Indeks Kesehatan	77,22	77,45	77,69	78,30	78,69	79,09	79,09
M3 Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas dan Berkelanjutan	T3. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang berkualitas	7. Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Na	Cukup	Cukup	Baik	Baik	Baik	Baik
	S3.1. Meningkatkan aksebilitas dan konektifitas wilayah	8. Tingkat Mobilitas	0,8638	0,8643	0,8649	0,8654	0,8660	0,8665	0,8665
	S3.2. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman	9. Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	0,97	0,97	0,97	0,98	0,98	0,98	0,98
M4. Mewujudkan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Melalui Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perluasan Lapangan Kerja	T4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	10. Angka kemiskinan (%)	12,78	12,65	12,30	12,13	11,97	11,92	11,92
	S4.1. Meningkatkan pendapatan masyarakat	11. PDRB Perkapita ADHB (Juta Rp.)	43,25	44,02	45,30	48,05	51,20	54,05	54,05

Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kondisi Awal (2019)	Capaian Tahun 2020	Rencana Capaian 2021	Target Tahun ...			Kondisi Akhir (2024)
						2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
M5. Mewujudkan Ketahanan Pangan dan Perekonomian Daerah Yang Tangguh Berbasis Agribisnis	T5. Meningkatkan produksi dan kemandirian pangan sebagai penopang kesejahteraan masyarakat	12. Indeks Ketahanan Pangan	78	80	83	86	89	92	92
	S5.1. Meningkatnya kontribusi Sektor Pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah	13. Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)	3,98	4,26	4,87	5,41	5,78	6,22	6,22
M6. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama Dalam Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Luwu Yang Religius	T6. Terwujudnya kehidupan masyarakat yang tertib, aman dan religius	14. Indeks Kerukunan Umat Beragama	n.a	76,01	76,02	76,03	76,04	76,05	76,05
	S6.1. Menurunkan angka kriminalitas	15. Angka Kriminalitas per 10.000 Penduduk	4,00	3,20	2,80	2,43	2,38	2,34	2,34
M7. Optimaslisasi Otonomi Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	T7. Meningkatkan pembangunan Desa	16. Jumlah desa dengan predikat tertinggal dan sangat tertinggal	103	94	83	61	38	10	10
	S7.1. Meningkatkan kemandirian Desa	17. Persentase desa mandiri	0,48	0,48	0,97	1,45	1,93	2,42	2,42
M8. Menciptakan Iklim Investasi dan Usaha Yang Kondusif Berwawasan Lingkungan	T8. Meningkatkan perekonomian daerah	18. Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,26	1,15-1,73	3,37-4,50	4,38-5,84	4,49-5,99	4,80-5,98	4,80-5,98
	S8.1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas industri pengolahan	19. Kontribusi Lapangan Usaha Industri Pengolahan Terhadap PDRB (%)	10,94	11,06	11,37	11,51	12,18	12,76	12,76
M9. Penegakan Supremasi Hukum, Hak Asasi Manusia, Untuk Mendorong Partispasi Publik	T9. Meningkatkan kepuasan masyakkat atas Penegakan Supremasi Hukum dan Hak Asasi Manusia	20. Indeks Kepuasan Masyarakat atas Penegakan Hukum	n.a	79,28	80,06	81,27	82,63	83,77	83,77
	S9.1. Menurunnya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan	21. Cakupan kasus hukum yang difasilitasi (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
M10. Mewujudkan Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Serta Penanggulangan Bencana	T10. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	22. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	67,54	70,01	72,25	72,63	72,84	72,91	72,91
	S10.1. Meningkatnya ketangguhan daerah menghadapi bencana	23. Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00

Pasal 186 ayat (3) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 menyatakan bahwa sasaran RPJMD setelah diterjemahkan kedalam strategi dan program Perangkat Daerah harus terhubung dengan sasaran Renstra Perangkat Daerah. Sedangkan dalam ayat (4) dinyatakan bahwa sasaran RPJMD dapat diterjemahkan kedalam sasaran antara secara tahunan melalui arah kebijakan dan dijadikan pedoman dalam menyusun prioritas pembangunan RKPD.

Tujuan dan sasaran Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 dapat dihubungkan dengan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Luwu Tahun 2005-

2025, meskipun RPJPD tersebut tidak mencantum target yang jelas dan terukur. Untuk periode tahun 2020-2025, diuraikan bahwa periode tersebut ditujukan untuk semakin mewujudkan kemajuan, kemandirian dan kesejahteraan dengan kualitas manusia yang tinggi dan berdaya saing, struktur perkonomian yang didominasi sektor sekunder dan tersier berlandaskan keunggulan kompetitif, dan kondisi sosial politik yang semakin demokratis serta kebudayaan yang maju dan nuansa religi yang semaikn melandasi sendi-sendi kehidupan, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. *Kemajuan* ditandai oleh pencapaian bidang kualitas manusia selain nilai indeks pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan yang secara kuantitaif tinggi, secara kualitatif juga mencapai taraf unggul dalam daya saing serta mewujudkan tatanan sosial (*choises dan voises*) yang beradab dan semakin membawa keberkahan bagi kemanusiaan dan kehidupan secara umum.
2. *Kemandirian* ditandai oleh pencapaian dari upaya-upaya pengembangan produk unggul hasil pengelolaan sumberdaya daerah dengan daya saing yang mengandalkan kandungan pengetahuan dalam produk khusunya produk derivasi kakao, rumput laut dan lainnya. Pada tahap ini kemandirian juga ditandai oleh kepemerintahan yang makin baik dengan kemandirian fiskal yang cukup mendukung. Keberdayan masyarakat, dengan kelembagaan sosial, politik, ekonomi, kebudayan dan lingkungan yang semakin kuat dan fungsional, juga diupayakan lebih tewujud.
3. *Kesejahteraan* ditandai oleh pencapaian dari upaya-upaya untuk meningkatkan pendapatan yang semakin tinggi dan merata,

pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, angka keisikinan yang semakin redah, transportasi perekonomian yang semakin memposisikan sektor industri, seiring dengan semakin besarnya kontribusi produk UKM dan koperasi dalam perkonomian daerah, sebagai indikasi perwujudan kemakmuran sebagaimana menjadi tekanan pada RPJPN dan RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan. Pada tahap ini, upaya pengelolaan lingkungan juga semakin signifikan dalam adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim global. Nuansa religi pada tahap ini ditandai oleh pencapaian dari upaya-upaya untuk mewujudkan kecerdasan spritual masyarakat di mana ketertiban, kemaman, saling percaya dan kebajikan sosial terjelmakan sebagai landasan kehidupan masyarakat. Pada tahap ini, kebudayaan daerah semakin memanifestasikan identitas daerah yang menunjukkan keunikan sekaligus keunggulan di tengah kompleksitas dinamika regional, nasional dan global.

5.4. Keterkaitan RPJMD Kabupaten Luwu terhadap Dokumen Perencanaan Lainnya (RPJPD Luwu Tahun 2005-2025, PRJMD Sulsel Tahun 2018-2023, RPJMN Tahun 2020-2024)

5.4.1. Keterkaitan Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 dengan RPJPD Kabupaten Luwu Tahun 2005-2025

Visi dan Misi jangka menengah Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 merupakan turunan dan penjabaran dari Visi dan Misi jangka panjang Kabupaten Luwu 2005-2025. Visi jangka panjang Kabupaten Luwu dalam RPJPD Tahun 2005-2025 adalah **"LUWU SEBAGAI DAERAH YANG MAJU, MANDIRI DAN SEJAHTERA DALAM NUANSA RELIGI"**. Dengan Visi tersebut diharapkan Kabupaten Luwu pada tahun 2025 mendatang terwujud menjadi:

Maju adalah keadaan Kabupaten Luwu pada tahun 2025 yang berposisi terkemuka di Sulawesi Selatan dalam berbagai aspek pembangunan, terutama dalam peningkatan kualitas manusia. Kemajuan tersebut khususnya ditandai oleh kualitas manusia yang tinggi dilihat dari indeks pembangunan manusia, mencakup penguasaan pengetahuan (pendidikan: melek huruf dan rata-rata lama sekolah), derajat kesehatan (kesehatan: angka harapan hidup) dan perekonomian (daya beli masyarakat).

Mandiri adalah keadaan Kabupaten Luwu pada tahun 2025 yang eksis sebagai daerah otonom; mampu mengelola potensinya dengan mengandalkan kemampuan masyarakat, dunia usaha dan pemerintah secara sinergis tanpa terlepas dari interkoneksitas dengan daerah lain terutama pada kawasan

Luwu Raya; serta masyarakat, dunia usaha dan pemerintahnya memiliki etos kemandirian dan daya saing yang tinggi. Kondisi ini ditandai dengan berkembangnya proses pemanfaatan potensi/sumberdaya secara produktif, efektif, efisien dengan berbasis pada kualitas teknostruktur masyarakat yang senantiasa berkembang, serta melibatkan sebanyak-banyaknya masyarakat.

Sejahtera adalah keadaan Kabupaten Luwu pada tahun 2025 yang masyarakatnya selain semakin mantap memenuhi kebutuhan dasarnya terutama ketahanan pangan, pemenuhan sandang dan kelayakan perumahan serta kondisi aman dan tertib sehingga kemiskinan bisa direduksi; juga semakin berkembang pemenuhan kebutuhan sosial dan aktualisasi dirinya dalam dukungan lingkungan hidup dan sumberdaya alam yang lestari. Kondisi ini ditunjang oleh pencapaian transformasi perekonomian dimana kontribusi nilai dan penyerapan tenaga kerja dalam struktur PDRB sudah nyata diperankan oleh sektor sekunder dan tersier. Selain itu, kondisi-kondisi ini terkait dengan berkembangnya kehidupan sosial-budaya yang harmonis dan dinamis, dan berkembanganya kegiatan pemuda dan olah raga serta kesejahteraan sosial.

Bernuansa religi adalah keadaan Kabupaten Luwu pada tahun 2025 dimana kehidupan keagamaan masyarakat semakin mantap sebagai manifestasi atas penghayatan dan pengamalan Pancasila. Kemajuan, kemandirian dan kesejahteraan yang didorong secara bersama oleh seluruh komponen daerah semuanya berbasis pada nuansa religius. Perwujudan nuansa religi tersebut bukan hanya ditandai oleh semakin mantapnya pemahaman dan pengamalan agama secara ritual; tetapi juga pada semakin fungsionalnya ajaran dan ritual agama dalam memanifestasikan etos dan budaya kerja yang mengakselerasi kemajuan, kemandirian dan kesejahteraan; serta mengkondisikan manusia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika dan beradab dalam kehidupan yang berbahagia.

5.4.1. Keterkaitan Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 dengan RPJPD Kabupaten Luwu Tahun 2005-2025

Agar Visi jangka panjang Kabupaten Luwu Tahun 2025 dapat diwujudkan maka ditempuh Misi RPJPD sebagai berikut:

1. Mewujudkan kualitas manusia yang tinggi

   Kualitas manusia yang tinggi merupakan indikator penting dari kemajuan daerah. Tingginya kualitas manusia, dalam arti pengetahuan yang luas sebagai hasil dari kemajuan pendidikan, angka harapan hidup yang tinggi sebagai hasil dari kemajuan kesehatan, dan daya beli yang tinggi sebagai

hasil kemajuan perekonomian; bukan hanya menggambarkan kemajuan daerah tetapi sekaligus menggambarkan kapasitas daerah untuk memberlanjutkan kemajuannya, karena kualitas manusia yang tinggi adalah jaminan bagi kapasitas untuk memberlanjutkan kemajuan.

2. Mewujudkan kemandirian dalam pengelolaan potensi daerah

   Potensi daerah dalam bentuk sumberdaya alam, manusia, finansial, sarana dan prasarana merupakan modal dasar bagi kemandirian daerah yang pengelolaannya harus secara mandiri pula agar azas kemanfaatan bersama bisa optimal. Karena itu, masyarakat, dunia usaha dan pemerintah daerah tidak hanya terniscayakan untuk memiliki kapasitas dalam mengelola potensi daerah tetapi lebih penting lagi adalah etos dan kerja keras untuk secara mandiri mengelola efektif, efisien dan berkelanjutan berbagai potensi demi otonomi daerah. Namun demikian, kemandirian pengelolaan potensi daerah tidak bisa sepenuhnya otonom, karena skala ekonomi dan sosiogeografis suatu potensi sering menembus batas-batas administratif, maka interkoneksitas dengan daerah lain khususnya dalam lingkup Luwu Raya menjadi konteks lebih luas dari kemandirian tersebut.

3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang layak dan merata

   Kesejahteraan merupakan cita-cita ideal dari setiap tatanan, begitu pula dengan Kabupaten Luwu sebagai bagian dari entitas negara-bangsa Indonesia. Tanpa perwujudan kesejahteraan dalam arti luas maka tujuan luhur dari otonomi daerah tidak tercapai. Karena itu, upaya-upaya untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat sehingga kemiskinan bisa direduksi, begitu pula pemenuhan kebutuhan yang lebih tinggi seperti kebutuhan sosial dan aktualisasi diri sehingga kemakmuran bisa dihampiri, serta secara struktural perekonomian daerah bisa bertransformasi kearah peran sektor industri dann jasa yang lebih dominan, merupakan keniscayaan.

4. Mewujudkan nuansa religi sebagai landasan tatanan daerah

   Nuansa religi sebagai landasan tatanan daerah merupakan manifestasi dari Pancasila sebagai dasar negara Indonesai dimana pada sila pertama begitu pula pada sila-sila lainnya terkandung substansi yang terkait dengan nuansa religiusitas dan kebudayaan yang luhur. Upaya untuk melahirkan secara terus menerus manusia yang berakhlak mulia dan beretika serta menjadikan agama fungsional dalam aktivitas pembangunan merupakan bagian dari pembangunan peradaban.

Tabel 5.3.
Hubungan Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Luwu Tahun 2005-2025 dengan Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024

Sasaran Pokok RPJPD	Tujuan dan Sasaran RPJMD	Indikator
Nilai indeks pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan yang secara kuantitaif tinggi.	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (T2)	Indeks Pembangunan Manusia
	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat (S2.2.)	Angka Harapan Hidup
Pengembangan produk unggul hasil pengelolaan sumberdaya daerah dengan daya saing yang mengandalkan kandungan pengetahuan dalam produk khususnya produk derivasi kakao, rumput laut dan lainnya.	Meningkatkan produksi dan kemandirian pangan sebagai penopang kesejahteraan masyarakat (T5)	Indeks Ketahanan Pangan
	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada sektor unggulan daerah (S5.1)	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB
Kepemerintahan yang makin baik dengan kemandirian fiskal yang cukup mendukung.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih (T1)	Indeks Reformasi Birokrasi
	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (S1.2.)	Ikhtisar Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI
Meningkatkan pendapatan yang semakin tinggi dan merata	Meningkatkan pendapatan masyarakat (T4.)	PDRB Perkapita
Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	Meningkatkan perekonomian daerah (T8)	Pertumbuhan Ekonomi
Angka kemiskinan yang semakin redah,	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat (T4)	Angka Kemiskinan
Transformasi perekonomian yang semakin memposisikan sektor industri,	Meningkatkan kuantitas dan kualitas industri pengolahan (S8.1)	Kontribusi Lapangan Usaha Industri Pengolahan Terhadap PDRB
Semakin besarnya kontribusi produk UKM dan koperasi dalam perkonomian daerah	Meningkatkan kuantitas dan kualitas industri pengolahan (S8.1)	Kontribusi Lapangan Usaha Industri Pengolahan Terhadap PDRB
Pengelolaan lingkungan juga semakin signifikan dalam adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim global	Terjaganya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup (T10)	Indeks kualitas lingkungan hidup
Mewujudkan kecerdasan spritual masyarakat di mana ketertiban, kemaman, saling percaya dan kebajikan sosial terjelmakan sebagai landasan kehidupan masyarakat.	Terwujudnya kehidupan masyarakat yang tertib, aman dan religious (T6)	Indeks Kerukunan Umat Beragama
	Menurunkan angka kriminalitas (S6.1.)	Angka Kriminalitas per 10.000 Penduduk

Keselarasan Visi RPJPD Kabupaten Luwu Tahun 2005-2025 dengan Visi RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024, disajikan dalam bentuk skema sebagai berikut:

Gambar 5.2
Keselarasan Visi RPJPD Kabupaten Luwu Tahun 2005-2025
Dengan Visi Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024

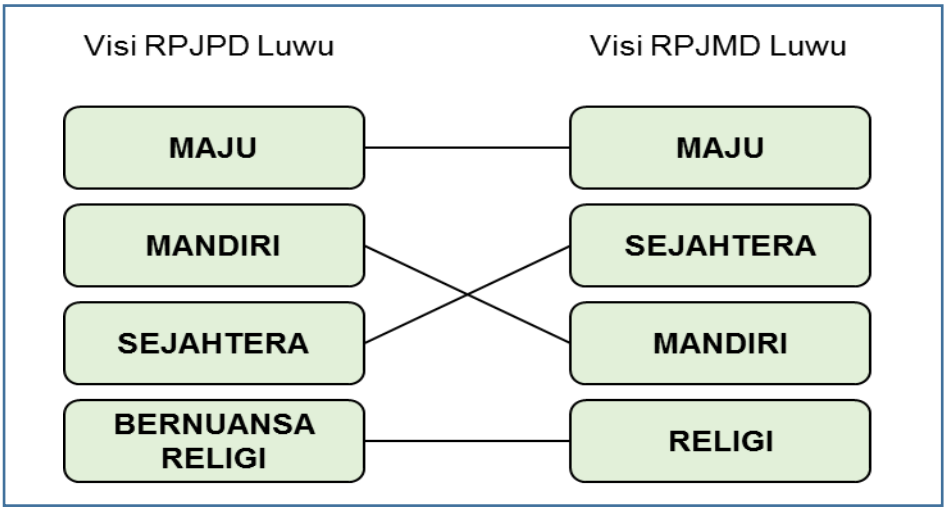

Bertolak dari uraian analisis di atas nampak, rumusan dari Visi jangka panjang Kabupaten Luwu yang tertuang dalam RPJPD Kabupaten Luwu Tahun 2005-2025 adalah relevan atau saling memiliki keterkaitan dengan rumusan visi jangka menengah daerah Kabupaten Luwu yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024. Demikian halnya dengan misi RPJPD dan RPJMD, saling terkait dan memiliki keterkaitan makna yang sangat jelas.

Sedangkan keselarasan Misi RPJPD Kabupaten Luwu Tahun 2005-2025 dengan Misi RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024, disajikan dalam bentuk skema sebagai berikut:

Gambar 5.3
Keselarasan Misi RPJPD Kabupaten Luwu Tahun 2005-2025
dengan Misi RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024

5.4.2. Keterkaitan Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 dengan Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018- 2023

Sebagai bagian integral dari Provinsi Sulawesi Selatan, Visi jangka menengah Kabupaten Luwu harus tetap selaras dengan Visi jangka menengah Provinsi Sulawesi Selatan. Di dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023-2028, Visi jangka menengah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023 adalah **"Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter".** Rumusan visi ini mengandung lima pokok visi di dalamnya yakni inovatif, produktif, kompetitif, inklusif dan berkarakter. Kelima pokok visi ini merupakan rangkaian yang terkait satu sama lain dalam mewujudkan kondisi pada tahun 2023 dimana terjelmakan Provinsi Sulawesi Selatan yang "Bersih dan Melayani", "Terkoneksi", "Mandiri dan Sejahtera", "Sehat dan Cerdas" serta "Berkarakter".

Berdasarkan pemahaman itu maka penjelasan pokok-pokok visi RPJMD Sulawesi Selatan 2018-2023 sebagai berikut:

- ***Inovatif***, dimaknai sebagai kondisi pemerintahan yang memiliki kemampuan menciptakan gagasan baru, produk baru, dan layanan baru dalam kerangka kepemerintahan yang baik sehingga terwujud Sulawesi Selatan yang "bersih dan melayani"
- ***Produktif***, mengandung makna kondisi perekonomian yang berkemampuan menghasilkan produk barang dan jasa yang berdaya saing sehingga terwujud Sulawesi Selatan yang "mandiri dan sejahtera".
- ***Kompetitif*****,** mengandung makna kondisi masyarakat yang memiliki sumberdaya manusia (SDM) dengan kualitas tinggi sehingga terwujud Sulawesi Selatan yang "sehat dan cerdas"
- ***Inklusif***, dimaknai sebagai kondisi penyelenggaraan pembangunan yang melibatkan partisipasi seluruh unsur masyarakat dan seluruh bagian wilayah serta ramah terhadap lingkungan hidup sehingga terwujud Sulawesi Selatan yang "inklusif dan terkoneksi".
- ***Berkarakter***, dimaknakan sebagai kondisi penyelenggaraan pembangunan Sulawesi Selatan yang dilandasi oleh spirit dan nilai-nilai luhur kebudayaan masyarakat sehingga terwujud Sulawesi Selatan yang "berkarakter".

Untuk mencapai Visi tersebut, Provinsi Sulawesi Selatan mengembangkan sejumlah Misi sebagai berikut:

Tabel 5.4.

Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 dengan Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024

Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan	Indikator	Target Tahun 2023	Tujuan dan Sasaran RPJMD Kab. Luwu	Indikator	Target Tahun 2023
Meningkatkan tata kelola penyekenggaraan pemerintahan yang baik (T1)	Indeks Reformasi Birokrasi	A (81 – 90)	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (T1)	Indeks Reformasi Birokrasi	67,25 (B)
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah (S1)	Nilai SAKIP Provinsi	A (80 – 90)	Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah (S1.1)	Nilai SAKIP Kabupaten	72,02 (BB)
Berkembangnya inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public (S2)	Indeks Pelayanan Publik	A (4,51 – 5,0)	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah (T9)	Indeks Kepuasan Masyarakat	82,63
Meningkatnya aksesibilitas infrastruktur wilayah (S3)	Indeks Layanan Infrastruktur	66,39	Meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan (T9)	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Baik
Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat secara merata (T3)	PDRB Perkapita AHB	66,01	Meningkatkan pendapatan masyarakat (S4.1)	PDRB Perkapita AHB (Juta Rp)	51,20
	Angka kemiskinan (%)	9,16	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat (T4)	Angka Kemiskinan	11,97
Meningkatkan Kualitas SDM secara inklusif (T4)	Indeks Pembangunan Manusia	73,87	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (T2)	Indeks Pembangunan Manusia	72,58
Meningkatnya Kualitas dan Pemerataan Pendidikan (S6)	Indeks Pendidikan	67,80	Meningkatkan derajat pendidikan masyarakat (S2.1)	Indeks Pendidikan	65,90
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (S7)	Indeks Kesehatan	77,97	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat (S2.2)	Indeks Kesehatan	78,69
Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah Produk Unggulan Daerah (T5)	Pertumbuhan ekonomi (%)	5,93	Meningkatkan perekonomian daerah (T8)	Pertumbuhan ekonomi (%)	5,99
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	77,87	Terjaganya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup (T10)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Sangat tinggi

Keselarasan Visi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 dengan Visi RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024, disajikan dalam bentuk skema sebagai berikut:

Gambar 5.4

Keselarasan Visi Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023
dengan Visi Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024

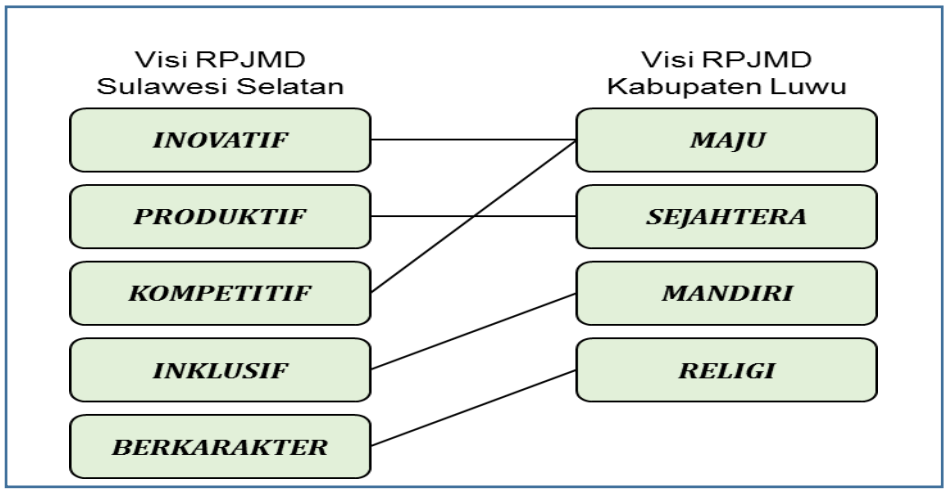

Sedangkan keselarasan Misi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018- 2023 dengan Misi RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024, disajikan dalam bentuk skema sebagai berikut:

Gambar 5.5

Keselarasan Misi Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023

dengan Misi Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024

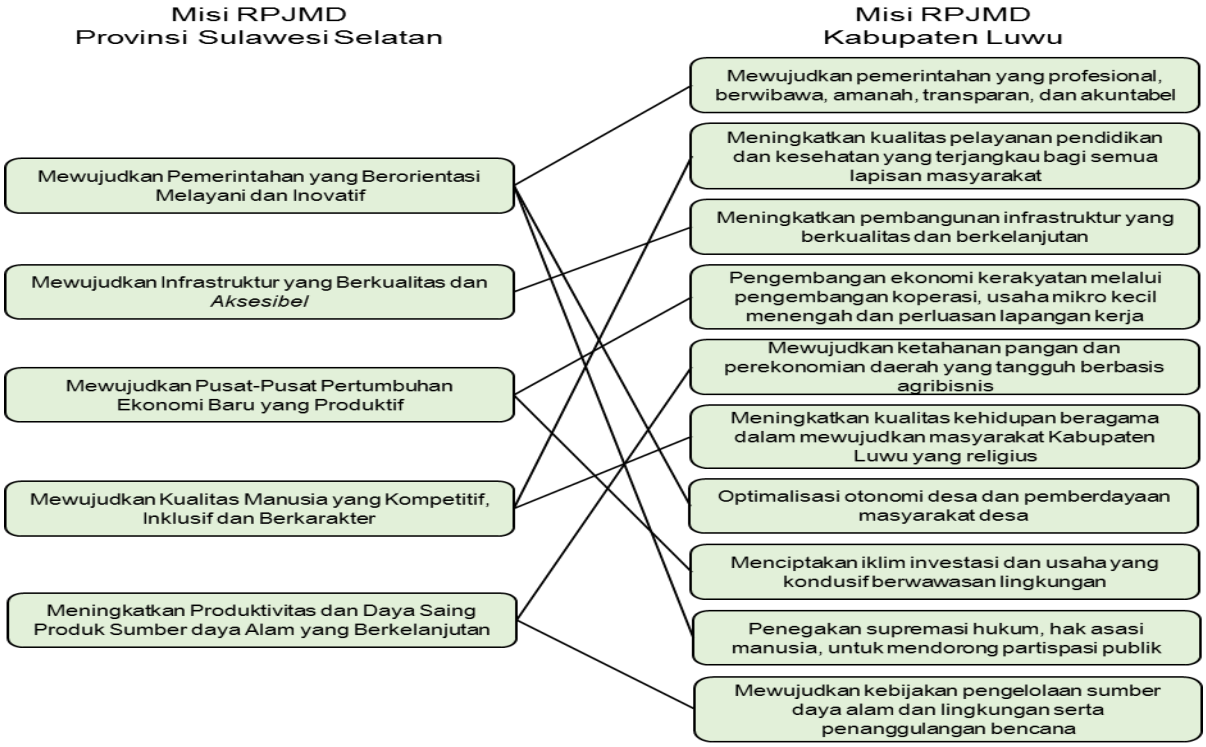

Dari skema di atas nampak bahwa rumusan dari Visi jangka menengah Provinsi Sulawesi Selatan yang tertuang dalam dokumen RPJMD Tahun 2018-2023 adalah relevan atau saling memiliki keterkaitan dengan rumusan visi jangka menengah daerah kabupaten Luwu yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024. Demikian halnya dengan misi kedua dokumen rencana pembangunan, saling terkait dan bersinergi untuk mempercepat pencapaian hasil-hasil pembangunan daerah.

5.4.3. Keterkaitan Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 dengan RPJMN Tahun 2020-2024

Misi pembangunan Kabupaten Luwu sejalan dengan Nawa Cita Kedua sebagaimana arahan RPJMN Tahun 2020-2024 yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;

7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya; dan
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Keterkaitan Misi RPJMN Tahun 2020-2024 dengan misi pembangunan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 dapat dicermati pada tabel berikut.

Tabel 5.5.

Keterkaitan Sasaran RPJMN Tahun 2020-2024 dengan Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024

Sasaran RPJMN	Indikat	Target	Tujuan dan Sasaran RPJMD	Indikat	Target
Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan	Skor Pola Pangan Harapan (2.2.2(c))	95,2	Meningkatkan produksi dan kemandirian pangan sebagai penopang kesejahteraan	Indeks Ketahanan Pangan	93
Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi	Kontribusi PDB industri pengolahan (9.2.1*)	21,0	Meningkatkan kuantitas dan kualitas industri pengolahan (S8.1)	Kontribusi Lapangan Usaha Industri Pengolahan Terhadap PDRB	12,76
	Pertumbuhan PDB pertanian (%)	4,1	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada sektor unggulan daerah (S5.1)	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)	6,22
	Pertumbuhan PDB	5,0			
	Pertumbuhan PDB	8,7			

Keterkaitan Misi RPJMN Tahun 2020-2024 dengan misi pembangunan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 dapat dicermati pada tabel berikut:

Tabel 5.6.
Keterkaitan Misi RPJMN Tahun 2020-2024 dengan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024

No.	Misi RPJMN Tahun 2020-2024	Misi RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024
1.	Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pendidikan Dan Kesehatan Yang Terjangkau Bagi Semua Lapisan Masyarakat.
2.	Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing;	Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Melalui Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah Dan Perluasan Lapangan Kerja.
		Mewujudkan Ketahanan Pangan Dan Perekonomian Daerah Yang Tangguh Berbasis Agribisnis.
3.	Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas dan Berkelanjutan.
4.	Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;	Menciptakan Iklim Investasi dan Usaha Yang Kondusif Berwawasan Lingkungan.
		Mewujudkan Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Serta Penanggulangan Bencana.
5.	Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;	Meningkatkan Kuaitas Kehidupan Beragama Dalam Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Luwu Yang Religius.
6.	Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;	Penegakan Supremasi Hukum, Hak Asasi Manusia, Untuk Mendorong Partispasi Publik.
7.	Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;	Penegakan Supremasi Hukum, Hak Asasi Manusia, Untuk Mendorong Partispasi Publik.
8.	Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya; dan	Mewujudkan Pemerintahan Yang Profesional, Berwibawa, Amanah, Transparan, dan Akuntabel.
9.	Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan	Optimaslisasi Otonomi Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Kebijakan pembangunan Wilayah Sulawesi tahun 2020-2024 dalam RPJMN diarahkan untuk memperkuat peran Sulawesi sebagai salah satu pintu gerbang Indonesia dalam perdagangan internasional dan pintu gerbang Kawasan Timur Indonesia; pengembangan industri berbasis logistik; lumbung pangan nasional dengan pengembangan industri berbasis kakao, padi, jagung; pengembangan industri berbasis

rotan, aspal, nikel, bijih besi dan gas bumi; percepatan pembangunan ekonomi berbasis maritim (kelautan) melalui pengembangan industri perikanan dan pariwisata bahari.

Transformasi ekonomi di Wilayah Sulawesi diarahkan untuk mewujudkan hilirisasi industri berbasis pertanian, perkebunan, perikanan dan tambang untuk menciptakan nilai tambah melalui pengolahan bahan baku menjadi bahan setengah jadi atau bahan akhir dengan mempertimbangkan pendekatan mitigasi dan adaptasi bencana. Strategi pembangunan Wilayah Sulawesi Selatan dilakukan secara terintegrasi dalam satu kesatuan Pulau Sulawesi dengan mengutamakan pemerataan, pertumbuhan, penguatan konektivitas, serta mitigasi dan pengurangan risiko bencana melalui : 1) peningkatan pelayanan dasar, diantaranya peningkatkan kualitas SDM dengan melakukan revitalisasi Balai Latihan Kerja; 2) penguatan pusat-pusat pertumbuhan, diantaranya melalui pengembangan komoditas unggulan dan industri pengolahan (hilirisasi) sumber daya alam (pertanian, perkebunan, logam dasar, dan kemaritiman) melalui pemanfaatan dan keterpaduan pembangunan infrastruktur KI Takalar; pengembangan kawasan strategis prioritas berbasis pariwisata pada Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP); dan pengembangan kawasan perkotaan termasuk wilayah perkotaan Mamminasata sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi dan 3) penguatan konektivitas diantaranya melalui pembangunan jalan trans Sulawesi, pembangunan Bandara Buntu Kunik, pembangunan sistem angkutan massal di perkotaan Mamminasata, pembangunan Pelabuhan Makassar, dan pembangunan jalur KA Makassar-Parepare.

Pengembangan wilayah dalam pembangunan nasional, sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN Tahun 2020-2024 dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu pendekatan pertumbuhan dan pendekatan pemerataan yang berbasis wilayah pulau. Pengembangan wilayah Sulawesi Selatan berdasarkan pendekatan koridor pertumbuhan diarahkan pada kabupaten/kota yang berperan sebagai pusatpusat pertumbuhan dengan basis keunggulan wilayah yang berperan sebagai pusat produksi, khususnya pusat produksi pertanian, dan perikanan di kabupaten Pinrang, Luwu Timur, Luwu Utara, Luwu, Wajo dan Soppeng; pusat pengolahan sumber daya alam di kabupaten Pangkajene Kepulauan; pusat perdagangan dan industri kepelabuhanan di kabupaten Barru dan Kota Parepare; pusat pengembangan jasa pariwisata di Kota Makassar dan kabupaten Maros; dan pusat pelayanan jasa dan perdagangan di Kota Palopo dan Kawasan Perkotaan Mamminasata yang meliputi wilayah Kota Makassar, dan Kabupaten Gowa, Takalar dan Maros. Sedangkan berdasarkan koridor pemerataan

diarahkan pada kabupaten yang berfungsi sebagai kawasan penyangga bagi pusat pertumbuhan yang berperan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi lokal yang meliputi Kabupaten Toraja, Toraja Utara, Bone, Bantaeng, Bulukumba dan Sinjai.

Kawasan pembangunan (KP) Palopo, diarahkan sebagai pusat pengembangan ekonomi berbasis keberlanjutan pemanfaatan sumber daya alam yang didukung oleh industry pengolahan dan industry jasa hasil perkebunan, peternakan dan perikanan serta pertambangan, dengan memperhatikan peran Kabupaten Luwu Timur sebagai bagian dari Kawasan Sorowako yang merupakan Kawasan Strategis Nasional (KSN) dan Kabupaten Tana Toraja dan Toraja Utara sebagai bagian dari Kawasan Toraja yang merupakan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) melalui pengembangan sektor unggulan berbasis sumberdaya alam. Pengembangan KP Palopo dan Sekitarnya akan dilakukan melalui peningkatan konektivitas antar wilayah dari pusat kegiatan menuju pusat pertumbuhan lainnya guna mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif melalui pembangunan infrastruktur wilayah berupa pembangunan Bandar udara Buntu Kunik dan pembangunan infrastruktur pembangkitan listrik. Sedangkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia akan dilakukan melalui pemenuhan akses dan peningkatan jangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, pendidikan vokasional, peningkatan kerjasama antar daerah, percepatan penerapan SPM dan pengembangan Badan Usaha Milik Pemerintah Daerah untuk mendukung produk unggulan wilayah. Arah pengembangan wilayah untuk Kabupaten Luwu adalah pengembangan komoditas lada, pala, dan cengkeh serta peningkatan produksi perikanan budidaya (ikan dan rumput laut). Untuk mendukung prioritas nasional tersebut, Pemerintah Kabupaten Luwu melakukan upaya-upaya untuk mempercepat pelaksanaannya yaitu dengan penyiapan data yang dibutuhkan, menetapkan lokasi pengembangan sesuai potensi yang dibutuhkan, serta membangun infrastruktur pendukung pada lokasi-lakasi yang telah ditetapkan. Dalam P-RPJMD Kabupaten Luwu tahun 2019-2024, telah ditetapkan arah kebijakan untuk menyusun *grand design* pengembangan pertanian dan perikanan di Kabupaten Luwu, sebagai pedoman dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan di sektor ini. Adapun data terkait kontribusi sektor pertanian terutama komoditas lada, pala dan cengkeh Kabupaten Luwu terhadap prioritas Nasional dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 5.8
Kontribusi Produksi Lada, Pala, dan Cengkeh
Kabupaten Luwu terhadap Nasional Tahun 2016-2020

Komoditas	2016	2017	2018	2019	2020
Lada (%)	0,39	0,45	0,34	0,34	0,34
Pala (%)	0,07	0,09	0,06	0,07	0,08
Cengkeh (%)	6,55	6,94	5,32	5,69	6,48

Sumber: Direktur Jenderal Perkebunan dan BPS Kabupaten Luwu, 2021

sBerdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa produksi Lada pada tahun 2016 hingga 2020 kontribusi lada Kabupaten Luwu bersifat fluktuatif hal ini ditunjukkan dengan nilai produksi lada pada tahun 2016 sebesar 321,79 ton sehingga memberikan kontribusi sebesar 0,39 % terhadap produksi Lada di Nasional. Dan pada tahun 2020 Kabupaten Luwu mampu memproduksi lada sebesar 295,77 ton sehingga memberikan kontribusi sebesar 0,34 % terhadap produksi Lada di Nasional. Hal ini menunjukkan bahwa persentase peningkatan pengembangan komoditas lada Kabupaten Luwu terhadap Nasional mengalami penurunan.

Tabel diatas pula menunjukan bahwa produksi pala pada tahun 2016 hingga 2020 kontribusi pala Kabupaten Luwu mengalami peningkatan setiap tahunnya hal ini ditunjukkan dengan nilai produksi pala pada tahun 2016 sebesar 21,78 ton sehingga memberikan kontribusi sebesar 0,07 % terhadap produksi pala di Nasional. Dan pada tahun 2020 Kabupaten Luwu berhasil memproduksi pala sebanyak30,50 ton sehingga memberikan kontribusi sebesar 0,08 % terhadap produksi pala di Nasional. Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan komoditas pala Kabupaten Luwu terhadap Nasional mengalami kenaikan.

Sedangkan untuk produksi cengkeh pada tahun 2016 hingga 2020 kontribusi cengkeh kabupaten Luwu bersifat fluktuatif hal ini ditunjukkan dengan nilai produksi cengkeh pada tahun 2016 sebesar 9.006,35 ton sehingga memberikan kontribusi sebesar 6,55 % terhadap produksi cengkeh di Nasional dan pada tahun 2020 Kabupaten Luwu

mampu memproduksi cengkeh sebesar 9.120,25 sehingga memberikan kontribusi sebesar 6,48 % terhadap produksi Cengkeh di Nasional. Hal ini menunjukkan bahwa persentase peningkatan pengembangan komoditas cengkeh Kabupaten Luwu terhadap Nasional mengalami kenaikan.

BAB VI
STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mencapai misi, tujuan dan sasaran RPJMD secara efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Luwu disusun untuk menjadi acuan bagi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan bagi seluruh perangkat daerah lingkup pemerintah Kabupaten Luwu, serta acuan bagi *stakeholders* terkait dalam partisipasi aktif mensukseskan pembangunan di Kabupaten Luwu.

6.1. Strategi

Rumusan strategi menunjukkan keinginan yang kuat dari pemerintah daerah dalam menciptakan nilai tambah (*added value*) bagi para pemangku kepentingan pembangunan daerah. Penetapan strategi dilakukan untuk menjawab bagaimana tahap-tahap pencapaian sasaran-sasaran pembangunan dengan batas waktu tertentu. Sebuah strategi dapat dilakukan untuk menjawab lebih dari 1 (satu) sasaran pembangunan dengan mempertimbangkan aspek efektifitas dan efisiensi pencapaian target sasaran.

Strategi dirumuskan dengan menganalisis kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman dalam mencapai sasaran. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Strategi juga dijadikan sebagai prioritas pembangunan jangka menengah yang setiap tahun diturunkan menjadi prioritas pembangunan tahunan daerah. Beberapa langkah yang telah ditempuh untuk menentukan strategi pembangunan jangka menengah Kabupaten Luwu antara lain:

1. Mengkaji sasaran pembangunan 5 (lima) tahunan;
2. Mengkaji gambaran umum kondisi daerah dan capaian pembangunan sampai dengan periode awal perencanaan serta permasalahan pembangunan terpenting dan isu-isu strategis pembangunan daerah;
3. Melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal untuk mengukur kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang akan dihadapi oleh daerah (khususnya pemerintahan daerah);

4. Merumuskan faktor-faktor ukuran keberhasilan (*key success factor*s) dan pengembangan berbagai kerangka kebijakan yang diselaraskan dengan permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah dan nasional;
5. Mengevaluasi berbagai alternatif strategi dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki dan kondisi eksternal yang dihadapi; dan
6. Memilih strategi yang paling sesuai untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah dengan memperhatikan arah kebijakan yang efektif untuk mencapai sasaran RPJMD;

Berdasarkan rumusan visi, misi, tujuan, dan sasaran dalam kertas kerja yang telah dikembangkan, strategi pembangunan jangka menengah Kabupaten Luwu Tahun 2022-2024, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6.1.

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi
Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Luwu 2022-2024

Visi : Kabupaten Luwu Yang Maju, Sejahtera dan Mandiri dalam Nuansa Religi		
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**
Misi 1 : Mewujudkan Pemerintahan Yang Profesional, Berwibawa, Amanah, Transparan, dan Akuntabel		
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	1. Mengoptimalkan penerapan prinsip *Good Governance*
	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	2. Meningkatkan kapasitas fiskal daerah serta mengembangkan kualitas pengukuran IKM
Misi 2 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Yang Terjangkau Bagi Semua Lapisan Masyarakat		
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	Meningkatkan derajat pendidikan masyarakat	3. Meningkatkan pembangunan pendidikan
	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	4. Meningkatkan pemerataan layanan kesehatan yang berkualitas
Misi 3 : Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas Dan Berkelanjutan		
Meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang berkualitas	Meningkatkan aksebilitas dan konektifitas wilayah	5. Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infratsruktur
	Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman	6. Pengembangan infrastruktur perkotaan dan lingkungan permukiman
Misi 4 : Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Melalui Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perluasan Lapangan Kerja;		
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Meningkatkan pendapatan masyarakat	7. Mengembangkan koperasi dan UMKM serta penanganan angka pengangguran
Misi 5 : Mewujudkan Ketahanan Pangan Dan Perekonomian Daerah Yang Tangguh Berbasis Agribisnis		
Meningkatkan produksi dan kemandirian pangan sebagai penopang	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada sektor unggulan daerah	8. Mewujudkan kemandirian pangan dan ekonomi kerakyatan yang tangguh berbasis agribisnis

Tujuan	Sasaran	Strategi
kesejahteraan masyarakat		
Misi 6 : Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama Dalam Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Luwu Yang Religius		
Terwujudnya kehidupan masyarakat yang tertib, aman dan religius	Menurunkan angka kriminalitas	9. Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum
Misi 7 : Optimaslisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa		
Meningkatkan pembangunan Desa	Meningkatkan kemandirian desa	10. Mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan desa serta pemberdayaan masyarakat desa
Misi 8 : Meningkatkan Investasi Berbasis Pembangunan Berkelanjutan		
Meningkatkan perekonomian daerah	Meningkatkan kuantitas dan kualitas industri pengolahan	11. Menciptakan iklim investasi yang kondusif berbasis pembangunan berkelanjutan
Misi 9 : Penegakan Supremasi Hukum, Hak Asasi Manusia, Untuk Mendorong Partispasi Publik		
Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah	Menurunnya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan	12. Mengoptimalkan pengundangan dan penegakan produk hukum daerah serta meningkatkan keberdayaan perempuan
Misi 10 : Mewujudkan Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Serta Penanggulangan Bencana		
Terjaganya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup	Meningkatnya ketangguhan daerah menghadapi bencana	13. Mengoptimalkan implementasi kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta manajemen penanggulangan bencana

Tabel di atas menunjukkan hubungan masing-masing strategi dengan sasaran pembangunan (RPJMD). Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, berdasarkan program kerja yang disampaikan oleh Bupati Luwu, Dr. Drs. H. Basmin Mattayang, M.Pd dan Wakil Bupati Luwu, Syukur Bijak, SE, dapat dirumuskan penjelasan atas strategi tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan penerapan prinsip *Good Governance*.

Optimalisasi penerapan *good governance* merupakan salah satu upaya untuk menata, memperbaiki dan mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui strategi ini berarti pemerintah melakukan perbaikan dan penyempurnaan tata kelola pemerintahan agar berkinerja

lebih optimal. Optimalisasi dilakukan pada seluruh aspek pemerintahan, termasuk kepatuhan terhadap peraturan perundangan dan paradigma aparatur. Hal ini akan menstimulasi kinerja birokrasi dan mengubah pola pikir pegawai pemerintah sebagai pelayan masyarakat. Selain itu pemanfaatan teknologi informasi akan mendorong percepatan pembangunan daerah dari segi infrastruktur dan layanan masyarakat. Sesuai dengan program kerja Bupati/Wakil Bupati Luwu, beberapa hal yang dilakukan terkait dengan strategi ini adalah sebagai berikut:

a. Penyempurnaan sistem reformasi birokrasi dan pelayanan masyarakat yang mudah, murah, cepat dan berkualitas.
b. Membentuk Mal Pelayanan Publik (MPP).
c. Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme aparatur pemerintah mulai dari kabupaten, kecamatan sampai aparatur desa dan kelurahan.
d. Membangun pemerintahan yang tertib hukum, tertib administrasi, tertib penyusunan perencanaan dan tertib pengelolaan keuangan.
e. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan SPM sub urusan Pemadaman Kebakaran dan sub urusan bencana.
f. Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah.

2. Meningkatkan kapasitas fiskal daerah serta mengembangkan kualitas pengukuran IKM

Kapasitas fiskal adalah gambaran kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui penerimaan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (tidak termasuk dana alokasi khusus, dana darurat, dana pinjaman lama, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk membiayai pengeluaran tertentu) untuk membiayai tugas pemerintahan setelah dikurangi belanja pegawai dan dikaitkan dengan jumlah penduduk miskin. Oleh karena itu, berbagai upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah yang merupakan faktor utama dalam rangka peningkatan kapasitas fiskal daerah harus dilakukan secara terarah dan berkesinambungan. Sehingga belanja untuk pembangunan, pemberdayaan dan pelayanan masyarakat dapat ditingkatkan. Selain itu, juga akan dikembangkan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik. IKM merupakan input dalam penyusunan kebijakan dan output dari suatu penyelenggaraan pemerintahan.

3. Meningkatkan pembangunan pendidikan

Pembangunan pendidikan merupakan salah satu prioritas utama dalam agenda pembangunan Kabupaten Luwu. Pembangunan pendidikan sangat penting karena memiliki peran yang signifikan dalam mencapai kemajuan di berbagai bidang kehidupan. Oleh karena itu, pemerintah daerah berkewajiban untuk memenuhi hak setiap warga masyarakat dalam memperoleh layanan pendidikan guna meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945, yang mewajibkan pemerintah bertanggung jawab dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan menciptakan kesejahteraan umum.

Sesuai dengan program kerja Bupati/Wakil Bupati Luwu, beberapa langkah yang akan dilakukan terkait dengan strategi ini adalah:

a. Membangun sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas, tersedia merata dan mudah dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat;
b. Memberikan tunjangan kepada guru yang bertugas di daerah terpencil atau daerah dengan jarak jangkauan dan tingkat kesulitan transportasi;
c. Memberikan beasiswa kepada pelajar berprestasi mulai SD, SMP, SMA atau Sederajat, yang diprioritaskan pada siswa dari warga kurang mampu dengan indikator penilaian yang terukur dan konsisten;
d. Memberikan bantuan penyelesaian pendidikan kepada mahasiswa/i S1, S2 dan S3;
e. Memberikan beasiswa kepada guru berprestasi untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi yang disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan mutu pendidikan di daerah;
f. Peningkatan pelayanan pendidikan dasar sesuai SPM.

4. Meningkatkan pemerataan layanan kesehatan yang berkualitas

Derajat kesehatan masyarakat merupakan salah satu aspek yang amat penting untuk segera diwujudkan sebagai upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat. Pembangunan kesehatan harus dipandang sebagai suatu investasi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia. Mutu layanan kesehatan dapat dilihat dari aspek teknis medis yang berhubungan langsung antara pelayanan medis dan pasien, atau mutu kesehatan dalam sudut pandang sosial dan pelayanan kesehatan secara keseluruhan, termasuk manajemen administrasi, keuangan, peralatan dan tenaga kesehatan lainnya. Dengan demikian diperlukan upaya yang lebih memadai bagi peningkatan derajat kesehatan dan pembinaan

penyelengaraan upaya kesehatan secara menyeluruh dan terpadu melalui pembangunan kesehatan.

Terkait dengan upaya pembangunan kesehatan tersebut, maka pemerintah wajib meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas bagi seluruh masyarakat Kabupaten Luwu. Selain itu, kepada masyarakat juga terus diberikan pengetahuan tentang pentingnya hidup sehat. Pada dasarnya, pembangunan kesehatan merupakan tanggung jawab seluruh pemangku kepentingan/masyarakat, tidak hanya pemerintah daerah.

Sesuai dengan program kerja Bupati/Wakil Bupati Luwu, beberapa langkah yang akan dilakukan terkait dengan strategi ini adalah:

a. Membangun sarana dan prasarana kesehatan yang berkualitas, tersedia merata dan mudah dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.
b. Memberikan tunjangan pakasi kepada bidan desa atau tenaga kesehatan di daerah terpencil atau daerah dengan jangkauan dan tingkat kesulitan transportasi.
c. Menyediakan layanan ambulance dan mobil jenazah gratis di setiap kecamatan.
d. Peningkatan pelayanan kesehatan sesuai SPM.
e. Peningkatan pelayanan minimal rumah sakit.
f. Peningkatan pelayanan di setiap PUSKESMAS sesuai Keputusan Menkes Nomor 129/MENKES/ SK/II/2008 tentang Kebijakan Pusat Kesehatan Masyarakat.

5. Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur

Pembangunan daerah terpencil dan perbatasan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Pengelolaan daerah perbatasan menghendaki adanya perhatian yang lebih fokus agar terjadi peningkatan kualitas pembangunan dan kualitas penduduk di wilayah tersebut. Pembangunan akses ke kawasan terisolir seperti daerah tertinggal dan perbatasan diharapkan mampu mengurangi kesenjangan/ketimpangan pembangunan. Ketimpangan ini akhirnya juga menyisakan banyak masalah pembangunan yang sewaktu-waktu bisa berubah menjadi “bom” yang meruntuhkan sendi-sendi pembangunan negara. Konsentrasi pembangunan di perkotaan akan memunculkan komplikasi pada masalah lingkungan, ketersediaan pangan, kemiskinan, dan berbagai masalah politik dan sosial lainnya.

Pembangunan daerah terpencil dan perbatasan memerlukan kerangka penanganan yang menyeluruh meliputi berbagai sektor pembangunan,

koordinasi, serta kerja sama yang efektif mulai dari pusat sampai ke tingkat kabupaten/kota, yang dijabarkan melalui kebijakan makro yang pelaksanaannya bersifat strategis dan operasional dengan mempertimbangkan aspek waktu yang ketat. Dalam pencapaiannya, pembangunan daerah terpencil dan perbatasan perlu dilandasi semangat, konsistensi, serta etika/moral yang baik dari pihak penyelenggara baik dari pusat maupun di daerah kabupaten/kota, demi mengabdi kepada bangsa dan negara, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Disparitas kesejahteraan antar kawasan juga dapat diidentifikasi dari kesenjangan infrastruktur yang terjadi di antaranya, seperti jalan, jembatan, dan pelabuhan. Dalam konteks ini, pendekatan pembangunan infrastruktur berbasis wilayah semakin penting untuk diperhatikan. Dalam perkembangannya, pembangunan infrasturktur yang terjadi tidaklah selalu harus sama jumlahnya di tiap daerah, dengan infrastruktur yang dianggap berkeadilan adalah infrastruktur yang mampu mencukupi kebutuhan hidup manusia, sesuai dengan kebutuhan. Pembangunan jalan misalnya, yang merupakan salah satu prasarana penting dalam pengembangan suatu wilayah, memudahkan aksesibilitas manusia, barang dan jasa, mempunyai peranan untuk sarana pendukung kegiatan di bidang ekonomi, sosial, budaya, serta lingkungan, perlu diikuti dengan pengembangan akses transportasi yang mudah dan murah bagi masyarakat.

Sesuai dengan program kerja Bupati/Wakil Bupati Luwu, beberapa langkah yang akan dilakukan terkait dengan strategi ini adalah:

a. Mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur perkotaan
b. Mewujudkan dan pemerataan pembangunan infrastruktur pada wilayah kecamatan dan desa
c. Penyediaan kebutuhan air bersih yang cukup dan berkualitas bagi masyarakat, industri serta jenis usaha lainnya
d. Mengembangkan sarana dan prasarana transportasi darat yang dapat menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Luwu
e. Mengembangkan sarana dan prasarana transportasi laut dan udara yang dapat memudahkan mobilitas manusia maupun barang untuk keluar dan masuk daerah
f. Pembangunan jalan baru dengan tujuan untuk pembukaan daerah terpencil dan tertinggal
g. Penataan dan pembangunan infrastruktur rencana ibu kota pemekaran Kabupaten Luwu Tengah

6. **Pembangunan infrastruktur perkotaan dan lingkungan permukiman**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang merupakan kebutuhan dasar manusia, dan yang mempunyai peran yang sangat strategis dalam pembentukan watak serta kepribadian bangsa sebagai salah satu upaya membangun manusia Indonesia seutuhnya, berjati diri, mandiri, dan produktif.

Rumah mempunyai fungsi yang multidimensi. Selain fungsi fisik, rumah juga mempunyai fungsi sosial dan ekonomi yang dapat terlihat dari pemanfaatannya. Agar dapat berfungsi secara layak, rumah harus dilengkapi infrastruktur dasar seperti taman, ruang terbuka, jaringan jalan dan sistem transportasi, jaringan listrik dan air minum. Penyediaan tersebut harus sesuai dengan tata ruang yang ada sehingga dapat mendukung berbagai kegiatan sosial dan ekonomi baik dalam skala lingkungan perumahan maupun kota.

Pemerintah dan pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab untuk menjadi fasilitator, memberikan bantuan dan kemudahan kepada masyarakat, serta melakukan penelitian dan pengembangan yang meliputi berbagai aspek yang terkait, antara lain, tata ruang, pertanahan, prasarana lingkungan, industri bahan dan komponen, jasa konstruksi dan rancang bangun, pembiayaan, kelembagaan, sumber daya manusia, kearifan lokal, serta peraturan perundang-undangan yang mendukung. Beberapa program kerja Bupati/Wakil Bupati pada point di atas dapat dijadikan sebagai langkah dalam penerapan strategi ini.

7. **Mengembangkan koperasi dan UMKM serta penanganan angka pengangguran**

Penanggulangan kemiskinan yang komprehensif memerlukan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha (sektor swata) dan masyarakat merupakan pihak-pihak yang memiliki tanggung jawab sama terhadap penanggulangan kemiskinan termasuk koperasi dan UMKM. Pemerintah telah melaksanakan berbagai program dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar warga negara secara layak, meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat miskin, penguatan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat serta melaksanakan percepatan pembangunan daerah tertinggal dalam upaya mencapai masyarakat Indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan.

Pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan salah satu indikatornya adalah pendapatan riel per kapita. Pendapatan per kapita dapat diartikan sebagai penerimaan yang diperoleh rumah tangga yang dapat dibelanjakan untuk konsumsi, yaitu yang dikeluarkan untuk pembelian barang konsumtif dan jasa-jasa yang dibutuhkan rumah tangga bagi pemenuhan kebutuhan. Rendahnya pertumbuhan pendapatan per kapita berarti mencerminkan rendahnya pertumbuhan ekonomi. Melalui pengelolaan koperasi dan UMKM secara profesional dan bantuan pemerintah terhadap akses permodalan, pemerataan pendapatan masyarakat dapat ditingkatkan.

Sesuai dengan program kerja Bupati/Wakil Bupati Luwu, beberapa langkah yang akan dilakukan terkait dengan strategi ini adalah:

a. Pengembangan koperasi, UMKM, pedagang tradisional melalui fasilitas bantuan modal usaha
b. Mendorong usaha ekonomi kreatif melalui pemberdayaan UMKM dan BUMDes
c. Memberikan kemudahan izin usaha bagi masyarakat kurang mampu

Dalam rangka mengantisipasi perkembangan pencari kerja yang terus meningkat di setiap tahunnya, perlu dilakukan upaya-upaya untuk membuka lapangan pekerjaan. Hal ini dapat dilakukan dengan mendorong peningkatan investasi dan meningkatkan aktivitas perekonomian daerah. Sehingga lapangan pekerjaan baik di sektor formal maupun informal mampu menampung tenaga kerja di seluruh wilayah sehingga angka pengangguran dapat diturunkan secara optimal.

Sesuai dengan program kerja Bupati/Wakil Bupati Luwu, beberapa langkah yang akan dilakukan terkait dengan strategi ini adalah:

a. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan memanfaatkan potensi sumberdaya wilayah dan modal sosial untuk meningkatkan daya saing, menarik investasi, dan menciptakan kesempatan kerja;
b. Meningkatkan kesejahteraan buruh dan pekerja pada sektor swasta melalui peningkatan upah minimum kabupaten;
c. Pelatihan calon tenaga kerja di BLK sesuai kebutuhan penyedia lapangan kerja;
d. Peningkatan daya saing pemuda melalui fasilitasi berbagai sertifikasi di bidang jasa konstruksi, kuliner dan pariwisata;
e. Menciptakan lapangan kerja dengan mengundang investor untuk menanamkan modal di wilayah Kabupaten Luwu.

8. **Mewujudkan kemandirian pangan dan ekonomi kerakyatan yang tangguh berbasis agribisnis**

Bidang pertanian merupakan bidang pekerjaan yang paling dominan dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Luwu karena keadaan wilayah yang merupakan daerah dengan potensi pertanian yang sangat besar. Fasilitasi di bidang permodalan, peningkatan keahlian, dan akses pasar produk pertanian perlu ditingkatkan. Oleh karena itu kerjasama perangkat daerah perlu dikembangkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani melalui strategi ini, khususnya Dinas Perdagangan, Dinas Pertanian dan Dinas Ketahanan Pangan.

Pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan nilai tambah hasil pertanian merupakan bagian dari penanggulangan kemiskinan. Perberdayaan masyarakat miskin bertujuan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dan meningkatkan kondisi sosial ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat yang miskin dan berpotensi menjadi miskin. Pemberdayaan dimaknai sebagai suatu kegiatan untuk meningkatkan kemampuan yang sudah ada menjadi lebih baik, dengan menggunakan metode, proses, program dan upaya yang digerakkan pihak yang berwenang (memiliki otoritas) sesuai dengan undang-undang demi mendatangkan hasil dan manfaat yang lebih dari kondisi sebelumnya. Beberapa langkah yang dilakukan adalah:

a. Mewujudkan sistem pertanian berkelanjutan yang efisien, berbasis Iptek dan sumberdaya lokal, serta berwawasan lingkungan melalui pendekatan sistem agribisnis
b. Memberikan bantuan bibit gratis (pertanian, peternakan, dan perikanan) kepada petani dan nelayan
c. Meningkatkan kualitas penyuluh bidang pertanian, peternakan dan perikanan
d. Mendorong terwujudnya sistem kemitraan usaha dan perdagangan komoditas pertanian yang sehat, jujur dan berkeadilan
e. Memberikan bantuan modal usaha dan pendampingan kepada kegiatan pengolahan hasil produksi pertanian dan perikanan
f. Melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat dalam melakukan pendampingan pemberdayaan

9. **Peningkatan Ketentraman dan ketertiban umum**

Budaya dan seni daerah merupakan kekayaan bangsa yang harus diperhatikan secara serius dan seksama, terutama dalam memasuki era otonomi daerah. Hal ini dikarenakan budaya daerah dapat memberi andil yang sangat besar dalam pembentukan jati diri bangsa dan proses

regenerasi bangsa, terlebih untuk Kabupaten Luwu yang memiliki sejarah yang gemilang dimasa lalu. Pada masa sekarang ini seni budaya daerah sudah mulai terkikis dan tergerus oleh budaya luar.

Budaya daerah diharapkan menjadi fundamen utama dalam pembentukan jati diri bangsa karena jati diri merupakan karakteristik jiwa bangsa yang bersumber dari akar budaya daerah masing-masing. Maka dengan sendirinya akan memberi jati diri pada setiap generasi anak Bangsa Indonesia di Kabupaten Luwu. Dengan masyarakat yang berbudaya, ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan akan dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat.

a. Peningkatan pemahaman, pengamalan dan penghayatan nilai-nilai keagamaan
b. Peningkatan kualitas pendidikan agama dan pendidikan keagamaan
c. Pembinaan kelembagaan keagamaan dengan koordinasi kegiatan keagamaan dengan seluruh stakeholders
d. Peningkatan pelayanan kehidupan beragama dengan fasilitasi pengembangan sarana dan prasarana keagamaan
e. Memberikan insentif kepada Pegawai Syara', Pendeta, Guru Mengaji, Guru TPA dan guru sekolah minggu
f. Pelestarian dan pemberdayaan budaya lokal

10. Mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan desa serta pemberdayaan masyarakat desa

Pembangunan pada hakekatnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat agar makmur dan berkeadilan. Kebijakan untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan pemerintah daerah di segala bidang terus diupayakan dan dimaksimalkan dalam rangka melaksanakan pembangunan. Pemberdayaan pemerintahan dan masyarakat desa adalah pemberdayaan pemilikan faktor-faktor produksi, pemberdayaan penguasaan distribusi dan pemasaran, pemberdayaan masyarakat untuk mendapatkan gaji/upah yang memadai, dan pemberdayaan masyarakat untuk memperoleh informasi, pengetahuan dan ketrampilan, yang harus dilakukan pada beberapa aspek, baik dari aspek masyarakatnya sendiri, mapun aspek kebijakannya.

Karena persoalan atau isu strategis perekonomian masyarakat bersifat lokal dan problem spesifik, maka strategi untuk meningkatkan keberdayaan pemerintahan dan masyarakat desa juga harus spesifik dan menurut kondisi lokal. Pemahaman ini harus diketahui oleh aparatur pemerintahan desa agar mereka mampu merumuskan dan melaksanakan

kebijakan yang efektif dalam memberdayakan masyarakat desa. Salah satu langkah penting untuk melaksanaan strategi ini adalah dengan mengembangkan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di setiap kecamatan sesuai dengan amanat peraturan perundangan. Beberapa langkah yang dilakukan adalah:

a. Meningkatkan kapasitas penyelenggara pemerintahan desa
b. Pembinaan dan pengembangan BUMDes
c. Mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur pedesaan

11. Menciptakan iklim investasi yang kondusif berbasis pembangunan berkelanjutan

Iklim investasi di Kabupaten Luwu masih belum kondusif mengingat infrastruktur perhubungan belum optimal dalam pengembangannya, khususnya ke daerah-daerah yang memiliki potensi unggulan. Hal ini menjadi ganjalan bagi investor dalam menanamkan modalnya di Kabupaten Luwu. Masih rendahnya kontribusi industri pengolahan menjadi salah satu parameter minimnya investasi yang digelontorkan investor.

Investasi merupakan salah satu komponen penting dalam pembangunan ekonomi karena mempunyai keterkaitan dengan keberlangsungan kegiatan ekonomi di masa yang akan datang. Semakin banyak dan tinggi nilai investasi, semakin besar pula dampak dan manfaat seperti menyerap tenaga kerja, optimalisasi sumber daya alam, serta meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat di daerah. Selama lima tahun ke depan, penguatan investasi akan ditempuh oleh pemerintah berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) melalui dua pilar kebijakan yaitu peningkatan Iklim Investasi dan dan Iklim Usaha untuk meningkatkan efisiensi proses perijinan bisnis; dan peningkatan Investasi yang inklusif terutama dari investor domestik. Kedua pilar kebijakan ini akan dilakukan secara terintegrasi baik di tingkat pusat maupun daerah.

Pada pilar pertama, arah kebijakan yang ditempuh adalah menciptakan iklim investasi dan iklim usaha yang lebih berdaya saing, baik di tingkat pusat maupun daerah, yang dapat meningkatkan efisiensi proses perijinan, meningkatkan kepastian berinvestasi dan berusaha di indonesia, serta mendorong persaingan usaha yang lebih sehat dan berkeadilan.

Adapun pada pilar kedua, arah kebijakan yang ditempuh adalah mengembangkan dan memperkuat investasi di sektor riil, terutama yang berasal dari sumber investasi domestik, yang dapat mendorong pengembangan investasi dan usaha di Indonesia secara inklusif dan berkeadilan terutama pada sektor produktif yang mengutamakan sumber daya lokal. Beberapa langkah yang dilakukan adalah:

a. Menciptakan stabilitas iklim politik, sosial dan ekonomi
b. Menciptakan iklim investasi dan usaha yang kondusif berwawasan lingkungan dan sistem pengupahan yang berkeadilan
c. Memperbaiki kondisi/menyediakan infrastruktur dasar (listrik, telekomunikasi dan prasarana jalan dan pelabuhan)
d. Pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal (investasi) di daerah mengacu pada Permendagri Nomor 64 Tahun 2012

12. Mengoptimalkan pengundangan dan penegakan produk hukum daerah serta meningkatkan keberdayaan perempuan

Pengaturan, pemberdayaan, pembinaan dan pembangunan merupakan langkah-langkah stratejik dalam meningkatkan efektivitas pembangunan daerah. Oleh karena itu, setiap perangkat daerah harus menerapkan langkah-langkah tersebut guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing. Keberhasilan dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang efektif dan efisien akan menghasilkan kepercayaan masyarakat kepada penyelenggara pemerintahan daerah.

Penyelenggaraan pembangunan daerah membutuhkan berbagai regulasi untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Regulasi secara umum merupakan suatu aturan yang dibuat untuk membantu mengendalikan suatu kelompok lembaga atau organisasi dan masyarakat demi mencapai tujuan tertentu dalam kehidupan bersama, bermasyarakat dan bersosialisasi. Regulasi dibuat melalui proses tertentu dimana suatu kelompok masyarakat atau lembaga sepakat untuk mengikuti atau terikat pada aturan tertentu yang telah dibuat untuk mencapai tujuan bersama. Regulasi merupakan kebutuhan pemerintah daerah untuk menjalankan fungsi pelayanan, sebagai pengatur, dan juga sebagai pengelola usaha untuk menghasilkan pendapatan. Oleh karena itu, dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan, strategi untuk menetapkan regulasi di berbagai bidang kehidupan masyarakat serta penegakannya merupakan hal yang tepat.

Pemberdayaan dan pembinaan merupakan langkah selanjutnya yang harus dioptimalkan dengan menggunakan strategi yang baik. Potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia di Kabupaten Luwu sangat potensial untuk terwujudnya tujuan pembangunan melalui pemberdayaan dan pembinaan yang tepat sasaran.

Selanjutnya, pembangunan dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan. Penyelenggara pemerintahan harus lebih mengutamakan langkah pemberdayaan dibandingkan dengan pembangunan, khususnya pemberdayaan terhadap perempuan. Disamping itu, pembangunan juga harus memanfaatkan semaksimal mungkin sumber-sumber pendanaan yang ada, baik dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun dana masyarakat lainnya.

a. Mendorong regulasi daerah yang menjamin kepastian hukum dan kemudahan investasi
b. Memperkuat regulasi yang menjamin SPM pada bidang pelayanan dasar untuk publik
c. Meninjau kembali Perda yang berdampak pada tidak kondusifnya keuangan daerah, terjadinya ekonomi biaya tinggi, dan menghambat pertumbuhan ekonomi
d. Memberikan layanan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat kurang mampu
e. Melakukan kerjasama dengan Perguruan Tinggi, LSM, Ormas, dan OKP dalam melakukan kampanye dan advokasi hak-hak hukum kepada masyarakat

13. Mengoptimalkan implementasi kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta manajemen penanggulangan bencana

Perubahan ekosistem lingkungan yang paling utama disebabkan oleh perilaku masyarakat yang kurang baik dalam pemanfaatan sumber-sumber daya dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Apabila ekosistem lingkungan tercemar dan rusak maka akan berdampak buruk bagi kelanjutan dari keberadaan sumber daya alam yang akhirnya dapat menurunkan kualitas kehidupan masyarakat. Upaya yang dilakukan untuk memelihara kualitas lingkungan dengan cara mengelola sumber daya alam berwawasan lingkungan hidup dan berkelanjutan.

Pengelolaan sumber daya alam merupakan usaha secara sadar dengan cara menggali sumber daya alam, tetapi tidak merusak sumber daya alam lainnya sehingga dalam penggunaannya harus memerhatikan pemeliharaan dan perbaikan kualitas dari sumber daya alam tersebut.

Pengelolaan sumber daya alam ini tidak hanya tugas pemerintah daerah saja, namun masyarakat juga berpartisipasi aktif dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Ketaatan dalam pemanfaatan lahan sesuai dengan RTRW menjadi strategi yang dianggap relevan dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Kabupaten Luwu tergolong wilayah yang rawan bencana, seperti halnya wilayah lain di Indonesia. Oleh karena itu, strategi penanggulangan bencana perlu menjadi salah satu kebijakan pemerintahan daerah. Pemerintah daerah membutuhkan langkah-langkah tertentu dalam melakukan penanggulangan bencana. Langkah pertama adalah membuat perencanaan. Dalam menyusun perencanaan diperlukan informasi akar permasalahan kebencanaan yang dihadapi oleh daerah yakni risiko bencana. Guna mengetahui risiko tersebut, maka dilakukan kajian risiko bencana.

Setelah mengetahui risiko bencana, maka langkah selanjutnya dalam penanggulangan bencana adalah melakukan pengelolaan risiko bencana tersebut. Kegiatan ini intinya adalah menentukan langkah, program, dan kegiatan yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menanggulangi risiko bencana. Kemudian langkah terakhir adalah membangun kewaspadaan dan kesiapsiagaan untuk respons yang lebih baik. Setelah mengetahui risiko bencana, menyusun upaya pengelolaan risiko bencana, dan melakukan investasi, maka berbagai pengetahuan tersebut perlu menjadi sikap dan perilaku sehari-hari. Cara yang ditempuh adalah dengan melakukan geladi atau latihan kesiapsiagaan. Adapun langkah-langkah yang dilakukan adalah:

Beberapa langkah yang dilakukan dalam strategi ini adalah:

a. Revisi Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten Luwu.
b. Penyelenggaraan tata ruang sesuai ketentuan perundang-undangan.
c. Penyusunan rencana teknis pengembangan kawasan rawan bencana.
d. Menjaga kuantitas dan kualitas sumberdaya alam secara berkelanjutan melalui rehabilitasi, konservasi dan peran serta masyarakat.
e. Meningkatkan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup dengan memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan.
f. Mewujudkan pencegahan kerusakan dan pengendalian pencemaran sumber daya alam dan lingkungan hidup.
g. Mengoptimalkan drainase dan aliran sungai guna mengurangi resiko banjir.
h. Menerbitkan peraturan-peraturan yang menunjang upaya pengendalian lingkungan hidup.

i. Melakukan kerjasama dengan tenaga ahli yang berkompeten dibidang penanggulangan dan penanganan bencana.

6.2. Arah Kebijakan

Arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan 5 (lima) tahunan guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan berkaitan dengan pengaturan waktu. Kebijakan tahunan yang belum terlaksana ditetapakan menjadi perhatian pada tahun berikutnya disamping kebijakan prioritas tahun berjalan.

Gambar 6.1
Tema Pembangunan Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024

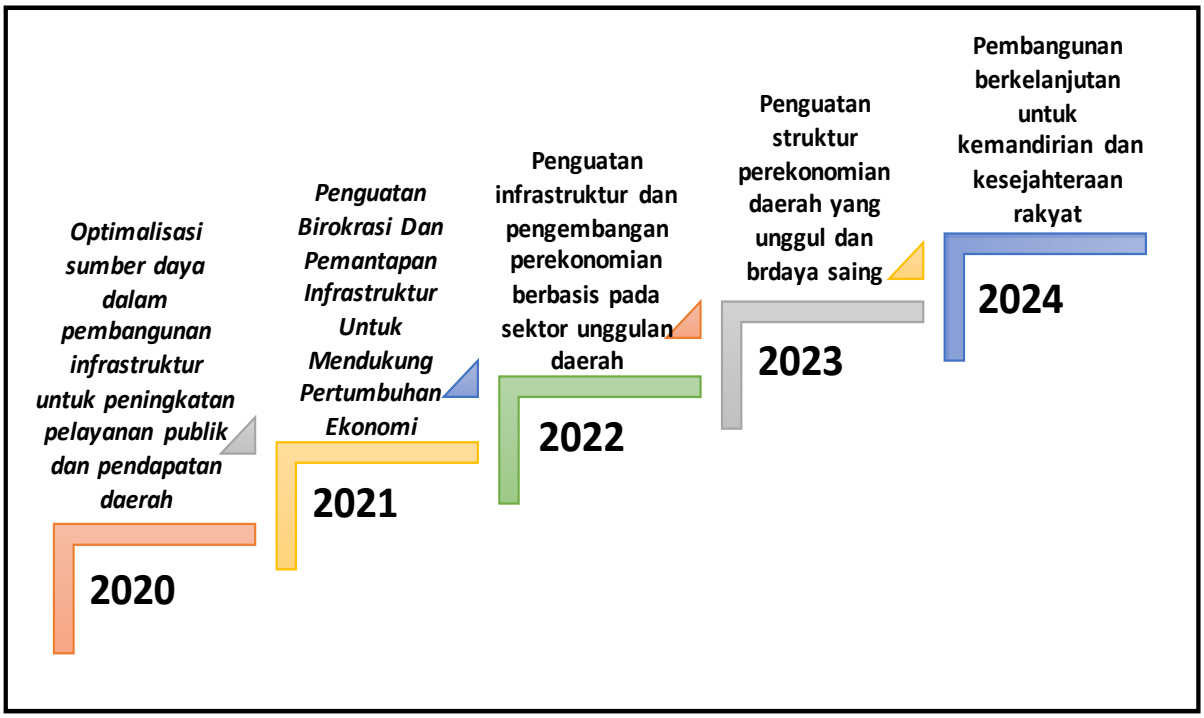

Penekanan prioritas kebijakan pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode keperiode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan limatahunan dalam RPJMD. Dengan prioritisas kebijakan tersebut bukan berarti program/kegiatan pembangunan operasional perangkat daerah di luar yang diprioritaskan tidak berjalan, tetap berjalan tetapi dengan penekanan strategis yang lebih rendah dibanding yang diprioritaskan. Kebijakan pembangunan dengan penekanan strategis lebih rendah dimaksud adalah program-program operasional pada semua OPD

yang melaksanakan program pembangunan daerah untuk memenuhi kewajiban penyelenggaraan semua urusan pemerintahan.

Menindaklanjuti tahapan dan fokus pembangunan diatas, arah kebijakan pembangunan Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 6.2.

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan
Kabupaten Luwu Tahun 2020-2021

RPJMD Pokok

Visi : Kabupaten Luwu Yang Maju, Sejahtera dan Mandiri dalam Nuansa Religi				
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**	
			Tahun 2020	**Tahun 2021**
Misi 1 : Mewujudkan Pemerintahan Yang Profesional, Berwibawa, Amanah, Transparan, dan Akuntabel				
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Perbaikan tatakelola dan tatalaksana pemerintahan.	Penilaian mandiri reformasi birokrasi, penyusunan Road Map reformasi birokrasi, penyusunan peta proses bisnis untuk terwujudnya good governanece. Penguatan sistem perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah serta penguatan keterbukaan informasi publik.	Pemantapan pelaksanaan reformasi birokrasi untuk terwujudnya good governanece, restrukturisasi OPD, pencanangan pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM pada 3 OPD. Pemantapan koordinasi dan kemitraan dengan DPRD. Pembangunan sistem perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang terpadu. Pengembangan keterbukaan informasi publik pada seluruh OPD serta penerapan SIPD.
	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah		Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.	Pengembangan inovasi dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik		Pembangunan sistem informasi pemerintah daerah yang terintegrasi dan basis data pembangunan daerah yang terpusat	Pengembangan sistem informasi pemerintah daerah yang terintegrasi dan basis data pembangunan daerah yang terpusat.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
			Tahun 2020	Tahun 2021
				Pembentukan Mall Pelayanan Publik (MPP)
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Yang Terjangkau Bagi Semua Lapisan Masyarakat				
Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Meningkatkan derajat pendidikan masyarakat	Peningkatan Kualitas dan Akses Pendidikan	Pembangunan sarana prasarana pendidikan, pengembangan kurikulum bermuatan lokal, pemberian tunjangan kepada guru di daerah terpencil, peningkatan mutu pendidikan.	Pembangunan sarana prasarana pendidikan, pengembangan kurikulum bermuatan lokal, pemberian tunjangan kepada guru di daerah terpencil, peningkatan mutu pendidikan dan penataan ketersediaan guru yang cukup di semua sekolah.
	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Peningkatan kualitas layanan kesehatan	Peningkatan sarana prasarana dan kapasitas tenaga kesehatan pada fasilitas kesehatan dan sosialisasi PHBS untuk mendukung UPP dan UKM. Menanggulangi dan mencegah penyebaran pandemi Covid-19.	Peningkatan sarana prasarana dan kapasitas tenaga kesehatan pada fasilitas kesehatan dan sosialisasi PHBS untuk mendukung UPP dan UKM, mengurangi dampak bencana non alam serta pemberlakuan PPKM pada seluruh kecamatan/desa/kelurahan.. Meningkatkan efektivitas program dengan memperbaiki indikator dan kelompok sasaran kegiatan
Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas Dan Berkelanjutan				
Meningkatnya ketersediaan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan	Meningkatkan aksebilitas dan konektifitas infrastruktur wilayah	Peningkatan aksesibilitas dan konektifitas wilayah	Peningkatan akses jalan pada daerah 3T (terpencil, tertinggal, terisolir), peningkatan jalan, pengembangan sarana prasarana jalan. Analisis pengembangan aksesibilitas.	Pembukaan jalan baru pada daerah terpencil, peningkatan jalan, pengembangan sarana prasarana jalan. Pengembangan fasilitas perhubungan dan analisis pengembangan aksesibilitas daerah.
	Meningkatkan kelayakan dan ketersediaan infrastruktur dasar	Peningkatan kualitas infrastruktur dasar dan lingkungan kawasan permukiman	Pengembangan irigasi pertanian dan perikanan dan pengembangan infrastruktur air minum	Pengembangan irigasi pertanian dan perikanan serta pengembangan infrastruktur air minum
	Meningkatkan PSU lingkungan kawasan permukiman		Penataan permukiman kumuh, rehabilitasi rumah layak huni dan peningkatan fasilitas umum	Penataan permukiman kumuh, rehabilitasi rumah layak huni dan peningkatan fasilitas umum

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
			Tahun 2020	Tahun 2021
Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Melalui Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perluasan Lapangan Kerja;				
Meningkatnya Perekonomian Daerah	Meningkatkan pendapatan masyarakat	Pengembangan koperasi dan UMKM	Pengembangan koperasi, UMKM, pedagang tradisional melalui fasilitasi bantuan modal usaha, promosi UMKM	Pengembangan koperasi, UMKM, pedagang tradisional melalui fasilitasi bantuan modal usaha dan kerjsama dengan pihak ketiga, promosi UMKM, pembentukan Satgas PEN
	Mengembangkan destinasi wisata	Pengembangan potensi wisata daerah	Identifikasi potensi wisata, pembinaan SDM pariwisata.	Penyusunan RIPPARDA, pengembangan destinasi wisata, pembinaan SDM pariwisata dan pelaku ekonomi kreatif.
	Menurunkan jumlah pengangguran	Peningkatan dan perluasan kesempatan kerja	Peningkatan kapasitas tenaga kerja melalui pelatihan keterampilan. Peningkatan pelayanan bagi pencari kerja melalui bursa kerja online dan kerjasama dengan pihak ketiga.	Peningkatan kapasitas tenaga kerja melalui pelatihan keterampilan. Peningkatan pelayanan bagi pencari kerja melalui bursa kerja online dan kerjasama dengan pihak ketiga.
Mewujudkan Ketahanan Pangan dan Perekonomian Daerah Yang Tangguh Berbasis Agribisnis				
Meningkatnya hasil pangan dan kemandirian pangan sebagai penopang kesejahteraan masyarakat	Meningkatkan perekonomian daerah berbasis agribisnis	Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	Pemberian bantuan bibit kepada kelompok tani, peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian, dan pengembangan komunikasi antara penyuluh dan kelompok tani. Pengembangan kapasitas petani dan mekanisasi pertanian.	Pemberian bantuan bibit kepada kelompok tani, peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian, dan pengembangan komunikasi antara penyuluh dan kelompok tani. Pengembangan kapasitas petani dan mekanisasi pertanian.
Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama Dalam Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Luwu Yang Religius				
Terwujudnya kehidupan masyarakat yang tertib, aman dan religius	Menurunkan angka kriminalitas	Meningkatkan pengamalan nilai-nilai agama dan budaya	Aktualisasi kehidupan beragama, koordinasi, pembinaan, pengembangan sarana prasarana keagamaan, pemberian instentif bagi pemangku kepentingan, serta pengembangan budaya lokal	Aktualisasi kehidupan beragama, koordinasi, pembinaan, pengembangan sarana prasarana keagamaan, pemberian instentif bagi pemangku kepentingan, serta pengembangan budaya lokal
Optimaslisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa				

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
			Tahun 2020	**Tahun 2021**
Meningkatnya keberhasilan pembangunan Desa	Berkembangnya Perekonoman Desa	Pemberdayaan pemerintahan dan masyarakat desa	Pengaturan kewenangan desa, pembinaan kepada aparatur pemerintahan desa, pembinaan BUMDes	Pembinaan pelaksanaan kewenangan desa, pembinaan kepada aparatur pemerintahan desa, pembinaan BUMDes
Meningkatkan Investasi Berbasis Pembangunan Berkelanjutan				
Meningkatnya Nilai Investasi	Meningkatnya realisasi investasi	Peningkatan iklim investasi	Peningkatan koordinasi dengan stakeholder terkait, peningkatan pelayanan untuk kemudahan investasi	Peningkatan koordinasi dengan stakeholder terkait, peningkatan pelayanan untuk kemudahan investasi, promosi, dan penyusunan regulasi yang mendukung investasi
Penegakan Supremasi Hukum, Hak Asasi Manusia, Untuk Mendorong Partispasi Publik				
Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Daerah	Meningkatkan kualitas penegakan dan perlindungan hukum	Optimalisasi pengundangan dan penegakan produk hukum daerah	Penyusunan produk hukum yang dibutuhkan dan sosialisasi peraturan perundang-undangan serta penegakan Perda	Penyusunan produk hukum yang dibutuhkan dan sosialisasi peraturan perundang-undangan serta penegakan Perda
	Meningkatkan perlindungan sosial terhadap penyandang masalah sosial	Peningkatan perlindungan sosial	Pemberian perlindungan sosial bagi PMKS, dukungan terhadap program pemerintah terkait dengan pembangunan di bidang sosial	Pemberian perlindungan sosial bagi PMKS, dukungan terhadap program pemerintah terkait dengan pembangunan di bidang sosial
	Meningkatnya pemberdayaan gender dan perlindungan terhadap perempuan dan anak	Peningkatan pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak	Pelayanan terhadap korban kekerasaan bagi perempuan dan anak dan sosialisasi peraturan perundangan	Pelayanan terhadap korban kekerasaan bagi perempuan dan anak dan sosialisasi peraturan perundangan
Mewujudkan Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Serta Penanggulangan Bencana				
Terjaganya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup	Meningkatkan pengawasan terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Penetapan peraturan terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup, penanganan sampah, pencegahan kerusakan dan pengendalian pencemaran suber daya alam dan lingkungan hidup	Sosialisasi dan implementasi peraturan terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup, penanganan sampah, pencegahan kerusakan dan pengendalian pencemaran suber daya alam dan lingkungan hidup

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
			Tahun 2020	Tahun 2021
	Meningkatnya kualitas pengelolaan bencana	Peningkatan kapasitas manajemen penanggulangan bencana	Penetapan peraturan terkait dengan mitigasi dan penangulangan bencana, pengembangan kapasitas kelembagaan, penyusunan kajian,	Sosialisasi dan implementasi peraturan terkait dengan mitigasi dan penangulangan bencana, pengembangan kapasitas kelembagaan, penyusunan kajian,

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan
Kabupaten Luwu Tahun 2022-2024
RPJMD Perubahan

Visi : Kabupaten Luwu Yang Maju, Sejahtera dan Mandiri dalam Nuansa Religi

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan		
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Mewujudkan Pemerintahan Yang Profesional, Berwibawa, Amanah, Transparan, dan Akuntabel					
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Strategi 1 Mengoptimalkan penerapan prinsip Good Governance	Pemantapan pelaksanaan reformasi birokrasi pada setiap OPD, pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM pada beberapa OPD. Penguatan koordinasi dan kemitraan dengan DPRD. Peningkatan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan daerah. Pembangunan sistem informasi pemerintah daerah yang terintegrasi dan basis data pembangunan daerah yang terpusat. Pemantapan keterbukaan informasi publik pada seluruh OPD. Penerapan merit system dalam penerimaan dan pengembangan pegawai	Pemantapan pelaksanaan reformasi birokrasi pada setiap OPD, pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM pada beberapa OPD. Penguatan koordinasi dan kemitraan dengan DPRD. Peningkatan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan daerah. Pemantapan sistem informasi pemerintah daerah yang terintegrasi dan basis data pembangunan daerah yang terpusat. Pemantapan keterbukaan informasi publik pada seluruh OPD. Penerapan merit system dalam penerimaan dan pengembangan pegawai	Pemantapan pelaksanaan reformasi birokrasi pada setiap OPD, pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM pada beberapa OPD Penguatan koordinasi dan kemitraan dengan DPRD. Penerapan merit system dalam pembinaan dan pengembangan pegawai. Penguatan sistem informasi pemerintah daerah yang terintegrasi dan basis data pembangunan daerah yang terpusat. Pemantapan keterbukaan informasi publik pada seluruh OPD. Penerapan merit system dalam penerimaan dan pengembangan pegawai

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan		
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Strategi 2 Meningkatkan kapasitas fiskal daerah	Pengembangan inovasi dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah. Penetapan target untuk masing-masing objek PAD. Pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Optimalisasi pemanfaatan asset daerah	Optimalisasi pendapatan daerah. Evaluasi pencapaian target pendapatan asli daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Optimalisasi pemanfaatan asset daerah.	Optimalisasi pendapatan daerah. Evaluasi pencapaian target pendapatan asli daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Optimalisasi pemanfaatan asset daerah.
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Yang Terjangkau Bagi Semua Lapisan Masyarakat					
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	Meningkatkan derajat pendidikan masyarakat	Strategi 3 Meningkatkan pembangunan pendidikan	Pembangunan sarana prasarana dan akses terhadap pendidikan, bantuan pendidikan, pengembangan kurikulum bermuatan lokal, pemberian tunjangan kepada guru di daerah terpencil, peningkatan mutu pendidikan dan penataan ketersediaan guru yang cukup di semua sekolah. Meningkatkan peran serta masyarakat terhadap kegiatan pendidikan formal dan non formal Pengelolaan data dan informasi pembangunan pendidikan.	Pembangunan sarana prasarana dan akses terhadap pendidikan, bantuan pendidikan pengembangan kurikulum bermuatan lokal, pemberian tunjangan kepada guru di daerah terpencil, peningkatan mutu pendidikan dan penataan ketersediaan guru yang cukup di semua sekolah. Meningkatkan peran serta masyarakat terhadap kegiatan pendidikan formal dan non formal Pengelolaan data dan informasi pembangunan pendidikan.	Pembangunan sarana prasarana dan akses terhadap pendidikan, bantuan pendidikan pengembangan kurikulum bermuatan lokal, pemberian tunjangan kepada guru di daerah terpencil, peningkatan mutu pendidikan dan penataan ketersediaan guru yang cukup di semua sekolah. Meningkatkan peran serta masyarakat terhadap kegiatan pendidikan formal dan non formal Pengelolaan data dan informasi pembangunan pendidikan.
	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Strategi 4 Meningkatkan pemerataan layanan	Peningkatan sarana prasarana dan kapasitas tenaga kesehatan pada	Peningkatan sarana prasarana dan kapasitas tenaga kesehatan pada	Peningkatan sarana prasarana dan kapasitas tenaga kesehatan pada

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan		
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
		kesehatan yang berkualitas	fasilitas kesehatan dan sosialisasi PHBS untuk mendukung UPP dan UKM, serta mengurangi dampak bencana non alam. Pencapaian SPM. Penanganan AKI dan perbaikan gizi masyarakat; peningkatan ketersediaan dan kualitas serta pemerataan tenaga medis	fasilitas kesehatan dan sosialisasi PHBS untuk mendukung UPP dan UKM, serta mengurangi dampak bencana non alam. Pencapaian SPM. Penanganan AKI dan perbaikan gizi masyarakat; peningkatan ketersediaan dan kualitas serta pemerataan tenaga medis	fasilitas kesehatan dan sosialisasi PHBS untuk mendukung UPP dan UKM, serta mengurangi dampak bencana non alam. Pencapaian SPM. Penanganan AKI dan perbaikan gizi masyarakat; peningkatan ketersediaan dan kualitas serta pemerataan tenaga medis
Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas Dan Berkelanjutan					
Meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang berkualitas	Meningkatkan aksebilitas dan konektifitas wilayah	Strategi 5 Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur	Peningkatan akses jalan pada daerah 3T (terpencil, tertinggal, terisolir), peningkatan jalan, pengembangan sarana prasarana jalan. Pengembangan fasilitas perhubungan dan aksesibilitas angkutan darat ke wilayah kecamatan.	Peningkatan akses jalan pada daerah 3T (terpencil, tertinggal, terisolir), peningkatan jalan, pengembangan sarana prasarana jalan. Pengembangan fasilitas perhubungan dan aksesibilitas angkutan daerat ke wilayah kecamatan.	Peningkatan akses jalan pada daerah 3T (terpencil, tertinggal, terisolir), peningkatan jalan, pengembangan sarana prasarana jalan. Pengembangan fasilitas perhubungan dan aksesibilitas angkutan daerat ke wilayah kecamatan serta aksesibilitas angkutan laut.
	Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman	Strategi 6 Pengembangan infrastruktur perkotaan dan lingkungan permukiman	Pengembangan infrastruktur air minum dan air limbah. Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangannya pemukiman kumuh, rehabilitasi rumah layak huni, peningkatan fasilitas umum dan infrastruktur perkotaan.	Pengembangan infrastruktur air minum dan air limbah. Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangannya pemukiman kumuh, rehabilitasi rumah layak huni, peningkatan fasilitas umum dan infrastruktur perkotaan.	Pengembangan infrastruktur air minum dan air limbah. Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangannya pemukiman kumuh, rehabilitasi rumah layak huni, peningkatan fasilitas umum dan infrastruktur perkotaan.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan		
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Melalui Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perluasan Lapangan Kerja;					
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Meningkatkan pendapatan masyarakat	Strategi 7 Pengembangan koperasi dan UMKM	Peningkatan kapasitas dan kapabilitas koperasi dan UMKM. Peningkatan akses UMKM terhadap permodalan dan layanan perbankan. Pengembangan destinasi wisata, pembinaan SDM pariwisata dan pelaku ekonomi kreatif.	Peningkatan kapasitas dan kapabilitas koperasi dan UMKM. Peningkatan akses UMKM terhadap permodalan dan layanan perbankan, mendorong usaha ekonomi kreatif. Pengembangan destinasi wisata, pembinaan SDM pariwisata dan pelaku ekonomi kreatif.	Peningkatan kapasitas dan kapabilitas koperasi dan UMKM. Peningkatan akses UMKM terhadap permodalan dan layanan perbankan, mendorong usaha ekonomi kreatif serta pengembangan pariwisata daerah. Pengembangan destinasi wisata, pembinaan SDM pariwisata dan pelaku ekonomi kreatif.
		Strategi 8 Menurunkan angka pengangguran	Peningkatan daya saing tenaga kerja, peningkatan pelayanan bagi pencari kerja melalui bursa kerja online dan kerjasama dengan pihak ketiga.	Peningkatan daya saing tenaga kerja, peningkatan pelayanan bagi pencari kerja melalui bursa kerja online dan kerjasama dengan pihak ketiga.	Peningkatan daya saing tenaga kerja, peningkatan pelayanan bagi pencari kerja melalui bursa kerja online dan kerjasama dengan pihak ketiga.
Mewujudkan Ketahanan Pangan Dan Perekonomian Daerah Yang Tangguh Berbasis Agribisnis					
Meningkatkan produksi dan kemandirian pangan sebagai penopang kesejahteraan masyarakat	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada sektor unggulan daerah	Strategi 9 Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	Pengembangan irigasi pertanian dan peningkatan pengelolaan potensi perikanan. Pemberian bantuan bibit kepada kelompok tani, peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian, dan pengembangan komunikasi antara penyuluh dan kelompok tani.	Pengembangan irigasi pertanian dan peningkatan pengelolaan potensi perikanan. Pemberian bantuan bibit kepada kelompok tani, peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian, dan pengembangan komunikasi antara penyuluh dan kelompok tani.	Pengembangan irigasi pertanian dan peningkatan pengelolaan potensi perikanan. Pemberian bantuan bibit kepada kelompok tani, peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian, dan pengembangan komunikasi antara penyuluh dan kelompok tani.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan		
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
			Pengembangan sistem pertanian berkelanjutan. Pengembangan kapasitas petani dan mekanisasi pertanian. Peningkatan produktivitas komoditas pertanian dan kreativitas dan inovasi dalam pengelolaan produk pertanian.	Pengembangan sistem pertanian berkelanjutan berbasis sumber daya lokal. Pengembangan kapasitas petani dan mekanisasi pertanian. Peningkatan produktivitas komoditas pertanian dan kreativitas dan inovasi dalam pengelolaan produk pertanian.	Pemantapan sistem pertanian berkelanjutan berbasis Iptek dan sumber daya lokal serta mendorong kemitraan. Pengembangan kapasitas petani dan mekanisasi pertanian. Peningkatan produktivitas komoditas pertanian dan kreativitas dan inovasi dalam pengelolaan produk pertanian.
Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama Dalam Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Luwu Yang Religius					
Terwujudnya kehidupan masyarakat yang tertib, aman dan religius	Menurunkan angka kriminalitas	Strategi 10 Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	Aktualisasi kehidupan beragama, koordinasi, pembinaan, pengembangan sarana prasarana keagamaan, pemberian instentif bagi pemangku kepentingan, serta pengembangan budaya lokal. Peningkatan kualitas pendidikan agama dan pendidikan keagamaan. Pelestarian budaya lokal.	Aktualisasi kehidupan beragama, koordinasi, pembinaan, pengembangan sarana prasarana keagamaan, pemberian instentif bagi pemangku kepentingan, serta pengembangan budaya lokal. Peningkatan kualitas pendidikan agama dan pendidikan keagamaan. Pelestarian dan pemberdayaan budaya lokal	Aktualisasi kehidupan beragama, koordinasi, pembinaan, pengembangan sarana prasarana keagamaan, pemberian instentif bagi pemangku kepentingan, serta pengembangan budaya lokal. Peningkatan kualitas pendidikan agama dan pendidikan keagamaan. Pelestarian dan pemberdayaan budaya lokal
Optimaslisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa					
Meningkatkan pembangunan Desa	Meningkatkan perekonoman Desa	Strategi 11 Mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan desa serta	Peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur pemerintahan desa.	Peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur pemerintahan desa	Peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur pemerintahan desa

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan		
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
		pemberdayaan masyarakat desa	Peningkatan dan pengembangan pemberdayaan masyarakat desa.	Peningkatan dan pengembangan pemberdayaan masyarakat desa	Peningkatan dan pengembangan pemberdayaan masyarakat desa
Meningkatkan Investasi Berbasis Pembangunan Berkelanjutan					
Meningkatkan perekonomian daerah	Meningkatkan kuantitas dan kualitas industri pengolahan	Strategi 12 Menciptakan iklim investasi yang kondusif berbasis pembangunan berkelanjutan	Menciptakan iklim investasi yang kondusif, melakukan promosi potensi investasi daerah, memberikan kemudahan perizinan.	Menciptakan iklim investasi yang kondusif, melakukan promosi potensi investasi daerah, memberikan kemudahan perizinan.	Menciptakan iklim investasi yang kondusif, melakukan promosi potensi investasi daerah, memberikan kemudahan perizinan.
Penegakan Supremasi Hukum, Hak Asasi Manusia, Untuk Mendorong Partispasi Publik					
Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah	Menurunnya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan	Strategi 13 Mengoptimalkan pengundangan dan penegakan produk hukum daerah	Anggaran berbasis kinerja, penerapan asistensi, verifikasi dan evaluasi program berbasis outcome, pemerintahan yang tertib administrasi, taat azas dan tepat waktu. Pengoperasian Mall Pelayanan Publik sebagai sarana pelayanan terpadu bagi masyarakat Menyusun regulasi yang menjamin SPM pada bidang pelayanan dasar untuk publik. Memberikan layanan bantuan hukum dan sosialisasi tentang hak-hak hukum masyarakat.	Anggaran berbasis kinerja, peningkatan penerapan asistensi, verifikasi dan evaluasi program berbasis outcome, pemerintahan yang tertib administrasi, taat azas dan tepat waktu. Pengembangan operasi Mall Pelayanan Publik sebagai sarana pelayanan terpadu bagi masyarakat Memperkuat regulasi yang menjamin SPM pada bidang pelayanan dasar untuk publik. Memberikan layanan bantuan hukum dan sosialisasi tentang hak-hak hukum masyarakat.	Anggaran berbasis kinerja, peningkatan penerapan asistensi, verifikasi dan evaluasi program berbasis outcome, pemerintahan yang tertib administrasi, taat azas dan tepat waktu. Optimalisasi operasi Mall Pelayanan Publik sebagai sarana pelayanan terpadu bagi masyarakat Memberikan layanan bantuan hukum dan sosialisasi tentang hak-hak hukum masyarakat.
Mewujudkan Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Serta Penanggulangan Bencana					

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan		
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Terjaganya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup	Meningkatnya ketangguhan daerah menghadapi bencana	Strategi 14 Mengoptimalkan implementasi kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta manajemen penanggulangan bencana	Revisi Perda RTRW. Peningkatan pengawasan dan penegakan hukum dalam pemanfaatan SDA	Peningkatan pengawasan dan penegakan hukum dalam pemanfaatan SDA sesuai tata ruang daerah.	Peningkatan pengawasan dan penegakan hukum dalam pemanfaatan SDA sesuai tata ruang daerah..
			Meningkatkan kuantitas dan kualitas penanggulangan bencana. Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap manajemen penanggulangan bencana.	Meningkatkan kuantitas dan kualitas penanggulangan bencana. Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap manajemen penanggulangan bencana.	Meningkatkan kuantitas dan kualitas penanggulangan bencana. Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap manajemen penanggulangan bencana.

6.3. Program Pembangunan Daerah

Perumusan program pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan prioritas pembangunan daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan. Dalam RPJMD ini, program pembangunan daerah diprioritaskan karena posisinya yang strategis dalam mencapai tujuan dan sasaran. Arahan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 terkait dengan faktor-faktor yang menjadi bahan petimbangan dalam perumusan program dan kegiatan, antara lain adalah: 1) Pencapaian visi dan misi kepala daerah. 2) Pencapaian SDGs. 3) Pengentasan kemiskinan. 4) Pencapaian NSPK dan SPM. 5) Pendayagunaan potensi ekonomi daerah. 6) Pengembangan daerah terisolir.

Selain itu, program pembangunan daerah Kabupaten Luwu juga diarahkan untuk pencapaian prioritas pembangunan daerah sebagai berikut: 1) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik; 2) Pembangunan Manusia; 3) Pengembangan infrastruktur wilayah dan lingkungan permukiman; 4) Pemberdayaan ekonomi kerakyatan berbasis agribisnis; 5) Penurunan kesenjangan sosial ekonomi; dan 6) Pelestarian Lingkungan Hidup dan Pencegahan Bencana.

Proyek prioritas strategis daerah merupakan upaya mejawab isu isu pembangunan daerah melalui pelaksanaan pembangunan, khususnya pada kegiatan yang memiiki nilai strategis dan daya ungkit dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Proyek prioritas strategis daerah Kabupaten Luwu dimaksudkan untuk mendukung percepatan pencapaian tujuan pembangunan nasional melalui sinergitas perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan daerah dengan menerapkan prinsip kolaborasi sumber pendanaan yaitu APBN, APBD Provinsi Sulawesi Selatan, APBD Kabupaten Luwu, dan Swasta.

Proyek prioritas strategis daerah Sulawesi Selatan merupakan sinergitas antara arahan pembangunan kewilayahan dan proyek prioritas nasional (*Major Project*) dengan prioritas pembangunan daerah yang disajikan berdasarkan sasaran misi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 dan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024. Pelaksanaan proyek prioritas strategis daerah, indikasi pendanaannya dapat dimutakhirkan melalui RKP, RKPD Provinsi Sulawesi Selatan dan RKPD Kabupaten Luwu dengan mempertimbangkan kesiapan pelaksanaan, pemutakhiran besaran dan sumber pendanaan guna memastikan prioritas pembangunan dapat terlaksana secara lebih efektif dan efisien sesuai dengan perkembangan pembangunan. Daftar prioritas pembangunan daerah beserta sumber pendanaan dan tahun pelaksanaan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 6.3.

Rencana Proyek Prioritas Strategis Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2022-2024

No.	Prioritas Pembangunan dan Proyek Prioritas Strategis Daerah	Sumber Anggaran				Tahun Pelaksanaan
		APBN	APBD Prov. Sulsel	APBD Kab. Luwu	Swasta/ BUMN/D	
I.	Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik			√		
	• Pembangunan Mall Pelayanan Publik (MPP)					2022
	• Pengembangan reformasi birokrasi			√		2022-2024
	• Peningkatan kapasitas dan kapabilitas perangkat daerah			√		2022-2024
II.	Pembangunan Manusia					
	• Pembangunan prasarana dan utilitas sekolah			√		2022-2024
	• Pengembangan prasarana dan sarana Puskesmas dan fasilitas kesehatan lainnya			√		2022-2024
	• Pemberdayaan dan perlindungan perempuan			√		2022-2024
	• Pemenuhan hak anak			√		2022-2024
III.	Pengembangan infrastruktur wilayah dan lingkungan permukiman					
	• Pembangunan jalan menuju daerah terpencil, tetinggal dan terisolir			√		2022-2024
	• Peningkatan jalan	√	√	√	√	2022-2024
	• Peningkatan irigasi pertanian			√		2022-2024
	• Revitalisasi lapangan/fasilitas umum untuk menunjang fungsi hunian			√	√	2022-2024
	• Pembangunan Terminal Belopa			√		2022-2023
IV.	Pemberdayaan ekonomi kerakyatan berbasis agribisnis					
	• Revitalisasi tambak	√		√		2022-2023
	• Pembangunan kolam/empang beserta sarana dan prasarananya			√		2022-2023
V.	Penurunan kesenjangan sosial ekonomi					
	• Pengelolaan data terkait dengan pelayanan sosial dan keluarga miskin			√		2022-2023
VI.	Pelestarian Lingkungan Hidup dan Pencegahan Bencana					
	• Pemenuhan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan			√		2022-2023
	• Pencegahan dan rehabilitasi kerusakan lingkungan			√		2022-2023

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Luwu tahun 2019-2024, maka dirumuskan program pembangunan daerah yang merupakan implemetasi dari arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah. Program pembangunan daerah merupakan panduan dalam menentukan kegiatan prioritas perangkat daerah yang akan dilaksanakan selama lima tahun. Program pembangunan berdasarkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Luwu dipetakan dalam dua kategori yaitu Matriks Program Pembangunan Daerah (RPJMD Pokok) dan Matriks Program Pembangunan Daerah (RPJMD Perubahan) berdasarkan hasil pemetaan nomenklatur Program sesuai Permendagri 90 Tahun 2019. Matriks program pembangunan pada RPJMD Pokok dan RPJMD Perubahan disajikan pada tabel berikut.

Kode					Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Tahun 2020		Capaian Kinerja Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target	(Rp)	Target	(Rp)	
(1)					(2)	(	(4)	(5)	(6)	(7)			(18)
					Misi 1 : Mewujudkan pemerintahan yang profesional, berwibawa, amanah, transparan dan								
					Tujuan 1.								
					Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Profesional, Inovatif, dan Responsif	**Indeks Reformasi Birolrasi**		***n.a***	**Cukup**	**13.534.239**	**Cukup**	**9.250.196**	
					Sasaran 1.1.								
					Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	***Nilai SAKIP***		***CC***	***CC***	***7.092.651***	***B***	***3.413.449***	
4	02	01	20		Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH (Prioritas)	Skor LPPD	Angka	2.771	2.885	4.012.520	2.885	2.574.000	Inspektorat Daerah
4	02	01	21		Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan (Prioritas)	Cakupan SDM Apartaur yang mengikuti pelatihan dan lulus tes auditor	%	0	100,00	800.000	100,00	228.952	Inspektorat Daerah
4	03	01	21		Program Perencanaan Pembangunan Daerah (Prioritas)	Persentase penjabaran konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD dan APBD	%	100	100,00	1.434.909	100,00	91.942	Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah
4	03	01	15		Program Pengembangan Data/ Informasi Pembangunan Daerah (Prioritas)	Data dan informasi pencapaian sasaran RPJMD	dokumen	0	4	547.186	4	339.294	Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah
4	03	01	24		Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (Prioritas)	Cakupan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	%	60,00	100,00	298.036	100,00	179.261	Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah
					Sasaran 1.2.								
					Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	***Opini LKPD dari BPK RI***	***Jenis Opini***	***WTP***	***WTP***	***3.060.330***	***WTP***	***3.214.586***	

Kode					Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Tahun 2020		Capaian Kinerja Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target	(Rp)	Target	(Rp)	
4	04	05	40		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Anggaran (Prioritas)	Persentase OPD yang menyusun RKA sesuai ketentuan dan kebutuhan	%	0,00	100,00	1.487.124	100,00	1.969.813	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
4	04	05	43		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah (Prioritas)	Persentase SKPD dalam penatausahaan BMD secara akurat	%	0,00	96,00	513.131	96,00	434.318	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
4	04	06	44		Program Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah (Prioritas)	Persentase Realisasi Pajak Daerah terhadap target yang ditetapkan	%	97,19	98,99	1.060.076	98,99	810.454	Badan Pendapatan Daerah

Kode					Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Tahun 2020		Capaian Kinerja Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target	(Rp)	Target	(Rp)	
(1)					(2)	(	(4)	(5)	(6)	(7)			(18)
					Sasaran 1.3.								
					Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik	***Indeks Kepuasan Masyarakat***		***Baik***	***Baik***	***3.381.258***	***Baik***	***2.622.162***	
4	4	05	09		Program Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi ASN (Prioritas)	Cakupan penyelenggaraan pengadaan, pemberhentian, dan informasi ASN	0	n.a	100	668.049	100,00	828.979	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4	4	05	09		Program Penyelenggaraan Mutasi dan Penilaian Kinerja Aparatur (Prioritas)	Persentase penempatan SDM sesuai kompetensi	0	n.a	80	906.360	80,00	1.213.703	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4	4	05	09		Program Pengembangan Kompetensi Aparatur (Prioritas)	Persentase pejabat yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan formal sesuai eselon	0	n.a	100	1.806.849	100,00	579.479	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
					Misi 2 Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan yang terjangkau bagi semua lapisan								
					Tujuan 2.								
					Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	**Indeks Pembangunan Manusia**	**Angka**	**69,37**	**70,40**	**157.305.592**	**70,40**	**124.735.278**	

Kode					Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Tahun 2020		Capaian Kinerja Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target	(Rp)	Target	(Rp)	
					Sasaran 2.1.								
					Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	***Indeks Pendidikan***	***Angka***	***63,19***	***63,72***	***57.023.122***	***63,72***	***54.302.587***	
1	01	01	15		Program Pengembangan Pendidikan Non Formal (Prioritas)	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	%	35,15	60,04	335.000	60,04	1.629.418	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	16		Program Pembinaan Sekolah Dasar (Prioritas)	APM SD/MI/Paket A	%	95,51	98,23	29.985.478	98,23	30.373.869	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	17		Program Pembinaan Sekolah Menengah Pertama (Prioritas)	APM SMP/MTs/Paket B	%	80,07	83,64	21.860.594	83,64	22.213.662	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	20		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Prioritas)	Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	Persen	87,05	89,23	4.842.050	89,23	85.638	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Sasaran 2.2.								

Kode					Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Tahun 2020		Capaian Kinerja Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target	(Rp)	Target	(Rp)	
(1)					(2)	(	(4)	(5)	(6)	(7)			(18)
					Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	**Indeks Kesehatan**	**Tahun**	**76,31**	**76,55**	**100.282.470**	***76,55***	**70.432.691**	
1	02	01	16		Program Upaya Kesehatan Masyarakat (Prioritas)	Cakupan Persalinan yang ditolong Tenaga Kesehatan	%	69,84	85,00	54.996.395	85,00	1.047.879	Dinas Kesehatan
1	02	01	16		Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan (Prioritas)	Indeks Kepuasan Masyarakat	0	0,00	80,00	45.286.075	80,00	69.384.811	Dinas Kesehatan

Kode					Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Tahun 2020		Capaian Kinerja Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target	(Rp)	Target	(Rp)	
(1)					(2)	(	(4)	(5)	(6)	(7)			(18)
					Misi 3 Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan								
					Tujuan 3.								

Kode					Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Tahun 2020		Capaian Kinerja Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target	(Rp)	Target	(Rp)	
					Pemerataan pembangunan infrastruktur dasar yang berkualitas dan berkelanjutan	**Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur**		**n.a**	**Cukup**	**301.349.470**	**Cukup**	**165.494.227**	
					Sasaran 3.1.								
					Meningkatkan aksebilitas dan konektifitas infrastruktur wilayah	***Persentasi jalan kabutaen dalam kondisi mantap***		***21,84***	***23,87***	***188.580.219***	***23,87***	***119.268.687***	
1	03	01	14		Program Peningkatan Jalan dan Jembatan (Prioritas)	Persentase jaringan jalan kabupaten dengan aspal dan beton	%	58,11	61,83	174.554.004	61,83	15.031.347	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	01	15		Program Pembangunan Jalan dan Jembatan (Prioritas)	Tingkat mobilitasi (panjang jalan per luas wilayah)	Angka	0,8638	0,8643	4.250.000	0,86	55.390.586	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	01	18		Program Preservasi Jalan dan Jembatan (Prioritas)	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	%	21,17	22,24	9.400.000	22,24	48.508.814	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	09	01	17		Program peningkatan pelayanan angkutan darat, laut dan udara (Prioritas)	Jumlah arus penumpang angkutan umum	orang	411.055	415.055	376.215	415055,00	337.940	Dinas Perhubungan
					Sasaran 3.2.								
					Meningkatkan kelayakan dan ketersediaan infrastruktur dasar	***Persentase penduduk berakses air minum***	***persen***	***82,04***	***84,09***	***58.411.081***		***19.616.780***	
						Rasio jaringan irigasi	***persen***	***59,94***	***63,00***				
1	03	01	24		Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya (Prioritas)	Persentase irigasi dalam kondisi baik	Persen	36,33	37,24	27.014.729	37,24	7.668.451	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	01	27		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum (Prioritas)	Persentase penduduk yang berakses air minum berkelanjutan	%	80,04	80,96	31.396.352	80,96	11.948.330	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
					Sasaran 3.3.								

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Tahun 2020		Capaian Kinerja Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target	(Rp)	Target	(Rp)	

Kode					Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Tahun 2020		Capaian Kinerja Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target	(Rp)	Target	(Rp)	
(1)					(2)	(	(4)	(5)	(6)	(7)			(18)
					Meningkatkan PSU lingkungan kawasan permukiman	***Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak***	***persen***	***75,45***	***76,00***	***54.358.170***		***26.608.760***	
1	04	01	15		Program Pembangunan dan Penataan Lingkungan Kawasan Permukiman	Persentase kawasan kumuh kabupaten yang tertata	%	0	15,85	30.200.000	15,85	8.538.874	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
						Persentase lingkungan kawasan permukiman perdesaan yang tertata	%	0	4,83	-		-	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
						Persentase lingkungan kawasan permukiman perkotaan yang tertata	%	0	20,00	-		-	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	01	16		Program Pengembangan Perumahan (Prioritas)	Persentase rumah layak huni	%	20	20,54	8.634.420	20,54	6.637.805	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	01	17		Program Pembangunan dan Penataan PSU (Prioritas)	Cakupan penyelenggaraan PSU	Persen	n.a	100,00	15.523.750	100,00	11.432.081	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode					Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Tahun 2020		Capaian Kinerja Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target	(Rp)	Target	(Rp)	
(1)					(2)	(	(4)	(5)	(6)	(7)			(18)
					Misi 4 Mewujudkan pengembangan ekonomi kerakyatan melalui koperasi, usaha mikro kecil menengah dan perluasan lapangan kerja								
					Tujuan 4.								
					Meningkatnya perekonomian daerah	**Pertumbuhan ekonomi**	**persen**	**7,21**	**7,30**	**1.860.437**		**193.827**	
					Sasaran 4.1.								
					Meningkatnya pendapatan masyarakat	***PDRB perkapita***	***Juta Rp***	***13,97***	***29,87***	***573.478***		***66.982***	
						Indeks Gini		***0,362***	***0,360***				
2	11	01	20		Program Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro (Prioritas)	Persentase Usaha Mikro dan Menengah Aktif	%	30,00	30,35	428.594	30,35	-	Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian

Kode					Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Tahun 2020		Capaian Kinerja Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target	(Rp)	Target	(Rp)	
2	11	01	19		Program Peningkatan Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Prioritas)	Cakupan penyelenggaraan pengawasan	%	0,00	100	144.885	100,00	66.982	Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian
					Sasaran 4.2.								
					Mengembangkan destinasi wisata	***Jumlah obyek wisata unggulan yang dikembangkan***	***Obyek wisata***	***0***	***1***	***402.000***		***17.500***	
3	02	01	20		Program Pengembangan Destinasi wisata (Prioritas)	Jumlah destinasi wisata yang dikembangkan secara terpadu	Destinasi	0	6	200.000	6,00	-	Dinas Pariwisata
3	02	01	21		Program Pengembangan Ekonomi Kreatif (Prioritas)	Jumlah pelaku ekonomi kreatif Kabupaten Luwu	%	n.a	200	202.000	200,00	17.500	Dinas Pariwisata
					Sasaran 4.3.								
					Menurunnya jumlah pengangguran	***Tingkat pengangguran terbuka***	***persen***	***4,47***	***4,36***	***884.959***		***109.345***	
1	03	01	33		Program Pembinaan Jasa Konstruksi (Prioritas)	Tersedianya 3 (tiga) layanan informasi jasa konstruksi tingkat Kabupaten	%	0	100,00	185.100	100,00	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	01	01	15		Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja (Prioritas)	Cakupan pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi	%	41,00	100,00	485.780	100,00	42.673	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
2	01	01	16		Program Peningkatan Kesempatan Kerja (Prioritas)	Perluasan Kesempatan kerja sektor formal maupun informal	%	4.04	3,70	214.079	3,70	66.672	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
Kode					**Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah**	**Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/**	**Satuan (4)**	**Kondisi Kinerja Awal RPJMD**	**Target Kinerja Tahun 2020 Target (6)**	**(Rp) (7)**	**Capaian Kinerja Tahun 2020**		**Perangkat Daerah Penanggung**
					Misi 5 Mewujudkan ketahan pangan dan perekonomian daerah yang ibisnis								
					Tujuan 5.								

Kode					Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Tahun 2020		Capaian Kinerja Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target	(Rp)	Target	(Rp)	
					Meningkatkan hasil pangan dan kemandirian pangan sebagai penopang kesejahteraan masyarakat	**Skor Pola Pangan Harapan**	**Angka skor**	**76,27**	**77,29**	**3.752.872**		**3.620.274**	
					Sasaran 5.1.								
					Meningkatnya perekonomian daerah berbasis agribisnis	***Pertumbuhan PDRB sektor Pertanian***	***persen***	***7,04***	***7,20***	***3.752.872***		***3.620.274***	
3	03	01	25		Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Pertanian (Prioritas)	Persentase kelompok tani yang memperoleh prasarana dan	%	0	20,00	2.726.532	20,00	1.489.824	Dinas Pertanian
3	03	01	30		Program Peningkatan Sistem Penyuluh Pertanian (Prioritas)	Persentase penyuluh yang meningkat kapasitasnya	%	0	20,00	1.026.340	20,00	2.130.450	
					Misi 6 Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dalam mewujudkan masyarakat Kabupaten Luwu yang Religius								
					Tujuan 6								
					Terwujudnya kehidupan masyarakat yang tertib, aman dan religius	**Angka kriminalitas per 10.000 penduduk**	**persen**	**4,00**	**3,20**	**1.241.190**		**1.595.875**	
					Sasaran 6.1.								
					Menurunnya kasus menerima suap, penipuan dan penggelapan	***Persentase kasus suap, penipuan dan penggelapan***	***persen***	***44,48 (2016)***	***27,50***	***1.241.190***		***1.595.875***	
4	03	01	29		Program Optimalisasi Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Rakyat (Prioritas)	Cakupan penyelenggaraan pembangunan bidang kesejahteraan rakyat	%	100,00	100,00	1.056.360	100,00	1.525.885	Sekretariat Daerah (Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat)
2	16	01	17		Program Pengelolaan Budaya	Penyelenggaraan festival seni	kali	6	6,00	184.830	6,00	69.990	Dinas Pendidikan
					Misi 7 Optimalisasi otonomi desa dan pemberdayaan masyarakat desa								

Kode					Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Tahun 2020		Capaian Kinerja Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target	(Rp)	Target	(Rp)	
Kode					Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Tahun 2020		Capaian Kinerja Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target	(Rp)	Target	(Rp)	
(1)					(2)	(	(4)	(5)	(6)	(7)			(18)
					Tujuan 7.								
					Meningkatkan kemandirian Desa	**Persentase desa mandiri**	**persen**	**n.a**	**40,00**	**900.000**		**1.947.791**	
					Sasaran 7.1.								
					Berkembangnya kemandirian desa	***Jumlah BUMDes berprestasi di tingkat nasional***		***n.a***	***4***	***900.000***		***1.947.791***	
2	07	01	23		Program Pembangunan dan Pembinaan Usaha Ekonomi Desa (Prioritas)	Jumlah BUMDes Bersama	4	0	5	400.000	5,00	105.072	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
2	07	01	20		Program Pembinaan Pemerintahan Desa (Prioritas)	Persentase desa yang mampu melaksanakan tata laksana pemerintahan desa secara tertib	%	n.a.	100	500.000	100,00	1.842.720	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa

Kode					Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Ou	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Tahun 2020		Capaian Kinerja Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target (6)	(Rp) (7)	Target	(Rp)	
					Misi 8 Menciptakan iklim investasi dan usaha yang kondusif berwawasan								
					Tujuan 8.								
					Meningkatkan nilai investasi	**Nilai investasi PMA dan PMDN**	**Miliar Rp**	**16,69**	**17,11**	**1.611.196**		**296.226**	
					Sasaran 8.1.								
					Meningkatnya realisasi investasi	***Jumlah PMA dan PMDN yang berinvestasi***	***Perusahaan***	***13***	***13***	***1.611.196***		***296.226***	
								0,50	***1,00***				
2	10	01	20		Program Penyelenggaraan E-Government	Jumlah aplikasi dalam rangka e-gov yang telah digunakan Pemda Kabupaten Luwu	%	100,00	2,00	1.337.716	2,00	-	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian

Kode				Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Tahun 2020		Capaian Kinerja Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target	(Rp)	Target	(Rp)	
2	12	01	20	(Prioritas) Program Penyelenggaraan	Jumlah izin yang dikeluarkan berdasrkan SOP	%	50,00	65,00	273.480	65,00	296.226	
				Misi 9 Penegakan supremasi hukum, hak asasi manusia, untuk mendorong publikasi publik								
				Tujuan 9								
				Meningkatnya penegakan dan perlindungan hukum	**Cakupan penegakan dan perlindungan hukum**	**persen**	**100,00**	**100,00**	**12.144.129**		**10.588.771**	
				Sasaran 9.1.								
				Meningkatnya ketersediaan produk hukum daerah	***Cakupan ketersediaan produk hukum daerah***	***persen***	***100,00***	***80,00***	***10.756.118***		***10.450.157***	
1	05	02	23	Program Penegakan Peraturan Perundang- undangan (Prioritas)	Persentase Penegakan PERDA	%	78,00	79,95	656.847	79,95	85.071	Satuan Polisi Pamong Praja
4	04	01	15	Program Peningkatan Kualitas Peraturan Daerah (Prioritas)	Cakupan penyelenggaraan peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	%	100,00	100,00	5.872.615	100,00	3.177.032	Sekretariat DPRD
1	05	02	26	Program Peningkatan Perlindungan Masyarakat (Prioritas)	Cakupan penyelenggaraan perlindungan masyarakat	%	100,00	100,00	1.350.056	100,00	2.225.329	Satuan Polisi Pamong Praja
4	04	01	39	Program Penganggaran, Pengawasan dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase penyelesaian penyusunan PERDA sesuai Prolegda	%	100,00	100,00	2.876.600	100,00	4.962.725	Sekretariat DPRD
				Sasaran 9.2.								

Kode				Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/	Satuan (4)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Tahun 2020		Capaian Kinerja Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung
								Target (6)	(Rp) (7)			
				Meningkatkan perlindungan sosial terhadap penyandang masalah sosial	***30. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial***	***%***	***100,00***	***100,00***	***1.114.872***		-	
1	06	01	18	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial (Prioritas)	Persentase PMKS menerima Perlindungan dan Jaminan Sosial	%	0,00	100,00	1.114.872	100,00	-	Dinas Sosial

Kode				Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Tahun 2020		Capaian Kinerja Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target	(Rp)	Target	(Rp)	
				Sasaran 9.3.								
				Meningkatnya pemberdayaan gender dan perlindungan terhadap perempuan dan anak	***Indeks Pemberdayaan Gender***	***Angka Indeks***	***61,61***	***61,90***	***273.139***		***138.614***	
2	02	01	20	Program Peningkatan Kesetaraan Gender dan Ketahanan Keluarga (Prioritas)	Cakupan penyelenggaraan fungsi pemerintahan dalam rangka peningkatan kesetaraan gender dan ketahanan keluarga	%	n.a	35,71	173.139	35,71	83.051	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	02	01	21	Program Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak (Prioritas)	Cakupan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak	%	0	52,50	100.000	52,50	55.564	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				Misi 10 Mewujudkan kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan serta penanggulangan bencana								
				Tujuan :								
				Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	**Indeks kualitas lingkungan hidup**		**n.a**	**Cukup**	**4.150.000**		**8.826.287**	
				Sasaran 10.1.								
				Meningkatkan pengawasan terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	***Persentase pembinaan dan pengawasan izin PPLH dan PUU LH***	***persen***	***39,22***	***50,00***	***300.000***		***92.397***	
2	05	01	16	Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Cakupan penyelenggaraan Pengendalian	0	0	50	300.000	50,00	92.397	Dinas Lingkungan Hidup
				Sasaran 10.2.								
Kode				**Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah**	**Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/**	**Satuan (4)**	**Kondisi Kinerja Awal RPJMD**	**Target Kinerja Tahun 2020 Target (6)**	**(Rp) (7)**	**Capaian Kinerja Tahun 2020**		**Perangkat Daerah Penanggung**

Kode				Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Tahun 2020		Capaian Kinerja Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target	(Rp)	Target	(Rp)	
				Meningkatkan perlindungan sosial terhadap penyandang masalah sosial	***30. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial***	***%***	***100,00***	***100,00***	***1.114.872***		-	
1	06	01	18	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial (Prioritas)	Persentase PMKS menerima Perlindungan dan Jaminan Sosial	%	0,00	100,00	1.114.872	100,00	-	Dinas Sosial
				Sasaran 9.3.								
				Meningkatnya pemberdayaan gender dan perlindungan terhadap perempuan dan anak	***Indeks Pemberdayaan Gender***	***Angka Indeks***	***61,61***	***61,90***	***273.139***		***138.614***	
2	02	01	20	Program Peningkatan Kesetaraan Gender dan Ketahanan Keluarga (Prioritas)	Cakupan penyelenggaraan fungsi pemerintahan dalam rangka peningkatan kesetaraan gender dan ketahanan keluarga	%	n.a	35,71	173.139	35,71	83.051	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	02	01	21	Program Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak (Prioritas)	Cakupan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak	%	0	52,50	100.000	52,50	55.564	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				Misi 10 Mewujudkan kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan serta penanggulangan bencana								
				Tujuan :								
				Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	**Indeks kualitas lingkungan hidup**		**n.a**	**Cukup**	**4.150.000**		**8.826.287**	
				Sasaran 10.1.								
				Meningkatkan pengawasan terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	***Persentase pembinaan dan pengawasan izin PPLH dan PUU LH***	***persen***	***39,22***	***50,00***	***300.000***		***92.397***	
2	05	01	16	Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Cakupan penyelenggaraan Pengendalian	0	0	50	300.000	50,00	92.397	Dinas Lingkungan Hidup
				Sasaran 10.2.								

Kode					Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Tahun 2020		Capaian Kinerja Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target	(Rp)	Target	(Rp)	
Kode					Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Tahun 2020		Capaian Kinerja Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target	(Rp)	Target	(Rp)	
(1)					(2)	(	(4)	(5)	(6)	(7)			(18)
					Meningkatnya kualitas menejemen pengelolaan bencana	***Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)***	***Angka Indeks***	***n.a***	***30,00***	***3.850.000***		***8.733.890***	
1	06	02	28		Program Peningkatan Kesiapsiagaan Penanganan Penanggulangan Bencana (Prioritas)	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	100,00	100,00	150.000	100,00	1.210.697	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	31		Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran (Prioritas)	Persentase Pelayanan Penanganan Bencana Kebakaran yang terlapor	%	0,00	100,00	2.200.000	100,00	6.025.689	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1	03	01	17		Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong dan Pengendali Banjir (Prioritas)	Wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor yang dibangun turap/Talud/Bonjong dan Pengendali Banjir	meter	1.445	700	1.500.000	700,00	1.497.504	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Ajtgrtjgzraykarjyauysuhjszuntzuntrbxu

Thstrgjsryjkyhkt

Kode			Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impac	Satuan	Kondisi Awal (2019)	Tahun 2021 Target (8)	(9)	Tahun 2022 Target (10	(11	Tahun 2023 Target (12	(13	Tahun 2024 Target (14	(15	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2024) (16	(17	Perangkat Daerah Penanggung Jawab (18)
Misi 1 : Mewujudkan pemerintahan , berwibawa, amanah, transparan																	
			Tujuan 1.														
			Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih	**Indeks Reformasi Birolrasi**		***n. a***	**56,31 (CC)**	**283.122 .930**	**59,80 (CC)**	**288.163 .372**	**64,22 (B)**	**291.119 .454**	**67,25 (B)**	**293.793 .204**	**67,25 (B)**	**1.156.19 8.960**	
			Sasaran 1.1.														
			Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja	***Nilai SAKIP***		***51,78 (CC)***	***64,76 (B)***	***5.252. 851***	***69,51 (B)***	***6.879. 692***	***72,02 (B)***	***6.973. 841***	***78,80 (BB)***	***6.746. 594***	***78,80 (BB)***	***25.852. 978***	
2	1 6	0 2	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas	%	100, 00	100,00	1.569. 471	100,00	1.567. 240	100,00	1.567. 240	100, 00	1.567.2 40	100, 00	6.271. 192	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian
5	0	0	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan	Angk a	0,0 0	0,0 0	1.775. 423	0,0 0	1.793. 178	0,0 0	1.811. 109	0,0 0	1.829.2 21	-	7.208. 931	Badan Kepegawaian dan Pengembangan
6	0 1	0 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern	Angka	0,0 0	0,0 0	1.907. 956	0,0 0	3.519. 274	0,0 0	3.595. 492	0,0 0	3.350.1 33	-	12.372. 855	Inspektorat Daerah
				Persentase tindak lanjut temuan	%	100,00	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,	-	
				Persentase tindak lanjut temuan Inspektorat	%	100,00	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100, 00	-	
			Sasaran 1.2.														

Kode			Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impac	Satuan	Kondisi Awal (2019)	Tahun 2021 Target (8)	(9)	Tahun 2022 Target (10	(11	Tahun 2023 Target (12	(13	Tahun 2024 Target (14	(15	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2024) (16	(17	Perangkat Daerah Penanggung Jawab (18)
			Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan	***Ikhtisar Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI***	***Jenis Opini***	***WTP***	***WTP***	***273.577.561***	***WTP***	***276.239.567***	***WTP***	***279.001.962***	***WTP***	***281.791.982***	***WTP***	***1.110.611.072***	
5	02	02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase OPD yang	%	100	100	270.470	100	273.110	100	275.841	100	278.599	100	1.098.030	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
				Persentase Penerbitan SP2D yang Tepat Waktu	%	95,00	95,00		95,00		95,00		95,00		95,00		
				Perentase SKPD yang menyampaikan Laporan	%	98,00	98,00		98,00		98,00		98,00		98,00		
5	02	04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Realisasi Pajak Daerah terhadap target yang	%	70,63	98,99	3.098.330	86,98	3.129.313	86,98	3.160.606	90,74	3.192.212	90,74	12.580.462	Badan Pendapatan Daerah
				Persentase ketercapaian target penerimaan retribusi	%	98,99	98,99		98,99		98,99		98,99		98,99		
				Persentase Realisasi Penerimaan Dana Perimbangan terhadap Target	%	90,00	90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		
				Persentase realisasi penerimaan PBB dan	%	80,00	80,00		80,00		80,00		80,00		80,00		

Kode			Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Satuan	Kondisi Awal (201	Tahun 2021 Target	(Rp	Tahun 2022 Target	(Rp	Tahun 2023 Target	(Rp	Tahun 2024 Target	(Rp	Kondisi Kinerja Pada Akhir Target	(Rp	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(8)	(9)	(10	(11	(12	(13	(14	(15	(16	(17	(18)
Misi 2 Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat																	
			Tujuan 2.														
			Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	**Indeks Pembangunan Manusia**	**Angka**	**70.39**	**70,79**	**274.797.481**	**71,09**	**278.575.831**	**71,40**	**295.028.037**	**71,88**	**295.146.036**	**71,88**	**1.143.547.385**	
			Sasaran 2.1.														
			Meningkatkan derajat pendidikan	***Indkes Pendidikan***	***Angka***	***64,17***	***64,98***	***113.354.497***	***65,44***	***114.488.042***	***65,90***	***115.632.922***	***66,35***	***116.789.252***	***66,35***	***460.264.713***	
1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang	%	35,15	61,55	113.302.640	63,08	114.435.666	64,66	115.580.023	66,28	116.735.823	66,28	460.054.152	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam	%	98,21	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
				Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam	%	82,10	85,73		87,87		90,07		92,32		92,32		
1	01	04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA	Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi	%	88,01	91,46	51.857	93,74	52.376	96,09	52.900	98,49	53.429	98,49	210.561	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Sasaran 2.2.														
			Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	**Indeks Kesehatan**	**Angka**	**77,22**	**77,69**	**161.442.984**	**78,30**	**164.087.789**	**78,69**	**179.395.115**	**79,09**	**178.356.784**	**79,09**	**683.282.672**	

Kode			Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impac	Satuan	Kondisi Awal (2019)	Tahun 2021 Target (8)	(9)	Tahun 2022 Target (10	(11	Tahun 2023 Target (12	(13	Tahun 2024 Target (14	(15	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2024) (16	(17	Perangkat Daerah Penanggung Jawab (18)
1	02	02	PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Persentase indikator SPM yang dapat dicapai sesuai target	%	8,33	100,00	160.817.746	100,00	163.632.009	100,00	178.939.335	100,00	177.900.850	100,00	681.289.940	Dinas Kesehatan dan RSUD Batara
1	02	03	PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Puskesmas yang memiliki tenaga kesehatan	%	77,10	77,27	382.881	77,27	194.013	77,27	194.013	77,27	194.043	77,27	964.950	Dinas Kesehatan
1	02	04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN	Persentase Pemenuhan Izin Sediaan Farmasi	%	100,00	100,00	242.357	100,00	261.767	100,00	261.767	100,00	261.891	100,00	1.027.782	Dinas Kesehatan
Misi 3 Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang																	
			Tujuan 3.														
			Meningkatnya ketersediaan infrastruktur yang	**Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur**		**n.a**	**Cukup**	**175.491.454**	**Baik**	**181.045.101**	**Baik**	**180.570.154**	**Baik**	**182.313.303**	**Baik**	**#REF!**	
			Sasaran 3.1.														
			Meningkatkan aksebilitas dan	***Tingkat mobilitas***		***0,8638***	***0,8649***	***118.794.194***	***0,8654***	***120.436.544***	***0,8660***	***118.293.538***	***0,8665***	***118.189.051***	***34,9500***	***475.713.327***	
1	03	10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten	Angka	0,24	0,25	111.994.447	0,26	113.114.392	0,27	114.245.536	0,28	115.387.991	0,28	454.742.366	Dinas Pekerjaan Umum dan
2	15	02	PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN	Rasio konektivitas angkutan jalan	Angka	0,37	0,37	6.799.747	0,53	7.322.152	0,63	4.048.002	0,79	2.801.060	0,79	20.970.961	Dinas Perhubungan

Kode			Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Satuan	Kondisi Awal (2019)	Tahun 2021 Target	(Rp	Tahun 2022 Target	(Rp	Tahun 2023 Target	(Rp	Tahun 2024 Target	(Rp	Kondisi Kinerja Pada Akhir Target	(Rp	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(8)	(9)	(10	(11	(12	(13	(14	(15	(16	(17	(18)
			Sasaran 3.2.														
			Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman	***Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU***	***angka***	***0,97***	***0,97***	***56.697.260***	***0,97***	***60.608.557***	***0,98***	***62.276.616***	***0,98***	***64.124.252***	***0,98***	***243.706.685***	
1	03	02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian	%	36,02	37,24	19.562.903	37,30	19.758.532	37,36	19.956.118	37,41	20.155.679	37,41	79.433.232	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Persentase irigasi dalam kondisi	Angka	40,26	42,01		42,99		43,67		44,54		44,5		
1	03	03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan	%	47,94	49,90	11.930.777	51,15	12.050.085	52,43	12.170.586	53,74	12.292.291	53,74	48.443.739	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase jalan yang memiliki drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	%	50,30	50,50	2.534.017	50,60	2.559.357	50,70	2.584.951	50,80	2.610.800	50,80	10.289.124	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode			Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impac	Satuan	Kondisi Awal (2019)	Tahun 2021 Target (8)	(9)	Tahun 2022 Target (10	(11	Tahun 2023 Target (12	(13	Tahun 2024 Target (14	(15	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2024) (16	(17	Perangkat Daerah Penanggung Jawab (18)
1	03	05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah	%	84,52	86,53	14.364.159	87,64	16.757.801	88,80	16.902.879	89,02	17.049.407	89,02	65.074.246	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	04	03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 hektar di kabupaten	%	3,88	4,85	1.560.226	6,31	1.575.828	8,25	1.591.586	9,71	1.607.502	9,71	6.335.143	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan	%	97,00	97,01	6.745.178	97,01	7.906.954	97,01	9.070.498	97,01	10.408.572	97,01	34.131.202	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Misi 4 Mewujudkan pengembangan ekonomi kerakyatan melalui koperasi, usaha mikro kecil menengah dan perluasan lapangan kerja																	
			Tujuan 4.														
			Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	**Angka kemiskinan**	**persen**	**12,78**	**12,30**	**4.947.233**	**12,10**	**5.435.075**	**11,97**	**5.533.034**	**11,92**	**6.660.447**	**11,92**	**22.575.790**	
			Sasaran 4.1.														
			Meningkatkan pendapatan masyarakat	***PDRB perkapita***	***Juta Rp***	***43,25***	***45,30***	***4.947.233***	***48,05***	***5.435.075***	***51,20***	***5.533.034***	***54,05***	***6.660.447***	***54,05***	***22.575.790***	
2	17	08	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO	Persentase Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	%	2,50	2,50	119.500	2,50	150.000	2,50	170.000	2,50	170.000	10,00	609.500	Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian
3	25	03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Total produksi perikanan tangkap	ton	17386,30	0,00	1.179.524	0,00	1.304.512	0,00	1.363.915	0,00	1.426.263	-	5.274.214	Dinas Perikanan
3	25	04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Total Produksi Perikanan Budidaya	Ton	0,00	0,00	2.065.812	0,00	2.169.103	0,00	2.277.558	0,00	2.391.436	-	8.903.908	Dinas Perikanan
3	26	02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan	%	0,00	0,00	445.432	0,00	664.831	0,00	565.172	0,00	1.506.501	-	3.181.936	Dinas Pariwisata
4	01	03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN	Tingkat capaian target pelaksanaan kebijakan	%	100,00	100,00	866.388	100,00	875.052	100,00	883.803	100,00	892.641	100,00	3.517.885	Sekretariat Daerah (Bagian

Kode				Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Satuan		Tahun 2021 Target	(Rp	Tahun 2022 Target	(Rp	Tahun 2023 Target	(Rp	Tahun 2024 Target	(Rp	Kondisi Kinerja Pada Akhir Target	(Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(8)	(9)	(10	(11	(12	(13	(14	(15	(16	(17	(18)
1	03	11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis	%	0,00	0,00	100.000	0,00	101.000	0,00	102.010	0,00	103.030	0,00	406.040	Dinas Pekerjaan Umum dan
2	07	03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	%	0,00	0,00	129.505	0,00	129.505	0,00	129.505	0,00	129.505	-	518.022	Dinas Ketenagakerjaan dan
2	07	04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja yang ditempatkan (dalam dan luarnegeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten	%	0,00	0,00	41.071	0,00	41.071	0,00	41.071	0,00	41.071	-	164.285	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
			Tujuan 5.														

Kode			Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impac	Satuan	Kondisi Awal (2019)	Tahun 2021 Target (8)	(9)	Tahun 2022 Target (10	(11	Tahun 2023 Target (12	(13	Tahun 2024 Target (14	(15	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2024) (16	(17	Perangkat Daerah Penanggung Jawab (18)
			Meningkatnya hasil pangan dan kemandirian pangan sebagai penopang	**Indeks Ketahanan Pangan**	**Angka skor**	**78,00**	**83,00**	**17.232.899**	**86,00**	**18.219.696**	**89,00**	**18.391.608**	**93,00**	**18.565.240**	**93,00**	**72.409.443**	
			Sasaran 5.1.														
			Meningkatkan perekonomian daerah	***Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian,***	***persen***	***3,98***	***4,87***	***17.232.899***	***5,41***	***18.219.696***	***5,78***	***18.391.608***	***6,22***	***18.565.240***	***6,22***	***72.409.443***	
2	09	02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN	Persentase keterserdiaan pangan (cadangan beras/jagung sesuai	%	100,00	100,00	1.028.020	100,00	1.425.000	100,00	1.432.100	100,00	1.439.271	100,00	5.324.391	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN	Tingkat Komsumsi Protein	Gr/Hari	63,00	65,00	854.003	66,00	1.290.311	67,00	1.300.080	68,00	1.309.947	68,00	4.754.340	Dinas Ketahanan Pangan
3	27	02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN	Persentase peningkatan produksi peternakan	%	0,00	0,00	1.536.019	0,00	1.551.379	0,00	1.566.893	0,00	1.582.562	-	6.236.854	Dinas Pertanian
3	27	03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	ton	0,00	0,00	6.170.279	0,00	6.231.981	0,00	6.294.301	0,00	6.357.244	-	25.053.805	Dinas Pertanian
3	27	07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase penyuluh yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan	%	0,00	0,00	7.644.578	0,00	7.721.024	0,00	7.798.234	0,00	7.876.216	-	31.040.052	Dinas Pertanian
			Tujuan 6.														
			Terwujudnya kehidupan masyarakat yang tertib, aman dan religius	**Indeks Kerukunan Umat Beragama**	**angka**	**n.a**	**76,02**	**3.436.520**	**76,03**	**3.511.139**	**76,04**	**3.565.629**	**76,05**	**3.603.182**	**76,05**	**14.081.328**	
			Sasaran 6.1.														
			Menurunkan angka kriminalitas	***Angka kriminalitas per 10.000 penduduk***	***angka***	***4,00***	***2,80***	***3.436.520***	***2,43***	***3.511.139***	***2,38***	***3.565.629***	***2,34***	***3.603.182***	***2,34***	***14.081.328***	
2	22	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase kebudayaan masyarakat yang	%	100,00	100,00	135.955	100,00	175.255	100,00	175.608	100,00	175.965	400,00	662.783	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4	01	02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN	Nilai LPPD	Angka	2771,00	2983,00	3.265.423	3126,00	3.276.647	3185,00	3.327.234	3200,00	3.379.217	3.200,00	13.248.521	Sekretariat Daerah (Bagian

Kode				Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Satuan		Tahun 2021 Target	(Rp	Tahun 2022 Target	(Rp	Tahun 2023 Target	(Rp	Tahun 2024 Target	(Rp	Kondisi Kinerja Pada Akhir Target	(Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(8)	(9)	(10	(11	(12	(13	(14	(15	(16	(17	(18)
8	01	02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Cakupan penyelenggaraan penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	%	100,00	100,00	35.141	100,00	59.237	100,00	62.787	100,00	48.000	100,00	170.024	Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan
			Tujuan 7.														
			Meningkatnya keberhasilan														

Kode			Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impac	Satuan	Kondisi Awal (2019)	Tahun 2021 Target (8)	(9)	Tahun 2022 Target (10	(11	Tahun 2023 Target (12	(13	Tahun 2024 Target (14	(15	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2024) (16	(17	Perangkat Daerah Penanggung Jawab (18)
			pembangunan desa	**Jumlah desa dengan predikat**	**des**	**10**	**8**	**5.967.**	**6**	**5.956.**	**3**	**5.967.**	**1**	**5.978.**	**1**	**23.919.**	
			Sasaran 7.1.														
			Meningkatkan kemandirian	***Persentase desa mandiri***	***%***	***0,4***	***0,9***	***5.967.***	***1,4***	***5.956.***	***1,9***	***5.967.***	***2,4***	***5.978.***	***2,4***	***23.919.***	
2	13	04	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase peningkatan status desa mandiri	%	0,02	0,01	4.838.398	0,01	4.815.839	0,01	4.815.839	0,01	4.815.839	0,04	19.285.915	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
2	13	05	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase desa dengan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	%	99,00	99,00	1.128.880	99,00	1.140.169	99,00	1.151.570	99,00	1.163.086	99,00	4.583.705	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
			Tujuan 8.														
			Meningkatnya perekonomian daerah	**Pertumbuhan Ekonomi**	**persen**	**6,26**	**4,50**	**2.022.952**	**5,84**	**2.250.899**	**5,99**	**2.386.603**	**7,85**	**2.475.492**	**7,85**	**9.135.947**	
			Sasaran 8.1.														
			Meningkatkan kuantitas dan kualitas industri	***Kontribusi Lapangan Usaha Industri***	***persen***	***10,94***	***11,37***	***2.022.952***	***11,51***	***2.250.899***	***12,18***	***2.386.603***	***12,76***	***2.475.492***	***12,76***	***9.135.947***	
2	18	02	PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten Luwu	%	10,00	10,00	59.109	10,00	75.000	10,00	135.000	10,00	162.000	10,00	431.109	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
2	18	03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Cakupan penyelenggaraan promosi penanaman modal	%	50,00	50,00	77.558	100,00	300.000	100,00	353.500	100,00	395.000	300,00	1.126.058	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
2	18	04	PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan perizinan penanaman modal	Angka	87,01	87,75	183.290	87,90	243.393	88,15	247.071	88,75	250.950	88,75	924.704	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
3	30	03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI	Persentase kecamatan yang telah memiliki sarana	%	0,00	0,00	1.339.115	0,00	1.352.507	0,00	1.366.032	0,00	1.379.692	100,00	5.437.346	Dinas Perdagangan
3	31	02	PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pembangunan industri	%	0,00	0,00	363.880	0,00	280.000	0,00	285.000	0,00	287.850	-	1.216.730	Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian
			Tujuan 9.														
			Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Daerah	**Indeks Kepuasan Masyarakat atas penegakan hukum**		**n.a**	**80,06**	**4.292.518**	**81,27**	**5.044.113**	**82,63**	**5.143.651**	**83,77**	**5.254.629**	**83,77**	**19.734.910**	
			Sasaran 9.1.														
			Menurunnya pelanggaran terhadap peraturan perundang	***Cakupan kasus hukum yang difasilitasi***	***%***	***100,00***	***100,00***	***4.292.518***	***100,00***	***5.044.113***	***100,00***	***5.143.651***	***100,00***	***5.254.629***	***100,00***	***19.734.910***	

Kode		Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Satuan		Tahun 2021 Target	(Rp	Tahun 2022 Target	(Rp	Tahun 2023 Target	(Rp	Tahun 2024 Target	(Rp	Kondisi Kinerja Pada Akhir Target	(Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(8)	(9)	(10	(11	(12	(13	(14	(15	(16	(17	(18)
	PROGRAM PENINGKATAN														

Kode			Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impac	Satuan	Kondisi Awal (2019)	Tahun 2021 Target (8)	(9)	Tahun 2022 Target (10	(11	Tahun 2023 Target (12	(13	Tahun 2024 Target (14	(15	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2024) (16	(17	Perangkat Daerah Penanggung Jawab (18)
1	0	0	KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat	%	100,00	100,00	2.201.	100,00	2.471.	100,00	2.492.	100,00	2.514.	100,	9.679.8	Satuan Polisi Pamong
1	0 6	0 5	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN	Persentase anak-anak terlantar yang	%	100,00	100,00	218.0 46	100,00	220.2 26	100,00	222.4 28	100,00	224.6 53	100, 00	885.3 53	Dinas Sosial
2	1 2	0 2	PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase perekaman KTP Elektronik	%	94,22	94,35	1.173. 804	94,45	1.249. 307	94,55	1.249. 307	94,65	1.249. 307	94,6 5	4.921.7 25	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
2	1 2	0 3	PENCATATAN SIPIL	Rasio pasangan berakte nikah	%	0,2 3	0,2 6	76.6 63	0,2 8	388.5 32	0,3 0	388.5 32	0,3 2	388.5 32	0,32	1.242.2 58	Dinas Kependudukan dan
5	0 1	0 2	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN	Tingkat capaian target perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	%	75,00	100,00	622.1 26	100,00	715.0 12	100,00	790.7 95	100,00	877.7 81	100, 00	3.005.7 13	Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah
			Tujuan :														
			Terjaganya daya dukung dan daya tampung	**Indeks kualitas lingkungan hidup**		**sedang**	**sedang**	**22.685. 288**	**tinggi**	**5.916. 419**	**tinggi**	**5.552. 274**	**sangat tinggi**	**5.556. 597**	**sangat tinggi**	**67.814. 421**	
			Sasaran 10.1.														
			Meningkatnya ketangguhan daerah	***Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)***	***%***	***30, 00***	***30,00***	***22.685. 288***	***30,00***	***5.916. 419***	***30,00***	***5.552. 274***	***30,00***	***5.556. 597***	***30, 00***	***67.814. 421***	
2	1 1	0 3	PENGENDALIAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks kualitas air	Angka	0,0 0	26,65	165.3 15	26,65	165.3 15	26,65	340.3 15	26,65	340.3 15	26, 65	1.011. 260	Dinas Lingkungan Hidup
1	0 3	1 2	PROGRAM PENATAAN RUANG	Ketaatan terhadap RTRW	%	100,00	100,00	50.0 00	100,00	89.9 99	100,00	90.5 99	100,00	86.2 05	100, 00	316.8 04	Dinas Pekerjaan Umum dan
1	0 5	0 3	PROGRAM BENCANA	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi	%	100,00	100,00	19.549. 992	100,00	1.594. 112	100,00	1.050. 314	100,00	1.054. 937	100, 00	23.249. 355	Badan Bencana Daerah
1	0 5	0 4	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100,00	100,00	2.518. 700	100,00	3.661. 700	100,00	3.661. 700	100,00	3.661. 700	100, 00	13.503. 800	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1	0 6	0 6	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	%	100,00	100,00	401.2 80	100,00	405.2 93	100,00	409.3 46	100,00	413.4 39	100, 00	1.629. 359	Dinas Sosial

BAB VII
KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

7.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan

Kerangka pendanaan merupakan perspektif rencana penganggaran untuk lima tahun ke depan. Sebagai perspektif rencana, maka analisis harus didasarkan dengan menunjukkan potensi kapasitas rill keuangan daerah lima tahun kedepan. Terkait dengan kapasitas rill keuangan belanja daerah untuk lima tahun kedepan. Pemerintah Kabupaten Luwu menyusun program sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah secara konsisten melaksanakan amanat Perundang-undangan dengan mengalokasikan anggaran untuk menunjang urusan wajib pelayanan dasar mengacu pada Standar Pelayanan Minimal. sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Demikian juga peraturan yang sifatnya *mandatory* sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa alokasi urusan pendidikan minimal 20% dari belanja daerah. dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dinyatakan bahwa urusan kesehatan minimal 10% dari belanja operasi. Kemudian berdasarkan Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 893.5/9039/SJ perihal Program Kompetensi SDM ASN Tahun Anggaran 2019 mengamanatkan bahwa pemerintah daerah harus mengalokasikan anggaran pendidikan dan pelatihan (pengembangan kompetensi) Aparatur Sipil Negara dalam APBD sekurang-kurangnya 0.16% dari total belanja daerah.

Tabel 7.1.
Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Luwu Tahun 2021-2024

No	KAPASITAS RILL/ BELANJA	2021	2022	2023	2024
1	**BELANJA**	**1.474.495.791.073,00**	**1.514.250.682.079,55**	**1.555.104.393.194,73**	**1.597.088.352.853,14**
1.1	**Belanja Operasi**	**930.279.448.301,00**	**953.045.414.682,17**	**973.865.696.439,52**	**997.890.467.949,50**
1.1.1	Belanja Pegawai	**592.843.691.345**	608.975.819.506,91	626.828.922.452,07	643.569.202.917,30
1.1.2	Belanja Barang dan Jasa	322.342.882.052	327.178.025.282,78	328.857.531.897,85	334.153.078.547,34
1.1.3	Belanja Hibah	14.470.374.904	16.206.819.892,48	17.432.242.089,61	19.358.936.484,86
1.1.4	Belanja Bantuan Sosial	622.500.000	684.750.000,00	747.000.000,00	809.250.000,00
1.2	**Belanja Modal**	276.267.892.772	290.206.635.906,19	304.155.614.954,41	317.969.009.593,01
1.3.	**Belanja Tak Terduga**	**3.000.000.000**	**3.275.348.495,59**	**3.463.140.700,40**	**3.583.140.700,40**
1.4.	**Belanja Transfer**	**264.948.450.000**	**267.723.282.995,59**	**273.619.941.100,40**	**277.645.734.610,23**
1.1.4	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	3.443.000.000	4.062.839.687,70	4.121.370.687,70	4.579.615.775,08
1.1.5	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa	261.505.450.000	263.660.443.307,90	269.498.570.412,70	273.066.118.835,15
Pembiayaan Netto					
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)		-	-	-	-

Sumber: Hasil Proyeksi Tim Penyusun

7.2 Program Perangkat Daerah

Arsitektur perencanaan pembangunan memisahkan antara aspek strategis dan operasional, maka program prioritas dipisahkan pula menjadi 2 (dua), yaitu program prioritas untuk perencanaan strategis dan program prioritas untuk perencanaan operasional. Suatu program prioritas yang dimaksudkan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah pada dasarnya adalah perencanaan operasional. Suatu program prioritas, baik strategis maupun operasional, kinerjanya merupakan tanggung jawab Kepala OPD. Namun, bagi program prioritas yang dikategorikan Strategis merupakan tanggung jawab bersama Kepala OPD dengan kepala daerah pada tingkat kebijakan.

Keseluruhan rangkaian perencanaan pembangunan daerah bermuara pada penentuan program Perangkat Daerah yang selanjutnya diterjemahkan oleh OPD kedalam kegiatan. Perencanaan program Perangkat Daerah dalam dokumen RPJMD harus dirumuskan dengan seksama mengingat pentingnya esensi program Perangkat Daerah bagi rujukan utama pelaksanaan perencanaan kegiatan tiap tahun yang dituangkan kedalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Adapun pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program tahunan dan program yang dilaksanakan lebih dari satu tahun anggaran (*multiyear*). Selain program pembangunan daerah (program prioritas II), program dan kegiatan ini wajib mendapatkan prioritas pendanaan karena sifatnya yang berkesinambungan. Program Perangkat Daerah yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatifnya kemudian dijadikan sebagai acuan bagi OPD dalam penyusunan.

Tabel 7.2.

D E					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Perubaha	Target dan Anggaran Tahun 2020		Capaian Kinerja Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung
									Target	Rp	Target	Rp.	
	(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)			(18)
1					**Urusan Wajib Pelayanan Dasar**								
1	**01**				**Pendidikan**								
1	**01**	**01**			**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**					**110.169.22 8**		**85.071.161**	
1	01	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	%	100,00	100,00	1.073.675	100,00	1.012.047	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	49,54	58,49	766.171	58,49	195.025	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	07		Program Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN dengan predikat kinerja baik	%	100,00	100,00	87.000	100,00		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	08		Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, Pengaturan dan Evaluasi Kinerja	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja secara	%	50,00	100,00	112.760	100,00	22.455	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Persentase ketersediaan peraturan pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	%	50,00	50,00	-	50,00		
1	01	01	15		Program Pengembangan Pendidikan Non Formal (Prioritas)	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	%	35,15	60,04	335.000	60,04	1.629.418	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	16		Program Pembinaan Sekolah Dasar (Prioritas)	APM SD/MI/Paket A	%	95,51	98,23	29.985.478	98,23	30.373.869	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	17		Program Pembinaan Sekolah Menengah Pertama (Prioritas)	APM SMP/MTs/Paket B	%	80,07	83,64	21.860.594	83,64	22.213.662	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	20		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Prioritas)	Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D.IV	Persen	87,05	89,23	4.842.050	89,23	85.638	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	22		Program Pengembangan Manajemen Pelayanan Pendidikan	Persentase sekolah yang telah melaksanakan menajemen pendidikan yang baik	Persen	20,00	20,00	51.106.500	20,00	29.539.047	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1	**02**				**Kesehatan**								
1	**02**	**01**			**Dinas Kesehatan**					**110.438.542**		**95.122.031**	
1	02	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	%	0,00	100,00	1.203.770	100,00	1.093.646	Dinas Kesehatan
1	02	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik	%	80,00	80,00	377.100	80,00	728.024	Dinas Kesehatan
1	02	01	07		Program peningkatan disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang disiplin	%	100,00	100,00	108.000	100,00	30.057	Dinas Kesehatan
1	02	01	08		Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, Pengaturan dan Evaluasi Kineria	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kineria	%	0,00	100,00	100.000	100,00	18.137	Dinas Kesehatan
						Persentase ketersediaan peraturan pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	%				0,00		
1	02	01	15		Program Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Cakupan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan	%	0,00	85,00	7.654.262	85,00	4.233.774	Dinas Kesehatan
1	02	01	16		Program Upaya Kesehatan Masyarakat (Prioritas)	Cakupan Persalinan yang ditolong Tenaga Kesehatan	%	69,84	85,00	54.996.395	85,00	1.047.879	Dinas Kesehatan
1	02	01	11		Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Cakupan menurunya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular	Kec.	0,00	22,00	371.990	22,00	737.111	Dinas Kesehatan
1	02	01	12		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana, Manajemen dan Informasi Pelayanan Kesehatan	Cakupan Sarana dan Prasarana Kesehatan serta Sistem Informasi Kesehatan	Tahun	0	1	340.950	1,00	17.848.592	Dinas Kesehatan
1	02	01	16		Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan (Prioritas)	Indeks Kepuasan Masyarakat	0	0,00	80,00	45.286.075	80,00	69.384.811	Dinas Kesehatan
1	**02**	**02**			**RSUD Batara Guru**					**66.572.663**		**52.454.462**	
1	02	02	34		Program Peningkatan Pelayanan dan Pendayagunaan Tenaga	Persentase peningkatan pelayanan dan kerjasama RS	%	0,00	45,00	19.572.663	45,00	-	RSUD Batara Guru
1	02	02	35		Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan RS-BLUD	Rasio pembiayaan operasional rumah sakit (Cost Recovery Ratio/CRR)	%	76,00	80,00	47.000.000	80,00	52.454.462	RSUD Batara Guru
1	**03**				**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**								

1	**03**	**01**			**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**					**290.252.765**		**153.383.812**	
1	03	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan administrasi	%	100,00	100,00	2.346.735	100,00	1.604.837	Dinas Pekerjaan Umum dan
1	03	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja internal	%	81,25	85,00	3.689.592	85,00	81.522	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	01	07		Program Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN dengan predikat kinerja baik	%	100,00	100,00	197.960	100,00	65.250	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	01	08		Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, Pengaturan dan Evaluasi Kinerja	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	%	50,00	100,00	229.070	100,00	19.323	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
						Persentase ketersediaan peraturan pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	%	80,00	100,00	-	100,00		
1	03	01	14		Program Peningkatan Jalan dan Jembatan (Prioritas)	Persentase jaringan jalan kabupaten dengan aspal dan beton	%	58,11	61,83	174.554.004	61,83	15.031.347	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	01	15		Program Pembangunan Jalan dan Jembatan (Prioritas)	Tingkat mobilitasi (panjang jalan per luas wilayah)	Angka	0,86	0,86	4.250.000	0,86	55.390.586	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	01	16		Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Panjang jalan yang memiliki saluran drainase dan gorong-	km	1.380,00	1392,96	12.900.000	1.392,96	3.245.819	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	01	17		Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong dan Pengendali Banjir (Prioritas)	Wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor yang dibangun turap/Talud/Bonjong dan Pengendali Banjir	meter	1.445,00	700,00	1.500.000	700,00	1.497.504	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	01	18		Program Preservasi Jalan dan Jembatan (Prioritas)	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	%	21,17	22,24	9.400.000	22,24	48.508.814	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	01	23		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana	%	100,00	100,00	4.605.000	100,00	691.044	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	01	24		Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya (Prioritas)	Persentase irigasi dalam kondisi baik	Persen	36,33	37,24	27.014.729	37,24	7.668.451	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	01	27		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum (Prioritas)	Persentase penduduk yang berakses air minum berkelanjutan	%	80,04	80,96	31.396.352	80,96	11.948.330	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	01	31		Program Pengembangan Kota Hijau	Persentase Ruang Terbuka Hijau yang	Ha	26,47	34,31	8.454.223	34,31	1.269.818	Dinas Pekerjaan Umum dan

1	03	01	32		Program Pengembangan dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU)	Cakupan ketersediaan PJU (Penerangan Jalan	Titi k	0,00	0,00	2.220.0 00	0,00	3.278.5 28	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	01	33		Program Pembinaan Jasa Konstruksi (Prioritas)	Tersedianya 3 (tiga) layanan informasi jasa konstruksi tingkat Kabupaten	%	0,00	100,00	185.1 00	100,00	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

KOD					Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Indikator Program (Outcome)	Satuan	Kondisi ... RPJM (5)	Target dan Anggaran Tahun 2020 (6	(7)	Capaian Kinerja Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawa
1	(1) 03	01			Program Pembangunan, Peningkatan, Pengawasan Sarana dan	Jumlah sarana dan prasarana bangunan gedung umum	unit	0,0 0	4,00	7.310.000	4,0 0	3.082. 641	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
						Persentase penyelenggaraan	%	0,00	100,0 0		100		
1	**04**				**Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**								
1		**01**			**Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman**					**56.352.946**		**29.555.761**	
1	04		01		Program Pelayanan Administrasi pemenuhan administrasi	Persentase	%	100,0 0	100,0 0		100,00		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	01	10		Program Peningkatan Sarana dan	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana	%	68,44	100,0	474.172	100,00	1.476. 015	
1	04	01	07		Program Peningkatan Disiplin Dan	Persentase ASN dengan predikat	%	100,0 0	100,0 0	68.700	100,00	135. 070	Dinas Perumahan dan Kawasan
1	04	01	08		Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, Pengaturan	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan,	%	60,00	100,0 0	300.000	100,00	45.672	Dinas Perumahan dan Kawasan Permuki
						Persentase ketersediaan peraturan pendukung	%	50,00	100,0 0		100,00		
1	04	01	15		Program Pembangunan dan Penataan Lingkungan Kawasan Permukiman (Prioritas)	Persentase kawasan kumuh kabupaten yang	%	0,00	15,85	30.200.000	15,85	8.538. 874	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
0	0	0	0			Persentase lingkungan kawasan permukiman	%	0,00	4,83		4,8 3		
0	0	0	0			Persentase lingkungan kawasan permukiman	%	0,00	20,00		20,00		Dinas Perumahan dan Kawasan

1	0	0	1	Program Pengembangan Perumahan	Persentase rumah layak	%	20,04	20,54	8.634.420	20,54	6.637.805	Dinas Perumahan dan Kawasan
1	0	0	1	(Prioritas) Program Pembangunan dan	Cakupan penyelenggaraan	Perse	n.	100,0	15.523.750	100,00		Dinas Perumahan dan Kawasan
1	**05**			**Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat**								
1		**01**		**Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan**					**2.162.078**		**1.097.127**	
KOD				**Urusan/ Bidang Urusan/ Program**	**Indikator Program (Outcome)**	**Satuan**	**Kondisi BPJM (5)**	**Target dan Anggaran Tahun 2020 (6)**	**(7)**	**Capaian Kinerja Tahun 2020**		**Perangkat Daerah Penanggung Jawa**
		(1)										
1	05	01		Program Pelayanan Administrasi	Persentase pemenuhan administrasi	0	0,00	100,00	1.047.270	100,00	645.481	Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan
1	05	01	02	Program Peningkatan Sarana dan	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana	0	0,00	65,00	35.000	65,00	41.9	Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan
1	05	01	07	Program Peningkatan Disiplin dan	Persentase ASN dengan predikat	%	0,00	100,00	131.260	100,00	14.000	Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan
1	05	01	08	Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, Pengaturan	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan,	0	0,00	100,00	121.578	100,00	40.880	Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan
					Persentase ketersediaan peraturan pendukung	0		0,00		0,00		
1	05	01	15	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	Cakupan koordinasi dalam rangka peningkatan kewaspadaan	%	0,00	100,00	408.700	100,00	284.900	Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat
1	05	01	21		Cakupan pembinaan	0	0,00	100,00	207.450	100,00	41.8	
1	05	01	22	Program Pembinaan Organisasi Sosial Politik	cakupan penyelenggaraan pendidikan Pembinaan Politik	0	0,00	100,00	210.820	100,00	28.050	Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan
1	**05**	**02**		**Satuan Polisi Pamong Praja**					**3.797.468**		**2.859.815**	
1			01	Program Pelayanan	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	%	0,00	100,00	996.529	100,00		Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	02	0	Program Peningkatan Sarana dan	Persentase ketersediaan	%	64,87	85,52	368.100	85,52	164.498	Satuan Polisi

1	05	02	07		Program Peningkatan Disiplin Dan	Persentase ASN dengan predikat	%	92,68	100,00	141.350	100,00	17.500	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	02	08		Program Penigkatan Perencanaan, Penganggaran, Pengaturan	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan,	%	50,00	100,00	75.000	100,00	15.292	Satuan Polisi Pamong Praja
						Persentase ketersediaan peraturan pendukung		25,00	100,00		100,00		
KOD					**Urusan/ Bidang Urusan/ Program**	**Indikator Program (Outcome)**	**Satuan**	**Kondisi RPJM (5)**	**Target dan Anggaran Tahun 2020 (6**	**(7)**	**Capaian Kinerja Tahun 2020**		**Perangkat Daerah Penanggung Jawa**
1		(1)			Program Penegakan Peraturan	Persentase Penegakan	%	78,0	79,95	656.847	79,95	85.071	Satuan Polisi
1	05	02	24		Program Peningkatan Ketertiban Umum dan	Cakupan penyelenggaraan peningkatan ketertiban	%	100,00	100,00	100.860	100,00	-	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	02	25		Program Pengembangan Kapasitas	Persentase Pemenuhan Kompetensi	%	0	0,00	108.727	0,00		Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	02	26		Program Peningkatan Perlindungan	Cakupan penyelenggaraan	%	100,00	100,00	1.350.056	100,00	2.225.329	Satuan Polisi Pamong Praja
1	**05**	**03**			**Dinas Pemadam Kebakaran**					**3.894.413**		**8.685.895**	
1	0	0	01		Program Pelayanan	Presentase pemenuhan administrasi perkantoran	%	0,00	100,00	806.263	100,00	1.935	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1	05	03	0		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana	persen	0,00	85,00	274.000	85,00	604.982	Dinas Pemadam
1	05	03	07		Program Peningkatan Disiplin Dan	Persentase ASN dengan predikat	%	0,00	100,00	45.190	100,00	7.355	Dinas Pemadam Kebakaran dan
1	05	03	08		Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, Pengaturan	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan,	%	100,00	100,00	48.960	100,00	112.256	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelam
						Persentase ketersediaan peraturan pendukung	%	100,00	100,00		100,00	-	

1	05	03	30		Program Pencegahan, Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasana	Cakupan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	0	0,00	0,00	420.000	0,00	-		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1	0	0	3		Program Peningkatan	Persentase Pelayanan Penanganan	%	0,00	100,00	2.200.000	100,00		6.025.689	
0	0	0	0		Program Pengendalian Operasi	Cakupan Penyelenggaraan Operasi	0	0,00	0,00	100.000	0,00	-		Dinas Pemadam Kebakaran dan
1	06				**Sosial**									
	1	**06**	**01**		**Dinas Sosial**					**3.161.459**		**949.524**		
	1	06	01	01	Program Pelayanan Administrasi	Persentase pemenuhan administrasi	%	0,00	100,00	807.041	100,00	541.821		Dinas Sosial
	1	06	01	02	Program Peningkatan Sarana dan	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana	%	0,00	0,00	285.950	0,00	35.487		Dinas Sosial
	1	06	01	07	Program peningkatan disiplin dan	Persentase ASN dengan predikat	%	0,00	100,00	107.550	100,00	-		Dinas Sosial
	1	06	01	08	Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, Pengaturan	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan,	%	0,00	100,00	62.765	100,00	-		Dinas Sosial
						Persentase ketersediaan peraturan pendukung	%	0,00	0,00		0,00	-		
	1	06	01	15	Program Penanganan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Persentase PMKS yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	persen	0,00	89,00	532.613	89,00	319.200		Dinas Sosial
	1	06	01	16	Program Pelayanan dan Rehabilitas	Persentase PMKS yang tertangani	0	0	100	195.904	100,00	35.366		Dinas Sosial
	1	06	01	18	Program Perlindungan dan Jaminan	Persentase PMKS menerima	%	0,00	100,00	1.114.872	100,00	-		Dinas Sosial
	1	06	01	21	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial yang	0	0,00	80,00	54.765	80,00	17.650		Dinas Sosial
	1	**06**	**02**		**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**					**2.579.540**		**3.000.624**		

	1	06	02	01		Program Pelayanan Administrasi	Presentase pemenuhan administrasi	%	0,00	100,00	913.040	100,00	663.176	Badan Penanggulangan Bencana
	1	06	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik	persen	0,00	0,00	182.500	0,00	84.499	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1	06	02	07		Program Peningkatan Disiplin Dan	Persentase ASN dengan predikat	%	100,00	100,00	45.190	100,00		

KOD					Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Indikator Program (Outcome)	Satuan	Kondisi RPJMD (5)	Target dan Anggaran Tahun 2020 (6)	(7)	Capaian Kinerja Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		(1)											
1	06	02			Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, Pengaturan	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan,	%	0,00	100,00	41.560	100,00	6.476	Badan Penanggulangan Bencana
						Persentase ketersediaan peraturan pendukung	%	0,00	0,00		0,0		
1	06	02	23		Program Peningkatan Pelayanan Tanggap Darurat Bencana	Cakupan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	0	0,00	0,00	1.247.250	0,00	1.035.776	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	0	0	2		Program Peningkatan Kesiapsiagaan	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama	%	100,00	100,00	150.000	100,00	1.210.	
2					**Urusan wajib Bukan Pelayanan Dasar**								
2	**01**												
2		**01**								**1.919.372**		**1.338.471**	
2	01		01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan administrasi	%	100,00	100,00	642.764	100,00		Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
2	01	01	10		Program Peningkatan	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana	%	100,0	100,0	260.500	100,00	210.938	
2	01	01	07		Program peningkatan disiplin aparatur dan	Persentase ASN dengan predikat	%	60,00	32,00	123.384	32,00	-	Dinas Ketenagakerjaan
2	01	01	08		Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, Pengaturan	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan,	%	100,00	100,00	33.400	100,00	4.442	Dinas Ketenagakerjaan dan

						Persentase ketersediaan peraturan pendukung	%	0,00	0,00		0,00		
2	01	01	15		Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja (Prioritas)	Cakupan pelatihan tenaga kerja	%	41,00	100,00	485.780	100,00	42.673	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
2	0	0	1			Perluasan Kesempatan kerja sektor formal	%	4.04	3,70	214.079	3,70	66.6	
2	01	01	17		Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Persentase Penanganan perselisihan buruh dan	%	100,00	100,00	159.465	100,00	146.380	Dinas Ketenagakerjaan
2	**02**				**Pemberdayaan Perempuan dan**								
2	**02**				**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**					**1.221.985**		**783.463**	
2	0202	01			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase pemenuhan administrasi perkantoran	%	0,00	100,00	579.134	100,00	574.010	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
2	0202	02			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja internal	%	0,00	70,00	100.000	70,00	19.992	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
2	0201	07			Program Peningkatan Disiplin Dan ASN dengan predikat	Persentase	%	100,00	100,00	64.190	100,00	-	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
3	0201	08			Program Peningkatan Perencanaan, Pengaturan dan Evaluasi	Persentase ketersediaan dokumen Penganggaran, perencanaan,	%	0,00	0,00	53.360	0,00	-	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
						Persentase ketersediaan peraturan pendukung	%	0,00	0,00		0,00		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
2	0201	20			Program Peningkatan Kesetaraan Gender pemerintahan dalam rangka dan Ketahanan Keluarga (Prioritas)	Cakupan penyelenggaraan fungsi		n.a	35,71	173.139	35,71	83.051	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
2	02	2				peningkatan	%	0,00	52,50	100.000	52,50	55.564	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
2	0202	22			data dan Program Penguatan Data dan Informasi Pemberdayaan Perempuan dan	Persentase ketersediaan informasi yang valid tentang penyelenggaraan	0	0,00	100,00	152.162	100,00	50.847	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

2	**03**			**Pangan**								
2	**03**			**Dinas Ketahanan Pangan**				**1.855.399**		**811.261**		
2	03	;0		Program Pelayanan Administrasi pemenuhan administrasi	Presentase	%	0,00	100,00	815.950		510.157	Dinas
2	03 01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja internal	%	59,50	68,25	128.792	68,25	42.350	Dinas Ketahanan Pangan
KOD						**Urusan/ Bidang Urusan/ Program**	**Indikator Program (Outcome)**	**Satuan**	Kondisi	Target dan Anggaran Tahun 2020	Capaian Kinerja Tahun 2020	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
E									Kinerja			
									Awal			

								RPJM	Target	Rp	Target	Rp	
	(1)				(2)	(3)	(4	(5	(6	(7)			(18)
2	03	01	07		Program Peningkatan Disiplin Dan	Persentase ASN dengan predikat	%	0,00	100,00	79.790	100,00	52.265	Dinas Ketahanan Pangan
2	03	01	08		Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, Pengaturan	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan,	%	0,00	100,00	108.858	100,00	-	Dinas Ketahanan Pangan
						Persentase ketersediaan peraturan pendukung	%	0,00	0,00		0,00	-	
2	03	01	15		Program Pengembangan Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	Angka Ketersediaan Energi	Kalori Perkapita Perhari	0,00	3.400,00	257.861	3.400,00	61.220	Dinas Ketahanan Pangan
2	03	01	16		Program Pengembangan Distribusi dan	Ketersediaan Informasi Harga, Pasokan dan	Pak	0,00	100,00	225.628	100,00	34.260	Dinas Ketahanan Pangan
2	03	01	17		Program Pengembangan Konsumsi dan Keamanan Pangan	Tingkat Komsumsi Protein	Gr/Hari	0,00	65,00	238.521	65,00	111.010	Dinas Ketahanan Pangan
2	0				**Pertanahan**								

2	**0**	**0**			**Dinas Pertanahan**					**6.315.177**		**1.331.**	**Dinas Pertanahan**
2	0	0	0		Program Pelayanan Administrasi	Persentase pemenuhan administrasi	%	100,0	100,0	799.657	100,00	618.9	Dinas Pertanahan
2	0 4	0 1	0 2		Program Peningkatan Sarana dan	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana	%	35,02	62,99	200.000	62,99	91.2 71	Dinas Pertanahan
2	0 4	0 1	0 7		Program Peningkatan Disiplin Dan	Persentase ASN dengan predikat	%	92,68	100,0 0	100.000	100,00	-	Dinas Pertanahan
2	0 4	0 1	0 8		Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, Pengaturan	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan,	%	0,00	100,0 0	74.600	100,00	11.0 25	Dinas Pertanahan
						Persentase ketersediaan peraturan pendukung	%	0,00	100,0 0		100,00	-	
2	0	0	1 7		Program Penyelesaian Konflik-konflik	Jumlah konflik pertanahan yang	Konfli	100,0	100,0	280.750	100,00	30.4	Dinas Pertanahan
2	0 4	0 1	1 9		Program Penataan Pertanahan (Prioritas)	Persentase Aset tanah pemda yang bersertifikat	%	0,00	100,0 0	4.860.170	100,00	579.7 53	Dinas Pertanahan
2	**0**				**Lingkungan Hidup**								
2	**0**	**0**			**Dinas Lingkungan Hidup**					**3.991.866**		**3.275.**	
2	0 5	0 1	0 1		Program Pelayanan Administrasi	Presentase pemenuhan administrasi	%	0,00	100,0	560.166	100,00	511.0	Dinas Lingkungan
2	0 5	0 1	0 2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik	%	0,00	60,00	229.000	60,00	46.4 15	Dinas Lingkungan Hidup
2	0 5	0 1	0 8		Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, Pengaturan	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan,	%	0,00	100,0 0	100.000	100,00	3.964	Dinas Lingkungan Hidup
						Persentase ketersediaan peraturan pendukung	%	0,00	0,00		0,0 0		
2	0 5	0 1	0 7		Program Peningkatan Disiplin Dan	Persentase ASN dengan predikat	%	0,00	100,0 0	50.000	100,00	7.500	
2	0 5	0 1	1 6		Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Cakupan penyelenggaraan Pengendalian Pencemaran dan	0	0,00	50,00	300.000	50,00	92.3 97	Dinas Lingkungan Hidup
						Cakupan penyelenggaraan							

2	0	0	2		Program Penataan dan Penegakan Hukum	perlindungan dan pengelolaan	0	0,00	0,00	252.700	0,0	4.487	Dinas Lingkungan
2	0 5	0 1	2 6		Program Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	Persentase jumlah sampah yang tertangani	%	85,84	87,99	2.500.000	87,99	2.609. 486	Dinas Lingkungan Hidup
2	**0**	**0**			**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**					**2.883.623**		**2.616.**	
2	0	0 1	0		Program Pelayanan Administrasi	Persentase pemenuhan administrasi	%	0,00	100,0	541.158	100,00	623.2	Dinas Kependudukan dan
2	0 6	0 1	0 2		Program Peningkatan Sarana dan	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana	%	59,01	65,00	239.200	65,00	189.1 38	Dinas Kependudukan
2	0 6	0 1	0 7		Program Peningkatan Disiplin Dan	Persentase ASN dengan predikat	%	100,0 0	100,0 0	74.000	100,00	-	Dinas Kependudukan
2	0 6	0 1	0 8		Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, Pengaturan	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan,	%	0,00	100,0 0	28.800	100,00	3.972	Dinas Kependudukan dan
						Persentase ketersediaan peraturan pendukung	%	0,00	100,0 0		100,00	-	
2	0	0 1	1 6		Program Pelayanan Pendaftaran	Rasio Penduduk Ber KK	%	0,62	0,65	1.326.130	0,6	1.124.	Dinas Kependudukan dan
2	0	0 1	1 7		Program Pelayanan	Rasio pasangan berakte	%	0,15	0,20	47.000	0,2	55.1	Dinas Kependudukan dan
2	0 6	0 1	1 8		Program Pengelolaan Informasi	Cakupan Dokumen Kependudukan yang	%	100,0 0	100,0 0	384.165	100,00	325.4 01	Dinas Kependudukan
2	0	0 1	1 9		Program Pemanfaatan Data dan Inovasi	Cakupan Inovasi Pelayanan	0	0,00	100,0	243.170	100,00	295.1	Dinas Kependudukan dan
2	**0**				**Pemberdayaan Masyarakat**								
2	**0**	**0**			**Dinas Pemberdayaan**					**3.226.824**		**4.441.**	
2	0	0 1	0 1		Program Pelayanan Administrasi	Presentase pemenuhan administrasi	%	100,0	100,0	1.450.334	100,00	868.9	Dinas Pemberdayaan Masyarakat
2	0 7	0 1	0 2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik	%	68,94	78,11	131.300	78,11	107.8 70	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
2	0 7	0 1	0 7		Program Peningkatan Disiplin Dan	Persentase ASN dengan predikat	%	100,0 0	100,0 0	95.190	100,00	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat

2	07	01	08		Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, Pengaturan	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan,	%	50,00	100,00	50.000	100,00	64.250	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
						Persentase ketersediaan peraturan pendukung	%	0,00	100,00	-	100,00		
2	07	01	20		Program Pembinaan Pemerintahan Desa (Prioritas)	Persentase desa yang mampu melaksanakan tata	%	n.a.	100,00	500.000	100,00	1.842.720	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
2	07	01	21		Program Pengembangan Kapasitas	Skor rata-rata Indeks Desa Membangun	Nilai	n.a	0,00	300.000	0,00	50.181	Dinas Pemberdayaan Masyarakat
2	07	01	22		Program Pembinaan Kelembagaan dan	Persentase LPM yang mandiri	%	0,00	0,00	300.000	0,00	1.402.782	Dinas Pemberdayaan Masyarakat
2	07	01	23		Program Pembangunan dan Pembinaan	Jumlah BUMDes Bersama	4	0,00	5,00	400.000	5,00	105.072	Dinas Pemberdayaan Masyarakat
2	**0**				**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**								
2	**0**	**01**			**Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga**					**7.097.368**		**4.663.**	
2	08	01	01		Program Pelayanan Administrasi	Presentase pemenuhan administrasi	%	100,00	100,00	708.873	100,00	465.751	Dinas Pengendalian Penduduk dan
2	08	01	02		Program Peningkatan Sarana dan	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana	%	69,31	79,75	191.500	79,75	110.232	Dinas Pengendalian Penduduk dan
2	08	01	07		Program Peningkatan Disiplin Dan	Persentase ASN dengan predikat	%	100,00	100,00	17.500	100,00	-	Dinas Pengendalian Penduduk dan
2	08	01	08		Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, Pengaturan	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan,	%	50,00	100,00	7.211	100,00	-	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
						Persentase ketersediaan peraturan pendukung	%		100,00		100,00	-	
2	08	01	15		Program Pengendalian Penduduk	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan perangkat daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan	0	0,00	100,00	2.480.212	100,00	2.952.327	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

	2	0 8	0 1	1 6		Program Keluarga Berencana	Persentase Penggunaan Kontrasepsi	%	0,00	22,35	2.471.983	22,35	833.2 76	Dinas Pengendalian Penduduk dan
	2	0 8	0 1	0		Program Ketahanan dan Keluarga	Cakupan Pusat Pelayanan Keluarga	0	0,00	18,00	1.220.088	18,00	301.8 10	Dinas Pengendalian Penduduk dan
	2	**0**	**0**			**Perhubungan**								
	2	**0**	**0**			**Dinas Perhubungan**					**2.093.398**		**1.185.**	
	2	0 9	0 1	0 1		Program Pelayanan Administrasi	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana	%	100,0 0	100,0 0	812.293	100,00	638.8 24	Dinas Perhubungan

KOD					Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Indikator Program (Outcome)	Satuan	Kondisi RPJMD (5)	Target dan Anggaran Tahun 2020 (6	(7)	Capaian Kinerja Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawa
		(1)											
2		09	01		Program Peningkatan Sarana dan	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana	%	0,0 0	0,00	318.150	0,0 0	112.402	Dinas Perhubungan
2	0 9	0 1	0 7		Program Peningkatan Disiplin Dan	Persentase ASN dengan predikat	%	92,68	100,0 0	64.640	100	5.000	Dinas Perhubungan
2	0 9	0 1	0 8		Program Peningkatan Perencanaan Penganggaran, Pengaturan	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan,	%	50,00	100,0 0	30.000	100,00	3.108	Dinas Perhubungan
						Persentase ketersediaan peraturan pendukung	%	100,0 0	100,0 0		100,00		
2	0 9	0 1	1 9		Program Peningkatan dan Pengawasan Lalu Lintas	Pembangunan Sarana & Prasarana	0	0,00	75,00	242.100	75,00	60.3 57	Dinas Perhubungan
2	0	0	1		Program peningkatan	Jumlah arus penumpang angkutan	orang	411.05 5	415.05 5	376.215	415.055 .00	337.9	Dinas
2	0 9	0 1	1 8		Program pembangunan sarana dan prasarana	Peningkatan Pengembangann sarana	0	0,00	80,00	250.000	80,00	27.6 00	Dinas Perhubungan
2	**1 0**				**Komunikasi dan Informatika**								
2		**0 1**				**dan Persandian**				**2.903.283**		**1.136. 514**	
2	1 0	0			Program Pelayanan Administrasi	Presentase pemenuhan administrasi	%	0,00		627.846	100,00	531.4	

2	1 0	0 1	0 1		Perkantoran	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik	%	37,58	100,0 0	305.778	73,04		85.3 62	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan
					Program Peningkatan									
2	1 0	0 1	0 7		Program Peningkatan Disiplin Dan	Persentase ASN dengan predikat	%	0,00	100,0 0	75.000	100,00	-		Dinas Komunikasi, Informatika,
2	1 0	0 1	0 8		Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, Pengaturan	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan,	%	0,00	100,0 0	49.643	100,00		16.7 31	Dinas Komunikasi, Informatika,
						Persentase ketersediaan peraturan pendukung	%	0,00	100,0 0		100,00			
KOD					**Urusan/ Bidang Urusan/ Program**	**Indikator Program (Outcome)**	**Satu an**	**Kondi si BPJM (5)**	**Target dan Anggaran Tahun 2020 (6**	**(7)**	**Capaian Kinerja Tahun 2020**			**Perangkat Daerah Penanggung Jawa**
2	1 0	0 1	0 1		Program Pengelolaan Informasi dan	0	0	0,0 0	0,00	101.280	0,0 0			Dinas Komunikasi, Informatika,
2	1 0	0 1	2 0		Program Penyelenggaraan E-Government	Jumlah aplikasi dalam rangka e-gov yang	%	100,0 0	0,00	1.337.716	0,0			Dinas Komunikasi, Informatika,
2	1 0	0 1	2 1		Program Peningkatan Layanan	0	0	0,00	0,00	406.020	0,0 0		502.9 86	Dinas Komunikasi, Informatika,
2 2	**1 1**	**0 1**			**Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**					**1.349.567**			**910. 217**	
2	1 1		0 1		Program Pelayanan Administrasi	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	%	100, 00	100,0 0	634.179	100, 00			Dinas Koperasi, UKM dan Perindus trian
2	1 1	0 1	0		Program Peningkatan Sarana dan	Persentase ketersediaan	%	0	0,00	44.440	0,0		51.9 75	
2	1 1	0 1	0 7		Program Peningkatan Disiplin Dan	Persentase ASN dengan predikat	%	100,0 0	100,0 0	47.470	100,00		36.1 25	Dinas Koperasi, UKM dan
2	1 1	0 1	0 8		Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, Pengaturan	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan,	%	50,00	100,0 0	50.000	100,00	-		Dinas Koperasi, UKM dan Perindus
						Persentase ketersediaan peraturan pendukung	%	100,0 0	100,0 0		100,00			

2	1	0	1	Program Peningkatan Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Prioritas)	Cakupan penyelenggaraan pengawasan	%	0,00	0,00	144.885	0,00	66.982	Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian
2	1	0	2		Persentase Usaha Mikro dan Menengah	%	30,00	30,35	428.594	30,35		
				Penanaman Modal								
				Dinas Penanaman Modal	**Terpadu Satu Pintu**				**1.678.474**		**807.778**	
2	1	0	0	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan administrasi	%	100,00	100,00	795.534	100,00	270.1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	1	0	0	Program Peningkatan	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana	%	58,24	72,42	76.300	72,42	30.985	
KOD				**Urusan/ Bidang Urusan/ Program**	**Indikator Program (Outcome)**	**Satuan**	**Kondisi RPJMD (5)**	**Target dan Anggaran Tahun 2020 (6)**	**(7)**	**Capaian Kinerja Tahun 2020**		**Perangkat Daerah Penanggung Jawa**
				(1)								
2	12	01		Program peningkatan disiplin aparatur dan	Persentase ASN dengan predikat	%	100,00	100,00	112.500	100,00	24.715	Dinas Penanaman Modal dan
2	1	0	8	Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, Pengaturan	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan,	%	100,00	100,00	48.828	100,00	6.937	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
					Persentase ketersediaan peraturan pendukung	%	100,00	100,00		100,00		
2	1	0	1	Program Peningkatan Promosi	Jumlah kegiatan Promosi dan Kerja	%	0,00	85,00	152.000	85,00	69.650	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	1	0	1	Penanaman Modal (Prioritas)	Jumlah kegiatan Peningkatan Iklim	investor	13,00	13,00	84.000	13,00	41.2	
2	1	0	2	Program Penyelenggaraan Pelayanan	Jumlah izin yang dikeluarkan	%	50,00	65,00	273.480	65,00	296.226	Dinas Penanaman Modal dan
2	1	0	0	Program Pengendalian dan Pengawasan	Jumlah pengendalian dan pengawasa	%	0,00	75,00	135.832	75,00	67.867	Dinas Penanaman Modal dan
2	**13**	**0**		**Kepemudaan dan Olahraga**								
2		**0**							**1.673.115**			

2	1	0	0 1		Program Pelayanan Administrasi	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	%	100,00	100,00	819.565	100,00	**855.590**	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	1 3	0 1	0		Program Peningkatan Sarana dan	Persentase ketersediaan	%	0,00	0,00	75.000	0,0	198.786	Dinas Kepemudaan
2	1 3	0 1	0 7		Program Peningkatan Disiplin Dan	Persentase ASN dengan predikat	%	100,00	100,00	52.890	100,00	-	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	1 3	0 1	0 8		Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, Pengaturan	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan,	%	50,00	100,00	49.240	100,00	8.936	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
						Persentase ketersediaan peraturan pendukung	%	50,00	100,00		100,00	-	
KOD					**Urusan/ Bidang Urusan/ Program**	**Indikator Program (Outcome)**	**Satuan**	**Kondisi RPJMD (5)**	**Target dan Anggaran Tahun 2020 (6)**	**(7)**	**Capaian Kinerja Tahun 2020**		**Perangkat Daerah Penanggung Jawa**
2	13	01 (1)			Program Pemberdayaan Pemuda dan Kepramukaan	Cakupan penyelenggaraan pemberdayaan	%	n.a	100,00	244.740	100,00	-	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	1 3	0 1	2 3		Program Pengembangan Pemuda	Persentase pengurus organisasi pemuda yang telah	%	n.a	100,00	104.500	100,00	49.103	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	1 3	0 1	2 4		Program Pembinaan dan Pemasyarakatan	Jumlah cabang olahraga yang digemari	cabang	0,00	0,00	155.000	0,00	23.780	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	1 3	0 1	2 5		Program Peningkatan Prestasi Olahraga	Jumlah cabang olahraga yang menorehkan prestasi untuk	cabang	0,00	0,00	172.180	0,00	-	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	**1 4**				**Statistik**								
2		**0 1**			**Dinas Komunikasi,**	**dan Persandian**				**100.000**		**53.115**	
2	1 4	0	1 5		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Tersedianya data statistik	0	0,00	40,00	100.000	40,00	53.1	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan
2	**1 5**				**Persandian**								
2		**0 1**			**Dinas Komunikasi,**	**dan Persandian**				**100.000**		**62.287**	
2	1 5	0			Program Penyelenggaraan Pengamanan	Indeks Kematangan Keamanan	level		5,00	100.000		62.2	

			1	Informasi Pemerintah			n.			5,0			Dinas Komunikasi,
2	**1**			**Kebudayaan**									
	6	**01**		**Dinas Pendidikan dan**					**184.830**			**69.990**	
2	1		17	Program Pengelolaan Budava Daerah	Penyelenggaraan festival seni dan	ka li	6	6	184.830	6,00			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	**17**			**Perpustakaan**									
2		**01**		**Dinas Perpustakaan dan**					**1.192.250**			**688.373**	
2	1		01	Program Pelayanan Administrasi	Persentase Pemenuhan Administrasi	%	100,00	100,00	635.160	100,00			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	17	01	0	Program Peningkatan Sarana dan	Perkantoran Persentase Ketersediaan	%	55,94	75,64	115.236	75,64		50.085	Dinas Perpustakaan
KOD				**Urusan/ Bidang Urusan/ Program**	**Indikator Program (Outcome)**	**Satuan**	**Kondisi RPJMD (5)**	**Target dan Anggaran Tahun 2020 (6**	**(7)**	**Capaian Kinerja Tahun 2020**			**Perangkat Daerah Penanggung Jawa**
2		(1) 17	01	Program Peningkatan Disiplin dan	Persentase ASN dengan Predikat	%	100,00	100,00	30.000	100,00	-		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	17	01	08	Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, Pengaturan	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan,	%	50,00	100,00	11.854	100,00	-		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
					Persentase Ketersediaan Peraturan Pendukung	%	100,00	100,00	-	100,00	-		
2	17	01	15	Program Deposit, Akusisi dan Pengelolaan	Cakupan penyelenggaraan	0	0,00	100,00	100.000	100,00		3.752	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2				Bahan Pustaka	Persentase Jumlah Pengunjung	%	0,00	0,00	100.000	0,0		6.500	
2	17	01	17	Program Pegembangan Sumber Dava	Persentase Pengunjung Usia Sekolah ke	%	0,00	0,00	200.000	0,00		47.102	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
				Kearsipan									
				Dinas Perpustakaan dan					**100.000**				
2	17	01	19	Program Pembinaan, Pengelolaan,	Presentase Sistem Administrasi Kearsipan yang Memiliki Predikat	0	0,00	100,00	100.000	100,00	-		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
				Urusan Pilihan									
				Kelautan dan Perikanan									
				Dinas Perikanan									

3	01	01	01		Program Pelayanan Administrasi	Persentase pemenuhan administrasi	%	100,00	100,00	**3.358.930**	100,00		**3.070.189**	Dinas Perikanan
3	0	0	0		Program Peningkatan Sarana dan	perkantoran Persentase ketersediaan	%	92,96	96,98	172.761	96,98		41.133	Dinas Perikanan
3	01	01	07		Program Peningkatan Disiplin Dan	Persentase ASN dengan predikat	%	100,00	100,00	39.592	100,00	-		Dinas Perikanan
3	01	01	08		Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, Pengaturan	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan,	%	100,00	100,00	70.551	100,00		29.525	Dinas Perikanan
						Persentase ketersediaan peraturan pendukung	%	100,00	100,00		100,00	-		
3	01	01	20		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	N.A	100,00	1.250.000	100,00		2.072.503	Dinas Perikanan

KODE					Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Indikator Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target dan Anggaran Tahun 2020		Capaian Kinerja Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target	Rp	Target	Rp	
	(1)				(2)	(3)	(4	(5	(6	(7)			(18
3	01	01	21		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya	%	10,68	11,00	964.096	11,00	315.664	Dinas Perikanan
3	01	01	25		Program Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan	Jumlah kelompok nelayan yang berhasil diberdayakan	0	0,00	20,00	200.000	20,00	20.777	Dinas Perikanan
3	**02**	**01**			**Dinas Pariwisata**					**2.023.595**		**1.470.741**	
3	02	01	01		Program Pelayanan Administrasi	Persentase pemenuhan administrasi	%	100,00	100,00	784.619	100,00	645.7[illegible]	Dinas Pariwisata
3	02	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi	%	53,88	72,55	233.243	72,55	102.000	Dinas Pariwisata
3	02	01	07		Program Peningkatan Disiplin Dan	Persentase ASN dengan predikat	%	100	100	54.934	100,00	50.695	Dinas Pariwisata
3	02	01	08		Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, Pengaturan	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan,	%	100,00	100,00	100.000	100,00	103.905	Dinas Pariwisata
						Persentase ketersediaan peraturan pendukung	%	50,00	100,00		100,00		

3	0	0	1		Program Pengembangan Pemasaran	Jumlah kunjungan wisata	orang	12.57	13.20	104.737	13.206,	13.3	Dinas Pariwisata
3	0 2	0 1	1 8		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata	Tingkat kepuasan pengunjung' atas ketersediaan sarana	tingka kepuas an	n. a	cuku p	344.063	cukup	555.1 41	Dinas Pariwisata
3	0	0	2		Program Pengembangan Destinasi wisata	Jumlah destinasi wisata yang	Destin	0	6	200.000	6,0		Dinas Pariwisata
3	0	0	2		Program Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah pelaku ekonomi kreatif	%	n.	20	202.000	200,00	17.5	Dinas Pariwisata
													Dinas Pariwisata
					Pertanian					6.000			
					Dinas Pertanian	**0**				**8.256.044**		**4.996.**	
3	0	0	0		Program Pelayanan Administrasi	Persentase pemenuhan administrasi	%	100,0	100,0	865.197	100,00	579.1	Dinas Pertanian
3	0 3	0 1	0 2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik	%	71,62	74,33	155.904	74,33	120.2 28	Dinas Pertanian
3						Persentase ASN dengan predikat	%	100,0 0	100,0 0	75.000	100,00	44.2 50	Dinas Pertanian
3	03 01	0 8			Program Peningkatan Perencanaan, Pengaturan dan Evaluasi	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan.	%	100,0 0	100,0 0	75.000	100,00		Dinas Pertanian
						Persentase ketersediaan peraturan pendukung	%	100,0 0	100,0 0		100,00		
3	03 01	2 5			Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Pertanian (Prioritas)	Persentase kelompok tani yang memperoleh prasarana dan sarana pertanian/perkebunan		0,00	0,00	2.726.532	0,00 1.489.824		Dinas Pertanian
3	03	2			Program Peningkatan Produksi dan Mutu peningkatan produksi	Persentase	0,00	%	3,00	1.593.971	3,0 0	198.4 71	Dinas Pertanian
3	03 01	2 7			Program Peningkatan Produksi dan Mutu peningkatan produksi	Persentase	%	0,00	3,00	638.100	3,00 189.839		Dinas Pertanian
3	03 01	2 8			Program Peningkatan Produksi dan Mutu peningkatan produksi	Persentase	%	0,00	3,00	650.000	3,0 0	189.8 39	Dinas Pertanian
3	03	2			Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Peningkatan populasi ternak	%	0,00	3,00	450.000	3,0	54.2	Dinas Pertanian
3	03	3			Program Peningkatan Sistem Penyuluh penyuluh yang meningkat	Persentase	%	0,00	20,00	1.026.340	20,00	2.130.	Dinas Pertanian
					Perdagangan								
					Dinas Perdagangan								

3	06 01	01		Program Pelayanan Administrasi pemenuhan administrasi	Persentase	%	100,00	100,00	**3.813.161**		**5.218.593**	
3	06	0		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja internal	%	86,62	92,52	147.885	92,52	119.272	Dinas Perdagangan
3	06 01	07		Program Peningkatan Disiplin Dan ASN dengan predikat	Persentase	%	100,00	100,00	60.190	100,00	-	Dinas Perdagangan
3	06 01	08		Program Peningkatan Perencanaan, Pengaturan dan Evaluasi	Persentase ketersediaan dokumen Penganggaran, perencanaan,	%	100,00	100,00	56.040	100,00	24.040	Dinas Perdagangan
					Persentase ketersediaan peraturan pendukung	%	100,00	100,00		100,00	-	
3	06	01	15	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Cakupan penyelenggaraan	%	75,00	100,00	115.360	100,00	88.774	Dinas Perdagangan
3					Cakupan bina kelompok	%	n.	100,0	404.366	100,00	471.0	
3	06	01	20	Peningkatan Sarana dan Prasarana	Persentase Sarana dan Prasarana	%	79,16	82,00	2.300.000	82,00	3.904.362	Dinas Perdagangan
				Perindustrian								
				Dinas Koperasi, UKM dan					**300.000**		**-**	
1	11	01	25	Program Pembinaan dan Pengawasan	0	0	0,00	0,00	300.000	0,00		Dinas Koperasi, UKM dan Perindus
				Transmigrasi								
									100.000		**-**	
2	01	01	18	Program Penyelenggaraan Transmigrasi	Cakupan Penyelenggaraan	%	85,00	100,00	100.000	100,00		Dinas Ketenagakerjaan dan
4				**Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan**								
4	03			**Pemerintahan**								
4		**01**		**Sekretariat Daerah**					**34.240.873**		**31.369.391**	
4	03	01		Program Pelayanan Administrasi	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	%	100,00	100,00	3.330.128	100,00	3.929	Sekretariat Daerah (Bagian Umum dan Perlengkapan)
4	03	01	0	Program Peningkatan Sarana dan	Persentase ketersediaan	%	100,0	0,00	16.083.100	0,0	15.678.628	
4	03	01	16	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah (wakil	Cakupan pelayanan kedinasan kepala	%	100,00	0,00	3.000.000	0,00	4.600.142	Sekretariat Daerah (Bagian Umum

4	03	01	28		Program Optimalisasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan	Cakupan penyelenggaraan	%	100,00	0,00	900.000	0,00	401.750	Sekretariat Daerah (Bagian Pemerintahan
4	03	01	29		Program Optimalisasi Penyelenggaraan Pembangunan Bidang	Cakupan penyelenggaraan pembangunan bidang	%	100,00	100,00	1.056.360	100,00	1.525.885	Sekretariat Daerah (Bagian Administrasi
4	03 01		30		Program Optimalisasi Penyelenggaraan Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Keprotokoleran dan Pembangunan Bidang		0	100,00	100,00	3.282.960	100,00	582.105	Sekretariat Daerah (Bagian Hubungan
4	03 01		31		Program Optimalisasi Penyelenggaraan Cakupan Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Perekonomian		0	100,00	100,00	800.670	100,00	567.827	Sekretariat Daerah (Bagian Administrasi
4	03 01		32		Program Optimalisasi Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Sumber Daya Alam	Cakupan Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Sumber Daya Alam	0	100,00	100,00	925.000	100,00	-	Sekretariat Daerah (Bagian Administrasi Sumber
4	03 01		34		Program Optimalisasi Penyelenggaraan Persentase ketersediaan Sistem SPSE Layanan Pengadaan Barang dan Jasa berbasis		%	80,00	83,00	975.000	83,00	205.968	Sekretariat Daerah (Bagian Layanan Pengadaan Barang
						Persentase penyelesaian tender Paket Pekerjaan Tepat waktu	%	100,00	100,00	-	100,00	-	
4	03 01		35		Program Optimalisasi Penyelenggaraan Persentase Produk Hukum Daerah yang Pemerintahan Bidang Hukum dan Hak difasilitasi		%	100,00	100,00	900.000	100,00	763.432	Sekretariat Daerah (Bagian Hukum dan Hak
4	03 01		36		Program Optimalisasi Penyelenggaraan Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Organisasi dan Pembangunan Bidang Organisasi dan		0	0,00	100,00	750.000	100,00	311.829	Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi dan Pendayagunaan
						Persentase ASN Sekretariat Daerah dengan predikat kinerja baik	%	100,00	100,00		100,00	-	
4	03 01		38		Program Peningkatan Pelayanan Kegiatan Cakupan pelayanan kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan, penyelenggaraan pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan pembangunan dan pembinaan Kemasyarakatan		0	0,00	100,00	2.237.655	100,00	2.802.312	Sekretariat Daerah

4	04	0		**Sekretariat DPRD**			0	0,00	0,00	14.318.44		13.884.602	
4	04 01	0 1		Program Pelayanan Administrasi pemenuhan administrasi	Persentase	%	100,0 0	100,0 0	2.789.751	100,00	3.056. 050	Sekretariat DPRD
4	04 01	0 2		Program Peningkatan Sarana dan ketersediaan sarana dan	Persentase	%	0,00	91,00	1.627.360	91,00	2.084.898	Sekretariat DPRD
4					Persentase ketersediaan dokumen perencanaan.	%	50,00	100,0 0	75.750	100,00	60.5 26	Sekretariat DPRD
					Persentase ketersediaan peraturan pendukung	%	100,0 0	100,0 0		100,00	-	Sekretariat DPRD
4	04 01	0 7		Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase ASN dengan predikat kinerja baik		0,00	100,0 0	1.076.367	100,00	540.560	Sekretariat DPRD
4	04	1		Program Peningkatan Kualitas Peraturan	Cakupan penyelenggaraan peningkatan kapasitas lembaga	%	100,0 0	100,0 0	5.872.615	100,00	3.177. 032	Sekretariat DPRD
4	04 01	3 9		Program Penganggaran, Pengawasan penyusunan dan Evaluasi Pembangunan Daerah (Prioritas)	Persentase penyelesaian PERDA sesuai Prolegda	%	100,0 0	100,0 0	2.876.600	100,00	4.962.725	Sekretariat DPRD
				Kecamatan Bua					**1.593.270**		**1.344.085**	
4	01 10	0 1		Program Pelayanan Administrasi pemenuhan administrasi	Persentase	%	100,0 0	100,0 0	251.207		226.278	
4	01	0		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja internal	%	0,00	0,00	35.754	0,0 0	16.2 87	Kecamatan Bua
4	01 10	0 7		Program Peningkatan Disiplin Dan ASN dengan predikat	Persentase	%	100,0 0	100,0 0	39.790	100,00	9.000	Kecamatan Bua
4	01 10	0 8		Program Peningkatan Perencanaan, Pengaturan dan Evaluasi	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, Penganggaran,	%	100,0 0	100,0 0	17.700	100,00	4.000	Kecamatan Bua
4	01 10	5 0		Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Cakupan penyelenggaraan pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan di	%	100,0 0	100,0 0	1.089.070	100,00	816.8 20	Kecamatan Bua
4	01 10	5 1		Program Peningkatan Pelayanan, Cakupan Pelayanan dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Urusan	Urusan Pemerintahan	%	100,0 0	100,0 0	159.749	100,00	271.7 00	Kecamatan Bua

4	**01**			**Kecamatan Bassesangtempe**							**430.800**		**412.068**		
4	**11**	0		Program Pelayanan Administrasi pemenuhan administrasi		Presentase	%	100,0	100,0		160.085		141.389		Kecamatan
4	01	11	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik	%	0,00	0,00		17.675	0,00		33.188	Kecamatan Bassesangtempe
4	01	10	07		Program Peningkatan Disiplin Dan	Persentase ASN dengan predikat	%	100,00	100,00		39.790	100,00		26.625	Kecamatan Bassesangtempe
4	01	10	08		Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, Pengaturan	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan,	%	100,00	100,00		17.460	100,00		5.065	Kecamatan Bassesangtempe
4	01	10	51		Program Peningkatan Pelayanan, Pembinaan dan Pengawasan	Cakupan Pelayanan dan Koordinasi Urusan Pemerintahan Tingkat	%	100,00	100,00		195.790	100,00		205.800	Kecamatan Bassesangtempe
4	**01**	**1**			**Kecamatan Walenrang**						**423.000**			**378.**	
4	01	12	01		Program Pelayanan Administrasi	Presentase pemenuhan administrasi	%	100,0	100,0		140.340	100,00		126.4	Kecamatan
4	01	12	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik	%	0,00	0,00		29.795	0,00		17.644	Kecamatan Walenrang Timur
4	01	12	07		Program Peningkatan Disiplin Dan	Persentase ASN dengan predikat	%	100,00	100,00		39.790	100,00		-	Kecamatan Walenrang Timur
4	01	12	08		Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, Pengaturan	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan,	%	100,00	100,00		17.140	100,00		5.000	Kecamatan Walenrang Timur
4	01	12	51		Program Peningkatan Pelayanan, Pembinaan dan Pengawasan	Cakupan Pelayanan dan Koordinasi Urusan Pemerintahan Tingkat	%	100,00	100,00		195.936	100,00		229.570	Kecamatan Walenrang Timur
4	**01**	**1**			**Kecamatan Lamasi Timur**						**377.000**			**256.**	
4	01	13	01		Program Pelayanan Administrasi	Presentase pemenuhan administrasi	%	100,0	100,0		131.906	100,00		125.9	Kecamatan Lamasi
4	01	13	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik	%	0,00	0,00		52.924	0,00		18.043	Kecamatan Lamasi Timur

4	01	13	07		Program Peningkatan Disiplin Dan	Persentase ASN dengan predikat	%	100,00	100,00	39.790	100,00	7.200	Kecamatan Lamasi Timur
4	01	13	08		Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, Pengaturan	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan,	%	100,00	100,00	17.220	100,00	-	Kecamatan Lamasi Timur
4	01	13	51		Program Peningkatan Pelayanan, Pembinaan dan Pengawasan	Cakupan Pelayanan dan Koordinasi Urusan Pemerintahan Tingkat	%	100,00	100,00	135.160	100,00	105.646	Kecamatan Lamasi Timur
4	**01**	**14**			**Kecamatam Ponrang Selatan**					**1.545.270**		**685.[illegible]**	
4	01	14	01		Program Pelayanan Administrasi	Presentase pemenuhan administrasi	%	100,00	100,00	193.900	100,00	126.6[illegible]	Kecamatam Ponrang Selatan
4	01	14	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik	%	0,00	0,00	36.360	0,00	9.381	Kecamatam Ponrang Selatan
4	01	13	07		Program Peningkatan Disiplin Dan	Persentase ASN dengan predikat	%	100,00	100,00	39.790	100,00	-	Kecamatam Ponrang Selatan
4	01	14	08		Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, Pengaturan	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan,	%	100,00	100,00	17.540	100,00	-	Kecamatam Ponrang Selatan
4	01	14	50		Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan penyelenggaraan pelayanan,	%	100,00	100,00	1.089.070	100,00	393.138	Kecamatam Ponrang Selatan
4	01	14	51		Program Peningkatan Pelayanan, Pembinaan dan Pengawasan	Cakupan Pelayanan dan Koordinasi Urusan Pemerintahan Tingkat	%	100,00	100,00	168.610	100,00	156.123	Kecamatam Ponrang Selatan
4	**01**	**15**			**Kecamatan Bupon**					**1.527.270**		**1.051.[illegible]**	
4	01	15	01		Program Pelayanan Administrasi	Presentase pemenuhan administrasi	%	100,00	100,00	127.058	100,00	137.0[illegible]	Kecamatan [illegible]
4	01	15	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik	%	0,00	0,00	96.758	0,00	31.000	Kecamatan Bupon
4	01	15	07		Program Peningkatan Disiplin Dan	Persentase ASN dengan predikat	%	100,00	100,00	39.790	100,00	9.000	Kecamatan Bupon

4	01	15	08		Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, Pengaturan	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan,	%	100,00	100,00	17.300	100,00	-	Kecamatan Bupon
4	01	15	50		Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan penyelenggaraan pelayanan,	%	100,00	100,00	1.089.070	100,00	866.581	Kecamatan Bupon
4	01	15	51		Program Peningkatan Pelayanan, Pembinaan dan Pengawasan	Cakupan Pelayanan dan Koordinasi Urusan Pemerintahan Tingkat	%	100,00	100,00	157.294	100,00	8.000	Kecamatan Bupon
4	**01**	**16**			**Kecamatan Walenrang Barat**					**350.600**		**350.475**	
4	01	16	02		Program Pelayanan Administrasi	Presentase pemenuhan administrasi	%	100,00	100,00	145.036	100,00	154.4[illegible]	Kecamatan Walenrang Barat
4	01	16	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik	%	0,00	0,00	44.036	0,00	43.544	Kecamatan Walenrang Barat
4	01	16	07		Program Peningkatan Disiplin Dan	Persentase ASN dengan predikat	%	100,00	100,00	39.790	100,00	4.500	Kecamatan Walenrang Barat
4	01	16	08		Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, Pengaturan	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan,	%	100,00	100,00	16.980	100,00	-	Kecamatan Walenrang Barat
4	01	16	51		Program Peningkatan Pelayanan, Pembinaan dan Pengawasan	Cakupan Pelayanan dan Koordinasi Urusan Pemerintahan Tingkat	%	100,00	100,00	104.758	100,00	148.000	Kecamatan Walenrang Barat
4	**01**	**17**			**Kecamatan Walenrang Utara**					**1.498.470**		**524.579**	
4	01	17	01		Program Pelayanan Administrasi	Presentase pemenuhan administrasi	%	100,00	100,00	144.228	100,00	190.7[illegible]	Kecamatan Walenrang Utara
4	01	17	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik	%	0,00	0,00	16.160	0,00	15.519	Kecamatan Walenrang Utara
4	01	16	07		Program Peningkatan Disiplin Dan	Persentase ASN dengan predikat	%	100,00	100,00	39.790	100,00	9.000	Kecamatan Walenrang Utara
4	01	17	08		Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, Pengaturan	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan,	%	100,00	100,00	17.380	100,00	5.000	Kecamatan Walenrang Utara

4	01	17	50		Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan penyelenggaraan pelayanan,	%	100,00	100,00	1.089.070	100,00	276.802	Kecamatan Walenrang Utara
4	01	17	51		Program Peningkatan Pelayanan, Pembinaan dan Pengawasan	Cakupan Pelayanan dan Koordinasi Urusan Pemerintahan Tingkat	%	100,00	100,00	191.842	100,00	27.500	Kecamatan Walenrang Utara
					Kecamatan Lamasi					**1.542.470**		**1.301.**	
4	01	18	;01		Program Pelayanan Administrasi	Persentase pemenuhan administrasi	%	100,00	100,00	201.243	100,00	180.	Kecamatan
4	01	18	02		Program Peningkatan Sarana dan	Persentase Ketersediaan Sarana dan	%	0,00	0,00	23.068	0,00	7.612	Kecamatan Lamasi
4	01	18	07		Program Peningkatan Disiplin Dan	Persentase ASN dengan predikat	%	100,00	100,00	39.790	100,00	-	Kecamatan Lamasi
4	01	18	08		Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, Pengaturan	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan,	%	100,00	100,00	17.300	100,00	-	Kecamatan Lamasi
4	01	18	50		Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan penyelenggaraan pelayanan,	0	%	100,00	1.089.870	100,00	834.388	Kecamatan Lamasi
4	01	18	51		Program Peningkatan Pelayanan, Pembinaan dan Pengawasan	Cakupan Pelayanan dan Koordinasi Urusan Pemerintahan Tingkat	%	100,00	100,00	171.199	100,00	279.594	Kecamatan Lamasi
4	**01**	**19**			**Kecamatan Kamanre**					**1.449.270**		**1.102.**	
4	01	19	01		Program Pelayanan Administrasi	Persentase pemenuhan administrasi	%	100,00	100,00	178.649	100,00	49.1	Kecamatan
4	01	19	02		Program Peningkatan Sarana dan	Persentase Ketersediaan Sarana dan	%	0,00	0,00	19.190	0,00	85.970	Kecamatan Kamanre
4	01	19	07		Program Peningkatan Disiplin Dan	Persentase ASN dengan predikat	%	100,00	100,00	39.790	100,00	10.500	Kecamatan Kamanre
4	01	19	08		Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, Pengaturan	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan,	%	100,00	100,00	17.140	100,00	5.000	Kecamatan Kamanre

4	01	19	50		Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan penyelenggaraan pelayanan,	%	100,00	100,00	1.089.070	100,00	902.020	Kecamatan Kamanre
4	01	19	51		Program Peningkatan Pelayanan, Pembinaan dan Pengawasan	Cakupan Pelayanan dan Koordinasi Urusan Pemerintahan Tingkat	%	100,00	100,00	105.431	100,00	49.500	Kecamatan Kamanre
4	**01**	**20**			**Kecamatan Bajo Barat**					**374.600**		**323.**	
4	01	20	01		Program Pelayanan Administrasi	Persentase pemenuhan administrasi	%	100,00	100,00	172.245	100,00	166.3	Kecamatan Bajo
4	01	20	;02		Program Peningkatan Sarana dan	Persentase Ketersediaan Sarana dan	%	0,00	0,00	29.290	0,00	8.000	Kecamatan Bajo Barat
4	01	20	07		Program Peningkatan Disiplin Dan	Persentase ASN dengan predikat	%	100,00	100,00	39.790	100,00	-	Kecamatan Bajo Barat
4	01	20	08		Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, Pengaturan	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan,	%	100,00	100,00	17.220	100,00	5.000	Kecamatan Bajo Barat
4	01	20	51		Program Peningkatan Pelayanan, Pembinaan dan Pengawasan	Cakupan Pelayanan dan Koordinasi Urusan Pemerintahan Tingkat	%	100,00	100,00	116.055	100,00	144.000	Kecamatan Bajo Barat
4	**01**	**21**			**Kecamatan Belopa**					**4.802.880**		**4.054.**	
4	01	21	01		Program Pelayanan Administrasi	Persentase pemenuhan administrasi	%	100,00	100,00	214.221	100,00	164.1	Kecamatan
4	01	21	02		Program Peningkatan Sarana dan	Persentase Ketersediaan Sarana dan	%	0,00	0,00	37.724	0,00	16.595	Kecamatan Belopa
4	01	21	08		Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, Pengaturan	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan,	%	100,00	100,00	17.220	100,00	-	Kecamatan Belopa
4	01	21	07		Program Peningkatan Disiplin Dan	Persentase ASN dengan predikat	%	100,00	100,00	39.790	100,00	-	Kecamatan Belopa
4	01	21	50		Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan penyelenggaraan pelayanan,	%	100,00	100,00	4.356.280	100,00	3.625.248	Kecamatan Belopa

4	01	21	51		Program Peningkatan Pelayanan, Pembinaan dan Pengawasan	Cakupan Pelayanan dan Koordinasi Urusan Pemerintahan Tingkat	%	100,00	100,00	137.646	100,00	248.125	Kecamatan Belopa
4	**01**	**22**			**Kecamatan Larompong Selatan**					**411.800**		**314.221**	
4	01	22	01		Program Pelayanan Administrasi	Persentase pemenuhan administrasi	%	100,00	100,00	170.180	100,00	115.521	Kecamatan Larompong Selatan
4	01	22	02		Program Peningkatan Sarana dan	Persentase Ketersediaan Sarana dan	%	0,00	0,00	40.304	0,00	-	Kecamatan Larompong Selatan
4	01	22	07		Program Peningkatan Disiplin Dan	Persentase ASN dengan predikat	%	100,00	100,00	39.790	100,00	-	Kecamatan Larompong Selatan
4	01	22	08		Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, Pengaturan	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan,	%	100,00	100,00	17.300	100,00	-	Kecamatan Larompong Selatan
4	01	22	51		Program Peningkatan Pelayanan, Pembinaan dan Pengawasan	Cakupan Pelayanan dan Koordinasi Urusan Pemerintahan Tingkat	%	100,00	100,00	144.226	100,00	198.800	Kecamatan Larompong Selatan
4	**01**	**23**			**Kecamatan Larompong**					**2.675.140**		**1.304.221**	
4	01	23	01		Program Pelayanan Administrasi	Persentase pemenuhan administrasi	%	100,00	100,00	184.123	100,00	165.641	Kecamatan Larompong
4	01	23	02		Program Peningkatan Sarana dan	Persentase Ketersediaan Sarana dan	%	0,00	0,00	25.250	0,00	18.503	Kecamatan Larompong
4	01	23	07		Program Peningkatan Disiplin Dan	Persentase ASN dengan predikat	%	100,00	100,00	39.790	100,00	-	Kecamatan Larompong
4	01	23	08		Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, Pengaturan	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan,	%	100,00	100,00	17.540	100,00	-	Kecamatan Larompong
4	01	23	50		Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan penyelenggaraan pelayanan,	%	100,00	100,00	2.178.140	100,00	900.486	Kecamatan Larompong
4	01	23	51		Program Peningkatan Pelayanan, Pembinaan dan Pengawasan	Cakupan Pelayanan dan Koordinasi Urusan Pemerintahan Tingkat	%	100,00	100,00	230.297	100,00	219.600	Kecamatan Larompong

4	**01**	**24**			**Kecamatan Suli**					**1.463.670**		**420.**	
4	01	24	01		Program Pelayanan Administrasi	Persentase pemenuhan administrasi	%	100,00	100,00	160.590	100,00	171.0	Kecamatan Suli
4	01	24	02		Program Peningkatan Sarana dan	Persentase Ketersediaan Sarana dan	%	0,00	0,00	35.350	0,00	-	Kecamatan Suli
4	01	24	07		Program Peningkatan Disiplin Dan	Persentase ASN dengan predikat	%	100,00	100,00	39.790	100,00	-	Kecamatan Suli
4	01	24	08		Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, Pengaturan	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan,	%	100,00	100,00	17.540	100,00	-	Kecamatan Suli
4	01	24	50		Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan penyelenggaraan pelayanan,	%	100,00	100,00	1.089.070	100,00	189.600	Kecamatan Suli
4	01	24	51		Program Peningkatan Pelayanan, Pembinaan dan Pengawasan	Cakupan Pelayanan dan Koordinasi Urusan Pemerintahan Tingkat	%	100,00	100,00	121.330	100,00	59.862	Kecamatan Suli
4	**01**	**25**			**Kecamatan Suli Barat**					**1.463.670**		**1.127.**	
4	01	25	01		Program Pelayanan Administrasi	Persentase pemenuhan administrasi	%	100,00	100,00	161.509	100,00	149.8	Kecamatan Suli Barat
4	01	25	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik	%	0,00	0,00	33.027	0,00	30.515	Kecamatan Suli Barat
4	01	25	07		Program Peningkatan Disiplin Dan	Persentase ASN dengan predikat	%	100,00	100,00	39.790	100,00	9.000	Kecamatan Suli Barat
4	01	25	08		Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, Pengaturan	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan,	%	100,00	100,00	17.140	100,00	-	Kecamatan Suli Barat
4	01	25	50		Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan penyelenggaraan pelayanan,	%	100,00	100,00	1.089.070	100,00	884.039	Kecamatan Suli Barat
4	01	25	51		Program Peningkatan Pelayanan, Pembinaan dan Pengawasan	Cakupan Pelayanan dan Koordinasi Urusan Pemerintahan Tingkat	%	100,00	100,00	123.134	100,00	54.617	Kecamatan Suli Barat

4	**01**	**26**			**Kecamatan Belopa Utara**					**1.494.870**		**789.**	
4	01	26	0		Program Pelayanan Administrasi	Persentase pemenuhan administrasi	%	100,0	100,0	230.654	100,00	226.2	Kecamatan Belopa
4	01	26	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik	%	0,00	0,00	19.695	0,00	15.437	Kecamatan Belopa Utara
4	01	26	07		Program Peningkatan Disiplin Dan	Persentase ASN dengan predikat	%	100,00	100,00	39.790	100,00	9.000	Kecamatan Belopa Utara
4	01	26	08		Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, Pengaturan	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan,	%	100,00	100,00	17.140	100,00	4.000	Kecamatan Belopa Utara
4	01	26	50		Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan penyelenggaraan pelayanan,	%	100,00	100,00	1.089.070	100,00	270.462	Kecamatan Belopa Utara
4	01	26	51		Program Peningkatan Pelayanan, Pembinaan dan Pengawasan	Cakupan Pelayanan dan Koordinasi Urusan Pemerintahan Tingkat	%	100,00	100,00	98.521	100,00	264.200	Kecamatan Belopa Utara
4	**01**	**27**			**Kecamatan Bajo**					**2.570.740**		**1.245.**	
4	01	27	01		Program Pelayanan Administrasi	Persentase pemenuhan administrasi	%	100,0	100,0	156.752	100,00	161.3	Kecamatan Bajo
4	01	27	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik	%	0,00	0,00	24.240	0,00	30.378	Kecamatan Bajo
4	01	27	07		Program Peningkatan Disiplin Dan	Persentase ASN dengan predikat	%	100,00	100,00	39.790	100,00	-	Kecamatan Bajo
4	01	27	08		Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, Pengaturan	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan,	%	100,00	100,00	17.460	100,00	8.899	Kecamatan Bajo
4	01	27	50		Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan penyelenggaraan pelayanan,	%	100,00	100,00	2.178.140	100,00	864.513	Kecamatan Bajo
4	01	26	51		Program Peningkatan Pelayanan, Pembinaan dan Pengawasan	Cakupan Pelayanan dan Koordinasi Urusan Pemerintahan Tingkat	%	100,00	100,00	154.358	100,00	180.340	Kecamatan Bajo

4	**0**	**2**			**Kecamatan Latimojong**					**389.000**		**365.**	
4	0	2	0		Program Pelayanan Administrasi	Persentase pemenuhan administrasi	%	100,0	100,0	114.130	100,00	111.8	Kecamatan
4	0 1	2 8	0 2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik	%	0,00	0,00	42.420	0,0 0	54.5 12	Kecamatan Latimojong
4	0 1	2 8	0 7		Program Peningkatan Disiplin Dan	Persentase ASN dengan predikat	%	100,0 0	100,0 0	39.790		-	Kecamatan Latimojong
4	0 1	2 8	0 8		Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, Pengaturan	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan,	%	100,0 0	100,0 0	17.460		-	Kecamatan Latimojong
4	0 1	2 8	5 1		Program Peningkatan Pelayanan, Pembinaan dan Pengawasan	Cakupan Pelayanan dan Koordinasi Urusan Pemerintahan Tingkat	%	100,0 0	100,0 0	175.200	100,00	199.0 00	Kecamatan Latimojong
4	**0**	**2**			**Kecamatan Ponrang**					**2.615.140**		**1.566.**	
4	0	2	0		Program Pelayanan Administrasi	Persentase pemenuhan administrasi	%	100,0	100,0	170.357	100,00	129.6	Kecamatan
4	0 1	2 9	0 2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik	%	0,00	0,00	56.560	0,0 0	31.0 00	Kecamatan Ponrang
4	0 1	2 9	0 7		Program Peningkatan Disiplin Dan	Persentase ASN dengan predikat	%	100,0 0	100,0 0	39.790		-	Kecamatan Ponrang
4	0 1	2 9	0 8		Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, Pengaturan	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan,	%	100,0 0	100,0 0	17.300	100,00	16.0 00	Kecamatan Ponrang
4	0 1	2 9	5 0		Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan penyelenggaraan pelayanan,	%	100,0 0	100,0 0	2.178.140	100,00	1.368. 951	Kecamatan Ponrang
4	0 1	2 9	5 1		Program Peningkatan Pelayanan, Pembinaan dan Pengawasan	Cakupan Pelayanan dan Koordinasi Urusan Pemerintahan Tingkat	%	100,0 0	100,0 0	152.993	100,00	20.5 50	Kecamatan Ponrang
4	**0**	**3**			**Kecamatan Walenrang**					**1.516.270**		**1.049.**	
4	0	3	0		Program Pelayanan Administrasi	Persentase pemenuhan administrasi	%	100,0	100,0	158.570	100,00	177.0	Kecamatan

4	01	30	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik	%	0,00	0,00	42.420	0,00	28.786	Kecamatan Walenrang
4	01	30	07		Program Peningkatan Disiplin Dan	Persentase ASN dengan predikat	%	100,00	100,00	39.790		-	Kecamatan Walenrang
4	01	30	08		Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, Pengaturan	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan,	%	100,00	100,00	17.220		-	Kecamatan Walenrang
4	01	30	50		Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan penyelenggaraan pelayanan,	%	100,00	100,00	1.089.070	100,00	632.579	Kecamatan Walenrang
4	01	30	51		Program Peningkatan Pelayanan, Pembinaan dan Pengawasan	Cakupan Pelayanan dan Koordinasi Urusan Pemerintahan Tingkat	%	100,00	100,00	169.200	100,00	210.602	Kecamatan Walenrang
D					**Urusan/ Bidang Urusan/ Program**	**Indikator Program (Outcome)**	**Satuan**	**Kinerja**	**Target dan Anggaran Tahun 2020**		**Capaian Kinerja Tahun 2020**		**Perangkat Daerah Penanggung**
									Target	**Rp**	**Target**	**Rp**	
	(1)				**(2**	**(3)**	**(4**	**(5**	**(6**	**(7)**			**(18**
4	**01**	**31**			**Kecamatan**					**367.200**		**309.**	
4	01	31	01		Program Pelayanan Administrasi	Persentase pemenuhan administrasi	%	100,00	100,00	156.550	100,00	120.7	Kecamatan Utara
4	01	31	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik	%	0,00	0,00	81.628	0,00	58.318	Kecamatan Utara
4	01	31	07		Program Peningkatan Disiplin Dan	Persentase ASN dengan predikat	%	100,00	100,00	39.790	100,00	6.000	Kecamatan Utara
4	01	31	08		Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, Pengaturan	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan,	%	100,00	100,00	17.460	100,00	-	Kecamatan Utara
4	01	31	51		Program Peningkatan Pelayanan, Pembinaan dan Pengawasan Urusan Pemerintahan	Cakupan Pelayanan dan Koordinasi Urusan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	%	100,00	100,00	71.772	100,00	124.280	Kecamatan Utara

4	**0**	**0**			**Inspektorat Daerah**					**6.502.901**		**5.094.**	
4	0	0	0		Program Pelayanan Administrasi	Tingkat Kinerja Pelayanan Administrasi	%	100,0	100,0	800.476	100,00	833.1	Inspektorat
4	0	0	0		Program Peningkatan Sarana dan	Tingkat ketersediaan sarana dan	%	0,00	97,00	800.425	97,00	1.393.	Inspektorat
0	0	0	0 7		Program Peningkatan Disiplin dan	Tingkat ketersediaan sarana dan	%	0,00	100,0 0	37.000	100,00	64.3 95	Inspektorat Daerah
4	0 2	0 1	0 8		Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, Pengaturan	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan,	%	0,00	100,0 0	52.480	100,00	-	Inspektorat Daerah
						Persentase ketersediaan peraturan pendukung	%	0,00	100,0 0		100,00	-	
4	0 2	0 1	2 0		Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian	Skor LPPD	Angka	2.771	2.885	4.012.520	2.885,0 0	2.574. 000	Inspektorat Daerah
ode					**Urusan/ Bidang Urusan/ Program**	**Indikator Program (Outcome)**	**Satuan**	**Kinerja Awal RPJM**	**Target dan Anggaran Tahun 2020**		**Capaian Kinerja Tahun 2020**		**Perangkat Daerah Penanggung**
									Target	**Rp**	**Target**	**Rp**	
	(1)				**(2**	**(3)**	**(4**	**(5**	**(6**	**(7)**			**(18**
4	0 2	0 1	2 1		Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan (Prioritas)	Cakupan SDM Apartaur yang mengikuti pelatihan dan lulus tes auditor	%	0,00	100,0 0	800.000	100,00	228.9 52	Inspektorat Daerah
4	**0**	**0**			**Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang**					**5.514.371**		**5.433.**	
4	0 3	0 1	0 1		Program Pelayanan Administrasi	Persentase pemenuhan administrasi	%	100,0 0	100,0 0	1.234.492	100,00	1.335. 497	Badan Pembangunan dan
4	0 3	0 1	0 2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi	%	92,81	97,43	150.000	97,43	1.019. 044	Badan Pembangunan dan Litbang Daerah
4	0 3	0 1	0 8		Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, Pengaturan	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan,	%	75,00	100,0 0	123.400	100,00	59.324	Badan Pembangunan dan Litbang Daerah
						Persentase ketersediaan peraturan pendukung	%	50,00	100,0 0		100,00	-	

4	03	01	07		Program Peningkatan Disiplin Dan	Persentase ASN dengan predikat	%	92,68	100,00	105.490	100,00	40.800	Badan Pembangunan dan Litbang Daerah
4	03	01	15		Program Pengembangan Data/ Informasi	Data dan informasi pencapaian sasaran	dokumen	0	4	547.186	4,00	339.294	Badan Pembangunan dan Litbang Daerah
4	03	01	21		Program Perencanaan Pembangunan Daerah (Prioritas)	Persentase penjabaran konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD	%	100,00	100,00	1.434.909	100,00	91.942	Badan Pembangunan dan Litbang Daerah
4	03	01	22		Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bidang Perekonomian, SDA	Rata-rata Capaian Kinerja Program Pembangunan Bidang	%	n.a	100,00	361.726	100,00	181.024	Badan Pembangunan dan Litbang Daerah
4	03	01	23		Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Bidang Pemerintahan dan	Rata-rata Capaian Kinerja Program Pembangunan Daerah	%	n.a	100,00	486.246	100,00	263.599	Badan Pembangunan dan Litbang Daerah
KODE					**Urusan/ Bidang Urusan/ Program**	**Indikator Program (Outcome)**	**Satuan**	**Kondisi Kinerja Awal RPJMD**	**Target dan Anggaran Tahun 2020**		**Capaian Kinerja Tahun 2020**		**Perangkat Daerah Penanggung Jawab**
									Target	**Rp**	**Target**	**Rp**	
	(1)				**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**			**(18)**
4	03	01	24		Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Cakupan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan	%	60,00	100,00	298.036	100,00	179.261	Badan Pembangunan dan Litbang Daerah
4	03	01	25		Program Kelitbangan Daerah (Prioritas)	Hasil kelitbangan utama	Rekomesi	0,00	1	772.886	1,00	1.923.619	Badan Pembangunan dan Litbang Daerah
						Hasil kelitbangan pendukung	Rekomesi	0,00	1		1,00	-	
4	**04**				**Kecamatan**								
4	**04**	**05**			**Badan Pengelolaan Keuangan Daerah**					**5.669.438**		**5.608.116**	
4	04	05	01		Program Pelayanan Administrasi	Persentase pemenuhan administrasi	%	100,00	100,00	1.730.574	100,00	1.489.[illegible]	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
4	04	05	02		Program Peningkatan Sarana dan	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana	%	0,00	0,00	456.150	0,00	454.384	Badan Pengelolaan Keuangan
4	04	05	08		Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, Pengaturan	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan,	%	100,00	100,00	93.760	100,00	54.616	Badan Pengelolaan Keuangan Daer

						Persentase ketersediaan peraturan pendukung	%	100,00	100,00		100,00		
4	04	05	07		Program Peningkatan Disiplin Dan	Persentase ASN dengan predikat	%	100,00	100,00	307.091	100,00	69.800	Badan Pengelolaan Keuangan
4	04	05	40		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Anggaran	Persentase OPD yang menyusun RKA	%	0,00	100,00	1.487.124	100,00	1.969.813	Badan Pengelolaan Keuangan
4	04	05	41		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Perbendaharaan	Persentase Penerbitan SP2D yang	%	85,00	90,00	342.087	90,00	424.837	Badan Pengelolaan Keuangan
4	04	05	42		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan	Perentase SKPD yang menyampaikan	%	0,00	96,00	739.522	96,00	710.949	Badan Pengelolaan Keuangan
4	04	05	43		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah (Prioritas)	Persentase SKPD dalam penatausahaan BMD secara akurat	%	0,00	96,00	513.131	96,00	434.318	Badan Pengelolaan Keuangan Daer
4	0	0			[illegible]					[illegible]		[illegible]	

KOD					Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Indikator Program (Outcome)	Satuan	Kondisi RPJM (5)	Target dan Anggaran Tahun 2020 (6)	(7)	Capaian Kinerja Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawa
		(1)											
4					Program Pelayanan Administrasi	Persentase pemenuhan administrasi	%	[illegible]	100,00	5.244.506	100,00	4.098.117	Badan Pendapatan Daerah
4	04	06	02		Program Peningkatan Sarana dan	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana	%	70,63	78,71	294.314	78,71	356.4	Badan Pendapatan Daerah
4	04	06	08		Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, Pengaturan	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan,	%	75,00	100,00	253.163	100,00	42.394	
						Persentase ketersediaan peraturan pendukung	%	50,00	100,00		100,00	-	
4	04	06	07		Program Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN dengan predikat	%	100,00	100,00	137.927	100,00	87.600	Badan Pendapatan Daerah
4	0	0	4			Persentase Realisasi Pajak Daerah terhadap	%	97,19	98,99	1.060.076	98,99	810.454	Badan Pendapatan
4	04	06	45		Program Peningkatan Penerimaan	Persentase ketercapaian target	%	90,38	90,38	190.540	90,38	144.462	Badan Pendapatan Daerah

4	0 4	0 6	4 6		Program Pengkajian dan Pengembangan Potensi Pendapatan Daerah	Persentase Realisasi Penerimaan Dana Perimbangan terhadap	%	90,00	90,00	215.960	90,00	245.1 13	Badan Pendapatan Daerah
4	0 4	0 6	4 7		Program Peningkatan Penerimaan PBB	Persentase realisasi penerimaan PBB	%	0,00	80,00	1.475.650	80,00	943.2 56	Badan Pendapatan Daerah
					Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan								
					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber					**8.893.540**		**4.304. 599**	
4	0 5	0 9	0 1		Program Pelayanan Administrasi pemenuhan administrasi	Persentase	%	100,0 0	100,0 0	1.085.993	100,00	1.250	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4	0	0	0		Program Peningkatan Sarana dan	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana	%	74,52	75,06	4.314.800	75,06	337.9 30	Badan Kepegawaian dan
4	0 5	0 9	0 8		Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, Pengaturan	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan,	%	100,0 0	100,0 0	53.000	100,00	34.1 83	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
						Persentase ketersediaan peraturan pendukung	%	100,0 0	100,0 0		100,00	-	
D					**Urusan/ Bidang Urusan/ Program**	**Indikator Program (Outcome)**	**Satuan**	**Kinerja**	**Target dan Anggaran Tahun 2020**		**Capaian Kinerja Tahun 2020**		**Perangkat Daerah Penanggung**
									Target	**Rp**	**Target**	**Rp**	
		(1			(2	(3	(4	(5	(6	(7)			(18)
4	0 5	0 9	0 7		Program Peningkatan Disiplin Dan	Persentase ASN perangkat daerah	%	100,0 0	100,0 0	58.490	100,00	60.0 00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan
4	0 5	0 9	1 8		Program Pengadaan, Pemberhentian, dan	Cakupan penyelenggaraan	%	n. a	100,0 0	668.049	100,00	828.9 79	Badan Kepegawaian dan Pengembangan
4	0 5	0 9	1 9		Program Penyelenggaraan Mutasi dan	Persentase penempatan SDM sesuai kompetensi	%	n. a	0,00	906.360	0,0 0	1.213. 703	Badan Kepegawaian dan Pengembangan
4	0 5	0 9	2 0		Program Pengembangan Kompetensi	Persentase pejabat yang telah mengikuti pendidikan	%	n. a	100,0 0	1.806.849	100,00	579.4 79	Badan Kepegawaian dan Pengembangan
					Jumlah					**822.013.46**		**672.234**	

Tabel 7.3.

Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
Kabupaten Luwu Tahun 2021-2024

KODE				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal Perubahan (2020)	Target dan Anggaran								Kondisi kinerja pada Akhir periode		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								2021		2022		2023		2024				
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1				**Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar**					**#REF!**		**#REF!**		**#REF!**		**#REF!**		**#REF!**	
1	01			**Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan**					**404.852.926**		**408.901.455**		**413.012.470**		**417.144.375**		**1.643.911.226**	
1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase warga negara usia 7-15 Tahun yang berpartisaipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs)	%	35,15	61,55	113.302.640	63,08	114.435.666	64,66	115.580.023	66,28	116.735.823	66,28	460.054.152	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Persentase jumlah warga usia 7-18yang belum menyelsaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan setara	%	98,21	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
					Persentase warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisispasi dalam pendidikan PAUD	%	97,12	97,31		97,33		97,35		100,00		100,00		
1	01	03		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Jumlah kurikulim muatan lokal yang dikembangkan	kurikulum		1	43.994	1	44.434	1	44.878	1	45.327	1	178.634	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	04		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D.IV	%	88,01	91,46	51.857	93,74	52.376	96,09	52.900	98,49	53.429	98,49	210.561	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	05		PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Cakupan penyelenggaraan pengendalian perizinan pendidikan	%	100,00		-			100,00	22.000	100,00	24.000	100,00	46.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
1	02	02		PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase indikator SPM yang dapat dicapai sesuai target yang ditetapkan	%	8,33	100,00	160.817.746	100,00	163.632.009	100,00	178.939.335	100,00	177.900.850	100,00	681.289.940	Dinas Kesehatan dan RSUD Batara Guru
1	02	03		PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Puskesmas yang memiliki tenaga kesehatan sesuai standar	%	77,10	77,27	382.881	77,27	194.013	77,27	194.013	77,27	194.043	77,27	964.950	Dinas Kesehatan
					Rasio tenaga medis per satuan penduduk	Angka	0,00021	0,00021		0,00021		0,00021		0,00021		0,00021		
					Rasio tenaga kesehatan lain per satuan penduduk	Angka	0,01146	0,01146		0,01146		0,01146		0,01146		0,01146		
1	02	04		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Pemenuhan Izin Sediaan Farmasi	%	100,00	100,00	242.357	100,00	261.767	100,00	261.767	100,00	261.891	100,00	1.027.782	Dinas Kesehatan

KODE				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal 2020	Target dan Anggaran								Kondisi kinerja pada Akhir periode		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								2021		2022		2023		2024				
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1	02	05		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase desa/kelurahan yang telah menerapkan PHBS	%	100,00	0,00	692.862	0,00	336.451	0,00	361.912	0,00	361.912	0,00	1.753.138	Dinas Kesehatan dan RSUD Batara Guru
																	-	
1	**03**			**Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**					**178.479.686**		**183.527.496**		**185.588.971**		**187.413.560**		**735.009.713**	
1	03	02		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	%	36,02	37,24	19.562.903	37,30	19.758.532	37,36	19.956.118	37,41	20.155.679	37,41	79.433.232	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
					Persentase irigasi dalam kondisi baik	Angka	40,26	42,01		42,99		43,67		44,54		44,54		
1	03	03		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	%	47,94	49,90	11.930.777	51,15	12.050.085	52,43	12.170.586	53,74	12.292.291	53,74	48.443.739	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	04		PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase wilayah perkotaan yang telah dilayani oleh sistem persampahan	%	100,00	100,00	150.000	100,00	-	100,00	250.000	100,00	250.000	100,00	650.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	05		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik	%	84,52	86,53	14.364.159	87,64	16.757.801	88,80	16.902.879	89,02	17.049.407	89,02	65.074.246	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	06		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase jalan yang memiliki drainase/saluran pembuangan air (minimal1,5 m)	%	50,30	50,50	2.534.017	50,60	2.559.357	50,70	2.584.951	50,80	2.610.800	50,80	10.289.124	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	08		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rasio kepatuhan IMB kabupaten	Angka	0,99	0,99	6.395.643	0,99	6.459.599	0,99	6.524.195	0,99	6.589.437	0,99	25.968.875	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	09		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase ruang publik yang berubah peruntukannya	%	0,10	0,10	1.728.912	0,10	100.000	0,10	100.000	0,10	100.000	0,10	2.028.912	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	10		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten	Angka	0,24	0,25	111.994.447	0,26	113.114.392	0,27	114.245.536	0,28	115.387.991	0,28	454.742.366	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	11		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	0,000	0,000	100.000	0,001	101.000	0,001	102.010	0,001	103.030	0,001	406.040	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
					Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Angka	0,99	0,99		0,99		0,99		0,99		0,99		
1	03	12		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Ketaatan terhadap RTRW	%	100,00	100,00	50.000	100,00	89.999	100,00	90.599	100,00	86.205	100,00	316.804	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

KODE				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal 2020	Target dan Anggaran								Kondisi kinerja pada Akhir periode		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								2021		2022		2023		2024				
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1	04	02		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten	%	100,00	100,00	189.994	100,00	1.141.150	100,00	1.127.308	100,00	1.123.485	100,00	3.581.937	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	03		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten yang ditangani	%	3,88	4,85	1.560.226	6,31	1.575.828	8,25	1.591.586	9,71	1.607.502	9,71	6.335.143	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	04		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase RTLH (Rumah Tidak Layak Huni	%	9,91	9,90	-	9,89	500.000	9,88	500.000	9,87	500.000	9,87	1.500.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	05		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	%	97,00	97,01	6.745.178	97,01	7.906.954	97,01	9.070.498	97,01	10.408.572	97,01	34.131.202	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	05		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Cakupan penyelenggaraan pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman	%	100,00	100,00	-	100,00	25.000	100,00	25.000	100,00	25.000	100,00	75.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	05	02		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100,00	100,00	2.201.879	100,00	2.471.036	100,00	2.492.589	100,00	2.514.356	100,00	9.679.861	Satuan Polisi Pamong Praja
					Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
1	05	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	%	100,00	100,00	2.421.208	100,00	2.445.421	100,00	2.469.875	100,00	2.494.573	100,00	9.831.077	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100,00	100,00	19.549.992	100,00	1.594.112	100,00	1.050.314	100,00	1.054.937	100,00	23.249.355	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
					Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
					Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
1	05	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	%	100,00	100,00	2.862.723	100,00	3.161.849	100,00	3.242.678	100,00	4.913.435	100,00	14.180.685	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

KODE				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal 2020	Target dan Anggaran								Kondisi kinerja pada Akhir periode		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								2021		2022		2023		2024				
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1	05	04		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100,00	100,00	2.518.700	100,00	3.661.700	100,00	3.661.700	100,00	3.661.700	100,00	13.503.800	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
					Waktu tanggap (response time) penanganan ke bakaran	%	15	15		15		15		15		15		
																	-	
1	06			**Urusan Pemerintahan Bidang Sosial**					**4.743.055**		**4.579.165**		**4.596.227**		**4.643.704**		**18.562.152**	
1	06	02		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase ketersediaan lembaga kesejahteraan sosial kabupaten	%	100,00	100,00	641.046	100,00	205.136	100,00	175.267	100,00	175.400	100,00	1.196.849	Dinas Sosial
					Persentase ketersediaan pekerja sosial dan tenaga kesejahteraan sosial masyarakat	%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00				
1	06	03		PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase warga migran korban tindak kekerasan yang telah tertangani	%	100,00	100,00	12.367	100,00	12.491	100,00	12.616	100,00	12.742	100,00	50.216	Dinas Sosial
1	06	04		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang DisabilitasTerlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, dan Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti	%	100,00	100,00	75.049	100,00	306.799	100,00	313.057	100,00	319.323	100,00	1.014.227	Dinas Sosial
1	06	05		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase anak-anak terlantar yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	%	100,00	100,00	218.046	100,00	220.226	100,00	222.428	100,00	224.653	100,00	885.353	Dinas Sosial
1	06	06		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Pcrsentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	%	100,00	100,00	401.280	100,00	405.293	100,00	409.346	100,00	413.439	100,00	1.629.359	Dinas Sosial
1	06	07		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Cakupan penyelenggaraan pengelolaan taman makam pahlawan nasional kabupaten	%	100,00	100,00	19.652	100,00	19.848	100,00	20.047	100,00	20.247	100,00	79.794	Dinas Sosial
																	-	
2				**Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar**													**-**	
2	**07**			**Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja**					**5.834.737**		**5.647.445**		**5.647.445**		**5.647.445**		**22.777.074**	
2	07	03		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	%	60,00	60,01	129.505	60,02	129.505	60,03	129.505	60,04	129.505	60,04	518.022	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
					Tingkat produktivitivitas tenaga kerja	%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		

KODE				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal (2020)	Target dan Anggaran								Kondisi kinerja pada Akhir periode		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								2021		2022		2023		2024				
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
2	07	04		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja yang ditempatkan (dalam dan lua megeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten	%	10,00	10,00	41.071	10,00	41.071	10,00	41.071	10,00	41.071	10,00	164.285	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
2	07	05		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak ((PP /PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	98,00	98,00	236.509	98,00	236.509	98,00	236.509	98,00	236.509	98,00	946.035	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
2	07	06		PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Cakupan pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi													Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
																	-	
2	**08**			**Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**					**3.774.679**		**3.959.936**		**3.959.936**		**4.027.555**		**15.722.106**	
2	08	02		PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) pada belanja langsung APBD	%	0,00	0,00	163.603	0,00	163.603	0,00	163.603	0,00	163.603	0,00	654.412	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
					Indeks Pemberdayaan Gender	Angka	66,10	66,98		67,74		68,31		68,98		68,98		
2	08	03		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan	Angka	0,001	0,001	324.489	0,001	301.029	0,001	301.029	0,001	301.029	0,001	1.227.576	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	04		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Cakupan penyelenggaraan peningkatan kualitas keluarga	%	77,78	77,78	183.570	77,78	178.130	77,78	178.130	77,78	178.130	77,78	717.959	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	05		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase data gender dan anak yang dikelola dalam sistem	%	100,00	100,00	34.401	100,00	34.401	100,00	34.401	100,00	34.401	100,00	137.604	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	06		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Cakupan penyelenggaraan pemenuhan hak anak	%	n.a	66,67	49.998	83,33	82.441	83,33	82.441	83,33	99.997	83,33	314.877	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	07		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	%	100,00	100,00	102.217	100,00	150.891	100,00	150.891	100,00	150.891	100,00	554.890	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	09	02		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase ketersediaan pangan (cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan)	%	100,00	100,00	1.028.020	100,00	1.425.000	100,00	1.432.100	100,00	1.439.271	100,00	5.324.391	Dinas Ketahanan Pangan

KODE				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal 2020	Target dan Anggaran								Kondisi kinerja pada Akhir periode		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								2021		2022		2023		2024				
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
2	09	03		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Tingkat Komsumsi Protein	Gr/ Kapita/ Hari	63,00	65,00	854.003	66,00	1.290.311	67,00	1.300.080	68,00	1.309.947	68,00	4.754.340	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	04		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Desa/Kelurahan Tahan Pangan	%	73,18	74,09	19.001	74,55	24.700	75,00	24.947	75,45	25.196	75,45	93.844	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	05		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Ketersediaan Informasi Harga, Pasokan dan Distribusi Pangan setiap bulan	%	100,00	100,00	33.342	100,00	61.683	100,00	62.300	100,00	62.923	100,00	220.249	Dinas Ketahanan Pangan
																	-	
2	**10**			**Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan**					**2.589.065**		**2.734.456**		**2.761.300**		**2.788.413**		**10.873.234**	
2	10	04		PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	%	0,00	0,00	49.997	0,00	49.997	0,00	49.997	0,00	49.997	100,00	199.989	Dinas Pertanahan
2	10	06		PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	%	0,00	0,00	20.000	0,00	20.200	0,00	20.402	0,00	20.606	0,00	81.206	Dinas Pertanahan
2	10	10		PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal dan pembangunan fasilitas umum	ha	0,00	0,00	299.990	0,00	302.990	0,00	306.020	0,00	309.080	0,00	1.218.080	Dinas Pertanahan
																	-	
2	**11**			**Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup**					**5.217.357**		**5.745.595**		**6.135.613**		**6.751.659**		**23.850.224**	
2	11	02		PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan hidup	%	0,00	0,00	-	0,00	10.000	0,00	10.000	0,00	310.000	0,00	330.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	03		PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks kualitas air	Angka	0,00	26,65	165.315	26,65	165.315	26,65	340.315	26,65	340.315	26,65	1.011.260	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	05		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3 dan limbah B3)	%				100,00	20.000	100,00	20.000	100,00	20.000	100,00	60.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase izin lingkungan dan PPLH yang dibina dan diawasi sesuai ketentuan peraturan perundangan	%				37,89	46.500	37,89	16.500	37,89	46.500	37,89	109.500	Dinas Lingkungan Hidup
					Ketaatan penanggungjawab usaha dan atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten	%				0,00		0,00		0,00		0,00		

KODE				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal 2020	Target dan								Kondisi kinerja pada Akhir periode		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								202		202		202		202				
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(8)	(9)	(10)	(11	(12)	(13	(14)	(15	(16)	(17	(18
2	11	07		PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PELU	Persentase masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang telah memperoleh pengakuan	%				100,00	17.900	100,00	17.900	100,00	17.900	100,00	53.700	
2	11	08		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah masyarakat yang telah memperoleh pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	orang				0	15.000	0	15.000	0	15.000	0,00	45.000	
2	11	11		PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengelolaan sampah di wilayah kabupaten	%	0,00	90,19	2.153.478	90,19	2.364.429	90,19	2.552.511	90,19	2.807.762	90,19	9.878.179	Dinas Lingkungan Hidup
2	12	02		PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase perekaman KTP Elektronik	%	94,22	94,35	1.173.804	94,45	1.249.307	94,55	1.249.307	94,65	1.249.307	94,65	4.921.725	Dinas Kependudukan dan
					Pcrscntase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (salu) hari yang memiliki KIA	%	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
					Persentase kepemilikan akta	%	86,22	90,00		91,00		92,00		93,00		93,00		
2	12	03		PENCATATAN SIPIL	Rasio pasangan berakte nikah	%	0,23	0,26	76.663	0,28	388.532	0,30	388.532	0,32	388.532	0,32	1.242.258	Dinas Kependudukan dan
2	12	04		PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan	OPD	0	0	499.212	0	-	0	-	0	-	0	499.212	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	05		PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase data kependudukan yang	%	100,00	100,00	35.000	100,00	45.000	100,00	45.000	100,00	45.000	100,00	170.000	Dinas Kependudukan dan
																	-	
2	**1**			**Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan**					**9.918.5**		**9.971.8**		**10.023.**		**10.074.**		**39.988.**	
2	13	02		PENATAAN DESA	Persentase desa yang dilakukan penataan desa	%	68,94		-	70,00	25.000	72,50	25.000	73,00	25.000	73,00	75.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
2	13	03		PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase pengentasan desa tertinggal	%	46,59	12,50	48.683	34,48	49.170	45,45	49.662	96,55	50.158	96,55	197.673	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
2	13	04		ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase peningkatan status desa mandiri	%	0,02	0,01	4.838.398	0,01	4.815.839	0,01	4.815.839	0,01	4.815.839	0,04	19.285.915	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
					Persentase peningkatan status desa maju	%	3,23	1,87		0,87		1,48		1,29		5,51		
2	13	05		PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase desa dengan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan	%	99,00	99,00	1.128.880	99,00	1.140.169	99,00	1.151.570	99,00	1.163.086	99,00	4.583.705	Dinas Pemberdavaan Masyarakat Desa

KODE				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal 2020	Target dan								Kondisi kinerja pada Akhir periode		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								202		202		202		202				
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(8)	(9)	(10)	(11	(12)	(13	(14)	(15	(16)	(17	(18
																	-	
2	1			**Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan**														
2	14	02		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Total Fretility Rate (TFR)	Angka	2,96	2,96	90.130	2,96	89.398	2,96	89.572	2,96	89.748	2,96	358.849	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	03		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevalence	%	0,00	0,00	6.213.556	0,00	4.080.294	0,00	4.310.094	0,00	4.030.594	0,00	18.634.539	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
					Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet	%	14,27	14,25		14,24		14,23		14,22		14,22		
2	14	04		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA	Persentase BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS yang aktif dalam pembinaan ketahanan	%	100,00	100,00	1.220.525	100,00	1.220.430	100,00	1.220.430	100,00	1.220.430	100,00	4.881.815	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
																	-	
2	1			**Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan**					**11.440.**		**12.350.**		**8.398.8**		**7.034.1**	#REF!	**39.223.**	
2	15	02		PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio konektivitas angkutan jalan	Angka	0,37	0,37	6.799.747	0,53	7.322.152	0,63	4.048.002	0,79	2.801.060	0,79	20.970.961	Dinas Perhubungan
					V/C Ratio di Jalan kabupaten	Angka	0,80	0,80		0,80		0,80		0,80		0,80		
2	15	03		PENGELOLAAN PELAYARAN	Jumlah jaringan lintas penyeberangan yang dikelola	jaringan lintas	0	0	494.433	0	399.309	1	256.208	1	256.208	1	1.406.159	Dinas Perhubungan
																	-	
2	1			**Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika**					**5.659.8**		**8.290.0**		**8.543.6**		**8.439.9**	#REF!	**33.947.**	
2	16	02		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah	%	100,00	100,00	1.569.471	100,00	1.567.240	100,00	1.567.240	100,00	1.567.240	100,00	6.271.192	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian
					Persentase Layanan publik yang diselenggarakan secara	%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
2	16	03		PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh	%	50,00	60,00	656.987	70,00	579.532	80,00	579.532	90,00	579.532	90,00	2.395.583	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan
																	-	

KODE				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal (2019)	Target dan Anggaran								Kondisi pada Akhir periode RPJMD (2024)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								2021		2022		2023		2024				
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
2	**17**			**Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**					**3.207.430**		**4.483.316**		**3.919.816**		**4.528.816**	#REF!	**16.139.377**	
2	17	03		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi yang dilakukan pengawasan dan pemeriksaan secara berkala	%	100,00	100,00	31.665	100,00	30.000	100,00	35.000	100,00	35.000	100,00	131.665	Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian
2	17	04		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase KSP/USP yang dilakukan penilaian kesehatan secara berkala	%			-	100,00	65.000	100,00	70.000	100,00	75.000	100,00	210.000	Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian
2	17	05		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase SDM Koperasi yang telah memperoleh pendidikan dan pelatihan perkoperasian	%	0	0	-	0	50.000	0	55.000	0	55.000	0	160.000	Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian
2	17	06		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Jumlah koperasi yang berkualitas	unit koperasi	0,00	0,00	38.335	0,00	40.000	0,00	50.000	0,00	50.000	0,00	178.335	Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian
2	17	08		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	%	2,50	2,50	119.500	2,50	150.000	2,50	170.000	2,50	170.000	10,00	609.500	Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian
2	17	09		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase pertumbuhan usaha mikro yang berkembang menjadi usaha kecil	%			-	1,00	50.000	1,00	50.000	1,00	50.000	3,00	150.000	Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian
																	-	
2	**18**			**Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal**					**4.215.979**		**4.848.523**		**5.107.903**		**5.390.363**		**19.562.767**	
2	18	02		PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten Luwu	%	10,00	10,00	59.109	10,00	75.000	10,00	135.000	10,00	162.000	10,00	431.109	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	03		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Cakupan penyelenggaraan promosi penanaman modal	%	50,00	50,00	77.558	100,00	300.000	100,00	353.500	100,00	395.000	300,00	1.126.058	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
2	18	04		PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan perizinan penanaman modal	Angka	87,01	87,75	183.290	87,90	243.393	88,15	247.071	88,75	250.950	88,75	924.704	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	05		PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Cakupan penyelenggaraan pengendalian pelaksanaan penanaman modal	%	100,00	100,00	376.135	100,00	419.600	100,00	452.400	100,00	464.200	100,00	1.712.335	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	06		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Sistem Informasi Penanaman Modal yang dikelola	sistem				1	65.000	1	68.500	1	73.000	1	206.500	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	19	01		PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	%	100,00	100,00	3.284.357	100,00	3.276.533	100,00	3.304.097	100,00	3.331.388	100,00	13.196.374	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	02		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Angka	0,00	0,00	785.000	0,00	609.350	0,00	785.000	0,00	609.350	0,00	2.788.700	Dinas Kepemudaan dan Olahraga

KODE				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal (2019)	Target dan Anggaran								Kondisi pada Akhir periode RPJMD (2024)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								2021		2022		2023		2024				
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
					Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Angka	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
2	19	03		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Peningkatan prestasi olahraga (jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional)	medali	0	0	2.434.604	0	3.005.134	0	3.005.134	0	3.005.134	3	11.450.006	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	04		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Cakupan Penyelenggaraan Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	%	50,00	100,00	254.210	100,00	254.210	100,00	254.210	100,00	254.210	100,00	1.016.840	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
																	-	
2	**20**			**Urusan Pemerintahan Bidang Statistik**					**54.698**		**54.698**		**54.698**		**54.698**		**218.790**	
2	20	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100,00	100,00	54.698	100,00	54.698	100,00	54.698	100,00	54.698	100,00	218.790	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian
					Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
2	21	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Angka	1	1	86.726	1	86.726	1	86.726	1	86.726	1	346.904	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian
2	**22**			**Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan**					**195.909**		**235.608**		**236.365**		**237.130**		**905.011**	
2	22	02		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase kebudayaan masyarakat yang dikembangkan	%	100,00	100,00	135.955	100,00	175.255	100,00	175.608	100,00	175.965	400	662.783	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	03		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase kesenian tradional yang dikembangkan	%	100,00	100,00	19.975	100,00	19.975	100,00	19.975	100,00	19.975	400	79.900	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	04		PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase Pembinaan Sejarah	%	0,00	0,00	19.997	0,00	20.197	0,00	20.399	0,00	20.603	0	81.198	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	05		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase cagar budaya yang dilestarikan	%	100,00	100,00	19.981	100,00	20.181	100,00	20.383	100,00	20.586	100,00	81.130	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	23	02		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Tingkat kegemaran membaca masyarakat	Angka	0,00	0,00	591.308	0,00	711.298	0,00	670.940	0,00	677.650	0,00	2.651.196	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
					Indeks pembangunan literasi masyarakat	Angka	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		

KODE				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal (2019)	Target dan Anggaran								Kondisi pada Akhir periode RPJMD (2024)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								2021		2022		2023		2024				
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
2	24	02		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	Angka	0,00	0,00	40.002	0,00	61.872	0,00	62.331	0,00	62.795	0,00	227.001	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
					Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Angka	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
2	24	03		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Jumlah arsip yang dimusnakhan	arsip	0	0	-	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	30.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
					Jumlah arsip yang diberikan perlindungan dan penyelamatan	arsip	0	0		0		0		0		0		
3	**25**			**Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan**					**7.546.209**		**7.974.983**		**8.189.460**		**8.412.928**		**32.123.580**	
3	25	03		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Total produksi perikanan tangkap	ton	17.386	0	1.179.524	0,00	1.304.512	0,00	1.363.915	0,00	1.426.263	0,00	5.274.214	Dinas Perikanan
3	25	04		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Total Produksi Perikanan Budidaya	Ton	0,00	0,00	2.065.812	0,00	2.169.103	0,00	2.277.558	0,00	2.391.436	0,00	8.903.908	Dinas Perikanan
3	25	05		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase usaha perikanan tangkap dan perikanan budidaya yang dilakukan pengawasan	%	0,00	0,00	-	0,00	40.000	0,00	40.000	0,00	40.000	0,00	120.000	Dinas Perikanan
3	25	06		PROGRAM PENGELOHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase usaha skala mikro dan kecil yang difasilitasi dalam pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	%	0,00	0,00	75.000	0,00	193.237	0,00	197.175	0,00	201.309	0,00	666.720	Dinas Perikanan
					Jumlah usaha skala mikro dan kecil yang difasilitasi dalam pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	kelompok	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00				
					Jumlah Produksi Pengolahan hasil perikanan	ton	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00				
3	**26**			**Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata**					**3.751.001**		**4.424.564**		**4.287.829**		**5.423.604**		**17.886.999**	
3	26	02		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	%	0,00	0,00	445.432	0,00	664.831	0,00	565.172	0,00	1.506.501	0	3.181.936	Dinas Pariwisata

KODE				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal	Target dan								Kondisi pada Akhir periode		Perangkat Daerah Penanggung
								2021		2022		2023		2024				
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(8)	(9)	(10)	(11	(12)	(13	(14)	(15	(16)	(17	(18
					Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke	%	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
3	26	03		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Tingkat hunian akomodasi	Angka	0,00	0,00	29.075	0,00	30.529	0,00	32.055	0,00	33.658	-	125.317	Dinas Pariwisata
					Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	%	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		-		
					Kontribusi sektor pariwisata terhadap	%	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		-		
3	26	04		PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Jumlah lokasi wisata kreatif kabupaten	%	0	1	30.336	1	150.000	1	30.000	2	150.000	2	360.336	Dinas Pariwisata
3	26	05		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Jumlah SDM Pariwisata Kabupaten Luwu	orang	3	3	-	3	146.200	3	196.200	3	196.200	3	538.600	Dinas Pariwisata
					Jumlah pelaku ekonomi kreatif Kabupaten Luwu	orang	0	0		0		1		1		1		
3	27	02		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase peningkatan produksi peternakan	%	0,00	0,00	1.536.019	0,00	1.551.379	0,00	1.566.893	0,00	1.582.562	0,00	6.236.854	Dinas Pertanian
					Persentase peningkatan produksi bibit ternak	%	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
3	27	03		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	ton	0,00	0,00	6.170.279	0,00	6.231.981	0,00	6.294.301	0,00	6.357.244	0,00	25.053.805	Dinas Pertanian
					Persentase peningkatan produksi komoditi tanaman	%	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
					Persentase peningkatan produksi komoditi tanaman	%	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
3	27	04		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	%	0,00	0,00	17.261	0,00	17.433	0,00	17.608	0,00	17.784	0,00	70.086	Dinas Pertanian
3	27	06		PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase izin usaha yang dilakukan pengawasan	%				100,00	20.852	100,00	20.852	100,00	20.852	100,00	62.557	Dinas Pertanian
3	27	07		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase penyuluh yang memiliki kompetensi	%	0,00	0,00	7.644.578	0,00	7.721.024	0,00	7.798.234	0,00	7.876.216	0,00	31.040.052	Dinas Pertanian
					Persentase kelompok tani yang didampingi penyuluh pertanian	%	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		

KODE				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal	Target dan								Kondisi pada Akhir periode		Perangkat Daerah Penanggung
								2021		2022		2023		2024				
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(8)	(9)	(10)	(11	(12)	(13	(14)	(15	(16)	(17	(18
					Persentase ketersediaan sarana dan prasarana	%	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
											-		-		-			
3	**3**			**Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan**					**6.462.6**		**6.630.9**		**6.958.5**		**7.099.5**		**27.151.**	
3	30	02		PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP / SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM / IUTS / SIUP Toko Swalayan)	%				100,00	6.000	100,00	6.000	100,00	6.000	100,00	18.000	Dinas Perdagangan
3	30	03		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase kecamatan yang telah memiliki sarana distribusi perdagangan	%	72,73	72,73	1.339.115	77,27	1.352.507	77,27	1.366.032	81,82	1.379.692	100,00	5.437.346	Dinas Perdagangan
3	**30**	04		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN	Rata-rata kenaikan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting sepanjang tahun	%	< 20	< 20	39.998	< 20	60.398	< 20	60.802	< 20	61.210	< 20	222.408	Dinas Perdagangan
					Persentase kinerja realisasi pupuk	%	100,0	100,00		100,00		100,0		100,0		100,00		
3	**30**	05		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase pertumbuhan ekspor daerah	%			-	1,50	77.600	1,00	90.000	1,00	90.000	1,00	257.600	Dinas Perdagangan
3	**30**	06		PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapan lainnya (UTTP) bertanda tera sah	%	100,00	100,00	78.129	100,00	78.910	100,00	79.700	100,00	80.497	100,00	317.236	Dinas Perdagangan
3	**30**	07		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Jumlah produk unggulan daerah yang dikembangkan pemasarannya	produk			-			7	250.000	7	325.000	7	575.000	Dinas Perdagangan
																	-	
				Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian					**370.0**		**320.0**		**330.0**		**333.0**		**1.353.0**	
3	31	02		PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pembangunan industri	%			363.880		280.000		285.000	100,00	287.850	100,00	1.216.730	Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian
					Tingkat penerapan rencana pembangunan industri	Angka	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
					Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah	%	1,00	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		
					Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dengan RPIP	%								60,00		60,00		
3	31	03		PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah IUI kecil dan menengah yang dikeluarkan	%	100,00	100,00	6.120	100,00	10.000	100,00	15.000	100,00	15.150	100,00	46.270	Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian

KODE				Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Indikator Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal (2019)	Target dan Anggaran Target (8)	(9)	Target (10)	(11	Target (12)	(13	Target (14)	(15	Kondisi pada Akhir periode RPJMD (2024) (16)	(17)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah IPUI kecil dan menengah yang dikeluarkan	kali	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
					Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah IKUI dan IPKI yang lokasinya di daerah	kali	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
3	31	04		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan	%			-	100,00	30.000	100,00	30.000	100,00	30.000	100,00	90.000	Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian
				Urusan Pemerintahan Bidang Trasmigrasi					**33.670**		**33.670**		**33.670**		**33.670**		**134.681**	
3	32	03		PROGRAM PENGEMBANGAN transmigrasi	Luas kawasan	Ha		10.000	33.67	10.000	33.67	10.000	33.67	10.000	33.67	10.000	134.6	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
4				**Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan**					#REF!		#REF!		#REF!		#REF!		**#REF!**	
4	**0**			**Penunjang Urusan Bidang Pemerintahan**					**30.542.**		**29.838.**		**30.608.**		**30.640.**	#REF!	**121.629.**	
4	1 01	01		PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	Cakupan penyelenggaraan administrasi umum	%	100,00	100,00	26.410.480	100,00	25.687.220	100,00	26.397.032	100,00	26.368.693	100,00	104.863.425	Sekretariat Daerah (Bagian Umum dan Perlengkapan)
4	01	02		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN	Nilai LPPD	Angka	2.771	2.983	3.265.423	3.126	3.276.647	3.185	3.327.234	3.200	3.379.217	3.200	13.248.521	Sekretariat Daerah
					Tingkat capaian target penyelenggaraan administrasi tata pemerintahan	%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
					Tingkat capaian target penyelenggaraan kebijakan kesejahteraan rakyat	%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
					Persentase Produk Hukum Daerah yang difasilitasi dalam kurun waktu tahun yang sama	%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
4	01	03		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Tingkat capaian target pelaksanaan kebijakan perekonomian	%	100,00	100,00	866.388	100,00	875.052	100,00	883.803	100,00	892.641	100,00	3.517.885	Sekretariat Daerah (Bagian Umum dan Perlengkapan)
					Tingkat capaian target pelaksanaan administrasi	%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
					Persentase pengadaan barang dan jasa yang dilakukan dengan metode kompetitif	%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
					Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	%												
					Tingkat capaian target pelaksanaan Pemantauan Kebijakan Sumber	%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		

KODE				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal (2019)	Target dan Anggaran								Kondisi pada Akhir periode RPJMD (2024)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								2021		2022		2023		2024				
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
4	02	01		PROGRAM ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	%	100,00	100,00	22.121.842	100,00	27.027.614	100,00	21.658.901	100,00	22.343.037	100,00	93.151.394	Sekretariat DPRD
4	02	02		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase penyelesaian penyusunan PERDA sesuai Prolegda	%	100,00	100,00	13.362.105	100,00	13.495.726	100,00	13.630.683	100,00	13.766.990	100,00	54.255.505	Sekretariat DPRD
					Tingkat capaian target atas dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DRPD	%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
5	01	02		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Tingkat capaian target perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	%	75,00	100,00	622.126	100,00	715.012	100,00	790.795	100,00	877.781	100,00	3.005.713	Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah
5	01	03		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Tingkat capaian target pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	%	80,00	100,00	611.568	100,00	703.303	100,00	808.799	100,00	930.119	100,00	3.053.790	Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah
									10.558.972									Badan Pendapatan Daerah
5	02	02		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase OPD yang menyusun RKA sesuai ketentuan dan kebutuhan	%	100,00	100,00	270.479.231	100,00	273.110.253	100,00	275.841.356	100,00	278.599.770	100,00	1.098.030.610	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
					Persentase Penerbitan SP2D yang Tepat Waktu	%	95,00	95,00		95,00		95,00		95,00		95,00		
					Perentase SKPD yang menyampaikan Laporan Keuangan tepat waktu	%	98,00	98,00		98,00		98,00		98,00		98,00		
					Tingkat capaian target penyaluran bantuan keuangan	%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
5	02	03		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase SKPD dalam penatausahaan BMD secara akurat	%	98,00	98,00	601.016	98,00	607.027	98,00	613.097	98,00	619.228	98,00	2.440.368	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5	02	04		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Realisasi Pajak Daerah terhadap target yang ditetapkan	%	70,63	98,99	3.098.330	86,98	3.129.313	86,98	3.160.606	90,74	3.192.212	90,74	12.580.462	Badan Pendapatan Daerah
					Persentase ketercapaian target penerimaan retribusi daerah	%	98,99	98,99		98,99		98,99		98,99		98,99		
					Persentase Realisasi Penerimaan Dana Perimbangan terhadap Target yang ditetapkan	%	90,00	90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		
					Persentase realisasi penerimaan PBB dan BPHTB	%	80,00	80,00		80,00		80,00		80,00		80,00		

KODE				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal	Target dan								Kondisi pada Akhir periode		Perangkat Daerah Penanggung
								202		202		202		202				
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(8)	(9)	(10)	(11	(12)	(13	(14)	(15	(16)	(17	(18
																	-	
5	**0**			**Penunjang Urusan Bidang Kepegawaian**					**17.712.**		**17.889.**		**18.068.**		**18.248.**		**71.918.**	
5	03	02		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar	Angka	0,00	0,00	1.775.423	0,00	1.793.178	0,00	1.811.109	0,00	1.829.221	0,00	7.208.931	Badan Kepegawaian dan Pengembangan
					Rasio Pegawai Fungsional	Angka	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
					Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi	Angka	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
5	04	02		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase pejabat yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan formal sesuai ketentuan	%	0,00	0,00	2.537.120	0,00	2.562.491	0,00	2.588.116	0,00	2.613.997	0,00	10.301.725	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
5	05	02		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Hasil kelitbangan utama	Rekomensi	0	1	812.854	1	975.425	1	1.170.510	1	1.404.612	4	4.363.402	Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah
6	01	01		PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	%	100,00	100,00	8.488.660	100,00	7.262.148	100,00	7.464.514	100,00	7.560.310	100,0	30.775.632	Inspektorat Daerah
6	01	02		PROGRAM PENGAWASAN	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern	Angka	0	0	1.907.956	0	3.519.274	0	3.595.492	0	3.350.133	-	12.372.855	Inspektorat Daerah
					Persentase tindak lanjut temuan	%	100,0	100,00		100,00		100,0		100,0		100,00		
					Persentase tindak lanjut temuan	%	100,0	100,00		100,00		100,0		100,0		100,00		
					Persentase tindak lanjut temuan Inspektorat	%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
6	01	03		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Tingkat capaian target pelaksanaan perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	%	100,00	100,00	519.463	100,00	524.657	100,00	529.904	100,00	535.203	100,00	2.109.227	Inspektorat Daerah
7	01	01		PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	%	100,00	100,00	45.629.734	100,00	46.770.477	100,00	47.939.739	100,00	49.138.233	100,00	143.848.449	seluruh Kecamatan
7	01	02		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Pelayanan dan Koordinasi Urusan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	%	100,00	100,00	45.004	100,00	45.004	100,00	45.004	100,00	45.004	100,00	135.012	seluruh Kecamatan

KODE				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal (2019)	Target dan Anggaran								Kondisi pada Akhir periode RPJMD (2024)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								2021		2022		2023		2024				
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan kegiatan yang dilaksanakan kecamatan dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	100,00	100,00	10.687.513	100,00	10.794.388	100,00	10.902.332	100,00	11.011.355	100,00	32.708.075	seluruh Kecamatan
7	01	04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan pelaksanaan koordinasi oleh kecamatan dalam rangka meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum	%	100,00	100,00	3.421.890	100,00	3.421.890	100,00	3.421.890	100,00	3.421.890	100,00	10.265.670	seluruh Kecamatan
7	01	05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan penyelenggaraan pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan di wilayah kecamatan	%	100,00	100,00	34.000	100,00	35.700	100,00	37.485	100,00	39.359	100,00	112.544	seluruh Kecamatan
7	01	06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	%	100,00	100,00	189.854	100,00	199.347	100,00	209.314	100,00	219.780	100,00	628.440	seluruh Kecamatan
8	01	01		KABUPATEN/KOTA	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	%	100,00	100,00	2.841.111	100,00	1.158.268	100,00	2.927.442	100,00	2.956.716	100,00	7.042.426	Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat
8	01	02		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Cakupan penyelenggaraan penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	%	100,00	100,00	35.141	100,00	59.237	100,00	62.787	100,00	48.000	100,00	170.024	Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat
8	01	03		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Cakupan penyelenggaraan pendidikan Pembinaan Politik Masyarakat	%	100,00	100,00	1.215.896	100,00	1.247.537	100,00	1.227.291	100,00	38.600	100,00	2.513.428	Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat
8	01	04		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase organisasi kemasyarakatan yang diberdayakan dan diawasi	%	100,00	100,00	37.423	100,00	92.204	100,00	92.454	100,00	33.468	100,00	218.126	Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat
8	01	05		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Cakupan penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	%		100,00	51.160	100,00	62.231	100,00	62.481	100,00	62.481	100,00	187.193	
8	01	06		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGAKTAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK	Cakupan koordinasi dalam rangka peningkatan kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	%	100,00	100,00	131.175	100,00	275.801	100,00	276.196	100,00	408.700	100,00	960.697	Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat
7	01	01		PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	%	100,00	100,00	556.964.988	100,00	567.024.251	100,00	571.201.277	100,00	577.659.089	100,00	2.272.828.565	SELURUH OPD

Pasal 186 ayat (3) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 menyatakan bahwa sasaran RPJMD setelah diterjemahkan kedalam strategi dan program Perangkat Daerah harus terhubung dengan sasaran Renstra Perangkat Daerah. Sedangkan dalam ayat (4) dinyatakan bahwa sasaran RPJMD dapat diterjemahkan kedalam sasaran antara secara tahunan melalui arah kebijakan dan dijadikan pedoman dalam menyusun prioritas pembangunan RKPD.

Untuk melihat keterhubungan antara sasaran, strategi dan program perangkat daerah tersebut diatas, disajikan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 7.4.

Keterkaitan Sasaran RPJMD dan Sasaran Strategis Perangkat Daerah

Strategi	Sasaran	Indikator Sasaran	Sasaran Antara	Indikator Sasaran	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Perbaikan kualitas tatakelola dan tatalaksana pemerintahan	Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Nilai SAKIP Kabupaten	Meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai LPPD Kabupaten Luwu	Sekretariat Daerah
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan fungsi lembaga perwakilan rakyat daerah	Cakupan penyelenggaraan fungsi lembaga perwakilan rakyat daerah	Sekretariat DPRD
			Meningkatkan keterbukaan informasi publik	Predikat keterbukaan informasi	Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian
	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Ikhtisar Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI	Meningkatnya kualitas hasil pengawasan	Level Maturitas SPIP pemerintah Kabupaten Luwu	Inspektorat Daerah
			Optimalisasi konsistensi perencanaan dan penganggaran daerah	Proporsi anggaran sesuai ketentuan	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
			Meningkatkan Pendapatan Daerah	Persentase pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah	Badan Pendapatan Daerah
Peningkatan kualitas dan akses pendidikan	Meningkatkan derajat pendidikan masyarakat	Indeks Pendidikan	Meningkatkan rata-rata lama sekolah	Rata-rata lama sekolah	Dinas Pendidikan
			Meningkatkan kualitas pelayanan perpustakaan dan pengelolaan kearsipan	Jumlah pengunjung perpustakaan (konvensional dan digital)	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Peningkatan kualitas dan pemerataan layanan kesehatan	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat	Persentase Indikator SPM Bidang Kesehatan yang mencapai target	• Dinas Kesehatan • RSUD
Peningkatan aksesibilitas dan konektifitas wilayah	Meningkatkan aksebilitas dan konektifitas wilayah	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	Meningkatkan asesibilitas masyarakat	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Meningkatnya konektifitas wilayah	Jumlah kecamatan yang memiliki akses angkutan daerat	Dinas Perhubungan
Pengembangan infrastruktur perkotaan dan lingkungan permukiman	Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	Meningkatkan akses masyarakat terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Strategi	Sasaran	Indikator Sasaran	Sasaran Antara	Indikator Sasaran	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Meningkatkan infrastruktur permukiman	Rasio Permukiman Layak Huni	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Pengembangan perekonomian daerah	Meningkatkan pendapatan masyarakat	PDRB Perkapita AHB	Berkembangnya kepariwisataan daerah	Pertumbuhan PDRB subsektor pariwisata	Dinas Pariwisata
			Menurunnya angka pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada sektor unggulan daerah	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)	Mengembangkan sistem pertanian berbasis agribisnis	Kontribusi subsektor pertanian/ perkebunan terhadap PDRB	Dinas Pertanian
			Meningkatkan produksi dan pengolahan hasil perikanan	Kontribusi subsektor perikanan terhadap PDRB	DInas Perikanan
			Meningkatkan perdagangan hasil produksi sektor unggulan	Ekspor bersih perdagangan	Dinas Perdagangan
Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	Menurunkan angka kriminalitas	Angka Kriminalitas per 10.000 Penduduk	Meningkatkan keamanan, ketertiban dan perlindungan masyarakat	Cakupan penyelenggaraan pembinaan dan penegakan Perda serta penindakan atas pelanggaran Perda	Satuan Polisi Pamong Praja
Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa	Meningkatkan Perekonomian Desa	Jumlah BUMDes yang memperoleh predikat Maju	Meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa	Persentase desa berstatus mandiri	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Peningkatan iklim investasi	Meningkatkan kuantitas dan kualitas industri pengolahan	Kontribusi Lapangan Usaha Industri Pengolahan Terhadap PDRB	Meningkatkan kapasitas koperasi, UMKM dan industri	Persentase pertumbuhan UMKM	Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian
			Meningkatkan promosi dan penciptaan iklim investasi yang kondusif	Nilai realisasi investasi	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Peningkatan kinerja perangkat daerah	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan	Rata-rata predikat capaian kinerja RKPD	Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Peringkat Kabupaten Luwu dalam penilaian Penghargaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah
			Meningkatkan kualitas pengelolaan kearsipan	Persentase Perangkat Daerah yang telah melaksanakan sistem kearsipan secara baku	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Meningkatkan pembinaan Ipoleksosbudhankam	Cakupan penyelenggaraan pembinaan Ipoleksosbudhankam	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Strategi	Sasaran	Indikator Sasaran	Sasaran Antara	Indikator Sasaran	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Meningkatkan pelayanan dan pemenuhan kebutuhan hidup pagi PMKS	Cakupan penyelenggaraan pelayanan dan pemenuhan kebutuhan hidup pagi PMKS	Dinas sosial
			Meningkatnya pemberdayaan gender dan perlindungan terhadap anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Indeks Kepuasan Masyarakat atas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Meningkatkan pembinaan kepemudaan dan keolahragaan	Cakupan penyelenggaraan pembinaan kepemudaan dan keolahragaan	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
			Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	Laju pertumbuhan penduduk	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Meningkatkan kualitas aparatur pemerintah daerah	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			Meningkatkan tertib administrasi pertanahan	Persentase asset Pemda yang memiliki sertifikat	Dinas Pertanahan
			Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Nilai IKM atas layanan kecamatan	Kecamatan
Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan penanggulangan bencana	Mengurangi risiko akibat kejadian bencana alam	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)	Terjaganya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)	Dinas Lingkungan Hidup
			Meningkatkan manajemen penanggulangan bencana	Persentase Desa/Kelurahan Tangguh Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Meningkatkan kapasitas manajemen kebakaran	Tingkat waktu tanggap (respon time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK)	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD. Selanjutnya, keterkaitan antara prioritas pembangunan dengan sasaran dan program program perangkat daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 7.5.
Keterkaitan Prioritas, Sasaran dan Program Pembangunan Daerah/Perangkat Daerah
Dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024

PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN PEMBANGUNAN	PROGRAM PERANGKAT DAERAH
Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	1. Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee 2. Program Penatagunaan Tanah 3. Program Pengelolaan Profil Kependudukan 4. Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik 5. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika 6. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral 7. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi 8. Program Pengelolaan Arsip 9. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting 10. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen 11. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD 12. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 13. Program Kepegawaian Daerah 14. Program Penyelenggaraan Pengawasan 15. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi 16. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik 17. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	18. Program Pengelolaan Keuangan Daerah 19. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah 20. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan	21. Program Pendaftaran Penduduk 22. Program Pencatatan Sipil 23. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 24. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik 25. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum 26. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 27. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa 28. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia 29. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah

PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN PEMBANGUNAN	PROGRAM PERANGKAT DAERAH
		30. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi 31. Program Penanganan Kerawanan Pangan 32. Program Pengawasan Keamanan Pangan 33. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 34. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota 35. Program Penanggulangan Bencana 36. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal 37. Program Pemberdayaan Sosial 38. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan 39. Program Rehabilitasi Sosial 40. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 41. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan 42. Program Hubungan Industrial 43. Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan 44. Program Perlindungan Perempuan 45. Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak 46. Program Pemenuhan Hak Anak 47. Program Perlindungan Khusus Anak 48. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan 49. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi 50. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip 51. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan 52. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial 53. Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno 54. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 55. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner 56. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Pembangunan Manusia	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	57. Program Pengelolaan Pendidikan 58. Program Pengembangan Kurikulum 59. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan 60. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan 61. Program Pembinaan Perpustakaan 62. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan 63. Program Pengembangan Kesenian Tradisional

PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN PEMBANGUNAN	PROGRAM PERANGKAT DAERAH
		64. Program Pembinaan Sejarah 65. Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya 66. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan 67. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	68. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat 69. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan 70. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman 71. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan 72. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan 73. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
	Menurunkan angka kriminalitas	74. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum 75. Program Pengembangan Kebudayaan 76. Program Peningkatan Kualitas Keluarga 77. Program Pengendalian Penduduk 78. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) 79. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
Pengembangan infrastruktur wilayah dan lingkungan permukiman	Meningkatkan aksebilitas dan konektifitas wilayah	80. Program Penyelenggaraan Jalan 81. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) 82. Program Pengelolaan Pelayaran
	Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman	83. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 84. Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional 85. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah 86. Program Penataan Bangunan Gedung 87. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase 88. Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya 89. Program Pengembangan Perumahan 90. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh 91. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) 92. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi 93. Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
Penurunan kesenjangan sosial ekonomi	Meningkatkan pendapatan masyarakat	94. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi 95. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) 96. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN PEMBANGUNAN	PROGRAM PERANGKAT DAERAH
		97. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya 98. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya 99. Program Perekonomian Dan Pembangunan 100. Program Pengembangan UMKM 101. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja 102. Program Penempatan Tenaga Kerja 103. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata 104. Program Pemasaran Pariwisata 105. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual 106. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif 107. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri 108. Program Pengembangan Jasa Konstruksi
Pemberdayaan ekonomi kerakyatan berbasis agribisnis	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada sektor unggulan daerah	109. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan 110. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat 111. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian 112. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian 113. Program Penyuluhan Pertanian 114. Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian
	Meningkatkan Perekonomian Desa	115. Program Administrasi Pemerintahan Desa 116. Program Peningkatan Kerjasama Desa 117. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat 118. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
	Meningkatkan kuantitas dan kualitas industri pengolahan	119. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal 120. Program Promosi Penanaman Modal 121. Program Pelayanan Penanaman Modal 122. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan 123. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri 124. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan
Pelestarian Lingkungan Hidup dan Pencegahan Bencana	Mengurangi risiko akibat kejadian bencana alam	125. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) 126. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN PEMBANGUNAN	PROGRAM PERANGKAT DAERAH
		127. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup 128. Program Pengelolaan Persampahan 129. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran 130. Program Penanganan Bencana

BAB VIII
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

8.1. Penetapan Indikator Kinerja Makro

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran tentangukuran keberhasilan pencapain visi dan misi bupati dan wakil bupati yang ditetapkanmenjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) dan indikator kinerja penyelenggaraanpemerintah daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhirmasa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

8.1.1 Penetapan Indikator Kinerja Makro

Penetapan Indikator Makro adalah gambaran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum dengan menilai capaian kinerja masing–masing indikator kinerja secara makro. Indikator makro tersebut terdiri dari enam indikator yang diamanahkan oleh pemerintah pusat sebagaimana dituangkan dalam Permendagri 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Enam indikator kinerja makro tersebut juga merupakan bagian dari IKU daerah sebagaimana dituangkan pada tabel berikut.

Tabel 8.1.
Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Luwu Tahun 2019-2023

No.	Indikator Makro	Realisasi Kinerja		Target Kinerja Makro		
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,26	1,30	3,37-4,50	4,38 – 5,84	4,49-5,99
2.	Tingkat Kemiskinan	12,78	12,65	12,27	11,40	10,49
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,38	4,94	4,92	4,82	4,72
4.	Gini Ratio	0,352	0,396	0,388	0,380	0,373
5.	Indeks Pembangunan Manusia	70,39	70,51	70,63	71,05	71,57

Sumber: - BPS
- Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan

8.1.2 Penetapan Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui hasil daripelaksanaan sasaran dan tujuan pembangunan daerah oleh Kepala Daerah. Tujuan penetapanIKU adalah memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian target indikatortujuan dan sasaran daerah. Pencapaian indikator tujuan dan sasaran tersebutmerupakan akumulasi dari pencapaian beberapa target indikator program. Berikut inipenetapan indikator kinerja utama Kabupaten Luwu tahun 2019-2024 yangtersaji pada tabel 8.1. sebagai berikut.

Tabel 8.2

Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024

Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2019)	Capaian	Rencana Capaian	Target			Kondisi Akhir (2024)
			2020	2021	2022	2023	2024	
1. Indeks Reformasi Birokrasi	*Skor Indeks*	N.A	C (44,62)	CC (50,78)	CC (57,35)	B (61,91)	B (68,99)	B (68,99)
2. Nilai SAKIP	*Skor Indeks*	CC (51,09)	B (60,04)	B (64,76)	B (69,51)	BB (72,02)	BB (78,80)	BB (78,80)
3. Ikhtisar Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI	*Opini*	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
4. Indeks Pembangunan Manusia	*Skor Indeks*	70,39	70,51	70,63	71,05	71,57	72,91	72,91
5. Indeks Kesehatan	*Skor Indeks*	77,22	77,45	77,69	78,30	78,69	79,09	79,09
6. Indeks Pendidikan	*Skor Indeks*	64,17	64,49	64,98	65,44	65,90	66,35	66,35
7. Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	*Skor indeks*	n.a	Cukup	Cukup	Baik	Baik	Baik	Baik
8. Persentasi Jalan Kabupaten dalam kondisi mantap	*%*	24,15	25,87	27,26	28,88	31,77	34,95	34,95
9. Persentase penduduk berakses air minum	*%*	80,03	82,09	84,19	86,35	88,56	90,82	90,82
10. Rasio Permukiman Layak Huni	*%*	0,97	0,97	0,97	0,98	0,98	0,98	0,98
11. Angka Kemiskinan	*%*	12,78	12,65	12,30	12,10	11,97	11,92	11,92
12. PDRB Perkapita (AHB)	*Juta Rp*	43,25	44,02	45,30	48,05	51,20	54,05	54,05
13. Indeks Ketahanan Pangan	*Skor*	78	80	83	86	89	92	92
14. Pertumbuhan PDRB Sektor PertanianKehutanan dan Perikanan terhadap PDRB	*%*	3,98	4,26	4,87	5,41	5,78	6,22	6,22
15. Indeks Kerukunan Umat Beragama	*Skor Indeks*	n.a	76,01	76,02	76,03	76,04	76,05	76,05
16. Angka kriminalitas	*Per 10.000 penduduk*	4,00	3,20	2,80	2,43	2,38	2,34	2,34
17. Persentase desa berstatus mandiri	*%*	0,00	0,00	0,97	1,45	1,93	2,42	2,42
18. Jumlah BUMDes berprestasi (maju dan mandiri)	*Unit*	0	0	0	1	2	5	5
19. Pertumbuhan Ekonomi	*%*	6,26	1,30	3,37-4,50	4,38 – 5,84	4,49-5,99	7,85	7,85
20. Kontribusi Lapangan Usaha Industri Pengolahan Terhadap PDRB	*%*	10,94	11,06	11,37	11,51	12,18	12,76	12,76
21. Indeks Kepuasan Masyarakat	*Skor Indeks*	n.a	79,28	80,06	81,27	82,63	83,77	83,77
22. Rata-rata Predikat Capaian Kinerja RKPD		Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
23. Indeks kualitas lingkungan hidup	*Skor indeks*	Sedang	Sedang	Sedang	Tinggi	Tinggi	Sangat tinggi	Sangat tinggi
24. Jumlah Desa/Kelurahan Tangguh Bencana	*%*	0	0	0,48	1,45	2,42	3,38	3,38

8.1.3 Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Kinerja pembangunan suatu daerah digambarkan melalui pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Oleh karena itu,penetapan indikator kinerja harus ditetapkan secara tepat agar dapat menggambarkan keadaan capaian pembangunan secara riil. Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja pemerintah tersebut, maka untuk dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan penetapan indikator kinerja pembangunan daerah sebagai Indikator Kinerja Kunci (*key performance indicator*). Sebagaimana lazimnya sebuah alat ukur kinerja suatu organisasi, maka indikator kinerja program pembangunan daerah ditetapkan dengan memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Terkait dengan upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah;
2. Menggambarkan hasil pencapaian program pembangunan yang diharapkan;
3. Memfokuskan pada hal-hal utama, penting, dan merupakan prioritas program pembangunan daerah; dan
4. Terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan daerah.

Secara rinci, penetapan indikator kinerja kunci pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Luwu pada tahun 2014-2019 merupakan dasar penetapan target capaian pembangunan tahun 2019-2024. Penetapan indikator kinerja daerah dalam RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 diuraikan dalam Tabe 8.2. berikut ini.

.

Tabel 8.3.

Penetapan Indikator Kinerja DaerahTerhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal RPJMD (2019)	Capaian	Rencana Capaian	Target			Kondisi Akhir RPJMD (2024)
				2020	2021	2022	2023	2024	
I.	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**								
1.	Pertumbuhan PDRB	%	6,42	7,11	7,23	7,31	7,37	7,45	7,45
2.	Laju inflasi	%	3,50	3,96	3,86	3,76	3,57	3,39	3,39
3.	PDRB per kapita	Juta Rp	43,25	38,03	38,98	39,95	40,95	41,98	41,98
4.	Indeks Gini	%	0,352	0,396	0,388	0,380	0,373	0,320	0,320
5.	Tingkat Kemiskinan	%	12,78	12,65	12,27	11,40	10,49	9,99	9,99
6.	Angka melek huruf	%	95,95	98,35	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7.	Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	8,15	8,31	8,43	8,60	8,75	8,91	8,91
8.	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,30	13,68	13,96	14,06	14,22	14,39	14,39
9.	Persentase balita gizi buruk	%	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
10.	Prevalensi balita gizi kurang	%	5,90	5,32	5,06	4,81	4,57	4,34	4,34
11.	Cakupan Desa Siaga Aktif	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100
12.	Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	64,89	68,18	69,88	71,63	73,42	75,25	75,25
13.	Tingkat pengangguran terbuka	%	4,38	4,94	4,92	4,82	4,72	2,78	2,78
14.	Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 Tahun ke atas	%	56,07	58,91	60,38	61,89	63,44	65,02	65,02
15.	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	%	44,45	40,12	38,11	36,20	34,39	32,67	31,04
16.	Persentase PAD terhadap pendapatan	%	8,08	8,27	8,48	8,69	8,91	9,13	9,13
17.	Opini BPK		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
18.	Penguatan cadangan pangan		44,68	46,94	48,12	49,32	50,55	51,82	53,11
19.	Penanganan daerah rawan pangan	Skor	5	5	5	4	4	3	3
20.	Ketersediaan pangan utama	%	62,16	67,36	68,78	70,19	71,64	73,16	73,16
21.	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan/kehutanan dan	%	53,83	53,75	53,35	52,75	52,15	51,75	51,75

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal RPJMD (2019)	Capaian	Rencana Capaian	Target			Kondisi Akhir RPJMD (2024)
				2020	2021	2022	2023	2024	
	perikanan terhadap PDRB								
22.	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	10,12	10,63	10,89	11,17	11,45	11,73	11,73
23.	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	%	4,58	4,89	5,60	6,35	6,75	7,19	7,19
24.	Pertumbuhan Industri		6,13	6,28	6,44	6,6	6,77	6,94	6,94
II	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**								
2.1.	Pengeluaran konsumsi Rumah tangga per kapita	Ribu Rp	716,05	752,29	771,10	790,38	810,14	830,39	830,39
2.2.	Nilai tukar petani			-	-	-	-		0
2.3.	Persentase pengeluaran konsumsi non pangan perkapita	%	50,12	52,66	53,98	55,33	56,71	58,13	58,13
2.4.	Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa	%	83,03	87,23	89,41	91,64	93,94	96,28	96,28
2.5.	Rasio Ekspor + Impor terhadap PDB indikator keterbukaan (ekonomi)		0,74	0,78	0,79	0,81	0,83	0,86	0,86
2.6.	Angka kriminalitas yang tertangani	%	100	100	100	100	100	100	100
2.7.	Rasio ketergantungan		61,38	61,32	61,33	61,32	61,33	61,34	61,35
III.	**ASPEK PELAYANAN UMUM**								
A.	**URUSAN WAJIB DASAR**								
1.	**PENDIDIKAN**								
1.1.	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	%	52,40	60,04	61,55	63,08	64,66	66,28	66,28
1.2.	Angka partisipasi kasar:								
1.2.1.	Angka partisipasi kasar SD/MI/Paket A	%	94,45	99,425	100,00	100,00	100,00	102,5	102,50
1.2.2.	Angka partisipasi kasar SMP/MTs/Paket B	%	96,77	98,85	100,00	100,00	100,00	102,50	102,50
1.2.3.	Angka Pendidikan yang ditamatkan SD/MI	%	7.723	8.114	8.317	8.525	8.738	8.956	8.956
1.3.	Angka Partisipasi Murni :								
1.3.1.	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	93,51	98,23	100,00	100,00	100,00	102,50	102,50
1.3.2.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	82,73	83,64	85,73	87,87	90,07	92,32	92,32

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal RPJMD (2019)	Capaian	Rencana Capaian	Target			Kondisi Akhir RPJMD (2024)
				2020	2021	2022	2023	2024	
1.4.	Angka partisipasi sekolah :								
1.4.1.	Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A	%	99,41	100	100	100	100	102,50	102,50
1.4.2.	Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	%	93,81	71,87	73,67	75,51	77,4	79,34	79,34
1.5.	Angka Putus Sekolah:								
1.5.1.	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	%	0	0	0	0	0	0	0,00
1.5.2.	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	%	0	0	0	0	0	0	0,00
1.6.	Angka Kelulusan:								
1.6.1.	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	97,85	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.6.2.	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	95,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.7.	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%	95,29	97,67	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.8.	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	%	95,24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.9.	Fasilitas Pendidikan:								
1.10.	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	%	23,90	61,77	63,31	64,89	66,52	68,18	68,18
1.11.	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	Angka	65,61	67,25	68,93	70,99	71,53	72,23	72,23
1.12.	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar	Per 10.000 murid	860,12	860,12	870,00	870,00	871,00	871,00	871,00
1.13.	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf	%	98,80	98,81	98,81	98,82	98,82	98,83	98,83
1.14.	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	87,05	89,23	91,46	93,74	96,09	98,49	98,49
1.15.	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	%	35,15	60,04	61,55	63,08	64,66	66,28	66,28
1.16.	Presentase sekolah yang telah melaksanakan manajemen pendidikan yang baik	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	**KESEHATAN**								
2.1.	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	per 1000 KH	0,0091	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
2.2.	Angka kelangsungan hidup bayi	%	99,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.3.	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	per 1000 KH	9,72	9,98	8,54	7,68	6,35	5,60	5,60

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal RPJMD (2019)	Capaian	Rencana Capaian	Target			Kondisi Akhir RPJMD (2024)
				2020	2021	2022	2023	2024	
2.4.	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	per 1000 KH	6,54	7,17	6,29	6,06	5,79	5,35	5,35
2.5.	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	per 100.000 KH	95,65	77,64	60,80	60,35	45,29	45,15	45,15
2.6.	Rasio posyandu per satuan balita		0,0144	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03
2.7.	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk		0,0007	0,0006	0,0006	0,0006	0,0007	0,0007	0,0007
2.8.	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk		0,0006	0	0	0	0	0	0
2.9.	Rasio dokter per satuan penduduk		0,00029	0	0	0	0	0	0
2.10.	Rasio tenaga medis per satuan penduduk		0,0001	0	0	0	0	0	0
2.11.	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	80,49	72,78	74,59	76,46	78,37	78,37	78,37
2.12.	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	88,52	92,02	94,33	96,68	99,1	0,01	0,01
2.13.	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	89,42	89,89	92,14	94,44	96,8	0,01	0,01
2.14.	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.15.	Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum standar yang digunakan Indonesia 2.100 (Kkal/kapita/hari)								0
2.16.	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	%	89,59	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.17.	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	%		-	-	-	-	0	0
2.18.	Cakupan balita pneumonia yang ditangani	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.19.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	%	60,30	45,70	46,84	48,02	57,25	65,45	65,45
2.20.	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	%	0,19	0,17	0,16	0,15	0,14	0,13	0,13
2.21.	Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	%	0,008	0	0	0	0	0	0
2.22.	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	%	63,68	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal RPJMD (2019)	Capaian	Rencana Capaian	Target			Kondisi Akhir RPJMD (2024)
				2020	2021	2022	2023	2024	
2.23.	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	%	77,00	94,61	96,97	99,40	99,57	99,97	99,97
2.24.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.25.	Penderita diare yang ditangani	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.26.	Angka kejadian Malaria			-	-	-	-		0
2.27.	Tingkat kematian akibat malaria	%	0	0	0	0	0	0	0
2.28.	Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida	%	na	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.29.	Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.30.	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi		0,004	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000
2.31.	Penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko tinggi terakhir	%	100	100	100	100	100	100	100
2.32.	Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.33.	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	%	72,33	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.34.	Cakupan kunjungan bayi		101,26	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.35.	Cakupan puskesmas		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.36.	Cakupan pembantu puskesmas	%	48,46	48,75	49,25	49,75	51,00	52,28	52,28
2.37.	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	%	81,00	87,08	89,26	91,49	93,78	96,12	96,12
2.38.	Cakupan pelayanan nifas	%	86,66	92,15	94,45	96,81	99,23	100,00	100,00
2.39.	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	%	48,81	59,69	61,18	62,71	64,28	65,89	65,89
2.40.	Cakupan pelayanan anak balita	%	71,14	71,55	73,33	75,17	77,05	78,98	78,97
2.41.	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 -24 bulan keluarga miskin	%	89,79	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.42.	Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat	%	89,67	92,05	94,35	96,70	99,12	100,00	100,00
2.43.	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal RPJMD (2019)	Capaian	Rencana Capaian	Target			Kondisi Akhir RPJMD (2024)
				2020	2021	2022	2023	2024	
2.44.	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.45.	Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.46.	Cakupan menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular	Kec	0,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00
2.47.	Cakupan sarana dan prasarana kesehatan serta Sistem Informasi Kesehatan	Tahun	0	1	1	1	1	1	1
2.48.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	0	80	80	80	80	80	80
3.	**PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**								
3.1.	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap/ Tingkat kemantapan jalan kabupaten	%	24,15	23,94	0,25	0,26	0,27	0,28	0,28
3.2.	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	%	21,29	19,44	22,8	23,37	23,95	24,55	24,55
3.3.	Persentase rumah tinggal bersanitasi	%	84,52	85,46	86,53	87,64	88,80	89,02	89,02
3.4.	Persentase sempadan sungai yang dipakai bangunan liar	%	0	0	0	0	0	0	0
3.5.	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	40,26	41,55	42,01	42,99	43,67	44,54	44,54
3.6.	Persentase penduduk berakses air minum	%	80,03	80,78	84,09	86,19	88,35	90,56	90,56
3.7.	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	%	47,94	68,24	49,90	51,15	52,43	53,74	53,74
3.8.	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3.9.	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3.10.	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	%	4,18	5,88	17,23	17,66	18,1	18,55	18,55
3.11.	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3.12.	Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan	%	NA	NA	99,81	100,00	100,00	100,00	100,00
3.13.	Ruang publik yang berubah peruntukannya	%	0	0	0	0	0	0	0
3.14.	Persentase jaringan jalan kabupaten dengan aspal dan beton	%	58,11	61,83	64,23	66,64	69,05	71,45	71,45

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal RPJMD (2019)	Capaian	Rencana Capaian	Target			Kondisi Akhir RPJMD (2024)
				2020	2021	2022	2023	2024	
3.15.	Tingkat Mobilitas (panjang jalan per luas wilayah)	Angka	0,86	0,86	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87
3.16.	Persentase jalan yang memiliki saluran drainase dan gorong-gorong dalam kondisi baik	Km	50,30	50,40	50,50	50,60	50,70	50,80	50,80
3.17.	Wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor yang dibangun turap/talud/bronjong dan pengendali banjir	meter	1.445,00	700	700	700	700	700	3.500
3.18.	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana kebinamargaan dalam kondisi baik	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3.19.	Cakupan ketersediaan PJU (Penerangan Jalan Umum)	Titik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.20.	Tersedianya 3 (tiga) layanan informasi jasa konstruksi tingkat Kabupaten	%	0,00	100	100	100	100	100	100
3.21.	Jumlah sarana dan prasarana bangunan gedung umum yang dibangun dan ditingkatkan	Unit	0,00	4,00	1,00	1,00	0,00	2,00	8,00
3.22.	Presentase penyelenggaraan pengawasan sarana dan prasarana bangunan gedung	%	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4.	**PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN**								
4.1.	Rasio rumah layak huni	%	0,208	20,54	20,84	30,15	30,76	40,01	40,01
4.2.	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	%	0,07	0,0685	0,0680	0,0675	0,0660	0,0645	0,0645
4.3.	Rasio permukiman layak huni	%	0,97	-	-	-	-	-	-
4.4.	Persentase pemukiman yang tertata	%	0,155	-	-	-	-	-	-
4.5.	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	%	0,03	-	-	-	-	-	-
4.6.	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan	%	0,0164	-	-	-	-	-	-
4.7.	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	%	0,97	0,97	0,97	0,98	0,98	0,98	0,98
4.8.	Cakupan penyelenggaraan PSU	%	NA	100	100	100	100	100	100

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal RPJMD (2019)	Capaian	Rencana Capaian	Target			Kondisi Akhir RPJMD (2024)
				2020	2021	2022	2023	2024	
5.	**KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**								
5.1.	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	%	55,00	56,38	57,78	59,23	60,71	62,23	62,23
5.2.	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 ketertiban, ketentraman, (keindahan)	%	75,00	76,88	78,8	80,77	82,79	84,86	84,86
5.3.	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten	%	100,00	82,00	84,05	86,15	88,31	90,52	90,52
5.4.	Tingkat waktu tanggap response time rate) daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Menit	15	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5.5.	Persentase Penegakan PERDA	%	100,00	79,95	81,95	84,00	86,10	88,25	88,25
5.6.	Cakupan Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada Tahapan Pasca Bencana	Persen	NA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5.7.	Cakupan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	Persen	NA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5.8.	Cakupan Jumlah Konflik/Ganguan Keamanan Daerah yang tertangani	Persen	NA	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
5.9.	Persentase Tingkat Partisipasi Pemilih dalam Pemilu	Persen	NA	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
5.10.	Persentase Keikutsertaan aparat dan masyarakat dalam bela negara	Persen	NA	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	9,00
5.11.	Cakupan koordinasi dalam rangka peningkatan kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	%	0	100	100	100	100	100	100
5.12.	Cakupan pembinaan wawasan kebangsaan	%	0	100	100	100	100	100	100
5.13.	Cakupan penyelenggaraan pendidikan Pembinaan Politik Masyarakat	%	0	100	100	100	100	100	100
5.14.	Cakupan penyelenggaraan peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	%	100	100	100	100	100	100	100
5.15.	Persentase pemenuhan Kompetensi Aparatur sesuai ketentuan	%	0	0	0	0	0	0	0
5.16.	Cakupan penyelenggaraan perlindungan masyarakat	%	100	100	100	100	100	100	100
5.17.	Cakupan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	%	0	0	0	0	0	0	0

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal RPJMD (2019)	Capaian	Rencana Capaian	Target			Kondisi Akhir RPJMD (2024)
				2020	2021	2022	2023	2024	
5.18.	Persentase Pelayanan Penanganan Bencana Kebakaran yang terlapor	%	0	100	100	100	100	100	100
5.19.	Cakupan penyelenggaraan Operasi Pemadaman dan Penyelamatan	%	0	0	0	0	0	0	0
6.	**SOSIAL**								
6.1.	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan social	%	44,58	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6.2.	Persentase PMKS yang tertangani	%	19,65	20,65	30,45	40,75	50,25	60,00	60,00
6.3.	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	44,58	11,95	12,35	12,75	13,07	13,45	13,45
6.4.	Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	%	1,74	0,62	0,63	0,65	0,66	0,68	0,68
6.5.	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan social	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6.6.	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan social.	%	0	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6.7.	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6.8.	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan mengunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	%	0,20	3,31	3,39	3,48	3,57	3,66	3,66
6.9.	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan social	%	66,23	67,43	69,12	70,85	72,62	74,44	74,44
6.10.	Persentase kejadian bencana alam dan kebakaran yang tertangani dengan baik	%	Na	95,00	98,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B.	**URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR**								
1.	**TENAGA KERJA**								

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal RPJMD (2019)	Capaian	Rencana Capaian	Target			Kondisi Akhir RPJMD (2024)
				2020	2021	2022	2023	2024	
1.1.	Angka sengketa pengusaha- pekerja per tahun	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1.2.	Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.3.	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	%	17,08	5,45	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.4.	Keselamatan dan perlindungan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.5.	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	%	100,00	75,79	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.6.	Penanganan perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.7.	Besaran Pemeriksaan Perusahaan	%	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi
1.8.	Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan	%	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi
1.9.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	79,27	48,19	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.10.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.11.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	%	48	32	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.12.	Perluasan kesempatan kerja sector formal maupun informal	%	4,04	3,70	3,91	4,13	4,35	100,00	100,00
1.13.	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja.	%	43,75	37,04	25,00	45,45	46,67	48,89	48,89
1.14.	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi	%	N.A	51,38	51,61	55,04	65,00	70,50	70,50
1.15.	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rp.juta/pekerja	102,91	104,71	107,75	109,01	110,32	111,04	111,04
1.16.	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Biparit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	N.A	2,86	3,24	3,91	4,69	5,21	5,21
1.17.	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten.	%	10,72	5,45	6,06	6,40	7,07	7,41	7,41

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal RPJMD (2019)	Capaian	Rencana Capaian	Target			Kondisi Akhir RPJMD (2024)
				2020	2021	2022	2023	2024	
2.	**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**								
2.1.	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	2,56	2,67	2,94	3,24	3,56	3,92	3,92
2.2.	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	%	5,71	11,41	12,55	13,80	15,18	16,70	16,70
2.3.	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	%	7,15	6,31	6,94	7,63	8,40	9,24	9,24
2.4.	Rasio KDRT	%	0,0027	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
2.5.	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	%	29,27	35,42	38,96	42,86	47,14	51,86	51,86
2.6.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.7.	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus- kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.8.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	%	100,00	55,45	56,00	56,85	60,55	70,00	70,00
2.9.	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	40,70	6,85	7,45	7,90	8,56	9,00	9,00
2.10.	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.11.	Rasio APM perempuan/laki- laki di SD	%	n.a	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04
2.12.	Rasio APM perempuan/laki- laki di SMP	%	1,24 (2017)	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24
2.13.	Rasio APM perempuan/laki- laki di SMA	%	1,03 (2017)	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03
2.14.	Rasio melek huruf Perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun	%	1,02 (2017)	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
2.15.	Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sector nonpertanian	%	24,00	35,75	36,00	36,25	36,45	36,45	36,45
2.16.	Indeks Pembangunan Gender	%	92,00	92,75	92,90	93,00	93,15	93,45	93,45
2.17.	Cakupan penyelenggaraan fungsi pemerintahan	%	n.a	35,71	71,43	57,14	50,00	71,43	71,43

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal RPJMD (2019)	Capaian	Rencana Capaian	Target			Kondisi Akhir RPJMD (2024)
				2020	2021	2022	2023	2024	
	dalam rangka peningkatan kesetaraan gender dan ketahanan keluarga								
2.18.	Cakupan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak	%	0,00	52,50	40,00	50,00	37,50	57,50	57,50
2.19.	Persentase ketersediaan data dan informasi yang valid tentang penyelenggaraan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten	%	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3.	**PANGAN**								
3.1.	Ketersediaan pangan utama	%	82,45	67,36	68,78	70,19	71,64	73,16	73,16
3.2.	Ketersediaan energi dan protein perkapita	Energi per Kpt	3.294	3.400	3.425	3.450	3.475	3.500	3.500
		Protein per Kpt	69,00	69,00	70,00	70,00	71,00	71,00	71,00
3.3.	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	%	48,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3.4.	Angka Ketersediaan Energi	Kalori/Perkapita/Perhari	0,00	3.400,00	3.425,00	3.450,00	3.475,00	3.500,00	3.500,00
3.5.	Ketersediaan Informasi Harga, Pasokan dan Distribusi Pangan	Pak	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3.6.	Tingkat Konsumsi Protein	Gr/Kapita/Hari	0,00	65,00	66,00	67,00	68,00	69,00	69,00
4.	**PERTANAHAN**								
4.1.	Persentase luas lahan bersertifikat	%	0.996	1,10	0,04	0,05	0,06	0,07	0,07
4.2.	Penyelesaian kasus tanah Negara	%	66,66	75,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4.3.	Penyelesaian izin lokasi	%	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5.	**LINGKUNGAN HIDUP**								
5.1.	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota	ada/tidak ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal RPJMD (2019)	Capaian	Rencana Capaian	Target			Kondisi Akhir RPJMD (2024)
				2020	2021	2022	2023	2024	
5.2.	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten	ada/tidak ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
5.3.	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat Kabupaten	ada/tidak ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
5.4.	Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Air		26,65	-	-	-	-	-	-
5.5.	Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Udara		89	-	-	-	-	-	-
5.6.	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	ada/tidak ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
5.7.	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota.	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5.8.	Timbulan sampah yang ditangani	%	67,30	84,50	85,01	85,75	86,35	86,90	86,90
5.9.	Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R	%	23,40	17,05	17,45	17,95	18,35	18,79	18,79
5.10.	Persentase cakupan area pelayanan	%	83,75	87,99	90,19	92,44	94,76	97,13	97,13
5.11.	Persentase jumlah sampah yang tertangani	%	85,84	87,99	90,19	92,44	94,76	97,13	97,129
5.12.	Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota	Nilai	85,00	85,35	85,75	85,80	85,95	86,00	86,00
5.13.	Persentase izin pengelolaan sampah oleh swasta yang diterbitkan	%	Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5.14.	Persentase pengelolaan sampah oleh swasta yang taat terhadap peraturan perundang-undangan	%	NA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5.15.	Cakupan penyelenggaraan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	%	0	50,00	60,00	70,00	80,00	90,00	90,00
6.	**ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**								
6.1.	Rasio Penduduk ber-KTP per satuan penduduk	Rasio	0,94	0,91	0,95	0,98	1,00	1,00	1,00
6.2.	Rasio Penduduk ber-KK	Rasio	0,55	0,65	0,70	0,75	0,80	0,85	0,85
6.3.	Rasio bayi berakte kelahiran	Rasio	0,86	0,85	0,90	0,95	1,00	1,00	1,00

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal RPJMD (2019)	Capaian	Rencana Capaian	Target			Kondisi Akhir RPJMD (2024)
				2020	2021	2022	2023	2024	
6.4.	Rasio pasangan berakte nikah	Rasio	0,23	0,20	0,35	0,45	0,50	0,65	0,65
6.5.	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	ada/tidak ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	Ada
6.6.	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah/ Belum	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah
6.7.	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	%	94,22	85,08	87,20	89,38	91,62	96,50	96,50
6.8.	Cakupan penerbitan akta kelahiran	%	86,22	-					0
6.9.	Cakupan Dokumen Kependudukan yang diunggah ke dalam database	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6.10.	Cakupan Inovasi Pelayanan Pemanfaatan Data	%	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7.	**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**								
7.1.	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	%	97,58	98,04	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7.2.	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	Nilai	100	-	-	-	-	-	-
7.3.	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	Nilai	100	-	-	-	-	-	-
7.4.	Persentase LSM aktif	%	20,34	20,84	21,36	21,89	22,44	23,50	23,50
7.5.	Persentase LPM Berprestasi	%	0,00	-	-	-	-	-	-
7.6.	Persentase PKK aktif	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7.7.	Persentase Posyandu aktif	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7.8.	Jumlah BUMDes Bersama	Jumlah	0	5	6	7	8	9	9
8.	**PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**								
8.1.	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	Nilai	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82
8.2.	Total Fertility Rate (TFR)	Nilai	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96
8.3.	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	%	8,82	8,90	8,93	8,96	8,99	9,00	9,00

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal RPJMD (2019)	Capaian	Rencana Capaian	Target			Kondisi Akhir RPJMD (2024)
				2020	2021	2022	2023	2024	
8.4.	Rata-rata jumlah anak per keluarga	Nilai	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
8.5.	Ratio Akseptor KB	Rasio	75,85	76,75	76,99	77,15	77,45	77,85	77,85
8.6.	Angka Pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49	%	66,18	65,15	65,45	65,78	65,92	65,98	65,98
8.7.	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya di bawah 20 Tahun	%	1,06	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98
8.8.	Cakupan PUS yang ingin ber- KB tidak terpenuhi (unmet need)	%	14,27	15,93	16,33	16,73	17,15	17,35	17,35
8.9.	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	24,50	22,35	22,75	23,05	23,60	23,95	23,95
8.10.	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	%	84,25	86,52	88,68	90,90	93,17	94,00	94,00
8.11.	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	%	61,18	63,15	63,89	64,56	65,15	65,86	65,86
8.12.	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber- KB	%	50,83	51,95	52,35	52,89	53,35	53,90	53,90
8.13.	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	%	37,08	35,98	36,25	36,80	37,05	37,75	37,75
8.14.	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	%	9,09	18,18	27,27	36,36	45,45	54,55	54,55
8.15.	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa	%	154,55	154,55	154,55	154,55	154,55	154,55	154,55
8.16.	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8.17.	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8.18.	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	%	110,08	125,22	125,22	125,22	125,22	125,22	125,22
8.19.	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	%	43,75	44,50	50,15	50,85	60,25	60,98	60,98

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal RPJMD (2019)	Capaian	Rencana Capaian	Target			Kondisi Akhir RPJMD (2024)
				2020	2021	2022	2023	2024	
8.20.	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8.21.	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	%	43,28	44,45	44,45	44,45	44,45	44,45	44,45
9.	**PERHUBUNGAN**								
9.1.	Jumlah arus penumpang angkutan umum	Jumlah	259.201	423.325	433.908	444.755	455.874	455.874	455.874
9.2.	Rasio ijin trayek	Rasio	0,0014	0,59	0,6	0,62	0,63	0,65	0,65
9.3.	Jumlah uji kir angkutan umum	Jumlah	1.926	1.924	1.973	2.022	2.072	2.172	2.172
9.4.	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	Jumlah	1/1/0	1/1/1	1/1/1	1/1/1	1/1/1	1/1/1	1/1/1
9.5.	Persentase layanan angkutan darat	%	21,30	8,54	8,75	8,97	9,19	9,35	9,35
9.6.	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	%	*45,35*	36,49	37,4	38,34	39,30	39,45	39,45
9.7.	Pemasangan Rambu-rambu	%	19,56	20,17	20,67	21,19	21,72	22,35	22,35
9.8.	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	Rasio	0,045	0,0641	0,0657	0,0673	0,0690	0,070	0,070
9.9.	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum	Jumlah	Orang berjumlah 212.582 dan barang berjumlah 167	Orang berujumlah 415.055 dan barang berjumlah 530,60	Orang berujumlah 421300 dan barang berjumlah 575,60	Orang berujumlah 433.0500 dan barang berjumlah 620,60	Orang berujumlah 451.055 dan barang berjumlah 590	Orang berujumlah 451.055 dan barang berjumlah 590	Orang berujumlah 451.055 dan barang berjumlah 590
9.10.	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun	Jumlah	Orang berujumlah 259.783 dan barang berjumlah 449,46	Orang berujumlah 415.055 dan barang berjumlah 530,60	Orang berujumlah 421300 dan barang berjumlah 575,60	Orang berujumlah 433.050 dan barang berjumlah 620,60	Orang berujumlah 440.055 dan barang berjumlah 590	Orang berujumlah 451.055 dan barang berjumlah 590	Orang berujumlah 451.055 dan barang berjumlah 590
9.11.	Pembangunan Sarana & Prasarana Pengamanan & Keselamatan Lalu Lintas	Jumlah	0,00	75,00	78,00	83,00	87,00	90,00	90,00
9.12.	Peningkatan pengembangan sarana dan prasarana transportasi	Jumlah	0,00	80,00	82,00	84,00	86,00	87,00	87,00

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal RPJMD (2019)	Capaian	Rencana Capaian	Target			Kondisi Akhir RPJMD (2024)
				2020	2021	2022	2023	2024	
10.	**KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**								
10.1.	Jumlah Server yang di kelola	Jumlah	7	1	1	1	1	1	1
10.2.	Jumlah Aplikasi Pemerintah yang dikembangkan	Jumlah	4	1	1	1	1	1	1
10.3.	Tersedianya Website Pemerintah Daerah	Tersedia/ Belum	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
10.4.	Persentase Website OPD	%	50,00	41,00	42,00	43,00	44,00	45,00	45,00
11.	**KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**								
11.1.	Persentase koperasi aktif	%	44,60	45,00	46,00	47,25	48,50	50,00	50,00
11.2.	Persentase Usaha Mikro dan Kecil yang dibina	%	30,00	35,88	36,77	37,69	38,63	39,15	39,15
11.3.	Jumlah Usaha Mikro dan Menengah	Jumlah	18.183	18.183	18.183	18.183	18.183	18.183	18.183
11.4.	Persentase Usaha Mikro dan Menengah Aktif	%	30,00	30,35	30,75	30,95	40,25	40,58	40,58
11.5.	Jumlah Produk Asli Daerah Hasil dari UKM	Jumlah	18	20	22	22	22	22	22
12.	**PENANAMAN MODAL**								
12.1.	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Jumlah	13	13	13	14	14	15	15
12.2.	Jumlah nilai investasi berskala nasional PMDN/PMA)	Miliar Rp	16.689.711.214	17,11	17,53	17,97	18,42	18,75	18,75
12.3.	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN	(juta rupiah)	16,88	17,25	17,56	17,89	17,97	18,21	18,21
12.4.	Jenis dan Jumlah Bank dan Cabang	Jumlah	7	7	7	7	7	7	7
12.5.	Jenis dan Jumlah Perusahaan Asuransi	Jumlah	2	2	2	2	2	2	2
12.6.	Jenis, Kelas dan Jumlah Penginapan/Hotel	Jumlah	14	14	14	14	14	14	14
12.7.	Lama Proses Perizinan	hari	1-15	1-15	1-15	1-15	1-15	1-15	1-15
12.8.	Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha	Jumlah	4	4	4	4	4	4	4
12.9.	Jumlah Macam Pajak	Jumlah	7	7	7	7	7	7	7
12.10	Jumlah Macam Retribusi	Jumlah	2	3	3	3	3	3	3
12.11	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	Rasio	25,48	20,75	20,96	21,35	21,78	21,95	21,95

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal RPJMD (2019)	Capaian	Rencana Capaian	Target			Kondisi Akhir RPJMD (2024)
				2020	2021	2022	2023	2024	
12.12	Presentase Indeks Kepuasan Masyarakat	%	91,12	87,35	87,75	87,90	88,15	88,75	88,75
12.13	Jumlah kegiatan promosi dan kerjasama	%	0,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00
12.14	Jumlah kegiatan peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi	Investor	13,00	13,00	13,00	14,00	14,00	15,00	15,00
12.15	Jumlah izin yang dikeluarkan berdasarkan SOP	%	50,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00
12.16	Jumlah pengendalian dan pengawasan perizinan	%	0,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
13.	**KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**								
13.1.	Persentase organisasi pemuda yang aktif	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13.2.	Cakupan pembinaan olahraga	%	3,00	5,13	5,25	5,38	5,52	5,75	5,75
13.3.	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	%	15,00	7,18	7,35	7,54	7,73	7,79	7,79
13.4.	Cakupan pembinaan atlet muda	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13.5.	Jumlah atlet berprestasi	Jumlah	11	11	11	11	12	12	12
13.6.	Jumlah prestasi olahraga	Jumlah	11	11	11	11	12	12	12
13.7.	Jumlah Organisasi Pemuda	Jumlah	30	25	25	25	25	25	25
13.8.	Jumlah Kegiatan Kepemudaan	Jumlah	4	8	9	10	11	12	12
13.9.	Jumlah Kegiatan Olah Raga	Jumlah	2	7	8	9	10	11	11
13.10	Jumlah Organisasi Olah Raga	Jumlah	15	15	15	15	15	15	15
13.11	Persentase Organisasi Olah Raga yang aktif	%	55,00	51,00	52,00	53,00	54,00	55,00	55,00
13.12	Cakupan Wasit yang Bersertifikasi	%	60,00	52,00	54,00	56,00	58,00	60,00	60,00
13.13	Jumlah Cabang Olah Raga Prestasi Setiap Tahun	Jumlah	1	2	3	4	5	6	6
13.14	Jumlah Klub Olah Raga	Jumlah	22	22	22	22	22	22	22
13.15	Jumlah Gedung/Lapangan Olahraga	Jumlah	1/229	1/229	1/229	1/229	1/229	1/229	1/229
13.16	Jumlah atlet yang memenangi kejuaran tingkat nasional dan internasional dalam satu tahun	Jumlah	11	-	-	-	-	-	-
13.17	Cakupan penyelenggaraan pemberdayaan pemuda dan kepramukaan yang dilaksanakan	%	n.a	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal RPJMD (2019)	Capaian	Rencana Capaian	Target			Kondisi Akhir RPJMD (2024)
				2020	2021	2022	2023	2024	
14.	**STATISTIK**								
14.1.	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	ada/tidak ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
14.2.	Buku ”kabupaten dalam angka”	ada/tidak ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
14.3.	Tersedianya Sistem Data dan Statistik yang Terintegrasi	ada/tidak ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
14.4.	Buku ”PDRB”	ada/tidak ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
15.	**PERSANDIAN**								
15.1.	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunkasi Perangkat Daerah	%	17,14	-	-	-	-	-	-
15.2.	Indeks Kematangan Keamanan Informasi (IKKI)	Sangak Kurang/ Kurang/ Cukup/Baik/Sangat Baik	NA	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
16.	**KEBUDAYAAN**								
16.1.	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Kali	8	6	6	6	6	7	31
16.2.	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	buah	7	4	4	4	4	4	4
16.3.	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan Inventarisasi	Karya Budaya	8	-	-	-	-	-	-
16.4.	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	Cagar Budaya	8	4	4	4	4	4	4
17.	**PERPUSTAKAAN**								
17.1.	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	%	4,22	4,75	5,15	5,75	6,04	6,65	6,65
17.2.	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan	Jumlah	49.746	51.250	52.531	53.844	55.190	55.210	55.210

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal RPJMD (2019)	Capaian	Rencana Capaian	Target			Kondisi Akhir RPJMD (2024)
				2020	2021	2022	2023	2024	
	daerah								
17.3.	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	Rasio	0,00146	0,00147	0,00147	0,00147	0,00147	0,00147	0,00147
17.4.	Jumlah rata-rata pengunjung pepustakaan/bulan	Jumlah	2.640	2.706	2.773	2.842	2.914	2.925	2.925
17.5.	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	Jumlah	15.221	15.221	15.345	15.476	15.678	15.713	15.713
17.6.	Jumlah pustakawan, tenaga Teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17.7.	Jumlah Perpustakaan di Desa/kelurahan yang di Kelola	Jumlah	2	111	111	111	111	111	111
17.8.	Jumlah Perpustakaan Desa/Kelurahan yang berprestasi	Jumlah	0	1	2	2	2	2	2
17.9.	Jumlah Armada Perpustakaan Keliling yang dikelola	Jumlah	2	2	2	2	2	2	2
18.	**KEARSIPAN**								
18.1.	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	%	85,12	35,25	35,75	40,00	40,50	50,00	50,00
18.2.	Jumlah SDM Pengelola Kearsipan	Jumlah	4	8	9	10	10	10	10
18.3.	Jumlah Arsip daerah yang dikelola	Jumlah	7	-	-	-	-	-	-
18.4.	Jumlah Sarana Kearsipan Daerah	Jumlah	13	13	13	13	13	13	13
C.	**LAYANAN URUSAN PILIHAN**								
1.	**KELAUTAN DAN PERIKANAN**								
1.1.	Produksi perikanan	ton	644.357,48	684.720,68	701.838,70	719.384,66	737.369,28	775.312,00	775.312,00
1.2.	Konsumsi ikan	%	107,42	106,53	106,53	106,53	106,53	106,53	106,53
1.3.	Cakupan bina kelompok nelayan	%	72,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.4.	Produksi perikanan kelompok nelayan	%	65,00	11,00	12,00	13,00	14,00	15,00	15,00
2.	**PARIWISATA**								

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal RPJMD (2019)	Capaian	Rencana Capaian	Target			Kondisi Akhir RPJMD (2024)
				2020	2021	2022	2023	2024	
2.1.	Kunjungan wisata	Jumlah	2.960	13.206	13.216	13.265	13.315	13.330	13.330
2.2.	Lama kunjungan Wisata	hari	NA	1	1	1	1	1	1
2.3.	PAD sektor pariwisata	%	0,07	0,15	0,16	0,17	0,18	0,19	0,19
2.4.	Jumlah Objek Wisata Pantai yang terdata dan terdaftar	Jumlah	11	10	10	10	10	10	10
2.5.	Jumlah Objek Wisata Alam yang terdata dan terdaftar	Jumlah	27	27	27	27	27	27	27
2.6.	Jumlah Objek Wisata Sejarah yang terdata dan terdaftar	Jumlah	12	12	12	12	12	12	12
2.7.	Jumlah Objek Wisata Budaya yang terdata dan terdaftar	Jumlah	2	2	2	2	2	2	2
2.8.	Jumlah Objek Wisata Seni yang terdata dan terdaftar		3	3	3	3	3	3	3
2.9.	Jumlah Objek Agrowisata yang terdata dan terdaftar	Jumlah	2	2	2	2	2	2	2
2.10.	Jumlah Objek Wisata Buatan yang Terdata dan Terdaftar	Jumlah	2	-	-	-	-	-	-
2.11.	Jumlah Objek Wisata dikelolah dengan sistem bagi hasil pemerintah setempat	Jumlah	3	3	3	3	3	3	3
2.12.	Jumlah Objek Wisata yang dikelola oleh Pemda	Jumlah	1	1	1	1	1	1	1
2.13.	Jumlah Objek wisata yang dikelolah oleh Swasta	Jumlah	3	3	3	3	3	3	3
3.	**PERTANIAN**								
3.1.	Nilai PDRB Sektor Pertanian (palawija)	Rp.Juta	1.085.063,47 (2017)	1.125.325,00	1.130.415,00	1.132.435,00	1.134.115,00	1.150.315,00	1.150.315,00
3.2.	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB sektor pertanian	%	25,51	26,52	26,53	26,54	26,55	26,56	26,56
3.3.	Nilai PDRB Sektor Perkebunan (Tanaman Keras)	Rp.Juta	2.615.266,50	2.620.315,00	2.631.475,00	2.635.435,00	2.641.275,00	2.651.325,00	2.651.325,00
3.4.	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB PDRB sektor pertanian/perkebunan	%	61,49	61,80	62,05	62,40	62,75	63,00	63,00
3.5.	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	ton/ha	58.066	-	-	-	-		0

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal RPJMD (2019)	Capaian	Rencana Capaian	Target			Kondisi Akhir RPJMD (2024)
				2020	2021	2022	2023	2024	
3.6.	Cakupan bina kelompok petani	%	5,75	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6.	**PERDAGANGAN**								
6.1.	Ekspor Bersih Perdagangan	Rupiah	38.611.486,07	-	-	-	-	-	-
6.2.	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	%	NA	-	-	-	-	-	-
7.	**PERINDUSTRIAN**								
7.1.	Pertumbuhan Industri	%	Na	7,10	7,95	8,25	8,89	9,35	9,35
7.2.	Cakupan bina kelompok pengrajin	%	Na	36,00	37,00	38,00	39,00	40,00	40,00
7.3.	Jumlah Kemasan Lokal yang tercipta	Jumlah	Na	20	20	20	20	20	20
8.	**TRANSMIGRASI**								
8.1.	Persentase transmigran swakarsa	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8.2.	Luas Lahan Areal Transmigrasi yang dikelola	Ha	104	125	150	200	225	250	250
8.3.	Luas Areal Lahan Transmigrasi yang disediakan	Ha	254	250	250	250	250	250	250
D.	**PENUNJANG URUSAN**								
1	**PERENCANAAN PEMBANGUNAN**								
1.1.	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	ada/tidak ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
1.2.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	ada/tidak ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
1.3.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	ada/tidak ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
1.4.	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	ada/tidak ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
1.5.	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal RPJMD (2019)	Capaian	Rencana Capaian	Target			Kondisi Akhir RPJMD (2024)
				2020	2021	2022	2023	2024	
1.6.	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.7.	Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan RTRW	%	100,00	-	-	-	-	-	-
2	**KEUANGAN**								
2.1.	Opini BPK terhadap laporan keuangan	Jenis Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2.2.	Persentase SILPA terhadap APBD	%	2,18	-	-	-	-	-	-
2.3.	Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana	%	0,20	-	-	-	-	-	-
2.4.	Persentase belanja pendidikan	%	27,13	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
2.5.	Persentase belanja kesehatan	%	14,71	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
2.6.	Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung	%	45,53/54,47	55,38/44,15	54,90/44,64	54,58/44,98	56,58/42,99	53,74/45,84	53,74/45,84
2.7.	Bagi hasil kabupaten/kota dan desa	%	0,20	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
2.8.	Penetapan APBD	tepat waktu/tidak tepat waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
3	**KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**								
3.1.	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	JP	11.356	17.601,78	18.041,82	18.492,87	18.955,19	19.429,07	19.429,07
3.2.	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	0,54	-	-	-	-	-	-
3.3.	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	%	13,21	13,54	13,88	14,23	14,58	13,21	13,21
3.4.	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	Jumlah	38	40	40	40	40	40	40
3.5.	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	Jumlah	3.071	3.071	3.071	3.071	3.071	3.071	3.071
3.6.	Persentase Penempatan SDM sesuai Kompotensi	%	NA					90,00	90,00

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal RPJMD (2019)	Capaian	Rencana Capaian	Target			Kondisi Akhir RPJMD (2024)
				2020	2021	2022	2023	2024	
4	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**								
4.1.	Persentase implementasi rencana kelitbangan.	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4.2.	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan.	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4.3.	PENERAPAN SIDa :		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4.4.	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4.5.	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah.	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	**PENGAWASAN**								
5.1.	Persentase tindak lanjut temuan BPK	%	94,46	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5.2.	Persentase tindak lanjut temuan BPKP	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5.3.	Persentase tindak lanjut temuan Inspektorat Provinsi	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5.4.	Persentase pelanggaran pegawai yang diproses	%	100,00	-	-	-	-	-	-
5.5.	Jumlah temuan BPK	Jumlah	12	-	-	-	-	-	-
6	**SEKRETARIAT DEWAN**								
6.1.	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat- alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	ada/tidak ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
6.2.	Tersusun dan terintegrasinya Program- Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	ada/tidak ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
6.3.	Terintegrasi program- program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam	ada/tidak ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal RPJMD (2019)	Capaian	Rencana Capaian	Target			Kondisi Akhir RPJMD (2024)
				2020	2021	2022	2023	2024	
	Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD								
7	**SEKRETARIAT DAERAH**								
6.4.	Persentase Penyelesaian Tapal Batas antar Kecamatan	%	60						
6.5.	Jumlah Analisa Berita dan Kebutuhan Publik yang disampaikan kepada kepala daerah	Jumlah	252	-	-	-	-	-	-
6.6.	Jumlah UMKM yang memperoleh akses ke lembaga keuangan	Jumlah	1.067	-	-	-	-	-	-
6.7.	Persentase Potensi Sumber Daya Alam yang telah dimanfaatkan	%	90,00	-	-	-	-	-	-
6.8.	Persentase Paket Tender yang diselesaikan tepat waktu	%	87,21	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6.9.	Persentase Ketersediaan Sistem Informasi Tender	%	100					89,00	89,00
6.10	Persentase Besaran Efesiensi Nilai Kontrak terhadap Nilai Pagu	%	4						
6.11	Persentase Asset Sekretariat yang sudah direkonsiliasi	%	90						
6.12	Nilai LPPD	Nilai	2.975	2.885	2.983	3.126	3.185	3.200	3.200
6.13	Persentase Produk Hukum Daerah yang difasilitasi dalam kurun waktu tahun yang sama	%	100						
6.14	Persentase Pejabat yang menyampaikan LHKPN	%	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6.15	Persentase ketersediaan analisis jabatan	%	100,00						
6.16	Persentase RKA Unit Kerja Lingkup Sekretarist daerah yang diverifikasi	%	100,00						
8	**KECAMATAN**								
6.1.	Jumlah Kecamatan dengan tingkat kepuasan masyarakat atas layanan di atas 80 %	jumlah	NA	22	22	22	22	22	22
6.2.	Tingkat Partisipasi masyarakat dalam kegiatan perencanaan pembangunan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal RPJMD (2019)	Capaian	Rencana Capaian	Target			Kondisi Akhir RPJMD (2024)
				2020	2021	2022	2023	2024	
6.3.	Persentase Konflik yang tertangani di tingkat kecamatan	%	NA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6.4.	Persentase Kecamatan memiliki penurunan angka kemiskinan sesuai target RPJMD	%	NA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

8.2. Indikator Standar Pelayanan Minimal

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai Jenis dan MutuPelayananDasar yangmerupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperolehsetiap WargaNegara secara minimal. SPM ditetapkan melalui Peraturan PemerintahNomor 2 Tahun2018 serta diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan,ketersediaan,keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran.

Mekanisme penerapan SPM tidak lagi ditentukan berdasarkan indikator SPM dan batas waktu pencapaian tetapi mengutamakan penerapan SPM dengan berdasarkan: (i) pengumpulan data secara empiris dengan tetap mengacu secara normatif sesuaistandar teknis; (ii) perhitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar; (iii) penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar; dan (iv) pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar yang kesemuanya itu dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar terdiri atas:

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
6. Sosial.

Penetapan target indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) disajikan padatabel berikut ini.

Tabel 8.4.
Penetapan Indikator Kinerja Stadar Pelayanan Minimal Kabupaten Luwu
Tahun 2019-2024

NO	URUSAN/ JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	SATUAN	REALISASI		TARGET						KONDISI AKHIR RPJMD
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	**PENDIDIKAN**											
1.1.	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi,SMP/MTs)	%	87,79	88,71	100	100	100	100	100	100	100
1.2.	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaiakan pendidikan dasar dan atau menengah yang perpartisipasi dalam pendidikan kesataraan	%	79,86	82,73	100	100	100	100	100	100	100
1.3.	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam	%	32,9	58,58	100	100	100	100	100	100	100
2.	**KESEHATAN**											
2.1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Pelayanan	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	%	88,39	84,96	100	100	100	100	100	100	100
2.2.	Kesehatan Ibu Bersalin Pelayanan	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	%	94,27	89,78	100	100	100	100	100	100	100
2.3.	Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	%	98,87	98,93	100	100	100	100	100	100	100
2.4.	Kesehatan balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2.5.	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	%	88,39	84,96	100	100	100	100	100	100	100
2.6.	Pelayanan kesehatan	Jumlah Warga Negara usia	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100

NO	URUSAN/ JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	SATUAN	REALISASI		TARGET						KONDISI AKHIR RPJMD
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	pada usia produktif	produktif yang mendapatkan layanan kesehatan										
2.7.	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2.8.	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	%	n.a	n.a	100	100	100	100	100	100	100
2.9.	Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus	Jumlah Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	%	n.a	n.a	100	100	100	100	100	100	100
2.10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	%	n.a	n.a	100	100	100	100	100	100	100
2.11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis	Jumlah Warga Negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan	%	n.a	n.a	100	100	100	100	100	100	100
2.12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficency Virus)	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	%	n.a	n.a	100	100	100	100	100	100	100
3.	**PEKRJAAN UMUM**											
3.1.	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3.2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah Domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4.	**PERUMAHAN RAKYAT**											
4.1.	Penyediaan & rehabiitasi rumah yg layak huni bagi	Jumlah Warga Negara korban bencana yang	%	n.a	n.a	100	100	100	100	100	100	100

NO	URUSAN/ JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	SATUAN	REALISASI		TARGET						KONDISI AKHIR RPJMD
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	korban bencana Kab/kota	memperoleh rumah layak huni										
4.2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	%	n.a	n.a	100	100	100	100	100	100	100
5.	**TRANTIBUMLINMAS**											
5.1.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hokum	%	n.a	n.a	100	100	100	100	100	100	100
5.2.	Pelayanan informasi rawan bencana	Perda dan perkada	%	42	47	100	100	100	100	100	100	100
5.3.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	n.a	n.a	100	100	100	100	100	100	100
5.4.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	n.a	22	100	100	100	100	100	100	100
5.5.	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	%	n.a	n.a	100	100	100	100	100	100	100
6.	**SOSIAL**											
6.1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	n.a	n.a	100	100	100	100	100	100	100
6.2.	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	n.a	n.a	100	100	100	100	100	100	100
6.3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang	%	n.a	n.a	100	100	100	100	100	100	100

NO	URUSAN/ JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	SATUAN	REALISASI		TARGET						KONDISI AKHIR RPJMD
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	diluar panti	memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti										
6.4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	%	n.a	100	100	100	100	100	100	100	100
6.5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan social	%	n.a	n.a	100	100	100	100	100	100	100

8.3. Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Suistainable Development Goals* (TPB/SDGs)

Sebagai pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 yang mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk mengintegrasikan (TPB/SDGs) kedalam dokumen perencanaan pembangunan daerah yang merupakan dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global. TPB/SDGs bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan social masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusifdan terlaksananya tatakelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk mensejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan. Upaya pencapaian target TPB/SDGs menjadi prioritas pembangunan nasional, yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan ditingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Terdapat tiga pilar yang menjadi indikator dalam konsep pengembangan SDGs yaitu: (1) indikator yang melekat pembangunan manusia (*human development*), di antaranya pendidikan, kesehatan; (2) Indikator yang melekat pada lingkungan sosial (*social economic development*), seperti ketersediaan sarana dan prasarana lingkungan, serta pertumbuhan ekonomi; dan (3) indikator yang melekat pada lingkungan (*Environmental Development*), berupa ketersediaan sumber daya alam dan kualitas lingkungan yang baik.

Dalam pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Luwu, maka dirumuskanlah target indikator tujuan pembangunan berkelanjutan yang dijabarkan pada tabel berikut.

Tabel 8.5.
Penetapan Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Suistainable DevelopmentGoals* (TPB/SDGs)
Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024

No	Indikator	Satuan	Capaian TPB/SDGs				Target TPB/SDGs			
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	**Tujuan 1 : Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun**									
1.1	Jumlah desa tertinggal	Desa	108,00		95,00	90,00	85,00	80,00	75,00	70,00
1.2	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	%	14,01	13,36						
1.3	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difanilitas		60,00		45,00	41,00	38,00	34,00	32,00	30,00
1.4	Proporsipeserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.									
1.5	Jumlah Penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas	Orang	9.903		18.267	21.007	24.158	27.782	31.949	34.994
1.6	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan		93,57	89,9						
1.7	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin		76,06		30,00	36,00	43,20	51,84	62,21	65,00
1.8	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/sederajat									
1.9	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran	%	55,26		8,00	8,48	8,99	9,53	10,10	11,00
1.10	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran	%	55,26		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.11	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umum	%	6,00		8,00	8,40	8,82	9,26	9,72	11,00
1.12	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN	%	21,43		65,00	70,85	77,23	84,18	91,75	100,00
2	**Tujuan 2 : Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan**									
2.1	Prevalensi anemia pada ibu hamil		28,60		25,00	22,50	20,25	18,23	16,40	15,00
2.2	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif	%	74,50		80,10	82,50	84,98	87,53	90,15	91,29
2.3	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat		87,8							

No	Indikator	Satuan	Capaian TPB/SDGs				Target TPB/SDGs			
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	konsumsi ikan									
3	**Tujuan 3 : Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia**									
3.1	Angka Kematian Ibu (AKI)		106,08 per 100.000 penduduk							
3.2	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih		93,57	89,9						
3.3	Angka kematian balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup		1;80	1;92	0,09	0,08	0,07	0,06	0,05	0,04
3.4	Angka kematian neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup		1;140	1;132	6,00	5,10	4,34	3,68	3,13	2,00
3.5	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran Hidup		0,0113 per kelahiran bayi	0,0107 per kelahiran bayi						
3.6	Prevalensi HIV pada populasi dewasa		0,009 dari total populiasi	0,005 dari total populasi						
3.7	Insiden tuberkulosis (ITB) per 100.000 pernduduk		174,00		150,00	144,00	138,00	132,00	127,00	125,00
3.8	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terbaikan (Filariasis dan Kusta)	Orang	29,00		20,00	19,00	18,00	17,00	16,00	15,00
3.9	Persentase merokok pada penduduk umur <18 tahun	%	5,90		5,00	4,85	4,70	4,56	4,43	4,00
3.10	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir	Kasus	4,00		2,50	2,00	2,00	2,00	2,00	1,00
3.11	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan		85,00		77,00	75,46	73,95	72,47	71,02	70,00
3.12	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin		76,06 tingkat keberlangsungan	84,36 tingkat keberlangsungan						
3.13	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern	%	13,00		19,00	19,95	20,95	21,99	23,09	23,50
3.14	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk		100	100						
3.15	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan		1:7.580	1:7.484						

No	Indikator	Satuan	Capaian TPB/SDGs				Target TPB/SDGs			
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
4	**Tujuan 4 : Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua**									
4.1	Persentase SD/MI berkareditasi minimal B	%	61,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4.2	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B	%	51,00		86,10	92,99	100,00	100,00	100,00	100,00
4.3	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Sederajat	%	86,60		68,00	70,04	72,14	74,31	76,53	80,00
4.4	Angka partisipasikasar (APK) SD/MI/Sederajat	%	102,39		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4.5	Angka partisipasi kasar (APK) SMP/Mts/sederajat	%	96,50		99,00	100,00	100,00	100,00	100,00	110,00
4.6	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/ MA/ sederajat		96,5							
4.7	Rata-rata lama sekolah penduduk umur 15 tahun									
4.8	Jumlah remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TiIK)	Orang	3697,00		4000,00	4080,00	4161,00	4244,00	4329,00	4500,00
4.9	Rasio angka partisipasi murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/Sederajat; (2) SMP/Mts/sederajat; (3) SMA/SMK/MA/sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) perguruan tinggi	%	95,51 SD/Sederajat 80,07 SMP/Sederajat		29,00	33,35	38,35	44,11	50,72	52,00
4.10	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun		98,78%	98,80%						
5	**Tujuan 5 : Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan**									
5.1	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (age Specific Fertility rate/ASFR)		472,00		300,00	225,00	180,00	144,00	115,20	100,00
5.2	Indikator total Fertility rate (TFR)		2,00		2,29	2,22	2,15	2,09	2,03	1,90
5.3	Korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif	%	100		45,00	48,60	52,49	56,69	61,22	70,00
5.4	Proporsiperempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir	%	32,30		15,00	10,00	7,00	5,00	3,00	2,00
5.5	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	%	8,57		35,00	36,75	38,59	40,52	42,54	45,00
5.6	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)		8,57 tingkat DPRD Kabupaten	8,57 tingkat DPRD Kabupaten						

No	Indikator	Satuan	Capaian TPB/SDGs				Target TPB/SDGs			
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
6	**Tujuan 6 : Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan**									
6.1	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan	%	75,45		92,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6.2	Persentase umah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan	%	95,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7	**Tujuan 7 : Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua**									
7.1	Rasio elektrifikasi									
8	**Tujuan 8 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua**									
8.1	Laju pertumbuhan PDB per kapita		6.79 PDRB/Kapita							
8.2	PDB per kapita		36603 PDRB/Kapita							
8.3	Persentase tenaga kerja formal	%	64,69%total pekerja seluruh jenis pekerjaan	64,89%total pekerja seluruh jenis pekerjaan	41,00	43,46	46,07	48,83	51,76	52,00
8.4	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur		4,784 dari total	3,892 dari total						
8.5	Jumlah wisatawan mancanegara		224 Skala Kabuapten	311 Skala Kabuapten						
8.6	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara		12.477	12.573						
9	**Tujuan 9 : Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi**									
9.1	Jumlah pelabuhan strategis		1	1						
10	**Tujuan 10 : Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antarnegara**									
10.1	Koefisien Gini		0,3593	0,362						
10.2	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur		14,01%	13,36%						

No	Indikator	Satuan	Capaian TPB/SDGs				Target TPB/SDGs			
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
11	**Tujuan 11 : Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan**									
11.1	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang		5 Angin Putting Beliung 25 Longsor9 63 Banjir							
11.2	Persentase sampah perkotaan yang tertangani		83,75							
12	**Tujuan 12 : Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan**									
12.1	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang		83,75							
13	**Tujuan 13 : Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya**									
13.1	Dokumen strategi penguranganrisiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah									
13.2	Dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK)									
14	**Tujuan 14 : Melestarikan dan Memanfaatkan secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera untuk Pembangunan Berkelanjutan**									
14.1	Jumlah nelayan yang terlindungi									
15	**Tujuan 15 : Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari,Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati**									
15.1	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan									
15.2	Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan									
15.3	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati									
16	**Tujuan 16 : Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatandan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan**									
16.1	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota)		81,94							
16.2	Persentase penggunaan E- procurement terhadap belanja pengadaan		100	100						
17	**Tujuan 17 : Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan**									
17.1	Jumlah metdata kegiatan statistik dasar, sektoral dan khusus yang terdapat dalam sistem informasi rujukan statistik	Unit	30,00		35,00	36,00	37,00	38,00	39,00	40,00

BAB IX
PENUTUP

9.1. Pedoman Transisi

Pedoman transisi disusun untuk menjembatani kekosongan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah pada tahun akhir masa jabatan Bupati/Wakil Bupati Luwu periode 2019-2024. Kerangka pendanaan jangka menengah yang ditetapkan pada Perubahan RPJMD ini adalah sampai dengan tahun 2024 dan tahun pertama RPJMD periode berikutnya adalah tahun 2025. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan daerah, apabila Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Luwu periode berikutnya dilaksanakan pada tahun 2024, maka RKPD Tahun 2025 (masa transisi) yang disusun pada tahun 2024, berpedoman pada sasaran pokok dan arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Luwu Tahun 2005-2025.

Program-program pada masa transisi ini diarahkan pada pencapaian target kinerja yang belum tercapai selama periode perencanaan sebelumnya berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi. Program-program dimaksud bersifat tahunan atau tidak *multiyear* sehingga hasil dan dampaknya dapat dievaluasi pada akhir tahun perencanaan.

9.2. Kaidah Pelaksanaan

Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu tahun 2019-2024 ditetapkan dengan Peraturan Daerah, dengan kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah tentang Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 dipublikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan, serta menjadi acuan bagi pemerintahan daerah Kabupaten Luwu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing.
2. Setiap Perangkat Daerah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu berkewajiban menyusun Perubahan Renstra-PD Tahun 2019-2024 yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing dengan berpedoman pada Perubahan RPJMD ini. Renstra-PD selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Renja-PD. Setiap perangkat daerah harus memastikan konsistensi antara RPJMD dengan Renstra dan Renja Perangkat Daerah pada setiap periode perencanaan.
3. Mengingat RPJMD merupakan dokumen perencanaan jangka menengah daerah lima tahunan, maka dokumen ini harus dijabarkan setiap tahun ke dalam RKPD yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan KUA-PPAS dan R-APBD.

4. Bupati/Wakil Bupati Luwu periode 2019-2024 merupakan penanggung jawab pelaksanaan Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024.
5. Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan RPJMD, Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah (BAPPELITBANGDA) Kabupaten Luwu berkewajiban mengkoordinasikan penyelarasan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 dengan Renstra-PD Tahun 2019-2024 dan penjabaran RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 ke dalam RKPD selama periode RPJMD.
6. Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019- 2024 dilakukan setiap tahun berdasarkan hasil evaluasi RKPD dan pada akhir periode RPJMD oleh Bupati/Wakil Bupati yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh BAPPELITBANGDA untuk keseluruhan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah dan oleh Kepala Perangkat Daerah untuk pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah.
7. Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 harus dilaksanakan oleh seluruh stakeholders secara sungguh-sungguh, konsisten, disiplin, dan bertanggungjawab. RPJMD ini juga menjadi arahan bagi seluruh pelaku pembangunan daerah untuk turut terlibat dan berpartisipasi dalam pembangunan daerah.

BUPATI LUWU,

BASMIN MATTAYANG